RENCANA KERJA AKHIR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dapat disusun sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang hendak dicapai dalam tahun 2024 dengan mempertimbangkan capaian pembangunan pendidikan hingga saat ini. Disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini berdasarkan pada Peraturan Bupati Tabalong yang merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan harapan masyarakat Kabupaten Tabalong yaitu masyarakat yang mandiri melalui penigkatan kualitas sumber daya manusia khususnya melalui bidang pendidikan dan dilaksanakan dengan memperhatikan Visi Kementerian Penedidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 yaitu ***Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong*** melalui **Misi** : 1) Mewujudkan pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat, 2) Mewujudkan akses yang meluas, Merata dan Berkeadilan, 3) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu, 4) Mewujudkan pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa, dan 5) Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahunan ini sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang tidak akan dapat diwujudkan dengan baik tanpa didukung dengan perencanaan yang matang, ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, serta para pemangku kepentingan pendidikan dalam menyusun perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan bidang pendidikan secara sinergis dan berkesinambungan.

Akhirnya kami jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak, demi suksesnya seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahunan ini. Semoga niat yang mulia ini mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.

Tanjung, 15 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tabalong,

Drs. Tonie Marwan, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19660307 199412 1 006

DAFTAR ISI

		Hal
Halaman Judul		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
Daftar Tabel		iv
BAB. I	PENDAHULUAN	
I.1.	Latar Belakang	1
I.2.	Landasan Hukum	1
I.3.	Maksud dan Tujuan	3
I.4.	Sistematika Penulisan	4
BAB. II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
II.1.	Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah	9
II.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
II.3.	Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.	22
II.4.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
II.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	47
BAB. III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	88
III.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	88
III.2.	Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah	90
III.3.	Program dan Kegiatan	91
BAB. IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	94
BAB. V	PENUTUP	118

DAFTAR TABEL

No.			Hal
1.	Tabel.2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)*	9
2.	Tabel.2.2.	Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	14
3.	Tabel.2.3.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun 2024	/23
4.	Tebel.2.4.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan (Musrenbang) Tahun 2024	48
5.	Tabel.4.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	95

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 21 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama satu tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dimana dalam penyusunannya melibatkan partisipasi dari stakeholder untuk mengakomodir saran dan masukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang akan dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun rencana 2024

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 16 ayat (2), proses penyusunan rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilaksanakan setelah melalui tahapan persiapan penyusunan dan penyusunan rancangan awal, untuk kemudian dilaksanakan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, serta perumusan rancangan akhir sebelum dilaksanakan penetapan Renja.

Pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 ini, telah melalui beberapa proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) adalah :

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong.Dengan mengubah Undang – Undang No.27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang – undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN):
c. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2005 – 2025:
i. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2019 - 2024:
j. Peraturan Bupati Tabalong Nomor. 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Tabalong;
k. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 ini adalah untuk memberikan arah kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Dimana dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan salah satu fungsi yaitu penyusunan rencana kerja yang mencakup seluruh susunan organisasi yang ada di dalamnya, terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD)
e. Bidang Pembinaan Sekolah Memenengah Pertama (SMP)
f. Bidang Pembinaan Ketenagaan
g. Bidang Kebudayaan
h. SKB
i. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah ini adalah untuk mempertajam program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong selama tahun 2024 dan alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah, Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUNAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun lalu adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Tahun 2019 – 2024. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, pada tahun 2023 melaksanakan 5 (lima) program yang dilaksanakan melalui 15 (Lima Belas) kegiatan. Dari 15 (Lima Belas) kegiatan tersebut ada 14 (empat belas) kegiatan yang memenuhi target kinerja, 1 (satu) kegiatan diantaranya tidak memenuhi target kinerja, secara rinci diuraikan sebagai berikut :

A. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dapat mencapai target sebesar 0,00 % dari target yang ditetapkan hal ini disebabkan dana untuk kegiatan tersebut menggunakan dana di kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
2. Program Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan kegiatan Pelestarian dan aktualisasi tradisi dan adat budaya daerah

dengan target 10 Cagar Budaya hanya terealisasi 9 Cagar Budaya atau 90 %, karena untuk menambah cagar budaya ternyata melalui proses yang panjang.

B. Realisasi Program/ Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja :

1. Program Pengelolaan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran mencapai target sebesar 100 %
2. Program Pengelolaan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Rapat-rapat koordinasi target sebesar 100 %
3. Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan Penigkatan kualitas kelembagaan PAUD dengan target sebesar 100 %
4. Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana PAUD dengan target sebesar 100 %
5. Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan Pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD dengan target sebesar 100 %
6. Program Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Kepemudaan dengan kegiatan Pengelolaan dan pengembangan pelestarian situs cagar budaya target sebesar 100 %
7. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan kegiatan Pelaksanaan kurikulum dan penilaian mencapai target sebesar 100 %
8. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan kegiatan Peningkatan kualitas kelembagaan Sekolah Dasar mencapai target sebesar 100 %
9. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar mencapai target sebesar 100 %

10. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar mencapai target sebesar 100 %
11. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan kegiatan Peningkatan kualitas dan karakter peserta didik Sekolah Dasar mencapai target sebesar 100 %
12. Program Peningkatam Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan kegiatan Pembinaan KKG Pendidikan Dasar dan Kompetensi Pendidik dengan capaian 100%
13. Program Peningkatam Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan kegiatan Pengembangan mutu dan kualitasa program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan capaian 100%
14. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan kegiatan Pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan capaian 100%,
15. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan capaian 100%, ,
16. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan capaian 100%,
17. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Menengah Pertama (SMP) dengan capaian 100%,
18. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan kegiatan Peningkatan kualitas dan Karakter Peserta Didik.

C. Realisasi Program/ Kegiatan yang melebihi Target Kinerja :

1. Program Pengelolaan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja dan perkantoran

dengan target kinerja 7 item realisasi mencapai 16 item karena ada penambahan anggaran perubahan atau sebesar 228,57%.

2. Program Pengelolaan Administrasi Perkantoran Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja dan perkantoran dengan target kinerja 9 item realisasi mencapai 12 item karena ada penambahan anggaran perubahan atau sebesar 133,33%.

D. Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya Target Kinerja :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dapat mencapai target sebesar 0,00 % dari target yang ditetapkan hal ini disebabkan dana untuk kegiatan tersebut menggunakan dana di kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
2. Program Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan kegiatan Pelestarian dan aktualisasi tradisi dan adat budaya daerah dengan target 10 Cagar Budaya hanya terealisasi 9 Cagar Budaya atau 90 %, karena untuk menambah cagar budaya ternyata melalui proses yang panjang.

Untuk lebih jelasnya Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra

Dinas Pendidikan dan Kebudyaan Kabupaten Tabalong s/d Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2023			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I	**Program Pengelolaan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**	**A**	-	**BB**	**BB**	**100%**	-	-	-
1	**Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**88,50**	-	**88,25**	***88,81***	**100,63**	-	-	-
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja dan perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengpakan kerja perkantoran	100,00	-	7	16 item	228,57	-	-	-

3	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja dan perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengpakan kerja perkantoran	9,00	-	9	12 Item	133,33	-	-	-
4	Rapat-rapat koordinaasi	Waktu pelakasanaan Rapat - rapat koordinasi	12,00	-	100	100	100%	-	-	-
5	Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	Jumlah dokumen	7,00		0	0	0%			
II	**Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini**	**APK PAUD**	**97,50**	-	97,10	98,52	101,46	-	-	-
6	Peningkatan kualitas kelembagaan PAUD	Jumlah APE PAUD	20,00	-	14	14	100%	-	-	-
7	Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD	1. Jumlah gedung baru, 2. Jumlah ruang kelas baru, 3. Jumlah pengadaan mebeler	100,00	-	100	100	100%	-	-	-
8	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD	Jumlah Rehab Gedung APUD	100,00	-	18.18%	0,00	0%	-	-	-
9	Pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD	Jumlah Pendidik PAUD Yang Melaksanakan Kurikulum dan Penilaian	100,00	-	100	100	100%	-	-	-
10	Peningkatan Kualitas dan Karakter Peserta Didik PAUD.	Jumlah Anak PAUD Pserta Hari Anak Nasional (HAN)	100,00	-	100	0,00	0,00	-	-	-
III	**Program Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan**	**Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan.**	**10 Cagar Budaya**	-	**10 Cagar Budaya**	***9 Cagar Budaya***	**90,00%**	-	-	-

11	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian situs cagar budaya	Jumlah Cagar Budaya Yang dilestarikan dan Kampung Budaya Yanag di Bangun	5	-	3	3	**100%**	-	-	-
12	Pelestarian dan aktualisasi tradisi dan adat budaya daerah.	Jumlah Kegiatan Even Pembinaan Tradisi dan Kepercayaan Yang di Lestarikan.	5	-	10	10	**100%**	-	-	-
IV	**Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.**	**1. APK SD/Paket A, 2. APM SD/Paket A**	**100 % - 100 %**	-	**106,00 % - 99,95**	***102,41% - 98,45%***	**96,61 % - 98,47 %**	-	-	-
13	Pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar (SD)	Jumlah Kegiatan Yang di Laksanakan	4,00	-	4	4	100%	-	-	-
14	Peningkatan kualitas kelembagaan Sekolah Dasar (SD)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	6,00	-	5	5	100%	-	-	-
15	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (SD)	Tersedianya sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar yang di Bangun/tersedia	102,00	-	23,94	23,94	100%	-	-	-
16	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (SD)	Jumlah Sekolah Dasar (SD) yang terpelihara	27,00	-	*4,23*	*4,23*	100%	-	-	-
17	Peningkatan Kualitas dan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar (SD)	Jumlah Sekolah Dasar (SD) yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Karakter Peserta Didik Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	221,00	-	2	2	100%	-	-	-
V	**Program Penigkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**1 Jumlah Pendidik yang berkualifikasi S1/D.IV, 2. Jumlah Pendidik yang bersetifikat pendidik.**	**100,00**	-	**87,72 % dan 61,73,%**	**84,00 dan 42,97**	**95,76 dan 69,61**	-	-	-

18	Verivikasi dan Validasi sertifikasi Pendidik.	Persentasi Ketersediaan Data Yang Valid Aneka Tunjangan	100,00	-	10,00	8,00	***80,00***	-	-	-
19	Pengembangan Sistem kesejahteraan,penghargaan dan perlindungan	Persentasi kegiatan pengembangan sistem kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan	100,00	-	100	98,18	***98,18***	-	-	-
20	Pembinaan KKG Pendidikan dasar dan kompetensi pendidik.	Jumlah kegiatan pembinaan KKG Pendidikan Dasar dan Kompetensi Pendidik.	40,00	-	34	34	***100,00***	-	-	-
21	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.	Persentasi Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100,00	-	40%	40%	***100,00***	-	-	-
VI	**Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah (SMP)**	**1. APK SMP/Paket B, 2. APM SMP/Paket B**	**100 % - 98,60%**	-	**111,32 % dan 98,59 %**	**104,17 % - 85,37 %**	**93,57 % - 86,59 %**	-	-	-
22	Pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1. Kegiatan POLRI Peduli Pendidikaan 2. Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Ujian Nasional 3. Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Sosialisasi/ Workshop/Bintek/Penyuluhan.	100,00	-	5	5	100,00	-	-	-
23	Peningkatan kualitas kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah Kegiatan Penyediaan Dana BOSDA/BOMM dan Penyelenggaraan BOS	100,00	-	100%	100%	100,00	-	-	-

24	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pengadaan Sarana Penunjang Pendidikan.	100,00	-	***100%***	***100%***	***100,00***	-	-	-
25	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Pendidikan	100,00	-	100%	100%	100,00	-	-	-
26	Peningkatan Kualitas dan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah Perlombaan Guna Meningkatkan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SMP	100,00	-	100%	100%	100,00	-	-	-
VI	**Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal dan Informal.**	***Persentasi jumlah penduduk yang melek huruf (AMH)***	99,54%	-	***99,45%***	***99,50%***	***100,05***	-	-	-
27	Penyelenggaraan paket A setara SD	Jumlah Warga Belajar Yang Mengikuti Paket A Setara SD.	160	-	160	43	26,87	-	-	-
28	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Jumlah Warga Belajar Yang Mengikuti Paket B Setara SMP.	500	-	360,00	398	110,55	-	-	-
29	Penyelenggaraan paket C setara SMA	Jumlah Warga Belajar Yang Mengikuti Paket C Setara SMA.	600	-	500,00	1.339	267,8	-	-	-
30	Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (HAI)	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Hari Aksara Internasional (HAI)	50	-	0	0	0,00	-	-	-
31	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Jumlah Peserta Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)	30	-	40	40	100,00	-	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun yang lalu dapat disimpulkan analisa kinerja yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong secara komulatif telah berhasil usaha dalam mencapai target yang diharapkan namun diperlukan usaha-usaha akseleratif untuk mencapai target secara akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Tabel : 2.2.

Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian					Proyeksi				Catatan Analisis
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	15	16	17
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Formal	v	-	-	94,67	96,80	97,00	97,10	97,50	96,79	114,37	99,36	98,52	97,00	97,10	97,10	97,50	
2	Persentasi lembaga PAUD yang terakreditasi A	-	v	-	2	1,75	2,50	3,16	3,96	1,40	2,54	2,77	2,70	2,50	3,16	3,16	3,96	

3	Persentasi Lembaga PNF yang terakreditasi	-	v	-	15,36	6,67	13,33	20,00	26,67	-	-	-	-	13,33	20,00	20,00	26,67	
4	Persentasi sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik	-	v	-	77,83	89,80	89,90	90,00	90,10	89,70	71,93	99,08	90,00	89,90	90,00	90,00	90,10	
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	v	v	-	109,68	106,10	106,20	106,22	106,23	105,99	107,44	110,54	102,41	106,20	106,22	106,22	106,23	
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	v	v	-	98,96	99,83	99,90	99,95	100	99,80	99,93	105,75	98,45	99,90	99,95	99,95	100	
7	Persentasi sekolah dasar yang terakreditasi A	v	v	-	18,09	11,91	11,95	11,96	11,97	11,89	10,45	9,95	10,86	11,95	11,96	11,96	11,97	

8	Persentasi angka melanjutkan pada satuan pendidikan dasar	-	v	-	95,88	90,32	92,48	92,58	92,60	90,28	95,25	77,72	99,49	92,48	92,58	92,58	92,60	
9	Persentasi angka kelulusan (AL) SD/MI/Paket A	-	v	-	99,75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentasi angka putus sekolah satuan pendidikan sekolah dasar	-	v	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,35	0,11	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	
11	Persentasi sarana dan prasarana SD dalam kondisi baik	-	v	-	44,54	58,41	60,50	62,60	64,67	58,40	58,45	68,97	68,97	60,50	62,60	62,60	64,67	
12	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket C	v	-	-	97,02	111.25	111.29	111.32	111.36	111,22	100	100	104,17	111.29	111.32	111.32	111.36	

13	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	v	-	-	98,96	98.57	98.58	98.59	98.6	98,56	98,58	104,26	85,37	98.58	98.59	98.59	98.6	
14	Persentasi satuan sekolah menengah pertama yang terakreditasi A	-	v	-	69,23	33.9	37.29	40.68	44.07	30,00	32,00	26,23	24,59	37.29	40.68	40.68	44.07	
15	Persentasi angka melanjutkan pada satuan sekolah menengah pertama	-	v	-	99,56	90,32	92,48	92,58	92,60	100	96,64	100	94,79	92,48	92,58	92,58	92,60	
16	Persentasi angka kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B	-	v	-	99,5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

17	Persentasi angka putus sekolah satuan pendidikan menengah pertama	-	v	-	0,12	0,12	0,10	0,10	0,08	0,39	0,29	0,38	0,21	0,10	0,10	0,10	0,08	
18	Persentasi sarana dan prasarana SMP dalam kondisi baik	-	v	-	45,65	46,44	49,493	52,493	55,493	43,30	44,40	96,18	96,18	3,053	6,053	52,493	55,493	
19	Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan.	-	v	-	9	9	9	9	10	9	9	9	9	9	9	9	10	
20	Jumlah penyelenggaraan even tradisi dan adat budaya daerah.	-	v	-	3	5	5	7	9	3	5	5	5	5	7	7	9	
21	Jumlah penyelenggaraan festival kesenian dan kebudayaan daerah.	-	v	-	3	3	5	7	9	3	5	5	5	5	7	7	9	

22	Persentasi PTK PAUD Formal yang memiliki kualifikai S1/A.IV.	-	v	-	73,43	68,41	73,26	78,10	82,95	53,08	53,81%	75,98	68,35	73,26	78,10	78,10	82,95	
23	Persentasi PTK PAUD Formal yang memiliki Sertifikat Pendidik;	-	v	-	42,46	13,57	15,50	25,50	60,79	13,08	13,08	18,63	20,83	15,50	25,50	25,50	60,79	
24	Persentasi PTK Sekolah Dasar (SD) yang memiliki kualifikai S1/A.IV.	-	v	-	87	94,22	94,70	97,18	99,65	94,18	94,18	92,70	92,39	94,70	97,18	97,18	99,65	
25	Persentasi PTK Sekolah Dasar (SD) yang memiliki Sertifikat pendidik;	-	v	-	53,91	53,11	53,12	53,14	54,00	53,10	53,10	48,94	47,53	53,12	53,14	53,14	54,00	

26	Persentasi PTK SMP/MTs yang memiliki kualifikai S1/A.IV.	-	v	-	92,46	97,87	97,87	98,93	100,00	96,80	93,20	95,29	94,53	97,87	98,93	98,93	100,00	
27	Persentasi PTK SMP/MTs yang memiliki Sertifikat Pendidik;	-	v	-	61,27	57,16	60,71	66,38	70,22	51,62	51,62	51,84	48,08	60,71	66,38	66,38	70,22	
28	Persentasi Tenaga Pamong yang memiliki kualifikai S1/A.IV. (Dikmas)	-	v	-	25,02	88,17	90,32	92,47	94,62	-	-	10	10	90,32	92,47	92,47	94,62	
29	Persentasi Tenaga Pamong yang memiliki kompetensi (Dikmas)	-	v	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

30	Persentasi penduduk yang berusia ≥15 tahun angka melek huruf (tidak buta aksara)	v	-	-	99,45	99,51	99,52	99,53	99,54	99,5	99,52	99,53	99,53	99,52	99,53	99,53	99,54	
31	Indek kepuasan masyarakat (IKM)	-	v	-	83,76	88,00	88,10	88,25	88,50	87,88	84,38	85,58	88,81	88,10	88,25	88,25	88,50	
32	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP pada sekretariat	-	v	-	BB	BB	BB	BB	A	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (SKPD)

Isu – isu yang dapat ditarik dari permasalahan- permaslahan yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong sampai saat ini sebagai berikut :

1) Belum optimalnya pembinaan pendidikan PAUD;
2) Belum optimalnya pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah;
3) Belum optimalnya pembinaan pendidikan sekolah dasar;
4) Belum optimalnya pembinaan sekolah menengah pertama;
5) Belum optimalnya tingkat kualifikasi Pendidik dan tenaga kependidikn;
6) Belum optimalnya kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikn;
7) Belum optimalnya pelayanan pendidikan kesetaraan;

Dari potensi dan permasalahan yang ada, maka isu strategis penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tabalong adalah :

"Mengoptimalkan layanan, akses dan kualitas Pendidikan"

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Tabel : 2.3
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Dinas Pendidikan Tahun 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kabupaten Tabalong**	**Nilai AKIP**	**BB**	**362,258,730,181**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kabupaten Tabalong**	**Nilai AKIP**	**BB**	**362,258,730,181**	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	100%	12,231,839	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	100%	12,231,839	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan.	7 Dokumen	12,231,839	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan.	7 Dokumen	12,231,839	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKM	88,10	358,783,877,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKM	88,10	358,783,877,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gajih dan Tunjangan yang dibayar	14 Bulan	358,783,877,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gajih dan Tunjangan yang dibayar	14 Bulan	358,783,877,000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				84,490,356	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				84,490,356	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				84,490,356	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				84,490,356	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKM	88,10	199,957,200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKM	88,10	199,957,200	
4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Tahun	81,504,800	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Tahun	81,504,800	
4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Tabalong	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	1 Tahun	12,236,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Tabalong	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	1 Tahun	12,236,000	
4.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Tabalong	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	538 Orang	106,216,400	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Tabalong	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		106,216,400	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Tabalong	IKM	88,10	1,307,877,726	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Tabalong	IKM	88,10	1,307,877,726	
5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Tabalong	Jumlah ATK di lingkungan Kantor yang dibeli	100%	344,128,879	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Tabalong	Jumlah ATK di lingkungan Kantor yang dibeli	100%	344,128,879	
5.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Barang Cetakan Kantor yang tersedia	12 Bulan	28,958,847	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Barang Cetakan Kantor yang tersedia	12 Bulan	28,958,847	
5.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	934,790,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	934,790,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tabalong	IKM	88,10	1,426,620,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tabalong	IKM	88,10	1,426,620,000	
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Pendidikan	Terbayarnya rekening listrik, air dan komunikasi 12 Bulan	207,440,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Pendidikan	Terbayarnya rekening listrik, air dan komunikasi 12 Bulan	207,440,000	
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibayar	14 Bulan	1,219,180,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibayar	14 Bulan	1,219,180,000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tabalong	IKM	88,10	443,676,060	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tabalong	IKM	88,10	443,676,060	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	4 Mobil, 35 Sepeda Motor	178,390,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	4 Mobil, 35 Sepeda Motor	178,390,000	
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tabalong	Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	46,930,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tabalong	Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	46,930,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
7,3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	12 Bulan	218,356,060	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	12 Bulan	218,356,060	
II.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				**119,900,001,582**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				**119,900,001,582**	
II.A	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Kabupaten Tabalong**	**APK dan APM SD**	**106,20,- dan 99,90**	**61,627,905,508**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Kabupaten Tabalong**	**APK dan APM SD**	**106,20,- dan 99,90**	**61,627,905,508**	
1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Tabalong, Haruai, Kembang Kuning	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 Ruang	681,120,000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Tabalong, Haruai, Kembang Kuning	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 Ruang	681,120,000	
		Kab. Tabalong, Muara Uya, Lumbang					Kab. Tabalong, Muara Uya, Lumbang				
2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Tabalong, Muara Uya, Uwie	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (DAK Fisik)	1 Unit	371,150,000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Tabalong, Muara Uya, Uwie	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (DAK Fisik)	1 Unit	371,150,000	
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Tabalong, Haruai, Seradang	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah (APBD)	3 Unit	1,005,951,500	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Tabalong, Haruai, Seradang	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah (APBD)	3 Unit	1,005,951,500	
		Kab. Tabalong, Tanjung, Jangkung	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah (DAK)				Kab. Tabalong, Tanjung, Jangkung	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah (DAK)			

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Kab. Tabalong, Muara Uya, Uwie	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah (DAK)				Kab. Tabalong, Muara Uya, Uwie	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah (DAK)			
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Pembangunan sarana dan prasarana sekolah dasar	13 Sekolah	3,124,668,803	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Pembangunan sarana dan prasarana sekolah dasar	13 Sekolah	3,124,668,803	
5	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Tabalong, Bintang Ara, Bumi Makmur	Terpenuhinya Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	1 Unit	340,425,000	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Tabalong, Bintang Ara, Bumi Makmur	Terpenuhinya Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	1 Unit	340,425,000	
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Tabalong, Tanjung, Juai	Terlaksananya rehab ruang Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Ruang	233,500,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Tabalong, Tanjung, Juai	Terlaksananya rehab ruang Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Ruang	233,500,000	
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Tabalong, Bintang Ara, Panaan-Kuwari	Terlaksananya rehab Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	1 Unit	240,450,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Tabalong, Bintang Ara, Panaan-Kuwari	Terlaksananya rehab Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	1 Unit	240,450,000	
8	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Tabalong, 8 (delapan) Kecamatan	Tercukupinya perlengkapan belajar mengajar di sekolah	1 Kegiatan (957 Paket)	2,182,560,730	Pengadaan Mebel Sekolah		Tercukupinya perlengkapan belajar mengajar di sekolah	1 Kegiatan (957 Paket)	2,182,560,730	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan	Terpenuhinya pengadaan laptop untuk operator dapodik sekolah dasar	1 Kegiatan (126 Paket)	1,419,180,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Terpenuhinya pengadaan laptop untuk operator dapodik sekolah dasar	1 Kegiatan (126 Paket)	1,419,180,000	
10	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya kualitas dan karakter peserta didik pendidikan Sekolah Dasar	100%	793,583,329	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya kualitas dan karakter peserta didik pendidikan Sekolah Dasar	100%	793,583,329	
11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Berkembangnya Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	863 orang	1,075,022,018	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Berkembangnya Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	863 orang	1,075,022,018	
12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya kualiltas kelembagaan pendidikan sekolah dasar	3 Kegiatan (221 Satuan Pendidikan)	7,298,423,640	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya kualiltas kelembagaan pendidikan sekolah dasar	3 Kegiatan (221 Satuan Pendidikan)	7,298,423,640	
13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselengganya Pembelajaran di Satuan Pendidikan	221 Satuan Pendidikan	24,481,830,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselengganya Pembelajaran di Satuan Pendidikan	221 Satuan Pendidikan	24,481,830,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		443 orang	271,946,972	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		443 orang	271,946,972	
15	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Kab. Tabalong, Muara Uya, Kampung Baru	Terbangunnya laboratorium komputer	4 Unit	1,011,372,000	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Kab. Tabalong, Muara Uya, Kampung Baru	Terbangunnya laboratorium komputer	4 Unit	1,011,372,000	
		Kab. Tabalong, Muara Uya, Uwie					Kab. Tabalong, Muara Uya, Uwie				
		Kab. Tabalong, Haruai, Lampahungin					Kab. Tabalong, Haruai, Lampahungin				
		Kab. Tabalong, Upau, Masingai					Kab. Tabalong, Upau, Masingai				
16	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	223 orang	137,785,180	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	223 orang	137,785,180	
17	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Tabalong, Haruai, Surian	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Kelas Baru	13 Ruang	6,261,511,766	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Tabalong, Haruai, Surian	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Kelas Baru	13 Ruang	6,261,511,766	
		Kab. Tabalong, Haruai, Kembang Kuning					Kab. Tabalong, Haruai, Kembang Kuning				

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Kab. Tabalong, Jaro, Lano					Kab. Tabalong, Jaro, Lano				
		Kab. Tabalong, Murung Pudak, Belimbing Raya, Pembataan, Mabuun,					Kab. Tabalong, Murung Pudak, Belimbing Raya, Pembataan, Mabuun,				
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Tabalong, Pugaan (Sei Rukam I), Haruai (Halong)	Terpenuhinya Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4 Unit (4 sekolah)	684,653,350	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Tabalong, Pugaan (Sei Rukam I), Haruai (Halong)	Terpenuhinya Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4 Unit (4 sekolah)	684,653,350	
19	Penyelengaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		Terpenuhinya Jumlah Kegiatan kurikulum dan penilaian Pendidikan Sekolah Dasar	5 Kegiatan (221 SD)	1,099,364,160	Penyelengaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		Terpenuhinya Jumlah Kegiatan kurikulum dan penilaian Pendidikan Sekolah Dasar	5 Kegiatan (221 SD)	1,099,364,160	
20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya rehab ruang kelas sekolah	39 Ruang	8,913,407,060	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya rehab ruang kelas sekolah	39 Ruang	8,913,407,060	
		Kab. Tabalong, Murung Pudak, Masukau, Mabuun, Pembataan,					Kab. Tabalong, Murung Pudak, Masukau, Mabuun, Pembataan,				

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Kab. Tabalong, Banua Lawas, Ds Banua Lawas, Ds Habau					Kab. Tabalong, Banua Lawas, Ds Banua Lawas, Ds Habau				
		Kab. Tabalong, Tanjung, Mahe Seberang					Kab. Tabalong, Tanjung, Mahe Seberang				
		Kab. Tabalong, Kelua, Kelurahan Pulau, Pasar Panas					Kab. Tabalong, Kelua, Kelurahan Pulau, Pasar Panas				
		Kab. Tabalong, Jaro, Purui, Namun, Muang					Kab. Tabalong, Jaro, Purui, Namun, Muang				
		Kab. Tabalong, Muara Uya, Binjai					Kab. Tabalong, Muara Uya, Binjai				
		Kab. Tabalong, Haruai, Bongkang					Kab. Tabalong, Haruai, Bongkang				
II.B	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Kab. Tabalong**	**APK dan APM SMP**	**111,29 dan 98,58**	**29,973,213,832**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Kab. Tabalong**	**APK dan APM SMP**	**111,29 dan 98,58**	**29,973,213,832**	
1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Tabalong, Muara Uya, Salikung	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 Ruang	800,539,728	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Tabalong, Muara Uya, Salikung	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 Ruang	800,539,728	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Kab. Tabalong, Banua Lawas, Pematang					Kab. Tabalong, Banua Lawas, Pematang				
2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Tabalong, Jaro, Jaro	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 Unit	231,999,600	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Tabalong, Jaro, Jaro	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 Unit	231,999,600	
3	Pembangunan Laboratorium	Kab. Tabalong, Bintang Ara, Ds Bintang Ara	Terbangunnya laboratorium komputer	1 buah	2,318,100,000	Pembangunan Laboratorium	Kab. Tabalong, Bintang Ara, Ds Bintang Ara	Terbangunnya laboratorium komputer	1 buah	2,318,100,000	
		Kab. Tabalong, Jaro, Ds Jaro	Terbangunnya laboratorium komputer	1 buah			Kab. Tabalong, Jaro, Ds Jaro	Terbangunnya laboratorium komputer	1 buah		
		Kab. Tabalong, Muara Uya, Uwie	Terbangunnya laboratorium komputer	1 buah			Kab. Tabalong, Muara Uya, Uwie	Terbangunnya laboratorium komputer	1 buah		
		Kab. Tabalong, Murung Pudak, Kasiau	Terbangunnya laboratorium komputer	1 buah			Kab. Tabalong, Murung Pudak, Kasiau	Terbangunnya laboratorium komputer	1 buah		
		Kab. Tabalong, Muara Harus, Ds Harus	Terbangunnya laboratorium komputer	1 buah			Kab. Tabalong, Muara Harus, Ds Harus	Terbangunnya laboratorium komputer	1 buah		
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Tabalong, Tanjung, Kitang dan Wayau	Terbangunnya sarana dan prasarana utilitas sekolah (Lapanagan Olahraga, Paving Halaman,	9 Paket/ unit	3,036,418,264	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Tabalong, Tanjung, Kitang dan Wayau	Terbangunnya sarana dan prasarana utilitas sekolah (Lapanagan Olahraga, Paving Halaman,	9 Paket/ unit	3,036,418,264	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Kab. Tabalong, Bintang Ara, Ds Bintang Ara, Dambung Raya, Burum Kab. Tabalong, Muara Uya, Ribang Kab. Tabalong, Tanta, Warukin Kab. Tabalong, Banua Lawas, Habau Kab. Tabalong, Pugaan, Ds Pugaan Kab. Tabalong, Kelua, Karangan Putih						Kab. Tabalong, Bintang Ara, Ds Bintang Ara, Dambung Raya, Burum Kab. Tabalong, Muara Uya, Ribang Kab. Tabalong, Tanta, Warukin Kab. Tabalong, Banua Lawas, Habau Kab. Tabalong, Pugaan, Ds Pugaan Kab. Tabalong, Kelua, Karangan Putih				
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Tabalong, Haruai, Wirang	Terlaksananya rehab ruang kelas sekolah	5 Ruang	2,292,667,624	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Tabalong, Haruai, Wirang	Terlaksananya rehab ruang kelas sekolah	5 Ruang	2,292,667,624	
		Kab. Tabalong, Bintang Ara, Ds Bintang Ara, Burum					Kab. Tabalong, Bintang Ara, Ds Bintang Ara, Burum				

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Kab. Tabalong, Tanta, Ds Tanta, Pulau Ku'u					Kab. Tabalong, Tanta, Ds Tanta, Ds Pulau Ku'u				
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Tabalong, Murung Pudak, Kelurahan Belimbing	Terlaksananya rehab perpustakaan sekolah	3 unit	273.705.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Tabalong, Murung Pudak, Kelurahan Belimbing	Terlaksananya rehab perpustakaan sekolah	3 unit	273.705.000	
		Kab. Tabalong, Banua Lawas, Ds Banua Lawas.					Kab. Tabalong, Banua Lawas, Ds Banua Lawas.				
		Kab. Tabalong, Tanta, Pulau Ku'u					Kab. Tabalong, Tanta, Pulau Ku'u				
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kab. Tabalong, Banua Lawas, Hapalah	Terlaksananya rehab ruang laboratorium IPA	2 Unit	1,230,520,238	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kab. Tabalong, Banua Lawas, Hapalah	Terlaksananya rehab ruang laboratorium IPA	2 Unit	1,230,520,238	
		Kab. Tabalong, Muara Uya, Uwie	Terlaksananya rehab ruang laboratorium IPA				Kab. Tabalong, Muara Uya, Uwie	Terlaksananya rehab ruang laboratorium IPA			
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Tabalong, Muara Harus, Ds Harus	Terlaksananya rehab ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1 unit	71,894,650	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Tabalong, Muara Harus, Ds Harus	Terlaksananya rehab ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1 unit	71,894,650	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Kab. Tabalong, Muara Uya, Uwie	Terlaksananya rehab Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1 unit	110,000,000		Kab. Tabalong, Muara Uya, Uwie	Terlaksananya rehab Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1 unit	110,000,000	
9	Pengadaan Mebel Sekolah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengadaan meja dan kursi siswa	420 pasang	851,441,040	Pengadaan Mebel Sekolah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengadaan meja dan kursi siswa	420 pasang	851,441,040	
10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan (15 Lokasi)	Jumlah sekolah penerima dana BOSDA	55 Sekolah	3,801,170,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan (15 Lokasi)	Jumlah sekolah penerima dana BOSDA	55 Sekolah	3,801,170,000	
			Pembayaran honorarium tim manajemen BOSDA	15 Orang				Pembayaran honorarium tim manajemen BOSDA	15 Orang		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dana BOSDA	2 Semester				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dana BOSDA	2 Semester		
			Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pemanfaatan Program Indonesia Pintar (PIP)	1 kali				Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pemanfaatan Program Indonesia Pintar (PIP)	1 kali		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
11	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Perlengkapan Belajar Peserta Didik	1680 Paket	380,242,800	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Perlengkapan Belajar Peserta Didik	1680 Paket	380,242,800	
12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Alat Praktik dan Peraga Siswa	6 Paket	365,393,750	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Alat Praktik dan Peraga Siswa	6 Paket	365,393,750	
13	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya kegiatan lomba-lomba dan Pemberian Beasiswa Kabupaten Tabalong	9 Paket	2,087,185,016	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya kegiatan lomba-lomba dan Pemberian Beasiswa Kabupaten Tabalong	9 Paket	2,087,185,016	
14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Guru dan Tata Usaha Kontrak yang ada di sekolah	26 Orang / 210 org di DPA	705,800,000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Guru dan Tata Usaha Kontrak yang ada di sekolah	26 Orang / 210 org di DPA	705,800,000	
15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	687 org di DPA	540,166,171	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	687 org di DPA	540,166,171	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kontrak yang ada di Bidang Pembinaan SMP	4 Orang	1,275,042,653	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kontrak yang ada di Bidang Pembinaan SMP	4 Orang	1,275,042,653	
			Pengadaan Laptop dan PC All In One untuk bidang Pembinaan SMP	4 Buah				Pengadaan Laptop dan PC All In One untuk bidang Pembinaan SMP	4 Buah		
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pembinaan Sekolah	1 Tahun				Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pembinaan Sekolah	1 Tahun		
17	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Bintek Penggunaan dan Pertanggung jawaban Dana BOS dan BOSDA SMP	60 sekolah	8,018,530,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Bintek Penggunaan dan Pertanggung jawaban Dana BOS dan BOSDA SMP	60 sekolah	8,018,530,000	
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dana BOS SMP	2 semester	8,018,530,000			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dana BOS SMP	2 semester	8,018,530,000	
18	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	61 orang	329,601,365	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	61 orang	329,601,365	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
19	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	5 Dokumen	65,300,000	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	5 Dokumen	65,300,000	
20	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	60 Komunitas	433,571,873	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	60 Komunitas	433,571,873	
			Bimbingan teknis penulisan ijazah					Bimbingan teknis penulisan ijazah			
			Workshop Digital Class					Workshop Digital Class			
			Workshop penyusunan kurikulum Sekolah					Workshop penyusunan kurikulum Sekolah			
			Workshop penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah(RKJM) dan Rencana Kerja Sekolah (RKS)					Workshop penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah(RKJM) dan Rencana Kerja Sekolah (RKS)			
			Workshop Penyusunan Silabus Program Sekolah Mengaji					Workshop Penyusunan Silabus Program Sekolah Mengaji			
			Workshop Penyusunan Soal Penilaian Ujian Sekolah					Workshop Penyusunan Soal Penilaian Ujian Sekolah			

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Workshop Sistem penilaian dan analisis hasil penilaianpeserta didik (PAS, PTS, PH) dan tindak lanjutnya					Workshop Sistem penilaian dan analisis hasil penilaianpeserta didik (PAS, PTS, PH) dan tindak lanjutnya			
21	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Asesmen Nasional (AN)	1 Kegiatan	299,624,178	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Asesmen Nasional (AN)	1 Kegiatan	299,624,178	
			Terlaksananya Bintek Proktor dan Teknisi pelaksanaan Asesmen Nasional	60 Sekolah				Terlaksananya Bintek Proktor dan Teknisi pelaksanaan Asesmen Nasional	60 Sekolah		
			Terlaksananya Monitoring pelaksanaan Asesmen Nasional	1 Kegiatan				Terlaksananya Monitoring pelaksanaan Asesmen Nasional	1 Kegiatan		
II.C	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Kab. Tabalong**			**25,123,180,669**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Kab. Tabalong**			**25,123,180,669**	
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemasangan Plapon dan Keramik TK	4 Paket	1,407,594,772	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemasangan Plapon dan Keramik TK	4 Paket	1,407,594,772	
			Pemasangan Keramik TK	1 Paket				Pemasangan Keramik TK	1 Paket		
			Pengurukan dan Penyiringan TK	1 Paket				Pengurukan dan Penyiringan TK	1 Paket		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pembuatan WC untuk PAUD Pembangunan Pagar TK	1 unit 2 Paket (2 X @ 68.74 m)				Pembuatan WC untuk PAUD Pembangunan Pagar TK	1 unit 2 Paket (2 X @ 68.74 m)		
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rehabilitasi Gedung TK dan PAUD	11 Paket	2,276,848,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rehabilitasi Gedung TK dan PAUD	11 Paket	2,276,848,000	
3	Pengadaan Mebel PAUD	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengadaaan Meubeler PAUD	15 Paket	198,119,143	Pengadaan Mebel PAUD	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengadaaan Meubeler PAUD	15 Paket	198,119,143	
4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah APE Luar PAUD	12 paket	309,057,860	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah APE Luar PAUD	12 paket	309,057,860	
			Jumlah APE Dalam PAUD (Alat Peraga PAUD/TK-Peralatan Permainan)	10 paket				Jumlah APE Dalam PAUD (Alat Peraga PAUD/TK-Peralatan Permainan)	10 paket		
5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua	Guru Bakti Guru Bantu Honor POS PAUD/SPS Operator PAUD Kecamatan	1248 Orang 815 Orang	10,427,348,360	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua	Guru Bakti Guru Bantu Honor POS PAUD/SPS Operator PAUD Kecamatan	1248 Orang 815 Orang	10,427,348,360	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Operator PKBM Pegawai Tidak Tetap Rumah Pintar Tenaga Kontrak Bidang PAUDNI	29 Orang 6 Orang				Operator PKBM Pegawai Tidak Tetap Rumah Pintar Tenaga Kontrak Bidang PAUDNI	29 Orang 6 Orang		
II.D	**Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**				**3,175,701,573**	**Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**				**3,175,701,573**	
6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksannanya Kegiatan Hari Anak Nasional	1000 Anak	249,593,329	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksannanya Kegiatan Hari Anak Nasional	1000 Anak	249,593,329	
7	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendidik PAUD	294 Lembaga	5,674,240,000	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendidik PAUD	294 Lembaga	5,674,240,000	
8	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		1.354.210.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	354.210.000	1.354.210.000	
9	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Kelas Baru (APBD 9 Rg + APBN/DAK 6 Rg	15 Ruang	4,150,379,205	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Kelas Baru (APBD 9 Rg + APBN/DAK 6 Rg	15 Ruang	4,150,379,205	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya biaya personil Peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan (SKB)	98 Peserta Didik	126,527,084	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya biaya personil Peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan (SKB)	98 Peserta Didik	126,527,084	
11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksannya Hari Aksara Internasional	40 Orang	100,000,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksannya Hari Aksara Internasional	40 Orang	100,000,000	
12	Pengelolaan Dana BOPS Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOPS Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	12 Lembaga Kesetaraan	1,931,010,000	Pengelolaan Dana BOPS Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOPS Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	12 Lembaga Kesetaraan	1,931,010,000	
13	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/	Kab. Tabalong, Semua	Warga Belajar KF Warga Belajar	100 WB 20 WB 200 WB 400 WB	1,018,164,489	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/	Kab. Tabalong, Semua	Warga Belajar KF Warga Belajar	100 WB 20 WB 200 WB 400 WB	1,018,164,489	
III.	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**		**1.Jumlah tenaga pendidik kualifikasi S1/D.IV, 2. Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi.**		**8,290,533,981**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**		**1.Jumlah tenaga pendidik kualifikasi S1/D.IV, 2. Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi.**		**8,290,533,981**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				8,290,533,981	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				8,290,533,981	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentasi ketersediaan data yang valid aneka tunjangan, dan Pembinaan KKG Pendidikan Dasar	3 kegiatan	1,384,522,820	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentasi ketersediaan data yang valid aneka tunjangan, dan Pembinaan KKG Pendidikan Dasar	3 kegiatan	1,384,522,820	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentasi Pengembanag sistem kesejahteraan,penghargaan dan perlindungan	100%	6,906,011,161	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentasi Pengembanag sistem kesejahteraan,penghargaan dan perlindungan	100%	6,906,011,161	
			IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN		1,053,705,600			IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN		1,053,705,600	
			DANA PENDAMPINGAN PROGRAM GURU PENGGERAK		18,449,009			DANA PENDAMPINGAN PROGRAM GURU PENGGERAK		18,449,009	
			HARI GURU NASIONAL TINGKAT KABUPATEN					HARI GURU NASIONAL TINGKAT KABUPATEN			

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			HARI GURU NASIONAL TINGKAT KECAMATAN					HARI GURU NASIONAL TINGKAT KECAMATAN			
			MONITORING PEMETAAN DAN PENEMPATAN PTK TK, SD, SMP					MONITORING PEMETAAN DAN PENEMPATAN PTK TK, SD, SMP			
			WORKSHOP DAPODIK SD 12 KECAMATAN 4 HARI		1,176,005			WORKSHOP DAPODIK SD 12 KECAMATAN 4 HARI		1,176,005	
			WORKSHOP DAPODIK SMP DAN PKBM		1,176,005			WORKSHOP DAPODIK SMP DAN PKBM		1,176,005	
			WORKSHOP DAPODIK TK, KB, TPA 4 HARI		1,054,913			WORKSHOP DAPODIK TK, KB, TPA 4 HARI		1,054,913	
			LOMBA DAPODIK TERBAIK		27,000,000			LOMBA DAPODIK TERBAIK		27,000,000	
			PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH BERDEDIKASIH TK, SD, SMP		39,000,000			PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH BERDEDIKASIH TK, SD, SMP		39,000,000	
IV.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**				**2,801,600,760**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**				**2,801,600,760**	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				1,985,819,122	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				1,985,819,122	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan Pagelaran dan Workshop Seni Budaya Daerah	3 Kegiatan	1,985,819,122	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan Pagelaran dan Workshop Seni Budaya Daerah	3 Kegiatan	1,985,819,122	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				458.845.000	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				458.845.000	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan Workshop, Event Seni Budaya Daerah, dan Penggalian Data Budaya Tak Benda	8 Kegiatan	1,985,819,122	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan Workshop, Event Seni Budaya Daerah, dan Penggalian Data Budaya Tak Benda	8 Kegiatan	1,985,819,122	
			Duta Batik, Gita Bahana Nusantara, Karnaval Budaya Sekolah, Gebyar Kemerdekaan, Gebyar Kihajar Dewantara, Kemah Budaya, Pawai Talintingan, Safari Budaya,					Duta Batik, Gita Bahana Nusantara, Karnaval Budaya Sekolah, Gebyar Kemerdekaan, Gebyar Kihajar Dewantara, Kemah Budaya, Pawai Talintingan, Safari Budaya,			
			Aruh Sastra Kalimantan Selatan, Festival Karya Tari Daerah, HUT Tabalong,					Aruh Sastra Kalimantan Selatan, Festival Karya Tari Daerah, HUT Tabalong,			

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
V.	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**		**Tercapainya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten**		**703,503,193**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**		**Tercapainya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten**		**703,503,193**	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					
	Pelindungan Cagar Budaya	Kab. Tabalong, Haruai, Nawin	Jumlah Kampung Budaya Yang Dibangun	1 Paket		Pelindungan Cagar Budaya	Kab. Tabalong, Haruai, Nawin	Jumlah Kampung Budaya Yang Dibangun	1 Paket		
	Pemanfaatan Cagar Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	10 Buah		Pemanfaatan Cagar Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	10 Buah		
	JUMLAH				**493.954.369.697**					**493.954.369.697**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kebijakan Masyarakat

Pada pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun 2024, ada usulan Program / Kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan.

2.5.1. Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Musrenbang

Musyawarah Perncanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) merupakan forum pertemuan antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi/kabupaten sebagai perwujudan dari pendekatan partisipasif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka membahas rancangan dokumenrencana pembanguna daerah menjadi rancangan akhir dokumen rancangan pembangunan daerah. Bahan masukan musrenbang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong diperoleh dari pelaksanaan forum perangkat daerah, Forum perangkat daerah (Forum PD) merupakan wadah penampungan, penjaringan dan pembahasan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan Renja PD dan penyempurnaan rancangan awal RKPD.

Forum PD dilaksanakan dengan tujuan memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Perangkat Daerah.

2.5.2. Kesesuaian Usulan Musrenbang dengan Tugas, Fungsi, dan Pelayanan Perangkat Daerah.

Semua usulan yang masuk dalam rangka penyusunan rancangan rencana kerja tahun 2024 sesuai dengan tugas, fungsi dan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong.

2.5.3. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

2.5.3. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Tabel: 2.4.

Daftar Usulan Musrenbang Tahun 2024 Kabupaten Tabalong

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
1	913064	10-01-2024	Agus Wari	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pengadaan APE Luar Untuk TK. Pasyangan	Sei Durian RT.04,	Kab. Tabalong	Banua Lawas	Sungai Durian	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
2	913205	10-01-2024	Agus Wari	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Meubelair 20 Meja dan Kursi untuk TK Pasyangan RT.04	Sei Durian RT. 04, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Banua Lawas	Sungai Durian	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
3	917938	10-01-2024	Sambelianto, A.Ma,Pd	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Rehab 4 Kelas SDN Banua Rantau	Desa Banua Rantau Rt 04, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Banua Lawas	Banua Rantau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
4	918155	10-01-2024	Sambelianto, A.Ma,Pd	Kelurahan / Desa	Pengelolaan Cagar Budaya	belum tersedianya bangunan makam yang layak bagi penjiarah, membangun	Desa Banua Rantau Rt 03, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Banua Lawas	Banua Rantau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
5	924848	11-01-2024	Yurhani	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	SDN PASAR ARBA PERMOHONAN PEMBUATAN WC 4 BUAH DAN 2 KAMAR MANDI	DESA BANUA LAWAS RT 02	Kab. Tabalong	Banua Lawas	Banua Lawas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diteruskan (2 wc, 1 kmr mand	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
6	925729	11-01-2024	H Hamdani	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pengurukan Halaman Sekolah SD Sungai Anyar RT 05	Desa Sungai Anyar RT 05, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Banua Lawas	Sungai Anyar	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diterus skan	-	-	-	-	-	-	-
7	925926	11-01-2024	Itar	Kelurahan / Desa	Kurikulum Pendidikan	Bangunan TK yang sudah tidak layak digunakan, karena terjadi retak yang sangat membahayakan murid dengan ukuran 10 x 5 meter	Desa Bangkiling RT 05, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Banua Lawas	Bangkiling	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sebutkan nama sekolahnya saat pembahasan desk	-	diterus skan	-	-	-	-	-	-	-
8	926149	11-01-2024	Madian	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Rusaknya bangunan SDN Talan sehingga perlu adanya perbaikan ruangan	Talan Rt. 03 , Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Banua Lawas	Talan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diterus skan	-	-	-	-	-	-	-
9	926340	11-01-2024	Madian	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pemasangan keramik dan rehab ringan bangunan SDN Talan	Talan Rt. 03, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Banua Lawas	Talan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Dikembalikan	sebutkan nama sekolahnya	mohon disebutkan nama sekola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	926368	11-01-2024	M Husnandar Yunani	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Cor halaman SMPN 4 Banua Lawas (100 M2)	Desa Pematang rt 04, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Banua Lawas	Pematang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diterus skan	-	-	-	-	-	-	-
11	926398	11-01-2024	M Husnandar Yunani	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Peningkatan pagar halaman SDN 1 Pematang (30 M)	Desa Pematang rt 04,	Kab. Tabalong	Banua Lawas	Pematang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diterus skan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
12	926928	11-01-2024	Baderi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	SDN Batang Banyu Pemasangan Paving Block atau Semen halaman	Desa Batang Banyu RT.02	Kab. Tabalong	Banua Lawas	Batang Banyu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
13	926938	11-01-2024	Sanusi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Penyiringan & Pengurukan lapangan Sekolah Karena Sering Kebanjiran Ukuran 50m x 30m	SDN Habau Hulu & SMPN Banua Lawas	Kab. Tabalong	Banua Lawas	Habau Hulu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
14	927193	11-01-2024	Baderi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pengadaan Meubelair 100 Buah	Desa Batang Banyu RT.02, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Banua Lawas	Batang Banyu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Dikembalikan	sebutkan nama sekolahnya	sebutkan nama sekolahnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	927296	11-01-2024	Baderi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Bocor Bagian Atap Sekolah sehingga Mengganggu Aktifitas Belajar (Rehab Sekolah TK.PANCAR II 1 Unit)	Desa Batang Banyu RT.02, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Banua Lawas	Batang Banyu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
16	927389	11-01-2024	H Anang Acil	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Relokasi SMPN 3 Banua Lawas dari RT.02 berpindah ke RT.005 Desa Hapalah. Diperlukan Pembangunan 3 Ruang Kelas, 1 Ruang Guru, 1 Ruang Kepala Sekolah, 4 WC/Toilet, 1 Ruang Tata Usaha, 1 Ruang Laboraturium IPA, 1 Ruang Lab Komputer, 1 Ruang Moshalla, 1 Ruang UKS, 1	Desa Hapalah RT.005, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Banua Lawas	Hapalah	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diterus skan	-	-	-	-	-	-	-
17	927707	11-01-2024	Maulana	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Kondisi Pagar Yang Tidak Layak (SDN Habau) memerlukan pembuatan pagar dengan volume	Desa Habau RT 02, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Banua Lawas	Habau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diterus skan	-	-	-	-	-	-	-
18	927884	11-01-2024	Sanusi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pembuatan Pagar Beton Sekolah T 2M x P 50M	SDN Banua Lawas & SMPN Banua Lawas	Kab. Tabalong	Banua Lawas	Habau Hulu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diterus skan	-	-	-	-	-	-	-
19	927897	11-01-2024	Maulana	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Kurang Lengkapnya Alat Permainan Idukatif Dalam untuk anak sekolah (RA Miftahul Alim dan TK Harapan Masa)	Desa Habau RT 03 dan Rt 04, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Banua Lawas	Habau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diterus skan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
20	929248	11-01-2024	Pahrujani,S.Sos	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pengadaan Meubelair 100 Buah	Bungin RT 03, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Banua Lawas	Bungin	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Dikembalikan	mhn sebutkan nama sekolah	mhn sebutkan nama sekola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	930772	11-01-2024	H Anang Acil	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Diperlukan Rehab atau Pembuatan Baru Toilet Guru dan Siswa SDN 2 Hapalah Masing-masing 1 (satu) Paket Ruang Toilet	Desa Hapalah RT.002, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Banua Lawas	Hapalah	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diterus kan	-	-	-	-	-	-	-
22	931856	11-01-2024	Abdul Gafur	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Memerlukan 10 buah Laptop	Desa Bangkiling Raya RT.03, SDN 1 Hapalah, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Banua Lawas	Bakiling Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diterus kan	-	-	-	-	-	-	-
23	934214	11-01-2024	Sugianoor	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Hariang	Desa Hariang RT.06, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Banua Lawas	Hariang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diterus kan	-	-	-	-	-	-	-
24	1053034	18-01-2024	Idrus	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Peninggian halaman sekola SDN purai Lebar 14,90 M dan Panjang 28,20 M	Desa Purai Rt. 06, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Banua Lawas	Purai	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diterus skan	-	-	-	-	-	-	-
25	907768	09-01-2024	Irhamsyah	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pembuatan Paving Block dan Pembuatan Pagar, Halaman Sekolah	Desa Waling Rt 001, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Bintang Ara	Waling	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	Diterus kan	-	Diter uskan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
26	918944	10-01-2024	Diki Asdie	Kelurahan / Desa	Kurikulum Pendidikan	kekurangan tenaga pendidik PNS	desa dambung raya rt 01 sampai dengan 06	Kab. Tabalong	Bintang Ara	Dambung Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	DITERUSKAN	-	-	-	-	-	-	-
27	929746	11-01-2024	Teguh Prayitno	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pembuatan Pagar dan Paping Block	SDN 1 USIH RT. 02 Argo Mulyo, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Bintang Ara	Argo Mulyo	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	DITERUSKAN	-	-	-	-	-	-	-
28	958904	13-01-2024	H. Kastalani	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Penyiringan lapangan sepak bola panjang 100 meter dan urukan tanah serta di buatkan tribun penonton SMPN 2 Haruai dan drainase pembuangan air hujan panjang 200 meter	Desa Bintang Ara Rt 04, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Bintang Ara	Bintang Ara	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	DITERUSKAN pengurukan	-	-	-	-	-	-	-
29	958990	13-01-2024	H. Kastalani	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pemagaran SDN Bintang Ara, Pagar sudah rusak dan SDN Mantup belum adanya pagar sekolah	Desa Bintang Ara Rt 02 ,06, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Bintang Ara	Bintang Ara	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	DITERUSKAN	-	-	-	-	-	-	-
30	959028	13-01-2024	H. Kastalani	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pengadaan Meubelair 100 Buah	Desa Bintang Ara Rt 06, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Bintang Ara	Bintang Ara	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	DITERUSKAN	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
31	1002462	16-01-2024	Suyanto	Kelurahan / Desa	Pelestarian Kesenian Tradisional	peralatan yang sudah rusak dan mahalnya harga perlengkapan kuda lumping	Desa Hegar Manah Rt 02, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Bintang Ara	Hegarmanah	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	DITERUSKAN	-	-	-	-	-	-	-
32	1024369	17-01-2024	Bahrudin	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pembangunan pagar permanen TK Pembina Desa Usih RT. 003	Desa Usih, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Bintang Ara	Usih	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	DITERUSKAN	-	-	-	-	-	-	-
33	942107	12-01-2024	Herman Susilo	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pemasangan Paving Block SDN 1 Danau	Jalan Danau RT 08 Desa Hayup Kec. Haruai	Kab. Tabalong	Haruai	Hayup	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
34	1004186	16-01-2024	Hendrikus Lada	Kelurahan / Desa	Pelestarian Kesenian Tradisional	Alat Musik tradisional dan pakaian adat tradisional tidak memadai dan harus membeli dari luar	Desa Suryan, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Haruai	Suryan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
35	1004343	16-01-2024	Hendrikus Lada	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Gedung SDN Surian yang baru dibangun hanya 3 lokal dan 1 kantor belum bisa digunakan karena fasilitas belum memadai.	Desa Suryan Rt.02, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Haruai	Suryan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
36	1027466	17-01-2024	DWI ADI SAPUTRA	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	SDN 3 Kembang Kuning Desa Catur Karya belum mempunyai Pagar Batas Tanah Sekolah	Desa Catur Karya RT 03 , Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Haruai	Catur Karya	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
37	1028695	17-01-2024	DWI ADI SAPUTRA	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	SDN 3 Kembang Kuning Rehab 3 ruang kelas	Desa Catur Karya RT 03, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Haruai	Catur Karya	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
38	1039846	18-01-2024	H. Zainal Fahmi,S.Ag	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	SDN Marindi peninggian halaman berupa Vaping Blok	Marinid RT 03, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Haruai	Marindi	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
39	1041867	18-01-2024	Muhammad Yusuf	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Halaman tergenang air setelah hujan	Suput, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Haruai	Suput	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Dikembalikan	SEBUTKAN NAMA SEKOLAHNYA	sebutkan nama sekolahnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	1045253	18-01-2024	Muhammad Yusuf	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pembuatan Pagar Sekolah	RT. 002 Desa Suput, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Haruai	Suput	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Dikembalikan	SEBUTKAN NAMA SEKOLAHNYA	sebutkan nama sekolahnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	1045302	18-01-2024	Muhammad Yusuf	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Leptop/Network	RT.002 Desa Suput, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Haruai	Suput	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Dikembalikan	SEBUTKAN NAMA SEKOLAHNYA	sebutkan nama sekolahnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1045378	18-01-2024	Muhammad Yusuf	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Gedung Sekolah dan Kantor	RT. 003 Desa Suput, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Haruai	Suput	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Dikembalikan	SEBUTKAN NAMA SEKOLAHNYA	sebutkan nama sekolahnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
43	1060406	19-01-2024	Herman Susilo	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pengecoran teras mushala SDN 2.3 Hayup dan SMP	Hayup RT 02, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Haruai	Hayup	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
44	1060472	19-01-2024	Herman Susilo	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Gedung TK Pagi danau	desa Hayup RT 08, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Haruai	Hayup	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Dikembalikan	usulan tidak jelas	usulan tidak jelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	1082603	20-01-2024	Basuki Rahmad	Kelurahan / Desa	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan pada SDN Lampahungin (275 M2)	Desa Bongkang RT. 02, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Haruai	Bongkang	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diteruskan ke musrembangcam	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
46	1082837	20-01-2024	Basuki Rahmad	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pembangunan Mushala SDN Lampahungin 1 buah	Desa Bongkang RT 02, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Haruai	Bongkang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
47	1082851	20-01-2024	Basuki Rahmad	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Rehab Ruang Kelas SDN Lampahungin (7 buah)	Desa Bongkang RT 02, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Haruai	Bongkang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
48	1082872	20-01-2024	Basuki Rahmad	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pengadaan Pavingisasi Halaman SDN 1 Bongkang (750 m2)	Desa Bongkang RT 01, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Haruai	Bongkang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
49	1082891	20-01-2024	Basuki Rahmad	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Rehab Pemagaran Pekarangan SDN 1 Bongkang (200 m)	Desa Bongkang RT 01, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Haruai	Bongkang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diterus skan	-	-	-	-	-	-	-
50	1082904	20-01-2024	Basuki Rahmad	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pembangunan Pagar dan Pintu Gerbang SDN 2 Bongkang (80 m)	Desa Bongkang RT 05, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Haruai	Bongkang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diterus skan	-	-	-	-	-	-	-
51	1082919	20-01-2024	Basuki Rahmad	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pembangunan Pagar dan Pintu Gerbang SDN 3 Bongkang (80 m)	Desa Bongkang RT 07, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Haruai	Bongkang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diterus skan	-	-	-	-	-	-	-
52	1083248	20-01-2024	H. Zainal Firdaus	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Perlu pagar yang memadai (200 M)	Desa Halong RT.004, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Haruai	Halong	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Dikembalikan	sebutkan nama sekolahnya	sebutkan nama sekolahnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	1084524	21-01-2024	H. Zainal Firdaus	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pengecoran halaman SDN 1 Nawin Hilir (20 M X 10 M)	Desa Halong RT.004, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Haruai	Halong	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diterus skan	-	-	-	-	-	-	-
54	1084648	21-01-2024	H. Zainal Firdaus	Kelurahan / Desa	Pengelolaan Cagar Budaya	Rehab kelas dan perlu keramik (1 PAKET)	Desa Halong RT.004, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Haruai	Halong	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Dikembalikan	sebutkan nama cagar budanyanaya	sebutkan nama cagar budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
55	1084967	21-01-2024	H. Zainal Firdaus	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Hibah Rumah Dinas Guru yang terbengkalai dan tidak terawat, untuk pembangunan kepentingan umum dengan menggunakan dana desa	Desa Halong RT.001, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Haruai	Halong	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diterus skan	-	-	-	-	-	-	-
56	914424	10-01-2024	Pipi Iswanto	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah Murid Bertambah, sedangkan Ruangan Tidak mencukupi, sehingga diperlukan Penambahan Ruangan TK Paud,	TK Paud Tunas Mandiri Desa Solan RT.008,	Kab. Tabalong	Jaro	Solan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diterus skan	-	-	-	-	-	-	-
57	914456	10-01-2024	Pipi Iswanto	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Penambahan RKB dan Toilet di SMP 3 Jaro	SMP Negeri 3 Jaro Desa Solan RT.002,	Kab. Tabalong	Jaro	Solan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diterus skan	-	-	-	-	-	-	-
58	917053	10-01-2024	Sudik	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Kekurangan Ruang Belajar	RT.05 (TK NUSA INDAH)	Kab. Tabalong	Jaro	Nalui	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diterus skan	-	-	-	-	-	-	-
59	926510	11-01-2024	Pipi Iswanto	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah murid bertambah, sedangkan Ruangan tidak mencukupi, sehingga diperlukan penambahan Ruangan belajar	TK Paud Tunas Mandiri Desa Solan RT.008,	Kab. Tabalong	Jaro	Solan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diterus skan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
60	935015	11-01-2024	Sudik	Kelurahan / Desa	Pelestarian Kesenian Tradisional	BELUM BERKEMBANG MAKSIMAL KARENA KEKURANGAN SARANA DAN	DESA NALUI, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Jaro	Nalui	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diterus skan	-	-	-	-	-	-	-
61	1036962	18-01-2024	Jamin Effendi	Kelurahan / Desa	Kurikulum Pendidikan	Kurangnya Fasilitas Ruangan Untuk Murid	Desa Lano,Rt.002 Kec.Jaro	Kab. Tabalong	Jaro	Lano	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Dikembalikan	sebutkan nama sekolahnya	sebutkan nama sekolahnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	969975	15-01-2024	Muhammad Nasib	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Ruang Kelas SDN Bahungin tidak proporsional, tidak tertata dengan baik, dan banyak kerusakan.	Desa Bahungin RT.03, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Kelua	Bahungin	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diterus skan	-	-	-	-	-	-	-
63	970235	15-01-2024	Muhammad Nasib	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Belum ada pagar belakang SDN Gayam	Desa Bahungin RT.05,	Kab. Tabalong	Kelua	Bahungin	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diterus skan	-	-	-	-	-	-	-
64	972485	15-01-2024	Yulnarian	Kelurahan / Desa	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Masih minimnya sarana prasarana olahraga yang dimiliki sekolah-sekolah untuk itu perlu bantuan seperti pembangunan lapangan volly, sepak bola, futsal dan lapangan badminton SMPN 2 KELUA	Desa Sungai Buluh rt.05, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Kelua	Sungai Buluh	Kabupaten / Kota	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
65	979374	15-01-2024	Muhammad Nasib	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	WC siswa tidak layak dan tidak proporsional dengan jumlah siswa	Desa Bahungin RT.03, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Kelua	Bahungin	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Dikembalikan	sebutkan nama sekolahnya	sebutkan nama sekolahnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	982063	15-01-2024	Yulnarian	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Letak Sekolah SDN 1 Sungai Buluh pembuatan pagar antara Sungai dengan sekolah untuk keamanan	Desa Sungai Buluh rt.01 SDN SUNGAI BULUH 1	Kab. Tabalong	Kelua	Sungai Buluh	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
67	983625	15-01-2024	Yulnarian	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Belum adanya pengecoran halaman tempat bermain TK IDHATA, perlu adanya bantuan	TK IDHATA Desa Sungai Buluh rt.01,	Kab. Tabalong	Kelua	Sungai Buluh	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
68	984619	15-01-2024	Yulnarian	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pembuatan lapangan Badminton di SMPN 2 Kelua	Desa Sungai Buluh rt.05,	Kab. Tabalong	Kelua	Sungai Buluh	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	DITERUSKAN	-	-	-	-	-	-	-
69	1026095	17-01-2024	Yulnarian	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pembuatan Vaping untuk halaman sekolah SDN 2 Sungai Buluh	Desa Sungai Buluh rt.02 H	Kab. Tabalong	Kelua	Sungai Buluh	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
70	1031006	17-01-2024	M. Akhyar	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Mohon dibuatkan paving block untuk halaman SDN Paliat agar	SDN Paliat RT 02, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Kelua	Paliat	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
71	1070196	19-01-2024	H. Huzairin, S.Pd.	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Peninggian Halaman Sekolah / Pemasangan Paving Block Halaman SDN Pari - Pari	SDN Pari - Pari Jalan Baco RT 05 Desa Pudak Setegal,	Kab. Tabalong	Kelua	Pudak Setegal	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
64	972485	15-01-2024	Yulnarian	Kelurahan / Desa	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Masih minimnya sarana prasarana olahraga yang dimiliki sekolah-sekolah untuk itu perlu bantuan seperti pembangunan lapangan volly, sepak bola, futsal dan lapangan badminton SMPN 2 KELUA	Desa Sungai Buluh rt.05, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Kelua	Sungai Buluh	Kabupaten / Kota	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	979374	15-01-2024	Muhammad Nasib	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	WC siswa tidak layak dan tidak proporsional dengan jumlah siswa	Desa Bahungin RT.03, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Kelua	Bahungin	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Dikembalikan	sebutkan nama sekolahnya	sebutkan nama sekolahnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	982063	15-01-2024	Yulnarian	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Letak Sekolah SDN 1 Sungai Buluh pembuatan pagar antara Sungai dengan sekolah untuk keamanan siswa-siswi	Desa Sungai Buluh rt.01 SDN SUNGAI BULUH 1	Kab. Tabalong	Kelua	Sungai Buluh	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
67	983625	15-01-2024	Yulnarian	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Belum adanya pengecoran halaman tempat bermain TK IDHATA, perlu adanya bantuan pengecoran	TK IDHATA Desa Sungai Buluh rt.01,	Kab. Tabalong	Kelua	Sungai Buluh	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
68	984619	15-01-2024	Yulnarian	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pembuatan lapangan Badminton di SMPN 2 Kelua	Desa Sungai Buluh rt.05,	Kab. Tabalong	Kelua	Sungai Buluh	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	DITERUSKAN	-	-	-	-	-	-	-
69	1026095	17-01-2024	Yulnarian	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pembuatan Vaping untuk halaman sekolah SDN 2 Sungai Buluh	Desa Sungai Buluh rt.02 H	Kab. Tabalong	Kelua	Sungai Buluh	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
70	1031006	17-01-2024	M. Akhyar	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Mohon dibuatkan paving block untuk halaman SDN Paliat agar	SDN Paliat RT 02, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Kelua	Paliat	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
71	1070196	19-01-2024	H. Huzairin, S.Pd.	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Peninggian Halaman Sekolah / Pemasangan Paving Block Halaman SDN Pari - Pari	SDN Pari - Pari Jalan Baco RT 05 Desa Pudak Setegal,	Kab. Tabalong	Kelua	Pudak Setegal	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
72	1070469	19-01-2024	H. Huzairin, S.Pd.	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pengadaan 25 unit Laptop / Komputer untuk Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK)	SDN 1.2 Pudak Setegal, Jalan A. Yani Desa Pudak Setegal RT 02,	Kab. Tabalong	Kelua	Pudak Setegal	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
73	1070565	19-01-2024	H. Huzairin, S.Pd.	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pembuatan Pagar Halaman Sekolah SDN 1.2 Pudak Setegal	SDN 1.2 Pudak Setegal, Jalan A. Yani Desa Pudak Setegal RT 02,	Kab. Tabalong	Kelua	Pudak Setegal	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
74	1073417	19-01-2024	Mawardi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Perlu pengecoran halaman sekolah	SDN Masintan Desa masintan RT 02,	Kab. Tabalong	Kelua	Masintan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
75	1083049	20-01-2024	Rustam	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	SMPN 4 Kelua perlu dipasang Paving Block Luas 260 M2	Desa binturu Rt 06,	Kab. Tabalong	Kelua	Binturu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
76	1083077	20-01-2024	Rustam	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Halaman sekolah SDN Pasar Minggu perlu Pengecoran Halaman Luas 240 M2	Desa Binturu RT 06,	Kab. Tabalong	Kelua	Binturu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
77	1083124	20-01-2024	Rustam	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	TK Negeri Saranti Desa binturu RT 02 Perlu dibangunkan Teras Luas 80 M2	Desa binturu Rt 02,	Kab. Tabalong	Kelua	Binturu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
78	1083209	20-01-2024	Rustam	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	TK Suka Maju satu atap dengan TPA sore Miftahul Jannah Perlu gedung tersendiri tanahnya sudah dibelikan oleh pihak pemerintah Desa Tinggal Dibangunkan Gedung TK Pagi Suka Maju Luas 80 M2	Desa binturu Rt 05, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Kelua	Binturu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
79	1084415	21-01-2024	Ramlan	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	SDN Takulat mengusulkan : 1. Ruangan Laboraturium kumputer 2. Ruang Mushalla 3. Peninggian halaman Sekolah dengan ukuran 24 x 8 M 4. Dan pembelian Tanah Untuk membangun	Desa Takulat RT 02, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Kelua	Takulat	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diteruskan hanya peninggian halaman sekolah yang lainnya ditola	-	-	-	-	-	-	-
80	1084421	21-01-2024	Ramlan	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Semakin banyaknya siswa siswi TK Pelangi mengusulkan pengadaan tanah dengan ukuran 14 M X 30 m	Desa Takulat RT 02, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Kelua	Takulat	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
81	1085611	21-01-2024	Roklan,S.H	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Penambahan kelas/lokal utk SDN 2 Karangan Putih sebanyak 2 lokal	Desa karangan putih rt 06,	Kab. Tabalong	Kelua	Karangan Putih	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
82	1085763	21-01-2024	Roklan,S.H	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Rehab Plafon SMPN 3 Ukuran P= 14 m dan L= 7 m	Desa Karangan Putih RT.06,	Kab. Tabalong	Kelua	Karangan Putih	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
83	1106554	22-01-2024	H. Alipahnor, S.Sos	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Rehab Kantor Induk UPT Pendidikan	RT. 01, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Kelua	Pulau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
84	1106765	22-01-2024	H. Alipahnor, S.Sos	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pengurukan/peninggian Halaman SDN Pulau 2.3 krn langganan banjir setiap tahunnya	RT. 01, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Kelua	Pulau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
85	1106816	22-01-2024	H. Alipahnor, S.Sos	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pengerasan halaman Sekolah PAUD Terpadu Negeri Pembina (Tempat Parkiran), Mengingat lokasi tersebut bekas persawahan	RT. 01, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Kelua	Pulau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
86	1106927	22-01-2024	H. Alipahnor, S.Sos	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pemagaran dan Pengurukan Halaman TK Pertiwi 2 Pengadaan APE luar, Pemasangan jaringan listrik dan PDAM, serta	RT. 04, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Kelua	Pulau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
87	970962	15-01-2024	Suhaimi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Rehab total ruang kantor guru SDN Madang, karena kondisi saat ini untuk ruang guru belum permanen dan sudah tidak layak	Desa Madang RT 03, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Muara Harus	Madang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	DITERUSKAN	-	-	-	-	-	-	-
88	971087	15-01-2024	Suhaimi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pemasangan Paving Block halaman sekolah SDN Madang	Desa Madang RT 03,	Kab. Tabalong	Muara Harus	Madang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
89	992556	16-01-2024	Rahmani	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Gedung/bangunan TK yang masih kurang	Desa Harus RT.02,	Kab. Tabalong	Muara Harus	Harus	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan (aprisal dari	-	-	-	-	-	-	-
90	993878	16-01-2024	Mirhan	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pembangunan RKB, Pembuatan Pagar Keliling dan Betonisasi Halaman TK.ANAK	Mangkupum Rt. 09, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Muara Uya	Mangkupum	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
91	1005453	16-01-2024	Nuraga	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Halaman SDN 1 Palapi becek perlu adanya pemavingan	Desa Palapi RT. 01, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Muara Uya	Palapi	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
92	1005620	16-01-2024	Misran	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Perbaikan Lantai SDN Sungai Kumap yang Rapuh dan Pembuatan Pagar Sekolah	Rt.01 Sungai Kumap,	Kab. Tabalong	Muara Uya	Sungai Kumap	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
93	1031794	17-01-2024	Arsani	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Halaman Sekolah perlu Paving Block	Santuun RT.03, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Muara Uya	Santuun	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
94	1031841	17-01-2024	Arsani	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Tanpa adanaya tanda pegenal,ingin dibuatkan GAPURA	Santuun RT.03, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Muara Uya	Santuun	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Dikembalikan	usulan tidak jelas	sebutkan lokasinya dan gapura	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	1075151	19-01-2024	Sri Utari	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Halaman SDN 2.3 Ribang minta Paving Block halaman 30 x 50 M. Dan pemasangan	Ribang Rt 008, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Muara Uya	Ribang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
96	1109724	22-01-2024	Sri Utari	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Rehab kantor guru SMP 2 Muara Uya	Rt 008, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Muara Uya	Ribang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
97	1109824	22-01-2024	Achmad Syafi'i	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pemeliharaan halaman SDN 2 Pulau Kuu panjang 87m lebar 4,5m (paping blok)	Jl. Bangkar, rt 008,	Kab. Tabalong	Muara Uya	Muara Uya	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
98	1109908	22-01-2024	Sri Utari	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	TK Negeri Tunas Harapan desa Ribang belum memiliki pagar keliling	Rt 008, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Muara Uya	Ribang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
99	1110058	22-01-2024	Sri Utari	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pembangunan ruang kelas/Keramik TK Negeri Tunas Muda, karena belum ada ruang UKS di TK tersebut.	Rt 001, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Muara Uya	Ribang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
100	1110090	22-01-2024	Sri Utari	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Belum adanya alat APE luar ruangan di TK Negeri Tunas Muda	Rt 001, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Muara Uya	Ribang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
101	1110134	22-01-2024	Sri Utari	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Halaman TK Negeri Tunas Muda desa Ribang masih Tanah, maka dari itu meminta paving/cor halaman TK Negeri Tunas Muda	Rt 001, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Muara Uya	Ribang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
102	1110596	22-01-2024	Budianto	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Rehab kelas 1 - kelas 3, karena ruangan kelas rendah dan kurang standar dengan sekolah lainnya	SDN Kampung Baru, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Muara Uya	Kampung Baru	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
103	1110697	22-01-2024	Sri Utari	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	kami mengusul untuk di hapuskan/dihilangkan eks SDN 2 Ribang, letaknya berada di tengah2 pusat	Rt 008, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Muara Uya	Ribang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
104	1110781	22-01-2024	Zainal Hadi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Cor lapangan vaping blok SMP 7 22 x 11 m	Trans Danau RT 07, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Muara Uya	Pasar Batu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
105	1110829	22-01-2024	Zainal Hadi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Rehab 4 lokal kelas SDN Pasar Batu	Pasar batu RT 01, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Muara Uya	Pasar Batu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
106	1111027	22-01-2024	Suriansyah	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Tidak adanya pagar sekolah SDN 1 Simpung Layung	Simpung Layung RT.001, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Muara Uya	Simpung Layung	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
107	1111050	22-01-2024	Suriansyah	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Halaman Sekolah SDN 1 Simpung Layung perlu Paving Block	Simpung Layung RT 001, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Muara Uya	Simpung Layung	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
108	1111091	22-01-2024	Suriansyah	Kelurahan / Desa	Pelestarian Kesenian Tradisional	Masih Kurangnya Alat - alat kesenian jaranan	Simpung Layung RT.009, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Muara Uya	Simpung Layung	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
109	1111312	22-01-2024	Rusdi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	WC Rusak atau Kekurangan WC SD - SMP	Kupang Nunding RT.003, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Muara Uya	Kupang Nunding	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
110	1111333	22-01-2024	Rusdi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	WC untuk guru Rusak atau Kekurangan WC SD - SMP	Kupang Nunding RT.003, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Muara Uya	Kupang Nunding	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Dikembalikan	sebutkan nama sekolahnya	sebutkan nama sekolahnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	1111416	22-01-2024	Barhin	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Halaman sekolah SD lumbang Paving Block sekolah SD lumbang rt.02	Lumbang rt.02, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Muara Uya	Lumbang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
112	1111606	22-01-2024	Rahmadi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pembuatan MCK Sekolah Dasar Negeri Salikung Ukuran 4x5M	SDN Salikung RT.02, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Muara Uya	Salikung	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
113	1111718	22-01-2024	Barhin	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Tidak adanya bangunan TK mutiara bunda desa lumbang rt.03	Lumbang rt.03, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Muara Uya	Lumbang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
114	1111921	22-01-2024	Zainal Hadi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Ape luar dalam TK restu bunda	Trans danau RT 07, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Muara Uya	Pasar Batu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
115	1111941	22-01-2024	Zainal Hadi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Ape luar dalam TK Al madani	Pasar batu RT 02, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Muara Uya	Pasar Batu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diterus kan	-	-	-	-	-	-	-
116	921029	10-01-2024	Adha Rayadi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Paving Block SDN 02 JAING HILIR Jika panas berdebu jika hujan becek.	Desa Kasiau Raya RT 03	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Kasiau Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diterus kan	-	-	-	-	-	-	-
117	921075	10-01-2024	Adha Rayadi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pembuatan Pagar SDN 02 JAING HILIR	Desa Kasiau Raya RT 03	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Kasiau Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diterus kan	-	-	-	-	-	-	-
118	921102	10-01-2024	Adha Rayadi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	KURANGNYA WC PERLU PENAMBAHAN WC DI SDN 02 JAING HILIR	Desa Kasiau Raya RT 03, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Kasiau Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diterus kan	-	-	-	-	-	-	-
119	921144	10-01-2024	Adha Rayadi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	RUANG KELAS SDN 02 JAING HILIR PERLU REHAB	Desa Kasiau Raya RT 03	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Kasiau Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diterus kan	-	-	-	-	-	-	-
120	921185	10-01-2024	Adha Rayadi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	PEMBUATAN PAGAR KELILING SDN 01 KASIAU RAYA	Desa Kasiau Raya RT 01	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Kasiau Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diterus kan	-	-	-	-	-	-	-
121	921229	10-01-2024	Adha Rayadi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	KURANGNYA WC PERLU PENAMBAHAN WC DI SDN 01 KASIAU RAYA	Desa Kasiau Raya RT 01, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Kasiau Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diterus kan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
122	921281	10-01-2024	Adha Rayadi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	PERLU COR BIOPORI PADA HALAMAN SDN 01 KASIAU RAYA KARENA	Desa Kasiau Raya RT 01, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Kasiau Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
123	921311	10-01-2024	Adha Rayadi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	RUANG KELAS DI SDN 01 KASIAU RAYA PERLU REHAB PADA BAGIAN ATAP YANG SUDAH RUSAK	Desa Kasiau Raya RT 01, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Kasiau Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
124	973523	15-01-2024	Saipul Rahman ,S.Pd.	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Program pengelolaan pendidikan di SDN KAPAR	Jalan Mufakat, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Kapar	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
125	975575	15-01-2024	Agoes Noor Zain,A.Md	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	SDN 1.2 Belimbing Raya Belum Memiliki Tempat Parkir	Jl.Garuda Rt. 12 Kelurahan Belimbing Raya, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Belimbing Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
126	975911	15-01-2024	Agoes Noor Zain,A.Md	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Sanggar Seni sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi para pelajar dalam mengembangkan dan meyalurkan potensi bakat yang dimiliki siwa siswi SDN 1.2 Belimbing Raya	Jl.Garuda Rt. 12 Kelurahan Belimbing Raya, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Belimbing Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
127	1007154	16-01-2024	Eddy Rahmanto	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	pembangunan pagar sekolah TK KARYA BAKTI	desa maburai RT 003, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Maburai	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
128	1015351	17-01-2024	Jati Akbar,S.IP. MM, Kp	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	1. Pembuatan WC 4 bilik dan wastafel 2. Sumur bor dan tandon untuk aktifitas sekolah	Desa Kasiau RT. 004, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Kasiau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Dikembalikan	sebutkan nama sekolahnya	sebutkan nama sekolahnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	1015623	17-01-2024	Jati Akbar,S.IP. MM, Kp	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	1. Penerbitan sertifikat sekolah 2. pemerataan jalan masuk sekolah 3. pembuatan pagar sekolah 4. pembuatan tempat wudhu 5. pengadaan Meubelair 6. penghijauan jalan	Desa Kasiau RT. 002, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Kasiau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Dikembalikan	sebutkan nama sekolahnya	sebutkan nama sekolahnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
130	1015969	17-01-2024	Eddy Rahmanto	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	belum memiliki ruang UKS	DESA MABURAI RT 003,	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Maburai	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Dikembalikan	sebutkan nama sekolahnya	sebutkan nama sekolahnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	1016141	17-01-2024	Eddy Rahmanto	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	belum memiliki ruang untuk kepala sekolah TK KARYA BAKTI	desa maburai RT 003,	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Maburai	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
132	1016312	17-01-2024	Eddy Rahmanto	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	belum memiliki ruang Aula untuk TK KARYA BAKTI	desa maburai RT 003,	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Maburai	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
133	1016484	17-01-2024	Eddy Rahmanto	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	belum memiliki ruang untuk Gudang	desa maburai RT 003,	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Maburai	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Dikembalikan	sebutkan nama sekolahnya	sebutkan sekolahnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	1016570	17-01-2024	Jati Akbar,S.IP. MM, Kp	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pemasangan Paving Block halaman sekolah	Desa Kasiau RT. 003,	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Kasiau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Dikembalikan	sebutkan nama sekolahnya	sebutkan nama sekolahnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	1017146	17-01-2024	Eddy Rahmanto	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Perbaikan pagar depan sekolah SDN Maburai	desa maburai RT 003, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Maburai	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
136	1017479	17-01-2024	Eddy Rahmanto	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pembangunan pagar sekolah SDN Maburai kiri kanan dan belakang	desa maburai RT 003, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Maburai	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
137	1017700	17-01-2024	Eddy Rahmanto	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Rehab ruang kelas 3	desa maburai RT 003,	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Maburai	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Dikembalikan	sebutkan nama sekolahnya	sebutkan nama sekolahnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	1018033	17-01-2024	Eddy Rahmanto	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Rehab WC siswa SDN Maburai	desa maburai RT 003,	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Maburai	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diterus kan	-	-	-	-	-	-	-
139	1018387	17-01-2024	Eddy Rahmanto	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pembangunan ruang aula SDN Maburai	desa maburai RT 003,	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Maburai	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diterus kan	-	-	-	-	-	-	-
140	1026556	17-01-2024	Eddy Rahmanto	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Sekolah TK, SD HIDAYATULLAH belum ada pagar halam belum ada paving	desa maburai RT 008,	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Maburai	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diterus kan	-	-	-	-	-	-	-
141	1026762	17-01-2024	Eddy Rahmanto	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pembangunan asrama panti dan ruang belajar SMP HIDAYATULLAH	desa maburai RT 008, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Maburai	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diterus kan	-	-	-	-	-	-	-
142	1032380	17-01-2024	Khairullah	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Kurangnya dari segi keamanan sekolah dikarenakan kondisi pagar yang belum selesai.	JL. PERTAMINA RAYA RT. 05 DESA MASUKAU	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Masukau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Dikembalikan	sebutkan nama sekolahnya	sebutkan nama sekolahnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	1034824	18-01-2024	Muhammad Rijani,S.Pt	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	RKB 3 buah ruang kelas baruSDN 2 Pembataan	SD Negeri 2 Pembataan	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Pembataan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diterus kan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
144	1034826	18-01-2024	Muhammad Rijani,S.Pt	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	perluasan ruang kantor guru 12 m x 4,5 m L = 54 m2	SD Negeri 2 Pembataan	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Pembataan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
145	1034829	18-01-2024	Muhammad Rijani,S.Pt	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	pembuatan teras & kanopi musholla 15 m x 5 m L = 75 m2	SD Negeri 2 Pembataan	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Pembataan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
146	1043885	18-01-2024	Muhammad Rijani,S.Pt	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Revitalisasi Sarana Olahraga lapangan bola basket	SMPN 4 TANJUNG	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Pembataan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
147	1044033	18-01-2024	Muhammad Rijani,S.Pt	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Rehab Mushola	SMPN 4 TANJUNG, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Pembataan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
148	1044081	18-01-2024	Muhammad Rijani,S.Pt	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Penambahan ruang kelas baru (RKB)	SMPN 4 TANJUNG	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Pembataan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
149	1044908	18-01-2024	Muhammad Rijani,S.Pt	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pengaspalan halaman sekolah- karena krikil jadi slip (paping lebih di sarankan karena	SMPN 4 TANJUNG	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Pembataan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
150	1074966	19-01-2024	Muhammad Rijani,S.Pt	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	tidak punya gudang jadi benda di taruh di parkiran semakin hari aset semakin bertambah	SMKN 1 TANJUNG	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Pembataan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	kewenangan provinsi	-	-	-	-	-	-	-
151	1074977	19-01-2024	Muhammad Rijani,S.Pt	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	kurang lahan parkir sehingga parkir hingga ke jalan	SMKN 1 TANJUNG , Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Murung Pudak	Pembataan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	kewenangan provinsi	-	-	-	-	-	-	-
152	974167	15-01-2024	Rahmadi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Kekurangan ruang belajar siswa SDN 1 Sei Rukam II, jadi perlu penambahan 1	Desa Sei Rukam II Rt 01 ,	Kab. Tabalong	Pugaan	Sungai Rukam II	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
153	994388	16-01-2024	Pansyah	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Perlu Pagar sekolah Tk di Rt 03	Desa Jirak Rt 03, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Pugaan	Jirak	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
154	994977	16-01-2024	Pansyah	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pembuatan Mushalla SDN Jirak Rt 03 untuk menunjang kegiatan anak	Desa Jirak Rt 03, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Pugaan	Jirak	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
155	997156	16-01-2024	Pansyah	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Belum adanya sekat untuk kantor sm Ruang belajar serta Toilet(WC) Sekolah Tk Paud	Desa Jirak RT 03, Kab. Tabalong	N	Pugaan	Jirak	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
156	1005757	16-01-2024	H. Hasan Asy''ari	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Tidak adanya tempat ibadah di sekolah	Desa Sei Rukam 1 Rt 03 , Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Pugaan	Sungai Rukam I	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Dikembalikan	sebutkan nama sekolahnya	sebutkan nama sekolahnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
157	1005800	16-01-2024	H. Hasan Asy''ari	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	sarana dan prasarana pendidikan. peninggian halaman SDN 1.2	jln a yani desa sei rukam 1 rt 3	Kab. Tabalong	Pugaan	Sungai Rukam I	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
158	1005916	16-01-2024	H. Hasan Asy''ari	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Kurangnya sarana dan prasarana permainan edukatif untuk TK Paud	Desa Sei Rukam 1 Rt 01,	Kab. Tabalong	Pugaan	Sungai Rukam I	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
159	993163	16-01-2024	Mahyudin	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Belum terbangunnya TK/PAUD/TPA di beberapa wilayah di Desa	Desa Juai RT 6, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Tanjung	Juai	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	DITERUSKAN	-	-	-	-	-	-	-
160	1013837	17-01-2024	Muhammad Jahyani, S.AP	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pembuatan TK Negerl Pembina di RT.005	Jl. Jend. A. Yani RT.005,	Kab. Tabalong	Tanjung	Jangkung	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	DITERUSKAN	-	-	-	-	-	-	-
161	1081400	20-01-2024	Akhmad Tarmizi, S.AP	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pembangunkan pagar sekolah SDN Banyu Tajun	Jln.Banyu Tajun RT.02 Kec.Tanjung	Kab. Tabalong	Tanjung	Banyu Tajun	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	DITERUSKAN	-	-	-	-	-	-	-
162	914294	10-01-2024	Linawati	Kelurahan / Desa	Kurikulum Pendidikan	Pembuatan Gedung Perpustakaan SDN Pamarangan Raya	Pamarangan Kanan Rt 02,	Kab. Tabalong	Tanta	Pamarangan Kanan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	Diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
163	914418	10-01-2024	Rahmadi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pengurukan Dan Pengecoran Lapangan SDN Padangin	Desa Padangin Rt 03,	Kab. Tabalong	Tanta	Padangin	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
164	914616	10-01-2024	M Syahrialuddin	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	SDN 2 MANGKUSIP Pembuatan Pagar Sekolah	Mangkusip RT 02, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Tanta	Mangkusip	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
165	915084	10-01-2024	M Syahrialuddin	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	TK NEGERI MANGKUSIP Rehab Rumah Guru Pembuatan Rumah Baru Guru Yang Rusak Berat	Mangkusip RT 02, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Tanta	Mangkusip	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
166	915751	10-01-2024	M Syahrialuddin	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	SEKOLAH MIS Perbaikan Gedung Sekolah Mis Kondisi Rusak dan Perlu perbaikan	Mangkusip RT 06,	Kab. Tabalong	Tanta	Mangkusip	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Dibatalkan	-	mhn disebutkan nama sekola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	915992	10-01-2024	M Syahrialuddin	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	SEKOLAH MIS Honor Guru Sekolah Kurangnya Keuangan Untuk Guru Honor	Mangkusip RT 06, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Tanta	Mangkusip	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Dibatalkan	-	mhn disebutkan nama sekolahnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	916299	10-01-2024	Arie Kurniawan	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Untuk menjaga keamanan siswa /siswi SDN DAHUR Ingin Dibuatkan Pagar Sekolah dengan Ukuran 45 m x 38 m	Barimbun rt.04, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Tanta	Barimbun	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-	-
169	919156	10-01-2024	Rajudin	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pemasangan/pengadaan paving halaman SMPN 3 Tanta 60 x 60 meter	walangkir, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Tanta	Walangkir	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
170	919176	10-01-2024	Rajudin	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Perbaikan atap kelas SDN Walangkir Rt. 01 - Rt. 04	walangkir, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Tanta	Walangkir	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
171	919203	10-01-2024	Rajudin	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pembuatan gawang futsal SMPN 3 Tanta (Walangkir) 2 buah	walangkir, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Tanta	Walangkir	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
172	919217	10-01-2024	Rajudin	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pembuatan rangka atap baja di halaman sekolah SDN Walangkir	Walangkir, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Tanta	Walangkir	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
173	920819	10-01-2024	Nurul Hikmah	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Agar anak anak di sekolah SDN Bingkai Sari Desa Murung Baru tidak terjatuh kesungai Tabalong, kami mohon Dibuatkan Pagar Pembatas Sungai.	Desa Murung Baru, RT.01, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Tanta	Murung Baru	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	di terus kan	-	-	-	-	-	-	-
174	921282	10-01-2024	Syakerani	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pada saat ini letak ruang tempat kegiatan belajar mengajar terpisah jadi tiga tempat dan halaman	Jln. Desa lukbayur Rt.02, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Tanta	Lukbayur	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
175	921593	10-01-2024	Bumukti	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Belum ada sekolah tingkat menengah atas (SMK Pertambangan)	Desa Padang Panjang Rt. 04, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Tanta	Padang Panjang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
176	922076	10-01-2024	Bumukti	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Halaman Sekolah licin, becek dan banyak tumbuhan tanaman liar yang dapat mengganggu aktivitas belajar di luar kelas	SMPN 5 Tanta, Jalan Mangaris Rt. 04 Padang Panjang	Kab. Tabalong	Tanta	Padang Panjang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
177	922114	10-01-2024	Bumukti	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Halaman sekolah becik dan licin pada saat musim hujan	SDN Laburan Desa Padang Panjang Rt. 01	Kab. Tabalong	Tanta	Padang Panjang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
178	922134	10-01-2024	Bumukti	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Belum ada tempat wudhu di mushalla SDN 1 Padang Panjang	SDN 1 Padang Panjang,	Kab. Tabalong	Tanta	Padang Panjang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
179	922155	10-01-2024	Bumukti	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Belum ada tempat wudhu di mushalla SDN Laburan	SDN Laburan, Desa Padang Panjang Rt. 01	Kab. Tabalong	Tanta	Padang Panjang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
180	923951	10-01-2024	Junadi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pembangunan Pagar keliling dan pintu gerbang SDN Urata	Puain Kanan RT 07, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Tanta	Puain Kanan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
181	924389	11-01-2024	Dedy Unjang, S.E	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pagar sekolah SMPN 2 Tanta belum memadai (153m)	Warukin RT 06,	Kab. Tabalong	Tanta	Warukin	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
182	924394	11-01-2024	Dedy Unjang, S.E	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pagar SDN Warukin belum permanen (53m)	Warukin RT 03,	Kab. Tabalong	Tanta	Warukin	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
183	924398	11-01-2024	Dedy Unjang, S.E	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	SDN Warukin memerlukan Meubelair Meja dan Kursi Siswa (50 Set) dan Meja	Warukin RT 03, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Tanta	Warukin	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
184	924405	11-01-2024	Dedy Unjang, S.E	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	SDN Haus perlu paving block halaman untuk mencegah terkikisnya	Warukin RT 08, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Tanta	Warukin	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diterus kan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
185	924468	11-01-2024	Dedy Unjang, S.E	Kelurahan / Desa	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat	Pagar dan Gapura Balai Adat Warukin	Warukin RT 06, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Tanta	Warukin	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (Diteruskan ke Musrenbang Kecam	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
186	924469	11-01-2024	Dedy Unjang, S.E	Kelurahan / Desa	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat	Penyelesaian Rumah Betang/ Rumah Adat	Warukin RT 06, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Tanta	Warukin	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (diteruskan ke Musrenbang Kecamatan)	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
187	925054	11-01-2024	Muyadi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Masih Rusaknya halaman SDN Tanta Hulu	Tanta Hulu RT 02, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Tanta	Tanta Hulu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
188	942269	12-01-2024	Budi Irianto,S.P	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pemasangan Paving Block halaman SDN Tanta	Desa Tanta RT. 03, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Tanta	Tanta	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
189	942805	12-01-2024	Budi Irianto,S.P	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pembuatan pagar keliling TK Pembina Negeri Tanta	Desa Tanta RT. 03	Kab. Tabalong	Tanta	Tanta	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
190	978216	15-01-2024	Mulyadi	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Halaman yang sering banjir dan becek serta pemasangan pagar untuk keamanan	Desa Pulau Ku'u RT 03, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Tanta	Pulau Ku"u	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Dikembalikan	mhn sebutkan nama sekolah	mhn sebutkan nama sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-
191	980507	15-01-2024	Rajuli	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Permbuatan Pagar SDN Tamiyang 480 M	Tamiyang RT.01, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Tanta	Tamiyang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
192	1603216	15-03-2024	ARIANTO, S.IP, M.Si	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan prasarana SMA	Perlu pagar belakang karena berbatasan dengan Sungai dan Sarana lain yang masih kurang	Desa Tanta, Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	Tanta	Tanta	Provinsi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi TAPD	-	Diteruskan ke SKPD	-	-	Pada Prinsipnya Disdikbud selalu meningkatkan Sarana dan Prasarana Sekolah, akan diakomodir dgn memerhatikan ketersediaan anggaran & tingkat urgensi (priorit	-	-	0	-	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
193	1295491	31-01-2024	Epatha	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Ada beberapa ruangan kelas yang sudah rusak	Desa Kinarum RT. 01,	Kab. Tabalong	Upau	Kinarum	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
194	1295515	31-01-2024	Epatha	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Halaman sering becek saat musim hujan di SDN Sungai Rumbia, SDN 1 Kinarum	Desa Kinarum RT.01, 02, dan 03,	Kab. Tabalong	Upau	Kinarum	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daera	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
195	1295622	31-01-2024	Epatha	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Tidak ada pagar permanen di SDN Sungai Rumbia, SDN 1 Kinarum dan SDN 2 Kinarum, Sehingga anak-anak dapat berkeliaran di luar lingkungan sekolah.	Desa Kinarum RT. 01, 02 dan 03, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Upau	Kinarum	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
196	1295645	31-01-2024	Epatha	Kelurahan / Desa	Pemeliharaan /Pengembangan Drainase	Parit di SDN 2 Kinarum dangkal sehingga air kadang menggenang ke halaman sekolah	Desa Kinarum RT. 03, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Upau	Kinarum	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diteruskan Ke Musrenbang Kecamatan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
197	1296019	31-01-2024	Hariadi Nata	Kelurahan / Desa	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pembangunan pusat kegiatan budaya	Desa Pangelak RT 02, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Upau	Pangelak	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan	-	diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
198	1296358	31-01-2024	Nawiyanto	Kelurahan / Desa	Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keagamaan dan Lainnya (Hibah)	SDN Masingai I, telah memiliki sebuah Mushala yg sampai saat ini pembangunannya belum selesai 100%, sehingga perlu untuk segera dilanjutkan pembangunannya	masingai I, rt. 07, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Upau	Masingai I	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diteruskan	-	Diteruskan	-	-	-	-	-	-	-
199	1296395	31-01-2024	Nawiyanto	Kelurahan / Desa	Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan	demi meningkatkan rasa aman dalam proses belajar mengajar maka perlu untuk segera di bangun pagar keliling di SD	masingai I, rt. 07, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Upau	Masingai I	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diteruskan	-	Diteruskan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
200	1296421	31-01-2024	Nawiyanto	Kelurahan / Desa	Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan	Banyaknya jumlah murid yang belajar di SDN Masingai I, sehingga perlu adanya penambahan Meubelair	masingai I, rt. 07, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Upau	Masingai I	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diterus kan	-	Diteruskan	-	-	-	-	-	-
201	1296464	31-01-2024	Nawiyanto	Kelurahan / Desa	Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan	Rehab rumah kepala sekolah SDN Masingai I, karena keadaan yang ada sudah memperihatinkan	masingai I, rt. 07, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Upau	Masingai I	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diterus kan	-	Diteruskan	-	-	-	-	-	-
202	1298595	31-01-2024	Hariadi Nata	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Belum ada Pagar untuk Sekolah TKN Pembina Upau	RT.004, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Upau	Pangelak	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	DITERUSKAN	-	-	-	-	-	-	-
203	1298702	31-01-2024	Hariadi Nata	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidi	Pemasangan saluran instalai air PDAM/PAM	RT.004, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Upau	Pangelak	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	DITERUSKAN	-	-	-	-	-	-	-
204	1298755	31-01-2024	Hariadi Nata	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Perlu tamhaban RKB Pembangunan Gedung TKN Pembina Upau secepatnya	RT.004, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Upau	Pangelak	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	DITERUSKAN	-	-	-	-	-	-	-
205	1298808	31-01-2024	Hariadi Nata	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Minta pasangkan Instalasi Lisrik TK Negeri Pembina Upau secepatnya	RT.004, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Upau	Pangelak	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	DITERUSKAN	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
206	1298866	31-01-2024	Hariadi Nata	Kelurahan / Desa	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Permintaan Laptop untuk kegiatan ADM TKN Pembina Upau b	RT.004, Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	Upau	Pangelak	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterus kan	-	DITERUSKAN	-	-	-	-	-	-	-

BAB. III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1. Visi dan Misi Pembangunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah ;

"Terwujudnya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong"

Misi dari penerjemahan Visi diatas adalah ;

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan Kebudayaan yang kuat
2. Mewujudkan akses yang meluas, merata dan berkeadilan
3. Mewujudakan pembelajaran yang bermutu
4. Mewujudkan pelestarian kebudyaan dan pengembangan Bahasa
5. Mewujudkan pengembangan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Permaslahan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 -2019.

1. Belum meratanya aksesabilitas Pendidikan anak usia dini yang berkualitas.
2. Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun belum maksimal
3. Peningkatan kualitas pembelajaran belum maksimal
4. Peningkatan manajemen Guru
5. Peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa (pendidikan masyarakat) belum maksimal
6. Pengentasanan keniksraan belum merata
7. Peningkatan pendidikan keluarga belum seperti yang diharapkan
8. Rendahnya mutu kemahiran membaca dan semakin punahnya penggunaan Bahasa dan sastra daerah
9. Gejala memudarnya karakter siswa dan jati diri bangsa
10. Minimnya apresiasi seni dan kreativitas karya budaya
11. Pelestarian warisan budaya belum efektif.

3.1.3. Visi dan Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan

Visi pembangunan daerah Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 yaitu ;

" **Visi: "Kalimantan Selatan Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibukota Negara".**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu;

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus Pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

3.1.4. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024, Visi jangka menengah Kabupaten Tabalong sebagai berikut :

"Menuju Kabupaten Tabalong Yang Lebih Agamais, Sejahtera dan Mandiri "

Untuk mencapai Visi sebagaimana tersebut diatas telah dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang lebih agamais;
2. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
3. Mewujudkan kemandirian daerah;

3.1.5. Telaah Kesepakatan Global

Dengan adanya permaslahan yang menjadi perhatian dunia dan juga Indonesia yakni; (i). kemiskinan; (ii). Pertumbuhan ekonomi yang relative stagnan; (iii). Perubahan Iklim, maka tujuan pembangunan sudah semestinya mengarah pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan dengan focus pada tiga (3) pilar

pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar sosial, ekonomi dan lingkungan secara sinergis. Hal ini telah menjadi komitmen dan kesepakatan Negara-Negara sebagai agenda pembangunan Global Pasca 2015.

Egenda pembangunan Global Pasca Mellenium Development Goals (MDGs) 2015 menjadi Sustainable Develoment Goals (SDGs) Periode 2015 – 2030, merupakan tantangan pembangunan daerah untuk mengakomodasi target-target 17 tujuan pembangunann dalam perencanaan pembangunan daerah. ***17 (tujuh belas) target pembangunan berkelanjutan*** meliputi :

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan;
4. Pendidikan berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air bersih dan sanitasi;
7. Energi bersih dan terjangkau;
8. Pertumbuhan ekonomi dan Pekerjaan yang Layak;
9. Industri,Inovasi dan Infrastruktur;
10. Menguragi kesenjangan;
11. Keberlanjutan kota dan Komunitas;
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung jawab;
13. Aksi terhadap iklim;
14. Kehidupan bawah laut;
15. Kehidupan didarat;
16. Institusi pengadilan yang Kuat dan Kedamaian;
17. Kemitraan untuk Mencapai tujuan;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Tabalong, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, yaitu berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong akan dapat mengetahui apa yang

harus dilaksanakan dalam memenuhi visi misi dalam kurun waktu 1 hingga 5 tahun ke depan.

Adapun tujuan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong ini adalah :

1. Meningkatkan pelayanan dan Pembinaan PAUD;
2. Meningkatkan pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah;
3. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan pendidikan sekolah dasar;
4. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama;
5. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan pendidikan kesetaraan;
7. Meningkatkan layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah pembangunan bidang pendidikan diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024. Sasaran untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut;

1. Meningkatnya pelayanan dan Pembinaan PAUD;
2. Meningkatnya pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah;
3. Meningkatnya pelayanan dan pembinaan pendidikan sekolah dasar;
4. Meningkatnya pelayanan dan pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama;
5. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Meningkatnya pelayanan dan pembinaan pendidikan kesetaraan;
7. Meningkatnya layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya adalah menuangkannya ke dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.

Pada tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong merencanakan 5 program, 15 Kegiatan (induk) 16 Kegiatan (APBD Perubahan) dan 63 Sub kegiatan (induk) 75 Sub kegiatan (APBD Perubahan). 5 (lima) program tersebut adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota jumlah kegiatan 7 (induk) dan Sub Kegiatan 14 (induk) dengan jumlah
   Pagu Rp. 362.258.730.181 (induk) /
   Pagu Rp. 364.532.175.438 (APBD Perubahan);
b. Program Pengelolaan Pendidikan jumlah kegiatan 4 dan Sub Kegiatan 44 (induk) dengan jumlah :
   Pagu Rp. 66.571.540.582 (induk)
   Pagu Rp. 132.117.396.171 (APBD Perubahan);
c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan jumlah kegiatan 1 dan Sub Kegiatan 2 dengan jumlah :
   Pagu Rp. 8.290.533.981 (induk)
   Pagu Rp. 9.967.277.919 (APBD Perubahan);
d. Program Pengembangan Kebudayaan jumlah kegiatan 2 dan Sub Kegiatan 2 dengan jumlah :
   Pagu Rp. 2.801.600.760 (induk)
   Pagu Rp. 3.345.289.652 (APBD Perubahan);
e. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya jumlah kegiatan 1 dan Sub Kegiatan 1 dengan jumlah :
   Pagu Rp. 703.503.193 (induk);
   Pagu Rp. 869.703.193 (APBD Perubahan);

Selanjutnya agar dalam penyusunan program dan kegiatan dapat terkendali dan terkoordinasi secara finansial, maka perlu ditetapkan plafon anggaran. Dengan menetapkan plafon anggaran diharapkan jumlah anggaran belanja yang diusulkan tidak melebihi plafon anggaran yang ditetapkan. Dengan demikian efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber dana akan tercipta.

Plafon anggaran pada dasarnya merupakan batas maksimal alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan, dalam hal ini program maupun kegiatan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Plafon anggaran yang diusulkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong untuk tahun 2024 dari sumber dana APBD Kabupaten Tabalong adalah sejumlah

Pagu Rp. 440.625.908.697 (induk),-

Pagu Rp. 510.831.842.373 (APBD Perubahan);

Dengan tersusunnya tujuan dan sasaran, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat menjabarkannya dalam program dan kegiatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja beserta pendanaan program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 yang bersumber dari dana APBD yaitu sebesar :

Pagu Rp. 440.625.908.697 (induk),-

Pagu Rp. 510.831.842.373 (APBD Perubahan);

secara detail dapat dilihat pada ***Tabel 4.1*** berikut ini.

4.1.Rencana kerja beserta pendanaan program dan kegiatan prioritas Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Tabel : 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Tabalong

Kode Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kabupaten Tabalong**	**Nilai AKIP**	**BB**	**362,258,730,181**	**Kabupaten Tabalong**	**Nilai AKIP**	**BB**	**363,323,877,000**
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	100%	12,231,839	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	100%	30,000,000
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan.	7 Dokumen	12,231,839	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan.	7 Dokumen	30,000,000
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKM	88,10	358,783,877,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKM	88,10	358,783,877,000
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gajih dan Tunjangan yang dibayar	14 Bulan	358,783,877,000	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gajih dan Tunjangan yang dibayar	14 Bulan	358,783,877,000
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				84,490,356				90,000,000
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				84,490,356				90,000,000

Kode Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKM	88,10	199,957,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKM	88,10	280,000,000
1	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Tahun	81,504,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Tahun	100,000,000
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Tabalong	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	1 Tahun	12,236,000	Kabupaten Tabalong	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	1 Tahun	30,000,000
1	01	01	2.05	09	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Tabalong	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	538 Orang	106,216,400	Kabupaten Tabalong	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		150,000,000
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Tabalong	IKM	88,10	1,307,877,726	Kabupaten Tabalong	IKM	88,10	1,580,000,000
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Tabalong	Jumlah ATK di lingkungan Kantor yang dibeli	100%	344,128,879	Kab Tabalong	Jumlah ATK di lingkungan Kantor yang dibeli	100%	450,000,000
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Barang Cetakan Kantor yang tersedia	12 Bulan	28,958,847	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Barang Cetakan Kantor yang tersedia	12 Bulan	30,000,000
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	934,790,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	1,100,000,000

Kode Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tabalong	IKM	88,10	1,426,620,000	Kabupaten Tabalong	IKM	88,10	1,750,000,000
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Pendidikan	Terbayarnya rekening listrik, air dan komunikasi 12 Bulan	207,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Pendidikan	Terbayarnya rekening listrik, air dan komunikasi 12 Bulan	350,000,000
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibayar	14 Bulan	1,219,180,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibayar	14 Bulan	1,400,000,000
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tabalong	IKM	88,10	443,676,060	Kabupaten Tabalong	IKM	88,10	810,000,000
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	4 Mobil, 35 Sepeda Motor	178,390,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	4 Mobil, 35 Sepeda Motor	250,000,000

Kode Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	01	2.09	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tabalong	Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	46,930,000	Kabupaten Tabalong	Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	60,000,000
1	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	12 Bulan	218,356,060	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	12 Bulan	500,000,000
1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				**119,900,001,582**				**133,706,847,701**
1	01	02	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Kabupaten Tabalong**	**APK dan APM SD**	**106,20,- dan 99,90**	**61,627,905,508**	**Kabupaten Tabalong**	**APK dan APM SD**	**106,20,- dan 99,90**	**64,566,955,768**
1	01	02	2.01		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Tabalong, Haruai, Kembang Kuning	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 Ruang	681,120,000	Kab. Tabalong, Haruai, Kembang Kuning	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 Ruang	681,120,000
						Kab. Tabalong, Muara Uya, Lumbang				Kab. Tabalong, Muara Uya, Lumbang			
1	01	02	2.01		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Tabalong, Muara Uya, Uwie	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (DAK Fisik)	1 Unit	371,150,000	Kab. Tabalong, Muara Uya, Uwie	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (DAK Fisik)	1 Unit	371,150,000

Kode Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	02	2.01	22	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Tabalong, Haruai, Seradang	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah (APBD)	3 Unit	1,005,951,500	Kab. Tabalong, Haruai, Seradang	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah (APBD)	3 Unit	1,005,951,500
						Kab. Tabalong, Tanjung, Jangkung	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah (DAK)			Kab. Tabalong, Tanjung, Jangkung	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah (DAK)		
						Kab. Tabalong, Muara Uya, Uwie	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah (DAK)			Kab. Tabalong, Muara Uya, Uwie	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah (DAK)		
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Pembangunan sarana dan prasarana sekolah dasar	13 Sekolah	3,124,668,803	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Pembangunan sarana dan prasarana sekolah dasar	13 Sekolah	4,000,000,000
1	01	02	2.01		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Tabalong, Bintang Ara, Bumi Makmur	Terpenuhinya Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	1 Unit	340,425,000	Kab. Tabalong, Bintang Ara, Bumi Makmur	Terpenuhinya Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	1 Unit	340,425,000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Tabalong, Tanjung, Juai	Terlaksananya rehab ruang Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Ruang	233,500,000	Kab. Tabalong, Tanjung, Juai	Terlaksananya rehab ruang Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Ruang	233,500,000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Tabalong, Bintang Ara, Panaan-Kuwari	Terlaksananya rehab Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	1 Unit	240,450,000	Kab. Tabalong, Bintang Ara, Panaan-Kuwari	Terlaksananya rehab Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	1 Unit	240,450,000

Kode Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Tabalong, 8 (delapan) Kecamatan	Tercukupinya perlengkapan belajar mengajar di sekolah	1 Kegiatan (957 Paket)	2,182,560,730		Tercukupinya perlengkapan belajar mengajar di sekolah	1 Kegiatan (957 Paket)	2,182,560,730
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan	Terpenuhinya pengadaan laptop untuk operator dapodik sekolah dasar	1 Kegiatan (126 Paket)	1,419,180,000		Terpenuhinya pengadaan laptop untuk operator dapodik sekolah dasar	1 Kegiatan (126 Paket)	1,419,180,000
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya kualitas dan karakter peserta didik pendidikan Sekolah Dasar	100%	793,583,329	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya kualitas dan karakter peserta didik pendidikan Sekolah Dasar	100%	900,000,000
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Berkembangnya Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	863 orang	1,075,022,018	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Berkembangnya Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	863 orang	1,200,000,000
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya kualiltas kelembagaan pendidikan sekolah dasar	3 Kegiatan (221 Satuan Pendidikan)	7,298,423,640	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya kualiltas kelembagaan pendidikan sekolah dasar	3 Kegiatan (221 Satuan Pendidikan)	7,298,423,640
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselengganya Pembelajaran di Satuan Pendidikan	221 Satuan Pendidikan	24,481,830,000	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselengganya Pembelajaran di Satuan Pendidikan	221 Satuan Pendidikan	25,000,000,000
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		443 orang	271,946,972	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		443 orang	271,946,972

Kode Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Kab. Tabalong, Muara Uya, Kampung Baru	Terbangunnya laboratorium komputer	4 Unit	1,011,372,000	Kab. Tabalong, Muara Uya, Kampung Baru	Terbangunnya laboratorium komputer	4 Unit	1,011,372,000
						Kab. Tabalong, Muara Uya, Uwie				Kab. Tabalong, Muara Uya, Uwie			
						Kab. Tabalong, Haruai, Lampahungin				Kab. Tabalong, Haruai, Lampahungin			
						Kab. Tabalong, Upau, Masingai				Kab. Tabalong, Upau, Masingai			
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	223 orang	137,785,180	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	223 orang	200,000,000
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Tabalong, Haruai, Surian	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Kelas Baru	13 Ruang	6,261,511,766	Kab. Tabalong, Haruai, Surian	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Kelas Baru	13 Ruang	6,261,511,766
						Kab. Tabalong, Haruai, Kembang Kuning				Kab. Tabalong, Haruai, Kembang Kuning			
						Kab. Tabalong, Jaro, Lano				Kab. Tabalong, Jaro, Lano			
						Kab. Tabalong, Murung Pudak, Belimbing Raya, Pembataan, Mabuun,				Kab. Tabalong, Murung Pudak, Belimbing Raya, Pembataan, Mabuun,			

Kode Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Tabalong, Pugaan (Sei Rukam I), Haruai (Halong)	Terpenuhinya Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4 Unit (4 sekolah)	684,653,350	Kab. Tabalong, Pugaan (Sei Rukam I), Haruai (Halong)	Terpenuhinya Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4 Unit (4 sekolah)	850,000,000
					Penyelengaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		Terpenuhinya Jumlah Kegiatan kurikulum dan penilaian Pendidikan Sekolah Dasar	5 Kegiatan (221 SD)	1,099,364,160		Terpenuhinya Jumlah Kegiatan kurikulum dan penilaian Pendidikan Sekolah Dasar	5 Kegiatan (221 SD)	1,099,364,160
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya rehab ruang kelas sekolah	39 Ruang	8,913,407,060	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya rehab ruang kelas sekolah	39 Ruang	10,000,000,000
						Kab. Tabalong, Murung Pudak, Masukau, Mabuun, Pembataan,				Kab. Tabalong, Murung Pudak, Masukau, Mabuun, Pembataan,			
						Kab. Tabalong, Banua Lawas, Ds Banua Lawas, Ds Habau				Kab. Tabalong, Banua Lawas, Ds Banua Lawas, Ds Habau			
						Kab. Tabalong, Tanjung, Mahe Seberang				Kab. Tabalong, Tanjung, Mahe Seberang			

Kode Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kab. Tabalong, Kelua, Kelurahan Pulau, Pasar Panas				Kab. Tabalong, Kelua, Kelurahan Pulau, Pasar Panas			
						Kab. Tabalong, Jaro, Purui, Namun, Muang				Kab. Tabalong, Jaro, Purui, Namun, Muang			
						Kab. Tabalong, Muara Uya, Binjai				Kab. Tabalong, Muara Uya, Binjai			
						Kab. Tabalong, Haruai, Bongkang				Kab. Tabalong, Haruai, Bongkang			
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Kab. Tabalong**	**APK dan APM SMP**	**111,29 dan 98,58**	**29,973,213,832**	**Kab. Tabalong**	**APK dan APM SMP**	**111,29 dan 98,58**	**38,768,241,020**
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Tabalong, Muara Uya, Salikung	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 Ruang	800,539,728	Kab. Tabalong, Muara Uya, Salikung	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 Ruang	800,539,728
						Kab. Tabalong, Banua Lawas, Pematang				Kab. Tabalong, Banua Lawas, Pematang			
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Tabalong, Jaro, Jaro	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 Unit	231,999,600	Kab. Tabalong, Jaro, Jaro	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 Unit	231,999,600

Kode Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Kab. Tabalong, Bintang Ara, Ds Bintang Ara	Terbangunnya laboratorium komputer	1 buah	2,318,100,000	Kab. Tabalong, Bintang Ara, Ds Bintang Ara	Terbangunnya laboratorium komputer	1 buah	2,318,100,000
						Kab. Tabalong, Jaro, Ds Jaro	Terbangunnya laboratorium komputer	1 buah		Kab. Tabalong, Jaro, Ds Jaro	Terbangunnya laboratorium komputer	1 buah	
						Kab. Tabalong, Muara Uya, Uwie	Terbangunnya laboratorium komputer	1 buah		Kab. Tabalong, Muara Uya, Uwie	Terbangunnya laboratorium komputer	1 buah	
						Kab. Tabalong, Murung Pudak, Kasiau	Terbangunnya laboratorium komputer	1 buah		Kab. Tabalong, Murung Pudak, Kasiau	Terbangunnya laboratorium komputer	1 buah	
						Kab. Tabalong, Muara Harus, Ds Harus	Terbangunnya laboratorium komputer	1 buah		Kab. Tabalong, Muara Harus, Ds Harus	Terbangunnya laboratorium komputer	1 buah	
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Tabalong, Tanjung, Kitang dan Wayau	Terbangunnya sarana dan prasarana utilitas sekolah (Lapanagan Olahraga, Paving Halaman, Mushalla, Pagar (3 Sekolah), Toilet, Peninggian	9 Paket/ unit	3,036,418,264	Kab. Tabalong, Tanjung, Kitang dan Wayau	Terbangunnya sarana dan prasarana utilitas sekolah (Lapanagan Olahraga, Paving Halaman, Mushalla,	9 Paket/ unit	4,000,000,000
						Kab. Tabalong, Bintang Ara, Ds Bintang Ara, Dambung Raya, Burum				Kab. Tabalong, Bintang Ara, Ds Bintang Ara, Dambung Raya, Burum			
						Kab. Tabalong, Muara Uya, Ribang				Kab. Tabalong, Muara Uya, Ribang			

Kode Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kab. Tabalong, Tanta, Warukin				Kab. Tabalong, Tanta, Warukin			
						Kab. Tabalong, Banua Lawas, Habau				Kab. Tabalong, Banua Lawas, Habau			
						Kab. Tabalong, Pugaan, Ds Pugaan				Kab. Tabalong, Pugaan, Ds Pugaan			
						Kab. Tabalong, Kelua, Karangan Putih				Kab. Tabalong, Kelua, Karangan Putih			
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Tabalong, Haruai, Wirang	Terlaksananya rehab ruang kelas sekolah	5 Ruang	2,292,667,624	Kab. Tabalong, Haruai, Wirang	Terlaksananya rehab ruang kelas sekolah	5 Ruang	2,292,667,624
						Kab. Tabalong, Bintang Ara, Ds Bintang Ara, Burum				Kab. Tabalong, Bintang Ara, Ds Bintang Ara, Burum			
						Kab. Tabalong, Tanta, Ds Tanta, Pulau Ku'u				Kab. Tabalong, Tanta, Ds Tanta, Ds Pulau Ku'u			
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Tabalong, Murung Pudak, Kelurahan Belimbing	Terlaksananya rehab perpustakaan sekolah	3 unit	273,705,000	Kab. Tabalong, Murung Pudak, Kelurahan Belimbing	Terlaksananya rehab perpustakaan sekolah	3 unit	273.705.000
						Kab. Tabalong, Banua Lawas, Ds Banua Lawas.				Kab. Tabalong, Banua Lawas, Ds Banua Lawas.			
						Kab. Tabalong, Tanta, Pulau Ku'u				Kab. Tabalong, Tanta, Pulau Ku'u			

Kode Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kab. Tabalong, Banua Lawas, Hapalah	Terlaksananya rehab ruang laboratorium IPA	2 Unit	1,230,520,238	Kab. Tabalong, Banua Lawas, Hapalah	Terlaksananya rehab ruang laboratorium IPA	2 Unit	1,230,520,238
						Kab. Tabalong, Muara Uya, Uwie	Terlaksananya rehab ruang laboratorium IPA			Kab. Tabalong, Muara Uya, Uwie	Terlaksananya rehab ruang laboratorium IPA		
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Tabalong, Muara Harus, Ds Harus	Terlaksananya rehab ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1 unit	71,894,650	Kab. Tabalong, Muara Harus, Ds Harus	Terlaksananya rehab ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang	1 unit	500,000,000
						Kab. Tabalong, Muara Uya, Uwie	Terlaksananya rehab Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1 unit	110,000,000	Kab. Tabalong, Muara Uya, Uwie	Terlaksananya rehab Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	1 unit	110,000,000
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengadaan meja dan kursi siswa	420 pasang	851,441,040	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengadaan meja dan kursi siswa	420 pasang	851,441,040
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan (15 Lokasi)	Jumlah sekolah penerima dana BOSDA	55 Sekolah	3,801,170,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan (15 Lokasi)	Jumlah sekolah penerima dana BOSDA	55 Sekolah	3,801,170,000
							Pembayaran honorarium tim manajemen BOSDA	15 Orang			Pembayaran honorarium tim manajemen BOSDA	15 Orang	

Kode Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dana BOSDA	2 Semester			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dana BOSDA	2 Semester	
							Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pemanfaatan Program Indonesia Pintar (PIP)	1 kali			Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pemanfaatan Program Indonesia Pintar (PIP)	1 kali	
					Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Perlengkapan Belajar Peserta Didik	1680 Paket	380,242,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Perlengkapan Belajar Peserta Didik	1680 Paket	380,242,800
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Alat Praktik dan Peraga Siswa	6 Paket	365,393,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Alat Praktik dan Peraga Siswa	6 Paket	365,393,750
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya kegiatan lomba-lomba dan Pemberian Beasiswa Kabupaten Tabalong	9 Paket	2,087,185,016	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya kegiatan lomba-lomba dan Pemberian Beasiswa Kabupaten Tabalong	9 Paket	2,200,000,000
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Guru dan Tata Usaha Kontrak yang ada di sekolah	26 Orang / 210 org di DPA	705,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Guru dan Tata Usaha Kontrak yang ada di sekolah	26 Orang / 210 org di DPA	705,800,000

Kode Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	687 org di DPA	540,166,171	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	687 org di DPA	540,166,171
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kontrak yang ada di Bidang Pembinaan SMP	4 Orang	1,275,042,653	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kontrak yang ada di Bidang Pembinaan SMP	4 Orang	1,275,042,653
							Pengadaan Laptop dan PC All In One untuk bidang Pembinaan SMP	4 Buah			Pengadaan Laptop dan PC All In One untuk bidang Pembinaan SMP	4 Buah	
							Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pembinaan Sekolah	1 Tahun			Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pembinaan Sekolah	1 Tahun	
1	01	02	2.02	43	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Bintek Penggunaan dan Pertanggung jawaban Dana BOS dan BOSDA SMP	60 sekolah	8,018,530,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Bintek Penggunaan dan Pertanggung jawaban Dana BOS dan BOSDA SMP	60 sekolah	8,018,530,000

Kode Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dana BOS SMP	2 semester	8,018,530,000		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dana BOS SMP	2 semester	8,018,530,000
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	61 orang	329,601,365	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	61 orang	329,601,365
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	5 Dokumen	65,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	5 Dokumen	65,300,000
					Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	60 Komunitas	433,571,873	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	60 Komunitas	433,571,873
							Bimbingan teknis penulisan ijazah				Bimbingan teknis penulisan ijazah		
							Workshop Digital Class				Workshop Digital Class		
							Workshop penyusunan kurikulum Sekolah				Workshop penyusunan kurikulum Sekolah		
							Workshop penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah(RKJM) dan Rencana Kerja Sekolah (RKS)				Workshop penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah(RKJM) dan Rencana Kerja Sekolah (RKS)		

Kode Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Workshop Penyusunan Silabus Program Sekolah Mengaji				Workshop Penyusunan Silabus Program Sekolah Mengaji		
							Workshop Penyusunan Soal Penilaian Ujian Sekolah				Workshop Penyusunan Soal Penilaian Ujian Sekolah		
							Workshop Sistem penilaian dan analisis hasil penilaianpeserta didik (PAS, PTS, PH) dan tindak lanjutnya				Workshop Sistem penilaian dan analisis hasil penilaianpeserta didik (PAS, PTS, PH) dan tindak lanjutnya		
1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Asesmen Nasional (AN)	1 Kegiatan	299,624,178	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Asesmen Nasional (AN)	1 Kegiatan	299,624,178
							Terlaksananya Bintek Proktor dan Teknisi pelaksanaan Asesmen Nasional	60 Sekolah			Terlaksananya Bintek Proktor dan Teknisi pelaksanaan Asesmen Nasional	60 Sekolah	
							Terlaksananya Monitoring pelaksanaan Asesmen Nasional	1 Kegiatan			Terlaksananya Monitoring pelaksanaan Asesmen Nasional	1 Kegiatan	
1	01	02	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Kab. Tabalong**			**25,123,180,669**	**Kab. Tabalong**			**15,742,120,135**

Kode Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemasangan Plapon dan Keramik TK	4 Paket	1,407,594,772	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemasangan Plapon dan Keramik TK	4 Paket	1,407,594,772
							Pemasangan Keramik TK	1 Paket			Pemasangan Keramik TK	1 Paket	
							Pengurukan dan Penyiringan TK	1 Paket			Pengurukan dan Penyiringan TK	1 Paket	
							Pembuatan WC untuk PAUD	1 unit			Pembuatan WC untuk PAUD	1 unit	
							Pembangunan Pagar TK	2 Paket (2 X @ 68.74 m)			Pembangunan Pagar TK	2 Paket (2 X @ 68.74 m)	
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rehabilitasi Gedung TK dan PAUD	11 Paket	2,276,848,000	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rehabilitasi Gedung TK dan PAUD	11 Paket	3,400,000,000
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengadaaan Meubeler PAUD	15 Paket	198,119,143	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengadaaan Meubeler PAUD	15 Paket	198,119,143
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah APE Luar PAUD	12 paket	309,057,860	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah APE Luar PAUD	12 paket	309,057,860
							Jumlah APE Dalam PAUD (Alat Peraga PAUD/TK-Peralatan Permainan)	10 paket			Jumlah APE Dalam PAUD (Alat Peraga PAUD/TK-Peralatan Permainan)	10 paket	

Kode Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Guru Bakti Guru Bantu	1248 Orang	10,427,348,360	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Guru Bakti Guru Bantu	1248 Orang	10,427,348,360
							Honor POS PAUD/SPS				Honor POS PAUD/SPS		
							Operator PAUD Kecamatan	815 Orang			Operator PAUD Kecamatan	815 Orang	
							Operator PKBM	29 Orang			Operator PKBM	29 Orang	
							Pegawai Tidak Tetap Rumah Pintar				Pegawai Tidak Tetap Rumah Pintar		
							Tenaga Kontrak Bidang PAUDNI	6 Orang			Tenaga Kontrak Bidang PAUDNI	6 Orang	
1	01	02	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**				**14,604,124,107**				**14,629,530,778**
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksannanya Kegiatan Hari Anak Nasional	1000 Anak	249,593,329	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksannanya Kegiatan Hari Anak Nasional	1000 Anak	275,000,000
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendidik PAUD	294 Lembaga	5,674,240,000	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendidik PAUD	294 Lembaga	5,674,240,000
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		1,354,210,000	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	354.210.000	1,354,210,000

Kode Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Kelas Baru (APBD 9 Rg + APBN/DAK 6 Rg	15 Ruang	4,150,379,205	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Kelas Baru (APBD 9 Rg + APBN/DAK 6 Rg	15 Ruang	4,150,379,205
1	01	02	2.03	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya biaya personil Peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan (SKB)	98 Peserta Didik	126,527,084	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya biaya personil Peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan (SKB)	98 Peserta Didik	126,527,084
1	01	02	2.03	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksannya Hari Aksara Internasional	40 Orang	100,000,000	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksannya Hari Aksara Internasional	40 Orang	100,000,000
					Pengelolaan Dana BOPS Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOPS Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	12 Lembaga Kesetaraan	1,931,010,000	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOPS Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	12 Lembaga Kesetaraan	1,931,010,000
					Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Warga Belajar KF Warga Belajar Paket A Warga Belajar Paket B Warga Belajar Paket C	100 WB	1,018,164,489	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Warga Belajar KF Warga Belajar Paket A Warga Belajar Paket B Warga Belajar Paket C	100 WB	1,018,164,489
								20 WB				20 WB	
								200 WB				200 WB	
								400 WB				400 WB	

Kode Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	04			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**		**1.Jumlah tenaga pendidik kualifikasi S1/D.IV, 2. Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi.**		**8,290,533,981**		**1.Jumlah tenaga pendidik kualifikasi S1/D.IV, 2. Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi.**		**9,384,522,820**
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan				8,290,533,981				9,384,522,820
					Nonformal/Kesetaraan								
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentasi ketersediaan data yang valid aneka tunjangan, dan Pembinaan KKG Pendidikan Dasar	3 kegiatan	1,384,522,820	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentasi ketersediaan data yang valid aneka tunjangan, dan Pembinaan KKG Pendidikan Dasar	3 kegiatan	1,384,522,820
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentasi Pengembanag sistem kesejahteraan,pengharg aan dan perlindungan	100%	6,906,011,161	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentasi Pengembanag sistem kesejahteraan,peng hargaan dan perlindungan	100%	8,000,000,000
							IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN		1,053,705,600		IURAN BPJS KETENAGAKERJA AN		1,053,705,600

Kode Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							DANA PENDAMPINGAN PROGRAM GURU PENGGERAK		18,449,009		DANA PENDAMPINGAN PROGRAM GURU PENGGERAK		18,449,009
							HARI GURU NASIONAL TINGKAT KABUPATEN				HARI GURU NASIONAL TINGKAT KABUPATEN		
							HARI GURU NASIONAL TINGKAT KECAMATAN				HARI GURU NASIONAL TINGKAT KECAMATAN		
							MONITORING PEMETAAN DAN PENEMPATAN PTK TK, SD, SMP				MONITORING PEMETAAN DAN PENEMPATAN PTK TK, SD, SMP		
							WORKSHOP DAPODIK SD 12 KECAMATAN 4 HARI		1,176,005		WORKSHOP DAPODIK SD 12 KECAMATAN 4 HARI		1,176,005
							WORKSHOP DAPODIK SMP DAN PKBM		1,176,005		WORKSHOP DAPODIK SMP DAN PKBM		1,176,005
							WORKSHOP DAPODIK TK, KB, TPA 4 HARI		1,054,913		WORKSHOP DAPODIK TK, KB, TPA 4 HARI		1,054,913
							LOMBA DAPODIK TERBAIK		27,000,000		LOMBA DAPODIK TERBAIK		27,000,000
							PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH BERDEDIKASIH TK, SD, SMP		39,000,000		PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH BERDEDIKASIH TK, SD, SMP		39,000,000
2	22				**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**				**2,801,600,760**				**2,801,600,760**

Kode Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	22	02			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				1,985,819,122				1,985,819,122
2	22	02	2.01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan Pagelaran dan Workshop Seni Budaya Daerah	3 Kegiatan	1,985,819,122	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan Pagelaran dan Workshop Seni Budaya Daerah	3 Kegiatan	1,985,819,122
2	22	02	2.01	01	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam				458.845.000				458.845.000
					Daerah								
					Kabupaten/Kota								
2	22	02	2.02		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan Workshop, Event Seni Budaya Daerah, dan Penggalian Data Budaya Tak Benda	8 Kegiatan	1,985,819,122	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan Workshop, Event Seni Budaya Daerah, dan Penggalian Data Budaya Tak Benda	8 Kegiatan	1,985,819,122
							Duta Batik, Gita Bahana Nusantara, Karnaval Budaya Sekolah, Gebyar Kemerdekaan, Gebyar Kihajar Dewantara, Kemah Budaya, Pawai Talintingan, Safari Budaya,				Duta Batik, Gita Bahana Nusantara, Karnaval Budaya Sekolah, Gebyar Kemerdekaan, Gebyar Kihajar Dewantara, Kemah Budaya, Pawai Talintingan, Safari Budaya,		

Kode Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Aruh Sastra Kalimantan Selatan, Festival Karya Tari Daerah, HUT Tabalong,				Aruh Sastra Kalimantan Selatan, Festival Karya Tari Daerah, HUT Tabalong,		
2	22	02	2.02	01	**PROGRAM**		**Tercapainya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten**		**703,503,193**		**Tercapainya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten**		**703,503,193**
					PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								
2	22	05			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								
2	22	05	2.01	01	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								
2	22	05	2.02		Pelindungan Cagar Budaya	Kab. Tabalong, Haruai, Nawin	Jumlah Kampung Budaya Yang Dibangun	1 Paket		Kab. Tabalong, Haruai, Nawin	Jumlah Kampung Budaya Yang Dibangun	1 Paket	
2	22	05	2.02	01	Pemanfaatan Cagar Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	10 Buah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	10 Buah	
					JUMLAH				**493.954.369.697**				**509,920,351,474**

BAB. V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini merupakan pelaksanaan rencana strategis periode 2019 – 2024. Program kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong, yang didukung dengan anggaran dan sumber daya yang ada.

Rencana kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Sehingga diharapkan rencana kerja ini mampu mewujudkan perencaan yang berkualitas dengan mengedapankan pendekatan perencanaan partisipatif dengan meningkatkan kualitas perencanaan melalui peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya yang ada.

Demikian rencana kerja perangkat daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ni dibuat dengan harapan dalam tahun-tahun berikutnya, kendala dan permaslahan yang dihadapi dapat dijadikan sebagai bahaan pertimbangan prioritas dalam penyusunan rencana kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Tanjung, 15 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tabalong,

Drs. Tonie Marwan, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP 19660307 199412 1 006

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TABALOG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan izin-Nya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini adalah merupakan dokumen yang dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam bentuk penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2024 dan rencana kerja ini juga mengacu pada rencana kerja pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024, sehingga terdapat sinergitas dalam penyusunan program dan kegiatan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong.

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan rencana kerja ini.

Tanjung, 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik
Kabupaten Tabalong,

ACH. RAHADIAN NOOR, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19780910 199711 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			1
DAFTAR ISI			2
BAB I	PENDAHULUAN		3
	1.1.	Latar Belakang	5
	1.2.	Landasan Hukum	6
	1.3.	Maksud dan Tujuan	6
	1.4.	Sistematika Penulisan	7
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU		8
	2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	8
	2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	15
	2.3.	Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	17
	2.4.	Review terhadap Rancangan Awal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	26
	2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN		35
	3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	35
	3.2.	Tujuan dan Sasaran	44
	3.3.	Program dan Kegiatan	44
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		46
BAB V	PENUTUP		53

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dilakukan dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2019 - 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 - 2024.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 pencapaian yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.

Gambar 1

Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja

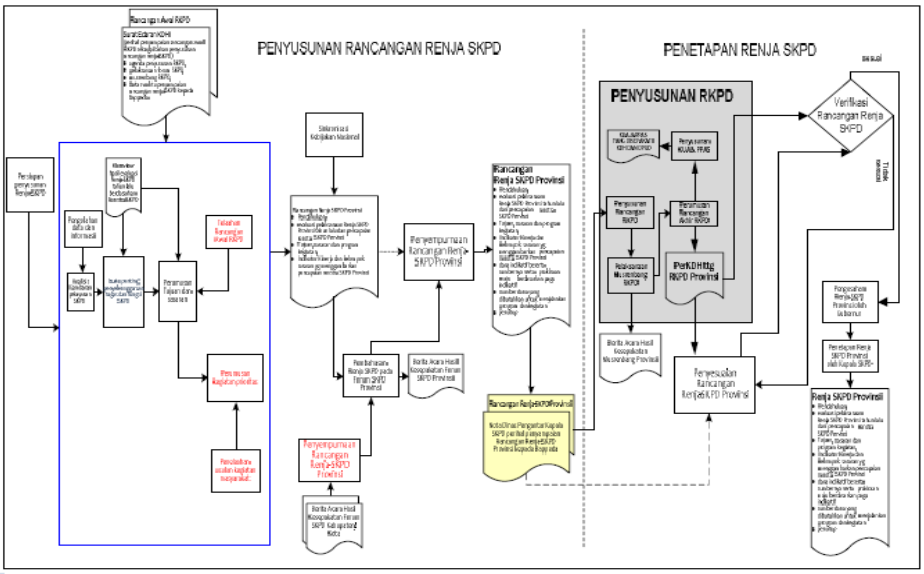

Sejalan dengan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tabalong **"TERWUJUDNYA KEHIDUPAN YANG DEMOKRATIS, DINAMIS DAN AMAN SERTA KOKOHNYA PERSATUAN DAN KESATUAN DALAM BINGKAI NKRI"** dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Pemerintahan di Tahun 2022 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tabalong yakni Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tabalong menyusun Rencana Kerja Tahun 2022. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran RPJMD 2019 - 2024. Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tabalong dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 atas Perubahan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005 – 2025
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari dibuatnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati Tabalong Periode 2019 – 2024.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong yaitu :

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program /kegiatan selama 1 tahun oleh SKPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan – kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah – langkah / kebijakan tugas – tugas sesuai dengan kewenangannnya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun – tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol) Kabupaten Tabalong Tahun 2024, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal SKPD
- 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sejak berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Analisa hanya dilakukan untuk Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tabalong Tahun 2022 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah:

TABEL 2.1a
RENCANA DAN REALISASI INDIKATOR INPUT (ANGGARAN)
KEGIATAN BADAN KESBANGPOL KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2022

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.545.696.170**	**3.334.869.056.00**	**94,05%**
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.916.000	34,898.000.00	89,68%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.263.102.000	2.092.743.820.00	92,47%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	379.128.584	378.695.292.00	99,89%
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	566.718.928	556.975.884.00	98,28%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.646.107	271.556.060.00	99,97%

B.	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**190.472.260**	**151.319.517.00**	**79,44%**
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	190.472.260	151.319.517.00	79,44%
C.	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**1.303.769.488**	**1.302.810.000.00**	**99,93%**
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.303.769.488	1.302.810.000.00	99,93%
D.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**504.049.200**	**468.188.000.00**	**99,61%**
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	504.049.200	468.188.000.00	99,61%
E.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**313.338.300**	**515.988.840.00**	**88,78%**
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	313.338.300	515.988.840.00	88,78%
F.	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**3.631.015.158**	**3.162.186.158.00**	**87,09%**

1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.631.015.158	3.162.186.158.00	87,09%

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Berikut tabel 2.1b mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian program (Renstra SKPD) untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong di tahun 2024 adalah :

TABEL 2.1b
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN TABALONG S.D. TAHUN 2023 (TAHUN BERJALAN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	BELANJA TIDAK LANGSUNG									
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	11 buah	11 buah	11 buah	11 buah	11 buah	11 buah	11 buah	11 buah
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji ASN terbayarkan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya bimbingan teknis	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran telpon, sumber daya air, listrik, materai, honorarium tenaga kontrak	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**									
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang

8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**									
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya pemantauan politik daerah dan verifikasi bantuan keuangan partai politik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**									

8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya pembinaan LSM dan Ormas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**									
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial budaya, dan ekonomi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**									
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya penanganan konflik sosial dengan forum-forum di kabupaten tabalong	Masyarakat, 8 forum dan orang asing	Masyarakat, 8 forum dan orang asing	Masyarakat, 8 forum dan orang asing	Masyarakat, 8 forum dan orang asing	Masyarakat, 8 forum dan orang asing	Masyarakat, 8 forum dan orang asing	Masyarakat, 8 forum dan orang asing	Masyarakat, 8 forum dan orang asing

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TABALONG

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tabalong berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Berikut tabel 2.2 mengenai capaian kinerja dan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong adalah :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN TABALONG

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2020)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Persentase partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik	%	70%	70%	74%	75%	78%	80%	80%
2. Persentase potensi konflik bernuansa SARA yang berhasil diselesaikan	%	70%	65%	70%	74%	75%	80%	80%
3. Persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perekonomian yang direkomendasikan	%	70%	65%	70%	74%	75%	80%	80%

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Tingkat kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong

Dalam rangka pelayanan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong mengacu pada peraturan Bupati No.41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesbangpol yang meliputi :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
3. Di bawah Sekretariat ada 2 (dua) sub bagian, terdiri dari :
    a. Kepala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan.
    b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
4. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama
5. Di bawah Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama ada 2 (dua) sub bidang, terdiri dari :
    a. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
    b. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
6. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
7. Di bawah Bidang Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik ada 2 (dua) sub bidang, terdiri dari :
    a. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
    b. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanganan Konflik
8. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasai Kemasyarakatan
9. Di bawah Bidang Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasai Kemasyarakatan ada 2 (dua) sub bidang, terdiri dari:
    a. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik Dalam Negeri
    b. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Sumber daya manusia tersebut belum mencukupi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pelayanan kinerja SKPD. Karena tingkat pelayanan masih kurang(Jumlah PNS dan Staf) semakin meningkat dengan tersedianya tenaga yang melayani keperluan karena tingkat pelayanan semakin tinggi, di perlukan tambahan tenaga PNS, atau NON PNS, untuk melayani keperluan masyarakat antara lain :

1. Pembuatan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi
2. Memfasilitasi Pembuatan Surat Izin Pendirian Rumah Ibadah yang dikelola oleh FKUB Kabupaten Tabalong

2. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong

Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi

Sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong yang selalu berkaitan dengan kondisi sosial politik, budaya, ekonomi dan juga situasi keamanan dan ketertiban setiap saat terus mengalami dinamika. Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang dewasa ini di Tabalong dapat di kemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong, sebagai berikut : :

Program : Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan :

- Sosialisasi Kepada Pelajar atau Masyarakat tentang Ideologi bangsa Indonesia (Pancasila)
- Sosialisasi Kepada Pelajar Masyarakat terkait Bila Negara dan Pembinaan Kebangsaan yang mencakup sejarah Bangsa Indonesia dan Bineka Tunggal Ika.
- Pelaksanaan Tim Penembatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Permasalahan :

- Belum Mantapnya Kesadaran Ploralisme Dalam Kehidupan dan Bernegara yang Tunggal Ika Era Globalisasi Sekarang ini Sangat Berimbas pada kehidupan bermasyarakat, kebangsaan dan bernegara.

- Mulai lunturnya jati diri bangsa serta Ideologi Pancasila berakibat terjadinya Penurunan nilai-nilai kebangsaan dan Nasionalme.
- Belum mantapnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang Bhineka Tunggal Ika. Disamping itu Era Globalisasi sekarang ini sangat berimbas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mulai lunturnya jati diri bangsa serta Ideologi Pancasila berakibat terjadinya penurunan Nilai Kebangsaan dan Nasionalisme;

Program : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik.

1. Pemantauan Politik Daerah, Untuk Mengetahui perkembangan situasi politik serta permasalahan yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong terutama kaitannya dengan laporan situasi dan kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta masalah sosial lainnya, melalui peninjauan dan pengamatanlangsung serta permintaan data ke seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tabalong.
2. Penyusunan Kepada Masyarakat, melakukan sosialisasi di bidang politik terhadap partisipasi masyarakat dalam menggunakan haknya dalam memilih dan hak untuk dipilih dalam pemilihan umum presiden, pemilihan umum kepala daerah gubernur /wakil gubernur, pemilihan umum bupati/wakil bupati serta pemilihan umum anggota legislatif DPD-RI, DPR-RI, DPRD Prop/ Kab. Kepada seluruh elemen masyarakat masyarakat (lurah/kepala desa/aparat desa/kelurahan/BPD, PKK, tokoh-tokoh agama/masyarakat, unsur pemuda/karang taruna serta siswa-siswi smu sebagai pemilih pemula.
3. Verifikasi Kelengkapan Penagajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dalam proses pencairan bantuan keuangan kepada partai politik, dalam proses pencairan bantuan keuangan kepada partai politik yang mempunyai kursi legislatif periode 2019-2024, melalui kegiatan bimbingan teknis pelaporan pertanggung jawaban keuangan.

Permasalahan :

1. Pemantauan Politik Daerah, masih belum terkoordinasi dengan baik antara pihak kecamatan, Koramil, Polsek, SKPD tingkat kecamatan dan unsur kelurahan/desa serta tokoh-tokoh masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam hal melaporkan situasi dan kondisi wilayahnya terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat, serta masalah sosial lainnya, sehingga terkadang Pemerintah dianggap lambat dalam mengantisipasi dan menangani permasalahan yang terjadi.
2. Penyuluhan Kepada Masyarakat, masih banyaknya unsur elemen masyarakat yang belum mengerti sepenuhnya dalam menggunakan hak politik baik hak memilih maupun hak pilih (khususnya partisipasi politik dalam memilih)dalam pelaksanaan pemilihan umum baik pemilu presiden / pemilu kepala daerah gubernur /wakil gubernur /pemilu bupati/wakil bupati serta pemilu anggota legislatif DPD-RI, DPR-RI,DPRD Prop/Kab.
3. Verifikasi kelengkapan pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada partai politik, belum optimalnya pemahaman dan kemampuan pengurus parpol dalam melaksanakan pertangung jawaban bantuan keuangan yang diterima oleh partai politik yang mempunyai kursi legislatif periode 2019-2024.

Program : Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi.

1. Pertemuan ketua LSM dengan SKPD Kab. Tabalong, dalam meningkatkan peran serta dan kontribusi anggota LSM kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui pertemuan rutin dengan SKPD terkait terhadap permasalahan yang dihadapi atau lagi actual untuk dibahas serta menggali informasi hambatan dan tantangan serta program dan keiatan yang dilaksanakan SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk meningkatkan kualitas kemampuan sumber daya manusia serta menambah wawasan dan pengetahuan anggota terutama dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara melalui kegiatan study implementasi ke daerah yang LSM nya sudah lebih maju dan maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LSM.

Permasalahan :

1. Pertemuan anggota LSM dengan SKPD Kab. Tabalong, kurang Optimalnya kemampuan sumber daya manusia anggota LSM dalam mencermati permasaahan yang terjadi serta rencana kerja yang menyesuaikan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu berkaitan dengan masalah yang timbul sebagai dampak akibat adanya kebijakan /peraturan baru.
2. Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Lembaga Swadaya Masyarakat, kurang optimalnya kemampuan sumber daya manusia anggota LSM dan kesiapan waktu dari anggota LSM serta adanya kendala yang terjadi berkaitan dengan kegiatan study implementasi yang harus menyesuaikan dengan rencana kerja daerah yang dituju terkait dengan potensi permasalahan yang akan digali agar hasil yang didapat lebih maksimal.

Program : Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional

Kegiatan : Deteksi Dini Potensi Konflik

- Untuk Mendeteksi dari segala kemungkinan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Kebedaan Tim atau Forom-forom ini sekurang-kurangnya dapat mendeteksi ruang gerak dalam aksi-aksi yang dapat memecah belahkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- Membrikan saran dan pertimbangan kepada Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut dalam permasalahan yang dihadapi di daerah.
- Menghindari Konflik di Masyarakat dengan tetap memelihara keamanan dan ketertiban di masing-masing Wilayah.
- Mengadakan Pertemuan Minimal 1 kali dalam 1 bulan dan melaksanakan pemantauan kelapangan minimal 2 kali dalam setahun guna mendetiksi segala kemungkinan yang terjadi dimasyarakat.
- Menghindari terjadinya konflik antar suku, agama dan kelompok tertentu.
- Membantu pemerintah dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di masyarakat.

- Membuat Laporan hasil pertemuan dan hasil pemantauan kelapangan kepada Bupati sebagai bahan laporan kepada pemerintah dan tembusan disampaikan ke Gubernur Kalimantan selatan

Permasalahan :

- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan untuk dapat tercapainya apa yang kita ingatkan.
- Perlu juga di dukung dengan Dana yang cukup agar semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang di inginkan.
- Koordinasi antara Instansi terkait dan juga koordinasi dengan Instansi pertikal yang ada di daerah ini.
- Kurangnya Monitor ke Kecamatan – Kecamatan sehingga potensi konflik yang mungkin terjadi di Kecamatan dan Desa, Informasinya terlambat kita terima.
- Kurangnya Pegawai Negeri yang bekerja di Bidang Kewaspadaan Nasional untuk menghandal pekerjaan – pekerjaan di bidang tersebut.

Program : Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional

Kegiatan : Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing

- Untuk Mengetahui jumlah Orang Asing yang ada di Kabupaten Tabalong dan juga Tenaga kerja Asing yang bekerja di Perusahaan-perusahaan yang beroprasi di Kabupaten Tabalong.
- Disamping itu kita juga dapat memantau keberadaan dan kegiatan Lembaga Swadaya Asing / Organisasi Masyarakat Asing yang ada di Kabupaten Tabalong.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut keberadaan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing di Daerah.
- Menghindari konflik antar Tenaga kerja Local dan Tenaga Kerja Asing.
- Mengadakan peretemuan Tim pemantauan minimal 1 kali dalam 1 bulan dan melaksanakan pemantauan turun kelapangan minimal 3 bulan sekalian
- Membuat laporan hasilpertemuan dan hasil pemantauan kelapangan kepada Bupati sebagai bahan Laporan kepada Pemerintah dan tembusan disampaikan ke Gubernur Kalimantan Selatan.

Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi

Hambatan yang dihadapi dalam Sektor Politik Dalam Negeri, Keamanan dan Ketertiban ini adalah Keamanan dan Ketertiban dalam arti luas dimana beberapa permasalahan yang dihadapi khususnya di Kabupaten Tabalong ini antara lain :

- Koordinasi antar instansi yang terkait belum maksimal sehingga menghambat dalam pelayanan publik.
- Belum maksimalnya tingkat pemahaman, inovasi, kreatifitas serta kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas dari aparatur pelaksana.
- Kurangnya rasa tanggung jawab sebagai pemangku jabatan dalam koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi.
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.
- Kurangnya sarana pendukung dalam pelaksanaan di lapangan maupun di kantor sehingga data yang dihasilkan tidak akurat.

3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Tanggung Jawab yang diberikan kepada Daerah kepada SKPD, terkait langsung sector dalam Negeri, kecamatan dan ketertiban belum maksimal memeberikan kontribusi
2. Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab dari Ormas terhadap kemajuan daerahnya melalui program pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, fasilitas partai politik, dan PEMILU akan sulit diciptakan.
2. Pemberdayaan terhadap organisasi kemasyarakatan untuk pengelolaan usaha mandiri belum terlaksana.
3. Memberikan kebebasan kepada kelompok masyarakat atau perorangan untuk membentuk organisasi kemasyarakatan belum terwujud.
4. Kurangnya kualitas dan tanggung jawab masyarakat terhadap perkembangan daerahnya khususnya tentang wawasan kebangsaan.
5. Tidak terwujudnya pemerintahan yang baik dalam pengawasan langsung dengan jalan koordinasi, monitoring pemantauan di lapangan dan segala macam situasi yang berkembang di masyarakat.

6. Memberikan rasa aman kepada masyarakat dari segala kemungkinan yang terjadi yang dapat memecah belah terhadap kelompok dan masyarakat yang ada di Kabupaten Tabalong.

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TANTANGAN

1 Terjadinya perubahan Struktur Organisasi dengan perubahan Bidang yang menyebabkan perlu penyesuaian tugas dan fungsi.
2. Terjadinya persaingan antar aparatur serta ada kecendrungan mementingkan kegiatan program daripada pelaksanaan pelayanan rutin terhadap tugas dan fungsinya.
3. Terjadinya mutasi pejabat / pegawai yang berakibatkan terhambatnya pelaksanaan tugas karena yang bersangkutan harus belajar mulai awal.
4. Kurang kuatnya landasan hukum dari segala permasalahan yang dihadapi sehingga terhambatnya keputusan yang diambil dengan jalan koordinasi antar instansi.
5. Adanya tumpang tindih dalam pengambilan dan pemberian kebijakan sehingga menghambat penyelesaian permasalahan.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat di daerah Kabupaten Tabalong terhadap aturan dan peraturan yang berlaku.
7. Semakin maraknya kegiatan penyakit masyarakat dikarenakan banyaknya pendatang baru.
8. Malam maraknya Tumbuh hiburan Malam di Kabupaten Tabalong.

PELUANG

1. Tersedianya peraturan perundang – undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Dukungan pemerintah daerah dalam Bidang Kesatuan Bangsa, Bidang Politik dalam Negeri Dalam Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
3. Kemajuan teknologi informasi.

KEKUATAN

1. Dukungan dan persetujuan Bupati terhadap rencana program dan kegiatan.
2. Koordinasi yang baik antara Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
3. Personil pegawai yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk maju dan bertanggung jawab.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

KELEMAHAN

1. Belum optimalnya anggaran dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana untuk mendukung program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Kurangnya kualitas keterampilan pegawai, baik yang profesional secara teknik maupun operasional.
3. Teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal

5. Isu - Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Isu - Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dihadapi dalam Sektor Politik Dalam Negeri, Keamanan dan Ketertiban ini adalah Keamanan dan Ketertiban dalam arti luas dimana beberapa permasalahan yang dihadapi khususnya di Kabupaten Tabalong ini antara lain :

- Peningkatan kerja sama dan keharmonisan hubungan kemitraan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat serta masyarakat itu sendiri.
- Peningkatan pengetahuan wawasan kebangsaan dari Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat serta masyarakat itu sendiri.
- Peningkatan keterampilan pengelolaan usaha mandiri oleh organisasi kemasyarakatan.
- Peningkatan peran serta Partai Politik dalam pembangunan daerah.

- Peningkatan fasilitas Pemerintah daerah terhadap pelaksanaan PEMILU.
- Terwujudnya kehidupan yang demokratis, dinamis, aman serta kokohnya persatuan dan kesatuan guna mendukung terwujudnya masyarakat yang cinta NKRI.
- Menumbuhkembangkan situasi Kamtibmas yang stabil, aman, tertib dan damai untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan berwibawa.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019- 2024 adalah tahapan kesatu dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2005 - 2025. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2019 - 2024 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah-atas (*topdown – bottom up*).

Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong 2019 – 2024 untuk mengasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program

pembangunan yang terarah, efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Berikut tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Tabalong

Nama SKPD: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol)

NO	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Tabalong			**5.628.492.701**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Tabalong			**5.628.492.701**	
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Jumlah dokumen**	**11 buah**	**32.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Jumlah dokumen**	**11 buah**	**32.000.000**	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	11 dokumen	32.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	11 dokumen	32.000.000	
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Gaji ASN terbayarkan**	**12 bulan**	**3.647.703.322**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Gaji ASN terbayarkan**	**12 bulan**	**3.589.143.322**	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tabalong	Jumlah gaji ASN terbayarkan	14 bulan	3.647.703.322	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tabalong	Jumlah gaji ASN terbayarkan	14 bulan	3.589.143.322	
8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya bimbingan teknis**	**12 bulan**	**42.625.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya bimbingan teknis**	**12 bulan**	**101.185.000**	
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tabalong	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis	16 orang	22.625.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tabalong	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis	16 orang	81.185.000	

.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tabalong	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35 orang	20.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tabalong	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35 orang	20.000.000	
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**12 bulan**	**378.824.166**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**12 bulan**	**364.783.386**	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tabalong	Jumlah alat dan perlengkapan komponen instalasi listrik yang dibeli	12 bulan	2.046.875	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tabalong	Jumlah alat dan perlengkapan komponen instalasi listrik yang dibeli	12 bulan	2.046.875	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tabalong	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	12 bulan	48.702.315	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tabalong	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	12 bulan	48.702.315	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tabalong	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1 paket	44.529.786	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tabalong	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1 paket	44.529.786	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tabalong	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	283.545.190	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tabalong	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	269.504.410	
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Terwujudnya pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah**	**20 unit**	**200.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Terwujudnya pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah**	**20 unit**	**200.000.000**	

8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tabalong	Jumlah peralatan dan mesin yang dibeli	20 unit	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tabalong	Jumlah peralatan dan mesin yang dibeli	20 unit	200.000.000	
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Jumlah pembayaran telpon, sumber daya air, listrik, materai, honorarium tenaga kontrak**	**12 bulan**	**756.679.362**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Jumlah pembayaran telpon, sumber daya air, listrik, materai, honorarium tenaga kontrak**	**12 bulan**	**770.720.142**	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tabalong	Jumlah dokumen surat menyurat	12 bulan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tabalong	Jumlah dokumen surat menyurat	12 bulan	3.000.000	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tabalong	Jumlah sumber daya air dan listrik terbayarkan	5 macam	68.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tabalong	Jumlah sumber daya air dan listrik terbayarkan	5 macam	82.440.780	
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tabalong	Jumlah alat dan perlengkapan yang dibeli	12 bulan	58.900.882	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tabalong	Jumlah alat dan perlengkapan yang dibeli	12 bulan	58.900.882	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tabalong	Jumlah honorarium tenaga kontrak, makan minum terbayarkan	12 bulan	626.378.480	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tabalong	Jumlah honorarium tenaga kontrak, makan minum terbayarkan	12 bulan	626.378.480	
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor**	**18 unit**	**570.660.851**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor**	**18 unit**	**570.660.851**	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tabalong	Jumlah pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor	20 unit	245.090.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tabalong	Jumlah pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor	20 unit	170.660.851	

8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tabalong	Jumlah pemeliharaan sara prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	12 bulan	325.570.851	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tabalong	Jumlah pemeliharaan sara prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	12 bulan	400.000.000	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Kab. Tabalong			**1.574.294.118**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Kab. Tabalong			**1.639.619.118**	
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan**	**60 orang**	**1.574.294.118**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan**	**60 orang**	**1.639.619.118**	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tabalong	Jumlah kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan	12 bulan	550.800.350	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tabalong	Jumlah kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan	12 bulan	1.639.619.118	
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kab. Tabalong			17.057.035						
	Pembentukan Paskibraka	Kab. Tabalong			1.006.436.733						

8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Kab. Tabalong			**59.160.358.368**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Kab. Tabalong			**59.160.358.368**	
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya pemantauan politik daerah dan verifikasi bantuan keuangan partai politik**	**12 bulan**	**59.160.358.368**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya pemantauan politik daerah dan verifikasi bantuan keuangan partai politik**	**12 bulan**	**59.160.358.368**	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah bantuan keuangan partai politik yang terverifikasi	10 parpol	58.142.293.500	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah bantuan keuangan partai politik yang terverifikasi	10 parpol	58.142.293.500	

8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah pemantauan politik daerah terpenuhi	100 orang	1.018.064.868	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah pemantauan politik daerah terpenuhi	100 orang	1.018.064.868	
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**				**287.331.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**				**287.331.000**	
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya pembinaan LSM dan Ormas**	**12 bulan**	**287.331.000**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya pembinaan LSM dan Ormas**	**12 bulan**	**287.331.000**	
8.01.04.2.01.02	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah pembinaan LSM dan Ormas	50 orang	287.331.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah pembinaan LSM dan Ormas	50 orang	287.331.000	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Kab. Tabalong**			**634.439.420**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Kab. Tabalong**			**569.114.420**	

8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial budaya, dan ekonomi**	**12 bulan**	**634.439.420**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial budaya, dan ekonomi**	**12 bulan**	**569.114.420**	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan agama	40 orang	174.721.500	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan agama	40 orang	174.721.500	
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah peningkatan ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan penyalahgunaan	12 bulan	459.717.920	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah peningkatan ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan penyalahgunaan	12 bulan	394.392.920	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Kab. Tabalong**			**1.160.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Kab. Tabalong**			**1.160.000.000**	
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya penanganan konflik sosial dengan forum-forum di kabupaten tabalong**	**Masyarakat, 8 forum dan orang asing**	**1.160.000.000**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya penanganan konflik sosial dengan forum-forum di kabupaten tabalong**	**Masyarakat, 8 forum dan orang asing**	**1.160.000.000**	

8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah pemantauan orang asing dan koordinasi tim kewaspadaan dini masyarakat terpenuhi	12 bulan	350.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah pemantauan orang asing dan koordinasi tim kewaspadaan dini masyarakat terpenuhi	12 bulan	350.000.000	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah pelaksanaan penanganan konflik sosial dengan forum-forum di Kabupaten Tabalong	12 bulan	450.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah pelaksanaan penanganan konflik sosial dengan forum-forum di Kabupaten Tabalong	12 bulan	450.000.000	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	5 dokumen	360.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	5 dokumen	360.000.000	
JUMLAH					**68.444.915.607**	**JUMLAH**				**68.444.915.607**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 3.2
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Besaran / Volume	Catatan
1	2	4	3	4	5	9
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah dokumen	Kab. Tabalong	11 buah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tabalong	Gaji ASN terbayarkan	Kab. Tabalong	12 bulan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tabalong	Terlaksananya bimbingan teknis	Kab. Tabalong	12 bulan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabalong	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kab. Tabalong	12 bulan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tabalong	Terwujudnya pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Tabalong	20 unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah pembayaran telpon, sumber daya air, listrik, materai, honorarium tenaga kontrak	Kab. Tabalong	12 bulan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabalong	Terlaksananya pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor	Kab. Tabalong	18 unit	
2.	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Kab. Tabalong		Kab. Tabalong		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Luar Kab. Tabalong	Terlaksananya kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan	Luar Kab. Tabalong	60 orang	
3.	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Kab. Tabalong		Kab. Tabalong		

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Tabalong	Terlaksananya pemantauan politik daerah dan verifikasi bantuan keuangan partai politik	Kab. Tabalong	12 bulan	
4.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Kab. Tabalong		Kab. Tabalong		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Tabalong	Terlaksananya pembinaan LSM dan Ormas	Kab. Tabalong	12 bulan	
5.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Kab. Tabalong		Kab. Tabalong		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Tabalong	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial budaya, dan ekonomi	Kab. Tabalong	12 bulan	
6.	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Kab. Tabalong		Kab. Tabalong		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Terlaksananya penanganan konflik sosial dengan forum-forum di kabupaten tabalong		Masyarakat, 8 forum dan orang asing	

BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Kegiatan melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Bangsa, Fasilitasi

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik.

Salah satu Instansi Pemerintah dalam wadah pembinaan terhadap masyarakat dalam menciptakan masyarakat yang tentram dan aman adalah pada Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang salah satunya Bidang Kesatuan Bangsa yang mempunyai 2 (dua) Sub Bidang yakni Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen dan Sub Bidang Penanganan Konflik.

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pada bidang ini mengusulkan peningkatan keharmonisan hubungan kemitraan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan Organisasi Kemayarakatan dan Partai Politik yang mempunyai landasan kuat sehingga akan menciptakan iklim politik dan stabilitas keamanan di Kabupaten Tabalong yang semakin kondusif, aman, sejahtera dan bernuansa agamis melalui bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pengawasan ormas dan ormas asing, yang mempunyai 2 (dua) Sub Bidang yakni Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA

Pada program ini mengusulkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya. Sehingga masyarakat Kabupaten Tabalong mempunyai ketahanan dari permasalahan di atas yang menunjang pelaksanaan pembangunan daerah yang ditampung dalam Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika,dan Sejarah Kebangsaan serta Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika serta Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan, yang mempunyai 2 (dua) Sub Bidang yakni Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong. adalah sebuah instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong berdiri sejak tahun 2003 dan berlokasi di Jalan Mawar Nomor 03 Tanjung Kode Pos 71513 Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

Sasaran	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Tingginya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan demokrasi	Pendidikan politik dan etika budaya politik bagi masyarakat yang belum optima	Adanya Program Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan secara kontinyu kepada seluruh lapisan masyarakat
Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Perkembangan Globalisasi Budaya Luar ditengah masyarakat telah mendorong terjadinya perubahan pandangan yang sangat cepat dan sulit diprediksi sehingga melemahnya nilai budaya bangsa	Kegiatan pembinaan Ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat masih belum optimal	Adanya Program Pendidikan Politik Masyarakat yang dilaksanakan secara kontinyu sebagai upaya peningkatan demokrasi masyarakat
Meningkatnya kewaspadaan nasional	Menurunnya wawasan kebangsaan, rasa nasionalisme dan bela negara	Meningkatnya apatisme terhadap pemerintahan	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Pembinaan kerukunan dan ketahanan melalui pembinaan organisasi kemasyarakatan dan	Potensi konflik Sosial dan ekonomi akibat penyalahgunaan teknologi informasi	Komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

Sasaran	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	ketahanan dibidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi belum optimal		

Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong. dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan memiliki 13 (tiga belas) jabatan lainnya di bawah kepala serta memiliki tugas dan fungsi antara lain memberikan layanan Pengelolaan Kesekretariatan, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan serta Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong memiliki harapan dimasa yang akan datang bisa lebih baik dalam memberikan layanan tentang Pengelolaan Kesekretariatan, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan serta Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

Oleh karenanya pengelolaan kesekretariatan, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan serta Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama senantiasa berbenah untuk bisa menjadi lebih baik dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi yang antara lain adanya kinerja pegawai yang selama ini memang harus ditingkatkan karena adaya banyak faktor disentralisasi soal motivasi kerja lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan. Adapun Struktur organisasi dan tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian.

Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan asset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
e. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Unsur – unsur Organisasi Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas mengkoordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik.

Untuk menjabarkan tugas di atas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan

perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Unsur - unsur organisasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik adalah :

a. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
b. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanganan Konflik

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan hubungan dengan partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif serta pemberdayaan politik masyarakat.

Untuk menjabarkan tugas di atas Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Unsur-unsur organisasi Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan adalah :

a. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik Dalam Negeri

b. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Organisasi Kemasyarakatan

BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

Untuk menjabarkan tugas di atas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, social dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghaya kepercayaan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, social dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghaya kepercayaan;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, social dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghaya kepercayaan;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, social dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghaya kepercayaan;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, social dan budaya, fasilitasi

pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghaya kepercayaan;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Unsur-unsur organisasi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama adalah:

a. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
b. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

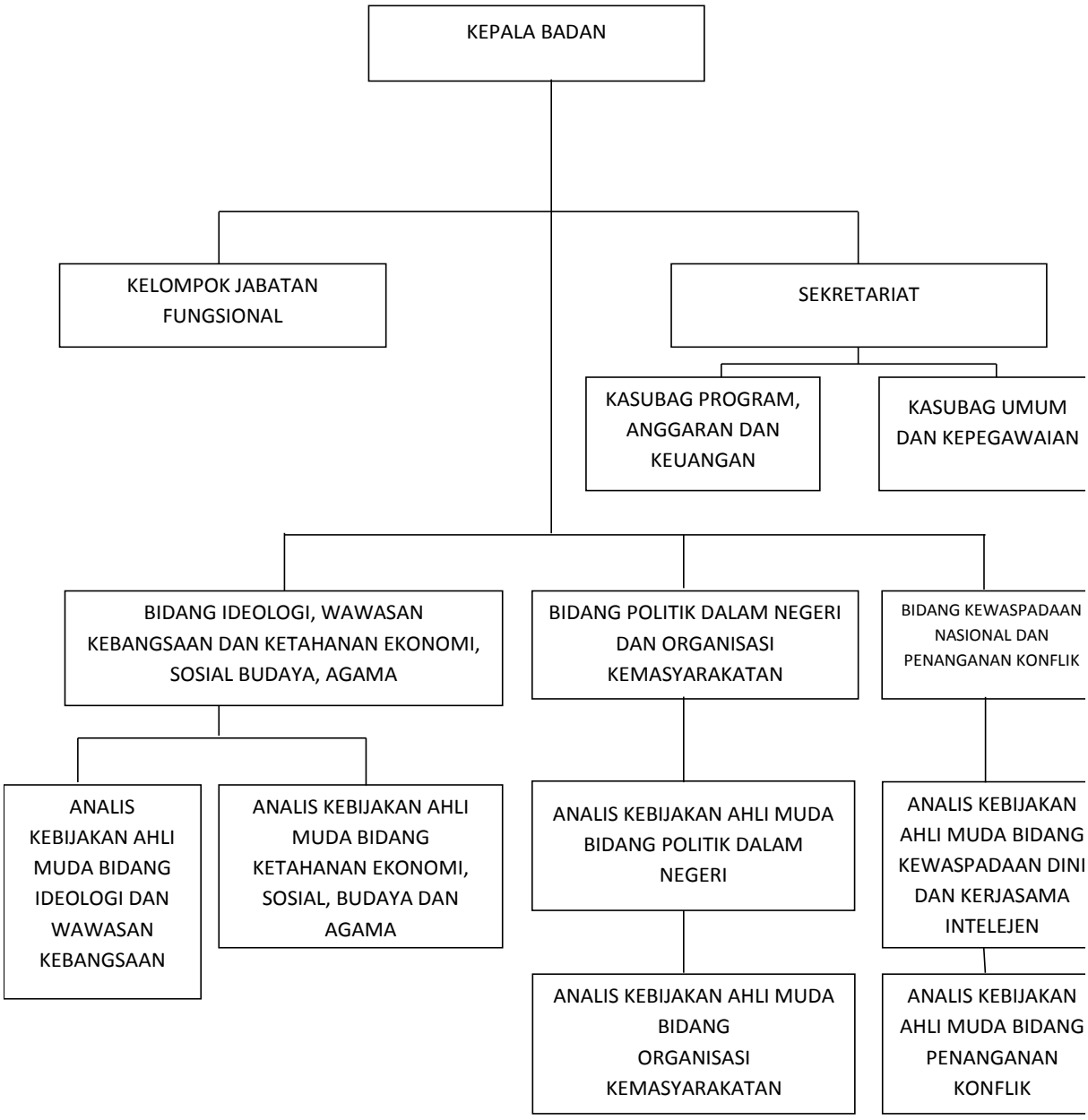
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
KASUBAG PROGRAM, ANGGARAN DAN KEUANGAN
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELEJEN
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG PENANGANAN KONFLIK

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan

1. Meningkatkan Pembinaan Politik dan Menumbuhkembangkan Kehidupan Demokratis.
2. Meningkatkan Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
4. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

3.2.2. Sasaran

1. Meningkatnya Pembinaan Politik dan Menumbuhkembangkan Kehidupan Demokratis.
2. Meningkatnya Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
4. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahun ke - empat dari Rencana Strategis SKPD Tahun 2019-2024.

Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (8.01.01), dengan kegiatan sebagai berikut :

A.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

A.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

A.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

A.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

A.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

A.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN (8.01.02) dengan kegiatan sebagai berikut :

B.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

C. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK (8.01.03), dengan kegiatan sebagai berikut :

C.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (8.01.04) , dengan kegiatan sebagai berikut :

D.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA (8.01.05), dengan kegiatan sebagai berikut :

E.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

F. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (8.01.06), dengan kegiatan sebagai berikut :

F.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**7.454.024.281**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**122.169.000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122.169.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**4.862.191.000**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.862.191.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**62.625.000**
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.625.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**825.051.660**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.546.875
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	241.105.999
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	69.529.786
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	509.869.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**121.742.908**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.742.908
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**860.139.362**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.400.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.360.882
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	669.378.480
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**600.105.351**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	329.250.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	270.855.351
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**2.070.086.118**
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	821.032.350

Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	17.057.035
Pembentukan Paskibraka	1.231.996.733
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**29.545.193.568**
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	28.447.529.700
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.097.663.868
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**760.171.000**
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	760.171.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**1.046.429.420**
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	538.799.500
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	507.629.920
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**8.875.664.000**
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	7.640.664.000

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	755.000.000
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	480.000.000
JUMLAH	**49.751.568.387**

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024
Kabupaten Tabalong

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	URUSAN WAJIB									
1.05.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI									
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**7.454.024.281**					**5.628.492.701**
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Kab. Tabalong	11 buah	122.169.000	APBD	11 buah		11 buah	32.000.000
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji ASN terbayarkan	Kab. Tabalong	12 bulan	4.862.191.000	APBD	12 bulan		12 bulan	3.589.143.322
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya bimbingan teknis	Kab. Tabalong	12 bulan	62.625.000	APBD	12 bulan		12 bulan	101.185.000
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kab. Tabalong	12 bulan	825.051.660	APBD	12 bulan		12 bulan	364.783.386

8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Tabalong	20 unit	121.742.908	APBD	20 unit		20 unit	200.000.000
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran telpon, sumber daya air, listrik, materai, honorarium tenaga kontrak	Kab. Tabalong	12 bulan	860.139.362	APBD	12 bulan		12 bulan	770.720.142
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor	Kab. Tabalong	18 unit	**600.105.351**		18 unit		18 unit	570.660.851
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		**Kab. Tabalong**		**2.070.086.118**					**1.639.619.118**
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan		60 orang	2.070.086.118		60 orang		60 orang	1.639.619.118

8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**		**Kab. Tabalong**		**29.545.193.568**	**APBD**				**59.160.358.368**
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya pemantauan politik daerah dan verifikasi bantuan keuangan partai politik	Kab. Tabalong	12 bulan	29.545.193.568	APBD	12 bulan		12 bulan	59.160.358.368

8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**		**Kab. Tabalong**		**760.171.000**	**APBD**				**287.331.000**
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya pembinaan LSM dan Ormas	Kab. Tabalong	12 bulan	760.171.000	APBD	12 bulan		12 bulan	287.331.000
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**		**Kab. Tabalong**		**1.046.429.420**	**APBD**				**569.114.420**
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial budaya, dan ekonomi	Kab. Tabalong	12 bulan	1.046.429.420	APBD	12 bulan		12 bulan	569.114.420

8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**		**Kab. Tabalong**		**8.875.664.000**	**APBD**				**1.160.000.000**
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya penanganan konflik sosial dengan forum-forum di kabupaten tabalong	Kab. Tabalong	Masyarakat, 8 forum dan orang asing	8.875.664.000	APBD	Masyarakat, 8 forum dan orang asing		Masyarakat, 8 forum dan orang asing	**1.160.000.000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol) Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol) Kabupaten Tabalong 2019 – 2024 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Tabalong serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol) Kabupaten Tabalong Tahun 2024 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol) Kabupaten Tabalong Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong maupun SKPD yang membidangi fungsi lain.

Tanjung, 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik
Kabupaten Tabalong,

ACH. RAHADIAN NOOR, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19780910 199711 1 001

PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN BINTANG
ARA KABUPATEN
TABALONG TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN BINTANG ARA
TAHUN 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Employer Branding:
#bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Renja Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong tahun 2024 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024, untuk menjalankan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dokumen Perubahan Renja ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong beserta program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan. Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon koreksi, saran dan masukan dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Perubahan Renja Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong ini dapat bermanfaat dan diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Bintang Ara, September 2024

Camat Bintang Ara

JAFI AKBAR, S.IP., M.M.,Kp

NIP.19770129 200501 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI .....

DAFTAR TABEL .....

BAB I PENDAHULUAN .....

1.1 Latar Belakang.....

1.2 Landasan Hukum .....

1.3 Maksud dan Tujuan.....

1.4 Sistematika Penulisan .....

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 .....

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan.....

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024 .....

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 .....

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah.....

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah .....

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD .....

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....

BAB IV PENUTUP.....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

2 Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan konsekuensi dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai wujud implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024. Renja Tahun 2024 telah disusun pada tahun 2023 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

3 Seiring dengan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2024, hasil pengendalian pelaksanaan renja menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Bintang Ara Tahun 2024.

4 Selain berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024, Perubahan Renja Kecamatan Bintang Ara Tahun 2024 juga disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019- 2024 yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bintang Ara Tahun 2024 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019–2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019–2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bintang Ara Kabupaten TabalongTahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

2. Tujuan

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di SKPD Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.

1.1 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bintang Ara Kabupaten TabalongTahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan
  - 2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024
  - 2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024
- 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun selain berpedoman dengan Perubahan RKPD, juga berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. Dalam hal ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Bintang Ara sampai dengan triwulan IItahun 2024 dengan mengacu pada APBD tahun 2024 yang sudah disahkan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024

2.1.1.1 Kesesuaian Program Antara Renja Kecamatan Bintang Ara Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada rencana kerja Kecamatan Bintang Ara dengan APBD Tahun 2024, terdapat kesesuaian 100%. Artinya bahwa jumlah program dalam renja sama dengan jumlah program yang ada dalam APBD, yaitu ada 6 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2.1.1.2 Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Kecamatan Bintang Ara Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan yang ada pada rencana kerja Kecamatan Bintang Ara dengan APBD Tahun 2024, jumlah kegiatan sudah sesuai dengan APBD induk yaitu sebanyak 13 Kegiatan yang meliputi,: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan.

2.1.1.3 Kesesuaian Sub Kegiatan Antara Renja Kecamatan Bintang Ara Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap Sub Kegiatan yang ada pada rencana kerja Kecamatan Bintang Ara dengan APBD Tahun 2024, jumlah sub kegiatan yang ada pada renja tahun 2024 sebanyak 29 sedangkan sub kegiatan yang ada di APBD Tahun 2024 sebanyak 29.

2.1.1.4 Kesesuaian Pagu Anggaran Antara Renja Kecamatan Bintang Ara Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Anggaran Renja Kecamatan Bintang Ara Tahun 2024 sebesar Rp. 3.480.399.115,- sedangkan anggaran APBD Kecamatan Bintang Ara Tahun 2024 sebesar Rp. 3.994.632.115 , Terdapat selisih antara anggaran APBD dan Renja Tahun 2024 sebesar Rp. 514.233.000,- seiring dengan proses penganggaran yang berjalan.

Hasil evaluasi kesesuaian jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pagu anggaran antara Renja Kecamatan Bintang Ara Tahun 2024 dengan APBD Kecamatan Bintang Ara Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawahini :

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian antara Renja Kecamatan Bintang Ara Tahun 2024dengan APBD Kecamatan Bintang Ara Tahun 2024

No	Uraian	Renja 2024	APBD 2024
1	Program	6	6
2	Kegiatan	13	14
3	Sub Kegiatan	29	29
4	Pagu Anggaran	Rp 3.480.399.115	Rp 3.994.632.115

Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.3 Perbandingan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Anggaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Peogram (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/Kegiatan Restra SKPD s/d Tahun 2022		Catatan
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7.01	**KECAMATAN**									
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	98 Persen	98%	100 Persen	100 Persen	100%	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	95 Persen	95%	100 Persen	100 Persen	100%	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	35 Buah	11 Buah	11 Buah	100%	35 Buah	35 Buah	100%	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**									
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**									
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir	9 Desa	9 Desa	9 Desa	100%	9 Desa	9 Desa	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Peogram (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian		
								Target Program/Kegiatan Restra SKPD s/d Tahun 2022		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**									
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**									
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**									
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	9 Desa	9 Desa	9 Desa	100%	9 Desa	9 Desa	100%	

Berdasarkan data perbandingan antara Renja 2024 dan APBD 2024 pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan pada APBD disusun masih mengacu pada Renja, hal ini dapat dilihat dari persentase kesesuaian Program sebesar 100 persen, persentase kesesuaian kegiatan sebesar 100 persen dan persentase kesesuaian sub kegiatan sebesar 100 persen.

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, penilaian hasil pelaksanaan Renja menggunakan data realisasi pelaksanaan APBD sebagai acuan. Berikut rekapitulasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bintang Ara sampai triwulan II tahun 2024.

Tabel 2.3 Perbandingan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Anggaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Peogram (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/Kegiatan Restra SKPD s/d Tahun 2022		Catatan
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7.01	**KECAMATAN**									
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	98 Persen	98%	100 Persen	100 Persen	100%	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	95 Persen	95%	100 Persen	100 Persen	100%	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	35 Buah	11 Buah	11 Buah	100%	35 Buah	35 Buah	100%	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**									
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**									

	KELURAHAN									
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir	9 Desa	9 Desa	9 Desa	100%	9 Desa	9 Desa	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Peogram (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kelua Kegiatan SKPD Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Ti Realis
1	2	3	4	5	6	7=(6
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	9 Desa	9 Desa	9 Desa	1

Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Bintang Ara sampai triwulan II diatas diolah berdasarkan data pada formulir evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sesuai format evaluasi renja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (formulir evaluasi terlampir). Evaluasi Renja dimaksudkan untuk mengindentifikasi sejauh mana capaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja serta implikasi yang timbul, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk Tindakan perencanaan selanjutnya.

Berdasarkan data pada tabel 2.3 tersebut, dapat dilihat bahwa dari sisi anggaran, Kecamatan Bintang Ara telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.509.704.607,- atau sekitar 45,42 persen dari total anggaran untuk tahun 2024. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif masih rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena pelaksanaannya memang dijadwalkan padatriwulan III dan IV, diantaranya yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

SKPD
.

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD.

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD.

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.

f. Koordinasi dan Penyusunan Lapooran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik SKPD.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah.

a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya.
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan :
    a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan :
    a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
9. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan :
    a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan Bintang Ara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan Otonomi Daerah. Kewenangan tersebut diantaranya :

1. Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK).
3. Pelayanan penerbitan Keterangan Pindah.
4. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat.
5. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
6. Menggkordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
7. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam membangun desa.
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
9. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Bintang Ara menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bintang Ara, diantaranya :

1. Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya.
2. Mengadakan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Meningkatkan system pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

Disamping itu, kinerja pelayanan perangkat daerah yang merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maka capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada Perubahan Renstra Kecamatan Bintang Ara adalah :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bintang Ara

No	Indikator (IKU)	Angka Nilai Target Standar (IKU)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun berjalan
2	Tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	-	65%	70%	75%	80%	85%	65%	69,69%	75%	80%	Tahun berjalan
3	Persentase layanan umum lainnya tepat waktu	-	65%	70%	75%	80%	85%	65%	69,06%	75%	80%	Tahun berjalan
4	Nilai AKIP	-	B	B	BB	BB	BB	B	B	BB	BB	Tahun berjalan

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong, maka Kecamatan Bintang Ara mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Kedudukan Kecamatan

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
2. Kecamatan dipimpin oleh Camat.
3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris daerah.

b. Tugas Pokok Kecamatan

Kecamatan Bintang Ara memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebaagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

c. Fungsi Kecamatan

Fungsi Kecamatan Bintang Ara adalah sebagai pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pengkoordinasian pelayanan administrasi publik dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Camat selaku kepala SKPD dibantu oleh Sekretaris Camat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi 4 (empat) Seksi yang terdiri dari : Pemerintahan, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, dan Keamanan dan Ketertiban Umum. Berikut adalah susunan organisasi di Kecamatan Bintang Ara :

Susunan Organisasi Kecamatan Bintang Ara

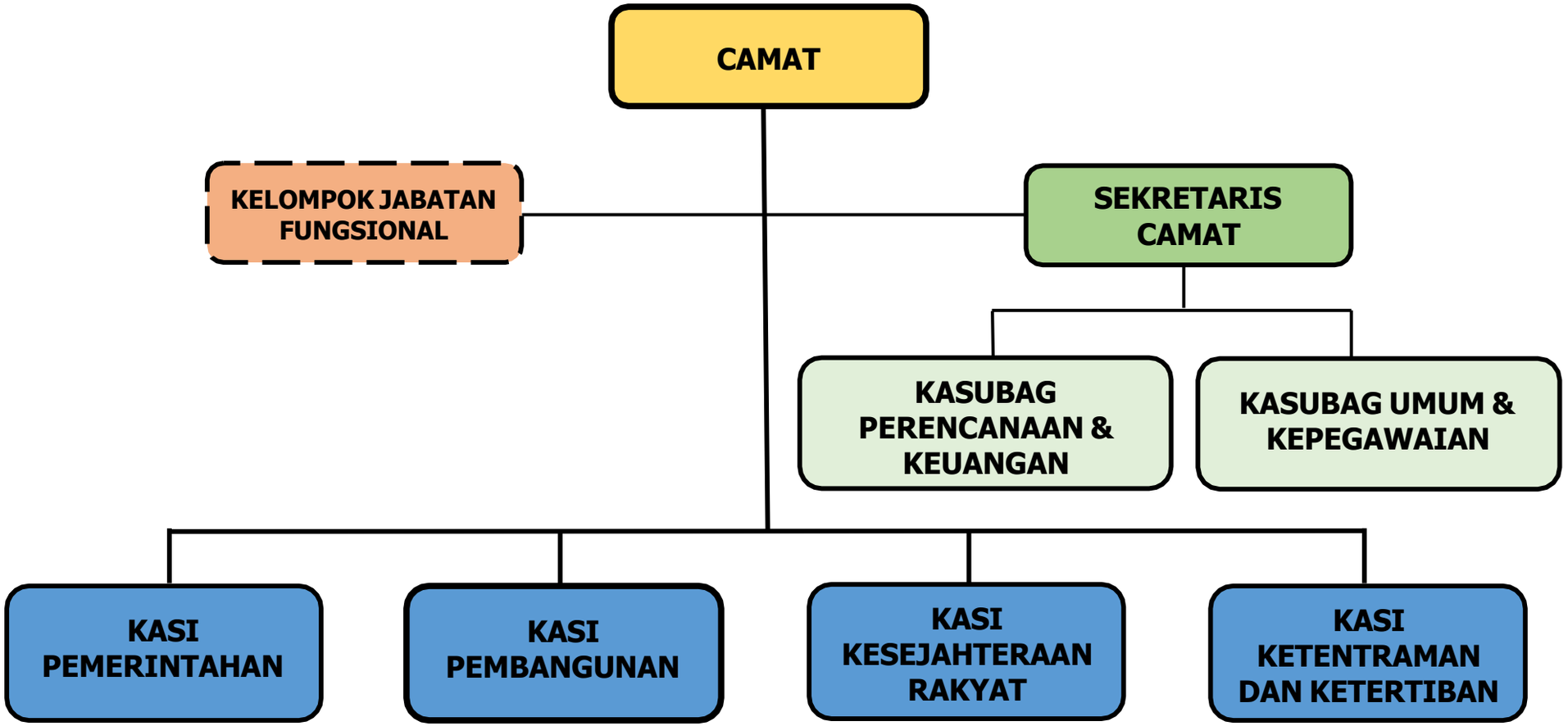

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, Kecamatan Bintang Ara berpangku pada visi Kabupaten Tabalong **"Menuju Tabalong yang lebih agamis, sejahtera dan mandiri"** dengan mengemban misi :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Tabalong yang lebih agamis melalui kebijakan pembangunan yang diarahkan agar tercapai masyarakat madani yang beretika dan bermoral melalui peningkatan pemahaman dan pengamanan nilai-nilai agama, memperkuat kelembagaan keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan sehingga akan terwujud kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia (Tabalong Berkualitas).
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong dengan mengawal pembangunan yang diarahkan agar masyarakat berkemampuan lebih dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya melalui kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara signifikan, serta penurunan angka kemiskinan secara nyata (Tabalong Sejahtera).

Mewujudkan kemandirian daerah Kabupaten Tabalong melalui pembangunan yang diarahkan pada tercapainya system yang handal dan dinamis yang mampu bertindak sesuai keadaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bijak melalui penguatan kelembagaan ekonomi, social budaya dan pemerintahan untuk menciptakan kemajuan perekonomian daerah yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas (Tabalong Mandiri).

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala dan kelemahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bintang Ara dalam memberikanpelayanan maksimal kepada masyarakat, diantaranya :

1. Adanya 3 desa terpencil yang jarak tempuhnya dan kondisi jalannya yang sangat rusak sehingga menyulitkan pihak kecamatan dalam melakukan pembinaan ke desa-desa tersebut.
2. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dan kurangnya pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan kerja dan profesionalitas aparatur Kecamatan Bintang Ara.
3. Minimnya pemanfaatan teknologi dalam bekerja dikalangan aparatur Kecamatan Bintang Ara menyebabkan kurang efektif dan efisiennya pemanfaatan waktu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan.
4. Jumlah SDM Apartur yang kurang memadai.

Disamping kendala dan kelemahan yang ada, Kecamatan Bintang Ara juga memiliki beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Bintang Ara dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Bintang Ara, diantaranya :

1. Adanya struktur organisasi yang terpola.
2. Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat.
3. Suasana kerja di Kecamatan Bintang Ara yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (team work).
4. Adanya koordinasi di Wilayah Kecamatan Bintang Ara yang baik.

Adapun isu-isu penting lainnya yang ada di Kecamatan Bintang Ara adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

   Kecamatan Bintang Ara merupakan kawasan yang terindikasi memiliki Kawasan kumuh. Untuk mengurangi kekumuhan, mindset masyarakat perlu diubah sehingga tercipta kawasan tanpa kumuh

2. Bidang Pemerintahan

   Berlakunya UU Desa yang menuntut aparat kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar desa lebih optimal melaksanakan amanat UU Desa tersebut.

3. Bidang Pelayanan

   Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima menjadikan kecamatan Bintang Ara untuk selalu berinovasi agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan

4. Bidang Pertanian

   Alih fungsi lahan merupakan masalah yang mulai mencuat di wilayah kecamatan Bintang Ara. Para pengembang mulai melirik tanah pertanian di Kecamatan Bintang Ara untuk dijadikan perumahan dan kawasan Industri.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rumusan tematik pembangunan sebagaimana disebutkan dalam RKPD Tahun 2024 adalah " Penguatan Daya Saing Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas"". RKPD 2024 dalam hal ini mengalami perubahan salah satunya dari segi rumusan program/kegiatan/sub kegiatan. Selanjutnya, sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rancangan Perubahan RKPD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, maka dalam reviu ini akan dilakukan proses membandingkan rancangan perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perubahan rencana kerja Kecamatan Bintang Ara. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Tabalong

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)**		**100%**	**70.016.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)**		**100%**	**70.016.000**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bintang Ara	12 Patroli Terpadu	70.016.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan		12 Patroli Terpadu	70.016.000	
7.01.04.2.01.01	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bintang Ara	12 Laporan	70.016.000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bintang Ara	12 Patroli Terpadu	70.016.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa**		**80%**	**54.267.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa**		**80%**	**62.017.000**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir		9 Desa	54.072.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir		9 Desa	54.072.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan		9 Lembaga Kemasyarakatan	42.017.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah				

	Pembangunan di Desa	Pembangunan di Desa				Pembangunan di	Perencanaan				
			Kec. Bintang Ara			Desa	Pembangunan di Desa	Kec. Bintang Ara	9 Desa	54.072.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah TP PKK Desa Yang Dibina		9 Desa	12.250.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah TP PKK Desa Yang Dibina		9 Desa	20.000.000	
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec. Bintang Ara	90 Keluarga	12.250.000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec. Bintang Ara	90 Keluarga	20.000.000	Penambahan Belanja Makan/Minum Rapat dan Belanja Konsultasi/SPPD
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**		**80%**	**56.376.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang**		**80%**	**56.173.000**	

							disusun tepat waktu				
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Bintang Ara	1 Laporan	56.376.000	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggara n urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Bintang Ara	1 Laporan	56.376.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Bintang Ara	100 Orang	41.160.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Bintang Ara	100 Orang	41.160.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Bintang Ara	12 Dokumen	15.216.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Bintang Ara	12 Dokumen	15.216.000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**		**80%**	**54.001.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**		**80%**	**54.001.000**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	Kec. Bintang Ara	9 Desa	54.001.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	Kec. Bintang Ara	9 Desa	54.001.000	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	Kec. Bintang Ara	9 Desa	54.001.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	Kec. Bintang Ara	9 Desa	54.001.000	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan**		**80%**	**96.970.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan**		**80%**	**96.970.000**	
07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Bintang Ara	3 Laporan	96.970.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Bintang Ara	3 Laporan	96.970.000	
07.01.02.2.01.02	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Bintang Ara	1 Laporan	44.784.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Bintang Ara	1 Laporan	44.784.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Bintang Ara	2 Laporan	52.186.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Bintang Ara	2 Laporan	52.186.000	

7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**B**	**1.716.982.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**B**	**2.690.931.000**	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	Kec. Bintang Ara	8 Laporan	9.629.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	Kec. Bintang Ara	8 Laporan	9.629.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bintang Ara	2 Dokumen	2.016.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bintang Ara	2 Dokumen	2.016.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Bintang Ara	2 Dokumen	1.284.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Bintang Ara	2 Dokumen	1.284.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Bintang Ara	2 Dokumen	1.284.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Bintang Ara	2 Dokumen	1.284.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Bintang Ara	2 Dokumen	1.511.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Bintang Ara	2 Dokumen	1.511.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Bintang Ara	2 Dokumen	1.511.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Bintang Ara	2 Dokumen	1.511.000	

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kec. Bintang Ara	2 Dokumen	1.016.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Kec. Bintang Ara	2 Dokumen	1.016.000	

		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bintang Ara	1 Laporan	1.007.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bintang Ara	1 Laporan	1.007.000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun	Kec. Bintang Ara	20 Laporan	1.210.567.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun	Kec. Bintang Ara	20 Laporan	2.153.864.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bintang Ara	13 Org / Bln	1.208.680.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bintang Ara	13 Org / Bln	2.151.977.000	Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Bintang Ara	2 Laporan	1.283.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Bintang Ara	2 Laporan	1.283.000	
7.01.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Bintang Ara	18 Laporan	604.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Bintang Ara	18 Laporan	604.000	

7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah yang disusun	Kec. Bintang Ara	3 Laporan	1.813.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah yang disusun	Kec. Bintang Ara	3 Laporan	1.813.000	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Bintang Ara	4 Dokumen	1.813.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Bintang Ara	4 Dokumen	1.813.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bintang Ara	100%	109.687.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bintang Ara	100%	109.687.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Bintang Ara	1 Paket	7.558.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Bintang Ara	1 Paket	7.558.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Bintang Ara	1 Paket	15.965.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Bintang Ara	1 Paket	15.965.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Bintang Ara	1 Paket	6.042.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Bintang Ara	1 Paket	6.042.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bintang Ara	408 Laporan	80.122.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bintang Ara	408 Laporan	100.000.000	Penambahan Biaya Paket Meeting dan SPPD ke Kabupaten
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah alat yang dibeli	Kec. Bintang Ara	15 Unit	83.191.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah alat yang dibeli	Kec. Bintang Ara	15 Unit	83.191.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Bintang Ara	4 Unit	83.191.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Bintang Ara	4 Unit	83.191.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Bintang Ara	100%	235.182.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Bintang Ara	100%	235.182.000	

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Bintang Ara	36 Laporan	34.914.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Bintang Ara	36 Laporan	34.914.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Bintang Ara	12 Laporan	200.268.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Bintang Ara	12 Laporan	200.268.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	Kec. Bintang Ara	35 Unit	66.913.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	Kec. Bintang Ara	35 Unit	66.913.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	Kec. Bintang Ara	32 Unit	54.226.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	Kec. Bintang Ara	32 Unit	65.000.000	Penambahan BBM Kendaraan Dinas
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor	Kec. Bintang Ara	19 Buah	12.687.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor	Kec. Bintang Ara	19 Buah	12.687.000	
JUMLAH					**3.480.399.115**	**JUMLAH**				**3.994.632.115**	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN)

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 merencanakan 6 program, 12 kegiatan, dan 29 Sub Kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD Kabupaten Tabalong senilai **Rp 3.994.632.115,-.** Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut secara terinci adalah sebagai berikut :

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH **KABUPATEN/KOTA**, dengan anggaran sebesar Rp. 3.573.094.058,- indikator program ini adalah : Persentase layanan umum lainnya tepat waktu dengan target 75% dan Nilai SAKIP (predikat) dengan target B sedangkan kegiatannya meliputi :
  a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
     - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
     - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
     - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
     - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
  c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
     - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
     - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
     - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
     - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,dengan rincian sub kegiatan :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/ RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

- PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN **PUBLIK**, dengan anggaran sebesar Rp. 134.400.318,- indikator program ini adalah : Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan di tingkat kecamatan dengan target 80% sedangkan kegiatannya meliputi :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan rincian sub kegiatan :

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN,

dengan anggaran sebesar Rp. 48.561.246,- indikator program ini adalah : Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa dengan target 85 % sedangkan kegiatannya meliputi :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan rincian sub kegiatan :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan., dengan rincian sub Kegiatan :

- Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, dengan anggaran sebesar Rp. 54.124.000,- indikator program ini adalah : Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)

100 % , dengan target 13 Desa sedangkan kegiatannya meliputi :

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan rincian sub kegiatan :
    - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

- PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, dengan anggaran sebesar Rp. 121.321.493,- indikator program ini adalah : Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 80 % sedangkan kegiatannya meliputi :

  a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
      - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
      - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.

- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA,

  dengan anggaran sebesar Rp. 40.511.000,- indikator program ini adalah : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target 80% sedangkan kegiatannya meliputi :

  a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan rincian sub kegiatan :
      - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Rencana kerja dan pendanaan pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. dibawah ini.

Tabel 3.1

Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Bintang Ara Tahun 2024

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)**		**100%**	**70.016.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)**		**100%**	**70.016.000**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bintang Ara	12 Patroli Terpadu	70.016.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan		12 Patroli Terpadu	70.016.000	
7.01.04.2.01.01	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bintang Ara	12 Laporan	70.016.000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bintang Ara	12 Patroli Terpadu	70.016.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa**		**80%**	**54.267.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa**		**80%**	**62.017.000**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir		9 Desa	54.072.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir		9 Desa	54.072.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan		9 Lembaga Kemasyarakatan	42.017.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum				

							Musyawarah				

	Pembangunan di Desa	Pembangunan di Desa				Pembangunan di	Perencanaan				
			Kec. Bintang Ara			Desa	Pembangunan di Desa	Kec. Bintang Ara	9 Desa	54.072.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah TP PKK Desa Yang Dibina		9 Desa	12.250.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah TP PKK Desa Yang Dibina		9 Desa	20.000.000	
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec. Bintang Ara	90 Keluarga	12.250.000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec. Bintang Ara	90 Keluarga	20.000.000	Penambahan Belanja Makan/Minum Rapat dan Belanja Konsultasi/SPPD
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**		**80%**	**56.376.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang**		**80%**	**56.173.000**	

							disusun tepat waktu				
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Bintang Ara	1 Laporan	56.376.000	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggara n urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Bintang Ara	1 Laporan	56.376.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Bintang Ara	100 Orang	41.160.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Bintang Ara	100 Orang	41.160.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Bintang Ara	12 Dokumen	15.216.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Bintang Ara	12 Dokumen	15.216.000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**		**80%**	**54.001.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**		**80%**	**54.001.000**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	Kec. Bintang Ara	9 Desa	54.001.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	Kec. Bintang Ara	9 Desa	54.001.000	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	Kec. Bintang Ara	9 Desa	54.001.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	Kec. Bintang Ara	9 Desa	54.001.000	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan**		**80%**	**96.970.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan**		**80%**	**96.970.000**	
07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Bintang Ara	3 Laporan	96.970.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Bintang Ara	3 Laporan	96.970.000	
07.01.02.2.01.02	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Bintang Ara	1 Laporan	44.784.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Bintang Ara	1 Laporan	44.784.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Bintang Ara	2 Laporan	52.186.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Bintang Ara	2 Laporan	52.186.000	

7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**B**	**1.716.982.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**B**	**2.690.931.000**	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	Kec. Bintang Ara	8 Laporan	9.629.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	Kec. Bintang Ara	8 Laporan	9.629.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bintang Ara	2 Dokumen	2.016.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bintang Ara	2 Dokumen	2.016.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Bintang Ara	2 Dokumen	1.284.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Bintang Ara	2 Dokumen	1.284.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Bintang Ara	2 Dokumen	1.284.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Bintang Ara	2 Dokumen	1.284.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Bintang Ara	2 Dokumen	1.511.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Bintang Ara	2 Dokumen	1.511.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Bintang Ara	2 Dokumen	1.511.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Bintang Ara	2 Dokumen	1.511.000	

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kec. Bintang Ara	2 Dokumen	1.016.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Kec. Bintang Ara	2 Dokumen	1.016.000	

		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bintang Ara	1 Laporan	1.007.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bintang Ara	1 Laporan	1.007.000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun	Kec. Bintang Ara	20 Laporan	1.210.567.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun	Kec. Bintang Ara	20 Laporan	2.153.864.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bintang Ara	13 Org / Bln	1.208.680.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bintang Ara	13 Org / Bln	2.151.977.000	Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Bintang Ara	2 Laporan	1.283.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Bintang Ara	2 Laporan	1.283.000	
7.01.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Bintang Ara	18 Laporan	604.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Bintang Ara	18 Laporan	604.000	

7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah yang disusun	Kec. Bintang Ara	3 Laporan	1.813.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah yang disusun	Kec. Bintang Ara	3 Laporan	1.813.000	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Bintang Ara	4 Dokumen	1.813.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Bintang Ara	4 Dokumen	1.813.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bintang Ara	100%	109.687.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bintang Ara	100%	109.687.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Bintang Ara	1 Paket	7.558.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Bintang Ara	1 Paket	7.558.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Bintang Ara	1 Paket	15.965.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Bintang Ara	1 Paket	15.965.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Bintang Ara	1 Paket	6.042.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Bintang Ara	1 Paket	6.042.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bintang Ara	408 Laporan	80.122.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bintang Ara	408 Laporan	100.000.000	Penambahan Biaya Paket Meeting dan SPPD ke Kabupaten
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah alat yang dibeli	Kec. Bintang Ara	15 Unit	83.191.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah alat yang dibeli	Kec. Bintang Ara	15 Unit	83.191.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Bintang Ara	4 Unit	83.191.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Bintang Ara	4 Unit	83.191.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Bintang Ara	100%	235.182.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Bintang Ara	100%	235.182.000	

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Bintang Ara	36 Laporan	34.914.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Bintang Ara	36 Laporan	34.914.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Bintang Ara	12 Laporan	200.268.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Bintang Ara	12 Laporan	200.268.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	Kec. Bintang Ara	35 Unit	66.913.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	Kec. Bintang Ara	35 Unit	66.913.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	Kec. Bintang Ara	32 Unit	54.226.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	Kec. Bintang Ara	32 Unit	65.000.000	Penambahan BBM Kendaraan Dinas
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor	Kec. Bintang Ara	19 Buah	12.687.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor	Kec. Bintang Ara	19 Buah	12.687.000	
JUMLAH					**3.480.399.115**	**JUMLAH**				**3.994.632.115**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Bintang Ara pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong.
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bintang Ara ini berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Bintang Ara Tahun 2019-2024, sehinggadifokuskan pada upaya pencapaian seluruh target pada Renstra.
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bintang Ara ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Bintang Ara ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkamenjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Tahun 2024.
2. Dalam penyusunan RKPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong, begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya Perubahan berdasarkan hasil asistensi dan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tabalong.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Tahun 2024 untuk setiap triwulannya.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, dengan melibatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat danstakeholders di Kabupaten Tabalong khususnya di Kecamatan Bintang Ara.

Akhir kata, Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintang Ara, September 2024

Camat Bintang Ara

JAFAKBAR, S.IP., M.M.,Kp

NIP.19770129 200501 1 006

TAHUN
2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

KECAMATAN HARUAI

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Renja Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong tahun 2024 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024, untuk menjalankan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dokumen Perubahan Renja ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong beserta program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan. Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon koreksi, saran dan masukan dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Perubahan Renja Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong ini dapat bermanfaat dan diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Haruai , September 2024

Camat Haruai

MULYADI, S.Sos, Kp

Pembina (IV/a)

NIP. 19690610 200012 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 ..... **7**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan..... 7

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024 7

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 12

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah..... 18

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah 19

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 23

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **27**

BAB IV PENUTUP..... **35**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian antara Renja Kecamatan Haruai Tahun 2024 dengan APBD Kecamatan Haruai Tahun 2024	8
Tabel 2.2	Perbandingan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Anggaran pada Renja dan APBD Kecamatan Haruai Tahun 2024	9
Tabel 2.3	Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Haruai sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	13
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Haruai	19
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Tabalong	24
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Haruai Tahun 2024	30

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan konsekuensi dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai wujud implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024. Renja Tahun 2024 telah disusun pada tahun 2023 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Seiring dengan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2024, hasil pengendalian pelaksanaan renja menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Haruai Tahun 2024.

Selain berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024, Perubahan Renja Kecamatan Haruai Tahun 2024 juga disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Haruai Tahun 2024 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019–2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019–2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Haruai Kabupaten TabalongTahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

   Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

2. Tujuan

   Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di SKPD Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Haruai Kabupaten TabalongTahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan
  - 2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024
  - 2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024
- 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun selain berpedoman dengan Perubahan RKPD, juga berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. Dalam hal ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Haruai sampai dengan triwulan IItahun 2024 dengan mengacu pada APBD tahun 2024 yang sudah disahkan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024

2.1.1.1 Kesesuaian Program Antara Renja Kecamatan Haruai Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada rencana kerja Kecamatan Haruai dengan APBD Tahun 2024, terdapat kesesuaian 100%. Artinya bahwa jumlah program dalam renja sama dengan jumlah program yang ada dalam APBD, yaitu ada 6 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2.1.1.2 Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Kecamatan Haruai Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan yang ada pada rencana kerja Kecamatan Haruai dengan APBD Tahun 2024, jumlah kegiatan sudah sesuai dengan APBD induk yaitu sebanyak 13 Kegiatan yang meliputi,: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan.

2.1.1.3 Kesesuaian Sub Kegiatan Antara Renja Kecamatan Haruai Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap Sub Kegiatan yang ada pada rencana kerja Kecamatan Haruai dengan APBD Tahun 2024, jumlah sub kegiatan yang ada pada renja tahun 2024 sebanyak 29 sedangkan sub kegiatan yang ada di APBD Tahun 2024 sebanyak 29.

2.1.1.4 Kesesuaian Pagu Anggaran Antara Renja Kecamatan Haruai Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Anggaran Renja Kecamatan Haruai Tahun 2024 sebesar Rp. **2,931,599,151.00** sedangkan anggaran APBD Kecamatan Haruai Tahun 2024 sebesar Rp. 3.323.951.281 , Terdapat selisih antara anggaran APBD dan Renja Tahun 2024 sebesar Rp. 392.352.130,- seiring dengan proses penganggaran yang berjalan.

Hasil evaluasi kesesuaian jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pagu anggaran antara Renja Kecamatan Haruai Tahun 2024 dengan APBD Kecamatan Haruai Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawahini :

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian antara Renja Kecamatan Haruai Tahun 2024dengan APBD Kecamatan Haruai Tahun 2024

No	Uraian	Renja 2024	APBD 2024
1	Program	6	6
2	Kegiatan	13	14
3	Sub Kegiatan	29	29
4	Pagu Anggaran	Rp 2.931.599.151	Rp 3.323.951.281

Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Perbandingan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Anggaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	UNSUR KEWILAYAHAN			**2.931.599.151,00**		3.323.951.281,00
7.01	KECAMATAN			**2.931.599.151,00**		3.323.951.281,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP	B	**2.739.515.151,00**	B	**2.937.617.281,00**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran danevaluasi Perangkat daerah yang disusun**	**8 Dokumen**	**9.547.650,00**	**8 Dokumen**	**9.547.650,00**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 1,999,800.00	2 Dokumen	Rp 1,999,800.00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1,274,625.00	1 Dokumen	Rp 1,274,625.00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1,274,625.00	1 Dokumen	Rp 1,274,625.00
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1,499,400.00	1 Dokumen	Rp 1,499,400.00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1,499,400.00	1 Dokumen	Rp 1,499,400.00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 999,900.00	1 Laporan	Rp 999,900.00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 999,900.00	1 Laporan	Rp 999,900.00
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen penatausahaan keuangan PerangkatDaerah yang disusun**	**20 Dokumen**	**2.069.370.432,00**	**20 Dokumen**	**2.271.572.652,00**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	Rp 2,067,141,870.00	14 Orang/Bulan	Rp 2,269,344,000.00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp 1,274,958.00	2 Laporan	Rp 1,274,958.00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ ~~Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan~~ Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp 953,604.00	18 Dokumen	Rp 953,604.00
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerahyang disusun**	**3 Dokumen**	**Rp 1,799,550.00**	**3 Dokumen**	**Rp 1,799,550.00**

7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	Rp 1,799,550.00	3 Dokumen	Rp 1,799,550.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum PerangkatDaerah**	**100%**	**194.798.899,00**	**100%**	**194.798.899**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 5,535,459.00	4 Paket	Rp 5,535,459.00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	31,179,130.00	25 Paket	Rp 31,179,130.00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Rp 7,800,310.00	4 Paket	Rp 7,800,310.00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Rp 150,284,000.00	2 Laporan	Rp 150,284,000.00
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**10 unit**	**Rp 50,128,620.00**	**10 unit**	**Rp 50,128,620.00**
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	Rp 50,128,620.00	10 unit	Rp 50,128,620.00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan PD**	**100%**	**310.900.000,00**	**100%**	**306.800.000,00**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp 28,800,000.00	1 Laporan	Rp 28,800,000.00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 282,100,000.00	1 Laporan	Rp 278,000,000.00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara**	**35 Unit**	**102.970.000,00**	**35 Unit**	**102.970.000,00**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Buah	Rp 76,180,000.00	12 Buah	Rp 76,180,000.00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	Rp 14,950,000.00	13 Unit	Rp 14,950,000.00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	Rp 11,840,000.00	1 Unit	Rp 11,840,000.00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Kelembagaan SosialKemasyarakatan**	**80%**	**63.934.000,00**	**80%**	**58.184.000,00**

7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**3 Laporan**	**63.934.000,00**	**3 Laporan**	**58.184.000,00**
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Rp 40,594,000.00	1 Laporan	Rp 40,594,000.00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Rp 23,340,000.00	2 Dokumen	Rp 17,590,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitasaparatur dan tata kelola kewilayahan desa**	**85%**	**28.400.000,00**	**85%**	**Rp 78.495.269,00**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Pemerintah Desa yang dibina/ diberdayakan.**	**13 Desa**	**Rp 7,800,000.00**	**13 Desa**	**Rp 7,800,000.00**
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga kemasyarakatan	Rp 7,800,000.00	13 Lembaga kemasyarakatan	Rp 7,800,000.00
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Meningkatkan Kesadaran keluarga mengikuti Penumbuhan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas**	**-**	**Rp 20.600.000.00**	**-**	**Rp 70,695,269.00**
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	9021 keluargs	Rp 20.600.000.00	9021 keluarga	Rp 70,695,269.00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)**	**13 Desa**	**Rp 40,440,000.00**	**13 Desa**	**Rp 90,065,000.00**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan**	**12 Patroli Terpadu**	**Rp 40,440,000.00**	**12 Patroli Terpadu**	**Rp 90,065,000.00**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp 40,440,000.00	12 Laporan	Rp 90,065,000.00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahanyang disusun tepat waktu**	**80%**	**Rp 48.380.000**	**80%**	**98.744.000,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan KepalaDaerah**	**Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahanumum sesuai penugasan kepala daerah**	**1 Laporan**	**Rp 48.380.000**	**1 Laporan**	**98.744.000,00**
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	Rp 38,800,000.00	100 Orang	Rp 88,154,731.00

7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Rp 9,580,000.00	12 Dokumen	Rp 10,590,000.00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Pembinaan danPengawasan PemerintahanDesa***	**85%**	**Rp 10,930,000.00**	**85%**	**Rp 60,845,000.00**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi**	**13 Desa**	**Rp 10,930,000.00**	**13 Desa**	**Rp 60,845,000.00**
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa	13 Dokumen	Rp 10,930,000.00	13 Dokumen	Rp 60,845,000.00

Berdasarkan data perbandingan antara Renja 2024 dan APBD 2024 pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan pada APBD disusun masih mengacu pada Renja, hal ini dapat dilihat dari persentase kesesuaian Program sebesar 100 persen, persentase kesesuaian kegiatan sebesar 100 persen dan persentase kesesuaian sub kegiatan sebesar 100 persen.

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, penilaian hasil pelaksanaan Renja menggunakan data realisasi pelaksanaan APBD sebagai acuan. Berikut rekapitulasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Haruai sampai triwulan II tahun 2024.

Tabel 2.3 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Catatan
			Keuangan (Rp.)	Kinerja %	Keuangan (Rp.)	Keuangan %	Kinerja %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	UNSUR KEWILAYAHAN		**3.323.951.281,00**		**1.509.704.607,00**	**45,42%**		
7.01	KECAMATAN		**3.323.951.281,00**		**1.509.704.607,00**	**45,42%**		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Evaluasi AKIP**	**2.739.515.151,00**	**B**	**1.454.546.607,00**	**50%**	**50 %**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran danevaluasi Perangkat daerah yang disusun**	**9.547.650,00**	**8 Dokumen**	**-**	**0,00%**	**50%**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 1,999,800.00	2 Dokumen	-	100,00%	1 Dokumen	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1,274,625.00	1 Dokumen	-	0,00%	1 Dokumen	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 1,274,625.00	1 Dokumen	--	0,00%	-	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 1,499,400.00	1 Dokumen	-	0,00%	1 Dokumen	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp 1,499,400.00	1 Dokumen	-	0,00%	-	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 999,900.00	1 Laporan	-	0,00%	1 Dokumen	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 999,900.00	1 Laporan	-	0,00%	1 Laporan	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen penatausahaan keuangan PerangkatDaerah yag disusun**	**2.271.572.562,00**	**20 Dokumen**	**1.147.441.491**	**51%**	**50,00%**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2,269.344.000.00	14 Orang/Bulan	1.147.441.491	51%	6 Bulan	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1,274,958.00	2 Laporan	-	0,00%	1 Laporam	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Rp 953,604.00	18 Laporan	-	0,00%	9 Laporan	

	Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerahyang disusun**	**Rp 1,799,550.00**	**3 Dokumen**	**-**	**0,00**	**1 Dokumen**	
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 1,799,550.00	3 Dokumen	-	0,00	1 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Catatan
			Keuangan (Rp.)	Kinerja %	Keuangan (Rp.)	Keuangan %	Kinerja %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum PerangkatDaerah**	**194.798.899,00**	**100%**	**125.904.093**	**65%**	**60%**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp 5,535,459.00	4 Paket	1.581.000-	29%	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31,179,130.00	25 Paket	7.607.100	24%	37,28%	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 7,800,310.00	4 Paket	-	0,00%	6 Bulan	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 150,284,000.00	2 Laporan	116.715.993	78%	6 Bulan	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**Rp 50,128,620.00**	**10 unit**	**Rp 44.099.099**	**88%**	**10 Unit**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp 50,128,620.00	10 unit	Rp 44.099.099	88%	10 Unit	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan PD**	**306.800.000,00**	**100%**	**116.033.808,00**	**38%**	**45%**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 28,800,000.00	1 Laporan	10.988.808	**38%**	1 Laporan	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 278,000,000.00	1 Laporan	105.045.000	**38%**	1 Laporan	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara**	**102.970.000,00**	**35 Unit**	**21.068.410**	**20%**	**35 Unit**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp 76,180,000.00	12 Unit	21.068.410	**28%**	12 Buah	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp 14,950,000.00	13 Unit	-	-	7 Unit	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang di Pelihara dan di rehabilitasi	Rp 11,840,000.00	1 Unit	-	-	1 Unit	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial**	**58.184.000,00**	**80%**	**-**	**-**	**80%**	

[redacted]

		Kemasyarakatan						
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**58.184.000,00**	**3 Laporan**	**-**	**-**	**2 Laporan**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahandengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 40,594,000.00	1 Laporan	-	-	1 Laporan	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 17.590.000,00	2 Laporan	-	-	1 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Catatan
			Keuangan (Rp.)	Kinerja %	Keuangan (Rp.)	Keuangan %	Kinerja %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitasaparatur dan tata kelola kewilayahan desa**	**Rp 78.495.269,00**	**85%**	**31.508.000**	**40%**	**70 %**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Pemerintah Desa yang dibina/diberdayakan.**	**Rp 7,800,000.00**	**13 Desa**	**6.550.000**	**84%**	**13 Desa**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 7,800,000.00	13 Lembaga kemasyarakatan	6.550.000	**84%**	13 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		**Rp 70.695.269,00**		**24.958.000**	**35%**	**1 Laporan**	
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Rp 70.695.269,00	9021 keluarga	24.958.000	**35%**	4500 keluarga	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,Keamanan dan Kenyamanan)**	**Rp 90.065.000.00**	**100 %**	**12.600.000**	**14%**	**100%**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan**	**Rp 90.065.000**	**12 Patroli Terpadu**	**12.600.000**	**14%**	**6 Patroli Terpadu**	**Penyesuaian anggaran pada sub kegiatan**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 90.065.000,00	12 Laporan	12.600.000	**14%**	3 Laporan	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahanyang disusun tepat waktu**	**Rp 98.744.000,00**	**80%**	**11.050.000**	**11%**	**90%**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan KepalaDaerah**	**Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahanumum sesuai penugasan kepala daerah**		**1 Laporan**	**11.050.000**	**11%**	**1 laporan**	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Rp 88.154.731,00	100 Orang	4.500.000	**5%**	30 Orang	

		Kesatuan Republik Indonesia						
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 10.590.000,00	12 Dokumen	6.550.000	**62%**	6 Dokumen	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Pembinaan danPengawasan PemerintahanDesa***	**Rp60.845.000**	**80%**	**-**	**0%**	**60%**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa**	**Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi**	**Rp 60.845.000**	**13 Desa**	**-**	**0%**	**13 Desa**	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 60.845.000,00	13 Dokumen	-	**0%**	13 Dokumen	

Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Haruai sampai triwulan II diatas diolah berdasarkan data pada formulir evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sesuai format evaluasi renja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (formulir evaluasi terlampir). Evaluasi Renja dimaksudkan untuk mengindentifikasi sejauh mana capaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja serta implikasi yang timbul, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk Tindakan perencanaan selanjutnya.

Berdasarkan data pada tabel 2.3 tersebut, dapat dilihat bahwa dari sisi anggaran, Kecamatan Haruai telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.509.704.607,- atau sekitar 45,42 persen dari total anggaran untuk tahun 2024. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif masih rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena pelaksanaannya memang dijadwalkan padatriwulan III dan IV, diantaranya yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
    a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
    b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD.
    c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
    d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD.
    e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
    f. Koordinasi dan Penyusunan Lapooran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
    g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD.
    b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik SKPD.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    a. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah.
    a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya.
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan :
    a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan :
    a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
9. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan :
    a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan Haruai mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan Otonomi Daerah. Kewenangan tersebut diantaranya :

1. Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK).
3. Pelayanan penerbitan Keterangan Pindah.
4. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat.
5. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
6. Menggkordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
7. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam membangun desa.
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
9. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Haruai menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Haruai, diantaranya :

1. Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya.
2. Mengadakan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Meningkatkan system pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

Disamping itu, kinerja pelayanan perangkat daerah yang merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maka capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada Perubahan Renstra Kecamatan Haruai adalah :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Haruai

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi		
		2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun Berjalan
2	Tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	65%	70%	75%	80%	85%	100%	100%	Tahun Berjalan
3	Persentase layanan umum lainnya tepat waktu	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Tahun Berjalan
4	Nilai AKIP	B	B	B	BB	BB	B	B	Tahun Berjalan

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong, maka Kecamatan Haruai mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Kedudukan Kecamatan
   1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
   2. Kecamatan dipimpin oleh Camat.
   3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris daerah.

b. Tugas Pokok Kecamatan

   Kecamatan Haruai memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebaagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

c. Fungsi Kecamatan

   Fungsi Kecamatan Haruai adalah sebagai pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pengkoordinasian pelayanan administrasi publik dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Camat selaku kepala SKPD dibantu oleh Sekretaris Camat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi 4 (empat) Seksi yang terdiri dari : Pemerintahan, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, dan Keamanan dan Ketertiban Umum. Berikut adalah susunan organisasi di Kecamatan Haruai :

Tabel : Susunan Organisasi Kecamatan Haruai

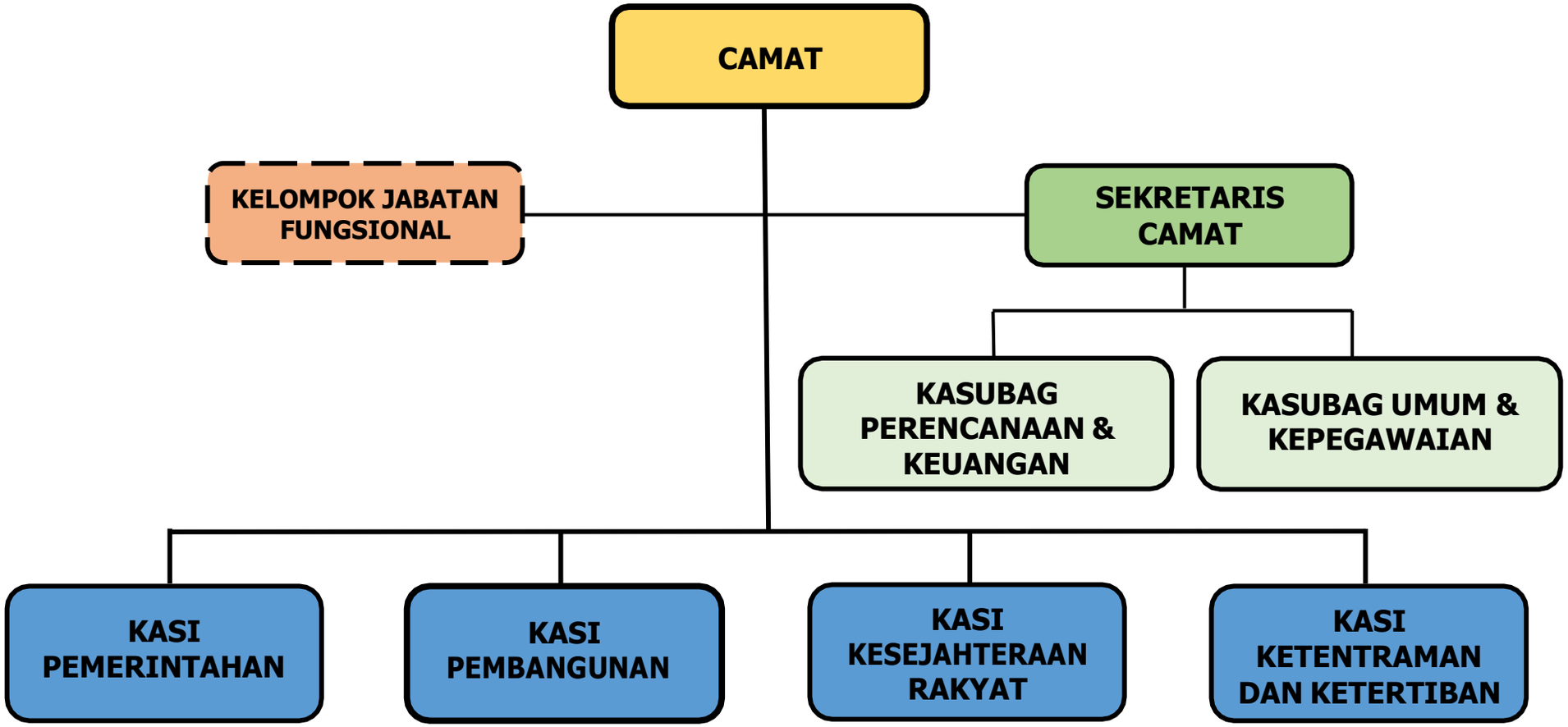

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, Kecamatan Haruai berpangku pada visi Kabupaten Tabalong **"Menuju Tabalong yang lebih agamis, sejahtera dan mandiri"** dengan mengemban misi :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Tabalong yang lebih agamis melalui kebijakan pembangunan yang diarahkan agar tercapai masyarakat madani yang beretika dan bermoral melalui peningkatan pemahaman dan pengamanan nilai-nilai agama, memperkuat kelembagaan keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan sehingga akan terwujud kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia (Tabalong Berkualitas).
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong dengan mengawal pembangunan yang diarahkan agar masyarakat berkemampuan lebih dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya melalui kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara signifikan, serta penurunan angka kemiskinan secara nyata (Tabalong Sejahtera).

Mewujudkan kemandirian daerah Kabupaten Tabalong melalui pembangunan yang diarahkan pada tercapainya system yang handal dan dinamis yang mampu bertindak sesuai keadaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bijak melalui penguatan kelembagaan ekonomi, social budaya dan pemerintahan untuk menciptakan kemajuan perekonomian daerah yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas (Tabalong Mandiri).

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala dan kelemahan yang dihadapi oleh Kecamatan Haruai dalam memberikanpelayanan maksimal kepada masyarakat, diantaranya :

1. Adanya 3 desa terpencil yang jarak tempuhnya dan kondisi jalannya yang sangat rusak sehingga menyulitkan pihak kecamatan dalam melakukan pembinaan ke desa-desa tersebut.
2. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dan kurangnya pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan kerja dan profesionalitas aparatur Kecamatan Haruai.
3. Minimnya pemanfaatan teknologi dalam bekerja dikalangan aparatur Kecamatan Haruai menyebabkan kurang efektif dan efisiennya pemanfaatan waktu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan.
4. Jumlah SDM Apartur yang kurang memadai.

Disamping kendala dan kelemahan yang ada, Kecamatan Haruai juga memiliki beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Haruai dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Haruai, diantaranya :

1. Adanya struktur organisasi yang terpola.
2. Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat.
3. Suasana kerja di Kecamatan Haruai yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (team work).
4. Adanya koordinasi di Wilayah Kecamatan Haruai yang baik.

Adapun isu-isu penting lainnya yang ada di Kecamatan Haruai adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

   Kecamatan Haruai merupakan kawasan yang terindikasi memiliki Kawasan kumuh. Untuk mengurangi kekumuhan, mindset masyarakat perlu diubah sehingga tercipta kawasan tanpa kumuh

2. Bidang Pemerintahan

   Berlakunya UU Desa yang menuntut aparat kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar desa lebih optimal melaksanakan amanat UU Desa tersebut.

3. Bidang Pelayanan

   Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima menjadikan kecamatan Haruai untuk selalu berinovasi agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan

4. Bidang Pertanian

   Alih fungsi lahan merupakan masalah yang mulai mencuat di wilayah kecamatan Haruai. Para pengembang mulai melirik tanah pertanian di Kecamatan Haruai untuk dijadikan perumahan dan kawasan Industri.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rumusan tematik pembangunan sebagaimana disebutkan dalam RKPD Tahun 2024 adalah " Penguatan Daya Saing Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas". RKPD 2024 dalam hal ini mengalami perubahan salah satunya dari segi rumusan program/kegiatan/sub kegiatan. Selanjutnya, sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rancangan Perubahan RKPD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, maka dalam reviu ini akan dilakukan proses membandingkan rancangan perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perubahan rencana kerja Kecamatan Haruai. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Tabalong

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**KEC. HARUAI**	**Nilai AKIP**	**B**	**2.937.617.281,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**KEC. HARUAI**	**Nilai AKIP**	**B**	**3.551.327.555,00**
I.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**KEC. HARUAI**	**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah**	**15 Dokumen**	9.547.650,00	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**KEC. HARUAI**	**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah**	**15 Dokumen**	9.547.650,00
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumah dokumen perencanaan perangkat daerah	**3 Dokumen**	1.999.800,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumah dokumen perencanaan perangkat daerah	**3 Dokumen**	1.999.800,00
I.1.2	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	**4 Dokumen**	1.274.625,00	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	**4 Dokumen**	1.274.625,00
I.1.3	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		Jumah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	**4 Dokumen**	1.274.625,00	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		Jumah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	**4 Dokumen**	1.274.625,00
I.1.4	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD		Jumah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	**2 Dokumen**	1.499.400,00	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD		Jumah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	**2 Dokumen**	1.499.400,00
I.1.5	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD		Jumah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	**2 Dokumen**	1.499.400,00	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD		Jumah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	**2 Dokumen**	1.499.400,00
I.1.6	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kknerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kknerja SKPD	**2 Laporan**	999.900,00	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kknerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kknerja SKPD	**2 Laporan**	999.900,00

I.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	**4 Laporan**	999.900,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	**4 Laporan**	999.900,00
I.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**KEC. HARUAI**	**Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah**	**20 Dokumen**	2.271.572.562,00	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**KEC. HARUAI**	**Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah**	**20 Dokumen**	2.271.572.562,00
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang	2.269.344.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang	2.269.344.000,00
I.2.2	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan SKPD		Jumah laporan akhir tahuan SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahuanan SKPD	2 Laporan	1.274.958,00	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan SKPD		Jumah laporan akhir tahuan SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahuanan SKPD	2 Laporan	1.274.958,00
I.2.3	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	953.604,00	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	953.604,00
I.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**KEC. HARUAI**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**1.799.550,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**KEC. HARUAI**	**Terlaksananya kegiatan administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**1.799.550,00**
I.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Reencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.799.550,00	Penysunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.799.550,00
I.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**KEC. HARUAI**	**Terlaksananya kegiatan administrasi Umum**	**100%**	**194.798.899,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**KEC. HARUAI**	**Terlaksananya kegiatan administrasi Umum**	**100%**	**394.213.978,00**
I.4.1	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Banguann Kantor		Jumlah Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan	6 Paket	5.535.459,00	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Banguann Kantor		Jumlah Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan	6 Paket	5.535.459,00
I.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	31.179.130,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	31.179.130,00
I.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di Sediakan	8 Paket	7.800.310,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di Sediakan	8 Paket	7.800.310,00
I.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	150.284.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	349.699.079,00
I.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**KEC. HARUAI**	**Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**50.128.620,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**KEC. HARUAI**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**277.788.115,00**

I.5.I	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 Unit		Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	6 Unit	10.161.546,00
I.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya Yang disediakan	4 Unit	50.128.620,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya Yang disediakan	18 Unit	**205.466.569,00**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	62.160.000,00
I.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KEC. HARUAI**	**Disediakan**	**100%**	**306.800.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KEC. HARUAI**	**Tersedianya Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**312.800.000,00**
I.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	28.800.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	34.800.000,00
I.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 Laporan	278.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 Laporan	278.000.000,00
I.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KEC. HARUAI**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara**	**43 Unit**	**102.970.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara**	**44 Unit**	**255.605.700,00**
1.7.I	Penyediaan Jasa Pemerliharaan, Biaya Pemelihaaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan kendaraan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan di Bayarkan Pajaknya	18 Unit	76.180.000,00	Penyediaan Jasa Pemerliharaan, Biaya Pemelihaaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan kendaraan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	110.560.000,00
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya		Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor	25 Unit	14.950.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya		Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainya yang dipeliharta'	25 Unit	14.950.000,00
I.7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya		Terpeliharanya Gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	11.840.000,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya		Terpeliharanya Gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	130.095.700,00
i.8	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**KEC. HARUAI**	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang urusan pemerintahan Perangkat daerah			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**KEC. HARUAI**	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang urusan pemerintahan Perangkat daerah	100%	28.000.000,00
1.8.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14	28.000.000,00
II	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**KEC. HARUAI**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum**	**100%**	**90.065.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**KEC.HARUAI**	**Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)**	**100%**	**90.065.000,00**
II.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	7 desa	90.065.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	7 desa	90.065.000,00

	Vertikal di Wilayah Kecamatan		Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Wilayah Kecamatan		
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**KEC.HARUAI**	**Jumlah usulan masyarakat yang** Diakomodir	85%	**78.495.269,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**KEC.PUGAAN**	**Jumlah usulan masyarakat yang** Diakomodir	85%	**86.045.269,00**
III.1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**KEC.HARUAI**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan**	**13 Desa**	**7.800.000,00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**KEC.HARUAI**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan**	**13 Desa**	**7.800.000,00**
III.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum MUSRENBANG di Desa	13 Lembaga Kemasyarakatan	7.800.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum MUSRENBANG di Desa	13 Lembaga Kemasyarakatan	7.800.000,00
III.2	**Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		**Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas**	**650 Keluarga**	**70.695.269,00**	**Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		**Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas**	**650 Keluarga**	**78.245.269,00**
III.2.1	Pertumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	650 Keluarga	**70.695.269,00**	Pertumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	650 Keluarga	**78.245.269,00**
IV	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**KEC.HARUAI**	***Tingkat keterlibatan masyarakatdalam perencanaan pembangunan***	85%	**60.845.000,00**	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**KEC.HARUAI**	***Tingkat keterlibatan masyarakatdalam perencanaanpembangunan***	85%	**60.845.000,00**
IV.1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**KEC.HARUAI**	**Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi**	**13 Desa**	**60.845.000,00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**KEC.HARUAI**	**Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi**	**13 Desa**	**60.845.000,00**
IV.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemrintahan desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**12 Dokumen**	60.845.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemrintahan desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**12 Dokumen**	**60.845.000,00**
V	**PROGRAM PENYELENGGARRAAN URUSAN PEMRINTAHAN UMUM**	**KEC.HARUAI**	**Persentase layanan umum lainnya tepat waktu**	**85%**	**98.744.731,00**	**PROGRAM PENYELENGGARRAAN URUSAN PEMRINTAHAN UMUM**	**KEC.HARUAI**	**Persentase layanan umum lainnya tepat waktu**	**85%**	**138.444.731,00**
V.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**KEC.HARUAI**	**Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**1 Laporan**	**98.744.731,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**KEC.HARUAI**	**Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**1 Laporan**	**138.444.731,00**

V.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1745, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1745, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	45 Orang	88.154.731,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1745, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1745, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	69 Orang	127.854.731,00
V.12	Pelaksanaan Tugas Prokopinca		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	8 Dokumen	10.590.000,00	Pelaksanaan Tugas Prokopinca		Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instalasi Vertikal Terkait	8 Dokumen	10.590.000,00
VI	**PROGRAM PENYELENGGARRAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**KEC.HARUAI**	**Persentase layanan umum lainnya tepat waktu**	**80%**	**58.184.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARRAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**KEC.PUGAAN**	**Persentase layanan umum lainnya tepat waktu**	**80%**	**62.184.000,00**
VI.1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**KEC.HARUAI**	**Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**11 Laporan**	**58.184.000,00**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**KEC.PUGAAN**	**Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**11 Laporan**	**62.184.000,00**
VI.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	40.594.000,00	Jumlah Laporan koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	40.594.000,00
VI.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah dokumen Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	17.590.000,00	Jumlah dokumen Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah dokumen Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	21.590.000,00
JUMLAH PAGU KEBUTUHAN TAHUN 2024 BERDASARKAN HASIL ANASLISIS					**3.323.951.281,00**					**3.988.911.555,00**

Keterangan : Untuk angka sebelumnya di File Tabel 2.5 Ranc Renja (Tabel TC 29 yg di kirim ke Bapperida Kabupaten Tabalong.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN)

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 merencanakan 6 program, 12 kegiatan, dan 29 Sub Kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD Kabupaten Tabalong senilai **Rp 3.890.366.362,-.** Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut secara terinci adalah sebagai berikut :

- **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**, dengan anggaran sebesar Rp. 3.417.482.862,- indikator program ini adalah : Persentase layanan umum lainnya tepat waktu dengan target 75% dan Nilai SAKIP (predikat) dengan target B sedangkan kegiatannya meliputi :
  a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
     - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
     - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
     - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
     - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
  c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
     - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
     - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
     - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
     - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,dengan rincian sub kegiatan :
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/ RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

- **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**, dengan anggaran sebesar Rp. 110.248.500,- indikator program ini adalah : Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan di tingkat kecamatan dengan target 80% sedangkan kegiatannya meliputi :
  a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan rincian sub kegiatan :
     - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
     - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**, dengan anggaran sebesar Rp. 91.680.269,- indikator program ini adalah : Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa dengan target 85 % sedangkan kegiatannya meliputi :
  a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan rincian sub kegiatan :
     - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

  b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan., dengan rincian sub Kegiatan :
     - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
- **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**, dengan anggaran sebesar Rp. 90.065.000,- indikator program ini adalah : Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)

100 % , dengan target 13 Desa sedangkan kegiatannya meliputi :

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan rincian sub kegiatan :
    - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

- **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**, dengan anggaran sebesar Rp. 125.444.731,- indikator program ini adalah : Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 80 % sedangkan kegiatannya meliputi :
    a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
        - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
        - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.

- **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**, dengan anggaran sebesar Rp. 55.445.000,- indikator program ini adalah : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target 80% sedangkan kegiatannya meliputi :
    a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan rincian sub kegiatan :
        - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Rencana kerja dan pendanaan pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. dibawah ini.

Tabel 3.1

Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Haruai Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2024 (Sebelum Perubahan)							Rencana Tahun 2024 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024			APBD 2024			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PERUBAHAN RENJA 2024			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	UNSUR KEWILAYAHAN	Haruai			**2.931.599.151**	PAD		**3.323.951.281**	PAD			**3.890.366.362**	PAD	
7.01	KECAMATAN	Haruai			**2.931.599.151,00**	PAD		**3.323.951.281**	PAD			**3.890.366.362**	PAD	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Haruai	Nilai SAKIP (predikat)	B	**2.739.515.151**	PAD	B	**2.937.617.281,00**	PAD	Nilai SAKIP (predikat)	B	**3.417.482.862**	PAD	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Haruai**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran danevaluasi Perangkat daerah yang disusun**	**8 Dokumen**	9.547.650	**PAD**	**8 Dokumen**	9.547.650	**PAD**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun**	**8 Dokumen**	9.547.650	**PAD**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Haruai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 1,999,800.00	PAD	2 Dokumen	Rp 1,999,800.00	PAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 1,999,800.00	PAD	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Haruai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1,274,625.00	PAD	1 Dokumen	Rp 1,274,625.00	PAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1,274,625.00	PAD	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Haruai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1,274,625.00	PAD	1 Dokumen	Rp 1,274,625.00	PAD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1,274,625.00	PAD	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Haruai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1,499,400.00	PAD	1 Dokumen	Rp 1,499,400.00	PAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1,499,400.00	PAD	

7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Haruai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1,499,400.00	PAD	1 Dokumen	Rp 1,499,400.00	PAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1,499,400.00	PAD	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Haruai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 999,900.00	PAD	1 Laporan	Rp 999,900.00	PAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 999,900.00	PAD	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Haruai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 999,900.00	PAD	1 Laporan	Rp 999,900.00	PAD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 999,900.00	PAD	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Haruai**	**Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun**	**20 Dokumen**	**2.069.370.432**	**PAD**	**20 Dokumen**	**2.271.572.562**	**PAD**	**Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun**	**20 Dokumen**	**2.477.298.562**	**PAD**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Haruai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	Rp 2,067,141,870.00	PAD	14 Orang/Bulan	Rp 2,269,344,000.00	PAD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	Rp 2.475.070.000	PAD	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Haruai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp 1,274,958.00	PAD	2 Laporan	Rp 1,274,958.00	PAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp 1.274.958	PAD	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Haruai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp 953,604.00	PAD	18 Laporan	Rp 953,604.00	PAD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp 953.604	PAD	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Haruai**	**Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerahyang disusun**	**3 Dokumen**	**Rp 1,799,550.00**	**PAD**	**3 Dokumen**	**Rp 1,799,550.00**	**PAD**	**Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah yang disusun**	**3 Dokumen**	**Rp 1.799.550**	**PAD**	

7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Haruai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	Rp 1,799,550.00	PAD	3 Dokumen	Rp 1,799,550.00	PAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	Rp. 1.799.550	PAD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2024 (Sebelum Perubahan)							Rencana Tahun 2024 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024			APBD 2024			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PERUBAHAN RENJA 2024			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Haruai**	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**194.798.899**	**PAD**	**100%**	**194.798.899**	**PAD**	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum PerangkatDaerah**	**100 %**	**315.498.899,00**	**PAD**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Haruai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 5,535,459.00	PAD	4 Paket	Rp 5,535,459.00	PAD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 5,535,459.00	PAD	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Haruai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	31,179,130.00	PAD	25 Paket	Rp 31,179,130.00	PAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	31,179,130.00	PAD	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Haruai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Rp 7,800,310.00	PAD	4 Paket	Rp 7,800,310.00	PAD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Rp 7,800,310.00	PAD	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Haruai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Rp 150,284,000.00	PAD	2 Laporan	Rp 150,284,000.00	PAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	270.984.000,00	PAD	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Haruai**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**10 unit**	**Rp 50,128,620.00**	**PAD**	**10 unit**	**Rp 50.128.620,00**	**PAD**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**20 unit**	**138.188.201**	**PAD**	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Haruai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	Rp 50,128,620.00	PAD	10 unit	Rp 50,128,620.00	PAD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	138.188.201	PAD	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Haruai**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**310.900.000**	**PAD**	**100%**	**306.800.000**	**PAD**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**312.800.000**	**PAD**	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Haruai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	Rp 28,800,000.00	PAD	1 Laporan	Rp 28,800,000.00	PAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	1 Laporan	34.800.000	PAD	

			Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							dan Listrik yang Disediakan				
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Haruai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 282,100,000.00	PAD	1 Laporan	Rp 278,000,000.00	PAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 278,000,000.00	PAD	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Haruai**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara**	**35 Unit**	**Rp 102.970.000**	**PAD**	**35 Unit**	**Rp 102.970.000**	**PAD**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara**	**35 Unit**	**162.350.000**	**PAD**	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Haruai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Rp 76,180,000.00	PAD	12 Unit	Rp 76,180,000.00	PAD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	110.560.000	PAD	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Haruai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	Rp 14,950,000.00	PAD	21 Unit	Rp 14,950,000.00	PAD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	14.950.000	PAD	
7.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Haruai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 11,840,000.00	PAD	2 Unit	Rp 11,840,000.00	PAD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	36.840.000	PAD	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Haruai**	**Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan**	**80%**	**Rp 63.934.000.00**	**PAD**	**80%**	**Rp 58.184.000**	**PAD**	**Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan**	**80%**	**110.248.500**	**PAD**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Haruai	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	Rp 63.934.000.00	PAD	3 Laporan	Rp 58.184.000	PAD	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	110.248.500	PAD	

7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Haruai	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Rp 40,594,000.00	PAD	1 Laporan	Rp 40,594,000.00	PAD	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	91.283.500,00	PAD	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Haruai	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Rp 23,340,000.00	PAD	2 Dokumen	Rp 17,590,000.00	PAD	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	18.965.000,00	PAD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2024 (Sebelum Perubahan)							Rencana Tahun 2024 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024			APBD 2024			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PERUBAHAN RENJA 2024			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Haruai**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa**	**85%**	**Rp 28.400.000,00**	**PAD**	**75%**	**Rp 78.495.269,00**	**PAD**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitasaparatur dan tata kelola kewilayahan desa**	**85%**	**91.680.269**	**PAD**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Haruai	Jumlah Pemerintah Desa yang di Bina/Di Berdayakan.	13 Desa	Rp 7,800,000.00	PAD	13 Desa	Rp 7,800,000.00		Jumlah Pemerintah Desa yang di Bina/Di Berdayakan.	13 Desa	Rp 7,800,000.00		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Haruai	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga kemasyarakatan	Rp 7,800,000.00	PAD	13 Lembaga kemasyarakatan	Rp 7,800,000.00	PAD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga kemasyarakatan	Rp 7,800,000.00	PAD	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Haruai	Meningkatkan Kesadaran keluarga mengikuti Penumbuhan Kehidupan Menuju Keluarga berkualitas		Rp 20.600.000,00	PAD		Rp 70,695,269.00	PAD	Meningkatkan Kesadaran keluarga mengikuti Penumbuhan Kehidupan Menuju Keluarga berkualitas	100%	Rp 83.880,,269.00	PAD	
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Haruai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	9021 keluargs	Rp 20.600.000,00	PAD	9021 keluarga	Rp 70,695,269.00	PAD	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	9021 keluarga	Rp 83.880,,269.00	PAD	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Haruai**	**Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan**	**13 Desa**	**Rp 40,440,000.00**	**PAD**	**13 Desa**	**Rp 90,065,000.00**	**PAD**	**Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan**	**13 Desa**	**Rp 90,065,000.00**	**PAD**	

			Kenyamanan)							**Kenyamanan)**				
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Haruai	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 Patroli Terpadu	Rp 40,440,000.00	PAD	12 Patroli Terpadu	Rp 90,065,000.00	PAD	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 Patroli terpadu	Rp 90,065,000.00	PAD	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Haruai	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp 40,440,000.00	PAD	12 Laporan	Rp 90,065,000.00	PAD	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp 90,065,000.00	PAD	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Haruai**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**	**80%**	**Rp 48.380.000**	**PAD**	**80%**	**98.744.731.00**	**PAD**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**	80%	**125.444.731,00**	**PAD**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan KepalaDaerah	Haruai	Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan		PAD	1 Laporan	98.744.731.00	PAD	Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahanumum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	125.444.731	PAD	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Haruai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	Rp 38,800,000.00	PAD	100 Orang	Rp 88,154,731.00	PAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	114.854.731	PAD	

7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Haruai	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Rp 9,580,000.00	PAD	12 Dokumen	Rp 10,590,000.00	PAD	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	10.590.000,00	PAD	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Haruai**	***Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**80%**	**Rp 10,930,000.00**	**PAD**	**80%**	**Rp 60,845,000.00**	**PAD**	***Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	80%	**55.445.000,00**	**PAD**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Haruai	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	13 Desa	Rp 10,930,000.00	PAD	13 Desa	Rp 60,845,000.00	PAD	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	13 Desa	55.445.000,00	PAD	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Haruai	Jumlah Dokumen yang difasulitasi dalam rangka Administrasi Pemerintahan Desa	13 Dokumen	Rp 10,930,000.00	PAD	13 Dokumen	Rp 60,845,000.00	PAD	Jumlah Dokumen yang difasulitasi dalam rangka Administrasi Pemerintahan Desa	13 Dokumen	55.445.000,00	PAD	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Haruai pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong.
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Haruai ini berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Haruai Tahun 2019-2024, sehinggadifokuskan pada upaya pencapaian seluruh target pada Renstra.
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Haruai ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Haruai ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkamenjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Tahun 2024.
2. Dalam penyusunan RKPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong, begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya Perubahan berdasarkan hasil asistensi dan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tabalong.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Tahun 2024 untuk setiap triwulannya.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, dengan melibatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat danstakeholders di Kabupaten Tabalong khususnya di Kecamatan Haruai.

Akhir kata, Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Haruai, September 2024

Camat Haruai

MULYADI, S.Sos, Kp

Pembina (IV/a)

NIP. 19690610 200012 1 005

PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN MUARA UYA
KABUPATEN TABALONG

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN MUARA UYA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Renja Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong tahun 2024 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024, untuk menjalankan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dokumen Perubahan Renja ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong beserta program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan. Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon koreksi, saran dan masukan dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Perubahan Renja Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong ini dapat bermanfaat dan diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Muara Uya, Oktober 2024

Camat Muara Uya,

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG KECAMATAN MUARA UYA

AIDY RISYAWAL, S.STP, M.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19900502 201010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 ..... **7**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan 7

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024 7

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 12

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah 18

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah 19

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 23

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **27**

BAB IV PENUTUP **35**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian antara Renja Kecamatan Muara Uya Tahun 2024 dengan APBD Kecamatan Muara Uya Tahun 2024	8
Tabel 2.2	Perbandingan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Anggaran pada Renja dan APBD Kecamatan Muara Uya Tahun 2024	9
Tabel 2.3	Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Muara Uya sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	13
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Muara Uya	19
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Tabalong	24
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Muara Uya Tahun 2024	30

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan konsekuensi dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai wujud implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024. Renja Tahun 2024 telah disusun pada tahun 2023 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Seiring dengan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2024, hasil pengendalian pelaksanaan renja menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Muara Uya Tahun2024. Hal ini sekaligus sebagai tindak lanjut dari terbitnya Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor P-668/Bappedalitbang.P2E/050/07/2024 tentang Penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2024, bahwa SKPD melakukan penyesuaian terhadap Renja sehubungan dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Selain berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024, Perubahan Renja Kecamatan Muara Uya Tahun 2024 juga disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Uya Tahun 2024 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019–2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019–2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2021 tentang

Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 29).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Uya Kabupaten TabalongTahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

   Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

2. Tujuan

   Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di SKPD Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Uya Kabupaten TabalongTahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan
  - 2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024
  - 2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024
- 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun selain berpedoman dengan Perubahan RKPD, juga berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. Dalam hal ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Uya sampai dengan triwulan II tahun 2024 dengan mengacu pada APBD tahun 2024 yang sudah disahkan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024

2.1.1.1 Kesesuaian Program Antara Renja Kecamatan Muara Uya Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada rencana kerja Kecamatan Muara Uya dengan APBD Tahun 2024, terdapat kesesuaian 100%. Artinya bahwa jumlah program dalam renja sama dengan jumlah program yang ada dalam APBD, yaitu ada 6 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2.1.1.2 Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Kecamatan Muara Uya Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan yang ada pada rencana kerja Kecamatan Muara Uya dengan APBD Tahun 2024, terdapat kesesuaian 100%. Artinya bahwa jumlah kegiatan dalam renja sama dengan jumlah kegiatan yang ada dalam APBD, yaitu ada 10 kegiatan yaitu : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.1.1.3 Kesesuaian Sub Kegiatan Antara Renja Kecamatan Muara Uya Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap Sub Kegiatan yang ada pada rencana kerja Kecamatan Muara Uya dengan APBD Tahun 2023, jumlah sub kegiatan yang ada pada renja tahun 2023 sebanyak 10 sedangkan sub kegiatan yang ada di APBD Tahun 2023 sebanyak 25. Hal ini terjadi sehubungan dengan pengurangan anggaran pada saat asistensi.

2.1.1.4 Kesesuaian Pagu Anggaran Antara Renja Kecamatan Muara Uya Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2023

Anggaran Renja Kecamatan Muara Uya Tahun 2024 sebesar Rp.3.925.674.043,- sedangkan anggaran APBD Kecamatan Muara Uya Tahun 2023 sebesar Rp. 3.321.769.464. Terdapat selisih antara anggaran APBD dan Renja Tahun 2023 sebesar Rp. 603.904.579,- seiring dengan proses penganggaran yang berjalan.

Hasil evaluasi kesesuaian jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pagu anggaran antara Renja Kecamatan Muara Uya Tahun 2024 dengan APBD Kecamatan Muara Uya Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawahini :

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian antara Renja Kecamatan Muara Uya Tahun 2024 dengan APBD Kecamatan Muara Uya Tahun 2024

No	Uraian	Renja 2024	APBD 2023
1	Program	6	6
2	Kegiatan	13	13
3	Sub Kegiatan	28	28
4	Pagu Anggaran	Rp 3.925.674.043	Rp 3.321.769.464

Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Perbandingan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Anggaran pada Renja dan APBD Kecamatan Muara Uya Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2023	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	UNSUR KEWILAYAHAN			3.925.674.043		3.321.769.464
7.01	KECAMATAN			3.925.674.043		3.321.769.464
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP (predikat)	B	3.330.724.491	B	3.045.547.743
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	9.893.170	8 Dokumen	9.672.090
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra/Renja, Renstra-P/Renja-P	2 Dokumen	2.022.002	2 Dokumen	2.000.002
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.287.945	1 Dokumen	1.275.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.287.945	1 Dokumen	1.278.900
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.505.456	1 Dokumen	1.581.820
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.081.638	1 Dokumen	1.081.820
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja	1 Dokumen	1.354.092	1 Dokumen	1.445.456
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen SAKIP	1 Dokumen	1.354.092	1 Dokumen	1.009.092
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun	20 Dokumen	2.555.131.715	20 Dokumen	2.515.779.940
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	2.552.994.000	14 Bulan	2.513.824.500
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumah laporan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahunan SKPD	2 Laporan	1.441.035	2 Laporan	1.350.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	696.680	18 Laporan	605.440
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	2.997.956	3 Dokumen	1.990.910
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD			2.997.956		1.990.910

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2023	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	304.100.343	100%	152.637.704
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik Kantor	12 Bulan	6.540.414	12 Bulan	4.297.341
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	33.902.600	12 Bulan	16.753.265
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	12 Bulan	6.543.329	12 Bulan	4.417.098
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	350 OK	257.114.000	270 OK	127.170.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			127.747.584		9.625.000
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	1 Paket	127.747.584	1 Paket	9.625.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan PD	100%	252.913.723	100%	246.692.447
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	12 Bulan	37.200.000	12 Bulan	37.800.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	215.713723	12 Bulan	208.892.447
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	35 Unit	77.940.000	32 Unit	109.149.652
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Kantor	10 Unit	63.000.000	10 Buah	98.581.460
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor	25 Unit	14.940.000	25 Unit	10.568.192
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	85%	111.137.608	80%	82.479.280
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 Laporan	111.137.608	3 Laporan	82.479.280
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Kegiatan MTQ	1 Laporan	87.794.920	1 Laporan	60.332.780
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Forum Kecamatan Sehat, Laporan PKK	2 Laporan	23.324.688	2 Laporan	22.146.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2023	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	85%	137.560.423	80%	46.725.989
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir	14 Desa	30.293.828	14 Desa	27.442.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Desa	30.293.828	14 Desa	27.442.000
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	**85%**	107.266.595	**80%**	19.283.989
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1400 Keluarga	107.266.595	1400 Keluarga	19.283.989
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	14 Desa	110.390.000	14 Desa	41.956.500
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	14 Patroli Terpadu	110.390.000	14 Patroli Terpadu	41.956.500
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Patroli Terpadu Pembinaan Kamtibmas / FORKOPIMCA	14 Patroli Terpadu	110.390.000	14 Patroli Terpadu	41.956.500
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	85%	155.524.601	80%	89.865.752
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	155.524.601	1 Laporan	89.865.752
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan Kegiatan Peringatan HUT RI	1 Laporan	125.985.865	1 Laporan	59.919.252
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14 Dokumen	29.538.736	14 Dokumen	29.946.500
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	85%	80.336.920	80%	15.194.200

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan Desa yang di bina dan di awasi	14 Desa	80.336.920	14 Desa	15.194.200
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen APBDes dan SISKEUDES	14 Desa	80.336.920	14 Desa	15.194.200

Berdasarkan data perbandingan antara Renja 2024 dan APBD 2024 pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan pada APBD disusun masih mengacu pada Renja, hal ini dapat dilihat dari persentase kesesuaian Program sebesar 100 persen, persentase kesesuaian kegiatan sebesar 100 persen dan persentase kesesuaian sub kegiatan sebesar 100 persen. Namun yang menjadi catatan, indikator dan target pada APBD pada sebagian kegiatan dan sub kegiatan masih belum sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan di Renja 2024. Hal ini disebabkan oleh tidak diinputnya / tidak diperbaruinya indikator dan target Renja 2024 ke dalam sistem SIPD sehingga hasil cetak Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagian besar masih menampilkan target indikator lama.

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, penilaian hasil pelaksanaan Renja menggunakan data realisasi pelaksanaan APBD sebagai acuan. Berikut rekapitulasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Muara Uya sampai triwulan II tahun 2024.

Tabel 2.3 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Uya sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023			Catatan
			Keuangan (Rp.)	Kinerja %	Keuangan (Rp.)	Keuangan %	Kinerja %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	UNSUR KEWILAYAHAN		3.925.674.043		1.132.399.185	36,79%	28,84%	
7.01	KECAMATAN		3.925.674.043		1.132.399.185	36,79%	28,84%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP (predikat)	3.330.723.491	B	1.065.559.185	39,38%	-	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	9. 893.170	8 Dokumen	`-	0%	30%	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.022.002	2 Dokumen		0,00%		
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1.287.945	1 Dokumen		0,00%	-	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.287.945	1 Dokumen	-	0,00%	-	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	1.081.638	1 Dokumen	-	0,00%	-	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.505.456	1 Dokumen	-	0,00%	-	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja	1.354.092	1 Dokumen	-	0,00%	1 Dokumen	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen SAKIP	1.354.092	1 Dokumen		99,10%	-	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	2.555.131.715	20 Dokumen	786.325.110	30,80%	41,26%	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	2.552.994.000	14 Bulan	786.325.110	30,80%	7 Bulan	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.441.035	3 Laporan	-	0,00%		
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	696.680	1 laporan	-	0,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023			Catatan
			Keuangan (Rp.)	Kinerja %	Keuangan (Rp.)	Keuangan %	Kinerja %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD Perangkat Daerah yang disusun	2.997.956	100%	-	0,00%		
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	2.997.956			0,00%		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.141.887	100%	122.134.895	42,53%	50%	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik Kantor	6.540.414	12 Bulan		0,00%	6 Bulan	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.902.600	12 Bulan	800.000 -	23,59%	6 Bulan	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	6.543.329	12 Bulan	2.452.900	37,48%	1 Bulan	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	257.114.000	378 OK	118.881.995	46,23%	OK	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Alat yang Dibeli	127.747.584	2 Unit	63.513.514	49,71%		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	127.747.584	2 Unit	63.513.514	49,71%		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	252.913.723	100%	80.439.626	31,80%	40%	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	37.200.000	12 Bulan	15.639.626	42,04%	6 Bulan	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	215.713.723	12 Bulan	64.800.000	30,03%	6 Bulan	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	77.940.000	25 Unit	13.146.040	16,86%	15%	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Kantor	63.000.000	10 Buah	13.146.040	20,86%	Buah	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor	14.940.000	15 Unit	-	0,00%	2 Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023			Catatan
			Keuangan (Rp.)	Kinerja %	Keuangan (Rp.)	Keuangan %	Kinerja %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	111.137.608	85%	-	0,00%	25%	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	111.137.608	3 Laporan	-	0,00%	25%	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Kegiatan MTQ	87.794.920	1 Laporan	-	0,00%	20%	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.342.688	2 Laporan	-	0,00%	1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	137.560.423	85%	**19.775.000**	14,37%	20%	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir	30.293.828	14 Desa	**6.110.000**	20,16%	15%	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pemerintahan Desa yang dibina/diberdayakan	30.293.828	14 Desa	6.110.000	20,16%	14 Desa	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Ketertiban Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	107.266.595	4000 Keluarga	**13.665.000**	12,73%		
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Pemberdayan dan Kesejahteraan Keluarga di Tingkat Kecamatan	107.266.595	4000 Keluarga	13.665.000	12,73%		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	110.390.000	14 Desa	**28.405.000**	25,73%	35,06%	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	110.390.000	14 Patroli Terpadu	**28.405.000**	25,73%	35,06%	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Patroli Terpadu Pembinaan Kamtibmas / FORKOPIMCA	110.390.000	14 Patroli Terpadu	28.405.000	25,73%	5 Patroli Terpadu	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023			Catatan
			Keuangan (Rp.)	Kinerja %	Keuangan (Rp.)	Keuangan %	Kinerja %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	155.524.601	85%	**3.000.000**	1,92%	10,95%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	155.524.601	1 Laporan	3.000.000	1,92%	10,95%	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	125.985.865	1 Laporan	-	0,00%	10,95%	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	29.538.736	1 Dokumen	3.000.000	10,15%	15%	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	80.336.920	85%	**15.660.000**	19,49%	0.00%	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	80.336.920	14 Desa	**15.660.000**	19,49%	Desa	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	80.336.920	14 Desa	15.660.000	19,49%	Desa	

Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Muara Uya sampai triwulan II diatas diolah berdasarkan data pada formulir evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sesuai format evaluasi renja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (formulir evaluasi terlampir). Evaluasi Renja dimaksudkan untuk mengindentifikasi sejauh mana capaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja serta implikasi yang timbul, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk Tindakan perencanaan selanjutnya.

Berdasarkan data pada tabel 2.3 tersebut, dapat dilihat bahwa dari sisi anggaran, Kecamatan Muara Uya telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.132.399.185,- atau sekitar 36,79 persen dari total anggaran untuk tahun 2024. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif masih rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena pelaksanaannya memang dijadwalkan pada triwulan III dan IV, diantaranya yaitu :

Administrasi Umum Perangkat daerah dengan Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
b. Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan
c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan :

   a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan :

   a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

   b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan :

   a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan Muara Uya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan Otonomi Daerah. Kewenangan tersebut diantaranya :

1. Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK).
3. Pelayanan penerbitan Keterangan Pindah.
4. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat.
5. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
6. Menggkordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
7. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam membangun desa.
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
9. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Muara Uya menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Uya, diantaranya :

1. Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya.
2. Mengadakan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Meningkatkan system pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

Disamping itu, kinerja pelayanan perangkat daerah yang merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maka capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada Perubahan Renstra Kecamatan Muara Uya adalah :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Muara Uya

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi		
		2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023
1	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	65%	70%	75%	80%	85%	70%	75%	
3	Persentase layanan umum lainnya tepat waktu	65%	70%	75%	80%	85%	70%	75%	
4	Nilai AKIP	B	B	B	B	B	B	(Belum Ada Penilaian)	

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong, maka Kecamatan Muara Uya mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Kedudukan Kecamatan
   1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
   2. Kecamatan dipimpin oleh Camat.
   3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris daerah.

b. Tugas Pokok Kecamatan

   Kecamatan Muara Uya memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebaagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

c. Fungsi Kecamatan

   Fungsi Kecamatan Muara Uya adalah sebagai pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pengkoordinasian pelayanan administrasi publik dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Camat selaku kepala SKPD dibantu oleh Sekretaris Camat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi 4 (empat) Seksi yang terdiri dari : Pemerintahan, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, dan Keamanan dan Ketertiban Umum. Berikut adalah susunan organisasi di Kecamatan Muara Uya :

Tabel : Susunan Organisasi Kecamatan Muara Uya

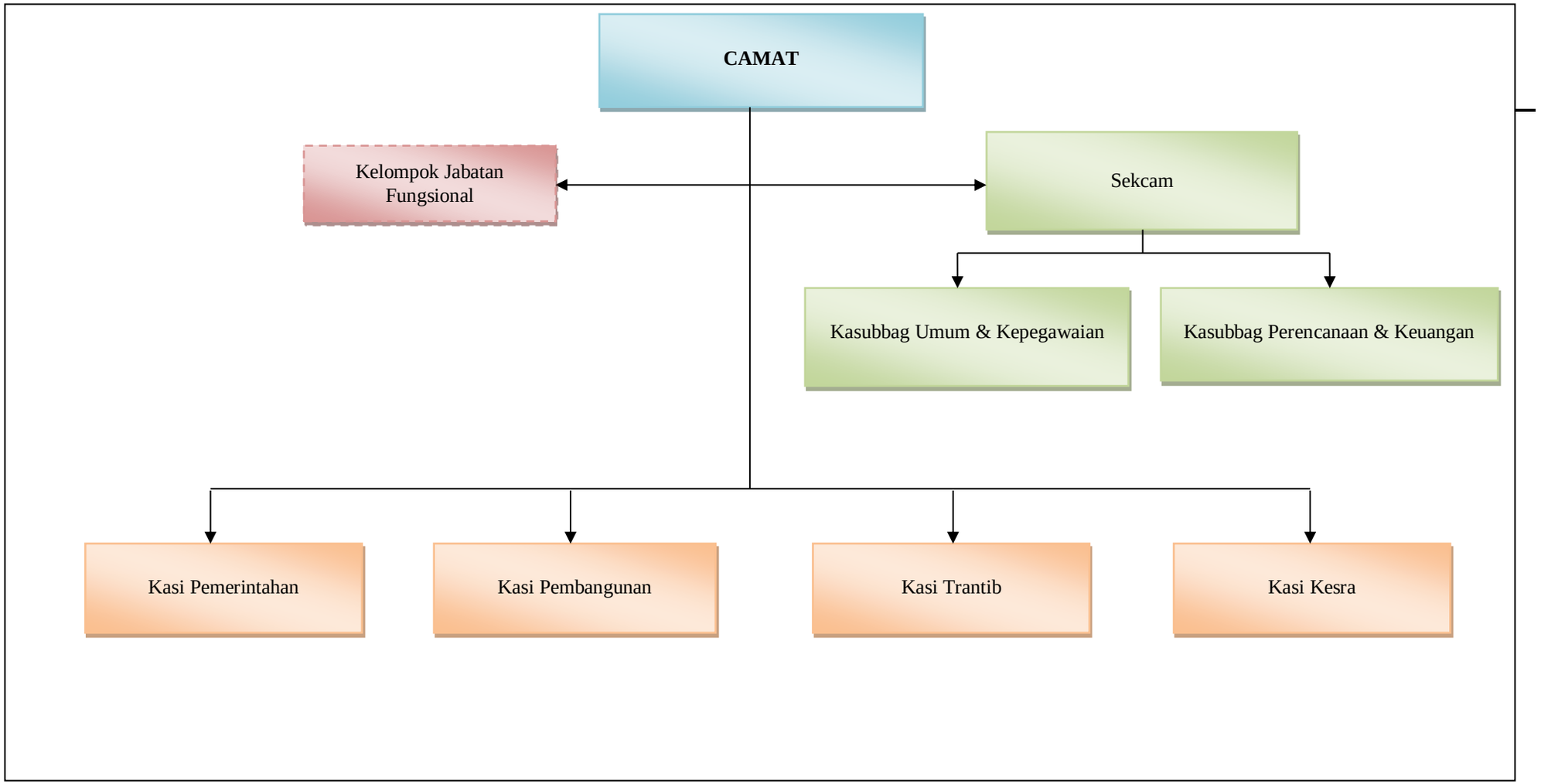

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, Kecamatan Muara Uya berpangku pada visi Kabupaten Tabalong **"Menuju Tabalong yang lebih agamis, sejahtera dan mandiri"** dengan mengemban misi :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Tabalong yang lebih agamis melalui kebijakan pembangunan yang diarahkan agar tercapai masyarakat madani yang beretika dan bermoral melalui peningkatan pemahaman dan pengamanan nilai-nilai agama, memperkuat kelembagaan keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan sehingga akan terwujud kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia (Tabalong Berkualitas).
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong dengan mengawal pembangunan yang diarahkan agar masyarakat berkemampuan lebih dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya melalui kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara signifikan, serta penurunan angka kemiskinan secara nyata (Tabalong Sejahtera).

Mewujudkan kemandirian daerah Kabupaten Tabalong melalui pembangunan yang diarahkan pada tercapainya system yang handal dan dinamis yang mampu bertindak sesuai keadaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bijak melalui penguatan kelembagaan ekonomi, social budaya dan pemerintahan untuk menciptakan kemajuan perekonomian daerah yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas (Tabalong Mandiri).

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala dan kelemahan yang dihadapi oleh Kecamatan Muara Uya dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, diantaranya :

1. Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tidak dapat diselenggarakan di Kantor Kecamatan Muara Uya karena rusaknya system koneksi jaringan dan hingga saat ini belum ada tindakan perbaikan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong. Hal ini tentunya mengakibatkan jika ada masyarakat yang ingin membuat KTP dan Kartu Keluarga terpaksa harus berurusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong yang ada di Tanjung.

2. Adanya 2 Desa terpencil yang jarak tempuhnya dan kondisi jalannya yang sangat rusak sehingga menyulitkan pihak kecamatan dalam melakukan pembinaan ke desa-desa tersebut.
3. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dan kurangnya pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan kerja dan profesionalitas aparatur Kecamatan Muara Uya.
4. Minimnya pemanfaatan teknologi dalam bekerja dikalangan aparatur Kecamatan Muara Uya menyebabkan kurang efektif dan efisiennya pemanfaatan waktu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan.
5. Jumlah SDM Apartur yang kurang memadai.

Disamping kendala dan kelemahan yang ada, Kecamatan Muara Uya juga memiliki beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Muara Uya dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Muara Uya, diantaranya :

1. Adanya struktur organisasi yang terpola.
2. Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat.
3. Suasana kerja di Kecamatan Muara Uya yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (team work).
4. Adanya koordinasi di Wilayah Kecamatan Muara Uya yang baik.

Adapun isu-isu penting lainnya yang ada di Kecamatan Muara Uya adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

   Kecamatan Muara Uya merupakan kawasan yang terindikasi memiliki Kawasan kumuh. Untuk mengurangi kekumuhan, mindset masyarakat perlu diubah sehingga tercipta kawasan tanpa kumuh

2. Bidang Pemerintahan

   Berlakunya UU Desa yang menuntut aparat kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar desa lebih optimal melaksanakan amanat UU Desa tersebut.

3. Bidang Pelayanan

   Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima menjadikan Kecamatan Muara Uya untuk selalu berinovasi agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan

4. Bidang Pertanian

   Alih fungsi lahan merupakan masalah yang mulai mencuat di wilayah Muara Uya. Para pengembang mulai melirik tanah pertanian di Kecamaan Muara Uya untuk dijadikan perumahan

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rumusan tematik pembangunan sebagaimana disebutkan dalam RKPD Tahun 2022 adalah "**Penanganan Kesehatan dan Percepatan Pemulihan Ekonomi dalam Rangka Menciptakan SDM yang Tangguh**" dengan 5 prioritas daerah dan 15 sasaran pembangunan yang upaya pencapaiannya dijabarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. RKPD 2023 dalam hal ini mengalami perubahan salah satunya dari segi rumusan program/kegiatan/sub kegiatan. Selanjutnya, sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rancangan Perubahan RKPD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, maka dalam reviu ini akan dilakukan proses membandingkan rancangan perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perubahan rencana kerja Kecamatan Muara Uya. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Tabalong

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Perubahan 2024					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)**		**100%**	**110.390.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)**		**100%**	**89.085.600**	
7.01.04.2.01	*1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan*	*Kecamatan Muara Uya*	*14 Patroli Terpadu*	*110.390.000*	*1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan*	*Kecamatan Muara Uya*	*14 Patroli Terpadu*	*89.085.600*	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan Desa**		**85%**	**137.560.423**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan Desa**		**85%**	**164.138.854**	*Rasionalisasi Batasan Pagu Anggaran dan Penyesuaian Standar Harga*
7.01.03.2.01	*2 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir*	*Kecamatan Muara Uya*	*14 Desa*	*30.293.828*	*2 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir*	*Kecamatan Muara Uya*	*14 Desa*	*15.219.828*	
7.01.03.2.06	3 *Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	*Meningkatnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas*	*Kecamatan Muara Uya*	1400 Keluarga	107.266.595	3 *Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	*Meningkatnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas*	*Kecamatan Muara Uya*	1400 Keluarga	162.609.026	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**		**85%**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase dokumen Penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**		**85%**	*Muara Uya*	*Rasionalisasi Batasan Pagu Anggaran dan Penyesuaian Standar Harga*
7.01.05.2.01	*4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*	*Kecamatan Muara Uya*	*1 Laporan*	*155.524.601*	*3 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah*	*Kecamatan Muara Uya*	*1 Laporan*	*203.108.247*	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Perubahan 2024					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**		**85%**	**80.336.920**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**		**85%**	**59.022.656**	*Rasionalisasi Batasan Pagu Anggaran dan Penyesuaian Standar Harga*
7.01.06.2.01	*5* Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset	*Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi*	*Kecamatan Muara Uya*	*14 Desa*	*80.336.920*	*4* Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset	*Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi*	*Kecamatan Muara Uya*	*14 Desa*	*59.022.656*	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan**		**85%**	**111.137.608**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan**		**85%**	**173.353.322**	
07.01.02.2.01	*6 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan*	*Kecamatan Muara Uya*	*3 Laporan*	111.137.608	*5 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan*	*Kecamatan Muara Uya*	*3 Laporan*	*173.353.322*	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Nilai SAKIP (predikat)**		**B**	**3.330.724.491**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Nilai SAKIP (predikat)**		**B**	**1.928.555.363**	*Rasionalisasi Batasan Pagu Anggaran dan Penyesuaian Standar Harga*
7.01.01.2.01	*7 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun*	*Kecamatan Muara Uya*	*8 Dokumen*	*9.893.170*	*6 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun*	*Kecamatan Muara Uya*	*8 Dokumen*	*11.429.962*	
7.01.01.2.02	*8 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun*	*Kecamatan Muara Uya*	*20 Dokumen*	*2.555.131.715*	*7 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun*	*Kecamatan Muara Uya*	*20 Dokumen*	*1.678.072.000*	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN perubahan 2024					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01..01.2.03	*9 Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah yang disusun	*Kecamatan Muara Uya*	*100%*	*2.997.956*	*9 Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah yang disusun	*Kecamatan Muara Uya*	*100%*	*2.997.956*	
7.01.01.2.06	*10 Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kecamatan Muara Uya*	*100%*	*304.100.343*	*10 Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Muara Uya Muara Uya*	*100%*	*345.093.060*	
7.01.01.2.07	11 Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah alat dan perlengkapan yang di beli	*Kecamatan Muara Uya*		127.747.584	11 Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah alat dan perlengkapan yang di beli	*Kecamatan Muara Uya*	*100%*	448.169.386	
7.01.01.2.08	*12 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kecamatan Muara Uya*	*100%*	*252.913.723*	*9 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kecamatan Muara Uya*	*100%*	*327.806.715*	
7.01.01.2.09	*13 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara*	*Kecamatan Muara Uya*	*35 Unit*	*77.940.000*	*10 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara*	*Kecamatan Muara Uya*	*32 Unit*	*625.037.930*	
JUMLAH					**3.925.674.043**	**JUMLAH**				**5.364.386.043**	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN)

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 merencanakan 6 program, 13 kegiatan, dan 28 Sub Kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD Kabupaten Tabalong senilai **Rp. 3.925.674.043,-**. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut secara terinci adalah sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**, dengan anggaran sebesar Rp. 3.330.724.491,- indikator program ini adalah : Persentase layanan umum lainnya tepat waktu dengan target 75% dan Nilai SAKIP (predikat) dengan target B sedangkan kegiatannya meliputi :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
   c. Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      . Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      . Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, dengan anggaran sebesar Rp. 111.137.608,- indikator program ini adalah : Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan di tingkat kecamatan dengan target 85% sedangkan kegiatannya meliputi :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan rincian sub kegiatan :
   - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
   - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, dengan anggaran sebesar Rp. 137.560.423,- indikator program ini adalah : Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa dengan target 85% sedangkan kegiatannya meliputi :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan rincian sub kegiatan :
   - Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, DENGAN RINCIAN Sub Kegiatan :

   . Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, dengan anggaran sebesar Rp. 110.390.000,- indikator program ini adalah : Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan) dengan target 14 Desa sedangkan kegiatannya meliputi :

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan rincian sub kegiatan :

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, dengan anggaran sebesar Rp. 155.524.601,- indikator program ini adalah : Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 85% sedangkan kegiatannya meliputi :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
   - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
   - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dengan anggaran sebesar Rp. 80.336.920,- indikator Program ini adalah : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Desa dengan Target 85 % sedangkan Kegiatannya meliputi :

a. Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan rincian sub kegiatan :
   . Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa

Rencana kerja dan pendanaan pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. dibawah ini.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Uya Kabupaten TabalongTahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Muara Uya pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong.
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Muara Uya ini berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Muara Uya Tahun 2019-2024, sehingga difokuskan pada upaya pencapaian seluruh target pada Renstra.
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Muara Uya ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Muara Uya ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkamenjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun 2024.
2. Dalam penyusunan RKPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong, begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya Perubahan berdasarkan hasil asistensi dan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tabalong.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun 2024 untuk setiap triwulannya.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, dengan melibatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dan stakeholders di Kabupaten Tabalong khususnya di Kecamatan Muara Uya.

Akhir kata, Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Uya, Okt 2024
CAMAT MUARA UYA

AIDY RISYAWAL, S.STP,M.Sos
NIP. 19900502 201010 1 001

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
KECAMATAN JARO
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN JARO
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga akhirnya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jaro 2024 dapat disusun. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jaro Tahun 2024 sebagai rencana pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jaro dalam pencapain visi dan misi serta tujuan Instansi Pemerintah dalam Perwujudan Good Govermence Sangat disadari bahwa Rencana Kerja Perubahan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, Sehingga sangat diharapkan sekali segala saran dan arahan bagi kami untuk dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan yang lebih baik dikesempatan lainnya.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat.

JARO, Agustus 2024

CAMAT JARO

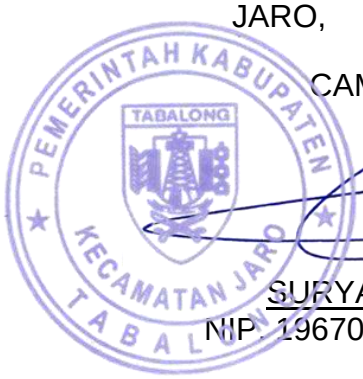

SURYADI, S.Sos,Kp

NIP. 19670414 198602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……... i

DAFTAR ISI……. ii

DAFTAR TABEL…….. iii

BAB I PENDAHULUAN …….. 1

1.1 Latar Belakang ……..…….. 1

1.2 Landasan Hukum ...……..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ……..... 4

1.4 Sistematika Penulisan …… 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024…….. 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan JARO Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan……... 6

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024..... 6

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024..... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan JARO .....…… 11

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan JARO …..……. 12

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD……... 15

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JARO TAHUN 2024……... 31

BAB IV PENUTUP……. 38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuai Antara Renja Kecamatan JARO Tahun 2024 dengan APBD 2024……..	7
Tabel 2.2	Perbandingan Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja dan APBD Kecamatan JARO Tahun 2024.....	10
Tabel 2.3	Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan JARO Sampai Triwulan II Tahun 2024.....….	11
Tabel 2.4	Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024	
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan JARO Tahun 2024……....	20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka Kantor Kecamatan JARO sebagai salah satu

Perangkat Daerah (PD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja Kecamatan JARO tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan estimasi dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, menjadi dasar hukum bagi Kecamatan JARO sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang ada dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tabalong.Agar pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab urusan tersebut berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten, perlu dibuat langkah-langkah perencanaan yang terencana dan berkesinambungan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi kepemerintahan Kecamatan.

Renja Kecamatan Jaro tahun 2024 merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Jaro untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di 9 desa yang ada di wilayah Kecamatan Jaro, sekaligus juga merupakan penjabaran Visi, Misi Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Jaro mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan tema RKPD Kabupaten Tabalong tahun 2024 yakni **“PENGUATAN DAYA SAING DAERAH UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS ”** maka di tahun 2024 Kantor Kecamatan Jaro memprioritaskan kegiatan untuk melakukan :

1. Meningkatkan kualitas dan daya saling Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Memperkuat ketahanan ekonomi melalui diversifikasi ekonomi ;
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar;
4. Menjaga kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
5. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaannya, keberhasilan ataupun tidaknya Renja PD ini tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat di wilayah Kecamatan Jaro.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja, dan Tata Cata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.
17. Peraturan Daerah No.05 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Tabalong.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaro Tahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

   Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Jaro disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

2. Tujuan

   Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Jaro disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran

pembangunan,menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan Kecamatan Jaro

1.3 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Kecamatan Jaro Tahun 2024 ini di susun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jaro Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
  - 2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024
  - 2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jaro
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jaro
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JARO TAHUN 2024

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun selain berpedoman dengan Perubahan RKPD, juga berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. Dalam hal ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Jaro sampai dengan triwulan II tahun 2024 dengan mengacu pada APBD tahun2024 yang sudah disahkan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jaro Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024

2.1.1.1 Kesesuaian Program Antara Renja Kecamatan Jaro Tahun 2024 dengan APDB Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada rencana kerja Kecamatan Jaro dengan APBD Tahun 2024, terdapat kesesuaian 100%. Artinya bahwa jumlah program dalam renja sama dengan jumlah program yang ada dalam APBD, yaitu ada 6 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2.1.1.2 Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Kecamatan Jaro Tahun 2024 dengan APDB Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan yang ada pada rencana kerja Kecamatan Jaro dengan APBD Tahun 2024, sama dengan APBD Tahun 2024. Dimana jumlah kegiatan yang ada di Renja sebanyak 13 kegiatan sedangkan jumlah kegiatan yang ada di APBD sebanyak 13 kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
9. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
10. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
12. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
13. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.1.1.3 Kesesuaian Sub Kegiatan Antara Renja Kecamatan Jaro Tahun 2024 dengan APDB Tahun 2024.

Berdasarkan evaluasi terhadap sub kegiatan yang ada di renja Kecamatan Jaro dengan APBD tahun 2024, jumlah sub kegiatan yang ada di renja sebanyak 36 sub kegiatan sedangkan sub kegiatan yang ada di APBD sebanyak 34 sub kegiatan. Karna ada pergeseran

2.1.1.4 Kesesuaian Pagu Anggaran Antara Renja Kecamatan Jaro Tahun 2024 dengan APDB Tahun 2024.

Anggaran Renja Kecamatan Jaro Tahun 2024 sebesar Rp. 3.372.478.742, sedangkan anggaran Kecamatan Jaro berdasar APBD 2024 adalah sebesar Rp. 3.617.182.000. Terdapat selisih anggaran antara APBD

dengan Renja 2024 sebesar Rp. 244.703.258,- seiring dengan proses penganggaran yang berjalan. Hasil evaluasi kesesuaian jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta paguanggaran antara renja Kecamatan Jaro Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1. dibawah ini.

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja
Kecamatan Jaro Tahun 2024 dengan APBD 2024

No	Uraian	Renja 2024	APBD 2024
1	Program	6	6
2	Kegiatan	13	12
3.	Sub Kegiatan	36	34
4	Pagu Anggaran	Rp. 3.372.478.742,-	Rp. 3.617.182.000,-

Tabel 2.2. Perbandingan Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Renja dan APBD Kecamatan Jaro Tahun 2024

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024		APBD 2024	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Anggaran
(1)						(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7		**URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
7	**01**	**PERENCANAAN**									
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Komponen Penunjang Nilai AKIP**	**B**	**3.692.666.110**	**B**	**3.201.884.414**
7	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja**	**B**	**10.544.000**	**B**	**10.544.000**
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	2 dokumen	2.024.000	2 dokumen	`2.024.000
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.030.000	2 dokumen	1.030.000
7	01	01	2	01	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.030.000	2 dokumen	1.030.000
7	01	01	2	01	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DKA-SKPD	6 dokumen	1.030.000	6 dokumen	1.030.000
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD	4 dokumen	1.030.000	4 dokumen	1.030.000
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	3.370.000	6 Laporan	3.370.000

7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat	2 Laporan	1.030.000	2 Laporan	1.030.000
7	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN**	**100%**	**2.622.389.625**	**100%**	**2.667.592.683**
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji danTunjangan	16 Pegawai	2.620.988.742	16 Pegawai	2.665.692.000
7	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	500.883	2 Dokumen	500.583
7	01	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	4 Dokumen	500.000	4 Dokumen	500.000
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Laporan	500.000	2 Laporan	500.000
7	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	400.000	17 Laporan	400.000
7	**01**	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang di amankan**		1.913.752		1.913.752
7	01	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 rencana	700.000	1 rencana	700.000
7	01	01	2	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 laporan	513.752	2 laporan	513.752
7	01	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	700.000	4 laporan	700.000
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**347.086.309**	100%	**218.720.437**
7	01	01	2	06	02	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Peralatan Kompenen listrik/penerangan yang disediakan	2 Paket	5.995.630	1 Paket	5.995.630

7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.195.500	4 Paket	10.440.140
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	15.004.811	10 Paket	25.800.667
7	01	01	2	06	06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	9.000.000	2 Dokumen	9.000.000
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	217.232.000	22 Laporan	167.484.000
7	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengdaan Barang Milik Daerah Penunjang Uusan Pemerintah Daeah**	**Persentase sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya**	**B**	**83.992.000**	**B**	**0**
7	**01**	**01**	**2**	**07**	00 11		Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	83.992.000	1 unit	0
7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**253.483.000**	**100%**	**215.430.542**
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	201.783.000	12 Laporan	185.340.542
7	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	121.989.000	**100%**	**87.683.000**
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	121.989.000	12 Unit	64.780.000

7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharannya peralatan dan mesin	25 unit	24.985.000	25 Unit	22.903.000
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Laiinya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	-	1 unit	22.903.000
7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**100%**	203.061.554	**100%**	**162.686.633**
7	**01**	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**100%**	**181.064.186**	**100%**	**150.476.633**
7	**01**	**02**	**2**	**01**	**01**	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan **1 laporan**	86.493.186	3 Laporan	57.725.600
7	**01**	**02**	**2**	**01**	**02**	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di kecamatan	3 laporan	94.571.000	3 laporan	92.751.033
7	**01**	**02**	**2**	**01**	**01**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan			**21.997.368**		12.210.000
						Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	21.997.368	2 laporan	12.210.000
7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**9 Desa**	**91.055.769**	**9 Desa**	**21.000.000**
7	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**9 desa**	**91.055.769**	**100 Kelurga**	**21.000.000**
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 laporan	91.055.769	100 Kelurga	21.000.000

7	**01**	**04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**100%**	**95.000.000**	**100%**	**94.004.501**
7	**01**	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		9 Laporan	**95.000.000**	9Laporan	**94.004.501**
7	01	04	2	01	01	Sinersigitas dengan kepolisian Negara Republik ndoenesia, Tentara Nasional dan instansi vertikal	Jumlah Laporan hasil Sinersigitas dengan kepolisian Negara Republik ndoenesia, Tentara Nasional dan instansi vertikal	12 Laporan	95.000.000	9 Laporan	88.004.501
7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan hasil harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyrakat	12 laporan			6.000.000
7	**01**	**05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**100%**	116.100.000	**100%**	**74.850.542**
7	**01**	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**100%**	116.100.000	**100%**	**74.850.542**
7	01	05	2	01	01	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalm rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Rupublik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	116.100.000	100 Orang	74.850.542
7	**01**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**100%**	55.351.163	**100%**	**62.756.000**
7	**01**	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**100%**	55.351.163	**100%**	**62.756.000**

7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	53.367.479	9 Dokumen	46.010.000
7	01	06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 laporan	8.746.000	9 laporan	8.746.000
7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	1.983.684	9 Laporan	8.000.000
Total Pagu Anggaran									3.372.478.742		3.617.182.000

Berdasarkan data perbandingan antara Renja 2024 dan APBD 2024 pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan pada APBD disusun masih mengacu pada Renja, hal ini dapat dilihat dari persentase kesesuaian Program sebesar 100 persen, persentase kesesuaian kegiatan sebesar 100 persen dan persentase kesesuaian sub kegiatan sebesar 99,5 persen

2.1.2. Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, penilaian hasil pelaksanaan Renja menggunakan data realisasi pelaksanaan APBD sebagai acuan. Berikut rekapitulasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jaro sampai triwulan II tahun 2024.

Tabel 2.3 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Jaro Sampai Triwulan II Tahun 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Catatan
								Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
7						**URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		4.146.708.000	100%	1.751.552.438			
7	**01**					**PERENCANAAN**							
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Komponen Penunjang Nilai AKIP**	**3.647.869.209**	**100%**	**340.544.614**	**15 %**	**36%**	
7	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase hasil perencanaan dan pelaporanyang dijadikan bahan evaluasi kinerja**	**10.544.000**	**100%**	**1.945.300**	**18,45%**	**36%**	
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang di susun	2.024.000	8 dokumen	1.945.300	96,11%	9%	
7	01	01	2	01	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.030.000	2 dokumen	0	0%	50%	
7	01	01	2	01	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DKA-SKPD	1.030.000	2 Dokumen	0	0%	50%	

7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD	1.030.000	2Dokumen	0	0%	50%	
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.370.000	4 Laporan	0	0%	50%	
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat	1.030.000	2 Laporan	0	0%	50%	
7	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN**	2.861.168.683	**100%**	1.371.908.320	47,59%	**100%**	
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan Tunjangan	2.859.268.000	21 Pegawai	1.370.801.820	47,94%	50%	
7	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	500.683	2 Dokumen	465.500.	92,97%	50%	
7	01	01	2	02	04	Koordinasi dan pelaksaan akutansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD	500.000	2 Dokumen	300.000	60%	50%	
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Akhir Tahun SKPD	Jumah laporan akhir tahuan SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahuanan SKPD	500.000	1 Laporan	0	0%	40%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Catatan
								Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
7	**01**	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Dearah**		**1.913.752**		**1.257.500**	**65,71%**		
7	01	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Dearah SKPD	Jumlah rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	700.000	2 rencana	657.500	93,93%		
7	01	01	2	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Dearah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	513.752	2 laporan	0	0%		
7	01	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik Dearah	Jumlah laporan rekonsilsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	513.752	2 laporan	0	0%		
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**318.720.437**		162.525.420	**50,99%**		
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5.995.630	1 paket	1.035.000	17,26%		
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10.440.140	2 Paket	4.706.000	45,08%		

7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25.800.667	10 Paket	5.965.000	23,12%		
7	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000	2 Dokumen	3.862.500	42,92%		
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	267.484.000	12 Laporan	146.956.920	54,94%		

Kode						**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022**		**Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022**			**Catatan**
								Keuangan (Rp)	**Kinerja (%)**	**Keuangan (Rp)**	**Keuangan (%)**	**Kinerja (%)**	
1						***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***
7	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Uusan Pemerintah Daeah**	**Persentase sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya**	**115.028.795**		0	0%		
7	**01**	**01**	**2**	**07**	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	71.392.425		**0**	**0%**		
7	**01**	**01**	**2**	**07**	00 11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	83.992.000	83.992.000	0	0%		

7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**218.430.542**		81.991.332	37,54%		
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	33.000.000	12 Laporan	11.756.332	35,63%		
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	185.430.542	12 Laporan	70.235.000	37,88%		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Catatan
								Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
7	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**122.063.000**	**100%**	37.930.566	**31.07**%		

7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan dan Biaya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	99.160.000	12 Unit	36.720.566	37.03%		
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22.903.000	25 unit	1.210.000	5,28%		
7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**196.540.000**		16.844.100	8.57%		
7	**01**	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**184.330.033**		16.844.100	9.14%		
7	**01**	**02**	**2**	**01**	**01**	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	**91.579.000**	1 Laporan	0	0%		
7	**01**	**02**	**2**	**01**	**02**	Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**92.751.033**	2 laporan	16.844.100	18.16%		

7	**01**	**02**	**2**	**02**		**Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat dearah yang ada dikecamatan**		**12.210.000**		0	0%		
7	**01**	**02**	**2**	**02**	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamata	**12.210.000**	3 laporan	0	0%		

Kode						**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Program/Kegiatan/SubKegiatan Tahun 2022**		**Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022**			**Catatan**
								Keuangan (Rp)	**Kinerja (%)**	**Keuangan (Rp)**	**Keuangan (%)**	**Kinerja (%)**	
1						***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***
7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**21.000.000**		12.337.000	58,75%		
7	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**21.000.000**	9 desa	12.337.000	58,75%		
7	**01**	**03**	**2**	**01**	**003**	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyrakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**21.000.000**	9 laporan	12.337.000	58,75%		

						Wilayah Kecamatan							
7	**01**	**04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**94.004.501**		12.420.000	13,21%		
7	**01**	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**94.004.501**	9 desa	12.420.000	13,21%		
7	01	04	2	01	0001	Sinersigitas dengan kepolisian Negara Republik indoensia, Tentara nasional dan instansi vertical di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinersigitas dengan kepolisian Negara Republik indoensia, Tentara nasional dan instansi vertical di wilayah kecamatan	**94.004.501**	12 laporan	12.420.000	13,21%		
7	01	04	2	01	02	Hormonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	**6.000.000**	12 laporan	0	0%		
7	**01**	**05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN**		**124.538.257**		33.148.000	26.62%		

						URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
7	**01**	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**124.538.257**		33.148.000	26.62%		
7	01	05	2	01	01	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalm rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Rupublik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**124.538.257**	100 orang	33.148.000	26.62%		
7	**01**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**62.756.000**	9 desa	19.244.900	30,67%		
	01	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**62.756.000**	9 desa	19.244.900	30,67%		
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	46.010.000	9 Dokumen	10.818.000	23,51%		

7	01	06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.746.000	9 dokumen	8.426.900	96,35%		
7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendamping Desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8.000.000	9 Dokumen	0	0%		

Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Jaro sampai triwulan II diatasdiolah berdasarkan data pada formulir evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sesuaiformat evaluasi renja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (formulir evaluasi terlampir). Evaluasi Renja dimaksudkan untuk mengindentifikasi sejauh mana capaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja serta implikasi yang timbul, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk tindakan perencanaan selanjutnya.

Berdasarkan data pada tabel 2.3 tersebut, dapat dilihat bahwa dari sisi anggaran, Kecamatan Jaro telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.751.552.438,- atau sekitar 42,24 persen dari total anggaran untuk tahun 2024. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif masih rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena pelaksanaannya memang dijadwalkan pada triwulan III dan IV, diantaranya yaitu:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan :
   a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan :
   a. Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalm rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Rupublik Indonesia
3. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan :
   a. Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikor kinerja yang sudah ditentukan dalam Review Renstra 2019-2024, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong

No.	Sasaran Strategis Stlh Review	Indikator Kinerja	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas Kecamatan	Nilai AKIP	Baik	Baik			Baik	Baik			
		Persentase Pelayanan Kependudukan Tepat waktu	100%	100%			91%	72%			
		Persentase layanan umum lainnya tepat waktu	100%	100%			100%	90%			
2.	Meningkatnya kinerja tugas umum pemerintahan (TUP) Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	Baik	Baik			Tidak ada penilaian	Belum ada penilaian			
		Persentase Temuan Inspektorat/ BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%			100%	100%			
3.	Meningkatnya kemandirian Desa	Persentase Desa Berkembang	50%	60%			100%	100%			

Kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas diantaranya dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Berdasarkan data pada tabel 2.3, secara umum pelaksanaan sebagian besar kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Beberapahal yang perlu diperhatikan terkait capaian kinerja sampai dengan triwulan II dan memerlukan tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Beberapa indikator kinerja baik program, kegiatan dan sub kegiatan Renja 2024 belum seluruhnya selaras dengan Perubahan Renstra 2019-2024 yang

telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena penyusunan Renja 2024 dilakukan sebelum ditetapkannya Perubahan Renstra pada tanggal 24 Desember 2021. Dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja pada Renja agar selaras dengan Perubahan Renstra.

2. Masih terdapat rincian belanja yang masuk pada sub kegiatan yang tidak tepat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian/pemindahan belanja dari sub kegiatan satu ke sub kegiatan lainnya yang sesuai.
3. Masih terdapat hambatan terkait upaya pemenuhan laporan penunjang nilai AKIP, diantaranya belum tepat waktunya pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi dari Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar dari dilakukannya evaluasikinerja. Selain itu pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dan rencana aksi juga belum sepenuhnya berjalan dengan baik

Kabupaten Tabalong telah berhasil meraih prestasi sebagai salah satu Kabupaten Terinovatif peringkat keempat se-Indonesia pada penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kemendagri.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan JARO

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, maka Kecamatan Jaro mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Kedudukan Kecamatan
   1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
   2. Kecamatan dipimpin oleh Camat.
   3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris daerah.

b. Tugas Pokok Kecamatan

   Kecamatan Jaro memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebaagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

c. Fungsi Kecamatan

Fungsi Kecamatan Jaro adalah sebagai pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pengkoordinasian pelayanan administrasi publik dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka Camat selaku kepala PD dibantu oleh Sekretaris Camat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, disamping membawahi 4 (empat) Seksi yang terdiri dari : Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum. Berikut adalah susunan organisasi di Kecamatan Jaro

Tabel : Susunan Organisasi Kecamatan JARO

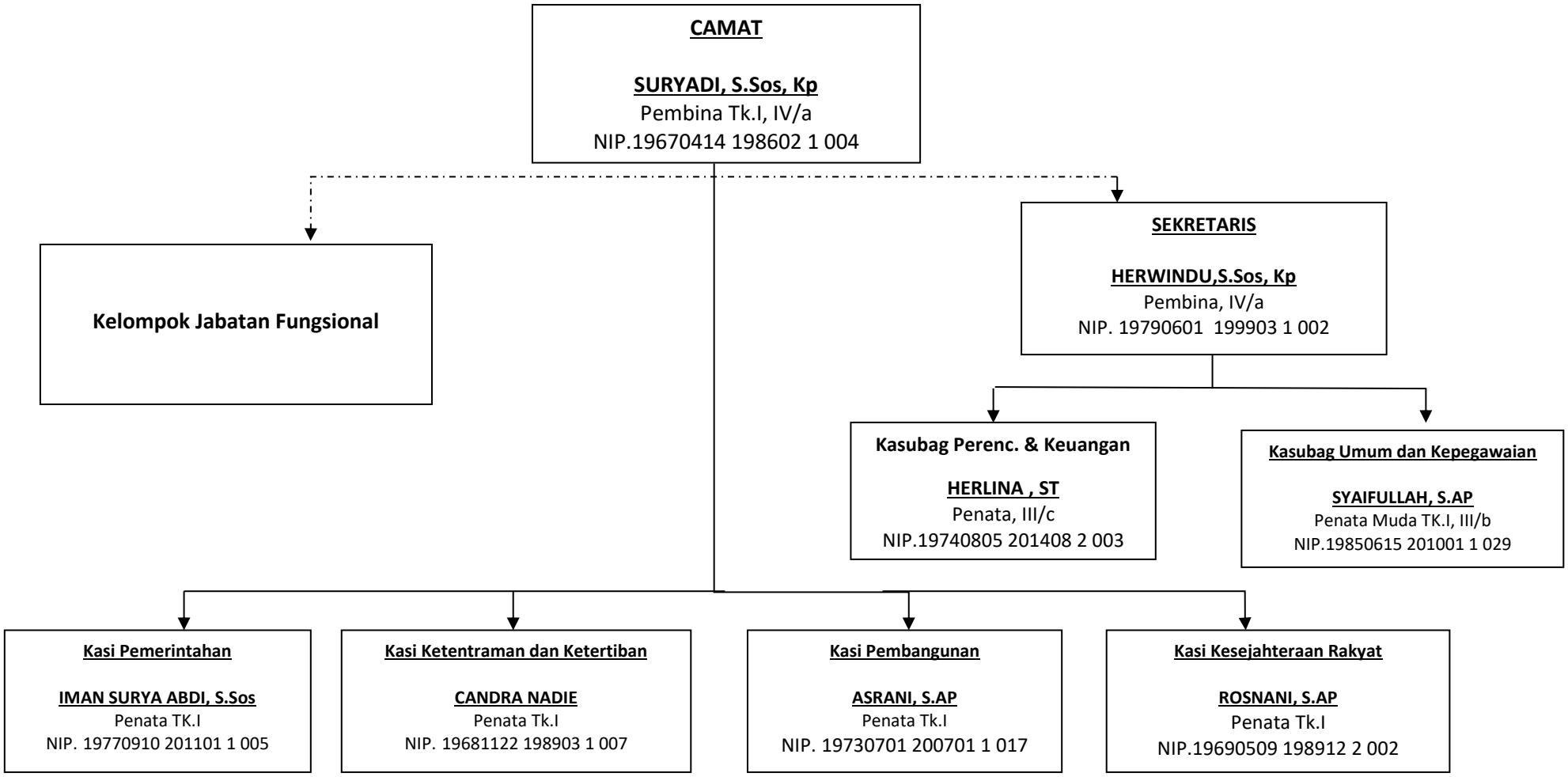

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka misi yang akan ditempuh Kecamatan Jaro adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Tabalong yang lebih agamis melalui kebijakan pembangunan yang diarahkan agar tercapai masyarakat madani yang beretika dan bermoral melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, memperkuat kelembagaan keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan sehingga akan terwujud kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia (Tabalong Berkualitas).
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong dengan mengawal pembangunan yang diarahkan agar masyarakat berkemampuan lebih dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya melalui kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara signifikan, serta penurunan angka kemiskinan secara nyata (Tabalong Sejahtera).
3. Mewujudkan kemandirian daerah Kabupaten Tabalong melalui pembangunan yang diarahkan pada tercapainya system yang handal dan dinamis yang mampu

   bertindak sesuai keadaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bijak melalui penguatan kelembagaan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan untuk menciptakan kemajuan perekonomian daerah yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas (Tabalong Mandiri).

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala dan kelemahan yang dihadapi oleh Kecamatan Jaro dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, diantaranya :

1. Kualitas SDM yang belum memadai terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi sehingga mempengaruhi terhadap kelancaran penyelesaian tugas pekerjaan, hal lain adalah pola budaya kerja yang cenderung pasif dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

2. Belum optimalnya pola sistem administrasi perkantoran dan administrasi kepegawaian yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, yang mana hal ini dapat menghambat kelancaran tugas pekerjaan.
3. Masih minimnya koordinasi antar instansi/ unit kerja/ instansi vertikal yang ada di Kecamatan dalam upaya peningkatan pembangunan di Kecamatan.
4. Belum tersedianya dokumen standar pelayanan publik dan atau standar operasional prosedur (SOP) di Kecamatan Jaro, hal ini berdampak pada pola pelayanan yang belum terstandar dengan baik.
5. Kualitas SDM yang belum memadai terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi sehingga mempengaruhi terhadap kelancaran penyelesaian tugas pekerjaan, hal lain adalah pola budaya kerja yang cenderung pasif dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
6. Belum optimalnya pola sistem administrasi perkantoran dan administrasi kepegawaian yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, yang mana hal ini dapat menghambat kelancaran tugas pekerjaan.
7. Masih minimnya koordinasi antar instansi / unit kerja / instansi vertikal yang ada di Kecamatan dalam upaya peningkatan pembangunan di Kecamatan.
8. Belum tersedianya dokumen standar pelayanan publik dan atau standar operasional prosedur (SOP) di Kecamatan Jaro, hal ini berdampak pada pola pelayanan yang belum terstandar dengan baik.

Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Regulasi dan kebijakan yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut. Adapun implementasi kebijakan yang perlu diperhatikan diantaranya kebijakan terkait :

a. Penyetaraan jabatan dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 17 Tahun 2021.
b. Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan dan

pembangunan daerah berdasar Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021.

c. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021.
d. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021.
e. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.
f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Review terhadap rancangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kecamatan JARO.

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Perubahan tahun 2024
Kabupaten Tabalong

Kecamatan JARO

NO	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**Nilai AKIP**		**3.728.115.414**					**3.742.768.070**	
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Jaro	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	22 Dokumen	10.544.000		Kec. Jaro	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	22 Dokumen	10.544.000	
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Jaro	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun	20 Dokumen	2.861.168.683		Kec. Jaro	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat	20 Dokumen	2.861.168.683	

								Daerah yag disusun			
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Kec. Jaro	Persentase Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	100 %	1.913.752		Kec. Jaro	Persentase Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	100%	1.913.752	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Jaro	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	368.720.437		Kec. JARO	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	318.720.437	Bertambahnya Belanja Peralatan dan sppd
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Kec. Jaro	Persentase Terpenuhinya Barang milik daerah penujang Urusan Pemerintah daerah	100%	145.275.000		Kec. Jaro	Persentase Terpenuhinya Barang milik daerah penujang Urusan Pemerintah daerah	100%	115.028.795	Bertambahnya belanja pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Jaro	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	218.430.542		Kec. Jaro	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	100%	218.430.542	Penambahan belanja rekening listrik

								Pemerintah Daerah				
	5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Jaro	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	122.063.000		Kec. Jaro	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	122.063.000	Berambahnya Belanja pemeliharaan roda 4
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan**		237.770.000				**Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan**	196.540.033	
	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Jaro	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Laporan	185.476.633		Kec. Jaro	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Laporan	184.330.033	Bertambah belanja kain batik,sewa mobil,sppd
	2	Penyelanggaran Urusan Pemeritahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan		Jumlah Laporan Urusan Pemeritahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	2 laporan	12.210.000		Kec. JARO	Jumlah Laporan Urusan Pemeritahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang	2 laporan	12.210.000	

									ada dikecamatan			
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**		**188.759.742**				**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**	**124.538.257**	
	1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Jaro	Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 laporan	188.759.742		Kec. Jaro	Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 laporan	124.538.257	bertambahnya belanja makan minum, sewa dan perjalanan dinas
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas Aparatur dan Tata Kelola Kewilayahan Desa**		**21.000.000**				**Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas Aparatur dan Tata Kelola Kewilayahan Desa**	**21.000.000**	

	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Jaro	Jumlah Pemerintah Desa yang dibina / diberdayakan	9 Desa	21.000.000		Kec. Jaro	Jumlah Pemerintah Desa yang dibina / diberdayakan	9 Desa	21.000.000	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**62.756.000**				**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**62.756.000**	
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. JARO	Jumlah Pemerintahan Desa yang di bina dan di awasi	9 Desa	62.756.000		Kec. JARO	Jumlah Pemerintahan Desa yang di bina dan di awasi	9 Desa	62.756.000	
6	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**94.004.501**					**94.004.501**	
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. JARO	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	9 patroli terpadu	94.004.501		Kec. JARO	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	9 patroli terpadu	94.004.501	
JUMLAH PAGU KEBUTUHAN TAHUN 2024 BERDASARKAN ANALISIS						**4.332.405.657**					**4.241.606.861**	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program-program pembangunan dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam rangka percepatan proses pembangunan. Adapun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakanKecamatan Jaro Kabupaten Tabalong terdiri dari 6 program, 13 kegiatan dan 34 subkegiatan sebagai berikut :

Program	:	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**
Kegiatan 1	:	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Sub Kegiatan	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan 2	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	3	Koordinasi Pelaksanaan Akutansi SKPD
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesreran SKPD
Kegiatan 3	:	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	1	Penyusunan Peerencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
	3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
Kegiatan 4	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	4	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan 5	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kegiatan 6	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan 7	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Program	**:**	**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
Kegiatan	:	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Sub Kegiatan	1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Program		**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
Kegiatan	:	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan

Program		**KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
Kegiatan	:	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Program		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
Program		**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
Kegiatan	:	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
	2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
	3	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

TABEL.4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2024				Kondisi kinerja pada akhir priode renstra SKPD	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
Administrasi Pemerintahan									
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Nilai AKIP**	**Kec. JARO**	**A**	**3.337.350.662,-**	APBD	A	**A**	**3.711.436.578**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Jaro	10 Dokumen	**10.544.000,-**	APBD	100%	**10 Dokumen**	**23.922.728**
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Jaro	2 Dokumen	2.024.000	APBD	100%	2 Dokumen	2.200.000
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Jaro	2 Dokumen	1.030.000,-	APBD	100%	2 Dokumen	1.100.000
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Kec. Jaro	2 Dokumen	1.030.000,-	APBD	100%	2 Dokumen	1.250.000
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kec. Jaro	2 Dokumen	1.030.000,-	APBD	100%	2 Dokumen	1.100.000

		Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Jaro	1 Dokumen	3.370.000,-	APBD	100%	1 Dokumen	1.100.000
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Jaro	1 Dokumen	1.030.000,-	APBD	100%	1 Dokumen	1.090.000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	Kec Jaro	14 bulan	**2.667.592.683**	APBD	100%	14 Bulan	**3.074.539.000**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Jaro	14 bulan	2.665.692.000,-,-	APBD	100%	14 bulan	3.069.139.000
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec Jaro	2 dokumen	500.683	APBD	100%	2 dokumen	1.200.000
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec Jaro	2 dokumen	500.000	APBD	100%	2 dokumen	1500.000
7.01.01.2.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Jaro	1 laporan	500.000	APBD	100%	1 laporan	1.500.000
7.01.01.2.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec Jaro	12 laporan	400.000	APBD	100%	12 laporan	1.200.000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya kegiatan administrasi	Kec. Jaro	100%	**318.720.437.-**	APBD	100%	100%	**276.569.350**

		umum							
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Jaro	4 paket	10.440.140,-	APBD	100%	4 paket	17.518.795
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Kompenen listrik/penerangan yang disediakan	Kec. Jaro	2 paket	5.995.630,-	APBD	100%	2 paket	5.146.680
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Jaro	4 paket	25.800.667,-	APBD	100%	4 paket	17.330.855
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Barang dan Fasilitas Tamu	Kec. Jaro	2 paket	9.000.000,-	APBD	100%	2 Paket	9.500.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Jaro	12 Laporan	267.484.000,-	APBD	100%	12 laporan	227.073.020
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	Kec. Jaro	12 bulan	**218.430.542**,-	APBD	100%	12 bulan	**225.762.500**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Jaro	12 Laporan	33.000.000,-	APBD	100%	12 laporan	30.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Jaro	12 Laporan	185.430.542,-	APBD	100%	12 Laporan	225.762.500
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Jaro	12 Unit	**122.063.000,-**	APBD	100%	12 Unit	**110.643.000**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum	Kec. Jaro	100%	99.160.000,-	APBD	100%	100%	91.560.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharannya peralatan dan mesin	Kec. Jaro	100%	22.903.000,-	APBD	100%	100%	19.083.000,-

7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	Kec. Jaro	73,96	**196.540.033,-**	APBD	73,96	73,96	83.315.400
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Jaro	3 laporan	184.330.033,-	APBD	100%	3 laporan	83.315.400
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Jaro	1 laporan	**91.579.000,-**	APBD	100%	1 laporan	62.432.600
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di kecamatan	Kec. Jaro	3 laporan	**92.751.033**	APBD	100%	3 laporan	20.882.800
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Jaro		**12.210.000**	APBD	100%		15.210.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Jaro	2 laporan	12.210.000	APBD	100%	2 laporan	15.210.000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	Kec. Jaro	75,8	21.000.000,-	APBD	75,8	75,8	12.624.600
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Jaro	9 Laporan	**21.000.000,-**	APBD	100%	9 Laporan	21.624.600
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Jaro	9 Laporan	**21.000.000,-**	APBD	100%	100%	12.624.600

7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan	Kec. Jaro	97,54	94.004.501,-	APBD	97,54	97,54	47.650.000
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Jaro	9 Laporan	94.004.501,-	APBD	100%	9 Laporan	47.650.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Jaro	12 Laporan	88.004.501,-	APBD	100%	12 Laporan	42.900.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah laporan hasil harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyrakat	Kec. Jaro	12 Laporan	6.000.000	APDB	100%	12 Laporan	4.750.000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	Kec. Jaro	82,23	124.538.257,-	APBD	82,23		105.537.760
7.01.05.2,01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Jaro	100 Orang	124.538.257,-	APBD	100%	100%	105.537.760
7.01.05.2,01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Jaro	100 Orang	124.538.257,-	APBD	100%	100 Orang	105.537.760
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Jaro	84,59	**62.756.000,-**	APBD	84,59	9 desa	55.149.200

7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Jaro	9 desa	62.756.000,-	APBD	100%	9 desa	55.149.200
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Jaro	9 Dokumen	46.010.000,-	APBD	100%	9 Dokumen	34.750.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Jaro	9 Dokumen	8.746.000	APBD	100%	9 Dokumen	12.399.200
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec Jaro	9 Dokumen	8.000.000	APBD	100%	9 Dokumen	8.000.000
Proram : 6 Kegiatan : 11									
Jumlah Total					**3.836.189.453.,-**				**4.015.713.538,-**

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong tahun 2024 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisein.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Jaro. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024, Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Selain itu Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Melalui Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga

Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Jaro, Agustus 2024

CAMAT JARO

SURYADI, S.Sos,Kp

NIP.19670414 198602 1 004

RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN KECAMATAN
PUGAAN TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka Kantor Kecamatan Pugaan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Renja Kecamatan Pugaan tahun 2024 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan estimasi dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, menjadi dasar hukum bagi Kecamatan Pugaan sebagai salah satu SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang ada dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tabalong. Agar pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab urusan tersebut berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten, perlu dibuat langkah-langkah perencanaan yang terencana dan berkesinambungan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilam pelaksanaan fungsi-fungsi kepemerintahan Kecamatan.

Renja Kecamatan Pugaan tahun 2024 merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Pugaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di 15 desa yang ada di wilayah Kecamatan Pugaan, sekaligus juga merupakan penjabaran Visi, Misi Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2024. Sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Tabalong yang diusung pada tahun 2024 ini yakni" Penanganan Kesehatan dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Dalam Rangka Menciptakan Sumber Daya ManusiaYang Tangguh" maka di tahun 2024 Kantor Kecamatan Pugaan memperioritaskan kegiatan untuk melakukan :

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan Kecamatan dan Desa
2. Peningkatan kegiatan pembinaan, pendampingan dan evaluasi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa
3. Peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan dalam upaya menumbuhkan nilai-nilai agamis dalam kehidupan

4. Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangungan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
5. Perbaikan dan pembenahan sarana dan prasarana kantor demi memberikan fasilitas yang nyaman untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, keberhasilan ataupun tidaknya Renja SKPD ini tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat di wilayah Kecamatan Pugaan.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Pugaan Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :

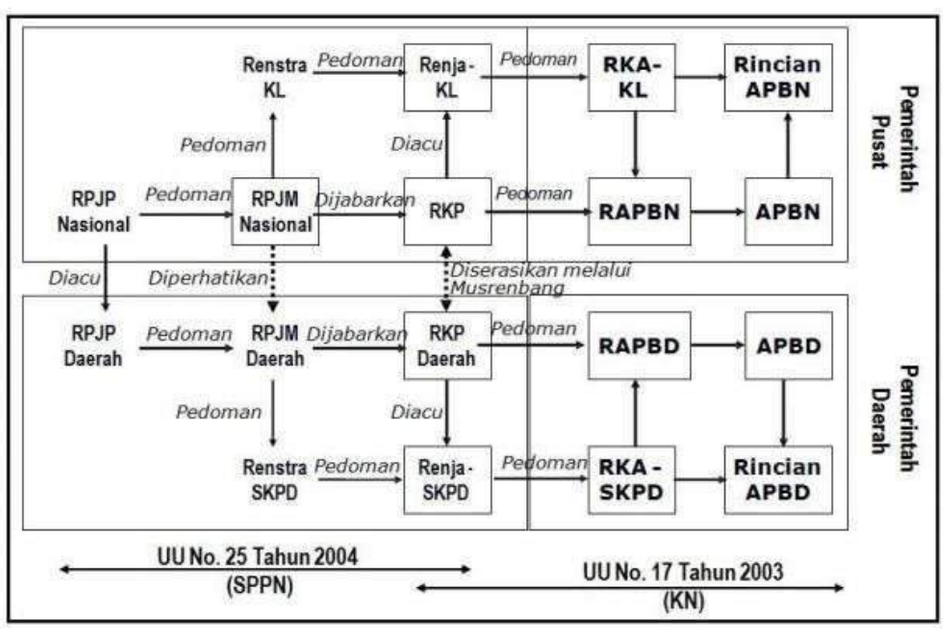

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6206 Tahun 2018)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatem Tabalong Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor .....Tahun 2022

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor……Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor …….. Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun yang merupakan implementasi dari Renstra SKPD 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupaan bermasyarakat sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di SKPD.

Adapun Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh SKPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannnya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PUGAAN TAHUN 2022
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pugaan Tahun 2022
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pugaan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pugaan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pugaan
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022

Kinerja Kantor Kecamatan Pugaan tahun 2022 tercermin dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) , diantaranya dapat dilihat dari:

1. Realisasi Keuangan Kecamatan Pugaan Tahun 2022 :

Tabel 2.1
Realisasi Keuangan Kecamatan Pugaan Tahun 2022

No.	Nama Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**				
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	211.328.000,-	203.497.250	7.830.750	96,30
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	126.200.000,-	125.380.000	820.000	99,35
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	98.280.000,-	97.031.100	1.248.900	98,72
		66.600.000,-	64.319.234	2.280.766	96,58
		5.690.000,-	5.690.000	0	100
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan				
	Penyelenggaraan pemerintahan umum	39.240.000,-	39.240.000	0	100
3.	Program Koordinasi Kesejahteraan Rakyat				
	Koordinasi dan dukungan pembinaan kemasyarakatan di kecamatan	18.325.000,-	16.975.000	1.350.000	92,63
4.	Program Pembinaan Kelembagaan, Aparatur dan Kewilayahan				

	Pengendalian pembangunan daerah kecamatan	29.600.000,-	29.600.000	0	100
5.	Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat				
	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda	45.400.000,-	45.400.000	0	100
JUMLAH		640.663.000	627.132.584	15.530.416	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 capaian realisasi keuangan Kantor Kecamatan Pugaan yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan berjumlah sebesar **Rp. 2.231.666.012** atau sebesar 94,13 % dari total pagu anggaran yang telah disediakan yakni **Rp. 2.370.710.637,-**.

Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kantor Kecamatan Pugaan yang diperoleh dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sampai dengan akhir tahun 2022 tidak ada penerimaan**.**

2. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi capaian target kinerja :

Tabel 2.2

Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Pugaan

No.	Nama Program / Kegiatan	Target Kinerja	Capaian Target Kinerja	%
1.	Program Pengelolaan Administrasi Perkantoran			
	Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran	Baik	Baik	100%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja dan perkantoran	28 Item	28 Item	100%
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja dan perkantontoran	48 Unit	48 Unit	100%
	Rapat-rapat koordinasi	250 ok	250 ok	100%
	Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	27 Dokumen	27 Dokumen	100%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan			
	Penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	100%	100%
3.	Program Koordinasi Kesejahteraan Rakyat			
	Koordinasi dan dukungan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan	100%	100%	**100%**
3.	Program Pembinaan Kelembagaan, Aparatur dan Kewilayahan			

	Pengendalian pembangunan daerah kecamatan	60 Usulan	60 Usulan	100%
4.	Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat			
	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda	7 Desa	7 Desa	100%

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2020 dapat tercapai meskipun belum optimal, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya target kinerja antara lain karena Pengaruh dari Pandemi Covid 19 dan keterbatasan sumber daya manusia dalam hal Pengelolaan Anggaran. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Kecamatan Pugaan adalah adanya optimis pencapaian target kinerja pada akhir tahun rencana strategis.

Adapun Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pugaan Tahun 2020 dapat disajikan pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra
Kecamatan Pugaan s/d Tahun 2021

No	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Peogram (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan S/d Tahun 2020 (Thn Ke-4)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan										Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Tahun 1 (2021)			Tahun 2 (2022)			Tahun 3 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
					Target	Realisasi	Ringkasan realisasi	Target	Realisasi	Ringkasan realisasi	Target	Realisasi	Ringkasan realisasi			
1	**Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan**	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			100 %				100%	100%
	1 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Serta Penegakan Perda	Jumlah Desa yang dibina keamanannya	7 desa	7 desa	7 desa	7 desa	100 %								100 %	100 %
2	**Program Pengelolaan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Terselenggaranya pengelolaan administrasi perkantoran**	Baik	Baik	C	Baik	Baik	C			C				Baik	Baik
	1 Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik								Baik	Baik

	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Kantor	Jumlah Alat dan Perlengkapan Kantor yang Dibeli	28 item	28 item	28 item	28 item	100 %								100 %	100 %
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja dan Perkantoran	Jumlah Alat dan Perlengkapan Kantor yang Dilakukan Pemeliharaan	48 unit	48 unit	48 unit	48 unit	100 %								100 %	100 %
	4	Rapat-Rapat Koordinasi	Orang kali Kegiatan	250 org kali kgt	250 org kali kgt	250 org kali kgt	250 org kali kgt	100 %								100 %	100 %
	5	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	27 dokumen	27 dokumen	27 dokumen	27 dokumen	100 %								100 %	100 %
3	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan**		**Persentase terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan**	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			100 %				100 %	100 %
	1	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %								100 %	100 %
4	**Program Koordinasi Kesejahteraan Rakyat**		**Persentase terlaksananya koordinasi kesejahtraan rakyat**	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			100 %				100 %	100 %

	1	Koordinasi dan dukungan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah peserta MTQ	45 Peserta	45 peserta	100%	100%	100%							100%	100%
5	**Program Pembinaan Kelembagaan,Aparatur dan kewilayanan**		**Persentase terlaksananya pembinaan kelembagaan,aparatur dan kewilayahan**	80 %	80 %	65 %	100 %	100 %	70 %			70 %				100 %	80 %
	1	Pengendalian pembangunan daerah kecamatan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir	60 Usulan	60 Usulan	60 Usulan	60 Usulan	100%							100%	80 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kecamatan Pugaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan Otonomi Daerah. Kewenangan tersebut diantaranya :

1. Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK).
3. Pelayanan penerbitan Keterangan Pindah.
4. Pelayaan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
5. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat.
6. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
7. Menggkordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
8. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam membangun desa.
9. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
10. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Pugaan menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pugaan, diantaranya :

1. Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya.
2. Mengadakan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Meningkatkan system pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

Disamping itu, kinerja pelayanan perangkat daerah yang merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maka capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada Perubahan Renstra Kecamatan Pugaan adalah

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pugaan

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi		
		2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		

	Keindahan)								
2	Nilai AKIP	C	B	B	B	B	B		
3	Persentase layanan umum lainnya tepat waktu	70 %	70 %	75	80 %	85%	100 %		
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	60 %	60 %	65 %	70 %	75 %	100 %		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pugaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, maka Kecamatan Pugaan mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Kedudukan Kecamatan

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
2. Kecamatan dipimpin oleh Camat.
3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris daerah.

b. Tugas Pokok Kecamatan

Kecamatan Pugaan memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebaagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

c. Fungsi Kecamatan

Fungsi Kecamatan Pugaan adalah sebagai pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pengkoordinasian pelayanan administrasi publik dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka Camat selaku kepala SKPD dibantu oleh Sekretaris Camat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, disamping membawahi 4 (empat) Seksi yang terdiri dari : Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum. Berikut adalah susunan organisasi di Kecamatan Pugaan :

Tabel 2.5

Susunan Organisasi Kecamatan Pugaan

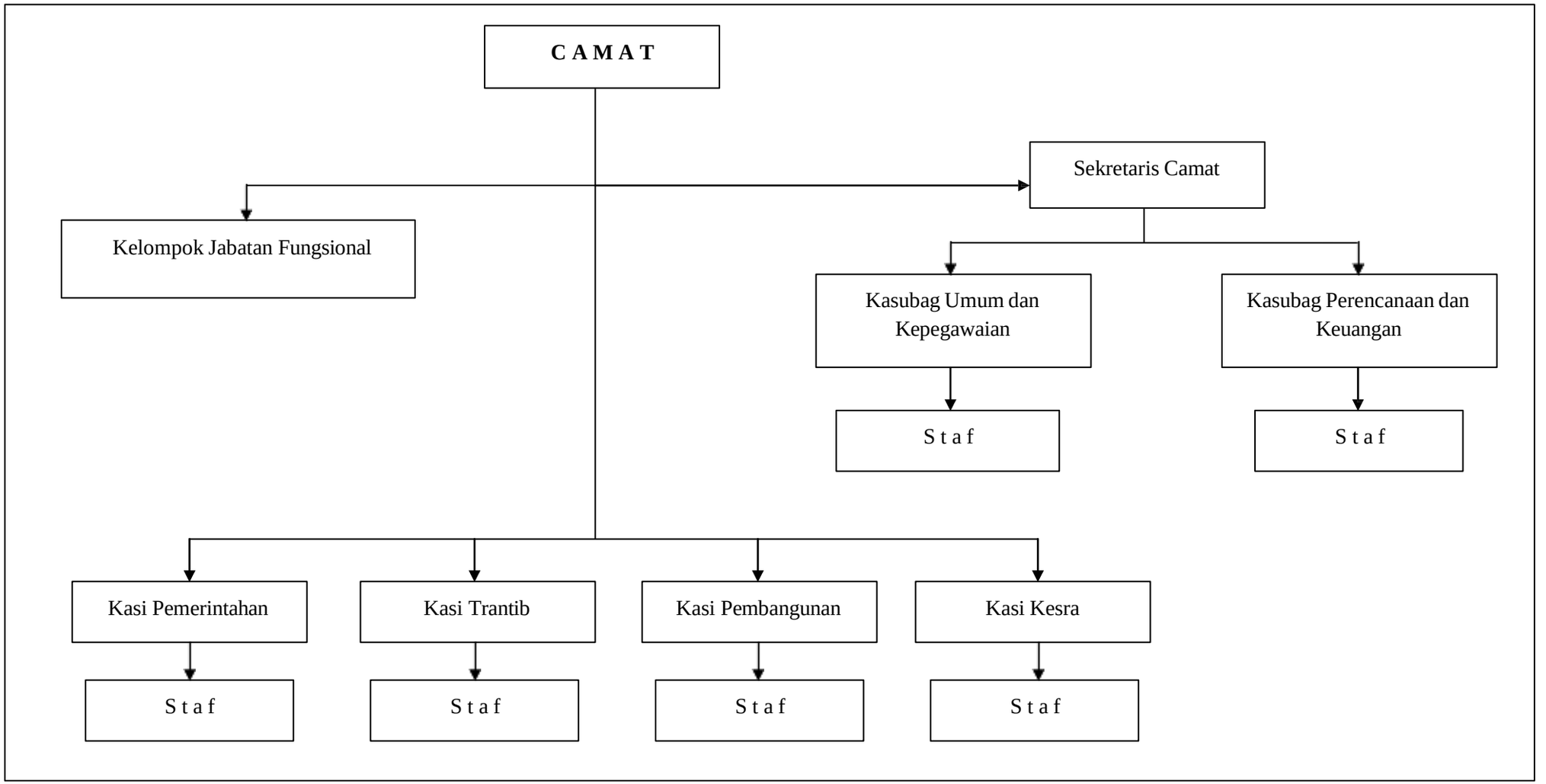

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, Kecamatan Pugaan berpungku pada visi Kabupaten Tabalong “Menuju Tabalong yang lebih agamis, sejahtera dan mandiri” dengan mengemban misi :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Tabalong yang lebih agamis melalui kebijakan pembangunan yang diarahkan agar tercapai masyarakat madani yang beretika dan bermoral melalui peningkatan pemahaman dan pengamanan nilai-nilai agama, memperkuat kelembagaan keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan sehingga akan terwujud kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia (Tabalong Berkualitas).
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong dengan mengawal pembangunan yang diarahkan agar masyarakat berkemampuan lebih dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya melalui kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara signifikan, serta penurunan angka kemiskinan secara nyata (Tabalong Sejahtera).
3. Mewujudkan kemandirian daerah Kabupaten Tabalong melalui pembangunan yang diarahkan pada tercapainya system yang handal dan dinamis yang mampu bertindak sesuai keadaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bijak melalui penguatan kelembagaan ekonomi, social budaya dan pemerintahan untuk menciptakan kemajuan perekonomian daerah yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas (Tabalong Mandiri).

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala dan kelemahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pugaan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, diantaranya :

1. Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tidak dapat diselenggarakan di Kantor Kecamatan Pugaan karena rusaknya system koneksi jaringan dan hingga saat ini belum ada tindakan perbaikan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong. Hal ini tentunya mengakibatkan jika ada masyarakat yang ingin membuat KTP dan Kartu Keluarga terpaksa harus berurusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong yang ada di Tanjung.
2. Jarak tempuh antara Kecamatan dengan Kabupaten yang cukup jauh ± 30 Km dengan kondisi jalan Kecamatan Pugaan yang rusak parah sehingga cukup menyulitkan dan memperlambat koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
3. Tidak terdapatnya jaringan telepon kabel di wilayah Kecamatan Pugaan sehingga Kantor Kecamatan Pugaan tidak dapat memasang jaringan internet, sedangkan untuk koneksi internet melalui jaringan nirkabel (GSM) juga tidak dapat diandalkan karena kualitas koneksi internet GSM yang buruk di Kecamatan Pugaan, pada hal disisi lain Kecamatan Pugaan dituntut untuk menggunakan aplikasi internet dalam melaksanakan beberapa pekerjaan

seperti pengentryan data untuk perencanaan keuangan dan pembangunan melalui *e-planing,* penyetoran pajak, dan sebagainya.

4. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dan kurangnya pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan kerja dan profesionalitas aparatur Kecamatan Pugaan.
5. Minimnya pemanfaatan teknologi dalam bekerja dikalangan aparatur Kecamatan Pugaan menyebabkan kurang efektif dan efisiennya pemanfaatan waktu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan.

Disamping kendala dan kelemahan yang ada, Kecamatan Pugaan juga memiliki beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Pugaan dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Pugaan, diantaranya :

1. Adanya struktur organisasi yang terpola.
2. Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat.
3. Jumlah aparat Kecamatan Pugaan yang memadai.
4. Suasana kerja di Kecamatan Pugaan yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok *(team work)*.
5. Adanya koordinasi di Wilayah Kecamatan Pugaan yang baik

Adapun isu-isu penting lainnya yang ada di Kecamatan Pugaan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

   Kecamatan Pugaan merupakan kawasan yang terindikasi rawan banjir. Untuk mengurangi dampak akibat banjir maka perlu adanya perbaikan infrastruktur yang ada di Kecamatan Pugaan

2. Bidang Pemerintahan

   Berlakunya UU Desa yang menuntut aparat kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar desa lebih optimal melaksanakan amanat UU Desa tersebut.

3. Bidang Pelayanan

   Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima menjadikan kecamatan Pugaan untuk selalu berinovasi agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan

4. Bidang Pertanian

   Alih fungsi lahan merupakan masalah yang mulai mencuat di wilayah Pugaan. Para pengembang mulai melirik tanah pertanian di Kecamaan Pugaan untuk dijadikan perumahan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pugaan serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan RKPD Kabupaten Tabalong disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat / melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (Proses Button-up dan Top-down).

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong tahun 2024 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2024 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2024 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan.
Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan KabupatenTabalong.

Tabel 2.6

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Tabalong

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISASI KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
NO.	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	NO.	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Kecamatan Pugaan	100%	52.480.000	1	Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Kecamatan Pugaan	100%	53.470.000	Peningkatan Peengawasan Penegakan Perda dan Peningkatan Retribusi Daerah
2	Program Pembinaan Kelembagaan, Aparatur dan Kewilayahan	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas Aparatur dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	Kecamatan Pugaan	65%	80.000.000	2	Program Pembinaan Kelembagaan, Aparatur dan Kewilayahan	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas Aparatur dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	Kecamatan Pugaan	70%	119.496.929	Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Kinerja Aparatur
3	Program Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Nilai Akip	Kecamatan Pugaan	B	647.145.000	3	Program Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Nilai Akip	Kecamatan Pugaan	B	3.388.382.536	Biaya Materai, Pembelian Peralatan Kantor, Peningkatan Sarana Kantor

4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	Kecamatan Pugaan	80%	89.139.000	4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	Kecamatan Pugaan	80%	153.304.680	Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Penyusunan Dokumen penyelenggaraan pemerintahan
5	Program Koordinasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan	Kecamatan Pugaan	80%	63.756.000	5	Program Koordinasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan	Kecamatan Pugaan	80%	87.876.855	Penambahan Kafilah MTQ
JUMLAH					932.520.000	JUMLAH					3.822.532.000	

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan, Kecamatan Pugaan telah menyampaikan beberapa usulan pembangunan yang diperoleh dari Musrenbang Tingkat Desa maupun Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD yang menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kerja antar SKPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agara tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah diatur dalam Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif.

Tahapan musrenbang dapat diskriptifkan fungsi dan perencanaan serta kerangka waktu masing-masing tahapan musrenbang :

1. Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan adalah tahapan penggalian usulan program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini dibuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam rangka berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan (minggu II s/d minggu IV bulan januari). Musrenbang tingkat ini merupakan tahapan penentuan prioritas usulan program/kegiatan dari masing-masing RT/RW serta pengklasifikasian usulan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Musrenbang tingkat kecamatan adalah tahapan pemantapan usulan program/kegiatan yang akana disampaikan pada forum SKPD. Pada tahap ini peranan SKPD sangat besar dalam membantu masyarakat memfoumulasikan usulan program/kegaiatan mereka (minggu I bulan febru ari)
3. Forum SKPD adalah tahapan sinkronisasi usulan program/kegiatan SKPD dengan usulan masyarakat hasil usulan musrenbang kecamatan. Pada tahap ini usulan-usulan program/kegaiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD sesuai misi dalam RPJMD. Minggu II s/d minggu IV bulan Februari).
4. Musrenbang tingkat kabupaten adalah puncak dari pelaksanaan musrenbang di kabupaten ini adalah tahapan finalisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang akan diimplementasikan oleh masing-masing SKPD terkait. (minggu II bulan maret)

Adapun usulan program dan kegiatan dari masyarakat Kecamatan Pugaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Kecamatan Pugaan Tahun 2022

No	Usulan	Lokasi	Kategori Usulan	Volume	SKPD Penanggung Jawab	Status Usulan
1.	Pembangunan Infrastruktur Jembatan	Desa Pugaan RT 04 Kecamatan Pugaan	Renja	sepanjang 100 X 3 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Forum SKPD
2.	Pembangunan Infrastruktur Drainase, irigasi,, sarana dan prasarana air dan pintu air	Desa Halangan RT 01 Kecamatan Pugaan	Renja	1 Kegiatan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Forum SKPD
3.	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Desa Sei Rukam II RT 01	Renja	35 M X 35 M	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Forum SKPD
4.	Penyediaan Bibit dan Benih Padi	Desa Halangan (Kelompok Tani)	Renja	1 Kegiatan	DINAS PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
5.	Perbaikan Rumah Tak Layak Huni	Desa Pampanan RT 01 – RT 06	Renja	35 Buah	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Diteruskan ke Forum SKPD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, yaitu : **"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"**, telah ditetapkan Fokus Pembangunan sebagai berikut :

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Nasional (PN) tahun 2024 yang ditetapkan ada 7 (tujuh) yaitu :

PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Posisi kecamatan dalam mendukung pelaksanaan prioritas nasional tahun 2024 menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan bentuk jawaban dan respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di pelayanan yang bersifat administratif dimana pemerintah menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien. Dan didalam permendagri yang dimaksud mengamanatkan bahwa penyelenggara PATEN harus terselenggara di seluruh Kecamatan se Indonesia.

Salah satu arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional 2024, yaitu memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip – prinsip tertentu, diantaranya : keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pelayanan publik tersebut dilakukan pada seluruh aspek manajeman penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, mulai dariperencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya. Penerapan tata kelola pelayanan publik yang baik diharapkan terwujud dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas dan

kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Tanpa pemerintahan yang bersih akan sulit dicapai pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel yang akan berakibat langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik serta menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan Visi Bupati Tabalong periode 2024 yakni **"Menuju Kabupaten Tabalong yang lebih Agamis, Sejahtera dan Mandiri"** dan Misi Bupati Tabalong diantaranya :

1. Mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Agamis.
2. Mewujudkan Kabupaten Tabalong yang sejahtera melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan serta peningkatan kegiatan ekonomi rakyat dan pendapatan masyarakat.
3. Mewujudkan Kabupaten Tabalong yang mandiri melalui peningkatan kemampuan pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha untuk melaksanakan pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Maka Rencana Kerja Kecamatan Pugaan Tahun 2024 dimaksudkan menjadi acuan dan pedoman bagi Kecamatan Pugaan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pugaan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Pugaan Tahun 2024.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Pugaan Tahun 2024.
3. Memberikan pedoman dalam pengawasan dalam penyelenggaran pemerintahan Daerah Tahun 2024.

Dengan mengusung tema pembangunan Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 yakni **" Penanganan Kesehatan dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Dalam Rangka Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Tangguh"** maka di tahun 2024 Kantor Kecamatan Pugaan memperioritaskan kegiatan untuk melakukan :

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan Kecamatan dan Desa
2. Peningkatan kegiatan pembinaan, pendampingan dan evaluasi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa
3. Peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan dalam upaya menumbuhkan nilai-nilai agamis dalam kehidupan
4. Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangungan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
5. Perbaikan dan pembenahan sarana dan prasarana kantor demi memberikan fasilitas yang nyaman untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Demi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut perlu ditempuh melalui penetapan beberapa Sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rencana Kerja, Tujuan, Sasaran dan indikator Kinerja
Kecamatan Pugaan Tahun 2024

No.	Rencana Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat	Mewujudkan kerukunan Hidup antar Umat Beragama	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Kehidupan Umat Beragama	Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Keamana dan Keindahan)	100%
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pegawai	Nilai AKIP	B
			2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan Umum Lainnya Tepat Waktu	85 %
			3. Meningkatnya Pengendalian Pembangunan di Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	75 %

3.3 Program dan Kegiatan

Rancangan Program dan kegiatan Kecamatan Pugaan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Rancangan Program dan Kegiatan Kecamatan Pugaan Tahun 2024

No.	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Capaian Program	Pagu Anggaran (Rp.)
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket petralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	55.254.395,-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yyang di sediakan	11.793.701,-
	Penelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	165.919.000,-
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusuna dokumen perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan daerah	1.403.320,-
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil kordinasi penyusuna RKA-SKPD	1.403.320,-
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil kordinasi penyusuna perubahan RKA-SKPD	1.403.320,-
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil kordinasi penyusuna DPASKPD	1.403.320,-
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil kordinasi penyusuna perubahan DPASKPD	1.403.320,-
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jum;ah laporan capaian kinerja dan ikhtisar relalisasi kinerjaSKPD	1.403.320,-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1.403.320,-
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2.814.254.000,-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	3.538.910,-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		4.836.276,-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

	Penyyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		24.800.000,-
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		222.353.014,-
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		
2.	**Program Penyeklenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik**		
	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
	Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	Terlaksananya urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan di kecamatan	30.000.000,-
	Peningkatan efektiitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		
3.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan desa	20.796.000,-
	Kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan luarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Meningkatnya partifasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembanguann di desa	90.000.000,-
	Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas		
4.	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**		
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	Sinergitas dengan kepolisian Negara republic Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	Terpeliharanya ubungan tokoh agama dan tokoh masyarakat	22.079.000,-
5.	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahhanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republik indonasia	Terselenggaranya urusan pemerintah umum	70.807.000,-
	Pelakaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan kecamatan	41.500.000,-

6.	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa** Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		
	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa Fasilitasi pengeloaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa pemberdayaan masyarakat desa	Terfasilitasinya administrasi tata pemerintahan desa Terfasilitasinya penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan	35.000.000,- 40.0
	J u m l a h		**3.822.532.000,-**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menyajikan rumusan program dan kegiatan beserta Indikator Kinerja dan pagu indikatif, yang disajikan dalam tabel 4.1, sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rancangan Awal Program dan Kegiatan Kecamatan Pugaan Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD					
NO.	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Cap.aian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
1	Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase tingkat peneyelesaian K3 (Ketertiban,Ketentraman dan Kenyamanan)	Kecamatan Pugaan	100%	22.079.000
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Pugaan	75%	56.038.709
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akip	Kecamatan Pugaan	Baik	3.388.382.536
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan kelembagaan social kemasyarakatan	Kecamatan Pugaan	80%	87.876.855
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase layanan umum lainnya tepat waktu	Kecamatan Pugaan	80%	158.497.400
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Kecamatan Pugaan	75%	3.459.220
JUMLAH					3.822.532.000

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisein.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Pugaan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong . Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Selain itu Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong , maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Melalui Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Pugaan, 2024

CAMAT PUGAAN

FARITH YUSRIANNUR RIZA,SH,Kp

Pembina

NIP. 19850918 200312 1 002

Format Perubahan Renja SKPD
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2024
Kabupaten Tabalong

Nama SKPD: KECAMATAN KELUA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju (Renja Tahun 2025)		Jenis Keg.*)	Unit SKPD Penanggung jawab
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana						
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=12-11	(14)	(7)	(16)	(17)	(18)	(19)
7				**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**			**KECAMATAN**									**5,869,332,318**	**6,462,242,352**	**887,509,383**				**5,869,332,318**		
7	**01.01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI AKIP**	**NILAI AKIP**	**ASN Kecamatan Kelua**	**ASN Kecamatan Kelua**	**Kec. Kelua**	**Kec. Kelua**	**B**	**BB**	**4,904,511,558**	**5,280,378,505**	**580,469,721**	**DAU**	**DAU**	**BB**	**4,904,511,558**		
7	**01.01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**ASN Kecamatan Kelua**	**ASN Kecamatan Kelua**	**Kec. Kelua**	**Kec. Kelua**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**29,118,757**	**25,734,220**	**3,384,537**	**DAU**	**DAU**	**7 Dokumen**	**29,118,757**		
7	01.01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ASN Kecamatan Kelua	ASN Kecamatan Kelua	Kec. Kelua	Kec. Kelua	15 Dokumen	15 Dokumen	29,118,757	25,734,220	3,384,537	DAU	DAU	15 Dokumen	29,118,757		Sekretaris Camat
7	**01.01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN**	**Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN**	**ASN Kecamatan Kelua**	**ASN Kecamatan Kelua**	**Kec. Kelua**	**Kec. Kelua**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**3,852,065,000**	**4,109,255,000**	**257,190,000**	**DAU**	**DAU**	**7 Dokumen**	**3,852,065,000**		
7	01.01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN Kecamatan Kelua	ASN Kecamatan Kelua	Kec. Kelua	Kec. Kelua	0 Orang/ Bulan	0 Orang/ Bulan	3,852,065,000	4,109,255,000	257,190,000	DAU	DAU	0 Orang/ Bulan	3,852,065,000		Sekretaris Camat
7	**01.01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**ASN Kecamatan Kelua**	**ASN Kecamatan Kelua**	**Kec. Kelua**	**Kec. Kelua**	**4 Paket**	**4 Paket**	**373,321,903**	**479,250,594**	**227,328,791**	**DAU**	**DAU**	**4 Paket**	**373,321,903**		
7	01.01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	ASN Kecamatan Kelua	ASN Kecamatan Kelua	Kec. Kelua	Kec. Kelua	10 Paket	10 Paket	60,700,050	-	60,700,050	DAU	DAU	10 Paket	60,700,050		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7	01.01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	ASN Kecamatan Kelua	ASN Kecamatan Kelua	Kec. Kelua	Kec. Kelua	1 Paket	1 Paket	3,388,276	11,226,138	7,837,862	DAU	DAU	1 Paket	3,388,276		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7	01.01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	ASN Kecamatan Kelua	ASN Kecamatan Kelua	Kec. Kelua	Kec. Kelua	5 Paket	5 Paket	28,651,577	28,771,456	119,879	DAU	DAU	5 Paket	28,651,577		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7	01.01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	ASN Kecamatan Kelua	ASN Kecamatan Kelua	Kec. Kelua	Kec. Kelua	2 Dokumen	2 Dokumen	3,240,000	4,680,000	1,440,000	DAU	DAU	2 Dokumen	3,240,000		Sekretaris Camat
7	01.01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ASN Kecamatan Kelua	ASN Kecamatan Kelua	Kec. Kelua	Kec. Kelua	50 Laporan	50 Laporan	277,342,000	434,573,000	157,231,000	DAU	DAU	50 Laporan	277,342,000		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7	**01.01**	**2.07**		**Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Alat yang di Beli**	**Jumlah Alat yang di Beli**	**ASN Kecamatan Kelua**	**ASN Kecamatan Kelua**	**Kec. Kelua**	**Kec. Kelua**	**4 Unit**	**4 Unit**	**15,540,000**	**22,709,593**	**7,169,593**	**DAU**	**DAU**	**4 Unit**	**15,540,000**		
7	01.01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Jumlah Paket mebel yang disediakan	ASN Kecamatan Kelua	ASN Kecamatan Kelua	Kec. Kelua	Kec. Kelua	6 Unit	6 Unit	15,540,000	22,709,593	7,169,593	DAU	DAU	6 Unit	15,540,000		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7	**01.01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah**	**ASN Kecamatan Kelua**	**ASN Kecamatan Kelua**	**Kec. Kelua**	**Kec. Kelua**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**496,008,027**	**491,655,227**	**22,352,800**	**DAU**	**DAU**	**12 Laporan**	**496,008,027**		
7	01.01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	ASN Kecamatan Kelua	ASN Kecamatan Kelua	Kec. Kelua	Kec. Kelua	12 Laporan	12 Laporan	31,800,000	40,800,000	9,000,000	DAU	DAU	12 Laporan	31,800,000		Kasubbag Umum dan Kepegawaian

7	01.01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	ASN Kecamatan Kelua	ASN Kecamatan Kelua	Kec. Kelua	Kec. Kelua	12 Laporan	12 Laporan	464,208,027	450,855,227	13,352,800	DAU	DAU	12 Laporan	464,208,027		Sekretaris Camat
7	**01.01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	**ASN Kecamatan Kelua**	**ASN Kecamatan Kelua**	**Kec. Kelua**	**Kec. Kelua**	**12 Unit**	**12 Unit**	**138,457,871**	**151,773,871**	**63,044,000**	**DAU**	**DAU**	**12 Unit**	**138,457,871**		
7	01.01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	ASN Kecamatan Kelua	ASN Kecamatan Kelua	Kec. Kelua	Kec. Kelua	13 Unit	13 Unit	92,646,000	130,826,000	38,180,000	DAU	DAU	13 Unit	92,646,000		Sekretaris Camat
7	01.01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	ASN Kecamatan Kelua	ASN Kecamatan Kelua	Kec. Kelua	Kec. Kelua	30 Unit	30 Unit	20,947,871	20,947,871	-	DAU	DAU	30 Unit	20,947,871		Sekretaris Camat
7	01.01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	ASN Kecamatan Kelua	ASN Kecamatan Kelua	Kec. Kelua	Kec. Kelua	1 Unit	1 Unit	24,864,000	-	24,864,000	DAU	DAU	1 Unit	24,864,000		Sekretaris Camat
7	**01.02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PELAYANAN KELEMBAGAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN**	**PERSENTASE PELAYANAN KELEMBAGAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN**	**ASN Kecamatan Kelua**	**ASN Kecamatan Kelua**	**Kec. Kelua**	**Kec. Kelua**	**80 Persen**	**80 Persen**	**109,881,192**	**296,568,240**	**186,687,048**	**DAU**	**DAU**	**80 Persen**	**109,881,192**		
7	**01.02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**ASN Kecamatan Kelua**	**ASN Kecamatan Kelua**	**Kec. Kelua**	**Kec. Kelua**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**109,881,192**	**296,568,240**	**186,687,048**	**DAU**	**DAU**	**1 Laporan**	**109,881,192**		
7	01.02	2.01	01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	ASN Kecamatan Kelua	ASN Kecamatan Kelua	Kec. Kelua	Kec. Kelua	1 Laporan	1 Laporan	109,881,192	296,568,240	186,687,048	DAU	DAU	1 Laporan	109,881,192		Kasi Kesra
7	**01.03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PENINGKATAN KINERJA APARATUR, KAPASITAS APARATUR DAN TATA KELOLA KEWILAYAHAN DESA**	**PERSENTASE PENINGKATAN KINERJA APARATUR, KAPASITAS APARATUR DAN TATA KELOLA KEWILAYAHAN DESA**	**ASN Kecamatan Kelua**	**ASN Kecamatan Kelua**	**Kec. Kelua**	**Kec. Kelua**	**80 Persen**	**80 Persen**	**195,384,399**	**154,557,362**	**37,827,037**	**DAU**	**DAU**	**80 Persen**	**195,384,399**		
7	**01.03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Pemerintah Desa yang dibina/ diberdayakan**	**Jumlah Pemerintah Desa yang dibina/ diberdayakan**	**ASN Kecamatan Kelua**	**ASN Kecamatan Kelua**	**Kec. Kelua**	**Kec. Kelua**	**3 Lembaga Kemasyarakatan**	**3 Lembaga Kemasyarakatan**	**114,665,893**	**77,494,086**	**37,171,807**	**DAU**	**DAU**	**3 Lembaga Kemasyarakatan**	**114,665,893**		
7	01.03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	ASN Kecamatan Kelua	ASN Kecamatan Kelua	Kec. Kelua	Kec. Kelua	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	14,592,698	-	14,592,698	DAU	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	14,592,698		Kasi Kesra
7	01.03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	ASN Kecamatan Kelua	ASN Kecamatan Kelua	Kec. Kelua	Kec. Kelua	12 Laporan	12 Laporan	100,073,195	77,494,086	22,579,109	DAU	DAU	12 Laporan	100,073,195		Kasi Kesra
7	**01.03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Pemerintah Kelurahan yang dibina dan diberdayakan**	**Jumlah Pemerintah Kelurahan yang dibina dan diberdayakan**	**ASN Kelurahan Pulau**	**ASN Kelurahan Pulau**	**Kel. Pulau**	**Kel. Pulau**	**1 Kelurahan**	**1 Kelurahan**	**5,518,506**	**4,863,276**	**655,230**	**DAU**	**DAU**	**1 Kelurahan**	**5,518,506**		
7	01.03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	ASN Kelurahan Pulau	ASN Kelurahan Pulau	Kel. Pulau	Kel. Pulau	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5,518,506	4,863,276	655,230	DAU	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	5,518,506		Kasi Pembangunan Kel. Pulau
7	**01.03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Jumlah Pemerintah Kelurahan yang dibina dan diberdayakan**	**Jumlah Pemerintah Kelurahan yang dibina dan diberdayakan**	**ASN Kelurahan Pulau**	**ASN Kelurahan Pulau**	**Kel. Pulau**	**Kel. Pulau**	**150 Keluarga**	**150 Keluarga**	**75,200,000**	**72,200,000**	**3,000,000**	**DAU**	**DAU**	**150 Keluarga**	**75,200,000**		
7	01.03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	ASN Kelurahan Pulau	ASN Kelurahan Pulau	Kel. Pulau	Kel. Pulau	150 Keluarga	150 Keluarga	75,200,000	72,200,000	3,000,000	DAU	DAU	150 Keluarga	75,200,000		Kasi Pembangunan Kel. Pulau

7	**01.04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan**	**Persentase Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan**	**ASN Kecamatan Kelua**	**ASN Kecamatan Kelua**	**Kec. Kelua**	**Kec. Kelua**	**100 Persen**	**100 Persen**	**22,407,400**	**20,007,400**	**2,400,000**	**DAU**	**DAU**	**100 Persen**	**22,407,400**		
7	**01.04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan**	**ASN Kecamatan Kelua**	**ASN Kecamatan Kelua**	**Kec. Kelua**	**Kec. Kelua**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**22,407,400**	**20,007,400**	**2,400,000**	**DAU**	**DAU**	**12 Laporan**	**22,407,400**		
7	01.04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	ASN Kecamatan Kelua	ASN Kecamatan Kelua	Kec. Kelua	Kec. Kelua	12 Laporan	12 Laporan	22,407,400	20,007,400	2,400,000	DAU	DAU	12 Laporan	22,407,400		Kasi Tramtib
7	**01.05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE DOKUMEN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG DISUSUN TEPAT WAKTU**	**PERSENTASE DOKUMEN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG DISUSUN TEPAT WAKTU**	**ASN Kecamatan Kelua**	**ASN Kecamatan Kelua**	**Kec. Kelua**	**Kec. Kelua**	**85 Persen**	**85 Persen**	**243,517,117**	**318,085,617**	**79,368,500**	**DAU**	**DAU**	**85 Persen**	**243,517,117**		
7	**01.05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**ASN Kecamatan Kelua**	**ASN Kecamatan Kelua**	**Kec. Kelua**	**Kec. Kelua**	**47 Orang**	**47 Orang**	**243,517,117**	**318,085,617**	**79,368,500**	**DAU**	**DAU**	**47 Orang**	**243,517,117**		
7	01.05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	ASN Kecamatan Kelua	ASN Kecamatan Kelua	Kec. Kelua	Kec. Kelua	25 Orang	25 Orang	138,814,034	215,782,534	76,968,500	DAU	DAU	25 Orang	138,814,034		Kasi Pemerintahan
7	01.05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	ASN Kecamatan Kelua	ASN Kecamatan Kelua	Kec. Kelua	Kec. Kelua	1 Dokumen	1 Dokumen	104,703,083	102,303,083	2,400,000	DAU	DAU	1 Dokumen	104,703,083		Kasi Tramtib
7	**01.06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**ASN Kecamatan Kelua**	**ASN Kecamatan Kelua**	**Kec. Kelua**	**Kec. Kelua**	**75 Persen**	**75 Persen**	**106,916,850**	**106,159,773**	**757,077**	**DAU**	**DAU**	**75 Persen**	**106,916,850**		
7	**01.06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi**	**Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi**	**ASN Kecamatan Kelua**	**ASN Kecamatan Kelua**	**Kec. Kelua**	**Kec. Kelua**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**106,916,850**	**106,159,773**	**757,077**	**DAU**	**DAU**	**1 Dokumen**	**106,916,850**		
7	01.06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	ASN Kecamatan Kelua	ASN Kecamatan Kelua	Kec. Kelua	Kec. Kelua	1 Dokumen	1 Dokumen	56,000,000	55,999,773	227	DAU	DAU	1 Dokumen	56,000,000		Kasi Pemerintahan
7	01.06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	ASN Kelurahan Pulau	ASN Kelurahan Pulau	Kel. Pulau	Kel. Pulau	1 Dokumen	1 Dokumen	50,916,850	50,160,000	756,850	DAU	DAU	1 Dokumen	50,916,850		Kasi Pemerintahan Kel. Pulau

Nama SKPD: KELURAHAN PULAU

7	**01.03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PENINGKATAN KINERJA APARATUR, KAPASITAS APARATUR DAN TATA KELOLA KEWILAYAHAN DESA**	**PERSENTASE PENINGKATAN KINERJA APARATUR, KAPASITAS APARATUR DAN TATA KELOLA KEWILAYAHAN DESA**	**ASN Kecamatan Kelua**	**ASN Kecamatan Kelua**	**Kec. Kelua**	**Kec. Kelua**	**80 Persen**	**80 Persen**	**286,713,802**	**286,485,455**	**51,247,753**	**PAD**	**PAD**	**80 Persen**	**286,713,802**		
7	**01.03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Pemerintah Kelurahan yang dibina dan diberdayakan**	**Jumlah Pemerintah Kelurahan yang dibina dan diberdayakan**	**ASN Kelurahan Pulau**	**ASN Kelurahan Pulau**	**Kel. Pulau**	**Kel. Pulau**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**286,713,802**	**286,485,455**	**51,247,753**	**PAD**	**PAD**	**1 Kegiatan**	**286,713,802**		
7	01.03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	ASN Kelurahan Pulau	ASN Kelurahan Pulau	Kel. Pulau	Kel. Pulau	0 Unit	0 Unit	231,770,394	206,032,344	25,738,050	PAD	PAD	0 Unit	231,770,394		Kasi Pembangunan Kel. Pulau
7	01.03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	ASN Kelurahan Pulau	ASN Kelurahan Pulau	Kel. Pulau	Kel. Pulau	0 Pokmas/ Ormas	0 Pokmas/ Ormas	54,943,408	80,453,111	25,509,703	PAD	PAD	0 Pokmas/ Ormas	54,943,408		Kasi Pemerintahan Kel. Pulau

Keterangan :

*) A. sedang berjalan
B. alternatif
C. baru

Tanjung, Juni 2024
Camat Kelua

H. FARIDUDDIN, S.AP., MA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680105 198903 1 011

Petunjuk Pengisian:

Format Perubahan Renja SKPD Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2024.

Kolom (1) **Kode** diisi dengan ; kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan

Kolom (2) **Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan** diisi dengan ;
uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifilcasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam Renja SKPD tahun 2023.

Kolom (3) **Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan** diisi dengan

Kolom (4)
a. jenis indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD yang telah dilaksanakan melalui DPA berdasarkan hasil evaluasi (T-C29).
b. indikator sebelum dan sesudah perubahan.

Kolom (5) **Kelompok Sasaran** diisi dengan ;

Kolom (6)
a. penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari kegiatan seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender, dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD yang telah dilaksanakan melalui DPA.
b. kelompok sasaran sebelum dan sesudah perubahan.

Kolom (7) **Lokasi** diisi dengan ;

Kolom (8)
a. lokasi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD yang telah dilaksanakan melalui DPA.
b. lokasi kegiatan sebelum dan sesudah perubahan.

Kolom (9) **Target Capaian Kinerja** diisi dengan :

Kolom (10)
a. target kinerja capaian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD yang telah dilaksanakan melalui DPA.
b. target capaian kinerja sebelum dan sesudah perubahan.

Kolom (11) **Pagu Indikatif** diisi dengan ;

Kolom (12)
a. jumlah pagu indikatif kegiatan sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD.
b. pagu indikatif sebelum dan sesudah perubahan.

Kolom (13) **Jumlah Perubahan** diisi dengan ;
hasil pengurangan antara jumlah anggaran pada kolom (12) dengan jumlah anggaran pada kolom (11)

Kolom (14) **Sumber Dana** diisi dengan ;

Kolom (15) sumber pendanaan kegiatan sebelum dan sesudah perubahan.

Kolom (16) **Perkiraan Maju (Renja Tahun 2024)** diisi dengan ;

Kolom (17)
a. target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan untuk prakiraan maju (Renja SKPD Tahun 2024).
b. jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju (Renja SKPD Tahun 2024).

Kolom (18 **Jenis Kegiatan** diisi dengan ; sifat jenis kegiatan tersebut:
A. sedang berjalan
B. alternatif, yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.
C. baru dengan kriteria:
1. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran rencana SKPD;
3. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
4. kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang maksimal.

Kolom (19) **Unit SKPD Penanggung jawab** diisi dengan ;
unit SKPD yang bertanggungjawab atas kegiatan tersebut (sekretariat, bidang, seksi)

PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024

Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong tahun 2024 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024, untuk menjalankan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dokumen Perubahan Renja ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong beserta program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan. Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon koreksi, saran dan masukan dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong ini dapat bermanfaat dan diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Banua Lawas, Agustus 2024

Camat Banua Lawas,

H. FAHRUDDIN, S.AP, MA
Pembina Tk. I
NIP. 19680105 198903 1 011

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum..... I-2

1.3 Maksud dan tujuan..... I-5

1.4 Sistematika penulisan I-5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 II-7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaaan II-7

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024 ..... II-7

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024.. II-14

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-23

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II-25

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD II-26

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH III-36

BAB IV PENUTUP IV-50

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Kecamatan Banua Lawas Tahun 2024 dengan APBD 2024 ..... II-8

Tabel 2.2 Perbandingan Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja dan APBD Kecamatan Banua Lawas Tahun 2024 ..... II-9

Tabel 2.3 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Banua Lawas Sampai Triwulan II Tahun 2024..... II-15

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024..... II-27

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2024.....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan konsekuensi dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja nstansi Pemerintah, serta sebagai wujud implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaliandan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024. Renja Tahun 2024 telah disusun pada tahun 2023 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Seiring dengan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2024, hasil pengendalian pelaksanaan renja menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Banua Lawas Tahun 2024. Hal ini sekaligus sebagai tindak lanjut dari terbitnya Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor P- 668/Kecamatan Banua Lawas.P2E/050/07/2022 tentang Penyusunan Perubahan Renja SKPDTahun 2024, bahwa SKPD melakukan penyesuaian terhadap Renja sehubungan dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun2024.

Selain berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024, Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas Tahun 2024 juga disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2024 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Derah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang- Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten TabalongNomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenTabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah KabupatenTabalong Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 63);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 (Berita Daerah KabupatenTabalong Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 29).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

   Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

2. Tujuan

   Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun selain berpedoman dengan Perubahan RKPD, juga berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. Dalam hal ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Banua Lawas sampai dengan triwulan II tahun 2024 dengan mengacu pada APBD tahun2024 yang sudah disahkan.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGANTRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024

2.1.1.1 Kesesuaian Program Antara Renja Kecamatan Banua Lawas Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada rencana kerja Kecamatan Banua Lawas dengan APBD Tahun 2024, terdapat kesesuaian 100%. Artinya bahwa jumlah program dalam renja sama dengan jumlah program yang ada dalam APBD, yaitu ada 6 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2.1.1.2 Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Kecamatan Banua Lawas Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan yang ada pada rencana kerja Kecamatan Banua Lawas dengan APBD Tahun 2024, terdapat kesesuaian 100%. Artinya bahwa jumlah kegiatan dalam renja sama dengan jumlah kegiatan yang ada dalam APBD, yaitu ada 12 kegiatan.

2.1.1.3 Kesesuaian Sub Kegiatan Antara Renja Kecamatan Banua Lawas Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap sub kegiatan yang ada di renja Kecamatan Banua Lawas dengan APBD tahun 2024, jumlah sub kegiatan yang ada di renja sebanyak 29 sedangkan sub kegiatan yang ada di APBD sebanyak 29 sub kegiatan.

2.1.1.4 Kesesuaian Pagu Anggaran Antara Renja Kecamatan Banua LawasTahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Anggaran Renja Kecamatan Banua Lawas Tahun 2024 sebesar Rp.3.849.011.317,- sedangkan anggaran Kecamatan Banua Lawas berdasarkan APBD 2024 adalah sebesar Rp .4.036.792.800,-. Terdapat selisih anggaran antara APBD dengan Renja 2024 sebesar Rp187.781.483,-.

Hasil evaluasi kesesuaian jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran antara renja Kecamatan Banua Lawas Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1. dibawah ini.

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Kecamatan
Banua Lawas Tahun 2024 dengan APBD 2024

No	Uraian	Renja 2024	APBD 2024
1	Program	6	6
2	Kegiatan	12	12
3.	Sub Kegiatan	29	29
4	Pagu Anggaran	Rp.3.849.011.317	Rp. 3.681.766.444

Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2. Perbandingan Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Renja dan APBD Kecamatan Banua Lawas Tahun 2024

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2022		APBD 2022	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Anggaran
(1)						(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7		**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**01**	**KECAMATAN**									
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**B**	**2.225.609.134**	**B**	**2.247.469.266**
7	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang disusun**	**8 dokumen**	**9.550.000**	**8 dokumen**	**9.550.000**
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah yang disusun	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 dokumen	1.275.000	1 dokumen	1.275.000
7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.500.000
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 dokumen	1.275.000	1 dokumen	1.275.000
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.500.000
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD yang disusun	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1 dokumen	1.000.000	2 dokumen	1.000.000
7	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**20 dokumen**	**1.729.875.000**	**20 dokumen**	**1.789.565,000**

7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah tersedianya pembayaran gaji dan Tunjangan pegawai	14 Bulan	1.728.000.000	14 Bulan	1.787.690.000
7	01	01	2	02	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	2 Dokumen	1.275.000	2 Dokumen	1.275.000
7	01	01	2	02	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	4 Dokumen	600.000	4 Dokumen	600.000
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**164.986.088**	**100%**	**129.381.651**
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 komponen	5.286.171	5 komponen	5.286.171
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	51 item	38.058.812	51 item	38.058.812
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	33.264 lembar	14.446.321	33.264 lembar	14.446.321
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	803 eksemplar	2.720.347	803 eksemplar	2.720.347
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang kali (OK) yang melaksanakan perjalanan dinas	500 OK	104.474.437	403 OK	68.870.000
7	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Alat Yang dibeli**	**3 Unit**	**18.078.754**	**3 Unit**	**18.266.594**
7	**01**	**01**	**2**	**07**	**06**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Yang dibeli**	**3 Unit**	**18.078.754**	**3 Unit**	**18.266.594**
7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi**	**100%**	**193.145.391**	**100%**	**198.435.163**
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon, listrik, air dan internet yang dibayarkan	12 bulan	33,600,000	12 bulan	33.600.000
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	159.545.391	12 bulan	164.835.163

7	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**38 Unit**	109.973.901	**38 Unit**	**102.270.858**
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	9 Unit	75.275.863	9 Unit	67.572.820
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	27 unit	21.317.335	27 unit	21.317.335
7	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang dipelihara	2 unit	13.380.703	2 unit	13.380.703
7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan**	**80%**	**1.413.101.146**	**80%**	**1.299.822.219**
7	**01**	**02**	2	01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	**1 Laporan**	1.357.197.146	**1 Laporan**	**1.256.022.219**
7	**01**	**02**	2	01	01	**Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	Terfasilitasinya laporan penyelenggaran kegiatan MTQ	**1 Laporan**	1.357.197.146	**1 Laporan**	**1.256.022.219**
7	**01**	**02**	2	02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Jumlah Kegiatan Yang di Fasilitasi	**4 Kegiatan**	55.904.000	**4 Kegiatan**	**43.800.000**

7	**01**	**02**	2	02	03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	Jumlah Kegiatan Yang di dilaksanakan dan di Fasilitasi	**4 Kegiatan**	55.904.000	**4 Kegiatan**	**43.800.000**
7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa**	**75%**	**49.936.800**	**75%**	**23.061.800**
7	**01**	**03**	2	01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Pemerintah Desa yang dibina / diberdayakan	**15 Desa**	**49.936.800**	**15 Desa**	**23.061.800**
7	**01**	**03**	2	01	03	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	**15 Desa**	**49.936.800**	**15 Desa**	**23.061.800**
7	**01**	**04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3, Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan**	**100%**	**69.035.200**	**100%**	**30.321.220**
7	**01**	**04**	2	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	**12 Patroli Terpadu**	**69.035.200**	**12 Patroli Terpadu**	**30.321.220**
7	**01**	**04**	2	01	01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	Terfasilitasinya Kegiatan Forkopimca	**11 Kegiatan**	**16.500.000**	**11 Kegiatan**	**16.500.000**
7	**01**	**04**	2	01	02	**Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**	Terfasilitasinya **Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**	**12 Kegiatan**	**38.713.980**	**12 Kegiatan**	**13.821.220**
7	**01**	**05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**	**80%**	**68.095.679**	**80%**	**40.670.679**

7	**01**	**05**	2	01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	**1 Laporan**	**68.095.679**	**1 Laporan**	**40.670.679**
7	**01**	**05**	2	01	01	**Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**	Terfasilitasinya Kegiatan HUT RI dan Pemerintahan Desa	**1 Laporan**	**68.095.679**	**1 Laporan**	**40.670.679**
7	**01**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**75%**	**68.396.260**	**75%**	**40.421.260**
7	**01**	**06**	2	01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	**15 Desa**	**68.396.260**	**15 Desa**	**40.421.260**
7	**01**	**06**	2	01	02	**Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**	**Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang difasilitasi**	**15 Dokumen**	**34.300.200**	**15 Dokumen**	**18.314.460**
7	**01**	**06**	2	01	03	**Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaygunaan Aset Desa**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaygunaan Aset Desa yang difasilitasi**	**15 Dokumen**	**34.096.060**	**15 Dokumen**	**22.106.800**

Berdasarkan data perbandingan antara Renja 2022 dan APBD 2022 pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan pada APBD disusun masih mengacu pada Renja, hal ini dapat dilihat dari persentase kesesuaian Program sebesar 100 persen, persentase kesesuaian kegiatan sebesar 100 persen dan persentase kesesuaian sub kegiatan sebesar 100 persen. Namun yang menjadi catatan, indikator dan target pada APBD pada sebagian kegiatan dan sub kegiatan masih belum sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan di Renja 2022. Hal ini disebabkan oleh tidak diinputnya / tidak diperbaruinya indikator dan target Renja 2022 ke dalam sistem SIPD sehingga hasil cetak Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagian besar masih menampilkan target indikator lama.

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2022

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, penilaian hasil pelaksanaan Renja menggunakan data realisasi pelaksanaan APBD sebagai acuan. Berikut rekapitulasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Banua Lawas sampai triwulan II tahun 2022.

Tabel 2.3 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Banua Lawas Sampai Triwulan II Tahun 2022

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022			Catatan
								Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**							
7	**01**					**KECAMATAN**							
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**2.247.469.266**	**B**	**2,310,405,305**	**40%**	**B**	
7	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang disusun**	**9.550.000**	**8 dokumen**	5.504.500	**57,64%**	**5 dokumen**	
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah yang disusun	2.000.000	2 dokumen	999.900	**50%**	1 dokumen	
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1.275.000	1 dokumen	1.275.000	**100%**	1 dokumen	
7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1.500.000	1 dokumen	0	**0**	**0**	
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1.275.000	1 dokumen	1.240.000	**97,25%**	1 dokumen	
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	1.500.000	1 dokumen	0	**0**	**0**	

7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD yang disusun	1.000.000	1 dokumen	999.600	99,96%	1 dokumen	
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1.000.000	1 dokumen	990.000	99,00%	1 dokumen	
7	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**1.789.565,000**	**20 dokumen**	**853.441.841**	**47,69%**	**9 dokumen**	
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah tersedianya pembayaran gaji dan Tunjangan pegawai	1.787.690.000	14 Bulan	852.168.041	47,67%	7 bulan	
7	01	01	2	02	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1.275.000	2 Dokumen	1.273.800	99,91%	2 dokumen	
7	01	01	2	02	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	600.000	4 Dokumen	-	-	-	
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**129.381.651**	**100%**	**94.069.510**	**72.71%**	**70%**	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022			Catatan
								Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5.286.171	5 komponen	5.282.500	99,93%	5 Komponen	
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	38.058.812	51 item	29.693.130	78,02%	27 item	
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan digandakan	14.446.321	33.264 lembar	11.305.100	78,25%	16.632 lembar	
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2.720.347	12 bulan	668.780	24,58%	6 bulan	
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang kali (OK) yang melaksanakan perjalanan dinas	68.870.000	403 OK	47.120.000	68,42%	200 OK	
7	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Alat Yang dibeli**	**18.266.594**	**3 Unit**	**16.409.100**	**89,83 %**	**3 Unit**	
7	**01**	**01**	**2**	**07**	**06**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Yang dibeli**	**18.266.594**	3 unit	16.409.100	**89,83%**	3 unit	

7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi**	**198.435.163**	**100%**	**71.193.896**	**35,88%**	**50%**	
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon, listrik, air dan internet yang dibayarkan	33.600.000	12 bulan	9.275.396	**27,60%**	6 bulan	
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor	164.835.163	12 bulan	61.918.500	**37,56%**	6 bulan	
7	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**102.270.858**	**38 Unit**	**62.644.645**	**61,25%**	**22 Unit**	
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	67.572.820	9 Unit	**46.390.350**	**68,65%**	5 unit	
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	21.317.335	27 unit	**9.295.295**	**43,60%**	15 unit	
7	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang dipelihara	13.380.703	2 unit	**6.959.000**	**52,01%**	2 unit	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022			Catatan
								Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan**	**1.299.822.219**	**80%**	**489.528.525**	**38,97%**	**40%**	
7	**01**	**02**	2	01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	**1.256.022.219**	1 Laporan	481.761.025	38,36%	1 Laporan	
7	**01**	**02**	2	01	01	**Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	Terfasilitasinya laporan penyelenggaran kegiatan MTQ	**1.256.022.219**	1 Laporan	481.761.025	38,36%	1 Laporan	
7	**01**	**02**	2	02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Yang di Fasilitasi**	**43.800.000**	**4 Kegiatan**	**7.767.500**	**17,73%**	**3 Kegiatan**	
7	**01**	**02**	2	02	03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	Jumlah Kegiatan Yang di dilaksanakan dan di Fasilitasi	**43.800.000**	**4 Kegiatan**	**7.767.500**	**17,73%**	**3 Kegiatan**	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022			Catatan
								Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa**	**23.061.800**	**75%**	**-**	**-**	**-**	
7	**01**	**03**	2	01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Pemerintah Desa yang dibina / diberdayakan	**23.061.800**	**15 Desa**	**-**	**-**	**-**	
7	**01**	**03**	2	01	03	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	**23.061.800**	**15 Desa**	**-**	**-**	**-**	
7	**01**	**04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3, Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan**	**30.321.220**	**100%**	**8.855.800**	**29,21%**	50%	
7	**01**	**04**	2	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	**30.321.220**	**12 Patroli Terpadu**	**8.855.800**	**29,21%**	**6 Patroli Terpadu**	
7	**01**	**04**	2	01	01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	Terfasilitasinya Kegiatan Forkopimca	**16.500.000**	**11 Kegiatan**	**4.500.000**	**27,27%**	**5 Kegiatan**	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022			Catatan
								Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
7	**01**	**04**	2	01	02	**Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**	Terfasilitasinya **Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**	**13.821.220**	**12 Kegiatan**	4.355.800	**31,51%**	**6 Kegiatan**	
7	**01**	**05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**	**40.670.679**	**80%**	**10.215.500**	**25,12%**	**40%**	
7	**01**	**05**	2	01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	**40.670.679**	**1 Laporan**	**10.215.500**	**25,12%**	**1 Laporan**	
7	**01**	**05**	2	01	01	**Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**	Terfasilitasinya Kegiatan HUT RI dan Pemerintahan Desa	**40.670.679**	**1 Laporan**	**10.215.500**	**25,12%**	**1 Laporan**	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022			Catatan
								Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
7	**01**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**40.421.260**	**75%**	**12.514.800**	**30,96%**	**35%**	
7	**01**	**06**	2	01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	**40.421.260**	**15 Desa**	**12.514.800**	**30,96%**	**7 Desa**	
7	**01**	**06**	2	01	02	**Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**	**Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang difasilitasi**	**18.314.460**	**15 Dokumen**	**5.200.000**	**28,39%**	**7 Dokumen**	
7	**01**	**06**	2	01	03	**Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaygunaan Aset Desa**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaygunaan Aset Desa yang difasilitasi**	**22.106.800**	**15 Dokumen**	**7.314.800**	**33,09%**	**7 Dokumen**	

Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Banua Lawas sampai triwulan II diatas diolah berdasarkan data pada formulir evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sesuaiformat evaluasi renja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (formulir evaluasi terlampir). Evaluasi Renja dimaksudkan untuk mengindentifikasi sejauh mana capaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja serta implikasi yang timbul, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk tindakan perencanaan selanjutnya.

Berdasarkan data pada tabel 2.3 tersebut, dapat dilihat bahwa dari sisi anggaran, Kecamatan Banua Lawas telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.623.104.317,- atau sekitar 44,08 persen dari total anggaran untuk tahun 2022. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif masih rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena pelaksanaannya memang dijadwalkan pada triwulan III dan IV, diantaranya yaitu :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan sub kegiatan :
   - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan :
   - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
3. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
   - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Banua Lawas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan Otonomi Daerah. Kewenangan tersebut diantaranya :

1. Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK).
3. Pelayanan penerbitan Keterangan Pindah.
4. Pelayaan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

5. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat.
6. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
7. Menggkordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
8. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam membangun desa.
9. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
10. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Banua Lawas menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banua Lawas, diantaranya :

1. Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya.
2. Mengadakan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Meningkatkan system pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

Kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas diantaranya dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Berdasarkan data pada tabel 2.3, secara umum pelaksanaan sebagian besar kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait capaian kinerja sampai dengan triwulan II dan memerlukan tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Beberapa indikator kinerja baik program, kegiatan dan sub kegiatan Renja 2022 belum seluruhnya selaras dengan Perubahan Renstra 2019-2024 yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena penyusunan Renja 2022 dilakukan sebelum ditetapkannya Perubahan Renstra pada tanggal 24 Desember 2021. Dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja pada Renja agar selaras dengan Perubahan Renstra.
2. Masih terdapat rincian belanja yang masuk pada sub kegiatan yang tidak tepat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian/pemindahan belanja dari sub kegiatan satu ke sub kegiatan lainnya yang sesuai.
3. Masih terdapat hambatan terkait upaya pemenuhan laporan penunjang nilai AKIP, diantaranya belum tepat waktunya pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi dari Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar dari dilakukannya evaluasi

kinerja. Selain itu pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dan rencana aksi juga belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong tidak terlepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Banua Lawas, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Berdasarkan perkembangan yang terjadi pada tahun 2022, dapat diidentifikasi beberapa isu yang berkembang dan harus ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala dan kelemahan yang dihadapi oleh Kecamatan Banua Lawas dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, diantaranya :

1. Terbatasnya jumlah dan kapasitas personil SKPD Kecamatan Banua Lawas untuk membantu dalam pelaksanaan tugas, sehingga pada masing-masing Kasi ada yang tidak memiliki staf.
2. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sehingga capaian kinerja individual masih relatif rendah. Tingkat SDM aparat Kecamatan Banua Lawas khususnya staf yang masih terbilang rendah juga minimnya penguasaan komputer dan internet menyebabkan kurang efektif dan efisiennya pelaksanaan program dan kegiatan, serta kurangnya kesadaran aparat pemerintahan di Kantor Kecamatan Banua Lawas dalam tertib administrasi.
3. Kurangnya tenaga pengelola administrasi keuangan yang berkompeten.
4. Masih rendahnya tanggung jawab aparatur pemerintahan desa terhadap pelaksanaan tugas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

Disamping kendala dan kelemahan yang ada, Kecamatan Banua Lawas juga memiliki beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Banua Lawas diantaranya :

1. Adanya struktur organisasi yang terpola.
2. Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat.
3. Suasana kerja di Kecamatan Banua Lawas yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok *(team work)*.

4. Adanya koordinasi di Wilayah Kecamatan Banua Lawas yang baik.

Adapun isu-isu penting lainnya yang ada di Kecamatan Banua Lawas adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

   Kecamatan Banua Lawas berdasarkan BPS menempati angka kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 85,6 %, sehingga untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut, perlu adanya upaya – upaya dengan memberikan pelatihan – pelatihan kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan instansi terkait.

2. Bidang Pemerintahan

   Berlakunya UU Desa yang menuntut aparat kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar desa lebih optimal melaksanakan amanat UU Desa tersebut.

3. Bidang Pelayanan

   Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima menjadikan kecamatan Banua Lawas untuk selalu berinovasi agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan

4. Bidang Pertanian

   Alih fungsi lahan merupakan masalah yang mulai mencuat di wilayah Banua Lawas. Para pengembang mulai melirik tanah pertanian di Kecamaan Banua Lawas untuk dijadikan perumahan

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN RKPD

Rumusan tematik pembangunan sebagaimana disebutkan dalam RKPD Tahun 2022 adalah **“Penanganan Kesehatan dan Percepatan Pemulihan Ekonomidalam Rangka Menciptakan SDM yang Tangguh”** dengan 5 prioritas daerah dan 15 sasaran pembangunan yang upaya pencapaiannya dijabarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. RKPD 2022 dalam hal ini mengalami perubahan salah satunya dari segi rumusan program/kegiatan/subkegiatan. Selanjutnya, sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rancangan Perubahan RKPD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, maka dalam reviu ini akan dilakukan proses membandingkan rancangan perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perubahan rencana kerja Kecamatan Banua Lawas. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**SKPD**	**Nilai AKIP**	**B**	**2.447.176.215**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**SKPD**	**Nilai AKIP**	**B**	**2.447.176.215**	
1	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**SKPD**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang disusun**	**8 Dokumen**	**9.550.000**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**SKPD**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang disusun**	**8 Dokumen**	**9.550.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah yang disusun	2 dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah yang disusun	2 dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 dokumen	1.275.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 dokumen	1.275.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 dokumen	1.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 dokumen	1.275.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 dokumen	1.275.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD	SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD	SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 dokumen	1.500.000	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD yang disusun	1 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD yang disusun	1 dokumen	1.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1 dokumen	1.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1 dokumen	1.000.000	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	SKPD	**Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	20 Dokumen	**1.907.925.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	SKPD	**Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	20 Dokumen	**1.907.925.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah tersedianya pembayaran gaji dan Tunjangan pegawai	1 dokumen	1.906.050.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah tersedianya pembayaran gaji dan Tunjangan pegawai	1 dokumen	1.906.050.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 dokumen	1.275.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 dokumen	1.275.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 dokumen	600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 dokumen	600.000	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**SKPD**	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**203.126.651**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**SKPD**	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**203.126.651**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 komponen	5.286.171	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 komponen	5.286.171	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	51 item	38.058.812	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	51 item	38.058.812	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan digandakan	33.264 lembar	14.446.321	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan digandakan	33.264 lembar	14.446.321	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	12 bulan	2.720.347	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	12 bulan	2.720.347	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah orang kali (OK) yang melaksanakan perjalanan dinas	403 OK	142.615.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah orang kali (OK) yang melaksanakan perjalanan dinas	403 OK	142.615.000	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**SKPD**	**Jumlah Alat Yang dibeli**	**3 Unit**	**18.266.594**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**SKPD**	**Jumlah Alat Yang dibeli**	**3 Unit**	**18.266.594**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	**Jumlah Peralatan dan Mesin Yang dibeli**	**3 Unit**	**18.266.594**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	SKPD	**Jumlah Peralatan dan Mesin Yang dibeli**	**3 Unit**	**18.266.594**	
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	SKPD	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi**	**100%**	**192.735.163**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	SKPD	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi**	**100%**	**192.735.163**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah pembayaran jasa telepon, listrik, air dan internet yang dibayarkan	12 bulan	33.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah pembayaran jasa telepon, listrik, air dan internet yang dibayarkan	12 bulan	33.600.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD	Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	159.135.163	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD	Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	159.135.163	
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	SKPD	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**38 Unit**	**115.572.807**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	SKPD	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**38 Unit**	**115.572.807**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	9 Unit	80.874.769	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	9 Unit	80.874.769	
	Rancangan RKPD					**Hasil Analisis**					

NO						Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah peralatan yang dipelihara	27 unit	21.317.335	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah peralatan yang dipelihara	27 unit	21.317.335	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang dipelihara	2 unit	13.380.703	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang dipelihara	2 unit	13.380.703	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SKPD	**Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan**	**80%**	**1.334.320.270**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	SKPD	**Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan**	**80%**	**1.334.320.270**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	SKPD	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Laporan	1.240.520.270	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	SKPD	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Laporan	1.240.520.270	
	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	SKPD	Terfasilitasinya laporan penyelenggaran kegiatan MTQ	1 Laporan	1.240.520.270	**Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	SKPD	Terfasilitasinya laporan penyelenggaran kegiatan MTQ	1 Laporan	1.240.520.270	

NO	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	SKPD	**Jumlah Kegiatan Yang di Fasilitasi**	**4 Kegiatan**	93.800.000	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	SKPD	**Jumlah Kegiatan Yang di Fasilitasi**	**4 Kegiatan**	93.800.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SKPD	Jumlah Kegiatan Yang di dilaksanakan dan di Fasilitasi	**4 Kegiatan**	93.800.000	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	SKPD	Jumlah Kegiatan Yang di dilaksanakan dan di Fasilitasi	**4 Kegiatan**	93.800.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	SKPD	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa**	**75%**	**21.461.800**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	SKPD	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa**	**75%**	**21.461.800**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	SKPD	Jumlah Pemerintah Desa yang dibina / diberdayakan	**15 Desa**	21.461.800	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	SKPD	Jumlah Pemerintah Desa yang dibina / diberdayakan	**15 Desa**	21.461.800	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SKPD	Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	**15 Desa**	21.461.800	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	SKPD	Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	**15 Desa**	21.461.800	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SKPD	**Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3, Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan**	**100%**	**30.321.220**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	SKPD	**Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3, Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan**	**100%**	**30.321.220**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SKPD	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	**12 Patroli Terpadu**	**30.321.220**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	SKPD	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	**12 Patroli Terpadu**	**30.321.220**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**SKPD**	Terfasilitasinya Kegiatan Forkopimca	**11 Kegiatan**	**16.500.000**	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**SKPD**	Terfasilitasinya Kegiatan Forkopimca	**11 Kegiatan**	**16.500.000**	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	SKPD	Terfasilitasinya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	**12 Kegiatan**	**13.821.220**	**Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**	SKPD	Terfasilitasinya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	**12 Kegiatan**	**13.821.220**	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	SKPD	Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	**1 Laporan**	**30.970.679**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	SKPD	Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	**1 Laporan**	**30.970.679**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	SKPD	Terfasilitasinya Kegiatan HUT RI dan Pemerintahan Desa	**1 Laporan**	**30.970.679**	**Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**	SKPD	Terfasilitasinya Kegiatan HUT RI dan Pemerintahan Desa	**1 Laporan**	**30.970.679**	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	SKPD	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**75%**	**35.876.260**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	SKPD	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**75%**	**35.876.260**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	SKPD	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	**15 Desa**	**35.876.260**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	SKPD	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	**15 Desa**	**35.876.260**	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	SKPD	**Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang difasilitasi**	**15 Dokumen**	**15.884.460**	**Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**	SKPD	**Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang difasilitasi**	**15 Dokumen**	**15.884.460**	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaygunaan Aset Desa	SKPD	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaygunaan Aset Desa yang difasilitasi**	**15 Dokumen**	**19.991.800**	**Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaygunaan Aset Desa**	SKPD	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaygunaan Aset Desa yang difasilitasi**	**15 Dokumen**	**19.991.800**	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program-program pembangunan dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam rangka percepatan proses pembangunan. Adapun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong terdiri dari 6 program, 12 kegiatan dan 29 sub kegiatan sebagai berikut :

Program 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : 1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Sub Kegiatan:
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Kegiatan : 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rumah Tangga

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Sub Kegiatan : a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya

Kegiatan : 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor

Kegiatan : 7. Pemelliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opeasional atau Lapangan
b. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program 2 : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan : 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan: a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Kegiatan : 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan
Sub Kegiatan: a. Peningkatan Efektifitas Pelaksasnaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Program 3 : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan : 1. Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa.

Sub Kegiatan : a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Program 4 : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :
1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan:
a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan
b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Program 5 : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan :
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan:
a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan KetahananNasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Program 6 : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan :
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan:
a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaygunaan Aset Desa

Rencana kerja dan pendanaan pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. dibawah ini.

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2022 (Sebelum Perubahan)							Rencana Tahun 2022 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting
									Renja 2022			APBD 2022			Perubahan Renja 2022				
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7						UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01					KECAMATAN													
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SKPD	Nilai AKIP	B	2.225.609.134	Pendapatan Asli Daerah	100%	5.751.286.737	Pendapatan Asli Daerah	Nilai AKIP	B	7.419.903.003	Pendapatan Asli Daerah	
7	01	01	2	01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang disusun	8 dok	9.550.000	Pendapatan Asli Daerah	100%	9.550.000	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang disusun	8 dok	9.550.000	Pendapatan Asli Daerah	
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah yang disusun	2 doK	2.000.000	Pendapatan Asli Daerah	9 dokumen	2.000.000	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah yang disusun	2 doK	2.000.000	Pendapatan Asli Daerah	
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 doK	1.275.000	Pendapatan Asli Daerah		1.275.000		Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 doK	1.275.000	Pendapatan Asli Daerah	

7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 dok	1.500.000	Pendapatan Asli Daerah		1.500.000		Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 dok	1.500.000	Pendapatan Asli Daerah	
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD	SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 doK	1.275.000	Pendapatan Asli Daerah		1.275.000		Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 doK	1.275.000	Pendapatan Asli Daerah	
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 doK	1.500.000	Pendapatan Asli Daerah		1.500.000		Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 doK	1.500.000	Pendapatan Asli Daerah	
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD yang disusun	1 dok	1.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1.000.000		Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD yang disusun	1 dok	1.000.000	Pendapatan Asli Daerah	
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1 dok	1.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1.000.000		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1 dok	1.000.000	Pendapatan Asli Daerah	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2022 (Sebelum Perubahan)							Rencana Tahun 2022 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting
									Renja 2022			APBD 2022			Perubahan Renja 2022				
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	SKPD	**Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun** -	**20 dokumen**	**1.729.875.000**	PAD	20 DOK	**1.789.565,000**	PAD	**Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	20 DOK	**1.907.925.000**	PAD	
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah tersedianya pembayaran gaji dan Tunjangan pegawai	14 Bulan	1.728.000.000	PAD	14 Bulan	1.787.690.000	PAD	Jumlah tersedianya pembayaran gaji dan Tunjangan pegawai	14 Bulan	1.906.050.000	PAD	
7	01	01	2	02	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	2 Dok	1.275.000	PAD	2 Dok	1.275.000	PAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	2 Dok	1.275.000	PAD	
7	01	01	2	02	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun	**SKPD**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	4 Dok	600.000	PAD	4 Dok	600.000	PAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	4 Dok	600.000	PAD	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2022 (Sebelum Perubahan)						Rencana Tahun 2022 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting
									Renja 2022			APBD 2022			Perubahan Renja 2022				
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**SKPD**	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**164.986.088**	**Pendapatan Asli Daerah**	**100%**	**129.381.651**	**Pendapatan Asli Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**203.126.651**	**Pendapatan Asli Daerah**	
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 komponen	5.286.171	Pendapatan Asli Daerah	5 komponen	5.286.171	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 komponen	5.286.171	Pendapatan Asli Daerah	
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**SKPD**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	51 item	38.058.812	**Pendapatan Asli Daerah**	51 item	38.058.812	**Pendapatan Asli Daerah**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	51 item	38.058.812	**Pendapatan Asli Daerah**	
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Digandakan	33.264 lembar	14.446.321	Pendapatan Asli Daerah	33.264 lembar	14.446.321	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Digandakan	33.264 lembar	14.446.321	Pendapatan Asli Daerah	
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	803 eksemplar	2.720.347	Pendapatan Asli Daerah	803 eksemplar	2.720.347	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	803 eksemplar	2.720.347	Pendapatan Asli Daerah	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2022 (Sebelum Perubahan)						Rencana Tahun 2022 (Setelah Perubahan) Perubahan Renja 2022				Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2022 Target Capaian Kinerja	Renja 2022 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Renja 2022 Sumber Dana	APBD 2022 Target Capaian Kinerja	APBD 2022 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	APBD 2022 Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah orang kali (OK) yang melaksanakan perjalanan dinas -	500 OK	104.474.437	PAD	403 OK	68.870.000	PAD	Jumlah orang kali (OK) yang melaksanakan perjalanan dinas	520 OK	142.615.000	Pendapatan Asli Daerah	
7	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	SKPD	**Jumlah Alat Yang dibeli**	**3 Unit**	**18.078.754**	Pendapatan Asli Daerah	**3 Unit**	**18.078.754**	Pendapatan Asli Daerah	**Jumlah Alat Yang dibeli**	**3 Unit**	**18.266.594**	Pendapatan Asli Daerah	
7	**01**	**01**	**2**	**07**	**06**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	SKPD	**Jumlah Peralatan dan Mesin Yang dibeli**	**3 Unit**	**18.078.754**	Pendapatan Asli Daerah	**3 Unit**	**18.078.754**	Pendapatan Asli Daerah	**Jumlah Peralatan dan Mesin Yang dibeli**	**3 Unit**	**18.266.594**	Pendapatan Asli Daerah	
7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	SKPD	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi**	**100%**	**193.145.391**	Pendapatan Asli Daerah	**100%**	**198.435.163**	Pendapatan Asli Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi**	**100%**	**192.735.163**	Pendapatan Asli Daerah	
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**SKPD**	Jumlah pembayaran jasa telepon, listrik, air dan internet yang dibayarkan	12 bulan	33,600,000	**PAD**	12 bulan	33.600.000	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah pembayaran jasa telepon, listrik, air dan internet yang dibayarkan	12 bulan	33.600.000	**Pendapatan Asli Daerah**	
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD	Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	159.545.391	PAD	12 bulan	164.835.163	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	159.135.163	Pendapatan Asli Daerah	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2022 (Sebelum Perubahan)						Rencana Tahun 2022 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting
								Renja 2022			APBD 2022			Perubahan Renja 2022				
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	SKPD	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**38 Unit**	**109.973.901**	Pendapatan Asli Daerah	**38 Unit**	**102.270.858**	Pendapatan Asli Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**38 Unit**	**115.572.807**	Pendapatan Asli Daerah	
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	9 Unit	75.275.863	Pendapatan Asli Daerah	9 Unit	67.572.820	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	9 Unit	80.874.769	Pendapatan Asli Daerah	
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah peralatan yang dipelihara	27 unit	21.317.335	Pendapatan Asli Daerah	27 unit	21.317.335	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah peralatan yang dipelihara	27 unit	21.317.335	Pendapatan Asli Daerah	
7	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**SKPD**	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang dipelihara	2 unit	13.380.703	**Pendapatan Asli Daerah**	2 unit	13.380.703	**Pendapatan Asli Daerah**	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang dipelihara	2 unit	13.380.703	**Pendapatan Asli Daerah**	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2022 (Sebelum Perubahan)						Rencana Tahun 2022 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting
								Renja 2022			APBD 2022			Perubahan Renja 2022				
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	SKPD	**Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan**	**80%**	**1.413.101.146**	Pendapatan Asli Daerah	**80%**	**1.299.822.219**	Pendapatan Asli Daerah	**Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan**	**80%**	**1.334.320.270**	Pendapatan Asli Daerah	
7	**01**	**02**	2	01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	SKPD	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	**1 Lap**	1.357.197.146	Pendapatan Asli Daerah	**1 Lap**	**1.256.022.219**	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	**1 Lap**	1.240.520.270	Pendapatan Asli Daerah	
7	**01**	**02**	2	01	01	**Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	SKPD	Terfasilitasinya laporan penyelenggaran kegiatan MTQ	**1 Lap**	1.357.197.146	Pendapatan Asli Daerah	**1 Lap**	**1.256.022.219**	Pendapatan Asli Daerah	Terfasilitasinya laporan penyelenggaran kegiatan MTQ	**1 Lap**	1.240.520.270	Pendapatan Asli Daerah	
7	**01**	**02**	2	02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**SKPD**	Jumlah Kegiatan Yang di Fasilitasi	**4 Keg**	55.904.000	**Pendapatan Asli Daerah**	**4 Keg**	**43.800.000**	**Pendapatan Asli Daerah**	Jumlah Kegiatan Yang di Fasilitasi	**4 Keg**	93.800.000	**Pendapatan Asli Daerah**	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2022 (Sebelum Perubahan)						Rencana Tahun 2022 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2022			APBD 2022			Perubahan Renja 2022				
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	**01**	**02**	2	02	03	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	SKPD	Jumlah Kegiatan Yang di dilaksanakan dan di Fasilitasi	**4 Keg**	55.904.000	Pendapatan Asli Daerah	**80%**	**43.800.000**	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Kegiatan Yang di dilaksanakan dan di Fasilitasi	**80%**	93.800.000	Pendapatan Asli Daerah	
7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	SKPD	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa**	**75%**	**49.936.800**	Pendapatan Asli Daerah	**75%**	**23.061.800**	Pendapatan Asli Daerah	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa**	**75%**	**21.461.800**	Pendapatan Asli Daerah	
7	**01**	**03**	2	01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	SKPD	Jumlah Pemerintah Desa yang dibina / diberdayakan	**15 Desa**	**49.936.800**	Pendapatan Asli Daerah	**15 Desa**	**23.061.800**	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pemerintah Desa yang dibina / diberdayakan	**15 Desa**	21.461.800	Pendapatan Asli Daerah	
7	**01**	**03**	2	01	03	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**SKPD**	Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	**15 Desa**	**49.936.800**	**Pendapatan Asli Daerah**	**15 Desa**	**23.061.800**	**Pendapatan Asli Daerah**	Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	**15 Desa**	21.461.800	**Pendapatan Asli Daerah**	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2022 (Sebelum Perubahan)								Rencana Tahun 2022 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2022			APBD 2022			Perubahan Renja 2022					
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	**01**	**04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	SKPD	**Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3, Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan**	**100%**	**69.035.200**	Pendapatan Asli Daerah	**100%**	**30.321.220**	Pendapatan Asli Daerah	**Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3, Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan**	**100%**	**30.321.220**	Pendapatan Asli Daerah	
7	**01**	**04**	2	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	SKPD	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	**12 Patroli Terpadu**	**69.035.200**	Pendapatan Asli Daerah	**12 Patroli Terpadu**	**30.321.220**	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	**12 Patroli Terpadu**	**30.321.220**	Pendapatan Asli Daerah	
7	**01**	**04**	2	01	01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	SKPD	Terfasilitasinya Kegiatan Forkopimca	**11 Kegiatan**	**16.500.000**	Pendapatan Asli Daerah	**11 Kegiatan**	**16.500.000**	Pendapatan Asli Daerah	Terfasilitasinya Kegiatan Forkopimca	**11 Kegiatan**	**16.500.000**	Pendapatan Asli Daerah	
7	**01**	**04**	2	01	02	**Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**	**SKPD**	Terfasilitasinya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	**12 Keg**	**38.713.980**	**Pendapatan Asli Daerah**	**12 Kegiatan**	**13.821.220**	**Pendapatan Asli Daerah**	Terfasilitasinya **Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**	**12 Kegiatan**	**13.821.220**	**Pendapatan Asli Daerah**	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2022 (Sebelum Perubahan)							Rencana Tahun 2022 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2022			APBD 2022			Perubahan Renja 2022				
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	**01**	**05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	SKPD	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**	**80%**	**68.095.679**	Pendapatan Asli Daerah	**80%**	**40.670.679**	Pendapatan Asli Daerah	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**	**80%**	**30.970.679**	Pendapatan Asli Daerah	
7	**01**	**05**	2	01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	SKPD	Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	**1 Lap**	**68.095.679**	Pendapatan Asli Daerah	**1 Lap**	**40.670.679**	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	**1 Lap**	**30.970.679**	Pendapatan Asli Daerah	
7	**01**	**05**	2	01	01	**Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**	SKPD	Terfasilitasinya Kegiatan HUT RI dan Pemerintahan Desa	**1 Lap**	**68.095.679**	Pendapatan Asli Daerah	**1 Lap**	**40.670.679**	Pendapatan Asli Daerah	Terfasilitasinya Kegiatan HUT RI dan Pemerintahan Desa	**1 Lap**	**30.970.679**	Pendapatan Asli Daerah	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2022 (Sebelum Perubahan)						Rencana Tahun 2022 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2022			APBD 2022			Perubahan Renja 2022				
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	**01**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	SKPD	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**75%**	**68.396.260**	Pendapatan Asli Daerah	**75%**	**40.421.260**	Pendapatan Asli Daerah	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**75%**	**35.876.260**	Pendapatan Asli Daerah	
7	**01**	**06**	2	01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	SKPD	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	**15 Desa**	**68.396.260**	Pendapatan Asli Daerah	**15 Desa**	**40.421.260**	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	**15 Desa**	**35.876.260**	Pendapatan Asli Daerah	
7	**01**	**06**	2	01	02	**Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**	SKPD	**Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang difasilitasi**	**15 Dok**	**34.300.200**	Pendapatan Asli Daerah	**15 Dok**	**18.314.460**	Pendapatan Asli Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang difasilitasi**	**15 Dok**	**15.884.460**	Pendapatan Asli Daerah	
7	**01**	**06**	2	01	03	**Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaygunaan Aset Desa**	SKPD	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaygunaan Aset Desa yang difasilitasi**	**15 Dok**	**34.096.060**		**15 Dok**	**22.106.800**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaygunaan Aset Desa yang difasilitasi**	**15 Dok**	**19.991.800**		

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2022 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2022 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong.
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas ini berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Banua Lawas Tahun 2019-2024, sehingga difokuskan pada upaya pencapaian seluruh target pada Renstra.
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2022.
2. Dalam penyusunan RKPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong, begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil asistensi dan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tabalong

c Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2022 untuk setiap triwulannya.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.

Akhir kata, Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banua Lawas , Agustus 2022

CAMAT

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN BANUA LAWAS

H. FARIDUDDIN, S.AP. MA
Pembina Tk. I
NIP. 19680105 198903 1 011

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KECAMATAN MUARA HARUS TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

KECAMATAN MUARA HARUS

2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Renja Kecamatan Muara Harus tahun 2024 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Harus tahun 2019-2024 serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong tahun 2024, untuk menjalankan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dab RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dokumen Perubahan Renja ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Muara Harus beserta program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan / sub kegiatan. Perubahan Renja ini selanjutnya akan dijadikan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Tahun anggaran 2024.

Kami sadari bahwa dengan segala keterbatasan yang dimiliki tentunya penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Muara Harus ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kami mohon saran dan masukan dari semua pihak. Meski demikian kami berharap dengan selesainya dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat dan diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Muara Harus, Agustus 2024

CAMAT MUARA HARUS

RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp

Pembina

NIP.19700914 199503 1 006

DAFTAR ISI

				Hal.
KATA PENGANTAR			.....	2
DAFTAR ISI			.....	3
DAFTAR TABEL			.....	4
BAB I	PENDAHULUAN		.....	5
	1.1	Latar Belakang	.....	5
	1.2	Landasan Hukum	.....	6
	1.3	Maksud dan Tujuan	.....	8
	1.4	Sistematika Penulisan	.....	9
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024		.....	10
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan	.....	10
		2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja tahun 2024 terhadap APBD tahun 2024	.....	10
		2.1.2 Ketercapaian kinerja sampai Triwulan II tahun 2024	.....	18
	2.2	Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah	.....	25
	2.3	Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	.....	26
	2.4	Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD	.....	27
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		.....	36
BAB IV	PENUTUP		.....	48

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel	2.1	Hasil Evaluasi Kesesuaian Antara Renja Kec Muara Harus Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024	.....	11
Tabel	2.2	Perbandingan Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja dan APBD Kec. Muara Harus Tahun 2024	.....	12
Tabel	2.3	Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kec. Muara Harus Sampai Triwulan II Tahun2024	.....	19
Tabel	2.4	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024	…..	28
Tabel	3.1	Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Kec. Muara Harus Tahun 2024	…..	39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka Kantor Kecamatan Muara Harus sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Perubahan. Renja Kecamatan Muara Harus tahun 2024 telah disusun pada tahun 2024 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan anggaran (RKA) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2024.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, menjadi dasar hukum bagi Kecamatan Muara Harus sebagai salah satu SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang ada dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tabalong. Agar pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab urusan tersebut berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten, perlu dibuat langkah-langkah perencanaan yang terencana dan berkesinambungan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Seiring dengan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2024, Hasil pelaksanaan Renja menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Muara Harus Tahun 2024. Hal ini sekaligus sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor P.652/Bappedalitbang/P2E/050/05/2023 tentang Penyusunan Perubahan RKPD dan Renja-SKPD Tahun 2023, bahwa SKPD melakukan penyesuaian terhadap Renja sehubungan dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.

Selain berpedoman pada hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024, Perubahan Renja Kecamatan Muara Harus Tahun 2024 juga disusun dengan berpedoman pada perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dan Perubahan rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Muara Harus Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah kabupaten tabalong Nomor 09 tahun 2009 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran daeah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupatem Tabalong tahun 2019 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran daerah Kabupaten Tabalong tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kab.tabalong Tahun 2024 No.06 Noreg Peraturan Daerah Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan (6-82/2024)
16. Peraturan Bupati tabalong Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong.
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 (Berita Daerah Kab.Tabalong Th. 2024 No.19)

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Harus Tahun 2024 disusun dengan maksud menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Harus Tahun 2024 adalah untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi

sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Muara Harus Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun selain berpedoman dengan Perubahan RKPD, juga berpedoman pada hasil pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan. Dalam hal ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Harus sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dengan mengacu pada APBD tahun 2024 yang sudah disahkan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan

2.1.1 Evaluasi kesesuaian Renja Tahun 2024 terhadap APBD Tahun 2024

2.1.1.1 Kesesuaian Program antara Renja Kecamatan Muara Harus tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan Evaluasi terhadap program yang ada pada Rencana Kerja Kecamatan Muara Harus dengan APBD tahun 2024, terdapat kesesuaian 100%, Artinya bahwa jumlah program dalam Renja sama dengan jumlah Program yang ada dalam APBD, yaitu 6 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2.1.1.2 Kesesuaian kegiatan antara Renja Kecamatan Muara Harus Tahun 2024 dengan APBD tahun 2024

Berdasarkan Evaluasi terhadap kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Kecamatan Muara Harus dengan APBD tahun 2024, jumlah kegiatan dalam Renja tahun 2024 sebanyak 14 kegiatan sedangkan jumlah kegiatan yang ada dalam APBD tahun 2024 yaitu ada 14 Kegiatan.

2.1.1.3 Kesesuaian Sub kegiatan antara Renja Kecamatan Muara Harus tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan Evaluasi terhadap Sub kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Kecamatan Muara Harus dengan APBD tahun 2024, Jumlah Sub Kegiatan yang ada di Renja sebanyak 30 sub kegiatan sedangkan sub kegiatan yang ada di APBD sebanyak 30 sub kegiatan juga.

2.1.1.3 Kesesuaian Pagu Anggaran antara Renja Kecamatan Muara Harus tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Anggaran Renja Kecamatan Muara Harus Tahun 2024 sebesar, Rp. 3.166.577.054,- Sedangkan anggaran Kecamatan Muara Harus berdasarkan APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.647.416.269,- Terdapat selisih anggaran antara Renja dengan APBD sebesar Rp. 480.839.215,- Seiring dengan proses penganggaran yang berjalan.

Hasil evaluasi kesesuaian jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran antara Renja Kecamatan Muara Harus Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini

Tabel 2.1
Hasil evaluasi terhadap kesesuaian antara Renja Kecamatan Muara Harus tahun 2024 dengan APBD tahun 2024

No	Uraian	Renja Tahun 2024	APBD Tahun 2024
1	2	3	4
1.	Program	6	6
2.	Kegiatan	14	14
3.	Sub Kegiatan	30	30
4.	Pagu Anggaran	3.166.577.054,-	3.647.416.269,-

Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Perbandingan Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja dan APBD Kecamatan Muara Harus tahun 2024

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Renja 2024		APBD 2024	
								Target capaian kinerja	Pagu indikatif	Target capaian kinerja	Anggaran
1						2	3	4	5	6	7
7		**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**01**	**KECAMATAN**									
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Nilai AKIP**	**BB**	**2.910.733.539**	**BB**	**3.214.060.560**
7	**01**	**01**	**2**	**01**		**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun**	**8 dokumen**	**9.523.860**	**8 dokumen**	**9.523.860**
7	01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.034.460	2 dokumen	2.034.460
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.245.000	1 dokumen	1.245.000
7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.245.000	1 dokumen	1.245.000
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.499.720	1 dokumen	1.499.720
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.500.320	1 dokumen	1.500.320
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 laporan	999.530	1 dokumen	999.530

						kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
7	01	01	2	01	07	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	999.830	1 dokumen	999.830
7	**01**	**01**	**2**	**02**		**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun**	**20 dokumen**	**2.416.328.553**	**20 dokumen**	**2.710.847.768**
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	2.414.453.785	15 orang/ bulan	2.708.973.000
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhit tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	2 laporan	1.274.768	2 laporan	1,274.768
7	01	01	2	02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	18 laporan	600.000	18 laporan	600.000
7	**01**	**01**	**2**	**03**		**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah dokumen administrasi BMD perangkat daerah**	**3 dokumen**	**1.805.976**	**3 dokumen**	**1.805.976**
7	01	01	2	03	01	Penyusunan perencanaan dan kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	1.805.976	3 dokumen	1.805.976
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat daerah**	**100%**	**154.648.829**	**100%**	**158.270.707**
7	01	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	4 paket	626.000	4 paket	642.690
7	01	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	41 paket	23.937.893	41 paket	23.936.765
7	01	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	9.809.700	4 paket	10.909.700
7	01	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	3.649.236	12 dokumen	3.645.000
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordnasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	116.626.000	12 laporan	119.136.5532

7	**01**	**01**	**2**	**07**		**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Jumlah unit BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**4 unit**	**28.056.819**	**4 unit**	**28.933.162**
7	01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	28.056.819	4 Unit	28.933.162
7	**01**	**01**	**2**	**08**		**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase tersedianyan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**208.863.300**	**100%**	**209.531.052**
7	01	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	27.600.000	12 laporan	27.600.000
7	01	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	181.263.300	12 laporan	181.931.052
7	**01**	**01**	**2**	**09**		**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**38 unit**	**91.506.202**	**38 unit**	**95.148.035**
7	01	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	74.459.309	11 unit	78.110.000
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26 unit	10.361.856	26 unit	10.361.856
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	6.685.037	1 unit	6.6876.179
7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan**	**80%**	**67.373.285**	**80%**	**72.441.258**
7	**01**	**02**	**2**	**01**		**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**3 laporan**	**67.373.285**	**3 laporan**	**72.441.258**

7	01	02	2	01	01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	40.250.000	1 laporan	40.774.020
7	01	02	2	01	02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 dokumen	27.123.285	3 dokumen	31.667.238
7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur, dan tata kelola kewilayahan desa**	**80%**	**89.614.730**	**80%**	**116.194.730**
7	**01**	**03**	**2**	**01**		**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**Jumlah Pemerintah desa yang dibina / diberdayakan**	**7 desa**	**17.571.000**	**7 desa**	**13.600.000**
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga kemasyarakatan	17.571.000	7 lembaga kemasyarakatan	13.600.000
7	**01**	**03**	**2**	**06**		**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN**	**Jumlah keluarga yang diberdayakan dan disejahterakan**	**1.544 Keluarga**	**72.043.730**	**1.544 Keluarga**	**102.594.730**
7	01	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1.544 keluarga	72.043.730	1.544 keluarga	102.594.730
7	**01**	**04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman & Kenyamanan)**	**100%**	**36.721.000**	**100%**	**86.930.000**
7	**01**	**04**	**2**	**01**		**KOORDINASI UPAYA**	**Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan**	**12 patroli**	**36.721.000**	**12 patroli**	**86.930.000**

						PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	36.721.000	12 laporan	86.930.000
7	**01**	**05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**	**80%**	**44.563.500**	**80%**	**94.189.721**
7	**01**	**05**	**2**	**01**		**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	**1 laporan**	**44.563.500**	**1 laporan**	**94.189.721**
7	01	05	2	01	01	Pembinaan wawasan kebangsaan danKetahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara repubik Indonesia tahun1945,pelestarian Bhinekka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 orang	32.078.000	300 orang	81.449.721
7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12.485.500	12 dokumen	12.740.000
7	**01**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**80%**	**17.571.000**	**80%**	**63.600.000**

7	**01**	**06**	**2**	**01**		**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah Pemerintah desa yang dibina dan diawasi**	**7 desa**	**17.571.000**	**7 desa**	**63.600.000**
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	17.571.000	12 dokumen	63.600.000
Total									**3.166.577.054**		**3.647.416.269**

Berdasarkan data perbandingan antara Renja tahun 2024 dan APBD Tahun 2024 pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan pada APBD disusun masih mengacu pada Renja, hal ini dapat dilihat dari persentase kesesuain program sebesar 100%, persentase kesesuaian kegiatan sebesar 100% dan persentase kesesuaian sub kegiatan sebesar 100%. Namun yang menjadi catatan, indikator dan target pada APBD pada sebagian kegiatan dan sub kegiatan masih ada yang belum sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan di Renja tahun 2024.Hal ini disebabkan oleh tidak diinputnya / tidak diperbaharuinya indikator dan target Renja tahun 2024 ke dalam sistem SIPD sehingga hasil cetak Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagian masih menampilkan target indikator lama.

2.1.2 Ketercapaian kinerja sampai Triwulan II tahun 2024

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, penilaian hasil pelaksanaan Renja menggunakan data realisasi pelaksanaan APBD sebagai acuan. Berikut rekapitulasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Harus sampai Triwulan II Tahun 2024.

Tabel 2.3

Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Harus sampai Triwulan II Tahun 2024

Kode						Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2024		Realisasi capaian target program/kegiatan/sub kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Catatan
								Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**							
7	**01**					**KECAMATAN**							
7	01	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Nilai AKIP**	**3.214.060.560**	**BB**				
7	01	**01**	2	**01**		**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun**	**9.523.860**	**8 dokumen**	**1.280.000**	**13,44%**	**50%**	
7	01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.034.460	2 dokumen	**680.000**	**33,42%**	**50%**	
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1.245.000	1 dokumen	**0**	**0**	**0**	
7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.245.000	1 dokumen	**0**	**0**	**0**	
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.499.720	1 dokumen	**0**	**0**	**0**	
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1.500.320	1 dokumen	**0**	**0**	**0**	

							Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						
7	01	01	2	02	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	999.530	1 laporan	**0**	**0**	**0**	
7	01	01	2	01	07	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	999.830	1 laporan	**600.000**	**60,01%**	**50%**	
7	01	**01**	2	**02**		**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun**	**2.710.847.768**	**20 dokumen**	**1.344.037.584**	**49,61%**	**50%**	
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.708.973.000	15 orang/bulan	**1.344.037.584**	**49,61%**	**50%**	
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.274.768	2 laporan	**0**	**0**	**0**	
7	01	01	2	02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	600.000	18 laporan	**0**	**0**	**0**	
7	01	**01**	2	**03**		**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah dokumen penatausahaan Barang milik daerah yang disusun**	**1.805.976**	**3 dokumen**	**0**	**0**	**0**	
7	01	01	2	03	01	Penyusunan perencanaan dan kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan Kebutuhan Barang Milik daerah yang disusun	1.805.976	3 dokumen	**0**	**0**	**0**	
7	01	**01**	2	**06**		**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah**	**158.270.707**	**100%**	**114.067.177**	**72,07%**	**50%**	
7	01	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi	Jumlah Paket Komponen	642.690	4 paket	0	**0**	**0**	

						listrik/penerangan bangunan kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan						
7	01	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23.936.765	41 paket	300.000	**1,25%**	**50%**	
7	01	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10.909.700	4 paket	0	**0**	**0**	
7	01	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.645.000	12 dokumen	1.950.000	**53,50%**	**50%**	
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordnasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.136.552	12 laporan	111.817.177	**93,86%**	**50%**	
7	01	**01**	2	**07**		**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Jumlah alat yang dibeli**	**28.933.162**	**4 Unit**	**17.477.477**	**60,41%**	**50%**	
7	01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28.933.162	4 unit	**17.477.477**	**60,41**	**50%**	
7	01	**01**	2	**08**		**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**209.531.052**	**100 %**	**78.132.478**	**37,29%**	**50%**	
7	01	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	27.600.000	12 laporan	**8.392.478**	**30,41%**	**50%**	
7	01	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	181.931.052	12 laporan	**69.740.000**	**38,33%**	**50%**	
7	01	**01**	2	**09**		**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**95.148.035**	**28 unit**	**23.195.000**	**24,38%**	**50%**	
7	01	01	2	09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	78.110.000	11 unit	20.875.000	**26,73%**	**50%**	

						jabatan							
97	01	01	2	09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10.361.856	26 unit	2.320.000	**22,39%**	**50%**	
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	6.676.179	1 unit	0	**0**	**0**	
7	01	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan**	**72.441.258**	**80%**	**5.310.000**	**16,77%**	**50%**	
7	01	**02**	2	**01**		**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**72.441.258**	**4 laporan**	**5.310.000**	**16,77%**	**50%**	
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40.774.020	1 laporan	**0**	**0**	**0**	
7	01	02	2	01	02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	31.667.238	3 dokumen	**5.310.000**	**16,77%**	**50%**	
7	01	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa**	**116.194.730**	**80%**	**17.500.000**	**15,06%**	**50%**	
7	01	**03**	2	**01**		**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**Jumlah pemerintah desa yang dibina/diberdayakan**	**13.800.000**	**7 desa**	**7.200.000**	**52,17%**	**50%**	
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.800.000	7 lembaga kemasyarakatan	7.200.000	52,17%	50%	
7	01	03	2	06		**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**	**Jumlah keluarga yang diberdayakan dan disejahterakan**	**102.594.730**	**1.544 Keluarga**	**10.300.000**	**10,04%**	**50%**	

						TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN							
7	01	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	102.594.730	1.544 Keluarga	10.300.000	10,04%	50%	
7	01	**04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)**	**86.930.000**	**100%**	**19.850.000**	**22,83%**	**50%**	
7	01	**04**	2	**01**		**KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan**	**86.930.000**	**12 patroli**	**19.850.000**	**22,83%**	**50%**	
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	86.930.000	12 laporan	19.850.000	22,83%	50%	
7	01	**05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**	**94.189.721**	**80%**	**975.000**	**1,04%**	**50%**	
7	01	**05**	2	**01**		**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**94.189.721**	**1 laporan**	**975.000**	**1,04%**	**50%**	
7	01	05	2	01	01	Pembinaan wawasan kebangsaan danKetahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara repubik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	81.449.721	300 orang	**975.000**	**1,20%**	**50%**	

						tahun1945,pelestarian Bhinekka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia	Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.740.000	12 dokumen	**0**	**0**	**0**	
7	01	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**63.600.000**	**80%**	**14.400.000**	**22,64%**	**50%**	
7	01	**06**	2	**02**		**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah pemerintah desa yang dibina dan diawasi**	**63.600.000**	**7 desa**	**14.400.000**	**22,64%**	**50%**	
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	63.600.000	12 dokumen	**14.400.000**	**22,64%**	**50%**	
Total								**3.647.416.269**		**1.636.224.716**	**44,86%**	**50%**	

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Harus sampai dengan Triwulan II di atas diolah berdasarkan data pada formulir evaluasi hasil renja Perangkat daerah sesuai format evaluasi Renja dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi Renja dimaksudkan untuk mengindentifikasi sejauh mana capaian pelaksanaan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/ tidak tercapainya kinerja serta implikasi yang timbul, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk tindakan perencanaan selanjutnya.

Berdasarkan data pada tabel 2.3 tersebut, dapat dilihat bahwa dari sisi anggaran, Kecamatan Muara harus telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.636.224.716,- Atau sekitar 44,86% persen dari total anggaran untuk tahun 2024.Pencapaian realisasi anggaran Triwulan II relatif masih rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena pelaksanaannya memang dijadwalkan pada Triwulan III dan IV, di antaranya yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
   - Sub kegiatan Koordinasi / Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
2. Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
   - Sub kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinekka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republok Indonesia

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Sesuai dengan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kabupaten / Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

Pelayanan pada kecamatan Muara Harus secara rinci adalah sebagai berikut :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan
- Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Menggordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Perturan Kepala Daerah
- Mengoordinasika pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- Menggordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daaerah kabupaten / kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten / kota yang ada di kecamatan

Kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas di antaranya dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan .Berdasarkan data ada tabel 2.3, secara umum pelaksanaan sebagian besar kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Beberapa hal yeng perlu diperhatikan terkait capaian kinerja sampai Triwulan II dan memerlukan tindak lanjut adalah sebagai berikut :

- Beberapa indikator kinerja baik program, kegiatan dan sub kegiatan Renja 2024 belum seluruhnya selaras dengan perubahan Renstra 2019-2024 yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena penyusunan Renja

2024 dilakukan sebelum ditetapkannya Perubahan Renstra, dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja pada Renja agar selaras dengan Perubahan Renstra

- Masih terdapat rincian belanja yang masuk pada sub kegiatan yang tidak tepat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian/pemindahan belanja dari sub kegiatan satu ke sub kegiatan lainnya yang sesuai
- Masih terdapat hambatan terkait upaya pemenuhan laporan penunjang IKM, di antaranya belum tepat waktunya pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar dilakukannya evaluasi kinerja.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Muara Harus tidak terlepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, yang dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala dan kelemahan yang dihadapi oleh Kecamatan Muara Harus dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, diantaranya :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan
2. Masih minimnya koordinasi antar instansi/ unit kerja/ instansi vertikal yang ada di Kecamatan dalam upaya peningkatan pembangunan di Kecamatan.
3. Belum tersedianya dokumen standar pelayanan publik dan atau standar operasional prosedur (SOP) di Kecamatan Muara Harus, hal ini berdampak pada pola pelayanan yang belum terstandar dengan baik.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Reviu terhadap rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Muara Harus tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Kecamatan Muara Harus tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Harus tahun 2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rancangan Perubahan RKPD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Hasil reviu terhadap rancangan Perubahan RKPD Kecamatan Muara Harus tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Review terhadap rancangan perubahan RKPD tahun 2024

No	Rancangan RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAM DAERAH KABUPATEN.KOTA**	**Kec.Muara Harus**	**Nilai AKIP**	**BB**	**3.636.177.528**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAM DAERAH KABUPATEN.KOTA**	**Kec.Muara Harus**	**Nilai AKIP**	**BB**	**3.636.177.528**	
1.	**PERENCANAAN , PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun**	**8 dokumen**	**9.523.860**	**PERENCANAAN , PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun**	**8 dokumen**	**9.523.860**	
	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah	Kec.Muara Harus	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.034.460	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah	Kec.Muara Harus	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.034.460	
	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.245.000	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.245.000	
	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.245.000	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.245.000	
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	1 dokumen	1.499.720	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	1.499.720	

			SKPD					Dokumen DPA-SKPD			
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.500.320	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.500.320	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	999.530	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	999.530	
	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	999.830	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	999.830	
2	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun**	**20 dokumen**	**2.906.399.768**	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun**	**20 dokumen**	**2.906.399.768**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Muara Harus	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	2.904.525.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Muara Harus	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	2.904.525.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Keuangan JAkhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	1.274.768	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	1.274.768	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18 laporan	600.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18 laporan	600.000	

			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
3	**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah dokumen penatausahaan BMD yang disusun**	**3 dokumen**	**1.805.976**	**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah dokumen penatausahaan BMD yang disusun**	**3 dokumen**	**1.805.976**	
	Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	1.805.976	Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	1.806.976	
4	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Kec. Muara Harus**	**Jumlah administrasi kepegawaian yang disediakan**	**15 paket**	**16.650.000**	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Kec. Muara harus**	**Jumlah administrasi kepegawaian yang disediakan**	**15 Paket**	**16.650.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Muara Harus	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 paket	16.650.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Muara Harus	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	16.650.000	
5	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**259.278.577**	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**259.278.577**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec.Muara Harus	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	642.690	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec.Muara Harus	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	642.690	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec.Muara Harus	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	41 paket	27.086.635	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec.Muara Harus	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	41 paket	27.086.635	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec.Muara Harus	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	10.909.700	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec.Muara Harus	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	10.909.700	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undagan	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	4.845.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undagan	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	4.845.000	

	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	215.794.552	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	215.794.552	
6	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah alat yang dibeli**	**8 Unit**	**65.209.226**	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah alat yang dibeli**	**8 Unit**	**65.209.226**	
	Pengadaan Mebel	Kec.Muara Harus	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	4.036.364	Pengadaan Mebel	Kec.Muara Harus	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	4.036.364	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec.Muara Harus	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	35.945.587	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec.Muara Harus	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	35.945.587	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Linnya	Kec.Muara Harus	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	25.227.275	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Linnya	Kec.Muara Harus	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	25.227.275	
7	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**214.371.052**	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**214.371.052**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	27.600.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	27.600.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	186.771.052	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	186.771.052	
8	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**28 unit**	**162.939.069**	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**28 unit**	**162.939.069**	

	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec.Muara Harus	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	105.930.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec.Muara Harus	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	105.930.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kec.Muara Harus	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 unit	10.361.856	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kec.Muara Harus	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 unit	10.361.856	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec.Muara Harus	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	46.647.213	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec.Muara Harus	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	46.647.213	
B	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan**	**80%**	**130.820.378**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan**	**80%**	**130.820.378**	
9	**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**4 laporan**	**130.820.378**	**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**4 laporan**	**130.820.378**	
	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kec.Muara Harus	Jumlah laporan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	1 laporan	86.023.140	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	86.023.140	
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerinthanan di tingkat kecamatan	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 dokumen	44.797.238	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerinthanan di tingkat kecamatan	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 dokumen	44.797.238	

C	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa**	**80%**	**123.166.730**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa**	**80%**	**123.166.730**	
10	**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah pemerintah desa yang dibina/diberdayakan**	**7 desa**	**13.600.000**	**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah pemerintah desa yang dibina/diberdayakan**	**7 desa**	**13.600.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Muara Harus	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga kemasyarakatan	13.600.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Muara Harus	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga kemasyarakatan	13.600.000	
11	**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN**	**Kec. Muara harus**	**Jumlah keluarga yang diberdayakan dan disejahterakan**	**1.544 Keluarga**	**109.566.730**	**Jumlah keluarga yang diberdayakan dan disejahterakan**	**Kec. Muara Harus**	**Jumlah keluarga yang diberdayakan dan disejahterakan**	**1.544 Keluarga**	**109.566.730**	
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarg Berkualitas	Kec. Muara Harus	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1.544 Keluarga	109.566.730	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarg Berkualitas	Kec. Muara Harus	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1.544 Keluarga	109.566.730	
D	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)**	**100%**	**88.170.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)**	**100%**	**88.170.000**	
12	**KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan**	**12 patroli**	**88.170.000**	**KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan**	**12 patroli**	**88.170.000**	

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	88.170.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	88.170.000	
E	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**	**80%**	**145.291.633**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**	**80%**	**145.291.633**	
13	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**1 laporan**	**145.291.633**	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**1 laporan**	**145.291.633**	
	Pembinaan wawasan kebangsaan danKetahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara repubik Indonesia tahun1945,pelestarian Bhinekka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia	Kec.Muara Harus	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 orang	129.521.633	Pembinaan wawasan kebangsaan danKetahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara repubik Indonesia tahun1945,pelestarian Bhinekka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia	Kec.Muara Harus	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 oramg	129.521.633	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Muara Harus	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	15.770.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Muara Harus	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	15.770.000	

F	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**80%**	**58.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**80%**	**58.000.000**	
14	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah pemerintah desa yang dibina dan diawasi**	**7 desa**	**58.000.000**	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah pemerintah desa yang dibina dan diawasi**	**7 desa**	**58.000.000**	
	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	58.000.000	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	58.000.000	
Total Pagu Rancangan RKPD					**4.181.626.269**	**Total Pagu Perubahan**				**4.181.626.269**	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program – program Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong pada Anggaran Perubahan tahun 2024 melaksanakan 6 (Enam) program dan 14 (Empat belas) kegiatan dan 33 Sub kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD Perubahan Kabupaten Tabalong. Program dan Kegiatan tersebut secara terinci adalah sebagai berikut :

1. Program 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

   Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

   Sub Kegiatan :

   - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
   - Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
   - Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
   - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
   - Evaluasi kinerja Perangkat daerah

   Kegiatan : 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   - Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
   - Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD
   - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD

   Kegiatan : 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah

   Sub Kegiatan : - Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD

   Kegiatan : 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan : - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

   Kegiatan : 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

   Kegiatan : 6. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah

   Sub Kegiatan :

   - Pengadaan Mebel
   - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Linnya

Kegiatan : 7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Kegiatan : 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program 2 : Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

   Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

   Sub Kegiatan :

   - Koordinasi / Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait
   - Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

3. Program 3 : Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

   Kegiatan : Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

   Sub Kegiatan : Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

   Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan

   Sub Kegiatan : Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan keluarga berkualitas

4. Program 4 : Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

   Kegiatan : Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

   Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara republik Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.

5. Program 5 : Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

   Kegiatan : Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah

   Sub Kegiatan :

   - Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia.
   - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program 6 : Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

   Kegiatan : Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa

Rencana Kerja dan pendanaan pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini

Tabel 3.1 Perubahan rencana program dan kegiatan Kecamatan Muara Harus Tahun 2024

Kode						Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan progam / kegiatan / sub kegiatan	Lokasi detail	Rencana tahun 2024 (sebelum perubahan)							Rencana tahun 2024 (setelah perubahan)				Catatan penting
									Renja 2024			APBD 2024			Perubahan renja				
								Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**					**KECAMATAN**													
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAM DAERAH KABUPATEN.KOTA**	**Kec Muara Harus**	**Nilai AKIP**	**BB**	**2.910.733.539**	**PAD**	**BB**	**3.214.060.560**	**PAD**	**Nilai AKIP**	**BB**	**3.636.177.528**	**PAD**	
7	**01**	**01**	**2**	**01**		**PERENCANAAN , PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Kec Muara Harus**	**Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun**	**8 dokumen**	**9.523.860**	**PAD**	**8 dokumen**	**9.523.860**	**PAD**	**Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun**	**8 dokumen**	**9.523.860**	**PAD**	
7	01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah	Kec Muara Harus	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.034.460	PAD	2 dokumen	2.034.460	PAD	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.034.460	PAD	
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kec Muara Harus	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.245.000	PAD	1 dokumen	1.245.000	PAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.245.000	PAD	

7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kec Muara Harus	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.245.000	PAD	1 dokumen	1.245.000	PAD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.245.000	PAD	
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kec Muara Harus	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.499.720	PAD	1 dokumen	1.499.720	PAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.499.720	PAD	
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Kec Muara Harus	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.500.320	PAD	1 dokumen	1.500.320	PAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.500.320	PAD	
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec Muara Harus	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	999.530	PAD	1 laporan	999.530	PAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	999.530	PAD	
7	01	01	2	01	07	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Kec Muara Harus	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	999.830	PAD	1 laporan	999.830	PAD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	999.830	PAD	
7	**01**	**01**	**2**	**02**		**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Kec Muara Harus**	**Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat**	**20 dokumen**	**2.416.328.553**	**DAU**	**20 dokumen**	**2.710.847.768**	**DAU**	**Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang**	**20 dokumen**	**2.906.399.768**		

								daerah yang disusun							**disusun**			
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Muara Harus	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/ bulan	2.414.453.785	DAU	15 orang/ bulan	2.708.973.000	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/ bulan	2.904.525.000	DAU	
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec Muara Harus	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	1.274.768	PAD	2 laporan	1.274.768	PAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	1.274.768	PAD	
7	01	01	2	02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kec Muara Harus	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	600.000	PAD	18 laporan	600.000	PAD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	600.000	PAD	
7	**01**	**01**	**2**	**03**		**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**Kec Muara Harus**	**Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik daerah yang disusun**	**3 dokumen**	**1.805.976**	**PAD**	**3 dokumen**	**1.805.976**	**PAD**	**Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik daerah yang disusun**	**3 dokumen**	**1.805.976**	**PAD**	
7	01	01	2	03	01	Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	**Kec Muara Harus**	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	1.805.976	PAD	3 dokumen	1.805.976	PAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	1.805.976	PAD	
7	**01**	**01**	**2**	**05**		**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Kec Muara Harus**	**Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**15 paket**	**16.650.000**	**PAD**	

7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec Muara Harus	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	-	-	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 paket	16.650.000	PAD	
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Kec Muara Harus**	**Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat daerah**	**100%**	**154.648.829**	**PAD**	**100%**	**158.270.707**	**PAD**	**Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat daerah**	**100%**	**259.278.577**	**PAD**	
7	01	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	**Kec Muara Harus**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	626.000	PAD	4 paket	642.690	PAD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	642.690	PAD	
7	01	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	**Kec Muara Harus**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	41 paket	23.937.893	PAD	41 paket	23.936.765	PAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	41 paket	27.086.635	PAD	
7	01	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	**Kec Muara Harus**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	9.809.700	PAD	4 paket	10.909.700	PAD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	10.909.700	PAD	
7	01	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undagan	**Kec Muara Harus**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	3.649.236	PAD	12 dokumen	3.645.000	PAD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	4.845.000	PAD	
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	**Kec Muara Harus**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	116.626.000	PAD	12 laporan	119.136.552	PAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	215.794.552	PAD	
7	**01**	**01**	**2**	**07**		**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH**	**Kec Muara Harus**	**Jumlah alat yang dibeli**	**4 unit**	**28.056.819**	**PAD**	**4 unit**	**28.933.162**	**PAD**	**Jumlah alat yang dibeli**	**8 unit**	**65.209.226**	**PAD**	

						DAERAH												
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Kec Muara Harus	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	-	-	-	-	-	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	4.036.364	PAD	
7	01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec Muara Harus	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	28.056.819	PAD	4 unit	28.933.162	PAD	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	35.945.587	PAD	
7	01	01	2	07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec Muara Harus	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	25.227.275	PAD	
7	**01**	**01**	**2**	**08**		**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kec Muara Harus**	**Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**208.863.300**	**PAD**	**100%**	**209.531.052**	**PAD**	**Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**214.371.052**	**PAD**	
7	01	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	**Kec Muara Harus**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 laporan	27.600.000	PAD	12 laporan	27.600.000	PAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 laporan	27.600.000	PAD	
7	01	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	**Kec Muara Harus**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	181.263.300	PAD	12 laporan	181.931.052	PAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	12 laporan	186.771.052	PAD	
7	**01**	**01**	**2**	**09**		**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kec Muara Harus**	**Jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**28 unit**	**91.506.202**	**PAD**	**28 unit**	**95.148.035**	**PAD**	**Jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**28 unit**	**162.939.069**	**PAD**	
7	01	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya	**Kec Muara**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	11 unit	74.459.309	PAD	11 unit	78.110.000	PAD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	11 unit	105.930.000	PAD	

						pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	**Harus**	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	**Kec Muara Harus**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	10.361.856	PAD	16 unit	10.361.856	PAD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	10.361.856	PAD	
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	**Kec Muara Harus**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	6.685.037	PAD	1 unit	6.676.179	PAD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	46.647.213	PAD	
7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec Muara Harus**	**Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan**	**80%**	**67.373.285**	**PAD**	**80%**	**72.441.258**	**PAD**	**Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan**	**80%**	**130.820.378**	**PAD**	
7	**01**	**02**	**2**	**01**		**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**Kec Muara Harus**	**Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**4 laporan**	**67.373.285**	**PAD**	**4 laporan**	**72.441.258**	**PAD**	**Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**4 laporan**	**130.820.378**	**PAD**	
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	**Kec Muara Harus**	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	40.250.000	PAD	1 laporan	40.774.020	PAD	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	86.023.140	PAD	
7	01	02	2	01	02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerinthanan di tingkat kecamatan	**Kec Muara Harus**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 dokumen	27.123.285	PAD	3 dokumen	31.667.238	PAD	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 dokumen	44.797.238	PAD	
7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	**Kec Muara**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata**	**80 %**	**89.614.730**	**PAD**	**80%**	**116.194.730**	**PAD**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan**	**80%**	**123.166.730**	**PAD**	

						KELURAHAN	**Harus**	**kelola kewilayahan desa**							**desa**			
7	**01**	**03**	**2**	**01**		**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**Kec Muara Harus**	**Jumlah pemerintah desa yang dibina/diberdayakan**	**7 desa**	**17.571.000**	**PAD**	**7 desa**	**13.600.000**	**PAD**	**Jumlah pemerintah desa yang dibina/diberdayakan**	**7 desa**	**13.600.000**	**PAD**
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**Kec Muara Harus**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga kemasyarakatan	17.571.000	PAD	7 lembaga kemasyarakatan	13.600.000	PAD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga kemasyarakatan	13.600.000	PAD
7	01	03	2	06		**Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Kec Muara Harus**	**Jumlah keluarga yang diberdayakan dan disejahterakan**	**1.544 Keluarga**	**72.043.730**	**PAD**	**1.544 Keluarga**	**102.594.730**	**PAD**	**Jumlah keluarga yang diberdayakan dan disejahterakan**	**1.544 Keluarga**	**109.566.730**	**PAD**
7	01	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas	Kec Muara Harus	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1.544 keluarga	72.043.730	PAD	1.544 keluarga	102.594.730	PAD	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1.544 Keluarga	109.566.730	PAD
7	**01**	**04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec Muara Harus**	**Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)**	**100%**	**36.721.000**	**PAD**	**100%**	**86.930.000**	**PAD**	**Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)**	**100%**	**88.170.000**	**PAD**
7	**01**	**04**	**2**	**01**		**KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec Muara Harus**	**Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan**	**12 Patroli**	**36.721.000**	**PAD**	**12 Patroli**	**86.930.000**	**PAD**	**Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan**	**12 Patroli**	**88.170.000**	**PAD**
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia,	Kec Muara	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	12 laporan	36.721.000	PAD	12 laporan	86.930.000	PAD	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	12 laporan	88.170.000	PAD

						dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Harus	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
7	**01**	**05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec Muara Harus**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**	**80%**	**44.563.500**	**PAD**	**80%**	**94.189.721**	**PAD**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**	**80%**	**145.291.633**	**PAD**	
7	**01**	**05**	**2**	**01**		**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**Kec Muara Harus**	**Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**1 laporan**	**44.563.500**	**PAD**	**1 laporan**	**94.189.721**	**PAD**	**Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**1 laporan**	**145.291.633**	**PAD**	
7	01	05	2	01	01	Pembinaan wawasan kebangsaan danKetahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara repubik Indonesia tahun1945,pelestarian Bhinekka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia	Kec Muara Ha**rus**	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 orang	32.078.000	PAD	300 orang	81.449.721	PAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 orang	129.521`.633	PAD	
7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Muara Ha	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12.485.500	PAD	12 dokumen	12.740.000	PAD	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	15.770.000	PAD	
7	**01**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec Muara Harus**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**80%**	**17.571.000**	**PAD**	**80%**	**63.600.000**	**PAD**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**80%**	**58.000.000**	**PAD**	

7	**01**	**06**	**2**	**01**		**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec Muara Harus**	**Jumlah pemerintah desa yang dibina dan diawasi**	**7 desa**	**17.571.000**	**PAD**	**7 desa**	**63.600.000**	**PAD**	**Jumlah pemerintah desa yang dibina dan diawasi**	**7 desa**	**58.000.000**	**PAD**	
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	**Kec Muara Harus**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	17.571.000	PAD	12 dokumen	63.600.000	PAD	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	58.000.000	PAD	
Total										**3.166.577.054**			**3.647.416.269**				**4.181.626.269**		

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

Perubahan Rencana Kerja (Renja Kecamatan Muara Harus Kabupaten TabalongTahun 2024 ini sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Muara harus Kabupaten Tabalong tahun 2024.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perubahan Renja Kecamatan Muara Harus Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Catatan penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada perubahan Renja Kecamatan Muara harus tahun 2024 antara lain :

- Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan renja Kecamatan Muara Harus, pada prinsipnya untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Tabalong
- Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Muara Harus ini berpedoman pada perubahan Renstra Kecamatan Muara Harus tahun 2019-2024, sehingga difokuskan pada upaya pencapaian seluruh target pada renstra
- Penyusunan perubahan Renja Kecamatan Muara Harus ini juga berpedoman pada perubahan RKPD Kabupaten Tabalong tahun 2024.

b. Kaidah pelaksanaan

   Kaidah pelaksanaan dokumen perubahan Renja Kecamatan Muara Harus Tahun 2024 adalah sebagai berikut ;

- Perubahan Renja Kecamatan Muara Harus ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Muara Harus tahun 2024
- Dalam penyusunan RKPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil reviu yang dilaksanakan oleh inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil asistensi dan pembahasan DPRD Kabupaten Tabalong

c. Rencana Tindak lanjut

   Rencana tindak lanjut dari penyusunan Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Muara Harus tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Dokumen Renja Kecamatan Muara harus tahun 2024 setiap triwulannya
- Prrogram, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Muara Harus akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan

Melalui Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Muara Harus, Agustus 2024

CAMAT MUARA HARUS

RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp

Pembina

NIP.19700914 199503 1 006

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
KECAMATAN TANTA
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN TANTA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga akhirnya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tanta 2024 dapat disusun. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tanta Tahun 2024 sebagai rencana pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tanta dalam pencapain visi dan misi serta tujuan Instansi Pemerintah dalam Perwujudan Good Govermence Sangat disadari bahwa Rencana Kerja Perubahan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, Sehingga sangat diharapkan sekali segala saran dan arahan bagi kami untuk dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan

yang lebih baik dikesempatan lainnya.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat.

Tanta, Agustus 2024

CAMAT TANTA

H. ADY FAZAR, S.Sos,SH,Kp,MH
NIP. 19781110 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…….. i

DAFTAR ISI…… ii

DAFTAR TABEL…….. iii

BAB I PENDAHULUAN …….. 1

1.1 Latar Belakang ……..…….. 1

1.2 Landasan Hukum ...……..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ……..... 4

1.4 Sistematika Penulisan …… 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024…….. 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tanta Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan……... 6

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024..... 6

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024..... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanta .....…… 11

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tanta …..……. 12

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD……... 15

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TANTA TAHUN 2024……... 31

BAB IV PENUTUP……. 38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuai Antara Renja Kecamatan Tanta Tahun 2024 dengan APBD 2024……..	7
Tabel 2.2	Perbandingan Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja dan APBD Kecamatan Tanta Tahun 2024.....	10
Tabel 2.3	Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Tanta Sampai Triwulan II Tahun 2024…….	11
Tabel 2.4	Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024	
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tanta Tahun 2024……..	20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka Kantor Kecamatan Tanta sebagai salah satu

Perangkat Daerah (PD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja Kecamatan Tanta tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan estimasi dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, menjadi dasar hukum bagi Kecamatan Tanta sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang ada dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tabalong.Agar pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab urusan tersebut berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten, perlu dibuat langkah-langkah perencanaan yang terencana dan berkesinambungan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi kepemerintahan Kecamatan.

Renja Kecamatan Tanta tahun 2024 merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Tanta untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di 14 desa yang ada di wilayah Kecamatan Tanta, sekaligus juga merupakan penjabaran Visi, Misi Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Tantamempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan tema RKPD Kabupaten Tabalong tahun 2024 yakni **“PENGUATAN DAYA SAING DAERAH UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS ”** maka di tahun 2024 Kantor Kecamatan Tanta memprioritaskan kegiatan untuk melakukan :

1. Meningkatkan kualitas dan daya saling Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Memperkuat ketahanan ekonomi melalui diversifikasi ekonomi ;
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar;
4. Menjaga kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
5. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaannya, keberhasilan ataupun tidaknya Renja PD ini tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat di wilayah Kecamatan Tanta.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja, dan Tata Cata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.
17. Peraturan Daerah No.05 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Tabalong.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanta Tahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

   Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tanta disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

2. Tujuan

   Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tanta disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan Kecamatan Tanta

1.3 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Kecamatan Tanta Tahun 2024 ini di susun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tanta Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
  - 2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024
  - 2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanta
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tanta
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TANTA TAHUN 2024

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun selain berpedoman dengan Perubahan RKPD, juga berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. Dalam hal ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Tanta sampai dengan triwulan II tahun 2024 dengan mengacu pada APBD tahun2024 yang sudah disahkan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tanta Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024

2.1.1.1 Kesesuaian Program Antara Renja Kecamatan Tanta Tahun 2024 dengan APDB Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada rencanakerja Kecamatan Tanta dengan APBD Tahun 2024, terdapat kesesuaian 100%. Artinya bahwa jumlah program dalam renja sama dengan jumlah program yang ada dalam APBD, yaitu ada 6 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2.1.1.2 Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Kecamatan Tanta Tahun 2024 dengan APDB Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan yang ada pada rencana kerja Kecamatan Tanta dengan APBD Tahun 2024, sama dengan APBD Tahun 2024. Dimana jumlah kegiatan yang ada di Renja sebanyak 12 kegiatan sedangkan jumlah kegiatan yang ada di APBD sebanyak 12 kegiatan.

2.1.1.3 Kesesuaian Sub Kegiatan Antara Renja Kecamatan Tanta Tahun 2024 dengan APDB Tahun 2024.

Berdasarkan evaluasi terhadap sub kegiatan yang ada di renja Kecamatan Tanta dengan APBD tahun 2024, jumlah sub kegiatan yang ada di renja sebanyak 23 sub kegiatan sedangkan sub kegiatan yang ada di APBD sebanyak 24 sub kegiatan. Karna ada pergeseran dan penambahan 1 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.1.1.4 Kesesuaian Pagu Anggaran Antara Renja Kecamatan Tanta Tahun 2024 dengan APDB Tahun 2024.

Anggaran Renja Kecamatan Tanta Tahun 2024 sebesar Rp. 4.157.915.226, sedangkan anggaran Kecamatan Tanta berdasar APBD 2024 adalah sebesar Rp. 4.629.915.000. Terdapat selisih anggaran antara APBD dengan Renja 2024 sebesar Rp. 471,999.774,- seiring dengan proses penganggaran yang berjalan. Hasil evaluasi kesesuaian jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran antara renja Kecamatan Tanta Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1. dibawah ini.

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja
Kecamatan Tanta Tahun 2024 dengan APBD 2024

No	Uraian	Renja 2024	APBD 2024
1	Program	6	6
2	Kegiatan	12	12
3.	Sub Kegiatan	23	24
4	Pagu Anggaran	Rp. 4.157.915.226,-	Rp. 4.496.497.000,-

Tabel 2.2. Perbandingan Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Renja dan APBD Kecamatan Tanta Tahun 2024

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024		APBD 2024	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Anggaran
(1)						(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7		**URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
7	**01**	**PERENCANAAN**									
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Komponen Penunjang Nilai AKIP**	**B**	**3.692.666.110**	**B**	**4.166.354.526**
7	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja**	**B**	**8.400.575**	**B**	**10.250.483**
7	01	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	2 dokumen	1.849.500	2 dokumen	`1.849.387
7	01	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.000.266	2 dokumen	1.000.266
7	01	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DKA-SKPD	6 dokumen	1.850.500	6 dokumen	1.850.392
7	01	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD	4 dokumen	1.800.000	4 dokumen	1.799.743
7	01	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1.900.309	6 Laporan	1.900.309
7	01	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat	2 Laporan	1.850.500	2 Laporan	1.850.386
7	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN**	**100%**	2.877.715.226	**100%**	**3.226.617.000**

7	01	01	2	02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan Tunjangan	22 Pegawai	2.877.715.226	22 Pegawai	3.226.617.000
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Terjaga Keamanannya**	**100%**	**347.086.309**	100%	334.395.043
7	01	01	2	06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	96.153.998	10 Paket	83.463.998
7	01	01	2	06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	15.195.500	4 Paket	15.195.500
7	01	01	2	06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	15.004.811	10 Paket	15.003.545
7	01	01	2	06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.500.000	2 Dokumen	3.500.000
7	01	01	2	06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	217.232.000	22 Laporan	217.232.000
7	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengdaan Barang Milik Daerah Penunjang Uusan Pemerintah Daeah**	**Persentase sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya**	**B**	**83.992.000**	**B**	**83.992.000**
7	**01**	**01**	**2**	**07**	00 11		Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	83.992.000	1 unit	83.992.000
7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**253.483.000**	**100%**	**266.973.000**
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.700.000	12 Laporan	50.700.000

7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	201.783.000	12 Laporan	216.273.000
7	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	121.989.000	**100%**	**244.127.000**
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	121.989.000	12 Unit	**110.709.000**
7	01	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Laiinya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	-	1 unit	**133.418.000**
7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**100%**	108.490.554	**100%**	**106.470.274**
7	**01**	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**100%**	**86.493.186**	**100%**	**86.493.186**
7	**01**	**02**	**2**	**01**	**01**	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	86.493.186	3 Laporan	86.493.186
7	**01**	**02**	**2**	**02**		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan			**21.997.368**		19.977.000
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 laporan	21.997.368		19.977.000
7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**14 Desa**	**91.055.769**	**14 Desa**	**91.055.769**
7	**01**	**03**	**2**	**06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**100 Kelurga**	**91.055.769**	**100 Kelurga**	**91.055.769**

7	01	03	2	06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	100 Kelurga	91.055.769	100 Kelurga	91.055.769
7	**01**	**04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**100%**	**95.000.000**	**100%**	**94.999.996**
7	**01**	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		14 Laporan	**95.000.000**	14 Laporan	**94.999.996**
7	01	04	2	01	00001	Sinersigitas dengan kepolisian Negara Republik ndoenesia, Tentara Nasional dan instansi vertikal	Jumlah Laporan hasil Sinersigitas dengan kepolisian Negara Republik ndoenesia, Tentara Nasional dan instansi vertikal	14 Laporan	95.000.000	14 Laporan	94.999.996
7	**01**	**05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**100%**	116.100.000	**100%**	**120.730.000**
7	**01**	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**100%**	116.100.000	**100%**	**120.730.000**
7	01	05	2	01	01	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalm rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Rupublik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	116.100.000	100 Orang	120.730.000
7	**01**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**100%**	55.351.163	**100%**	**50.304.435**
7	**01**	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**100%**	55.351.163	**100%**	**50.304.435**

7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 Dokumen	53.367.479	14 Dokumen	48.320.751
7	01	06	2	01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	1.983.684	14 Laporan	1.983.684
Total Pagu Anggaran									4.157.915.226		4.629.915.000

Berdasarkan data perbandingan antara Renja 2024 dan APBD 2024 pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan pada APBD disusun masih mengacu pada Renja, hal ini dapat dilihat dari persentase kesesuaian Program sebesar 100 persen, persentase kesesuaian kegiatan sebesar 100 persen dan persentase kesesuaian sub kegiatan sebesar 99,5 persen.

2.1.2. Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, penilaian hasil pelaksanaan Renja menggunakan data realisasi pelaksanaan APBD sebagai acuan. Berikut rekapitulasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tanta sampai triwulanII tahun 2024.

Tabel 2.3 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Tanta Sampai Triwulan II Tahun 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Catatan
								Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
7						**URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		4.496.497.000	100%				
7	**01**					**PERENCANAAN**							
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Komponen Penunjang Nilai AKIP**	**4.032.936.526**	**100%**	340.544.614	**15 %**	**36%**	
7	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase hasil perencanaan dan pelaporanyang dijadikan bahan evaluasi kinerja**	**10.250.483**	**100%**	1.979.600	**42%**	**36%**	
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	`1.849.387	22 dokumen	580.800	31%	9%	
7	01	01	2	01	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.266	2 dokumen	399.000	40%	50%	
7	01	01	2	01	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DKA-SKPD	1.850.392	6 Dokumen	999.800	54%	50%	

7	01	01	2	01	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD	1.799.743	6 Dokumen	0	0	0	
7	01	01	2	01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.900.309	6 Laporan	0	0	0	
7	01	01	2	01	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat	1.850.386	2 Laporan	0	0	0	
7	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN**	3.226.617.000	**100%**	1.581.405.275	49%	**100%**	
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan Tunjangan	3.226.617.000	22Pegawai	1.581.405.275	49%	21 Pegawai	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022			Catatan
								Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**334.395.043**		192.681.430	**60%**	**39,8**	
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	83.463.998	10 Paket	29.475.000	35%	**20**	
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15.195.500	4 Paket	10.388.700	68%	50	
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15.003.545	10 Paket	5.112.000	34%	20	
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.500.000	2 Dokumen	3.440.000	98%	100	
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217.232.000	22 Laporan	144.265.730	66%	9	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022			Catatan
								Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
7	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengdaan Barang Milik Daerah Penunjang Uusan Pemerintah Daeah**	**Persentase sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya**	**83.992.000**	**83.992.000**	9.000.000	11%	11%	
7	**01**	**01**	**2**	**07**	00 11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	83.992.000	83.992.000	9.000.000	11%	11%	
7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**266.973.000**	**100%**	97.583.976	37%	17%	
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50.700.000	12 Laporan	18.488.976	36%	17%	
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	216.273.000	12 Laporan	79.095.000	37%	17%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022			Catatan
								Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
7	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**110.709.000**	**100%**	39.299.608	**35%**	**12 Unit**	
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan dan Biaya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	110.709.000	12 Unit	39.299.608	35%	12 unit	
7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**106.470.274**	**100%**	11.320.000	13%	33%	
7	**01**	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**86.493.186**	**100%**	11.320.000	13%	33%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/SubKegiatan Tahun 2022		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022			Catatan
								Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
7	**01**	**02**	**2**	**01**	**01**	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	**86.493.186**	3 Laporan	11.320.000	13%	33%	
7	**01**	**02**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan**		**19.977.088**		0	0	0	
7	**01**	**02**	**2**	**02**	**0003**	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.977.088		0	0	0	

7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**91.055.769**	**100%**	26.397.001	29%	29%	
7	**01**	**03**	**2**	**06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecaatan dan Kelurahan**		**91.055.769**	**100%**	26.397.001	29%	29%	
7	**01**	**03**	**2**	**06**	**00 12**	Penumbuhan dan Peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan Kehidupan Menuju keluarga berkualitas	Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	91.055.769	100 Keluarga	26.397.001	29%	29%	
7	**01**	**04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**94.999.996**	**100%**	26.445.034	28%	14%	
7	**01**	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban**		**94.999.996**	**14 Laporan**	26.445.034	28%	14%	

						Umum							
7	01	04	2	01	0 0 0 1	Sinersigitas dengan kepolisian Negara Republik indoensia, Tentara nasional dan instansi vertical di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinersigitas dengan kepolisian Negara Republik indoensia, Tentara nasional dan instansi vertical di wilayah kecamatan	**94.999.996**	14 Laporan	26.445.034	28%	14%	
7	**01**	**05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**120.730.000**	**80%**	3.630.000	3%	3%	
7	**01**	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**120.730.000**	**80%**	3.630.000	3%	3%	
7	01	05	2	01	0 1	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalm rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Rupublik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**120.730.000**	100 orang	3.630.000	3%	3%	

7	**01**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**50.304.435**	**80%**	14.755.000	53%	57%	
	01	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**50.304.435**	**80%**	14.755.000	53%	57%	
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	48.320.751	14 Dokumen	13.180.000	27%	29%	
7	01	06	2	01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1.983.684	14 Laporan	1.575.000	79%	86%	

Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Tanta sampai triwulan II diatasdiolah berdasarkan data pada formulir evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sesuai format evaluasi renja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (formulir evaluasi terlampir). Evaluasi Renja dimaksudkan untuk mengindentifikasi sejauh mana capaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja serta implikasi yang timbul, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk tindakan perencanaan selanjutnya.

Berdasarkan data pada tabel 2.3 tersebut, dapat dilihat bahwa dari sisi anggaran, Kecamatan Tanta telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 2.004.496.924,- atau sekitar 43 persen dari total anggaran untuk tahun 2024. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif masih rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena pelaksanaannya memang dijadwalkan pada triwulan III dan IV, diantaranya yaitu:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan :
   - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan :
   - Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalm rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Rupublik Indonesia
3. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan :
   - Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikor kinerja yang sudah ditentukan dalam Review Renstra 2019-2024, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong

No.	Sasaran Strategis Stlh Review	Indikator Kinerja	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas Kecamatan	Nilai AKIP	Baik	Baik			Baik	Baik			
		Persentase Pelayanan Kependudukan Tepat waktu	100%	100%			91%	72%			
		Persentase layanan umum lainnya tepat waktu	100%	100%			100%	90%			
2.	Meningkatnya kinerja tugas umum pemerintahan (TUP) Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	Baik	Baik			Tidak ada penilaian	Belum ada penilaian			
		Persentase Temuan Inspektorat/ BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%			100%	100%			
3.	Meningkatnya kemandirian Desa	Persentase Desa Berkembang	50%	60%			100%	100%			

Kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas diantaranya dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Berdasarkan data pada tabel 2.3, secara umum pelaksanaan sebagian besar kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait capaian kinerja sampai dengan triwulan II dan memerlukan tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Beberapa indikator kinerja baik program, kegiatan dan sub kegiatan Renja 2024 belum seluruhnya selaras dengan Perubahan Renstra 2019-2024 yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena penyusunan Renja 2024 dilakukan sebelum ditetapkannya Perubahan Renstra pada tanggal 24 Desember 2021. Dalam hal ini perlu

dilakukan penyesuaian indikator kinerja pada Renja agar selaras dengan Perubahan Renstra.

2. Masih terdapat rincian belanja yang masuk pada sub kegiatan yang tidak tepat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian/pemindahan belanja dari sub kegiatan satu ke sub kegiatan lainnya yang sesuai.
3. Masih terdapat hambatan terkait upaya pemenuhan laporan penunjang nilai AKIP, diantaranya belum tepat waktunya pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi dari Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar dari dilakukannya evaluasi kinerja. Selain itu pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dan rencana aksi juga belum sepenuhnya berjalan dengan baik

Kabupaten Tabalong telah berhasil meraih prestasi sebagai salah satu Kabupaten Terinovatif peringkat keempat se-Indonesia pada penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kemendagri.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tanta

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, maka Kecamatan Tanta mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Kedudukan Kecamatan
   1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
   2. Kecamatan dipimpin oleh Camat.
   3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris daerah.

b. Tugas Pokok Kecamatan

   Kecamatan Tanta memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebaagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

c. Fungsi Kecamatan

   Fungsi Kecamatan Tanta adalah sebagai pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pengkoordinasian pelayanan administrasi publik dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka Camat selaku kepala PD dibantu oleh Sekretaris Camat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, disamping membawahi 4 (empat) Seksi yang terdiri dari : Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum. Berikut adalah susunan organisasi di Kecamatan Tanta

Tabel : Susunan Organisasi Kecamatan Tanta

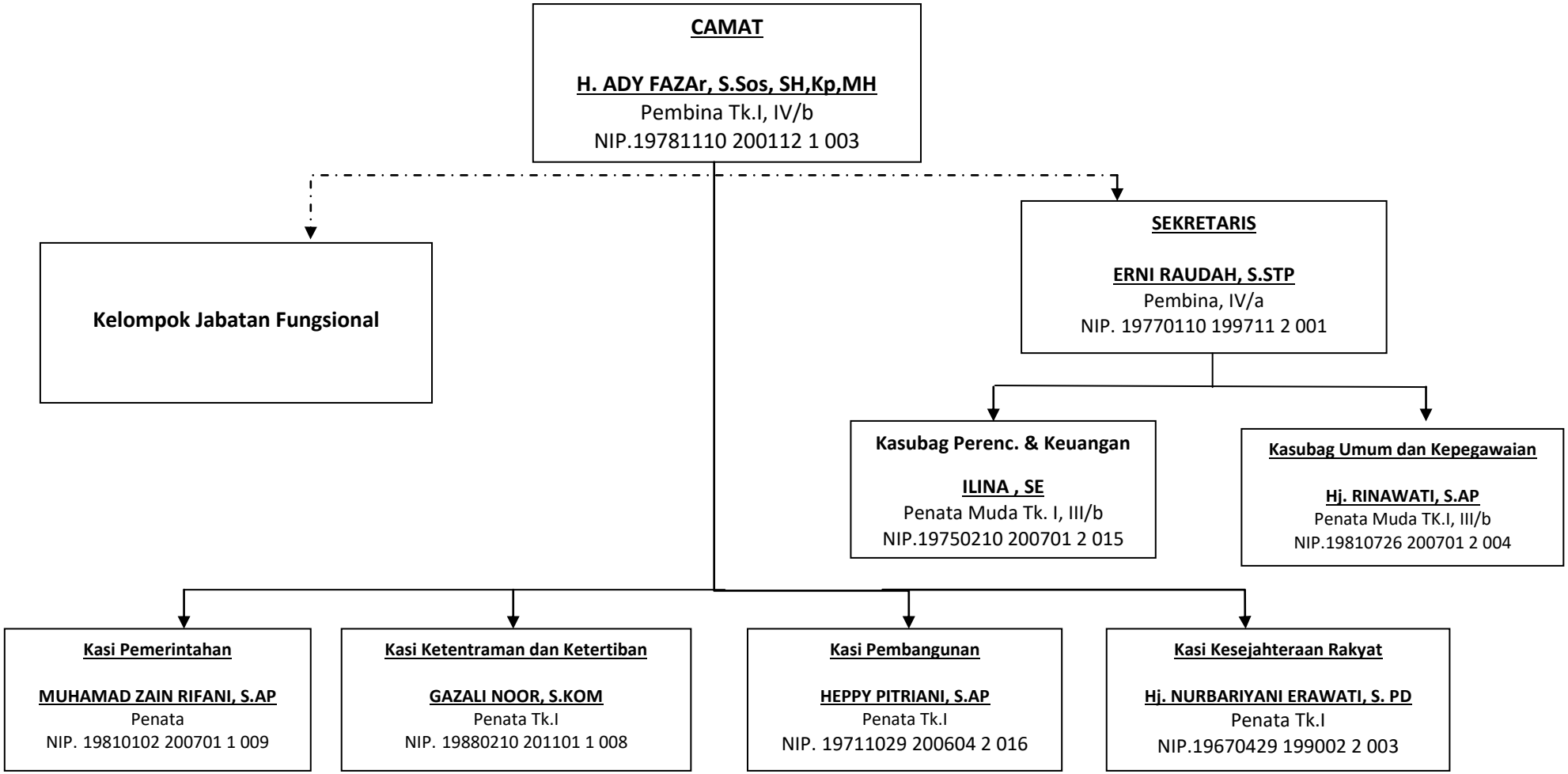

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka misi yang akan ditempuh Kecamatan Tanta adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Tabalong yang lebih agamis melalui kebijakan pembangunan yang diarahkan agar tercapai masyarakat madani yang beretika dan bermoral melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, memperkuat kelembagaan keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan sehingga akan terwujud kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia (Tabalong Berkualitas).
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong dengan mengawal pembangunan yang diarahkan agar masyarakat berkemampuan lebih dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya melalui kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara signifikan, serta penurunan angka kemiskinan secara nyata (Tabalong Sejahtera).
3. Mewujudkan kemandirian daerah Kabupaten Tabalong melalui pembangunan yang diarahkan pada tercapainya system yang handal dan dinamis yang mampu

   bertindak sesuai keadaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bijak melalui penguatan kelembagaan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan untuk menciptakan kemajuan perekonomian daerah yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas (Tabalong Mandiri).

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala dan kelemahan yang dihadapi oleh Kecamatan Tanta dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, diantaranya :

1. Kualitas SDM yang belum memadai terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi sehingga mempengaruhi terhadap kelancaran penyelesaian tugas pekerjaan, hal lain adalah pola budaya kerja yang cenderung pasif dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Belum optimalnya pola sistem administrasi perkantoran dan administrasi kepegawaian yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan

perundang-undangan, yang mana hal ini dapat menghambat kelancaran tugas pekerjaan.

3. Masih minimnya koordinasi antar instansi/ unit kerja/ instansi vertikal yang ada di Kecamatan dalam upaya peningkatan pembangunan di Kecamatan.
4. Belum tersedianya dokumen standar pelayanan publik dan atau standar operasional prosedur (SOP) di Kecamatan Tanta, hal ini berdampak pada pola pelayanan yang belum terstandar dengan baik.
5. Kualitas SDM yang belum memadai terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi sehingga mempengaruhi terhadap kelancaran penyelesaian tugas pekerjaan, hal lain adalah pola budaya kerja yang cenderung pasif dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
6. Belum optimalnya pola sistem administrasi perkantoran dan administrasi kepegawaian yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, yang mana hal ini dapat menghambat kelancaran tugas pekerjaan.
7. Masih minimnya koordinasi antar instansi / unit kerja / instansi vertikal yang ada di Kecamatan dalam upaya peningkatan pembangunan di Kecamatan.
8. Belum tersedianya dokumen standar pelayanan publik dan atau standar operasional prosedur (SOP) di Kecamatan Tanta, hal ini berdampak pada pola pelayanan yang belum terstandar dengan baik.

Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Regulasi dan kebijakan yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut. Adapun implementasi kebijakan yang perlu diperhatikan diantaranya kebijakan terkait :

a. Penyetaraan jabatan dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 17 Tahun 2021.
b. Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah berdasar Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021.
c. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021.
d. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021.

e. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.
f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Review terhadap rancangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kecamatan Tanta.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Perubahan tahun 2024
Kabupaten Tabalong

Kecamatan Tanta

NO	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**Nilai AKIP**		**2.465.974.500**					**3.689.111.114**	
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanta	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	22 Dokumen	10.250.483		Kec. Tanta	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	22 Dokumen	10.250.483	
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tanta	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun	20 Dokumen	3.226.617.000		Kec. Tanta	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun	20 Dokumen	3.226.617.000	

	3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tanta	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	334.395.043		Kec. Tanta	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	572.510.646	Bertambahnya Belanja Peralatan dan sppd
	4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah		Persentase Terpenuhinya Barang milik daerah penujang Urusan Pemerintah daerah	100%	83.992.000		Kec. Tanta	Persentase Terpenuhinya Barang milik daerah penujang Urusan Pemerintah daerah	100%	91.745.856	Bertambahnya belanja jasa perencanaan
	4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanta	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	266.973.000		Kec. Tanta	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	267.273.000	
	5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanta	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	110.709.000		Kec. Tanta	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	252.722.000	Berambahnya Belanja Modal Plafond Dan Parkir
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan**		106.470.274				**Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarak**		

									atan		
	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tanta	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Laporan	86.493.186		Kec. Tanta	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Laporan	164.648.241	Bertambah belanjaunan kontruksi, makan minum sewa dan sppd
	2	Penyelanggaran Urusan Pemeritahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan		Jumlah Laporan Urusan Pemeritahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan		19.977.088		Kec. Tanta	Jumlah Laporan Urusan Pemeritahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan		0	
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**		**120.730 .000**				**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**	**207.493.086**	
	1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Tanta	Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 laporan	**120.730 .000**		Kec. Tanta	Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai	1 laporan	207.493.086	bertambahnya belanja makan minum, sewa dan perjalanan dinas

									penugasan kepala daerah			
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas Aparatur dan Tata Kelola Kewilayahan Desa**		91.055.769				**Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas Aparatur dan Tata Kelola Kewilayahan Desa**		
	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tanta	Jumlah Pemerintah Desa yang dibina / diberdayakan	14 Desa			Kec. Tanta	Jumlah Pemerintah Desa yang dibina / diberdayakan	14 Desa	14.977.088	perubahan program dan berkurangnya sppd
	2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	14 Desa	91.055.769		Kec. Tanta	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	14 Desa	107.125.769	bertambahnya sppd dan hadiah bersifat perlombaan

5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**50.304.435**				**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**50.304.435**	
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tanta	Jumlah Pemerintahan Desa yang di bina dan di awasi	14 Desa	**50.304.435**		Kec. Tanta	Jumlah Pemerintahan Desa yang di bina dan di awasi	14 Desa	**50.304.435**	
6	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**94.999.996**					**89.750.395**	
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tanta	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	14 patroli terpadu	**94.999.996**		Kec. Tanta	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	14 patroli terpadu	89.750.395	Berkurangnya Jumlah Sppd , SPanduk dan foocoy
JUMLAH PAGU KEBUTUHAN TAHUN 2024 BERDASARKAN ANALISIS						**4.629.915.000**					**5.221.511.000**	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program-program pembangunan dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam rangka percepatan proses pembangunan. Adapun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong terdiri dari 6 program, 12 kegiatan dan 24 subkegiatan sebagai berikut :

Program	:	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**
Kegiatan 1	:	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Sub Kegiatan	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan 2	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan 3	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan 4	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kegiatan 5	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan 6	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Program	**:**	**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
Kegiatan	:	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Kegiatan	:	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Sub Kegiatan	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Program		**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
Kegiatan	:	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Sub Kegiatan	1	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
Program		**KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
Kegiatan	:	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Program		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
Program		**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
Kegiatan	:	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan	1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
	2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

TABEL.4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2024				Kondisi kinerja pada akhir priode renstra SKPD	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
Administrasi Pemerintahan									
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Nilai AKIP**	**Kec. Tanta**	**A**	**4.032.936.526-**	APBD	A	**A**	**4.242.477.781**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanta	10 Dokumen	**10.250.500,-**	APBD	100%	**10 Dokumen**	**11.788.075**
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanta	2 Dokumen	1.849.387	APBD	100%	2 Dokumen	2.126.925
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Tanta	2 Dokumen	1.000.266,-	APBD	100%	2 Dokumen	1.157.000
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Kec. Tanta	2 Dokumen	1.850.392,-	APBD	100%	2 Dokumen	2.128.075
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Tanta	2 Dokumen	1.800.000,-	APBD	100%	2 Dokumen	2.070.000

7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanta	1 Dokumen	1.900.000,-	APBD	100%	1 Dokumen	2.185.000
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanta	1 Dokumen	1.850.500,-	APBD	100%	1 Dokumen	2.128.075
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tanta	14 bulan	**3.226.617.000,-**	APBD	100%	14 Bulan	**3.710.609.550**
7.01.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanta	14 bulan	**3.226.617.000**,-,-	APBD	100%	14 bulan	**3.226.617.000**
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	Kec. Tanta	100%	**334.395.043.-**	APBD	100%	100%	**436.943.425**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket dokumen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kec. Tanta	100%	-	APBD	100%	24 Paket	10.629.780
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tanta	10 paket	83.463.998,-	APBD	100%	30 paket	100.486.714
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Tanta	4 paket	15.195.500,-	APBD	100%	4 paket	17.326.931
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tanta	10 paket	15.003.545,-	APBD	100%	3 paket	12.898.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tanta	2 Dokumen	3.500.000,-	APBD	100%	2 dokumen	5.500.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanta	22 Laporan	217.232.000,-	APBD	100%	12 laporan	290.102.000
27.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Tersedianya Saranan dan Prsaranan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tanta	1 Unit	83.992.000	APBD		4 laporan	646.963.953

Kec. Tanta	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kec. Tanta			APBD		12 unit	41.729.884
Kec. Tanta	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	jumlah unit dan mesin yang disediakan	Kec. Tanta			APBD		2 unit	10.608.069
7.01.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukug Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tanta	1 Unit	83.992.000	APBD		1 unit	594.626.000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	Kec. Tanta	12 bulan	**266.973.000**,-	APBD			**286.413.000.**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Tanta	12 Laporan	50.700.000,-	APBD	100%	4 Laporan	54.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Tanta	12 Laporan	216.273.000,-	APBD	100%	6 Laporan	232.413.000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tanta	100	**253.182.000,-**	APBD		35 unit	**251.055.350**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum	Kec. Tanta	12 unit	110.709.000,-	APBD	100%	13 unit	186.942.475
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kec. Tanta			APBD	100%	35 unit	29.640.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	100%	142.473.000,-	APBD	100%	2 unit	46.742.475,-

7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	Kec. Tanta	85	**106.470.274,-**	APBD	73,96	73,96	141.412.540
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di**	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat	Kec. Tanta	**3 laporan**	**86.493.186,-**	APBD	100%	3 laporan	141.412.540

	Tingkat Kecamatan	kecamatan							
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tanta	**3 laporan**	**86.493.186,-**	APBD	100%	3 laporan	141.412.540
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tanta	14 Laporan	**19.977.088,-**				
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanta	100%	**19.977.088,-**				
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	Kec. Tanta	100	**91.055.769,-**	APBD		100	99.387.000
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tanta			APBD	100%	14 Laporan	99.387.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanta			APBD	100%	100%	16.140.000
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di desa	Kec. Tanta			APBD	5 lembaga kemasyarakatan	14 laporan	2.310.0000
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan **Kelurahan**	Kec. Tanta	**100 Keluarga**	**91.055.769,-**	APBD	100%	**100** Keluarga	80.937.000
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Tanta	100 Keluarga	**91.055.769,-**	APBD	100%	**100** Keluarga	80.937.000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan	Kec. Tanta	100	94.999.996,-	APBD	97,54	97,54	97.700.000

7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tanta	14 Laporan	94.999.996,-	APBD	100%	100%	97.700.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanta	14 Laporan	94.999.996,-	APBD	100%	100%	97.700.000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	Kec. Tanta	80	120.730.000,	APBD	80	80	137.836.810
7.01.05.2,01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Tanta	100 Orang	120.730.000,	APBD	80	80	137.836.810
7.01.05.2,01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tanta	100 Orang	120.730.000,-	APBD	100%	100 Orang	137.836.810
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Tanta	80	**50.304.435,-**	APBD	100	14 Laporan	72.346.792
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Tanta	14 Laporan	**50.304.435,-**	APBD	100%	14 Laporan	72.346.792
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Tanta	14 Laporan	48.320.751,-	APBD	100%	14 Dokumen	48.050.000
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan	Jumlah Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan	Kec. Tanta			APBD	100	14 Laporan	20.111.192

	Desa	Desa							
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya	Jumlah Laporan Hasil koordinasi pendampingan desa diwilayhanya	Kec. Tanta			APBD	100	14 Laporan	1.890.600
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec Tanta	14 Laporan	1.983.684,-	APBD	100%	100%	2,295.000
Proram : 6 Kegiatan : 13 Sub Kegiatan : 31									
Jumlah Total					**4.496.497.000.,-**				**5.360.763.926,-**

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong tahun 2024 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisein.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Tanta. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024, Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Selain itu Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Melalui Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Tanta, Agustus 2024

CAMAT TANTA

H. ADY FAZAR, S.Sos, S.H, M.H,Kp

NIP. 19781110 200112 1 003

RENCANA KERJA
KECAMATAN MURUNG PUDAK
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

KECAMATAN MURUNG PUDAK

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL……..... ii

DAFTAR GAMBAR..... iii

BAB I PENDAHULUAN …….. 1

1.1 Latar Belakang ……..…….. 4

1.2 Landasan Hukum ...……... 6

1.3 Maksud dan Tujuan ……... 7

1.4 Sistematika Penulisan …… 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MURUNG PUDAK TAHUN 2022…….. 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Murung Pudak Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Murung Pudak 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Murung Pudak .....……...14

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Murung Pudak …...……...… 15

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD…… 18

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …… 36

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 ...……. 39

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..... 39

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Murung Pudak…… 41

3.3 Program dan Kegiatan ……. 43

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MURUNG PUDAK TAHUN 2024…….. 49

BAB V PENUTUP…… 58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d tahun 2022…….	10
Tabel 2.2	Realisasi Keuangan Kecamatan Murung Pudak Anggaran Tahun Anggaran 2022 …..……	13
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja PD Kecamatan Murung Pudak Tahun Anggara……	15
Tabel 2.4	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Murung Pudak Tahun 2024…….	20
Tabel 2.5	Rekapitulasi Jumlah Usulan Musrenbang Kecamatan Murung Pudak ……	38
Tabel 3.1	Rencana Kerja, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Murung pudak Tahun 2024 ……..…	43
Tabel 3.2	Sasaran, Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Murung Pudak Tahun Anggaran 2024…….	44
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025……..	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Kecamatan Murung Pudak …… 17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka Kantor Kecamatan Murung Pudak sebagai salah satu

Perangkat Daerah (PD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja Kecamatan Murung Pudak tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan estimasi dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, menjadi dasar hukum bagi Kecamatan Murung Pudak sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang ada dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tabalong.Agar pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab urusan tersebut berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten, perlu dibuat langkah-langkah perencanaan yang terencana dan berkesinambungan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi kepemerintahan Kecamatan.

Renja Kecamatan Murung Pudak tahun 2024 merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Murung Pudak untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di 14 desa yang ada di wilayah Kecamatan MURUNG PUDAK, sekaligus juga merupakan penjabaran Visi, Misi Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Murung Pudak mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan tema RKPD Kabupaten Tabalong tahun 2024 yakni **“PENGUATAN DAYA SAING DAERAH UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS ”** maka di tahun 2024

Kantor Kecamatan Murung Pudak memprioritaskan kegiatan untuk melakukan :

1. Meningkatkan kualitas dan daya saling Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Memperkuat ketahanan ekonomi melalui diversifikasi ekonomi ;
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar;
4. Menjaga kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
5. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaannya, keberhasilan ataupun tidaknya Renja PD ini tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat di wilayah Kecamatan Murung Pudak.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja, dan Tata Cata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.
17. Peraturan Daerah No.05 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Tabalong.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk 1 (satu) tahun yang merupakan implementasi dari Renstra Perangkat Daerah 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupaan bermasyarakat sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di Perangkat Daerah.

Adapun Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Perangkat Daerah.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.

4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MURUNG PUDAK TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Murung Pudak Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Murung Pudak
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Murung Pudak
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Murung Pudak
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MURUNG PUDAK
- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MURUNG PUDAK TAHUN 2024

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja, Capaian Renstra Kecamatan Murung Pudak Tahun 2022

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kantor Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tahun lalu sampai tahun berjalan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

a. Belanja Pegawai

Realisasi anggaran Belanja Pegawai Kecamatan Murung Pudak untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Rasio Realisasi
1.	Gaji dan Tunjangan PNS	4.856.050.000,-	4.485.675.237	92,37%
Jumlah		**4.856.050.000,-**	**4.485.675.237,-**	**92,37%**

b. Belanja Barang Jasa

Belanja Barang Jasa untuk tahun 2022 terdiri atas Program dan kegiatan dengan realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kantor Kecamatan MURUNG PUDAK Kabupaten Tabalong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi target Kinerja Hasil Program &Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program & Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota**	**Nilai AKIP**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**			
7.01.01.2.01	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%			
7.01.01.2.02	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
7.01.01.2.03	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%			
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %			
7.01.01.2.07	5. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah alat yang dibeli	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100 %			

7.01.01.2.08	6. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Derah	Persentasi tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
7.01.01.2.09	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%			
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**			
7.01.02. 2.01	8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%			
7.01.02.2.02	9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pelayanan yang tidak dilaksanakan Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
7.01.02.2.04	10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	75 %	75 %	75 %	75 %	85%			
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentasi Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas Aparatur dan Tata Kelola Kewilayahan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**			
7.01.03.2.01	11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemerintahan desa yang dibina / diberdayakan	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	100%			
7.01.03.2.02	12. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemerintahan Kelurahan yang dibina / diberdayakan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	100 %			

7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentasi Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas Aparatur dan Tata Kelola Kewilayahan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**			
7.01.04.2.02	13. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 patroli terpadu	12 patroli terpadu	12 patroli terpadu	12 patroli terpadu	100%			
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum**	**Persentasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**			
7.01.05.2.01	14. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%			
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**			
7.01.06.2.01	15. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah pemerintahan desa yang diawasi dan dibina	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	100%			

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kantor Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dapat dilihat realisasi kinerja pada tahun 2022 secara umum tercapai sesuai target, namun target dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 serta perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan dikarenakan adanya perbedaan nomenklatur program dan kegiatan tahun 2022.

Kinerja Kantor Kecamatan Murung Pudak tahun 2022 tercermin dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD), diantaranya dapat dilihat dari:

Tabel. 2.2

Realisasi Keuangan Kecamatan Murung Pudak Tahun 2022

No.	Nama Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
1.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	7,722,455,302	7,031,973,003	690,482,299	91
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.713.299	10.936.000	777.299	94
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.857.800.012	4.487.201.937	370.598.075	93
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1.518.184	0	1.518.184	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	570.037.068	404.140.837	165.896.231	71
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	637.767.232	596.226.745	41.540.487	94
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.056.389.752	1.009.082.187	47.307.565	96
	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	587.229.755	524.385.297	62.844.458	90
2.	Program Penyeleggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	858,215,521	790,170,121	68,045,400	92
	Koordinasi Penyelengggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	297.233.224	252.738.921	44.494.303	85
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan	388.987.297	368.681.200	20.306.097	95
	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat	171.995.000	168.750.000	3.245.000	99

3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	426,538,093	19,330,500	407,207,593	5
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.642.968	12.580.500	2,062,468	86
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	411.895.125	6.750.000	405.145.125	2
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	256.033.481	189.621.623	66.411.858	74
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	256.033.481	189.621.623	66.411.858	74
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11.902.848	3.401.000	8.501.848	29
	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.902.848	3.401.000	8.501.848	29
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.251.000	18.651.000	1.600.000	92
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.251.000	18.651.000	1.600.000	92
J u m l a h		**9.295.396.245**	**8.053.147.247**	**1.242.248.998**	**86,64**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 capaian realisasi keuangan Kantor Kecamatan Murung Pudak yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan berjumlah sebesar **Rp. 8.053.147.247,-** atau sebesar 86,64 % dari total pagu anggaran yang telah disediakan yakni **Rp. 9.295.396.245,-**

Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kantor Kecamatan Murung Pudak yang diperoleh dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sampai dengan akhir tahun 2022 berjumlah **Rp.0,-** atau sebesar 0% dari jumlah pendapatan yang ditargetkan yakni sebesar **Rp. 0,-**.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Murung Pudak

Analisis kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikor kinerja yang sudah ditentukan dalam Review Renstra 2019-2024, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel.2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong

No.	Sasaran Strategis stlh Reviu	Indikator Kinerja	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n)	Tahun 2023 (Thn n+1)	Tahun 2024 (Thn n+1	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Kehidupan bermasyarakat	Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan)		100	100	100	100	100	100			
2.	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dan Desa dalam pembangunan Wilayah	Tingkat Ketertiban Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan		70	75	80	85	100	100			
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerinatahan Umum	Nilai AKIP Kecamatan		B	B	BB	BB	B	B			
		Persentasi Layanan Umum Lainya Tepat Waktu		70	75	80	85	100	100			

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Murung Pudak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, maka Kecamatan Murung Pudak mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Kedudukan Kecamatan
   1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
   2. Kecamatan dipimpin oleh Camat.
   3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris daerah.

b. Tugas Pokok Kecamatan

   Kecamatan Murung Pudak memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

c. Fungsi Kecamatan

   Fungsi Kecamatan Murung Pudak adalah sebagai pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pengkoordinasian pelayanan administrasi publik dan

pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka Camat selaku kepala PD dibantu oleh Sekretaris Camat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, disamping membawahi 4 (empat) Seksi yang terdiri dari : Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum. Berikut adalah susunan organisasi di Kecamatan Murung Pudak :

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG

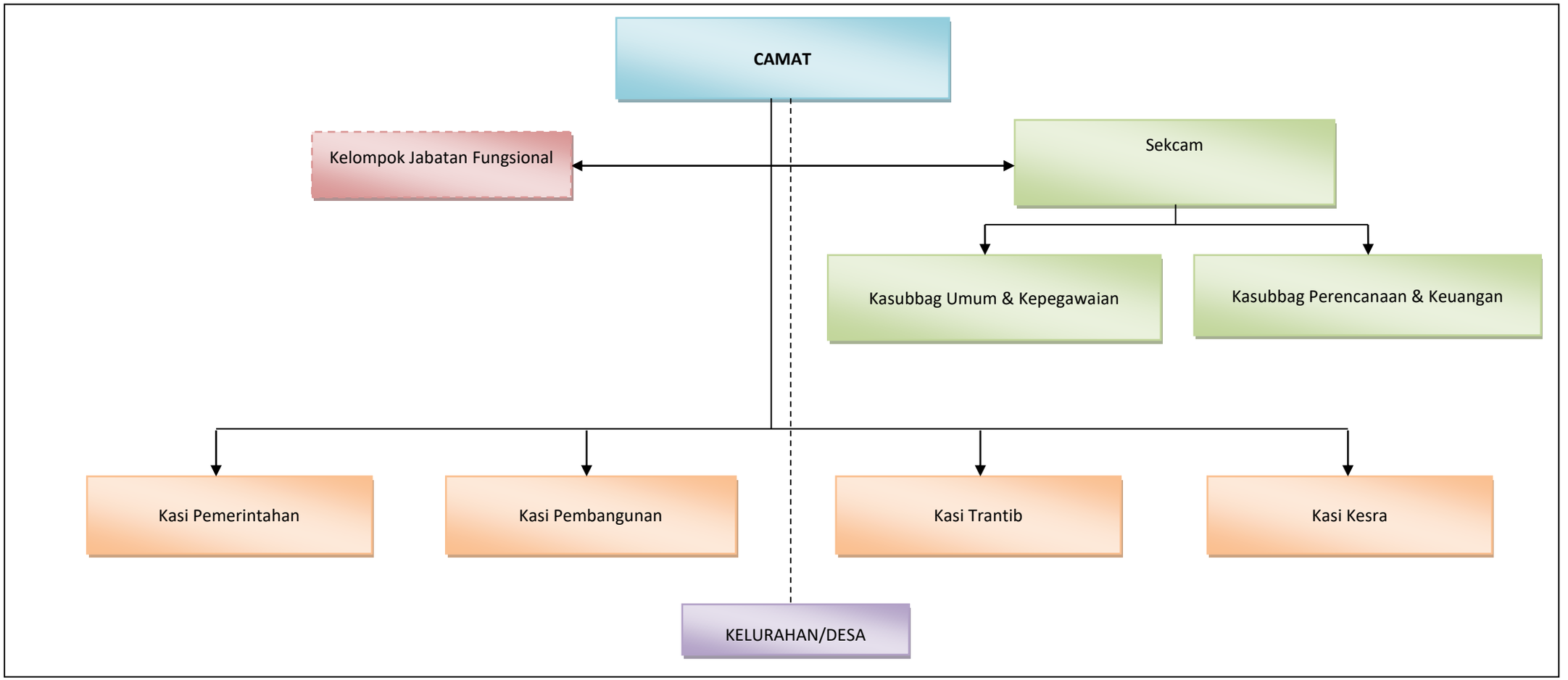

Sumber :Bagian Kepegawaian Kantor Kecamatan Murung Pudak,2021

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Tabalong **"Menuju Tabalong yang lebih agamis, sejahtera dan mandiri"**, maka misi yang akan ditempuh Kecamatan Murung Pudak adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Tabalong yang lebih agamis melalui kebijakan pembangunan yang diarahkan agar tercapai masyarakat madani yang beretika dan bermoral melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, memperkuat kelembagaan keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan sehingga akan terwujud kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia (Tabalong Berkualitas).
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong dengan mengawal pembangunan yang diarahkan agar masyarakat berkemampuan lebih dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya melalui kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara signifikan, serta penurunan angka kemiskinan secara nyata (Tabalong Sejahtera).
3. Mewujudkan kemandirian daerah Kabupaten Tabalong melalui pembangunan yang diarahkan pada tercapainya system yang handal dan dinamis yang mampu bertindak sesuai keadaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bijak melalui penguatan kelembagaan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan untuk menciptakan kemajuan perekonomian daerah yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas (Tabalong Mandiri).

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala dan kelemahan yang dihadapi oleh Kecamatan Murung Pudak dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, diantaranya:

1. Kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan,Kelurahan maupun Desa yang masih belum optimal, yang disebabkan rendahnya sumber daya aparatur Kecamatan,Kelurahan dan Desa serta minimnya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bimtek/pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan,Kelurahan maupun Desa.
2. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor Kecamatan Murung Pudak sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal. Selain itu bangunan gedung kantor yang telah dimakan usia, ruang kerja yang sempit, panas dan terkesan seadanya menyebabkan kurang nyamannya dalam bekerja.
3. Tidak tersedianya Aula / tempat pertemuan yang refresentatif untuk acara –acara/ Rapat Koordinasi tingkat Kecamatan.
4. Jaringan internet yang kurang stabil dan sering tidak terkoneksi dengan baik di Kecamatan Murung Pudak sehingga sering kali cukup menyulitkan dalam penyampaian sistem informasi data berbasis internet.
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembuatan perizinan mendirikan bangunan (IMB), perizinan tempat usaha, perizinan rumah burung wallet maupun kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
6. Minimnya anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Murung Pudak.

Disamping kendala dan kelemahan yang ada, Kecamatan Murung Pudak juga memiliki beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Murung Pudak dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Murung Pudak, diantaranya :

1. Adanya struktur organisasi yang terpola.
2. Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat.
3. Jumlah aparat Kecamatan Murung Pudak yang memadai.
4. Suasana kerja di Kecamatan Murung Pudak yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok *(team work)*.
5. Adanya koordinasi di Wilayah Kecamatan Murung Pudak yang baik.

Adapun isu-isu penting lainnya yang ada di Kecamatan Murung Pudak adalah sebagai berikut:

1. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

   Kecamatan Murung Pudak merupakan kawasan perkotaan yang terindikasi memiliki Kawasan kumuh disebagian Desa dan Kelurahan. Untuk mengurangi kekumuhan, mindset masyarakat perlu diubah sehingga tercipta kota tanpa kumuh
2. Bidang Pemerintahan

   Berlakunya UU Desa yang menuntut aparat kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar desa lebih optimal melaksanakan amanat UU Desa tersebut.
3. Bidang Pelayanan

   Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima menjadikan kecamatan Murung Pudak untuk selalu berinovasi agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan
4. Bidang Pertanian

   Alih fungsi lahan merupakan masalah yang mulai mencuat di wilayah Murung Pudak. Para pengembang mulai melirik tanah pertanian di Kecamatan Murung Pudak untuk dijadikan perumahan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kecamatan Murung Pudak.

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Kabupaten Tabalong

Kecamatan Murung Pudak

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)**	**Kecamatan Murung Pudak**	**100 Persen**	**433.132.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Laporan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Murung Pudak**	**12 Laporan**	**67,889,769**	
7.01.04.2.01	*1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan*	*Kecamatan Murung Pudak*	*12 Patroli Terpadu*	433.132.000	*1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Kecamatan Murung Pudak*	*12 Laporan*	67,889,769	
	- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	*Kecamatan Murung Pudak*	*12 Patroli Terpadu*	433.132.000	- *Sinergitasdengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional*	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	*Kecamatan Murung Pudak*	*12 Laporan*	67,889,769	*Sub Kegiatan ini hanya ada dikecamatan saja untuk tahun 2024*

	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					*Indonesia dan Instansi* *Vertikal di Wilayah* *Kecamatan*					
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Ketertiban Masyarakat dalam Perencanan Pembangunan**	**Kecamatan Murung Pudak**	**100%**	**4,276,101,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa**	**Kecamatan Murung Pudak**	**100 %**	**4.485.278.135**	
7.01.03.2.01	*2 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Jumlah Pemerintah Desa yang dibina / diberdayakan*	*Kecamatan Murung Pudak*	5 Desa	68,561,579	*2 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Kecamatan Murung Pudak*	5 Desa	**69.169.000**	
7.01.03.2 .01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Kecamatan Murung Pudak*	5 Desa	68,561,579	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Kecamatan Murung Pudak*	5 Desa	**69.169.000**	
7.01.03.2 .02	*3 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	*Jumlah Pemerintah Kelurahan yang dibina / diberdayakan*	*Kecamatan Murung Pudak*	*5 Kelurahan*	4,207,539,421	*3 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	*Jumlah Kelurahan yang mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	*Kecamatan Murung Pudak*	*5 Kelurahan*	4.209.539.421	

7.01.03.2.02.01	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Kecamatan Murung Pudak*	*5 desa*	24.057.917	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Kecamatan Murung Pudak*	*5 desa*	24.057.917	
7.01.03.2.02.02	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	*Kecamatan Murung Pudak*	*5 unit*	3.583.523.202	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	*Kecamatan Murung Pudak*	*5 unit*	3.583.523.202	
7.01.03.2.02.03	- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Kecamatan Murung Pudak*	*5 pokmas*	592.458.302	- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Kecamatan Murung Pudak*	*5 pokmas*	592.458.302	
7.01.03.2.02.04	- Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	*Kecamatan Murung Pudak*	*5 laporan*	7,500,000	- Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	*Kecamatan Murung Pudak*	*5 laporan*	9.500.000	*Penambahan anggaran untuk Rapat dan belanja cetak*

7.01.03.2.06	*4*	*Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	*Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	*Kecamatan Murung Pudak*	*100 Keluarga*	0	*4*	*Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	*Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	*Kecamatan Murung Pudak*	*1 00 Keluarga*	206,569,714	*Penambahan anggaran untuk kegiatan PKK di Kecamatan dan kelurahan*
7.01.03.2.06.12	-	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan	*Kecamatan Murung Pudak*	*100 Keluarga*	0	-	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan	*Kecamatan Murung Pudak*	*1 00 Keluarga*	206,569,714	*Penambahan anggaran untuk kegiatan PKK di Kecamatan dan kelurahan*
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		*Kecamatan Murung Pudak*		56,051,000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		*Kecamatan Murung Pudak*		71.851.000	
7.01.05.2.01	*5*	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan*	*Kecamatan Murung Pudak*	*12 dokumen*	56,051,000	*5*	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Jumlah dokumen penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*	*Kecamatan Murung Pudak*	*12 Dokumen*	**71.851.000**	

7.01.05.2.01.01	- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	*Kecamatan Murung* Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	*100 orang*	56,051,000	- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	*Kecamatan Murung Pudak*	100 orang	56.580.000	

7.01.05. 2.01.08	- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan	*Kecamatan Murung Pudak*	*12 dokumen*	0	- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan	*Murung Pudak*	*12 dokumen*	15.271.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Kecamatan Murung Pudak**	**83.9 Persen**	55,566,000	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Murung Pudak**	**12 Dokumen**	**33.796.000**	
7.01.06. 2.01	*6 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi*	*Kecamatan Murung Pudak*	*10 Desa / Kelurahan*	55,566,000	*6 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Kecamatan Murung Pudak*	*12 Dokumen*	**33.796.000**	
7.01.06. 2.01.02	- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Kecamatan Murung Pudak*	*5 desa / kelurahan*	45,316,000	- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Kecamatan Murung Pudak*	*5 desa / kelurahan*	16.121.000	

7.01.06.2.01.03	- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa	*Kecamatan Murung Pudak*	*5 desa / kelurahan*	10,250,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa	*Kecamatan Murung Pudak5 desa / kelurahan*	*5 desa / kelurahan*	17.675.000	*Penambahan anggaran pembinaan kedesa*
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan**	**Kecamatan Murung Pudak**	**73.83 Persen**	782,413,000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan**	**Kecamatan Murung Pudak**	**100%**	**828.271.000**	
07.01.02.2.01	*7 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan*	*Kecamatan Murung Pudak*	*10 Laporan*	243.123.500	*7 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan*	*Kecamatan Murung Pudak*	*Laporan*	243.123.500	
07.01.02.2.01.01	- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	*Kecamatan Murung Pudak*	*12 laporan*	55.428.304	- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	*Kecamatan Murung Pudak*	*12 laporan*	55.428.304	
07.01.02.2.01.02	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Kecamatan Murung Pudak*	*5 dokumen*	187.695.196	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Kecamatan Murung Pudak*	*5 dokumen*	187.695.196	

7.01.02.2.02	***8***	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan***	**terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pelayanan yang tidak dilaksanakan Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	***Kecamatan Murung Pudak***	***12 Bulan***	**434.347.500**	***8***	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan***	***Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan***	***Kecamatan Murung Pudak***	***12 Laporan***	**434.347.500**	
7.01.02.2.02.03	-	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Kecamatan Murung Pudak*	*5 laporan*	434.347.500	-	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Kecamatan Murung Pudak*	*5 laporan*	434.347.500	
7.01.02.2.04	***9***	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang*** ***Dilimpahkan kepada Camat***	***Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat***	***Kecamatan Murung Pudak***	***80 %***	**104.942.000**	***9***	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahaan yang*** ***Dilimpahkan kepada***	***Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan***	***Kecamatan Murung Pudak***	***12 Dokumen***	**150,800,000**	**Belanja jasa tenaga survey 5 kelurahan**
7.01.02.2.04.01	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	*Kecamatan Murung Pudak*	*2500 lokasi*	104.942.000	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	*Kecamatan Murung Pudak*	*2500 lokasi*	**150,800,000**	Penambahan anggaran jasa survey tanah untuk 5 kelurahan

7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Kecamatan Murung Pudak**	**BB Indeks**	6,429,235,000	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Evaluasi Nilai AKIP**	**Kecamatan Murung Pudak**	**B Nilai**	**10.187.997.097**	
7.01.01. 2.01	*10 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun*	*Kecamatan Murung Pudak*	*10 Dokumen*	9,550,000	*10 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun*	*Kecamatan Murung Pudak*	*10 Dokumen*	**9.661.000**	
7.01.01. 2.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Kecamatan Murung Pudak*	*4 dokumen*	2,000,000	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Kecamatan Murung Pudak*	*4 dokumen*	2.024.000	
7.01.01. 2.01.02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	*Kecamatan Murung Pudak*	*1 dokumen*	1,275,000	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	*Kecamatan Murung Pudak*	*1 dokumen*	1.288.000	
7.01.01. 2.01.03	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	*Kecamatan Murung Pudak*	*1 dokumen*	1,275,000	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	*Kecamatan Murung Pudak*	*1 dokumen*	1.288.000	

7.01.01. 2.01.04	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	*Kecamatan Murung Pudak*	*1 dokumen*	1,500,000	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	*Kecamatan Murung Pudak*	*1 dokumen*	1.516.000	
7.01.01. 2.01.05	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	*Kecamatan Murung Pudak*	*1 dokumen*	1,500,000	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	*Kecamatan Murung Pudak*	*1 dokumen*	1.516.000	
7.01.01. 2.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Kecamatan Murung Pudak*	*1 dokumen*	1,000,000	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Kecamatan Murung Pudak*	*1 dokumen*	1.019.000	

7.01.01. 2.01.07	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Kecamatan Murung Pudak*	*1 dokumen*	1,000,000	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Kecamatan Murung Pudak*	*1 dokumen*	1.010.000	
7.01.01. 2.02	*11*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun*	*Kecamatan Murung Pudak*		4,707,875,000	*11*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun*	*Kecamatan Murung Pudak*		7,430,256.215	*Penmabahan anggaran gaji dan tunjangan PNS*
7.01.01. 2.02.01	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Kecamatan Murung Pudak*	*26 Dokumen*	4,706,000,000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Kecamatan Murung Pudak*	*26 Dokumen*	7.428.363.215	*Penmabahan anggaran gaji dan tunjangan PNS*
7.01.01. 2.02.05	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	*Kecamatan Murung Pudak*	*1 dokumen*	1,275,000	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	*Kecamatan Murung Pudak*	*1 dokumen*	1.287.000	
7.01.01. 2.02.07	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	*Kecamatan Murung Pudak*	*4 dokumen*	600,000	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	*Kecamatan Murung Pudak*	*4 dokumen*	606.000	

7.01.01.2.03	*12*	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah yang disusun*	*Kecamatan Murung Pudak*	*3 Dokumen*	1,800,000	*12*	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Kecamatan Murung Pudak*	*12 Dokumen*	850,684	*Efisiensi anggaran*
7.01.01.2.03.01	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Kecamatan Murung Pudak*	*1 dokumen*	1,800,000	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Kecamatan Murung Pudak*		850.684	
7.01.01.2.06	*13*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kecamatan Murung Pudak*	*12 laporan*	389,364,346	*13*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kecamatan Murung Pudak*	*12 Laporan*	572.072.414	
7.01.01.2.06.01	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	*Kecamatan Murung Pudak*	6 paket	70.654.444	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	*Kecamatan Murung Pudak*	6 paket	70.654.444	
7.01.01.2.06.02	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Kecamatan Murung Pudak*	6 paket	149.160.549	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Kecamatan Murung Pudak*	6 paket	212.011.645	*Penambahan anggaran belanja atk,perlengkapan komputer*

7.01.01.2.06.05	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Kecamatan Murung Pudak*	6 paket	39.406.325	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Kecamatan Murung Pudak*	6 paket	39.406.325	
7.01.01.2.06.06	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Kecamatan Murung Pudak*	6 paket	0	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Kecamatan Murung Pudak*	6 paket	15.000.000	
7.01.01.2.06.09	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	*Kecamatan Murung Pudak*	150 laporan	130,143,028	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	*Kecamatan Murung Pudak*	160 laporan	235.000000	*Penambahan anggaran perjalanan dinas*
7.01.01.2.07	*14*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah alat yang dibeli*	*Kecamatan Murung Pudak*	6 paket	**0**	*14*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kecamatan Murung Pudak*	*Unit*	**383.500.000**	
7.01.01.2.07.05	-	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	*Kecamatan Murung Pudak*	*10 unit*	0	-	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	*Kecamatan Murung Pudak*	*100 unit*	25.000.000	

7.01.01.2.07.06	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	*Kecamatan Murung Pudak*	*6 unit*	0	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	*Kecamatan Murung Pudak*	*6 unit*	55.500.000	
7.01.01.2.07.07	-	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	*Kecamatan Murung Pudak*	*6 unit*	0	-	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	*Kecamatan Murung Pudak*	*6 unit*	23.000.000	
7.01.01.2.07.10	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	*Kecamatan Murung Pudak*	*6 unit*	0	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	*Kecamatan Murung Pudak*	*6 unit*	155.000.000	
7.01.01.2.07.11	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	*Kecamatan Murung Pudak*	*6 unit*	0	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	*Kecamatan Murung Pudak*	*6 unit*	125.000.000	
7.01.01.2.08	*15*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kecamatan Murung Pudak*	*100 %*	1,117,896,270	*15*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kecamatan Murung Pudak*	*12 Laporan*	1.460.488.640	

7.01.01.2.08.02	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	*Kecamatan Murung Pudak*	*12 laporan*	109,667,270		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	*Kecamatan Murung Pudak*	*12 laporan*	110.000.000	
7.01.01.2.08.04	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	*Kecamatan Murung Pudak*	*12 laporan*	1.008.229.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	*Kecamatan Murung Pudak*	*12 laporan*	1.350.488.640	*Penambahan anggaran makan m9num harian pegawai dan makan*
7.01.01.2.09	*16*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Jumlah alat yang dibeli	*Kecamatan Murung Pudak*		202,749,384	*16*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan*	*Jumlah Unit yang dipelihara dalam rangka Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan*	*Kecamatan Murung Pudak*		331.168.144	
7.01.01.2.09.01	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	*Kecamatan Murung Pudak*	*34 unit*	183.612.217	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	*Kecamatan Murung Pudak*	*34 unit*	214.467.211	*Penambahan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan bahan bakar minyak*
7.01.01.2.09.06	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*Kecamatan Murung Pudak*	*30 unit*	0	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*Kecamatan Murung Pudak*	*60 unit*	39.200.933	*Penambahan anggaran pemeliharaan peralatan kantor sepert laptop,printer dll*

7.01.01.2.09.09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Kecamatan Murung Pudak*	*1 unit*	0	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Kecamatan Murung Pudak*	*1 unit*	22.500.000	
7.01.01.2.09.10	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	*Kecamatan Murung Pudak*	*1 unit*	19.137.167	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	*Kecamatan Murung Pudak*	*6 unit*	55.000.000	*Penambahan anggaran pemeliharaan/rehab kantor kecamatan dan kelurahan*
JUMLAH					**12.032.498.000**	**JUMLAH**				**15.675.083.001**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan, Kecamatan Murung Pudak telah menyampaikan beberapa usulan pembangunan yang diperoleh dari Musrenbang Tingkat Desa maupun Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD yang menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kerja antar SKPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agara tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah diatur dalam Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif.

Tahapan musrenbang dapat diskriptifkan fungsi dan perencanaan serta kerangka waktu masing-masing tahapan musrenbang :

1. Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan adalah tahapan penggalian usulan program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini dibuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam rangka berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan (minggu II s/d minggu IV bulan januari). Musrenbang tingkat ini merupakan tahapan penentuan prioritas usulan program/kegiatan dari masing-masing RT/RW serta pengklasifikasian usulan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Musrenbang tingkat Kecamatan adalah tahapan pemantapan usulan program/kegiatan yang akana disampaikan pada forum SKPD. Pada tahap ini peranan SKPD sangat besar dalam membantu masyarakat memformulasikan usulan program/kegiatan mereka (minggu I bulan Februari)
3. Forum SKPD adalah tahapan sinkronisasi usulan program/kegiatan SKPD dengan usulan masyarakat hasil usulan Musrenbang Kecamatan. Pada tahap ini usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD sesuai misi dalam RPJMD. Minggu ke III bulan Februari).

4. Musrenbang tingkat Kabupaten adalah puncak dari pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten ini adalah tahapan finalisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang akan diimplementasikan masing-masing SKPD terkait. (minggu II bulan Maret).

Adapun usulan program dan kegiatan dari masyarakat Kecamatan Murung Pudak dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.5
REKAPITULASI JUMLAH USULAN MUSRENBANG
Kecamatan Murung Pudak

No	SKPD Pengampu	Total Usulan			Ket
		Usulan	Usulan dibatalkan	Jumlah	
1 .	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	12	1	13	Diteruskan ke Forum SKPD
2.	DINAS KESEHATAN	5	0	5	Diteruskan ke Forum SKPD
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	148	1	149	Diteruskan ke Forum SKPD
4.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	0	4	Diteruskan ke Forum SKPD
5.	DINAS SOSIAL	1	0	1	Diteruskan ke Forum SKPD
6.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3	0	3	Diteruskan ke Forum SKPD
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	2	0	2	Diteruskan ke Forum SKPD
8.	DINAS TENAGA KERJA	2	0	2	Diteruskan ke Forum SKPD
9.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	9	0	9	Diteruskan ke Forum SKPD
10.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL	3	0	3	Diteruskan

	DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				ke Forum SKPD
11.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10	0	10	Diteruskan ke Forum SKPD
12.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2	0	2	Diteruskan ke Forum SKPD
13.	DINAS PERHUBUNGAN	3	0	3	Diteruskan ke Forum SKPD
14.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2	0	2	Diteruskan ke Forum SKPD
15.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	3	0	3	Diteruskan ke Forum SKPD
16.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	0	1	Diteruskan ke Forum SKPD
17.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	7	1	8	Diteruskan ke Forum SKPD
18.	SEKRETARIAT DAERAH	16	0	16	Diteruskan ke Forum SKPD
Jumlah		**233**	**3**	**236**	Diteruskan ke Forum SKPD

Adapun usulan Musrenbang tingkat kelurahan dan desa se Kecamatan Murung Pudak Tahun 2023 RKP Daerah Kabupaten Tabalong untuk Jumlah Usulan Per Kegiatan Kecamatan Murung Pudak adalah untuk Infrastruktur sebanyak 155 Usulan, Ekonomi sebanyak 19 Usulan dan Pelayanan Publik sebanyak 59 Usulan untuk total keseluruhan sebanyak 233 Usulan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan**" telah ditetapkan 7 Prioritas Nasional

PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin

PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PN5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PN6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Berdasarkan Rancangan Prioritas Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024, yaitu :

1. Percepatan dan Pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor potensial dan produktif;
2. Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;
3. Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah sebagai serambi depan IKN dalam mendukung konektivitas dan jalur logistik:
4. Kualitas Pengelolaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima;
5. Peningkatan Kualitas lingkungan hidup.

Sedangkan arah kebijakan Kabupaten Tabalong tahun 2024 adalah:

1. Mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian, industri dan UMKM;
2. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang terampil; 3. Pengembangan pariwisata lokal dan ekonomi kreatif;
3. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian sebagai daerah penyangga IKN; Mendorong perkembangan UMKM dan tumbuhnya wira usaha baru;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui akses pelayanan dasar yang baik dan melalui gerakan masyarakat hidup sehat;

5. Peningkatan kualitas pendidikan;
6. Pengendalian prevalensi stunting;
7. Peningkatan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan; 10.Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa;
8. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan logistik sebagai penyangga IKN.
9. Penataan kota dan lingkungan permukiman.
10. Penguatan reformasi birokrasi.
11. Pengembangan satu data Tabalong.
12. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak.
13. Perencanaan pembangunan berbasis data dan kajian.
14. Pembangunan berwawasan lingkungan melalui tata kelola dan perlindungan lingkungan hidup

RENCANA SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024 SESUAI RPJMD KAB. TABALONG 2019-2024

1. Pertumbuhan Ekonomi : 4,0%
2. Persentase Penduduk Miskin : 5,55 %
3. Indeks Pembangunan Manusia : 75,07
4. Laju Inflasi : 1,14%
5. Indeks GINI : 0,28-0,30
6. Tingkat Pengangguran Terbuka : 3,05

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

1. Mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing sector pertanian,industri dan UMKM
2. Peningkatan sumber daya manusia,kesempatan kerja,penurunan kemiskinan dan pengangguran.
3. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang terampil.
4. Pengembangan pariwisata local beserta ekonomi kreatifnya.
5. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian sebagai daerah penyangga IKN.

6. Mendorong perkembangan UMKM dan tumbuh wira usaha baru.
7. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui gerakan masyarakat hidup sehat peningkatan kualitas tenaga kerja yang terampil.
8. Peningkatan kualitas pendidikan
9. Peningkatan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.
10. Pengendalian prevalensi stunting.
11. Peningkatan pemberdayaan masyarkata desa.
12. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan logistic sebagai penyangga IKN.
13. Penataan kota dan lingkungan permukiman.
14. Penguatan reformasi birokrasi
15. Pengembangan satu data Tabalong.
16. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak.
17. Perencanaan pembangunan berbasis data dan kajian
18. Pembangunan berwawasan lingkungan melalui tata kelola dan perlindungan lingkungan hidup.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Murung Pudak

Berdasarkan Visi Bupati Tabalong periode 2020–2024 yakni **"Menuju Kabupaten Tabalong yang lebih agamis, sejahtera dan mandiri"** dan sesuai dengan Renstra Kecamatan Murung Pudak maka adapun tujuan utama dari Kecamatan Murung Pudak adalah :

1. Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Murung Pudak tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Kecamatan Murung Pudak dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya.Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Murung Pudak tahun 2024 bertujuan untuk :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Murung Pudak tahun 2024.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Murung Pudak tahun 2024.
3. Memberikan pedoman dalam pengawasan dalam penyelenggaran pemerintahan Daerah tahun 2024.

Demi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut perlu ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Murung Pudak yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 :

Rencana Kerja, Tujuan, Sasaran dan indikator Kinerja

Kecamatan Murung Pudak

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
1.	Meningkatkan Kerukunan Hidup Bermasyarakat	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman & Kenyamanan)	100%
2.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Desa dalam Pembangunan Wilayah	Tingkat Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	85%
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan Umum Lainnya Tepat Waktu Indeks Kepuasan Masyarakat	85 % BB

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rancangan program dan kegiatan Kecamatan Murung Pudak tahun 2024 dituangkan dalam renja Kecamatan Murung Pudak tahun 2024. Jumlah seluruh program di tahun 2024 sebanyak 6 (enam) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 16 (Enam Belas) kegiatan dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 15.675.083.001,- dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten Tabalong.

Mengacu pada Program pembangunan prioritas Pemerintah Kabupaten Tabalong maka program prioritas yang akan bersentuhan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan antara lain :

1. Pemantapan terwujudnya pemerintah yang melayani masyarakat.
   Salah satu tugas atributif Camat adalah melaksanakan pelayanan yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan. Agar kecamatan dapat mendukung secara optimal program pelayanan ini, maka syarat substantifnya adalah pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat secara jelas dengan ditunjang standar pelayanan serta sarana dan prasarana dan pelaksana teknis yang memadai.
2. Optimalisasi penerapan gerakan pembangunan masyarakat dalam pembinaan desa.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan tentu akan berimplikasi terhadap program ini. Dengan besarnya dana yang akan dikelola desa, maka pendampingan dan fasilitasi terhadap penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Desa serta perbaikan administrasi pemerintahan desa akan menjadi fokus pembinaan oleh Kecamatan serta menjadi fasilitator pembangunan ekonomidengan mendorong sektor pertanian, peternakan, perikanan air tawar serta usaha kecil dan menengah masyarakat serta turut serta mengembangkan sektor pariwisata yang ada di wilayah Kecamatan Murung Pudak.

3. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
   Melalui program ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka Kecamatan akan turut serta dalam melaksanakan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Tabel 3.2

Sasaran, Program dan subkegiatan Kecamatan Murung Pudak

No.	Sasaran	Nama Program/Kegiatan		
1.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat	**Program**	**:**	**Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
		Kegiatan	:	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Sub. Kegiatan	:	- Sinersigitas dengan kepolisian Negara republic indoensia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
2.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	**Program**	**:**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
		Kegiatan	:	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		Sub. Kegiatan	:	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

				Desa
		Kegiatan	:	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Sub. Kegiatan	:	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Evaluasi Kelurahan
		Kegiatan	:	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
		Sub. Kegiatan	:	- Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
		Program	**:**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
		Kegiatan	:	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Sub. Kegiatan	:	- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
3.	Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan public	**Program**	**:**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
		Kegiatan	:	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah
		Sub.	:	- Pembinaan Wawasan Kebangsaan

		Kegiatan		dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - Pelaksanaan Tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan
		Program		**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
		Kegiatan	:	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Sub. Kegiatan	:	- Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Kegiatan	:	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
		Sub. Kegiatan	:	- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Kegiatan	:	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		Sub. Kegiatan	:	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
		Program		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
		Kegiatan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Sub. Kegiatan		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

				- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Evaluasi kinerja perangkat daerah
		Kegiatan	:	Administasi Keuangan Perangkat Daerah
		Sub. Kegiatan	:	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Kegiatan	:	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Sub. Kegiatan	:	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Sub. Kegiatan	:	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Kegiatan	:	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
		Sub. Kegiatan	:	- Pengadaan Mebel - Pengadaan Peralatan dan Mesin

				Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub. Kegiatan	:	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
		Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Sub. Kegiatan	:	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN MURUNG PUDAK

Berikut adalah rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong :

Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 merencanakan 6 program dan 16 kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD Kabupaten Tabalong senilai Rp.15.675.083.001,-. Program dan Kegiatan tersebut secara terinci adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan anggaran sebesar Rp. 10.187.997.097,-

   Indikator program ini adalah: Nilai Evaluasi AKIP dengan target BB sedangkan kegiatannya meliputi :

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, dengan anggaran sebesar Rp. 828.271.000,-

   indikator program ini adalah: Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan, dengan target 73.83 % sedangkan kegiatannya meliputi :

   a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, dengan anggaran sebesar Rp. 71.851.000,-

indikator program ini adalah: Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 82,23 %, sedangkan kegiatannya meliputi :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, dengan anggaran sebesar Rp. 4.485.278.135,-

indikator program ini adalah: Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas Aparatur dan Tata Kelola Kewilayahan Desa dengan target 100% sedangkan kegiatannya meliputi :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, dengan anggaran sebesar Rp. 33.796.000,-

indikator program ini adalah: Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target 83,9 %, sedangkan kegiatannya meliputi :

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, dengan anggaran sebesar Rp. 67.889.769,-

indikator program ini adalah: Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan dengan target 5 Kelurahan dan 5 desa, sedangkan kegiatannya meliputi :

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

TABEL.4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2024				Kondisi kinerja pada akhir priode renstra SKPD	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
Administrasi Pemerintahan									
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Nilai AKIP**	**Kec. MURUNG PUDAK**	**BB**	**10.187.997.097**	APBD	BB	**BB**	**11.717.353.698,-**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. MURUNG PUDAK	10 Dokumen	**9.661.000,-**	APBD	100%	**10 Dokumen**	**11.462.000,-**
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. MURUNG PUDAK	4 Dokumen	2.024.000,-	APBD	100%	2 Dokumen	2.327.000,-
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. MURUNG PUDAK	1 Dokumen	1.288.000,-	APBD	100%	2 Dokumen	1.481.000,-
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. MURUNG PUDAK	1 Dokumen	1.288000,-	APBD	100%	2 Dokumen	1.481.000,-
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Kec. MURUNG PUDAK	1 Dokumen	1.516.000,-	APBD	100%	2 Dokumen	1.743.000,-
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kec. MURUNG	1 Dokumen	1.516.000,-	APBD	100%	2 Dokumen	1.743.000,-

		Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	PUDAK						
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. MURUNG PUDAK	1 Dokumen	1.019.000,-	APBD	100%	1 Dokumen	1.171.000,-
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. MURUNG PUDAK	1 Dokumen	1.010.000,-	APBD	100%	1 Dokumen	1.516.000,-
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	Kec. MURUNG PUDAK	14 bulan	**7.430.256.215,-**	APBD	100%	14 Bulan	**8.544.793.698,-**
7.01.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. MURUNG PUDAK	14 bulan	7.428.363.215 -	APBD	100%	14 bulan	8.542.617.698,-
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. MURUNG PUDAK	1 Dokumen	1.287.000,-	APBD	100%	1 Dokumen	1.480.000,-
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Kec. MURUNG PUDAK	4 Dokumen	606.000,-	APBD	100%	4 Dokumen	696.000,-
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	*Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah yang disusun*	Kec. MURUNG PUDAK	*12 Dokumen*	850.684,-	APBD	100%	4 Dokumen	1.816.000,-
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. MURUNG PUDAK	*12 Dokumen*	850.684,-	APBD	100%	12 Dokumen	1.816.000,-
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	Kec. MURUNG PUDAK	100%	**572.072.414.-**	APBD	100%	100%	**657.882.000,-**

7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. MURUNG PUDAK	6 paket	70.654.444,-	APBD	100%	6 paket	81.252.000-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. MURUNG PUDAK	6 paket	212.011.645,-	APBD	100%	6 paket	243.813.000,-
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. MURUNG PUDAK	6 paket	39.406.325,-	APBD	100%	6 paket	45.317.000,-
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. MURUNG PUDAK	6 paket	15.000.000,-	APBD	100%	6 paket	17.250.000,-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. MURUNG PUDAK	150 Laporan	235.000.000,-	APBD	100%	150 laporan	270.250.000,-
7.01.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	*Jumlah alat yang dibeli*	Kec. MURUNG PUDAK	unit	**383.500.000,-**	APBD	100%	Unit	441.025.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. MURUNG PUDAK	100 unit	25.000.000,-	APBD	100%	100 unit	28.750.000,-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. MURUNG PUDAK	6 unit	55.500.000,-	APBD	100%	6 unit	63.825.000,-
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kec. MURUNG PUDAK	6 unit	23.000.000,-	APBD	100%	6 unit	26.450.000,-
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. MURUNG PUDAK	6 unit	155.000.000,-	APBD	100%	6 unit	178.250.000,-
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. MURUNG PUDAK	6 unit	125.000.000,-	APBD	100%	6 Unit	143.750.000,-
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	Kec. MURUNG PUDAK	12 bulan	1.460.488.640	APBD	100 %	12 Bulan	**1.679.500.000,-**

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. MURUNG PUDAK	12 Laporan	110.000.000,-	APBD	100%	12 laporan	126.500.000,-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. MURUNG PUDAK	12 Laporan	1.350.488.640,-	APBD	100%	12 Laporan	1.553.000.000,-
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. MURUNG PUDAK	Unit	**331.168.144,-**	APBD	100%	Unit	**380.875.000,-**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum	Kec. MURUNG PUDAK	34 Unit	214.467.211,-	APBD	100%	34 Unit	246.650.000,-
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. MURUNG PUDAK	60 Unit	39.200.933,-	APBD	100%	60 Unit	45.100.000,-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. MURUNG PUDAK	1 Unit	22.500.000,-	APBD	100%	1 Unit	25.875.000,-
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. MURUNG PUDAK	6 Unit	55.000.000,-	APBD	100%	6 Unit	63.250.000,-
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	Kec. MURUNG PUDAK	100	**828.271.000,-**	APBD	100	100	952.515.000,-
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. MURUNG PUDAK	**Laporan**	**243.123.500,-**	APBD	100%	laporan	279.595.000,-
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. MURUNG PUDAK	**12 laporan**	55.428.304,-	APBD	100%	**12 laporan**	63.745.000,-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. MURUNG PUDAK	**5 Dokumen**	187.695.196,-	APBD	100%	**5 Dokumen**	215.850.000,-
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan**	terlaksananya Fasilitasi	Kec.	12 Bulan	434.347.500,-	APBD	100%	12 Bulan	499.500.000,-

	Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kegiatan Pelayanan yang tidak dilaksanakan Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	MURUNG PUDAK						
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. MURUNG PUDAK	12 Bulan	434.347.500,-	APBD	100%	12 Bulan	499.500.000,-
7.01.02.2.04	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kec. Murung Pudak	**80 %**	**150.800.000,-**	APBD	100%	**2500 Lokasi**	173.420.000,-
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Murung Pudak	2500 lokasi	150.800.000,-	APBD	100%	2500 lokasi	173.420.000,-
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	Kec. MURUNG PUDAK	100	4.485.278.135,-	APBD	100%	100	5.158.175.000,-
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. MURUNG PUDAK	5 Desa	**69.169.000,-**	APBD	100%	5 Desa	79.550.000,-
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. MURUNG PUDAK	5 Desa	**69.169.000,-**	100%	100%	100%	79.550.000,-
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Pemerintah Kelurahan yang dibina / diberdayakan	Kec. MURUNG PUDAK	5 Kelurahan	4.209.539.421,-	APBD	100%	5 Kelurahan	4.841.075.000,-
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. MURUNG PUDAK	*5 Kelurahan*	24.057.917,-	APBD	100%	*5 Kelurahan*	27.700.000,-
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kec. MURUNG PUDAK	*5 unit*	3.583.523.202,-	APBD	100%	*5 unit*	4.121.100.000,-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. MURUNG PUDAK	*5 pokmas*	592.458.302,-	APBD	100%	*5 pokmas*	681.350.000,-

7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kec. MURUNG PUDAK	*5 laporan*	9.500.000	APBD	100%	*5 laporan*	10.925.000,-
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan **Kelurahan**	Kec. MURUNG PUDAK	**100 Keluarga**	**206.569.714,-**	APBD	100%	**100** Keluarga	237.550.000,-
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. MURUNG PUDAK	100 Keluarga	206.569.714,-	APBD	100%	**100** Keluarga	237.550.000,-
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan	Kec. MURUNG PUDAK	100	67.889.769,-	APBD	97,54	97,54	78.075.000,-
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. MURUNG PUDAK	12 Laporan	67.889.769,-	APBD	100%	100%	78.075.000,-
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. MURUNG PUDAK	12 Laporan	67.889.769,-	APBD	100%	100%	78.075.000,-
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	Kec. MURUNG PUDAK	85	71.851.000,-	APBD	85	orang	82.629.000,-
7.01.05.2,01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. MURUNG PUDAK	100 Orang	71.851.000,-	APBD	100%	100%	**82.629.000,-**
7.01.05.2,01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. MURUNG PUDAK	100 Orang	56.580.000,-	APBD	100%	100 Orang	65.067.000,-

7.01.05.2,01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec MURUNG PUDAK	12 Dokumen	15.271.000,-	APBD	100%	12 dokumen	17.562.000,-
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec MURUNG PUDAK	83.9	**33.796.000,-**	APBD	84,59	Desa/Kelurahan	65.652.000,-
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec MURUNG PUDAK	10 desa/ Kelurahan	33.796.000**,-**	APBD	100%	14 desa	65.652.000,-
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec MURUNG PUDAK	5 Desa	16.121.000,-	APBD	100%	2 Dokumen	45.326.000,-
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec MURUNG PUDAK	5 Desa/Keluraha n	17.675.000,-	APBD	100%	100%	20.326.000,-
Proram : 6 Kegiatan : 16									
Jumlah Total					**15.675.083.001**				**18.054.399.698,-**

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tahun 2024 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisein.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Murung Pudak. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024, Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Selain itu Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Melalui Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Murung Pudak, Sptember 2024

CAMAT MURUNG PUDAK

ABDUL WAHID,SE.Kp

NIP.19770717 199903 1 008

RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RANWAL RENJA P)
KECAMATAN TANJUNG
TAHUN 2024

KECAMATAN TANJUNG
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan (Ranwal Renja P) Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan (Ranwal Renja P) Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 serta Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024, untuk menjalankan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan (Ranwal Renja P) ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong beserta program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan. Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan (Ranwal Renja P) Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon koreksi, saran dan masukan dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong ini dapat bermanfaat dan diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanjung, 7 Agustus 2024

CAMAT TANJUNG,

N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP, MA
NIP. 19880526 200701 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 ..... **6**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan 6

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024 6

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 13

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah 19

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah 19

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 22

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **30**

BAB IV PENUTUP **40**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian antara Renja Kecamatan Tanjung Tahun 2024 dengan APBD Kecamatan Tanjung Tahun 2024	8
Tabel 2.2	Perbandingan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Anggaran pada Renja dan APBD Kecamatan Tanjung Tahun 2024	9
Tabel 2.3	Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Tanjung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	14
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Tabalong	23
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Tanjung Tahun 2024	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan konsekuensi dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai wujud implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024. Renja Tahun 2024 telah disusun padatahun 2024 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Seiring dengan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2024, hasil pengendalian pelaksanaan renja menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Tanjung Tahun 2024. Hal ini sekaligus sebagai tindak lanjut dari terbitnya Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor B-83/BAPPEDALITBANG/000.7/VI/2024 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN Tahun 2024, bahwa SKPD melakukan penyesuaian terhadap Renja sehubungan dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Selain berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024, Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Tahun 2024 juga disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Tahun 2024 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019–2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019–2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tuga Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong.
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 21);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

   Dokumen Renja Perubahan Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

2. Tujuan

   Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efesiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Renja Perubahan Kecamatan Tanjung disusun selain berpedoman dengan Perubahan RKPD, juga berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenan. Dalam hal ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Tanjung sampai dengan triwulan II tahun 2024 dengan mengacu pada APBD tahun 2024 yang sudah disahkan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tanjung Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024

2.1.1.1 Kesesuaian Program Antara Renja Kecamatan Tanjung Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada rencana kerja Kecamatan Tanjung dengan APBD Tahun 2024, terdapat kesesuaian 100%. Artinya bahwa jumlah program dalam renja sama dengan jumlah program yang ada dalam APBD, yaitu ada 6 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2.1.1.2 Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Kecamatan Tanjung Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan yang ada pada rencana kerja Kecamatan Tanjung dengan APBD Tahun 2024, terdapat kesesuaian 100%. Artinya bahwa jumlah kegiatan dalam renja sama dengan jumlah kegiatan yang ada dalam APBD, yaitu ada 13 kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
9. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
10. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
12. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
13. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.1.1.3 Kesesuaian Sub Kegiatan Antara Renja Kecamatan Tanjung Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024.

Berdasarkan evaluasi terhadap Sub Kegiatan yang ada pada rencana kerja Kecamatan Tanjung dengan APBD Tahun 2024, jumlah sub kegiatan yang ada pada renja tahun 2024 sebanyak 30 sedangkan sub kegiatan yang ada di APBD Tahun 2024 sebanyak 30.

2.1.1.4 Kesesuaian Pagu Anggaran Antara Renja Kecamatan Tanjung Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024. Anggaran Renja Kecamatan Tanjung Tahun 2024 sebesar Rp. 13.640.373.672,- sedangkan anggaran APBD Kecamatan Tanjung Tahun 2024 sebesar Rp. 13.640.373.672,- Terdapat selisih antara anggaran APBD dan Renja Tahun 2024 sebesar Rp. 0.

Hasil evaluasi kesesuaian jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pagu anggaran antara Renja Kecamatan Tanjung Tahun 2024 denngan APBD Kecamatan Tanjung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian antara Renja Kecamatan Tanjung Tahun 2024

dengan APBD Kecamatan Tanjung Tahun 2024

No	Uraian	Renja 2024	APBD 2024
1	Program	6	6
2	Kegiatan	13	13
3	Sub Kegiatan	30	30
4	Pagu Anggaran	Rp 13.640.373.672,-	Rp 13.640.373.672,-

Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Perbandingan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Anggaran pada Renja dan APBD Kecamatan Tanjung Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			13.640.373.672		13.640.373.672
7.01	**KECAMATAN**			13.640.373.672		13.640.373.672
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (predikat)	BB	11.067.759.558	BB	11.067.759.558
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	100 %	44.526.020	100 %	44.526.020
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	15.391.440	8 Dokumen	15.391.440
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	29.134.580	1 Dokumen	29.134.580
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.562.644.776	100 %	7.562.644.776
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	7.062.653.132	45 Orang	7.551.115.000
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	11.529.776	2 Laporan	111.529.776
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	100 %	6.900.912	100 %	6.900.912
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD, RKPBMD, RKBMD-P, RKPBMD-P, RUP, RUPP	2 Dokumen	6.900.912	2 Dokumen	6.900.912
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.480.028.262	100%	1.480.028.262
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.960.739	5 Paket	8.960.739
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	712.192.082	5 Paket	712.192.082
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	107.438.746	5 Paket	107.438.746
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	43.183.505	5 Paket	43.183.505
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Dokumen	29.160.000	5 Paket	29.160.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 Laporan	579.093.000	170 Laporan	579.093.000

7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	289.513.380	100 %	289.513.380
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kinerja 1 Laporan	Pagu Indikatif 289.513.380	Kinerja 1 Laporan	Pagu Indikatif 289.513.380
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	80,83%	267.473.849	80,83%	267.473.849
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	267.473.849	100%	267.473.849
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	75,4%	1.648.742.370	75,4%	1.648.742.370
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	221.624.849	150 Orang	221.624.849
7.01.03.2.01	Pemberdayaan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang memperoleh Pemberdayaan dan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100%	411.572.076	100%	411.572.076
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	236.500.000	22 Unit	236.500.000
7.01.03.2.01.0003	Pemberdayaan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang memperoleh Pemberdayaan dan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	310 Keluarga	411.572.076	310 Keluarga	411.572.076
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	82 Unit	77.340.000	82 Unit	77.340.000
7.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	45.849.000	1 Dokumen	45.849.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksanya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	1.237.170.294	100%	1.237.170.294
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	1.038.882.431	17 Unit	1.038.882.431

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dan Ketertiban Umum	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	83,9%	156.873.586	83,9%	156.873.586
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	100%	156.873.586	100%	156.873.586
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	48.064.600	1 Dokumen	48.064.600
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	86.059.989	1 Dokumen	86.059.989

7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	22.749.000	1 Laporan	22.749.000
JUMLAH				**13.640.373.673**		**13.640.373.673**

Berdasarkan data perbandingan antara Renja 2024 dan APBD 2024 pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan pada APBD disusun masih mengacu pada Renja, hal ini dapat dilihat dari persentase kesesuaian Program sebesar 100 persen, persentase kesesuaian kegiatan sebesar 100 persen dan persentase kesesuaian sub kegiatan sebesar 100 persen.

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, penilaian hasil pelaksanaan Renja menggunakan data realisasi pelaksanaan APBD sebagai acuan. Berikut rekapitulasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tanjung sampai triwulan II tahun 2024.

Tabel 2.3 Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Tanjung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024		Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Semester I Tahun 2024			Catatan
			Keuangan (Rp)	Kinerja %	Keuangan (Rp)	Keuangan %	Kinerja %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**		**13.640.373.672**					
7.01	**KECAMATAN**		**13.640.373.672**					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (predikat)	11.067.759.558	BB	4.818.550.571	43,54		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	44.526.020	100 %	9.973.500	22,40		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.391.440	8 Dokumen	5.400.000	35,08	50	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.134.580	1 Dokumen	4.573.500	15,70	100	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.562.644.776	100 %	3.932.554.941	52		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.551.115.000	45 Orang	3.929.354.941	52,04	100	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	11.529.776	2 Laporan	3.200.000	27,75	50	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.900.912	100 %	5.000.000	72,45		
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD, RKPBMD, RKBMD-P, RKPBMD-P, RUP, RUPP	6.900.912	6 Dokumen	5.000.000	72,45	50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024		Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Semester I Tahun 2024			Catatan
			Keuangan (Rp)	Kinerja %	Keuangan (Rp)	Keuangan %	Kinerja %	
1	2	3	5	4	6	7	8	9
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.480.028.262	100%	301.859.213	20,40		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8.960.739	5 Paket	1.451.000	16,19	16	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	712.192.272	5 Paket	44.469.711	6,24	20	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	107.438.746	5 Paket	6.984.000	6,50	10	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	43.183.505	5 Paket	12.334.270	28,56	10	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.160.000	5 Paket	3.152.500	10,81	10	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	579.093.000	170 Laporan	233.467.732	40,32	46	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.033.287.000	100%	441.322.347	42,71		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.100.000	12 Laporan	2.800.000	45,90	50	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	129.167.000	12 Laporan	42.274.018	32,73	50	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	898.020.000	12 Laporan	396.248.329	44,12	50	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	940.372.588	100%	127.840.570	13,59		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	236.500.000	22 Unit	112.358.570	47,51	100	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	77.340.000	83 Unit	15.482.000	20,02	50	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	626.532.588	3 Unit	0	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024		Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Semester I Tahun 2024			Catatan
			Keuangan (Rp)	Kinerja %	Keuangan (Rp)	Keuangan %	Kinerja %	
1	2	3	5	4	6	7	8	9
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kelembagaan sosial masyarakatan	422.885.309	73.83%	147.805.000	34,95		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	113.371.9299	100%	2.700.000	2,02		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	111.602.929	1 Laporan	0	0	0	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.769.000	1 Dokumen	2.700.000	12,40	100	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang ada di Kecamatan	289.513.380	100 %	145.105.000	50,12		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	289.513.380	1 Laporan	145.105.000	50,12	50	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	1.648.742.370	75,4%	111.415.837	6,76		
7.01.03.2.01	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	411.572.076	100%	111.415.837	27.07		
7.01.03.2.01.0003	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	411.572.076	1 Laporan	111.415.837	27.07	50	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.237.170.294	100%	0	0		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.038.882.431	17 Unit	0	0	0	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	198.287.863	4 Pokmas	0	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024		Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Semester I Tahun 2024			Catatan
			Keuangan (Rp)	Kinerja %	Keuangan (Rp)	Keuangan %	Kinerja %	
1	2	3	5	4	6	7	8	9
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan)	76.639.000	97,37%	49.009.009	63.95		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	76.639.000	100%	49.009.009	63.95		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000	1 Laporan	49.009.009	98,02	100	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Hubungan Laporan dengan Tokoh Pelaksanaan Agama Harmonisasi dan Tokoh Masyarakat	26.639.000	1 Laporan	0	0	0	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	267.473.849	80,83%	12.558.000	4,71		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	267.473.849	100%	12.558.000	4,71		
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	221.624.849	150 Orang	0	0	0	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	45.849.000	1 Dokumen	12.588.000	27,46	50	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	156.873.586	83,9%	13.575.000	8,65		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	156.873.586	100%	13.575.000	8,65		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa	48.064.600	1 Dokumen	4.770.000	9,92	50	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	86.059.989	1 Dokumen	5.505.000	6,40	50	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	22.749.000	1 Laporan	3.300.000	14,51	50	
JUMLAH			13.640.373.672		5.152.943.417	37,78		

Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Tanjung sampai triwulan II diatas diolah berdasarkan data pada formulir evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sesuai format evaluasi renja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (formulir evaluasi terlampir). Evaluasi Renja dimaksudkan untuk mengindentifikasi sejauh mana capaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan untuk mengetahui faktor- faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja serta implikasi yang timbul, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk Tindakan perencanaan selanjutnya.

Berdasarkan data pada tabel 2.3 tersebut, dapat dilihat bahwa dari sisi anggaran, Kecamatan Tanjung telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 5.152.943.417,- atau sekitar 37,78 persen dari total anggaran untuk tahun 2024. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif masih rendah dikarenakan terdapat kegiatan yang seharusnya ditangani oleh KPA tetapi masih dibawah PPTK sehingga menunggu SK KPA diterbitkan oleh Pj Bupati Tabalong dan ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena pelaksanaannya memang dijadwalkan pada triwulan III dan IV, diantaranya yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub Kegiatan :
    a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait. (Kegiatan MTQ tingkat Kabupaten).
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Sub Kegiatan :
    a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan :
    a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (kegiatan Peringatan Hari Kemerdekaan RI dan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tabalong).

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan Tanjung mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusanOtonomi Daerah. Kewenangan tersebut diantaranya :

1. Pelayanan fasilitasi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Pelayanan fasilitasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Pelayanan Fasilitasi penerbitan Kartu Keluarga (KK).
4. Pelayanan penerbitan Keterangan Pindah.
5. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat.
6. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
7. Menggkordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
8. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam membangun desa.
9. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
10. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Tanjung menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan dankemasyarakatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjung, diantaranya :

1. Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya.
2. Mengadakan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Meningkatkan system pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

Disamping itu, kinerja pelayanan perangkat daerah yang merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong, maka Kecamatan Tanjung mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Kedudukan Kecamatan
    1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
    2. Kecamatan dipimpin oleh Camat.

3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris daerah.

b. Tugas Pokok Kecamatan

Kecamatan Tanjung memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

c. Fungsi Kecamatan

Fungsi Kecamatan Tanjung adalah sebagai pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pengkoordinasian pelayanan administrasi publik dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Camat selaku kepala SKPD dibantu olehSekretaris Camat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi 4 (empat) Seksiyang terdiri dari : Pemerintahan, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, dan Keamanan dan Ketertiban Umum.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, Kecamatan Tanjung berpangku pada visi Kabupaten Tabalong **"Menuju Tabalong yang lebih agamis, sejahtera dan mandiri"** dengan mengemban misi :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Tabalong yang lebih agamis melalui kebijakan pembangunan yang diarahkan agar tercapai masyarakat madani yang beretika dan bermoral melalui peningkatan pemahaman dan pengamanan nilai-nilai agama, memperkuat kelembagaan keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan sehingga akan terwujud kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia (Tabalong Berkualitas).
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong dengan mengawal pembangunan yang diarahkan agar masyarakat berkemampuan lebih dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya melalui kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara signifikan, serta penurunan angka kemiskinan secara nyata (Tabalong Sejahtera).

Mewujudkan kemandirian daerah Kabupaten Tabalong melalui pembangunan yang diarahkan pada tercapainya system yang handal dan dinamis yang mampu bertindak sesuai keadaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bijak melalui penguatan kelembagaan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan untuk

menciptakan kemajuan perekonomian daerah yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas (Tabalong Mandiri).

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala dan kelemahan yang dihadapi oleh Kecamatan Tanjung dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, diantaranya :

1. Sarana dan prasarana Pelayanan yang masih belum memadai, contohnya untuk fasilitas pelayanan kepada disabilitas masih belum tersedia di Kantor Kecamatan Tanjung. Akan tetapi sudah dianggarkan pada pagu Perubahan untuk pemeliharaan gedung kantor / rehab /perbaikan sehingga kedepan nya untuk pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal.
2. Daya Listrik yang belum mencukupi untuk kebutuhan kantor, sehingga mengganggu dalam hal pelayanan dan pelaksanaan kegiatan pekerjaan kantor sehingga pada pagu perubahan di anggararkan untuk penambahan daya listrik.
3. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dan kurangnya pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan kerja dan profesionalitas aparatur Kecamatan Tanjung.
4. Minimnya pemanfaatan teknologi dalam bekerja dikalangan aparatur Kecamatan Tanjung menyebabkan kurang efektif dan efisiennya pemanfaatan waktu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan.
5. Jumlah SDM Apartur yang kurang memadai.

Disamping kendala dan kelemahan yang ada, Kecamatan Tanjung juga memiliki beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Tanjung dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Tanjung, diantaranya :

1. Adanya struktur organisasi yang terpola.
2. Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat.
3. Suasana kerja di Kecamatan Tanjung yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok *(team work)*.
4. Adanya koordinasi yang baik dengan kelurahan dan desa di Wilayah Kecamatan Tanjung.

Adapun isu-isu penting lainnya yang ada di Kecamatan Tanjung adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

   Kecamatan Tanjung merupakan ibukota Kabupaten Tabalong yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Tabalong oleh karena itu diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

2. Bidang Pemerintahan

   Berlakunya UU Desa yang menuntut aparat kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar desa lebih optimal melaksanakan amanat UU Desa tersebut.

3. Bidang Pelayanan

   Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima menjadikan kecamatan Tanjung untuk selalu berinovasi agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rancangan Perubahan RKPD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, maka dalam reviu ini akan dilakukan proses membandingkan rancangan perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perubahan rencana kerja Kecamatan Tanjung. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Tabalong

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CatatanPenting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**13.640.373.672**	**UNSUR KEWILAYAHAN**				14.822.782.672	
7.01	**KECAMATAN**				**13.640.373.672**	**KECAMATAN**				**14.822.782.672**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Tanjung	Nilai AKIP (predikat)	BB	11.067.759.558	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Tanjung	Nilai AKIP (predikat)	BB	12.017.808.961	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanjung	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	100 %	44.529.020	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanjung	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	100 %	49.626.020	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanjung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	15.391.440	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanjung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	17.491.440	Penambahan untuk narasumber
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	29.134.580	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	32.134.580	Penambahan untuk rapat koordinasi ke kabupaten
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	Kec. Tanjung	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.562.644.776	Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	Kec. Tanjung	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	8.157.261.776	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Kec. Tanjung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	7.551.115.000	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Kec. Tanjung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	8.146.132.000	Penambahan untuk belanja tunjangan keluarga, beras,pph dan tambahan penghasilan ASN
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	2 Laporan	11.529.776	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	2 Laporan	12.129.776	Penambahan untuk rapat koordinasi dalam Kabupaten
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah	Kec. Tanjung	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	6.900.912	Administrasi Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah	Kec. Tanjung	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	8.100.912	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CatatanPenting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik DaerahSKPD	Kec. Tanjung	Dokumen RKBMD, RKPBMD	2 Dokumen	6.900.912	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Tanjung	Dokumen RKBMD, RKPBMD	2 Dokumen	8.100.912	Penambahan untuk rapat koordinasi ke kabupaten
7.01.01.2.06	Administrasi Umum PerangkatDaerah	Kec. Tanjung	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.480.028.262	Administrasi Umum PerangkatDaerah	Kec. Tanjung	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.690.313.049	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tanjung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.960.739	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tanjung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7.128.324	Penghapusan Belanja lampu hias
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tanjung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	712.192.082	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tanjung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	842.196.003	Penambahan belanja ,modal peralatan dan perlengkapan kantor
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Tanjung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	107.438.746	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Tanjung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	107.438.746	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tanjung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	43.183.505	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tanjung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	49.734.746	Penambahan belanja karangan bunga untuk peringatan2
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanjung	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Dokumen	29.160.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanjung	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Dokumen	27.500.000	Pengurangan belanja langganan koran
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 Laporan	579.093.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	656.315.000	Penambahan untuk sppd ke luar daerah

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CatatanPenting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanjung	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan PemerintahDaerah	100%	1.033.287.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanjung	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan PemerintahDaerah	100%	1.067.264.916	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.100.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.470.000	Penghapusan belanja Amplop
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	129.167.000	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	141.163.900	Penambahan tagihan air dan listrik serta penambahan pemasangan PDAM kelurahan
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	898.020.000	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	920.163.900	Penambahan belanja Iuran BPJS ketenaga kerjaan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanjung	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	940.372.588	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanjung	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	100%	1.045.242.288	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tanjung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	236.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tanjung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	270.880.000	Penambahan pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 4
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanjung	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	83 Unit	77.340.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanjung	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	83 Unit	65.160.000	Pengurangan untuk pemeliharaan genset
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tanjung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	626.532.588	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tanjung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	709.202.288	Penambahan pemeliharaan / rehab gedung dan pembangunan tempat parkir

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CatatanPenting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK	Kec. Tanjung	Persentase pelayanan kelembagaan sosial masyarakatan	73.83%	422.885.309	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK	Kec. Tanjung	Persentase pelayanan kelembagaan sosial masyarakatan	73.83%	445.916.859	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di TingkatKecamatan	Kec. Tanjung	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	113.371.929	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di TingkatKecamatan	Kec. Tanjung	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	162.033.479	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan PerangkatDaerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11 Laporan	111.602.929	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan PerangkatDaerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11 Laporan	159.333.479	Penambahan untuk kegiatan MTQ (peserta dan official MTQ)
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tanjung	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	21.769.000	Peningkatan Efektifitas KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tanjung	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	2.700.000	Pengurangan untuk keg musrenbang karena sudah dilaksanakan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada diKecamatan	Kec. Tanjung	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	289.513.380	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada diKecamatan	Kec. Tanjung	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	283.883.380	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepadaMasyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	289.513.380	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	283.883.380	Pengurangan Belanja Honorarium PPTK di Kelurahan

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CatatanPenting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tanjung	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	75,4%	1.648.742.370	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tanjung	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	75,4%	1.700.181.992	
7.01.03.2.01	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Tanjung	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	411.572.076	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Tanjung	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	463.011.698	
7.01.03.2.01.0003	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec. Tanjung	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	310 Keluarga	411.572.076	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec. Tanjung	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	310 Keluarga	463.011.698	penambahan kegiatan sosialisasi PKK kecamatan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Tanjung	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	1.237.170.294	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Tanjung	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	1.237.170.294	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan	Kec. Tanjung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	1.038.882.431	Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan	Kec. Tanjung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	985.923.708	Pengurangan anggaran untuk penanganan stuntting dikelurahan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan	Kec. Tanjung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas	198.287.863	Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan	Kec. Tanjung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas	251.246.586	Penambahan makan untuk penanganan stuntting dikelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM	Kec. Tanjung	Persentase Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan)	97,37%	76.639.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM	Kec. Tanjung	Persentase Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan)	97,37%	91.856.224	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteramandan Ketertiban Umum	Kec. Tanjung	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	76.639.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteramandan Ketertiban Umum	Kec. Tanjung	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	91.856.224	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CatatanPenting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	50.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	91.856.224	Penambahan pagu untuk kegiatan pilkada
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan denganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Tanjung	Jumlah Hubungan Laporan dengan Tokoh Pelaksanaan Agama Harmonisasi dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	26.639.000	Harmonisasi Hubungan denganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Tanjung	Jumlah Hubungan Laporan dengan Tokoh Pelaksanaan Agama Harmonisasi dan Tokoh Masyarakat	0	0	Di geser untuk ke kegiatan lain
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Tanjung	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	80,83%	267.473.849	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Tanjung	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	80,83%	476.390.636	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah	Kec. Tanjung	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	267.473.849	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah	Kec. Tanjung	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	476.390.636	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengama- lan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tanjung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	45 Orang	221.624.849	Pembinaan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengama- lan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tanjung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	45 Orang	382.545.160	Penambahan untuk perayaan kegiatan hari jadi Kabupaten Tabalong

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CatatanPenting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Tanjung	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	45.849.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Tanjung	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	93.845.160	Penambahan kegiatan sosialisasi kejaksaan di kelurahan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHANDESA	Kec. Tanjung	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	83,9%	156.873.586	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHANDESA	Kec. Tanjung	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	83,9%	90.628.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tanjung	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	100%	156.873.586	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tanjung	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	90.628.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi TataPemerintahan Desa	Kec. Tanjung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	48.064.600	Fasilitasi Administrasi TataPemerintahan Desa	Kec. Tanjung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	34.164.600	Pengurangan perjalanan dinas dan kegiatan sosialisasi
7.01.06.2.01.03	Faslitasi Pengelolaan KeuanganDesa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tanjung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	86.059.989	Faslitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tanjung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	21.414.600	Pengurangan perjalanan dinas dan kegiatan sosialisasi
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	22.749.000	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	35.048.800	Pengurangan belanja makan minum
JUMLAH					13.640.373.672	JUMLAH				14.822.782.672	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN)

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 merencanakan 6 program, 13 kegiatan, dan 30 Sub Kegiatan yang bersumber dari dana DAU dan APBD Kabupaten Tabalong senilai **Rp. 14.822.782.672,-**. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut secara terinci adalah sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**, dengan anggaran sebesar Rp. 12.017.808.961,- indikator program ini adalah : Nilai AKIP dengan target BB sedangkan kegiatannya meliputi :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
      - *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
      - *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
      - *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
      - *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD*

   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
      - *Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*

   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
      - *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*
      - *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
      - *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*
      - *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*
      - *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*
      - *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*

   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
      - *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
      - *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
      - *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian sub kegiatan :

- *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
- *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
- *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, dengan anggaran sebesar Rp. 445.916.859,- indikator program ini adalah : Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan di tingkat kecamatan dengan target 73,83% sedangkan kegiatannya meliputi :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan rincian sub kegiatan :

- *Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*
- *Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, dengan rincian sub kegiatan :

- *Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, dengan anggaran sebesar Rp. 1.700.181.992,- indikator program ini adalah : Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa dengan target 75,4 % sedangkan kegiatannya meliputi :

a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dengan rincian sub kegiatan :

- *Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas*

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan rincian sub kegiatan :

- *Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*
- *Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, dengan anggaran sebesar Rp. 91.856.224,- indikator program ini adalah : Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan) dengan target 97,37% sedangkan kegiatannya meliputi :

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan rincian sub kegiatan :
   - *Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*
   - *Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*

5. **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**, dengan anggaran sebesar Rp. 476.390.636,- indikator program ini adalah : Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 80,83% sedangkan kegiatannya meliputi :
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
      - *Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*
      - *Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*

6. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**, dengan anggaran sebesar Rp. 90.845.160,- indikator program ini adalah : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target 83,9% sedangkankegiatannya meliputi :
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan rincian sub kegiatan :
      - *Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*
      - *Faslitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*
      - *Koordinasi pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan*

Rencana kerja dan pendanaan pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. dibawah ini.

Tabel 3.1

Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Tanjung Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahandan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2024 (Sebelum Perubahan)							Rencana Tahun 2024 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024			APBD 2024			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA PERUBAHAN 2024			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	UNSUR KEWILAYAHAN				13.460.373.672			13.460.373.672				**14.822.782.672**		
7.01	KECAMATAN				13.460.373.672			13.460.373.672				**14.822.782.672**		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Tanjung	Nilai AKIP (predikat)	BB	11.067.373.672	PAD	BB	11.067.373.672	PAD	Nilai AKIP (predikat)	BB	12.017.808.961	PAD	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanjung	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	100 %	44.526.020	PAD	100 %	44.526.020	PAD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	100 %	49.626.020	PAD	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	Kec. Tanjung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	15.391.440	PAD	8 Dokumen	15.391.440	PAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	17.491.440	PAD	Penambahan untuk narasumber
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	29.134.580	PAD	1 Dokumen	29.134.580	PAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	32.134.580	PAD	Penambahan untuk rapat koordinasi ke kabupaten
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	Kec. Tanjung	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.562.644.776	PAD	100 %	7.562.644.776	PAD	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	8.157.261.776	PAD	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanjung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	7.062.653.132	PAD	45 Orang	7.062.653.132	PAD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	8.146.132.000	PAD	Penambahan untuk belanja tunjangan keluarga, beras,pph dan tambahan penghasilan ASN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahandan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2024 (Sebelum Perubahan)							Rencana Tahun 2024 (Setelah Perubahan)				CatatanPenting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024			APBD 2024			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA PERUBAHAN 2024			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	18 Dokumen	11.529.776	PAD	18 Dokumen	11.529.776	PAD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	2 Laporan	12.129.776	PAD	Penambahan untuk rapat koordinasi dalam Kabupaten
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah	Kec. Tanjung	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	6.900.912	PAD	100 %	6.900.912	PAD	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	8.100.912	PAD	
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD	Kec. Tanjung	Dokumen RKBMD, RKPBMD, RKBMD-P, RKPBMD-P, RUP, RUPP	6 Dokumen	6.900.912	PAD	6 Dokumen	6.900.912	PAD	Dokumen RKBMD, RKPBMD	2 Dokumen	8.100.912	PAD	Penambahan untuk rapat koordinasi ke kabupaten
7.01.01.2.06	Administrasi Umum PerangkatDaerah	Kec. Tanjung	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.480.028.262	PAD	100%	1.480.028.262	PAD	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.690.313.049	PAD	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tanjung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.960.739	PAD	5 Paket	8.960.739	PAD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7.128.324	PAD	Pengurangan Belanja alat-alat listrik
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tanjung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	712.192.082	PAD	5 Paket	712.192.082	PAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	842.196.003	PAD	Penambahan belanja ,modal peralatan dan perlengkapan kantor
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Tanjun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	107.438.746	PAD	5 Paket	107.438.746	PAD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	107.438.746	PAD	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan	Kec. Tanjung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	43.183.505	PAD	5 Paket	43.183.505	PAD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	49.734.746	PAD	Penambahan belanja karangan bunga untuk peringatan2
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanjung	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Dokumen	29.160.000	PAD	5 Dokumen	29.160.000	PAD	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Dokumen	27.500.000	PAD	Pengurangan belanja langganan koran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2024 (Sebelum Perubahan)							Rencana Tahun 2024 (Setelah Perubahan)				CatatanPenting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024			APBD 2024			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA PERUBAHAN 2024			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 Laporan	579.093.000	PAD	170 Laporan	579.093.000	PAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	656.315.000	PAD	Penambahan untuk sppd ke luar daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanjung	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.033.287.000	PAD	100%	1.033.287.000	PAD	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan PemerintahDaerah	100%	1.067.264.916	PAD	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.100.000	PAD	12 Laporan	6.100.000	PAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.470.000	PAD	Penghapusan belanja Amplop
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	129.167.000	PAD	12 Laporan	129.167.000	PAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	141.163.900	PAD	Penambahan tagihan air dan listrik serta penambahan pemasangan PDAM kelurahan
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	898.020.000	PAD	12 Laporan	898.020.000	PAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	920.163.900	PAD	Penambahan belanja Iuran BPJS ketenaga kerjaan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanjung	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	100%	940.372.588	PAD	100%	940.372.588	PAD	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	100%	1.045.242.288	PAD	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tanjung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	236.500.000	PAD	22 Unit	236.500.000	PAD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	270.880.000	PAD	Penambahan pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 4
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanjung	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	83 Unit	77.340.000	PAD	83 Unit	77.340.000	PAD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	83 Unit	65.160.000	PAD	Pengurangan untuk pemeliharaan genset
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tanjung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	626.532.588	PAD	3 Unit	626.532.588	PAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara/Direhabilitasi	3 Unit	709.202.288	PAD	Penambahan pemeliharaan / rehab gedung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2024 (Sebelum Perubahan)							Rencana Tahun 2024 (Setelah Perubahan)				CatatanPenting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024			APBD 2024			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA PERUBAHAN 2024			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	SumberDana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Tanjung	Persentase pelayanan kelembagaan sosial masyarakatan	73.83%	422.885.309	PAD	73.83%	422.885.309	PAD	Persentase pelayanan kelembagaan sosial masyarakatan	73.83%	445.916.859	PAD	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tanjung	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	133.371.929	PAD	100%	133.371.929	PAD	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	162.033.479	PAD	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan danPelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	111.371.929	PAD	1 Laporan	111.371.929	PAD	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11 Laporan	159.333.479	PAD	Penambahan untuk kegiatan MTQ (peserta dan official MTQ)
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tanjung	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	21.769.000	PAD	1 Dokumen	21.769.000	PAD	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	2.700.000	PAD	Pengurangan untuk keg musrenbang karena sudah dilaksanakan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Tanjung	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	289.513.380	PAD	100 %	289.513.380	PAD	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	283.883.380	PAD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas PelaksanaanPelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	289.513.380	PAD	1 Laporan	289.513.380	PAD	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	283.883.380	PAD	Pengurangan Belanja Honorarium PPTK di Kelurahan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tanjung	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	75,4%	1.648.742.370	PAD	75,4%	1.648.742.370	PAD	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	75,4%	1.700.181.992	PAD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2024 (Sebelum Perubahan)							Rencana Tahun 2024 (Setelah Perubahan)				CatatanPenting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	RENJA 2024			APBD 2024			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA PERUBAHAN 2024			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SumberDana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tanjung	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	75,4%	1.648.742.370	PAD	75,4%	1.648.742.370	PAD	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	75,4%	1.700.181.992	PAD	
7.01.03.2.01	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Tanjung	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	411.572.076	PAD	100%	411.572.076	PAD	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	463.011.698	PAD	
7.01.03.2.01.0003	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec. Tanjung	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	310 keluarga	411.572.076	PAD	310 keluarga	411.572.076	PAD	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	310 Keluarga	463.011.698	PAD	penambahan kegiatan sosialisasi PKK kecamatan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Tanjung	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	1.237.170.294	PAD	100%	1.237.170.294	PAD	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	1.237.170.294	PAD	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan PrasaranaKelurahan	Kec. Tanjung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	1.038.882.431	PAD	17 Unit	1.038.882.431	PAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	985.923.708		Pengurangan anggaran untuk penanganan stuntting dikelurahan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tanjung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas	198.287.863	PAD	4 Pokmas	198.287.863	PAD	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas	251.246.586	PAD	Penambahan makan untuk penanganan stuntting dikelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM	Kec. Tanjung	Persentase Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan)	97,37%	76.639.000	PAD	97,37%	76.639.000	PAD	Persentase Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan)	97,37%	91.856.224	PAD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2024 (Sebelum Perubahan)							Rencana Tahun 2024 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024			APBD 2024			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA PERUBAHAN 2024			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif	SumberDana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tanjung	Persentase Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan)	97,37%	76.639.000	PAD	97,37%	76.639.000	PAD	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	91.856.224	PAD	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung	Persentase Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan)	1 Laporan	50.000.000	PAD	1 Laporan	50.000.000	PAD	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	91.856.224	PAD	Penambahan pagu untuk kegiatan pilkada
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan denganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan dengan Tokoh Pelaksanaan Agama Harmonisasi dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	26.639.000	PAD	1 Laporan	26.639.000	PAD	Jumlah Hubungan Laporan dengan Tokoh Pelaksanaan Agama Harmonisasi dan Tokoh Masyarakat	0	0	PAD	Di geser untuk ke kegiatan lain
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Tanjung	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	80,83%	267.473.849	PAD	80,83%	267.473.849	PAD	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	80,83%	476.390.636	PAD	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Tanjung	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	267.473.849	PAD	100%	267.473.849	PAD	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	476.390.636	PAD	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Kec. Tanjung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang dasar Negara	45 Orang	221.624.849	PAD	45 Orang	221.624.849	PAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun	45 Orang	382.545.160	PAD	Penambahan untuk perayaan kegiatan hari jadi Kabupaten Tabalong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2024 (Sebelum Perubahan)							Rencana Tahun 2024 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024			APBD 2024			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA PERUBAHAN 2024			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							1945,Pelestarian Bhinnek Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republi Indonesia				
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Tanjung	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	45.849.000	PAD	1 Dokumen	45.849.000	PAD	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	93.845.160	PAD	Penambahan kegiatan sosialisasi kejaksaan di kelurahan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHANDESA	Kec. Tanjung	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	83,9%	156.873.586	PAD	83,9%	156.873.586	PAD	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	83,9%	90.628.000	PAD	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tanjung	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	100%	156.873.586	PAD	100%	156.873.586	PAD	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	90.628.000	PAD	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi TataPemerintahan Desa	Kec. Tanjung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	48.064.600	PAD	1 Dokumen	48.064.600	PAD	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	34.164.600	PAD	Pengurangan perjalanan dinas dan kegiatan sosialisasi
7.01.06.2.01.03	Faslitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tanjung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	86.059.989	PAD	1 Dokumen	86.059.989	PAD	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	39.738.638	PAD	Pengurangan perjalanan dinas dan kegiatan sosialisasi
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	22.749.000	PAD	1 Laporan	22.749.000	PAD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	35.048.800	PAD	Pengurangan belanja makan minum
JUMLAH					13.640.373.672			13.640.373.672		JUMLAH		14.822.782.672		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. CATATAN PENTING

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Tanjung pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong.
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tanjung ini berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Tanjung Tahun 2019-2024, sehingga difokuskan pada upaya pencapaian seluruh target pada Renstra.
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tanjung ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

B. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Tanjung ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun 2024.
2. Dalam penyusunan RKPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong, begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya Perubahan berdasarkan hasil asistensi dan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tabalong.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun 2024 untuk setiap triwulannya.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, dengan melibatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dan stakeholders di Kabupaten Tabalong khususnya di Kecamatan Tanjung.

Akhir kata, Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 07 Agustus 2024

CAMAT TANJUNG,

N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP, MA
NIP . 19880526 200701 1 001

KABUPATEN
TABALONG

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

(BKPSDM)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tabalong dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 serta merespons perubahan kebijakan, kondisi fiskal, dan kebutuhan riil yang berkembang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Renja Perubahan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan strategis kepegawaian serta pengembangan sumber daya manusia agar berjalan lebih terarah, efisien, dan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2024, serta menjadi rujukan pelaksanaan kegiatan di masing-masing bidang dalam lingkup BKPSDM.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik dalam bentuk data, masukan, maupun saran yang membangun, khususnya tim penyusun, staf perencana, serta seluruh bidang teknis yang terlibat secara aktif dalam proses penyusunan dokumen ini.

Akhir kata, semoga dokumen Renja Perubahan Tahun 2024 ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, serta mampu mendukung tercapainya tata kelola kepegawaian yang profesional, akuntabel, dan berintegritas**.**

Tanjung, Agustus 2024
Kepala

Dr. Drs. H. Erwan, S.H., M.AP
NIP. 196609211987031009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	.....	2
Daftar isi	.....	3
BAB **I**	Pendahuluan	4
	1.1 Maksud dan Tujuan	
	1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan	
	1.3 Sistematika Penyusunan	
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2024.....	6
BAB III	Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja 2024.....	15
BAB IV	Penutup	24
	4.1 Kesimpulan.....	
	4.2 Saran.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tabalong dalam menyelenggarakan program dan kegiatan yang telah mengalami penyesuaian. Dokumen ini menjadi acuan dalam mewujudkan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan, sekaligus memastikan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Tujuan

1. Menyelaraskan dokumen Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024;
2. Menjabarkan rencana strategis (Renstra BKPSDM) ke dalam operasional tahunan secara terukur dan fleksibel;
3. Memastikan konsistensi antara arah kebijakan jangka menengah dengan kebijakan anggaran dan pelaksanaan tahunan;
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur;
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Memberikan dasar perencanaan perubahan APBD (KUA-PPAS Perubahan);
7. Menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan pelayanan dan perubahan struktur organisasi, formasi ASN, serta **kebijakan nasional/daerah.**

1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan dokumen Renja Tahun 2024 dilatarbelakangi oleh:

- Adanya penyesuaian terhadap RKPD Perubahan Tahun 2024 sebagai tindak lanjut atas evaluasi triwulan II;

- Perubahan plafon anggaran akibat efisiensi, refocusing, maupun prioritas baru dalam belanja daerah;
- Perubahan indikator dan target kinerja kegiatan/sub kegiatan yang harus menyesuaikan dengan capaian dan kondisi aktual;
- Perubahan kebijakan nasional dan daerah terkait pengelolaan ASN, reformasi birokrasi, dan pengembangan SDM aparatur;
- Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 yang menunjukkan perlunya penyesuaian baik dari segi output, outcome, maupun alokasi anggaran.

Penyusunan perubahan ini juga merujuk pada ketentuan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Bupati dan dokumen perencanaan lainnya yang relevan di tingkat Kabupaten Tabalong.

1.3 Sistematika Penyusunan

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2024
- Bab III : Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja 2024
- Bab V : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TW II TAHUN 2024

Sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan yang bersifat dinamis dan berkelanjutan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong melakukan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan program dan kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, baik dari aspek kinerja maupun penyerapan anggaran.

Melalui evaluasi ini, dilakukan identifikasi terhadap kegiatan yang telah tercapai secara optimal, kegiatan yang perlu dilakukan percepatan, serta kegiatan yang memerlukan penyesuaian baik dari sisi target, indikator, maupun alokasi anggaran. Hasil evaluasi menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan agar pelaksanaan kegiatan dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.

Secara umum, capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Tabalong sampai dengan Triwulan II menunjukkan kinerja yang cukup baik, ditandai dengan banyaknya indikator yang realisasinya telah melebihi 100%. Namun demikian, terdapat pula beberapa kegiatan yang realisasinya masih rendah dan memerlukan perhatian khusus, seperti pembinaan kedisiplinan ASN yang belum optimal.

Berikut disajikan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan urusan, program, kegiatan, dan subkegiatan:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	Catatan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6/5)*100	(8)	(9)	(10) = (9/4) * 100	(11)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
KEPEGAWAIAN									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasaan Pelayanan Kesekretariatan	90	75						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedia Dokumen Perencanaan, Laporan Perencanaan dan Laporan Keuangan sesuai ketentuan	8 Dokumen	100%	100%	100%				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	40%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	3 Laporan	10 Laporan	333%	10 Laporan	10 Laporan	100%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi Gaji dan Tunjangan	80%	100%	100%	100%				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ bulan	25 Orang/ bulan	25 Orang/ bulan	100%	25 Orang/ bulan	25 Orang/ bulan	100%	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		14 bulan						

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	100%	75						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	113 buah	113 buah	100%	2 Paket	2 Paket	100%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 buah	15 buah	15 buah	100%	15 buah	15 buah	100%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	20 Paket	4 Paket	20%	4 Paket	4 Paket	100%	
	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan		30.5 lembar						
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1163 Dokumen	1163 Dokumen	5815 Dokumen	500%	1163 Dokumen	1163 Dokumen	100%	
	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1163 Eks						
Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100%	100 Laporan	100 Laporan	100%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	100%	100%	100%				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10 Laporan	1 Laporan	10%	1 Laporan	1 Laporan	100%	
	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat		210 Lembar						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	

	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik		86 tagihan						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	100%	100%	100%	100%				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	16 Unit	16 Unit	100%	16 Unit	16 Unit	100%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	20 Unit	65 Unit	325%	65 Unit	65 Unit	100%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit		3 Unit	3 Unit	100%	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks kepuasan pelayanan administrasi Kepegawaian daerah (nilai)	100%	75						
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (nilai)	100%	75						
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	
	Persentase penyusunan formasi dan pelaksanaan dan pengadaan ASN	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan HUT Korpri	4 kegiatan	4 Kegiatan			4 kegiatan	4 kegiatan	100%	

	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	
	Jumlah PNS yang mendapatkan hak cuti	100 orang	100 orang			100 orang	100 orang	100%	
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
Mutasi dan Promosi ASN	Indeks kepuasan terhadap layanan mutasi dan promosi ASN (Nilai)	100%	75						
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	15 Dokumen	1 Dokumen	39 dokumen	3900%	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	600 Dokumen	1 Dokumen	828 dokumen	82800%	450 Dokumen	450 Dokumen	100%	
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	1 Dokumen	7 dokumen	700%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Peningkatan Pendidikan (Persen)	100%	100%	100%	100%			100%	
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	56 Orang	15 orang	123 orang	820%	56 Orang	56 Orang	100%	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	65 Orang	40 Orang	103 orang	258%	60 Orang	60 Orang	100%	
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Kepuasan Terhadap layanan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (nilai)	100%	92						
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5200 Dokumen	1 Dokumen	4096 dokumen	409600%	4181 Dokumen	4181 Dokumen	100%	
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 Orang	250 orang	395 orang	158%	200 Orang	200 Orang	100%	
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	200 Orang	10 orang	2 orang	20%	5 Orang	5 Orang	100%	

Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		1 Dokumen						
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	1 Laporan	2 laporan	200%	5 Laporan	5 Laporan	100%	
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5 Dokumen	10 Dokumen	13 dokumen	130%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai (Persen)	100%		100%					
Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Lulus Diklat	50 Orang	100%	100%	100%				
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis		100 Orang						
	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 Orang	100 Orang	75 orang	75%	76 Orang	76 Orang	100%	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang lulus diklat	217 orang	100%	100%	100%				
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional		75 orang						
	Jumlah CASN yang mengikuti Latihan Dasar		100 orang						
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	1 laporan	3 laporan	300%	3 Laporan	3 Laporan	100%	

	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti Diklat Kepemimpinan		40 orang						

Berdasarkan Tabel 2.1 yang memuat hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong menunjukkan hasil yang sangat positif. Mayoritas indikator yang dievaluasi telah melampaui target yang ditetapkan dalam perencanaan awal.

Beberapa indikator bahkan menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Misalnya, jumlah dokumen perencanaan yang disusun mencapai lima dokumen dari target dua dokumen, atau sebesar 250%. Capaian ini menunjukkan adanya efisiensi dan kemampuan adaptif dalam merespons kebutuhan dokumen tambahan. Hal serupa juga terjadi pada pengelolaan mutasi ASN, di mana dari target 15 dokumen, telah direalisasikan sebanyak 39 dokumen (260%), serta kegiatan penggandaan dokumen administrasi yang mencapai 500% dari target semula.

Selain itu, kinerja dalam hal pengelolaan kenaikan pangkat ASN juga cukup tinggi, dengan realisasi sebesar 828 dari target 600 dokumen atau sekitar 138%. Tingginya capaian ini mengindikasikan volume kerja yang meningkat karena banyaknya ASN yang memenuhi syarat kepangkatan dalam periode yang sama.

Meski demikian, tidak semua indikator menunjukkan hasil optimal. Nilai indeks kepuasan pelayanan kesekretariatan tercatat sebesar 75 dari target 90 atau sekitar 83%. Sementara itu, pengembangan kompetensi teknis ASN baru mencapai 75% dari target, yang bisa disebabkan oleh kendala teknis atau keterbatasan sumber daya pelatihan.

Yang paling mencolok adalah indikator pembinaan disiplin ASN, yang realisasinya sangat rendah. Dari target 200 ASN, hanya dua orang yang tercatat dibina secara formal, atau hanya sebesar 1%. Capaian yang sangat minim ini menunjukkan bahwa aspek penegakan disiplin ASN belum berjalan sesuai harapan dan perlu mendapatkan perhatian khusus ke depan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini menjadi dasar penting dalam merumuskan penyesuaian target, indikator, dan alokasi anggaran dalam Renja Perubahan 2024, guna memastikan bahwa program dan kegiatan yang dijalankan benar-benar relevan dan

berdampak terhadap peningkatan kualitas manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2024

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, serta memperhatikan perubahan kondisi, kebutuhan, dan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka dilakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024. Penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas pelaksanaan program, memperkuat pencapaian sasaran kinerja daerah, serta memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan akuntabel.

Perubahan yang dilakukan mencakup revisi terhadap target indikator kinerja, realokasi dan perubahan pagu anggaran, serta penambahan atau pengurangan subkegiatan sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan. Selain itu, beberapa target output kegiatan juga disesuaikan berdasarkan realisasi yang telah dicapai, baik yang melampaui maupun yang belum memenuhi target sebelumnya. Penyesuaian ini menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas nasional, serta mendukung terwujudnya tata kelola kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur yang profesional dan berkinerja tinggi.

Dalam proses penyusunan perubahan ini, BKPSDM Kabupaten Tabalong juga mempertimbangkan masukan dari hasil monitoring dan evaluasi internal, perubahan regulasi, serta kebutuhan organisasi yang mendesak, termasuk kebutuhan operasional, penyesuaian formasi ASN, dan urgensi pelayanan administrasi kepegawaian yang semakin kompleks. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan tidak semata bersifat administratif, melainkan juga strategis untuk meningkatkan kinerja kelembagaan secara keseluruhan.

Perubahan ini diharapkan dapat mendorong pencapaian target tahunan secara lebih realistis dan berdampak, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang kepegawaian dan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Berikut ini disajikan rincian perubahan program, kegiatan, subkegiatan, beserta target indikator kinerja dan pagu anggaran pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 BKPSDM Kabupaten Tabalong:

Tabel 3.1
Perubahan Renja
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2024
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan)					Perkiraan Maju (Renja Tahun 2025)	
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif				
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah perubahan +/(-)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 12-11	(16)	(17)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					15.172.009.433	18.376.717.607	3.204.708.174		18.098.158.220
KEPEGAWAIAN					11.585.487.907	15.241.575.673	3.656.087.766		13.506.804.513
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Kesekretariatan (Nilai)	Nilai IKM Kesekretariatan (Nilai)	92	92	7.030.007.685	9.273.425.979	2.243.418.294	92	8.719.325.905
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100%	100%	51.826.565	101.826.565	50.000.000	100%	84.078.850
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	26.276.190	36.276.190	10.000.000	2 Dokumen	35.448.560
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan	25.550.375	65.550.375	40.000.000	10 Laporan	48.630.290
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	100%	100%	5.261.698.744	5.301.698.744	40.000.000	100%	5.286.861.870
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ bulan	27 Orang/ bulan	5.232.774.000	5.232.774.000	-	27 Orang/ bulan	5.232.774.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	28.924.744	68.924.744	40.000.000	12 Laporan	54.087.870
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100%	-	492.000.000	492.000.000	100%	244.400.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	41 steel	-	82.000.000	82.000.000	41 steel	44.400.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	41 orang	-	410.000.000	410.000.000	41 orang	200.000.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100%	100%	739.650.770	1.443.650.770	704.000.000	100%	1.400.789.708
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	23.213.730	23.213.730	-	2 Paket	26.174.902
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 buah	15 buah	375.311.419	725.311.419	350.000.000	15 buah	681.424.380
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	35.331.621	51.331.621	16.000.000	4 Paket	36.448.790
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1163 Dokumen	1163 Dokumen	4.320.000	17.320.000	13.000.000	1163 Dokumen	10.380.000
Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	20 Laporan	301.474.000	601.474.000	300.000.000	200 Laporan	619.445.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-		-		-	10.000.000	10.000.000		16.716.636
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-		-		-	15.000.000	15.000.000		10.200.000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	-	100%	-	500.000.000	500.000.000	100%	75.270.117
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	7 buah	-	500.000.000	500.000.000	7 buah	75.270.117
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	100%	678.629.900	784.129.900	105.500.000	100%	839.899.900
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	4.500.000	10.000.000	5.500.000	1 Laporan	5.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	118.200.000	118.200.000	-	1 Laporan	118.200.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	555.929.900	655.929.900	100.000.000	1 Laporan	716.699.900
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	100%	100%	298.201.706	650.120.000	351.918.294	100%	788.025.460

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	20 Unit	164.750.000	314.750.000	150.000.000	20 Unit	241.110.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	65 Unit	43.370.000	45.370.000	2.000.000	65 Unit	43.370.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	90.081.706	290.000.000	199.918.294	3 Unit	503.545.460
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks kepuasan pelayanan administrasi Kepegawaian daerah (nilai)	Indeks kepuasan pelayanan administrasi Kepegawaian daerah (nilai)	82	82	4.555.480.222	5.968.149.694	1.412.669.472	82	4.787.478.608
	Persentase Penyusunan Formasi dan Pelaksanaan dan Pengadaan ASN (Persen)	Persentase Penyusunan Formasi dan Pelaksanaan dan Pengadaan ASN (Persen)	100%	100%				100%	
	Persentase penempatan ASN sesuai analis jabatan (Persen)	Persentase penempatan ASN sesuai analis jabatan (Persen)	90%	90%				90%	
	Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin ASN (Persen)	Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin ASN (Persen)	100%	100%				100%	
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (nilai)	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (nilai)	92	92	1.330.314.535	2.094.105.711	763.791.176	92	1.122.917.738
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 dokumen	1 dokumen	33.400.000	98.345.000	64.945.000	1 dokumen	25.333.000
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 laporan	1 laporan	481.555.760	588.601.760	107.046.000	1 laporan	372.516.258
	Persentase penyusunan formasi dan pelaksanaan dan pengadaan ASN	Persentase penyusunan formasi dan pelaksanaan dan pengadaan ASN	100%	100%				100%	
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 dokumen	1 dokumen	172.749.075	639.797.075	467.048.000	1 dokumen	352.749.075
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan HUT Korpri	Jumlah kegiatan HUT Korpri	4 Kegiatan	4 Kegiatan	497.142.900	616.495.076	119.352.176	4 Kegiatan	293.508.925
	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 lembaga	1 lembaga				1 lembaga	
	Jumlah PNS yang mendapatkan hak cuti	Jumlah PNS yang mendapatkan hak cuti	150 orang	150 orang				150 orang	
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	145.466.800	150.866.800	5.400.000	1 dokumen	78.810.480
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Indeks kepuasan terhadap layanan mutasi dan promosi ASN (Nilai)	Indeks kepuasan terhadap layanan mutasi dan promosi ASN (Nilai)	90	90	654.092.752	908.734.171	254.641.419	90	940.000.000

Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	201.015.877	198.199.736	(2.816.141)	20 Dokumen	280.000.000
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	650 Dokumen	650 Dokumen	222.580.167	394.240.187	171.660.020	650 Dokumen	360.000.000
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	7 Dokumen	7 Dokumen	230.496.708	316.294.248	85.797.540	7 Dokumen	300.000.000
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Peningkatan Pendidikan (Persen)	Persentase Peningkatan Pendidikan (Persen)	100%	100%	2.125.269.348	2.464.275.348	339.006.000	100%	1.793.563.400
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	70 orang	70 orang	702.408.900	626.670.900	(75.738.000)	70 orang	502.626.900
	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	2 dokumen	2 dokumen				2 dokumen	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	60 Orang	60 Orang	1.422.860.448	1.837.604.448	414.744.000	60 Orang	1.290.936.500
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Kepuasan Terhadap layanan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (nilai)	Indeks Kepuasan Terhadap layanan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (nilai)	92	92	445.803.587	501.034.464	55.230.877	92	930.997.470
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4000 Dokumen	4000 Dokumen	90.490.996	90.490.996	-	4000 Dokumen	200.000.000
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	150 PNS	150 PNS	119.868.843	124.570.000	4.701.157	150 PNS	450.000.000
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	200 orang	200 orang	186.154.748	223.313.468	37.158.720	200 orang	200.000.000
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	5 Laporan	24.290.000	37.661.000	13.371.000	5 Laporan	55.000.000
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	10 Dokumen	10 Dokumen	24.999.000	24.999.000	-	10 Dokumen	25.997.470,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					3.586.521.526	3.135.141.934	(451.379.592)		4.591.353.707
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai (Persen)	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai (Persen)	100%	100%	3.586.521.526	3.135.141.934	(451.379.592)	100%	4.591.353.707
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pengembangan Kompetensi teknis (Persen)	Persentase pengembangan Kompetensi teknis (Persen)	100%	100%	768.906.000	941.187.000	172.281.000	100%	1.122.094.973
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	65 Orang	120 Orang	768.906.000	941.187.000	172.281.000	80 Orang	1.122.094.973
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pengembangan manajerial dan fungsional (Persen)	Persentase pengembangan manajerial dan fungsional (Persen)	100%	100%	2.228.760.974	2.093.954.934	(134.806.040)	100%	3.199.529.734

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	2 Laporan	2.228.760.974	2.093.954.934	(134.806.040)	2 Laporan	3.199.529.734
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	100%	100%	588.854.552	100.000.000	(488.854.552)	100%	269.729.000
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	6 Orang	6 Orang	588.854.552	100.000.000	(488.854.552)	6 Orang	269.729.000

Berdasarkan data dalam Tabel 3.1, terlihat adanya sejumlah perubahan signifikan dalam perencanaan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Tabalong Tahun 2024. Perubahan tersebut mencakup penyesuaian target indikator kinerja, penambahan maupun pengurangan pagu anggaran, serta penguatan fokus pada kegiatan-kegiatan yang dianggap prioritas sesuai kebutuhan aktual dan hasil evaluasi kinerja semester pertama.

Beberapa subkegiatan mengalami peningkatan pagu anggaran secara substansial. Salah satunya adalah subkegiatan Administrasi Kepegawaian yang mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp492 juta. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pelayanan administrasi kepegawaian, seperti pengelolaan mutasi, promosi, dan kenaikan pangkat ASN menjadi prioritas utama BKPSDM. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja juga mengalami penyesuaian pagu sebesar Rp40 juta, mengindikasikan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja kelembagaan.

Selain itu, terdapat kegiatan strategis yang sebelumnya tidak tercantum namun kemudian dimunculkan dalam perubahan, seperti Pengadaan Kendaraan Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp500 juta. Ini menunjukkan adanya kebutuhan logistik yang selama ini belum terakomodasi dan dinilai penting untuk mendukung mobilitas pegawai dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepegawaian. Penambahan pada kegiatan Konsultasi dan Koordinasi antar-SKPD juga mencerminkan pentingnya penguatan sinergi dan kerja sama antarinstansi dalam mempercepat pelayanan publik.

Di sisi lain, terdapat kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran, seperti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, yang mengalami penyesuaian turun sebesar Rp488 juta. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh efisiensi metode pelatihan, keterbatasan kapasitas peserta, atau perubahan prioritas ke pelatihan teknis lainnya yang lebih relevan dengan kebutuhan ASN.

Dari sisi target kinerja, beberapa indikator juga mengalami penyesuaian ke atas. Contohnya, jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis meningkat dari 65 orang menjadi 120 orang, menandakan adanya komitmen yang lebih kuat dalam mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Selain itu, terdapat penambahan

target kendaraan operasional dari tidak ada menjadi tujuh unit, yang mencerminkan upaya memperkuat sarana penunjang kinerja instansi.

Secara keseluruhan, perubahan-perubahan yang ditampilkan dalam Tabel 3.1 mencerminkan perencanaan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan organisasi. BKPSDM Kabupaten Tabalong telah mengarahkan anggaran dan program secara lebih tepat sasaran, dengan fokus pada efektivitas pelayanan, pengembangan kapasitas ASN, serta penguatan sistem pendukung kelembagaan.

BAB V
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II, perubahan kebijakan daerah dan nasional, serta kondisi riil kebutuhan organisasi.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah mencapai atau bahkan melampaui target, khususnya pada aspek administrasi kepegawaian dan pelayanan perencanaan. Namun, terdapat pula beberapa indikator dengan capaian rendah yang memerlukan perhatian dan strategi pelaksanaan yang lebih tepat sasaran, seperti pembinaan disiplin ASN.

Perubahan program dan kegiatan yang dirumuskan dalam dokumen ini menunjukkan adanya pergeseran fokus anggaran dan target kinerja ke arah yang lebih operasional, realistis, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian. Penyesuaian pagu, penambahan kegiatan strategis, serta peningkatan target output seperti diklat ASN dan pengadaan sarana operasional menjadi bukti komitmen BKPSDM dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

Secara umum, dokumen ini diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan yang lebih adaptif dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan sumber daya aparatur secara optimal.

4.2 Saran

1. **Penguatan koordinasi internal dan lintas perangkat daerah** perlu terus dilakukan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lebih sinergis dan tidak tumpang tindih.
2. **Pembinaan disiplin ASN** agar lebih ditingkatkan, tidak hanya berbasis penindakan, tetapi juga melalui edukasi, sosialisasi aturan, dan pembinaan budaya kerja positif.

3. **Monitoring dan evaluasi berkala** wajib dilaksanakan untuk memastikan seluruh program yang telah disesuaikan dalam Renja Perubahan benar-benar mencapai output dan outcome yang diharapkan.
4. **Penggunaan anggaran** agar tetap berorientasi pada hasil (result-based budgeting) dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.
5. **Dokumentasi pelaksanaan program** perlu ditingkatkan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan dalam proses pelaporan kinerja.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, diharapkan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 BKPSDM Kabupaten Tabalong dapat berjalan dengan baik dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola sumber daya manusia aparatur daerah

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG

RENCANA KERJA
PERUBAHAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana kami telah dapat menyelesaikan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024. Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 disusun berdasarkan acuan Rencana Strategis 2019-2024 dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman kepada segenap Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam pelaksanaan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masa satu tahun dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal. Analisis dilakukan secara mendalam pada setiap sasaran untuk memperlihatkan kinerja sesungguhnya, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi.

Akhirnya, kami berharap dengan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh stakeholders dan media dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Tanjung, 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tabalong,

Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720306 199203 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan 6

1.4 Maksud dan Tujuan 6

1.5 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TRIWULAN II 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD Hingga Triwulan II 8

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG 17

BAB IV PENUTUP 34

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong 8
Tabel 2. 2 Realisasi Pendapatan Daerah hingga Triwulan II 11
Tabel 2. 3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah 13
Tabel 3.1 Rekapitulasi Daftar Perubahan Program dan Perubahan Kegiatan pada Rencanan Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024, sedangkan Perubahan Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUPA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2024.

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk

mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain sebagai berikut :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun n-1 dan mengacu RKPD tahun n.
2. Program dalam Rencana Kerja SKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun n.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja SKPD dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan Misi Pembangunan ke-3 Pemerintah Kabupaten Tabalong yakni "Mewujudkan Kemandirian Daerah. Dukungan untuk menyukseskan misi ke-3 dilaksanakan yaitu optimalisasi pendaatan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. Pada pertengahan tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang mengacu pada Perubahan RKPD 2024 dan Renstra 2020-2024. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah tercantum dalam KUPA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKAP-PD).

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 menggunakan landasan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunannya antara lain:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 927);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026;
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026;
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 52).

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong;
2. Keadaan yang mengakibatkan penambahan atau pengurangan kegiatan, target kinerja dan pagu kegiatan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah untuk penyempurnaan Rencana Kerja untuk menyesuaikan perubahan target terhadap program dan kegiatan dan menyesuaikan perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan perubahan tahun 2024 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong;
2. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD Hingga Triwulan II

Berdasarkan hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2024

NO	KODE REKENING	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA		REALISASI		%
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**BB (80)**	-	**14,420,346,950**	**4,485,594,630**	**31.11**
1	**5.02.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah**	**34 Dokumen**	**20 Dokumen**	**43,040,000**	**13,278,200**	**30.85**
	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34 Dokumen	20 Dokumen	43,040,000	13,278,200	30.85
2	**5.02.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah**	**44 Dokumen**	6 Bln	**9,820,323,000**	**3,459,047,367**	**35.22**
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan	60 Orang	9,820,323,000	3,459,047,367	35.22
3	**5.02.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi kepegawaian**	1	**35%**	**50,000,000**	**35,260,000**	**70.52**
	5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	14 Orang	50,000,000	35,260,000	70.52
4	**5.02.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya kegiatan administrasi umum**	1	**50%**	**1,274,640,919**	**377,557,417**	**29.62**
	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	18,966,417	0	-

NO	KODE REKENING	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA		REALISASI		%
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	379,175,354	18,059,259	4.76
	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	113,560,148	9,258,631	8.15
	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114 Laporan	69 Laporan	762,939,000	350,239,527	45.91
5	**5.02.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya barang milik daerah**	**Unit**	-	**391,780,677**	**0**	-
	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	-	79,994,430	**0**	-
	5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	-	311,786,247	**0**	-
6	**5.02.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan**	**12 Bulan**	**6 Bulan**	**1,440,196,287**	**513,716,833**	35.67
	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	4 Laporan	2 Laporan	6,000,000	1,750,000	29.17
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	183,000,000	71,464,680	39.05
	5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2 Laporan	53,637,087	1,830,000	3.41
	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	1,197,559,200	438,672,153	36.63
7	**5.02.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1**	**6 Bulan**	**1,400,366,067**	**86,734,813**	**6.19**
	5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit	8 Unit	469,990,000	86,734,813	18.45
	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	-	930,376,067	0	-
II.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Konstibusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**	**43,54 %**	**80.48%**	**2,894,485,708**	**531,711,062**	**18.37**
			Persentase Konstibusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	**5,1 %**	**5.62%**			

NO	KODE REKENING	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA		REALISASI		%
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase SKPD pengelola PAD yang mencapai target (%)	**0.14**	**60.00%**			
1	5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah Pajak Daerah**	**99.332.283.832**	**39.979.985.113**	**2,894,485,708**	**531,711,062**	**18.37**
			Jumlah Retribusi Daerah	**11.638.406.296**	**3.118.684.362**			
			Jumlah OPD pengelola retribusi yang mencapai target	**4 OPD**	**7 OPD**			
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pendapatan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	10,200,000	3,550,000	34.80
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	9 Dokumen	339,338,756	17,657,300	5.20
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	496,220,282	52,122,409	10.50
	5.02.04.2.01.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Dokumen	6 Dokumen	60,420,000	12,117,050	20.05
	5.02.04.2.01.0005	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	24 Dokumen	10 Dokumen	179,549,000	18,774,263	10.46
	5.02.04.2.01.0006	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1750 OP	880 OP	185,224,000	75,557,580	40.79
	5.02.04.2.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	132 Dokumen	66 Dokumen	223,378,542	31,708,823	14.20
	5.02.04.2.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9520 Layanan	3740 Layanan	110,893,885	49,571,252	44.70
	5.02.04.2.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12500 Dokumen	6367 Dokumen	196,938,200	85,835,807	3.59
	5.02.04.2.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	624,040,000	67,674,639	10.84
	5.02.04.2.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Laporan	3 Laporan	280,279,611	36,284,626	12.95
	5.02.04.2.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	96,385,232	34,446,928	35.74

NO	KODE REKENING	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA		REALISASI		%
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.02.04.2.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	2 Laporan	91,618,200	46,410,385	50.66
		Total				**17,314,832,658**	**5,017,305,692**	**28.98**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong

Adapun capaian pendapatan dari sektor pajak dan retribusi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2
Realisasi Pendapatan Daerah hingga Triwulan II
Tahun Anggaran 2024

Komponen Pendapatan Daerah	Realisasi	
	Triwulan I	Triwulan II
PENDAPATAN DAERAH	**546.425.549.771,48**	**1.176.193.316.350,40**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**60.907.109.928,48**	**118.326.985.852,43**
Pajak Daerah	21.695.547.759,00	41.792.961.105,00
Retribusi Daerah	1.446.488.733,00	3.267.201.412,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.226.686.396,00	14.735.829.206,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23.538.387.040,48	58.530.994.129,43
PENDAPATAN TRANSFER	**485.518.439.843,00**	**1.057.866.330.498,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	417.558.722.388,00	933.807.506.941,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.959.717.455,00	124.058.823.557,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-
Pendapatan Hibah	-	-

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian kinerja seluruh program Badan Pendapatan Daerah sebagian sudah mencapai target yang sesuai dengan rencana aksi. Hasil evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah
Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 (Triwulan II)

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Semua Bidang																							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Nilai)	5.00	-	5.00	-	5	14,420,346,950		3,022,347,806		1,463,348,624		-		-	-	4,485,594,630	0.00%	31.11%	5.00	4,485,594,630		0.00%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah (10 Dokumen)			0.00	-	23	43,040,000	13	9,238,200	7	4,040,000		-		-	20	13,278,200	86.96%	30.85%	20.00	13,278,200	0.00%	0.00%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun(*) ( )			0.00	-	23	43,040,000	13	9,238,200	7	4,040,000		-		-	20	13,278,200	86.96%	30.85%	20.00	13,278,200	0.00%	0.00%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanahya pelaksanaan keuangan Perangkat Daerah (36 Dokumen)			0.00	-	12	9,820,323,000	3	2,396,610,307	3	1,062,437,060		-		-	6	3,459,047,367	50.00%	35.22%	6.00	3,459,047,367	0.00%	0.00%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)			0.00	-	31	9,820,323,000	31	2,396,610,307	31	1,062,437,060		-		-	16	3,459,047,367	50.00%	35.22%	15.50	3,459,047,367	0.00%	0.00%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksanahya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Bulan)			0.00	-	100	50,000,000	25	7,700,000	25	27,560,000		-		-	50	35,260,000	50.00%	70.52%	50.00	35,260,000	0.00%	0.00%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			0.00	-	0		-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			0.00	-	10	50,000,000	6	7,700,000	8	27,560,000		-		-	14	35,260,000	140.00%	70.52%	14.00	35,260,000	0.00%	0.00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanahya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Perseo)			0.00	-	100	1,274,646,919	25	163,624,112	25	213,733,305		-		-	50	377,357,417	50.00%	29.62%	50.00	377,357,417	0.00%	0.00%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			0.00	-	4	18,964,417	1	-	1	-					2	-	50.00%	0.00%	2.00	-	0.00%	0.00%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			0.00	-	4	379,175,354	1	2,465,000	1	15,594,259					2	18,059,259	50.00%	4.76%	2.00	18,059,259	0.00%	0.00%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			0.00	-	0		-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			0.00	-	4	113,560,143	1	7,990,900	1	1,267,731					2	9,258,631	50.00%	8.15%	2.00	9,258,631	0.00%	0.00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			0.00	-	114	762,909,000	29	153,368,212	40	196,971,315					69	350,239,527	60.53%	45.91%	69.00	350,239,527	0.00%	0.00%

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah (Persen)		-	0.00	-	100	391,780,677	25	-	25	-		-		-	50		50.00%	0.00%	50.00	-	0.00%	0.00%
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	* Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		-	0.00	-	0	-	-	-	-	-		-		-	-		0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	* Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		-	0.00	-	0	-	-	-	-	-		-		-	-		0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
		Pengadaan Mebel	* Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		-	0.00	-	0	-	-	-	-	-		-		-	-		0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	* Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0.00	-	8	79,994,430	-	-	-	-		-		-	-		0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	* Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0.00	-	0	-	-	-	-	-		-		-	-		0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	* Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0.00	-	0	-	-	-	-	-		-		-	-		0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	* Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0.00	-	88	311,786,247	-	-	-	-		-		-	-		0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan (Persen)		-	0.00	-	12	1,440,196,267	3	390,156,674	3	123,560,159		-		-	6	513,716,833	50.00%	35.67%	6.00	513,716,833	0.00%	0.00%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	* Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0.00	-	4	6,000,000	1	1,750,000	1	-					2	1,750,000	50.00%	29.17%	2.00	1,750,000	0.00%	0.00%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	* Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0.00	-	12	183,000,000	3	50,956,415	3	21,408,265					6	71,464,680	50.00%	39.05%	6.00	71,464,680	0.00%	0.00%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	* Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0.00	-	4	53,637,067	1	1,830,000	1	-					2	1,830,000	50.00%	3.41%	2.00	1,830,000	0.00%	0.00%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	* Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0.00	-	12	1,197,559,200	3	336,500,259	3	102,151,894					6	438,672,153	50.00%	36.63%	6.00	438,672,153	0.00%	0.00%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)		-	0.00	-	100	1,400,366,067	25	54,716,513	25	32,016,300		-		-	50	86,734,813	50.00%	6.19%	50.00	86,734,813	0.00%	0.00%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	* Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0.00	-	40	469,980,000	-	54,716,513	8	32,016,300					8	86,734,813	20.00%	18.45%	8.00	86,734,813	0.00%	0.00%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	* Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0.00	-	1	930,376,067	-	-	-	-		-		-	-		0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		45.42%	31.11%				
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				

		KEUANGAN																							
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase SKPD pengelola PAD yang mencapai target (%) (%)	14.00		61.53		14												0.00%		14.00			
			Persentase Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (%)	5.10		2.68		5.1	2,894,485,709		235,696,328		296,014,734						531,711,062	0.00%	18.37%	5.10	531,711,062		0.00%
			Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (%)	43.54		40.52		43.54												0.00%		43.54			
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	4. Jumlah Pajak Daerah 5. Jumlah Retribusi Daerah 5. Jumlah OPD pengelola retribusi yang mencapai target (12.187.192. 358 Rupiah 4 OPD)			0.00		0												0.00%		0.00		0.00%	
			Jumlah Pajak Daerah (Rupiah)			0.00		104,016,101,466		21,607,070,645		39,973,985,113					39,973,985,113	38.44%		39979985113.00		0.00%	
			Jumlah Retribusi Daerah (Rupiah)			0.00		12,187,192,358		1,340,711,633		3,119,684,362					3,118,684,362	25.59%		3119684362.00		0.00%	
			Jumlah OPD pengelola retribusi yang mencapai target (OPD)			0.00		4		7		7					14	350.00%		14.00		0.00%	
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	* Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)			0.00		4	10,200,000	1		2	3,550,000				3	3,550,000	75.00%	34.80%	3.00	3,550,000	0.00%	0.00%
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	* Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)			0.00		3	339,338,756	6	4,898,200	3	12,759,100				9	17,657,300	300.00%	5.20%	9.00	17,657,300	0.00%	0.00%
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	* Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)			0.00		4	496,220,292	1	30,262,991	1	21,859,419				2	52,122,409	50.00%	10.50%	2.00	52,122,409	0.00%	0.00%
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	* Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)			0.00		4	60,420,000	1	2,738,200	1	9,378,850				2	12,117,050	50.00%	20.06%	2.00	12,117,050	0.00%	0.00%
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	* Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)			0.00		24	179,549,000	5	9,951,300	1	8,822,963				10	18,774,263	41.67%	10.46%	10.00	18,774,263	0.00%	0.00%
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (P6BP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	* Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Objek Pajak)			0.00		1750	165,224,000	392	31,013,568	488	44,544,012				880	75,557,580	50.29%	40.79%	880.00	75,557,580	0.00%	0.00%
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	* Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)			0.00		132	223,378,542	33	31,708,823	33	-				66	31,708,823	50.00%	14.20%	66.00	31,708,823	0.00%	0.00%
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	* Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)			0.00		9520	110,893,885	1,392	15,565,200	2,348	34,006,052				3,740	49,571,252	39.29%	44.70%	3740.00	49,571,252	0.00%	0.00%
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	* Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)			0.00		12500	196,938,200	2,401	37,094,649	3,966	48,741,158				6,367	85,835,807	50.94%	43.59%	6367.00	85,835,807	0.00%	0.00%
		Penagihan Pajak Daerah	* Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)			0.00		4	624,940,000	1	36,667,539	1	30,807,100				2	67,674,639	50.00%	10.84%	2.00	67,674,639	0.00%	0.00%

		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)			-	0.00	-	4	-	-	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)			-	0.00	-	4	280,279,611	2	6,851,426	1	29,433,200					3	36,284,626	75.00%	12.95%	3.00	36,284,626	0.00%	0.00%
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)			-	0.00	-	4	96,395,232	3	12,908,924	1	21,516,064					4	34,446,929	100.00%	35.74%	4.00	34,446,929	0.00%	0.00%
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)			-	0.00	-	4	91,616,200	1	15,835,506	1	30,574,877					2	46,410,385	50.00%	50.66%	2.00	46,410,385	0.00%	0.00%
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%):		82.64%	18.37%				
																				Predikat Kinerja:		Tinggi	Sangat Rendah				
									17,314,832,658	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												51.64%	28.98%				
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Rendah	Sangat Rendah				

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**):

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG

Dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024, ada beberapa kegiatan yang bertambah dan ada juga yang mengalami perubahan dari segi target dan anggaran, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Target Indikator Nilai AKIP adalah 80 (BB)

    1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Target Indikator Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah dengan target 23 dokumen berubah menjadi 34 dokumen.

        1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Pada saat APBDP 2024 ini mengalami perubahan dari pagu kegiatannya Rp. 43.040.000,- menjadi Rp. 123.309.000,- dengan target kinerja jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah awalnya sebanyak 23 dokumen menjadi 34 dokumen. Penambahan tersebut untuk penambahan honor PPTK dan belanja perjalanan dinas terkait perencanaan

    2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Target Indikator Terpenuhinya Administrasi Keuangan selama 12 bulan.

        2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Pada sub kegiatan ini pada APBDP 2023 mengalami pergeseran dan penambahan belanja sebesar Rp 792.904.000,- dari pagu awal Rp. 9.820.323.000,- menjadi 10.613.227.000,-. Penambahan pagu untuk kekurangan tunjangan fungsional PPPK, tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS, iuran jaminan kesehatan PPPK, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS, tambahan penghasilan berdasarkankondisi kerja PNS dan pergeseran belanja insentif non ASN dan insentif KDH/WKDH untuk menambah belanja insentif ASN. Target indikator pada sub kegiatan ini juga berubah, untuk jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN yang sebelumnya 31 Orang/ Bulan menjadi 30 Orang/ Bulan.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Target Indikator Terlaksananya Administrasi Kepegawaian 100%

3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Selengkapnya. Sub kegiatan ini baru muncul pada APBDP 2024 ini dengan pagu Rp. 62.173.320,- guna pembelian pakaian batik/sasirangan hari jadi Tabalong. Target indikator ini adalah jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sebanyak 1 paket.

3.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Pada perubahan ini mengalami penambahan pagu sebesar Rp. 100.000.000,- dari pagu awal Rp. 50.000.000,- menjadi Rp. 150.000.000,-. Penambahan pagu ini terdiri dari penambahan jumlah peserta pelatihan yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sebelumnya 10 orang menjadi 30 orang. Target kinerja juga mengalami perubahan, untuk jumlah pegawai berdasar tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sebelumnya 10 orang menjadi 30 orang.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Target Indikator Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum 100%

4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, terdapat pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 673.992,- dari Rp. 18.966.417,- menjdai Rp. 18.292.425,-. Untuk indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan tidak mengalami perubahan, tetap 4 paket.

4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Terdapat penambahan pagu belanja sebesar Rp. 2.918.054,- dari Rp. 379.175.354,- menjadi Rp. 382.093.408,-. Penambahannya berupa Penambahan Anggaran Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Pada sub kegiatan ini terdapat pengurangan pagu sebesar Rp. 13.321.590, dari pagu awal Rp. 113.560.148,- menjadi Rp. 100.238.558,-. Target indikator kinerja pada sub kegiatan ini yaitu jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan tidak mengalami perubahan, tetap 4 paket.

4.4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Pada sub kegiatan ini terdapat penambahan pagu anggaran

sebesar Rp. 689.314.000, dari pagu induk Rp. 762.939.000,- menjadi Rp. 1.452.253.000. Penambahan anggaran ini terdiri dari penambahan belanja perjalanan dinas untuk kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong. Target indikator kinerja jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD mengalami perubahan dari 114 laporan menjadi 184 laporan.

4.4 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD. Sub kegiatan ini merupakan sub kegiatan yang baru pada APBDP 2024 dengan pagu anggaran Rp. 286.611.135,- yang berisi belanja boks arsip, jasa penataan arsip dan rak arsip. Target indikator kinerja jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD adalah 3 paket.

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Target Indikator Tersedianya Barang Milik Daerah dari 96 unit menjadi 68 unit.

5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 400.955.531,- dari pagu awal Rp. 79.994.430,- menjadi Rp. 480.949.961,-, yang berisi penambahan belanja pompa air, mesin penghancur kertas, running text jam musholla, vacum cleaner,dispenser bawah, sound system ruangan, laptop teknis, printer, audio mixer, TV 65 Inchi, TV 98 Inch. Target indikator kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan mengalami penambahan dari 8 unit menjadi 28 unit.

5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 144.304.888,- dari Rp. 311.786.247,- menjadi Rp. 456.091.135,- untuk Penambahan belanja gorden, karpet, papan reklame (neon box), meja baca HPL, sedangkan meja kerja anggarannya dihapus. Target indikator Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan mengalami penambahan dari 30 unit menjadi 40 unit.

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Target Indikator Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 12 bulan

6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Pada sub kegiatan ini tidak mengalami perubahan. Pagu anggarannya tetap Rp.

6.000.000 dengan target indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 4 laporan.

6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Pada sub kegiatan ini tidak mengalami perubahan, pagu anggarannya tetap sebesar Rp. 183.000.000,-. Target indikator jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan tidak mengalami perubahan, yaitu 12 laporan.

6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 27.703.102,- dari pagu awal Rp. 53.637.087,- menjadi Rp. 81.340.189,-, guna pembelian tinta printer, aksesoris komputer dan hardisk eksterna . Terget indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan tidak mengalami perubahan, yaitu 4 laporan.

6.4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, adanya penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 5.400.000,- dari pagu awal sebesar Rp. 1.197.559.200,- menjadi Rp. 1.202.959.200,- dikarenakan adanya penambahan belanja makan dan minum rapat. Target indikator jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan tidak mengalami perubahan, yaitu 12 laporan.

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Target Indikator Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100%

7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, tidak ada penambahan penambahan pagu anggaran, tetap sebesar Rp. 469.990.000,-. Target indikator jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 40 unit.

7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 42.075.254,- dari pagu awal Rp. 930.376.067,- menjadi Rp. 972.451.321,- untuk belanja perencanaan, pengawasan dan rehab atap. Target indikator jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi tidak mengalami perubahan, yaitu 1 unit.

2. Program Pengelola Pendapatan Daerah dengan Perubahan Target Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 35,18%, Persentase Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 46,10%, Persentase SKPD Pengelola PAD yang Mencapai Target 54%.

   1) Kegiatan Pengelola Pendapatan Daerah dengan Perubahan Target Indikator Jumlah Pajak Daerah Rp. 85.313.474.000,-, Jumlah Retribusi Daerah Rp. 111.795.793.776,-, Jumlah OPD Pengelola Retribusi yang Mencapai Target 7 dari 13 PD.

      1.1 Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, tidak terdapat penambahan pagu anggaran, tetap Rp. 10.200.000,-. Target indikator Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah juga tidak mengalami perubahan, tetap 4 Dokumen.

      1.2 Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, adanya penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 236.079.963,- dari pagu sebelumnya Rp. 339.338.756,- menjadi Rp. 575.418.719,- penambahan guna pembayaran penambahan honorarium PPTK, pembelian seragam sasirangan, honorarium narasumber, belanja perjalanan dinas dalam provinsi dan luar provinsi, perjalanan dinas dalam kota, belanja modal laptop teknis, tablet, printer Target indikator jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah mengalami perubahan, dari 3 dokumen menjadi 11 dokumen.

      1.3 Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 358.606.824,-, dari pagu awal Rp. 496.220.282,- menjadi Rp. 854.827.106,-. Penambahan anggaran untuk penambahan belanja untuk diserahkan kepada masyarakat untuk kegiatan sosialisasi pajak daerah, belanja makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, sewa gedung, belanja perjalanan dinas biasa luar provinsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota. Target indikator jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah tidak mengalami perubahan, yaitu 4 laporan.

      1.4 Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 155.770.380,- dari pagu awal sebesar Rp. 60.420.000,- menjadi Rp. 216.190.380,- untuk Penambahan belanja fotocopy, honorarium narasumber atau

pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, dan perjalanan dinas biasa. Target indikator jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah tidak mengalami perubahan, tetap 4 laporan.

1.5 Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 244.149.000,- dari pagu awal sebesar Rp. 179.549.000,- menjadi Rp. 423.698.000,- dikarenakan adanya Penambahan untuk belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, belanja sewa komputer jaringan (langganan dedicated server pajak daerah, 2 IP), SSL server SIMPBB SIMBPHTB, Perbaikan Pembayaran SIMPBB SIMPBB dan Pemasangan Antivirus, belanja perjalanan dinas biasa, belanja modal laptop teknis dan belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software). Untuk target indikator jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah mengalami perubahan, dari 24 laporan menjadi 22 laporan.

1.6 Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adanya penambahan anggaran sebesar Rp. 619.039.561,- dari sebelumnya Rp. 185.224.000,- menjadi Rp. 804.263.561,- untuk penambahan Penambahan untuk belanja ATK, belanja cetak, belanja bahan komputer, belanja suvenir/ cindera mata, belanja pakaian dinas lapangan, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, belanja jasa iklan/ reklame, film dan pemotretan, belanja pemeliharaan camera untuk kegiatan penilaian PBB P2 serta BPHTB, penambahan belanja perjalanan dinas biasa, belanja modal telpon seluler, personal computer dekstop all in one, PC Admin geospasial, monitor display, printer portable,tablet, printer dot matrik, printer multi fungsi besar, NAS Storage, proyektor, UPS dan Aplikasi Sistem Informasi Geografis. Target indikator jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya mengalami perubahan,dari 1750 OP menjadi 2750 OP .

1.7 Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak, terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 359.933.724,- dari pagu awal sebesar Rp. 223.378.542,- menjadi Rp. 583.312.266,- untuk Penambahan untuk belanja kertas dan cover, belanja bahan komputer, perlengkapan dinas, souvenir, pakaian batik tradisional, belanja perjalanan dinas, belanja modal perlengkapan kantor dan belanja modal pengadaaan

aplikasi pajak daerah. Target indikator jumlah dokumen ketetapan pajak daerah tidak mengalami perubahan, tetap 132 dokumen.

1.8 Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 350.893.885,- dari pagu awal Rp. 110.893.885,- menjadi Rp. 461.787.770,- untuk Penambahan untuk belanja kertas dan cover, belanja bahan komputer, perlengkapan dinas, souvenir, pakaian batik tradisional, belanja perjalanan dinas, belanja modal perlengkapan kantor dan belanja modal pengadaaan aplikasi pajak daerah. Target indikator jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah mengalami perubahan, dari 9.520 layanan menjadi 12.520 layanan.

1.9 Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, adanya penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 44.010.000,- dari pagu sebelumnya Rp. 196.938.200,- menjadi Rp. 240.948.200,- untuk Penambahan untuk honor PPTK, belanja makan dan minum rapat/ sosialisasi/ bimtek/ lokakarya/ workshop/ seminar/ pertemuan. Target indikator jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi ada perubahan, dari 4 dokumen menjadi 13.750 dokumen.

1.10 Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 176.551.179,- dari pagu awal sebesar Rp. 624.040.000,- menjadi Rp. 800.591.179,- dikarenakan adanya Penambahan untuk honor PPTK, belanja makan dan minum rapat/ sosialisasi/ bimtek/ lokakarya/ workshop/ seminar/ pertemuan. Target indikator jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah tidak mengalami perubahan, tetap sebanyak 4 dokumen

1.11 Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 248.540.040,- dari pagu awal Rp. 280.279.611,- menjadi Rp. 528.819.651 untuk Penambahan untuk honor PPTK, belanja souvenir/ cinderamata, belanja perjalanan dinas biasa, belanja modal laptop non teknis, personal komputer, tablet, printer, belanja modal upgrade dan pengembangan aplikasi ependa. Target indikator jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah mengalami perubahan, dari 4 dokumen menjadi 5 dokumen.

1.12 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 116.677.000,-, dari pagu awal Rp. 96.385.232,- menjadi

Rp. 213.062.232,- dikarenakan adanya Penambahan untuk belanjaperlengkapan dinas (sepatu dan topi lapangan), pakaian dinas lapangan, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia dan perjalanan dinas biasa. Target indikator jumlah laoran hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah tidak mengalami perubahan, tetap 4 laporan.

1.13 Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. Terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 21.360.000,- dari pagu awal Rp. 91.618.200,- menjadi Rp. 112.9778.200,- untuk Penambahan untuk belanjaperlengkapan dinas (sepatu dan topi lapangan), pakaian dinas lapangan, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia dan perjalanan dinas biasa. Target indikator Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah tidak mengalami perubahan, tetap 4 laporan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rekapitulasi Daftar Perubahan Program dan Perubahan Kegiatan pada Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024

NO. / URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		SEBELUM	SESUDAH		RKPD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	RKPD SETELAH PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.420.346.950	2.620.682.702	17.041.029.652	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	23 dok	34 dok	43.040.000	80.269.000	123.309.000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23 dok	34 dok	43.040.000	80.269.000	123.309.000	Penambahan Honor PPTK dan Belanja Perjalanan Dinas terkait perencanaan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	44 dok	44 dok	9.820.323.000	792.904.000	10.613.227.000	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Org/ Bln	30 Org/ Bln	9.820.323.000	792.904.000	10.613.227.000	Penambahan pagu untuk kekurangan tunjangan fungsional PPPK, tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS, iuran jaminan kesehatan PPPK, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS, tambahan penghasilan berdasarkankondisi kerja PNS dan pergeseran belanja insentif non ASN dan insentif KDH/WKDH untuk menambah belanja insentif ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian	100%	100%	50.000.000	162.173.320	212.173.320	

NO. / URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		SEBELUM	SESUDAH		RKPD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	RKPD SETELAH PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	-	62.173.320	62.173.320	Pengadaan Pakaian Batik/Sasirangan Hari Jadi Tabalong
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Org	30 Org	50.000.000	100.000.000	150.000.000	Penambahan jumlah peserta pelatihan yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sebelumnya 10 orang menjadi 30 orang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya kegiatan administrasi umum**	**100%**	**100%**	**1.274.640.919**	**964.897.607**	**2.239.538.526**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	18.966.417	(673.992)	18.292.425	Pergeseran Anggaran
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	379.175.354	2.918.054	382.093.408	Penambahan Anggaran Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	113.560.148	(13.321.590)	100.238.558	Pengurangan dan Pergeseran Anggaran
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114 Laporan	184 Laporan	762.939.000	689.314.000	1.452.253.000	Penambahan belanja perjalanan dinas
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		3 Paket	-	286.661.135	286.661.135	Penambahan Anggaran untuk belanja boks arsip, jasa penataan arsip dan rak arsip

NO. / URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		SEBELUM	SESUDAH		RKPD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	RKPD SETELAH PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya barang milik daerah**	**96**	**96**	**391.780.677**	**545.260.419**	**937.041.096**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	79.994.430	400.955.531	480.949.961	Penambahan belanja pompa air, mesin penghancur kertas, running text jam musholla, vacum cleaner, dispenser bawah, sound system ruangan, laptop teknis, printer, audio mixer, TV 65 inchi, TV 98 inch
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	40 Unit	311.786.247	144.304.888	456.091.135	Penambahan belanja gorden, karpet, papan reklame (neon box), meja baca HPL, sedangkan meja kerja anggarannya dihapus
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**1.440.196.287**	**33.103.102**	**1.473.299.389**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	4 Laporan	4 Laporan	6.000.000	-	6.000.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	183.000.000	-	183.000.000	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	53.637.087	27.703.102	81.340.189	Pembelian tinta printer, aksesoris komputer dan hardisk eksternal

NO. / URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		SEBELUM	SESUDAH		RKPD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	RKPD SETELAH PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.197.559.200	5.400.000	1.202.959.200	Penambahan Untuk Belanja Makan dan Minum Rapat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**1.400.366.067**	**42.075.254**	**1.442.441.321**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit		469.990.000	-	469.990.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	930.376.067	42.075.254	972.451.321	Penambahan belanja perencanaan, pengawasan dan rehap atap
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Konstibusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**	**43,54%**		**2.894.485.708**	**2.931.611.556**	**5.826.097.264**	
				Persentase Konstibusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	**5,1%**					
				Persentase SKPD pengelola PAD yang mencapai target (%)	**14%**					
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Jumlah Pajak Daerah**	**104,016,101,486**		**2.894.485.708**	**2.931.611.556**	**5.826.097.264**	
				Jumlah Retribusi Daerah	**12,187,192,358**					
				Jumlah OPD pengelola retribusi yang mencapai target	**4 OPD**					
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dok	4 Dok	10.200.000	-	10.200.000	

NO. / URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		SEBELUM	SESUDAH		RKPD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	RKPD SETELAH PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	11 Dokumen	339.338.756	236.079.963	575.418.719	Penambahan untuk honorarium PPTK, pembelian seragam sasirangan, honorarium narasumber, belanja perjalanan dinas dalam provinsi dan luar provinsi, perjalanan dinas dalam kota, belanja modal laptop teknis, tablet, printer.
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	496.220.282	358.606.824	854.827.106	Penambahan belanja untuk diserahkan kepada masyarakat untuk kegiatan sosialisasi pajak daerah, belanja makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, sewa gedung, belanja perjalanan dinas biasa luar provinsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	60.420.000	155.770.380	216.190.380	Penambahan belanja fotocopy, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, dan perjalanan dinas biasa

NO. / URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		SEBELUM	SESUDAH		RKPD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	RKPD SETELAH PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	24 Laporan	22 Laporan	179.549.000	244.149.000	423.698.000	Penambahan untuk belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, belanja sewa komputer jaringan (langganan dedicated server pajak daerah, 2 IP), SSL server SIMPBB SIMBPHTB, Perbaikan Pembayaran SIMPBB SIMPBB dan Pemasangan Antivirus, belanja perjalanan dinas biasa, belanja modal laptop teknis dan belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software)

NO. / URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		SEBELUM	SESUDAH		RKPD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	RKPD SETELAH PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 Dok	4 Dok	624.040.000	176.551.179	800.591.179	Penambahan untuk honor PPTK, belanja makan dan minum rapat/ sosialisasi/ bimtek/ lokakarya/ workshop/ seminar/ pertemuan
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dok	5 Dok	280.279.611	248.540.040	528.819.651	Penambahan untuk honor PPTK, belanja souvenir/ cinderamata, belanja perjalanan dinas biasa, belanja modal laptop non teknis, personal komputer, tablet, printer, belanja modal upgrade dan pengembangan aplikasi ependa
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	96.385.232	116.677.000	213.062.232	Penambahan untuk belanjaperlengkapan dinas (sepatu dan topi lapangan), pakaian dinas lapangan, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia dan perjalanan dinas biasa
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan		91.618.200	21.360.000	112.978.200	Penambahan untuk belanja perjalanan dinas dalam kota
							17.314.832.658	**5.552.294.258**	**22.867.126.916**	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Tabalong berdasarkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Darah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
2. Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan, arahan dalam melaksanakan program, kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu tahun berjalan tahun 2024;
3. Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun agar lebih terukur dan terarah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur sipil negara di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tabalong Terdepan.

Tanjung, 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tabalong,

Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720306 199203 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

RANCANGAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024

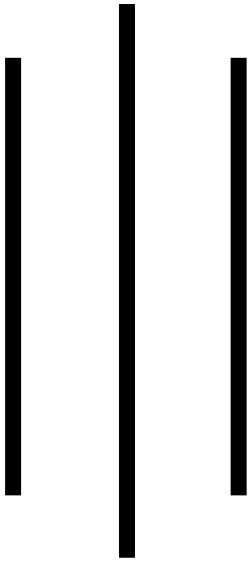

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 selesai disusun.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini merupakan penjelasan secara ringkas mengenai rencana kerja yang disusun dalam rangka pelaksanaan APBD dan sekaligus merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang telah diamanatkan untuk mencapai misi organisasi. Saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini.

Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dari semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini. Semoga bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Tabalong.

Tanjung, September 2024

Kepala Badan,

Dr. Husin Ansari, SE,. ME.

NIP. 19800610 200501 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN LALU 10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja (Rencana Kerja) SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra (Rencana Strategis) SKPD 10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 34
2.4. Reviu Terhadap Rancangan RKPD 35
2.5. Penelaahan Usul Program dan Kegiatan Masyarakat 42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN 43
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 43
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong 43
3.2.1. Tujuan 43
3.2.2. Sasaran 44
3.3. Program dan Kegiatan 44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 48
BAB V PENUTUP 55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra BPKAD s/d Tahun 2021 (tahun berjalan) 11
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong 32
Tabel 2.3 Reviu Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023 Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong .. 36
Tabel 4.1 Rumusan Rencana dan Program Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 49

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

a. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
b. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
c. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42860);
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
n. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

o. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
p. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 tentang 69);
q. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 63).
r. Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/053/2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tabalong Tahun 2024,

1.3. Maksud dan Tujuan

1.1.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program–program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tabalong. Perubahan Rencana Kerja juga dijadikan sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun berjalan, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun yang akan datang.

1.1.2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong ini adalah:

a. Mendeskripsikan tentang program–program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.
b. Untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2024.
c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja instansi.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Perubahan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan Pokok-pokok materi yang disajikan:

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD;

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian tentang:

a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan lainnya.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi tentang:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja (Rencana Kerja) SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra (Rencana Strategis) SKPD

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra BPKAD s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
											Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
4	**04**	**4**	**04**	**28**	**17**		**Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Jangka waktu penyusunan dan penetapan RAPBD**	**≤ 31 Desember**	**September, Oktober, Desember 2019**							
4	04	4	04	28	17		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah Dokumen Raperda APBD tepat waktu	1 Dokumen	1							
4	04	4	04	28	17		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Raperbup tentang Penjabaran APBD tepat waktu	1 Dokumen	1							
4	04	4	04	28	17		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah Dokumen Raperda APBDP tepat waktu	1 Dokumen	1							
4	04	4	04	28	17		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Dokumen Raperbup tentang Penjabaran APBDP tepat waktu	1 Dokumen	1							
4	04	4	04	28	17		Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta yang terlatih	0	58							
4	**04**	**4**	**04**	**28**	**15**		**Program Pengelolaan Penganggaran Keuangan Daerah**	**Jangka waktu penyusunan dan penetapan dokumen tanggaran**	**≤ 31 Desember**		**≤ 31 Desember**	**10 Desember**	100%				

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
											Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
4	04	4	04	28	15	01	Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penyusunan anggaran daerah tepat waktu	62 Dokumen		62	62	100%				
4	04	4	04	28	15	02	Pelaksanaan Evaluasi Anggaran Daerah	DPA dan DPPA SKPD tepat waktu	58 Dokumen		58	58	100%				
4	04	4	04	28	15	03	Pengelolaan Data Informasi Anggaran	Persentasi ketersediaan data anggaran SKPD	100%		100%	100%	100%				
5	**02**	**02**	**02**	**01**	**01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**							**31 Desember**			
5	02	02	02	01	01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS							2 Dokumen			
5	02	02	02	01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS							2 Dokumen			
5	02	02	02	01	01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD							46 Dokumen			
5	02	02	02	01	01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD							46 Dokumen			
5	02	02	02	01	01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD							2 Dokumen			
5	02	02	02	01	01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan							2 Dokumen			

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
											Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
							Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD										
5	02	02	02	01	01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota							100%			
4	**04**	**4**	**04**	**28**	**17**		**Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Jumlah berkas SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah**	**100%**	**100%**							
4	04	4	04	28	17	30	Pengelolaan Bukti-Bukti Pengeluaran, Pendapatan dan Kas Daerah dari Bendaharawan SKPD	Laporan Kas Daerah tepat waktu	12 Lap	12							
4	04	4	04	28	17	68	Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD	Persentase SP2D gaji dan tunjangan yang terbit sesuai Sisdur	100%	100%							
4	04	4	04	28	17	117	Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Tabalong	Laporan Anggaran Kas SKPD tepat waktu	2	2							
4	04	4	04	28	17	127	Penyusunan Produk Hukum Bendaharawan Umum Daerah	Persentasi SP2D yang terbit sesuai SOP	100%	100%							
4	**04**	**4**	**04**	**28**	**16**		**Program Pengelolaan Administrasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah**	**Jumlah berkas SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah**	**100%**		100%	100%	100%				

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
											Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
4	04	4	04	28	16	01	Pengelolaan Belanja Daerah	Persentasi SP2D yang terbit sesuai SOP	100%		100%	100%	100%				
4	04	4	04	28	16	02	Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan Belanja Pegawai	Persentase SP2D gaji dan tunjangan yang terbit sesuai Sisdur	100%		100%	100%	100%				
4	04	4	04	28	16	03	Pengelolaan Kas Daerah	Laporan Rekon Kas Daerah dan Anggaran Kas SKPD tepat waktu	14 Dokumen		14	14	100%				
5	**02**	**02**	**02**	**02**	**02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**							**100%**			
5	02	02	02	02	02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah							12 Laporan	12	100	
5	02	02	02	02	02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD							100%	100	100	
5	02	02	02	02	02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya							12 Laporan	12	100	
5	02	02	02	02	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan							24 Dokumen	24	100	

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
											Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
							Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)										
5	02	02	02	02	02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait							12 Dokumen	12	100	
5	02	02	02	02	02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota							100%	100	100	
4	**04**	**4**	**04**	**28**	**17**		**Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Jumlah jumlah SKPD dengan laporan keuangan sesuai SAP**	**100%**	**100%**							
4	04	4	04	28	17	118	Penyusunan pelaporan keuangan triwulan dan semesteran realisasi APBD	Jumlah Laporan Keuangan triwulanan dan semesteran SKPD tepat waktu	4 Lap	4							
4	04	4	04	28	17	119	Pengolahan Sistem Akuntansi SKPKD	Laporan keuangan SKPD sesuai sistem akuntansi SKPKD	58 Lap	58							
4	04	4	04	28	17	123	Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan SKPD sesuai SAP	8 Lap	8							
4	04	4	04	28	17	10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah draf Raperda tentang Pertanggungjawaba	1 Dok	1							

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
											Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
								n Pelaksanaan APBD									
4	**04**	**4**	**04**	**28**	**17**		**Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah**	**Cakupan rancangan laporan keuangan tepat waktu**	**≤ 31 Maret**		**≤ 31 Maret**	**17 Maret**	**100%**				
4	04	4	04	28	17	01	Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	12 Dokumen		12	12	100%				
4	04	4	04	28	17	02	Analisa dan Pengolahan Sistem Akuntansi SKPD dan SKPKD	Laporan Keuangan SKPD sesuai Sistem Akuntansi SKPKD	58 Laporan		58	58	100%				
4	04	4	04	28	17	03	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2 Dokumen		2	2	100%				
5	02	02	02	02	03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**							**31 Maret**	**100**	**100**	
5	02	02	02	02	03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban							12 Laporan	12	100	
5	02	02	02	02	03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah							2 Dokumen	2	100	

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
											Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
5	02	02	02	02	03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							2 Dokumen	2	100	
5	02	02	02	02	03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota							82 Orang	82	100	
4	**04**	**4**	**04**	**28**	**17**		**Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Jumlah tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**							
4	04	4	04	28	17	57	Stock Of Name Aset dan persediaan daerah	Jumlah laporan stock of name dan persediaan daerah	4	4							
4	04	4	04	28	17	59	Pelaporan dan monitoring tata usaha aset/barang daerah	Jumlah laporan neraca SKPD	2	2							
4	04	4	04	28	17	60	Penghapusan Barang Inventaris	Jumlah BMD yang dihapuskan SKPD	4	4							
4	04	4	04	28	17	70	Sertifikasi Tanah Daerah	Jumlah tanah yang bersertifikat an. Pemerintah Kab. Tabalong	10	19							

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
											Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
4	04	4	04	28	17	73	Pengamanan Aset-Aset Daerah	Jumlah patok dan pagar yang terpasang pada tanah milik Pemerintah Daerah	95	25							
4	04	4	04	28	17	101	Kapitalisasi dan rekonsiliasi pemeliharaan aset-aset daerah	Jumlah laporan rekon aset	12	2							
4	04	4	04	28	17	106	Penyusunan Sistem dan Prosedur pengelolaan BMD	Dokumen sistem dan prosedur pengelolaan BMD	2	1							
4	04	4	04	28	17	113	Bimbingan teknis dan pendampingan SIMDA Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD dengan laporan aset baik	53	53							
4	04	4	04	28	17	114	Manajemen Aset	Cakupan tertibnya pengelolaan BMD	100%	100%							
4	04	4	04	28	17	126	Pemanfaatan barang milik daerah	Cakupan pemanfaatan BMD	100%	100%							
4	**04**	**4**	**04**	**28**	**18**		**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**100%**		**100%**	**100%**	**100%**				
4	04	4	04	28	18	01	Penatausahaan dan Penghapusan BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	16 Dokumen		16 Dokumen	16	100%				
4	04	4	04	28	18	02	Pengamanan dan Pemindahtanganan Aset Daerah	Jumlah pemindahtanganan dan sertifikasi tanah pemerintah daerah	10 persil		10 persil	10	100%				
4	04	4	04	28	18	03	Perencanaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	Cakupan tertibnya pengelolaan BMD	100%		100%	100%	100%				

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
											Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
5	**02**	**03**	**02**	**02**	**01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**							**100%**			
5	02	03	02	02	01	01	Penyusunan Standar Harga							1 Dokumen	1	100	
5	02	03	02	02	01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah							2 Dokumen	2	100	
5	02	03	02	02	01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah							1 Dokumen	1	100	
5	02	03	02	02	01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah							1 Dokumen	1	100	
5	02	03	02	02	01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah							10 Persil	10	100	
5	02	03	02	02	01	08	Penilaian Barang Milik Daerah							2 Dokumen	2	100	
5	02	03	02	02	01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah							2 Dokumen	2	100	
4	**04**	**4**	**04**	**28**			**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkaan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah,**	**Prosentase penatausahaan administrasi perkantoran tepat waktu**	**100%**	**100%**								

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
											Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
							Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi										
4	04	4	04	28	02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
4	04	4	04	28	02	5	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Kendaraan operasional terpenuhi dalam kondisi baik	-	6							
4	04	4	04	28	02	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan kantor dalam kondisi baik	3	1							
4	04	4	04	28	02	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan kantor dalam kondisi baik	6	8							
4	04	4	04	28	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor dalam kondisi baik	1	1							
4	04	4	04	28	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil operasional layak jalan	8	8							
								Kendaraan operasional layak jalan	30	20							
4	04	4	04	28	01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan kepegawaian diselesaikan tepat waktu	100%	100%							
4	04	4	04	28	01	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tindak lanjut administrasi surat menyurat	100%	100%							

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
											Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
4	04	4	04	28	01	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening Telepon, Air dan Listrik terbayar tepat waktu	12	12							
4	04	4	04	28	01	9	Penyediaan jasa pemeliharaan /perijinan kendaraan dinas /operasional	Pengurusan Izin kendaraan /mobil operasional tepat waktu	38	28							
4	04	4	04	28	01	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lingkungan gedung kantor dalam kondisi bersih	12	12							
4	04	4	04	28	01	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan kerja dengan kondisi baik	100%	100%							
4	04	4	04	28	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Ketersediaan alat tulis kantor dalam kondisi baik dan cukup	52	53							
4	04	4	04	28	01	11	Penyediaan barang cetatakan dan penggandaan	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan dalam kondisi baik dan cukup	100%	100%							
4	04	4	04	28	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penerangan Bangunan Kantor dalam kondisi baik	100%	100%							
4	04	4	04	28	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Ketersediaan Bahan Bacaan sesuai kebutuhan	12	12							
4	04	4	04	28	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Ketersediaan makan dan minum untuk pegawai, tamu dan rapat kantor	100%	100%							

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
											Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
4	04	4	04	28	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Ketersediaan perjalanan dinas luar daerah untuk koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder	130	300							
4	04	4	04	28	01	20	Penyediaan jasa keamanan kantor	Lingkungan kantor dalam kondisi aman	12	12							
4	04	4	04	28	03		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin berpakaian pegawai									
4	04	4	04	28	03	5	Pengadaan Pakaian dinas bagi aparatur	Jumlah pakaian dinas untuk pegawai	40	40							
4	04	4	04	28	05		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur									
4	04	4	04	28	05	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	5	5							
4	04	4	04	28	28		Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi										
4	04	4	04	28	28	15	Penyelenggaraan pameran investasi	Ketersediaan informasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah bagi masyarakat	1	1							
4	04	4	04	28	16		Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase peningkatan disiplin berpakaian pegawai									
4	04	4	04	28	16	2	Pendataan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah pakaian dinas untuk pegawai	40	40							

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
											Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
4	**04**	**4**	**04**	**28**	**01**		**Program Pengelolaan Administrasi Perkantoran**	**Nilai AKIP**	**BB**		**BB**						
4	04	4	04	28	01	01	Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran	IKM	Baik		Baik	Baik	100%				
4	04	4	04	28	01	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja dan Perkantoran	Jumlah alat dan perlengkapan yang dibeli	10 item		10 item	10 item	100%				
4	04	4	04	28	01	03	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja dan Perkantoran	Jumlah alat dan perlengkapan kantor yang dilakukan pemeliharaan	7 item		7 item	7 item	100%				
4	04	4	04	28	01	04	Rapat-rapat Koordinasi	Orang kali kegiatan	40 orang kegiatan		40 orang kegiatan	55 orang kegiatan	100%				
4	04	4	04	28	01	05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Jumlah dokumen	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	100%				
5	**02**	**01**	**02**	**01**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**BB**			
5	02	01	02	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							2 Dokumen	2	100	
5	02	01	02	01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							8 Dokumen	8	100	
5	02	01	02	01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1 Dokumen	1	100	

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
											Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
5	02	01	02	02	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**BB**			
5	02	01	02	02	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							17 Laporan	17	100	
5	**02**	**01**	**02**	**02**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**BB**			
5	02	01	02	02	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							7 Orang	-		
5	02	01	02	02	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							100%	-		
5	**02**	**01**	**02**	**02**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**BB**			
5	02	01	02	02	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							100%	100%	100	
5	02	01	02	02	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							40 Item	40	100	
5	02	01	02	02	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							100%	100%	100	
5	02	01	02	02	06	09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							12 Bulan	12	100	

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
											Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
5	02	01	02	02	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							97 Orang Kali Keg	97	100	
5	**02**	**01**	**02**	**02**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**BB**			
5	02	01	02	02	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							-			
5	02	01	02	02	07	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							17 Item	17	100	
5	02	01	02	02	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										
5	02	01	02	02	08		Penyediaan Jasa Surat Menyurat							805 Lembar	805	100	
5	02	01	02	02	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							12 Bulan	12	100	
5	02	01	02	02	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							12 Bulan	12	100	
5	**02**	**01**	**02**	**02**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**BB**			
5	02	01	02	02	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya							38 Unit	38	100	

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
											Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
							Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
5	02	01	02	02	09		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							100%	100%	100	
5	02	01	02	02	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							1 Buah	1	100	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin dan tidak melaksanakan pelayanan kepada masyarakat maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong tidak memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Pengelolaan Keuangan dan Keuangan Daerah digunakan Indikator Kinerja utama sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala–kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Analisis capaian kinerja atas sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut:

1. Persentase ketepatan waktu penyusunan dan penetapan RAPBD

   Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, proses penyusunan APBD Kabupaten Tabalong adalah setelah selesainya KUA-PPAS atau Penyusunan dan Pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang waktunya paling lambat minggu II bulan Agustus sampai dengan batas akhir penetapan APBD pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan, sehingga dapat diketahui jumlah waktu yang tersedia bagi penyusunan APBD yaitu selama 142 hari kalender. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022. Waktu yang digunakan dalam penyusunan APBD yaitu 141 hari atau lebih cepat 1 hari dari waktu yang telah ditentukan. Sehingga capaian dari indikator kinerja Persentase waktu penetapan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Tabalong yaitu (142 +1)/142 X100 % = 101,41%.

2. Persentase waktu penyelesaian SP2D berdasarkan SPM yang dinyatakan sah dan lengkap sesuai ketentuan secara tepat waktu

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Kabupaten Tabalong dilaksanakan berdasarkan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan Jenis Belanjanya sebagaimana telah diuraikan di atas terbagi dalam 2 (dua) jenis belanja yaitu Belanja Gaji/Tunjangan dan Belanja Operasi.

Jumlah seluruh Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diajukan dan dinyatakan lengkap sebanyak 6.534 dokumen dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 6.534 dokumen. Dengan demikian capaian indikator ini adalah:

$$\frac{\mathbf{6.534\ dokumen}}{\mathbf{6.534\ dokumen}} \times \mathbf{100} = \mathbf{100}\%$$

3. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tabalong merupakan gabungan laporan keuangan Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong. Kualitas laporan keuangan sesuai dengan SAP adalah syarat normatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan untuk menghasilkan informasi akuntansi yang memiliki manfaat bagi pengguna laporan keuangan. (Paragraf 32 Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) Sedangkan kriteria agar laporan keuangan pemerintah berkualitas, yaitu:

a. Relevan, laporan keuangan dikatakan relevan apabila keputusan pengguna dipengaruhi oleh informasi yang termuat didalamnya dengan membantu pengguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi tersebut.
b. Andal, laporan keuangan andal berarti informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, serta diverifikasi.

Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap penyajian LKPD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 yaitu Waja Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan diperolehnya Opini WTP sehingga dapat dikatakan bahwa LKPD Kabupaten Tabalong telah memenuhi:

a. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
b. Kecukupan pengungkapan;
c. Efektifitas sistem pengendalian internal; dan
d. Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 29 Maret 2021 lebih cepat 2 (dua) hari dari target yang ditetapkan yaitu pada tanggal 31 Maret 2021. Capaian dari indikator kinerja Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu 102,19%, dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\textbf{Realisasi Tanggal Penyampaian LKPD}}{\textbf{Target Tanggal Penyampaian LKPD}} \times \mathbf{100\%}$$

$$\frac{(\mathbf{91}\ \boldsymbol{hari} + \mathbf{2}\ \boldsymbol{hari})\ \mathbf{29}\ \boldsymbol{Maret}}{(\mathbf{91\ hari})\ \mathbf{31}\ \boldsymbol{Maret}} \times \mathbf{100\%} = \mathbf{102,19\%}$$

4. Persentase kesesuaian nilai aktiva tetap BMD dengan Neraca keuangan Pemerintah Kabupaten

Rekonsiliasi antara bidang aset dan akuntansi dilaksanakan setiap bulan berjalan untuk mengetahui realisasi belanja modal. Sedangkan rekonsiliasi antara bidang aset dan SKPD dilaksanakan tiap bulan juga untuk mengetahui mutasi tambah/kurang baik dari belanja modal, belanja

pegawai, mutasi antar SKPD dan koreksi catat. Untuk memverifikasi laporan aset pada setiap SKPD dilakukan melalui kegiatan rekonsiliasi dengan bidang aset dan akuntansi setiap bulan yang dituangkan dalam kertas kerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong pada tahun 2021 mengupayakan untuk Persentase kesesuaian nilai aktiva tetap BMD dengan Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten sebesar 100 % dan pada tahun 2021 telah tercapai (terpenuhi) sebesar 100% dengan nilai aset sebesar Rp3.580.443.219.644,94 (*audited*). Dengan perhitungna sebagai berikut:

$$\frac{\boldsymbol{Jumlah\ Nilai\ Aktiva\ Tetap\ BMD}}{\boldsymbol{Nilai\ Neraca\ Keuangan\ Pemerintah\ Kabupaten}} \times \mathbf{100\%}$$

$$\frac{\boldsymbol{Rp3.580.443.219.644,94}}{\boldsymbol{Rp3.580.443.219.644,94}} \times \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

5. Indeks layanan kesekretariatan

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Target predikat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 belum tercapai karena belum dilaksanakan evaluasi/penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong.

Nilai hasil evaluasi AKIP SKPD menjadi indikator yang cukup menentukan terhadap kualitas kinerja SKPD, karena semakin baik nilai evaluai AKIP SKPD menunjukkan bahwa pola manajemen dalam suatu organisasi telah berjalan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dimana seluruh unsur tersebut menentukan tingkat keberhasilan SKPD dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan yang diperkuat dengan komitmen dari semua bidang untuk melaksanakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan melaksanakan Perjanjian Kinerja. Nilai SAKIP Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong untuk Tahun 2021 adalah 80,50 (A) dengan capaian memuaskan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022 (Tahun n)	Tahun 2023 (Tahun n+1)	Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2023 (Tahun n-1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	**Jangka waktu penyusunan dan penetapan dokumen anggaran**			≤ 31 Des	≤ 31 Des	≤ 31 Des	≤ 31 Des	10 Des	24 Des	100%		
1	Jumlah dokumen perencanaan dan penyusunan anggaran daerah tepat waktu			62 Dok	62 Dok	62 Dok	62 Dok	62 Dok	62 Dok	100%		
2	DPA dan DPPA SKPD tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3	Persentasi ketersediaan data anggaran SKPD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
B	**Cakupan berkas SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah**			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Persentasi SP2D yang terbit sesuai SOP			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Persentase SP2D gaji dan tunjangan yang terbit sesuai Sisdur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6	Laporan rekon Kas Daerah dan Anggaran Kas SKPD tepat waktu			14 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dok	100%		
C	**Cakupan rancangan laporan keuangan tepat waktu**			≤ 31 Maret	≤ 31 Maret	≤ 31 Maret	≤ 31 Maret	17 Maret	29 Maret	100%		
7	Jumlah Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP			12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100%		
8	Laporan Keuangan SKPD sesuai Sistem Akuntansi SKPKD			58 Lap	58 Lap	58 Lap	58 Lap	58 Lap	58 Lap	100%		

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022 (Tahun n)	Tahun 2023 (Tahun n+1)	Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2023 (Tahun n-1)	
9	Jumlah dokumen rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD			2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%		
D	**Prosentase Jumlah SKPD dengan Laporan Aset Baik**			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
10	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan			17 Lap	17 Lap	17 Lap	17 Lap	17 Lap	17 Lap	100%		
11	Jumlah pemindahtanganan dan sertifikasi tanah pemerintah daerah			10 Persil	40 Persil	40 Persil	40 Persil	10 Persil	10 Persil	100%		
12	Cakupan tertibnya pengelolaan BMD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
E	**Nilai AKIP**			B	B	B	B	A	A	100%		
13	Penyediaan jasa administrasi perkantoran			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100%		
14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			10 Item	42 Item	42 Item	42 Item	10 Item	10 Item	100%		
15	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor			7 Item	43 Item	43 Item	43 Item	7 Item	7 Item	100%		
16	Rapat-rapat Koordinasi			40 Org kali Keg	130 Org kali Keg	130 Org kali Keg	130 Org kali Keg	55 Org kali Keg	55 Org kali Keg	100%		
17	Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja			7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	100%		

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sesuai tugas pada saat ini adalah membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Adapun Fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengeloaan keuangan dan aset daerah.
d. Pelaksanaan administrasi badan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Walaupun dalam menjalankan fungsi pelayanan menghadapi beberapa kendala, namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

a. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
b. Semakin berkembangnya dinamika tuntutan pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel.
c. Masih kurang tersedianya infrastruktur dan teknologi informasi yang menunjang kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
d. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah.
e. SKPD belum memahami pedoman penyusunan RKA SKPD dan ketentuan yang berlaku.
f. Laporan keuangan SKPD yang disampaikan belum lengkap sesuai SAP dan tidak tepat waktu.

g. Perubahan yang cepat terhadap regulasi dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, yang memaksa Pemerintah Daerah untuk menyesuaikannya.

Adapun solusi dan upaya pemecahan terhadap permasalahan tersebut antara lain:

a. Peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
b. Peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
c. Peningkatan infrastruktur dan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
d. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
e. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD Kabupaten Tabalong, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat.
f. Melakukan revisi berbagai ketentuan dan peraturan dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
g. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi pedoman penyusunan anggaran.
h. Melakukan rekon secara berkala baik terhadap pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan RKPD

Reviu terhadap RKPD tahun 2023 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.3. sebagai berikut:

Tabel 2.3
Reviu Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024
Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tabalong

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai AKIP**	**BB**	**3.317.982.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai AKIP**	**BB**	**3.317.982.000**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**11 Dok**	**17.254.600**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**11 Dok**	**17.254.600**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 Dok	2.707.800`	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat darah yang disusun	2 Dok	2.707.800`	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	8 Dok	12.529.550	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	8 Dok	12.529.550	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1 Dok	4.725.050	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1 Dok	4.725.050	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disusun**	**17 dok**	**10.297.100**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disusun**	**17 dok**	**10.297.100**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	17 Lap	10.297.100	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	17 Lap	10.297.100	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**270.391.000**	**Persentase pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**100%**	**270.391.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD	Ketersediaan pakaian dinas bagi pegawai	60 Stel		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD	Ketersediaan pakaian dinas bagi pegawai	60 Stel		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPKAD	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan yang dikirim	7 Org	42.350.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPKAD	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan yang dikirim	7 Org	42.350.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	Prosentase sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	100%	228.041.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	Prosentase sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	100%	228.041.000	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**892.450.000**	**Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah**		**Persentase tersedianya administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**892.450.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Persentase penerangan bangunan kantor terpenuhi	100%	20.570.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Prosentase penerangan bangunan kantor terpenuhi	100%	20.570.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	40 Item	233.612.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	40 Item	233.612.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKAD	Prosentase terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	100%	107.433.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKAD	Prosentase terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	100%	107.433.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	Jumlah bacaan dan iklan yang terpenuhi setiap bulannya	12 Bulan	20.570.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	Jumlah bacaan dan iklan yang terpenuhi setiap bulannya	12 Bulan	20.570.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan	97 Org x Keg	510.265.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan	97 Org x Keg	510.265.000	
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**378.463.800**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**378.463.800**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD	Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD	Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	20 Item	378.463.800	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	20 Item	378.463.800	
	Pengadaan Gedung Baru atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Ketersediaan gedung baru			Pengadaan Gedung Baru atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Ketersediaan gedung baru			
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1.389.443.500**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1.389.443.500**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Jumlah benda pos yang tersedia	800 lbr	9.740.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Jumlah benda pos yang tersedia	805 lbr	9.740.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah rekening listrik, air dan telpon yang terbayar	12 Bulan	355.520.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah rekening listrik, air dan telpon yang terbayar	12 Bulan	355.520.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD	Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	1.024.183.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD	Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	1.024.183.000	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**359.682.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**359.682.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD	Jumlah kendaraan dinas yang diurus izin nya dan kendaraan dinas yang layak jalan	38 Unit	250.232.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD	Jumlah kendaraan dinas yang diurus izin nya dan kendaraan dinas yang layak jalan	38 Unit	250.232.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD	Prosentase peralatan kerja dan mesin yang diperbaiki	100%	54.450.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD	Prosentase peralatan kerja dan mesin yang diperbaiki	100%	54.450.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah gedung yang terpelihara dengan baik	1 Buah	55.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah gedung yang terpelihara dengan baik	1 Buah	55.000.000	
B	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		**Persentase ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD**	**100%**	**1.788.712.300**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		**Persentase ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD,**	**100%**	**1.788.712.300**	
			Persentase waktu penyelesaian SP2D berdasarkan SPM yang dinyatakan sah dan lengkap sesuai ketentuan dan tepat waktu	**100%**	**1.052.146.100**			**Persentase waktu penyelesaian SP2D berdasarkan SPM yang dinyatakan sah dan lengkap sesuai ketentuan dan tepat waktu**	**100%**	**1.052.146.100**	
			Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	**100%**	**957.870.100**			**Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**	**100%**	**957.870.100**	
1	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**		**Jumlah dokumen penganggaran keuangan daerah**	**100 Dok**	**1.788.712.300**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**		**Jumlah dokumen penganggaran keuangan daerah**	**100 Dok**	**1.788.712.300**	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah dokumen perencanaan dan penyusunan anggaran daerah tepat waktu	2 Dok	168.342.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah dokumen perencanaan dan penyusunan anggaran daerah tepat waktu	2 Dok	168.342.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah dokumen perencanaan dan penyusunan anggaran daerah tepat waktu	2 Dok	152.193.800	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah dokumen perencanaan dan penyusunan anggaran daerah tepat waktu	2 Dok	152.193.800	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang terfasilitasi	46 Dok	286.031.900	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	46 Dok	286.031.900	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah DPA SKPD yang terfasilitasi	46 Dok	254.120.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah DPA SKPD yang tersusun	46 Dok	254.120.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah dokumen Perda APBD yang tersusun	2 Dok	421.379.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah dokumen Perda APBD yang tersusun	2 Dok	421.379.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah dokumen APBD Perubahan yang tersusun	2 Dok	417.440.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah dokumen APBD Perubahan yang tersusun	2 Dok	417.440.000	
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Cakupan regulasi penyusunan anggaran daerah tepat waktu	100%	89.205.600	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Cakupan regulasi penyusunan anggaran daerah tepat waktu	100%	89.205.600	
2	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah**	**60 Dok**	**1.052.146.100**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah**	**60 Dok**	**1.052.146.100**	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Jumlah laporan rekonsiliasi kas daerah dan anggaran kas SKPD tepat waktu	12 Lap	185.853.800	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Jumlah laporan rekonsiliasi kas daerah dan anggaran kas SKPD tepat waktu	12 Lap	185.853.800	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	Persentasi penerbitan anggaran kas dan SPD yang sesuai dengan Kasda	100%	128.720.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	Persentasi penerbitan anggaran kas dan SPD yang sesuai dengan Kasda	100%	128.720.000	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	Jumlah laporan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer tepat waktu	12 Lap	138.063.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	Jumlah laporan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer tepat waktu	12 Lap	138.063.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan	BPKAD	Jumlah dokumen kasda dan PFK yang telah direkon	24 Dok	188.129.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan	BPKAD	Jumlah dokumen kasda dan PFK yang telah direkon	24 Dok	188.129.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	Jumlah dokumen rekonsiliasi data penerimaan dan pengelolaan kasda tepat waktu	12 Dok	300.548.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	Jumlah dokumen rekonsiliasi data penerimaan dan pengelolaan kasda tepat waktu	12 Dok	300.548.000	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Persentasi berkas SPP dan SPM yang dinyatakan lengkap dan sah	100%	110.831.600	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Persentasi berkas SPP dan SPM yang dinyatakan lengkap dan sah	100%	110.831.600	
3	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		**Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah**	**16 Dok**	**957.870.100**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		**Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah**	**16 Dok**	**957.870.100**	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD	Jumlah laporan rekonsiliasi SKPD	12 Lap	278.201.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD	Jumlah laporan rekonsiliasi SKPD	12 Lap	278.201.000	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah draf Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dok	132.192.500	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah draf Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dok	132.192.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah draf raperda dan raperbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2 Dok	345.202.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah draf raperda dan raperbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2 Dok	345.202.000	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Kemandirian PPK/Kasubag dalam menyusun Laporan Keuangan berbasis Akrual	82 Org	202.274.600	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Kemandirian PPK/Kasubag dalam menyusun Laporan Keuangan berbasis Akrual	82 Org	202.274.600	
4	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**1 tahun**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**1 tahun**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Tabalong	Tersedianya Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota, Pemerintah Desa	1 Tahun		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Tabalong	Tersedianya Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota, Pemerintah Desa	1 Tahun		
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Tabalong	Terpenuhinya Dana Darurat dan Mendesak	1 Tahun		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Tabalong	Terpenuhinya Dana Darurat dan Mendesak	1 Tahun		
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Tabalong	Terpenuhinya pengelolaan Dana Bagi Hasil	1 Tahun		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Tabalong	Terpenuhinya pengelolaan Dana Bagi Hasil	1 Tahun		
C	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		**Persentase pengelolaan barang milik daerah**	**100%**	**2.005.428.400**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		**Persentase pengelolaan barang milik daerah**	**100%**	**2.005.428.400**	
1	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**Persentase jumlah SKPD dengan laporan aset baik**	**100%**	**2.005.428.400**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**Persentase jumlah SKPD dengan laporan aset baik**	**100%**	**2.005.428.400**	
	Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah dokumen penyusunan standar harga sesuai ketentuan	1 Dok	151.709.800	Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah dokumen penyusunan standar harga sesuai ketentuan	1 Dok	151.709.800	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah laporan penyusunan perencanaan kebutuhan BMD sesuai ketentuan	2 Dok	345.392.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah laporan penyusunan perencanaan kebutuhan BMD sesuai ketentuan	2 Dok	345.392.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	1 Dok	157.130.600	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	1 Dok	157.130.600	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan inventarisasi BMD sesuai ketentuan	1 Dok	761.408.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan inventarisasi BMD sesuai ketentuan	1 Dok	761.408.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah pemindahtanganan dan sertifikasi tanah pemerintah daerah	10 Persil	412.610.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah pemindahtanganan dan sertifikasi tanah pemerintah daerah	10 Persil	412.610.000	
	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Leporan penilaian BMD sesuai ketentuan	2 Dok	76.748.000	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Leporan penilaian BMD sesuai ketentuan	2 Dok	76.748.000	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan pemindahtanganan BMD	2 Dok	100.430.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan pemindahtanganan BMD	2 Dok	100.430.000	
	J U M L A H				**9.122.138.900**	**J U M L A H**				**9.122.138.900**	

2.5. Penelaahan Usul Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, Maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2024 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena menjalankan kegiatan yang bersifat penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah berupa fasilitasi pelayanan keuangan bagi SKPD

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional dikaitkan RPJMN 2020-2024 untuk mencapai visi “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandasan Gotong Royong” yang diwujudkan 9 (sembilan) misi Nasional (Nawacita Kedua).

Sedangkan Prioritas Nasional (PN) yang ditetapkan ada 7 (tujuh) yaitu:

1. PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. PN 3 : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. PN 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. PN 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. PN 7 : Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong

3.2.1. Tujuan

Tujuan disusunnya rencana kerja dalam mewujudkan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong adalah:

a. Meningkatkan kualitas penganggaran dalam penyusunan dan penetapan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Meningkatkan kinerja penatausahaan keuangan dan pelayanan kebendaharaan sesuai peraturan perundangan.
c. Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
d. Meningkatkan pengelolaan aset daerah sesuai peraturan perundangan.
e. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

3.2.2. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai melalui rangkaian kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah:

a. Meningkatnya tata kelola keuangan yang berkualitas, transparan dan akuntabel.
b. Meningkatnya pengelolaan aset daerah sesuai peraturan perundangan.
c. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong akan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2023

No	Progam/Kegiatan	Sub Kegiatan
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

No	Progam/Kegiatan	Sub Kegiatan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
		Sosialisasi perundang-undangan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Gedung Baru atau Bangunan Lainnya
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
		Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Progam/Kegiatan	Sub Kegiatan
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
C	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah
		Inventarisasi Barang Milik Daerah
		Penilaian Barang Milik Daerah
		Penyusunan Standar Harga
		Pengamanan Barang Milik Daerah
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 dapat diuraikan dengan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024 (n)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (n+1)	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5						**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								
5	**02**					**KEUANGAN**				**9.122.138.900**				**10.037.659.300**
5	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**		**BB**	**3.317.982.000**			**BB**	**3.652.758.200**
5	**02**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**BPKAD**	**11 Dok**	**17.254.600**	**APBD**		**11 Dok**	**21.958.200**
5	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	BPKAD	2 Dok	2.707.800	APBD		2 Dok	2.978.600
5	02	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	BPKAD	8 Dok	12.529.550	APBD		8 Dok	13.782.550
5	02	01	2	01	03	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun	BPKAD	1 Dok	4.725.050	APBD		1 Dok	5.197.050
5	**02**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disusun**	**BPKAD**	**17 Lap**	**10.297.100**	**APBD**		**17 Lap**	**11.326.100**
5	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	BPKAD	1 Tahun		APBD		1 Tahun	
5	02	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	BPKAD	17 Lap	10.297.100	APBD		17 Lap	11.326.100
5	**02**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan Administrasi**	**BPKAD**	100%	**270.391.000**	**APBD**		**100%**	**297.430.100**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024 (n)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (n+1)	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
							Kepegawaian Perangkat Daerah							
5	02	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Ketersediaan pakaian dinas bagi pegawai	BPKAD	60 Stel	-	APBD		-	
5	02	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan yang dikirim	BPKAD	7 Org	42.350.000	APBD		7 Org	46.585.000
5	02	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	BPKAD	100%	228.041.000	APBD		100%	250.845.100
5	**02**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**BPKAD**	**100%**	**892.450.000**	**APBD**		**100%**	**981.695.000**
5	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penerangan bangunan kantor terpenuhi	BPKAD	100%	20.570.000	APBD		100%	22.627.000
5	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	BPKAD	40 Item	233.612.000	APBD		40 Item	256.973.200
5	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	BPKAD	100%	107.433.000	APBD		100%	118.176.300
5	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan iklan yang terpenuhi setiap bulannya	BPKAD	12 Bulan	20.570.000	APBD		12 Bulan	22.627.000
5	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan	BPKAD	97 Org x Keg	510.265.000	APBD		100 Org x Keg	561.291.500
5	**02**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**BPKAD**	**100%**	**378.463.800**	**APBD**		**13 Item**	**416.310.100**
5	02	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan	BPKAD			APBD			
5	02	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	BPKAD	20 Item	378.463.800	APBD		13 Item	416.310.100
5	02	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Baru atau Bangunan Lainnya	Ketersediaan gedung baru	BPKAD	1 Buah		APBD		1 Buah	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024 (n)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (n+1)	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	**02**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BPKAD**	**100%**	**1.389.443.500**	**APBD**		**100%**	
5	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang tersedia	BPKAD	805 lbr	9.740.500	APBD		800 lbr	
5	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air dan telpon yang terbayar	BPKAD	36 Rek / Bulan	355.520.000	APBD		12 Bulan	
5	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	BPKAD	12 Bulan	1.024.183.000	APBD		12 Bulan	
5	**02**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BPKAD**	**100%**	**359.682.000**	**APBD**		**100%**	**1.528.388.500**
5	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diurus izin nya dan kendaraan dinas yang layak jalan	BPKAD	38 Unit	250.232.000	APBD		38 Unit	10.715.500
5	02	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase peralatan kerja dan mesin yang diperbaiki	BPKAD	100%	54.450.000	APBD		100%	391.072.000
5	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara dengan baik	BPKAD	1 Buah	55.000.000	APBD		1 Buah	1.126.601.000
5	**02**	**02**				**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD**	**BPKAD**	**100%**	**1.788.712.300**	**APBD**		**100 Dok**	**1.967.662.400**
							Persentase waktu penyelesaian SP2D berdasarkan SPM yang dinyatakan sah dan lengkap sesuai ketentuan dan tepat waktu	**BPKAD**	**100%**	**1.052.146.100**	**APBD**		**60 Dok**	**1.157.359.200**
							Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	**BPKAD**	**100%**	**957.870.100**	**APBD**		**16 Dok**	**1.053.830.100**
5	**02**	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Jumlah dokumen penganggaran keuangan daerah**	**BPKAD**	**100 Dok**	**1.788.712.300**	**APBD**		**100 Dok**	**1.967.662.400**
5	02	02	2	01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS tepat waktu	BPKAD	2 Dok	168.342.000	APBD		2 Dok	185.176.200

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024 (n)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (n+1)	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	02	02	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS waktu	BPKAD	2 Dok	152.193.800	APBD		2 Dok	167.412.800
5	02	02	2	01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang terfasilitasi	BPKAD	46 Dok	286.031.900	APBD		46 Dok	314.634.900
5	02	02	2	01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang terfasilitasi	BPKAD	46 Dok	254.120.000	APBD		46 Dok	279.532.000
5	02	02	2	01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda APBD yang tersusun	BPKAD	2 Dok	421.379.000	APBD		2 Dok	463.516.900
5	02	02	2	01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen APBD Perubahan yang tersusun	BPKAD	2 Dok	417.440.000	APBD		2 Dok	459.184.000
5	02	02	2	01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Cakupan SKPD yang dilakukan pembinaan dalam penyusunan anggaran	BPKAD	100%	89.205.600	APBD		100%	98.205.600
5	**02**	**02**	**2**	**02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah**	**BPKAD**	**60 Dok**	**1.052.146.100**	**APBD**		**60 Dok**	**1.157.359.200**
5	02	02	2	02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi kas daerah dan anggaran kas SKPD tepat waktu	BPKAD	12 Lap	185.853.800	APBD		12 Lap	204.438.800
5	02	02	2	02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase penerbitan anggaran kas dan SPD yang sesuai dengan Kasda	BPKAD	100%	128.720.000	APBD		100%	141.592.000
5	02	02	2	02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer tepat waktu	BPKAD	12 Lap	138.063.000	APBD		12 Lap	151.869.300
5	02	02	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah dokumen kasda dan PFK yang telah direkon	BPKAD	24 Dok	188.129.700	APBD		24 Dok	206.941.700
5	02	02	2	02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan	Jumlah dokumen rekonsiliasi data	BPKAD	12 Dok	300.548.000	APBD		12 Dok	330.602.800

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024 (n)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (n+1)	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	penerimaan dan pengelolaan kasda tepat waktu							
5	02	02	2	02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentasi berkas SPP dan SPM yang dinyatakan lengkap dan sah	BPKAD	100%	110.831.600	APBD		100%	121.914.600
5	**02**	**02**	**2**	**03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah**	**BPKAD**	**16 Dok**	**957.870.100**	**APBD**		**16 Dok**	**1.053.830.100**
5	02	02	2	02	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah laporan rekonsiliasi SKPD	BPKAD	12 Lap	278.201.000	APBD		12 Lap	306.121.000
5	02	02	2	02	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah draf Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	2 Dok	132.192.500	APBD		2 Dok	145.412.500
5	02	02	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah draf raperda dan raperbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD	2 Dok	345.202.000	APBD		2 Dok	379.732.000
5	02	02	2	02	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kemandirian PPK/Kasubag dalam menyusun Laporan Keuangan berbasis Akrual	BPKAD	82 Org	202.274.600	APBD		82 Org	222.564.600
5	**02**	**02**	**2**	**04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**BPKAD**	**1 tahun**		**APBD**		**1 tahun**	
5	02	02	2	04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota, Pemerintah Desa	Kab. Tabalong	1 Tahun		APBD		1 Tahun	
5	02	02	2	04	09	Pengelolaan Dana Darurat	Terpenuhinya Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Tabalong	1 Tahun		APBD		1 Tahun	
5	02	02	2	04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pengelolaan Dana Bagi Hasil	Kab. Tabalong	1 Tahun		APBD		1 Tahun	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024 (n)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (n+1)	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	**02**	**03**				**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase kesesuaian nilai aktiva tetap BMD dengan Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten**	**BPKAD**	**100%**	**2.005.428.400**	**APBD**		**100%**	**2.206.049.400**
5	**02**	**02**	**2**	**01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase pengelolaan barang milik daerah**	**BPKAD**	**100%**	**2.005.428.400**	**APBD**		**100%**	**2.206.049.400**
5	02	02	2	01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen penyusunan standar harga sesuai ketentuan	BPKAD	1 Dok	151.709.800	APBD		1 Dok	166.879.800
5	02	02	2	01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penyusunan perencanaan kebutuhan BMD sesuai ketentuan	BPKAD	2 Dok	345.392.000	APBD		2 Dok	379.932.000
5	02	02	2	01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	BPKAD	1 Dok	157.130.600	APBD		1 Dok	172.880.600
5	02	02	2	01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan inventarisasi BMD sesuai ketentuan	BPKAD	1 Dok	761.408.000	APBD		1 Dok	837.558.000
5	02	02	2	01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah pemindahtanganan dan sertifikasi tanah pemerintah daerah	BPKAD	10 Persil	412.610.000	APBD		10 Persil	453.871.000
5	02	02	2	01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan penilaian BMD sesuai ketentuan	BPKAD	2 Dok	76.748.000	APBD		2 Dok	84.448.000
5	02	02	2	01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan pemindahtanganan BMD	BPKAD	2 Dok	100.430.000	APBD		2 Dok	110.480.000
J U M L A H										**9.122.138.900**				**10.037.659.300**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja SKPD menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis kedalam langkah–langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur, dan dengan segala keterbatasan yang ada diharapkan Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun dapat berjalan dengan baik secara bertahap dan berkesinambungan dan selalu diupayakan untuk dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan semua pihak memiliki satu persepsi tentang Rencana Kerja sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Tanjung, Januari 2023

Kepala Badan,

Dr. HUSIN ANSARI, SE,. ME.
NIP. 19800610 200501 1 014

PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Tabalong tahun 2024 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024, untuk menjalankan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dokumen Perubahan Renja ini memuat tujuan dan sasaran Bappedalitbang Kabupaten Tabalong beserta program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan. Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappedalitbang Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon koreksi, saran dan masukan dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Tabalong ini dapat bermanfaat dan diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanjung, Juli 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong

ARIANTO, S.IP. M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196805151990031008

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB 1 PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-2

1.3 Maksud dan Tujuan I-5

1.4 Sistematika Penulisan I-6

BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022 ..... II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaaan II-1

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2023 Terhadap APBD Tahun 2024..... II-1

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 II-10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-21

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II-24

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD II-26

BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH III-1

BAB 4 PENUTUP IV-1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Bappedalitbang Tahun 2023 dengan APBD 2024 ..... II-2

Tabel 2.2 Perbandingan Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja dan APBD Bappedalitbang Tahun 2024 ..... II-3

Tabel 2.3 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bappedalitbang Sampai Triwulan II Tahun 2024 ..... II-11

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024.. II-27

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ..... III-5

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB 1 PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-2

1.3 Maksud dan Tujuan I-5

1.4 Sistematika Penulisan I-5

BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022 ..... II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaaan II-1

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2023 Terhadap APBD Tahun 2024..... II-1

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 II-21

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-35

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II-37

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD II-39

BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH III-1

BAB 4 PENUTUP IV-1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Bappedalitbang Tahun 2023 dengan APBD 2024 ..... II-2

Tabel 2.2 Perbandingan Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja dan APBD Bappedalitbang Tahun 2024 ..... II-3

Tabel 2.3 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bappedalitbang Sampai Triwulan II Tahun 2024 ..... II-22

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024.. II-40

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ..... III-6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan konsekuensi dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai wujud implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024. Renja Tahun 2024 telah disusun pada Tahun 2023 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Seiring dengan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2024, hasil pengendalian pelaksanaan renja menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Renja Bappedalitbang Tahun 2024. Hal ini sekaligus sebagai tindak lanjut dari terbitnya Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor B-83/Bappedalitbang/000.7/VI/2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, bahwa SKPD melakukan penyesuaian terhadap Renja sehubungan dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Selain berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024, Perubahan Renja Bappedalitbang Tahun 2024 juga disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun

BAPPEDALITBANG

2024 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Tabalong Tahun 2024 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Derah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

BAPPEDALITBANG

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009

BAPPEDALITBANG

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 07)
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

BAPPEDALITBANG

17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 16).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

   Dokumen Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Tabalong disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

2. Tujuan

   Dokumen Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Tabalong disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Tabalong.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

BAPPEDALITBANG

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup

BAPPEDALITBANG

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun selain berpedoman dengan Perubahan RKPD, juga berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. Dalam hal ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappedalitbang Kabupaten Tabalong sampai dengan triwulan II tahun 2024 dengan mengacu pada APBD tahun 2024 yang sudah disahkan.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Bappedalitbang Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024

2.1.1.1 Kesesuaian Program Antara Renja Bappedalitbang Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada rencana kerja Bappedalitbang dengan APBD Tahun 2024, terdapat kesesuaian 100%. Artinya bahwa jumlah program dalam renja sama dengan jumlah program yang ada dalam APBD, yaitu ada 4 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

2.1.1.2 Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Bappedalitbang Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan yang ada pada rencana kerja Bappedalitbang dengan APBD Tahun 2024, terdapat perbedaan jumlah kegiatan, jumlah kegiatan dalam Renja ada 19, kemudian jumlah kegiatan di APBD ada 18, hal ini terjadi karena kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan tidak jadi

BAPPEDALITBANG

dilaksanakan dalam APBD Tahun 2024, sehingga jumlah kegiatan di APBD hanya sebanyak 18 kegiatan.

2.1.1.3 Kesesuaian Sub Kegiatan Antara Renja Bappedalitbang Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2023

Berdasarkan evaluasi terhadap sub kegiatan yang ada di renja Bappedalitbang dengan APBD tahun 2024, jumlah sub kegiatan yang ada di renja sebanyak 69 dan sub kegiatan yang ada di APBD sebanyak 61 sub kegiatan. Dilakukan penyesuaian sub kegiatan antara sub Kegiatan dalam Renja dengan APBD Tahun 2024 untuk mengakomodir hasil asietensi dan saran pimpinan karena adanya keterbatasan anggaran dan ada kegiatan lain yang lebih prioritas.

2.1.1.4 Kesesuaian Pagu Anggaran Antara Renja Bappedalitbang Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024.

Terdapat kenaikan 93 % antara pagu anggaran pada Renja Bappedalitbang dengan pagu anggaran APBD Bappedalitbang Kabupaten Tabalong Tahun 2024, pagu Renja Rp. 18.336.643.301,00 dan Pagu APBD sebesar Rp. 19.224.611.503,00.

Hasil evaluasi kesesuaian jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran antara renja Bappedalitbang Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1. dibawah ini.

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Bappedalitbang Tahun 2024 dengan APBD 2024

No	Uraian	Renja 2024	APBD 2024
1.	Program	4	4
2.	Kegiatan	19	18
3.	Sub Kegiatan	69	61
4.	Pagu Anggaran	Rp. 18.336.643.301,00	Rp. 19.224.611.503,00

Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

BAPPEDALITBANG

Tabel 2.2. Perbandingan Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Renja dan APBD Bappedalitbang Tahun 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5						**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					
5	**01**					**PERENCANAAN**					
5	**01**	**02**				**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase indikator kinerja sasaran daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah**	**100%**	**2.351.959.180**	**100%**	**2.643.894.050**
5	**01**	**02**	**2**	**01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase realisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun**	**100%**	**1.429.107.560**	**100%**	**1.689.138.400**
5	01	02	2	01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	18.792.000	1 Berita Acara	18.792.000
5	01	02	2	01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	31.100.000	1 Berita Acara	31.100.000
5	01	02	2	01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	282.723.000	1 Berita Acara	278.673.626
5	01	02	2	01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1500 usulan	276.520.000	1500 usulan	282.723.000

BAPPEDALITBANG

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)						*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
5	01	02	2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	819.972.560	3 Dokumen	1.077.849.774
5	**01**	**02**	**2**	**02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase SKPD yang mendapatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Data Informasi guna penyediaan data Perencanaan Pembangunan**	**100%**	**242.714.740**	**100%**	**284.718.740**
5	01	02	2	02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan	69.124.540	1 Masukan	69.124.540
5	01	02	2	02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	40 Orang	120.165.000	40 Orang	162.169.000
5	01	02	2	02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang	1 buku	53.425.200	1 buku	53.425.200

BAPPEDALITBANG

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)						*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
						Kabupaten/Kota	Diterbitkan				
5	**01**	**02**	**2**	**04**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Persentase Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**100%**	**193.230.000**	**100%**	**193.230.000**
5	01	02	2	04	01	Penngelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 dokumen	9.790.000	1 dokumen	9.790.000
5	01	02	2	04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 dokumen	168.540.000	1 dokumen	168.540.000
5	01	02	2	04	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 dokumen	14.900.000	1 dokumen	14.900.000
5	**01**	**02**	**2**	**03**		**Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Realisasi Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**100%**	**486.906.880**	**100%**	**476.806.910**

BAPPEDALITBANG

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)						*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
5	01	02	2	03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	264.063.416	2 Laporan	253.963.446
5	01	02	2	03	03	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan	222.843.464	8 Laporan	222.843.464
5	**01**	**03**				**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD terhadap program pada Dokumen Perencanaan daerah**	**100%**	**2.337.721.830**	**100%**	**2.000.737.258**
5	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap Program pada Dokumen Perencanaan Daerah**	**100%**	**1.362.115.586**	**100%**	**1.362.115.584**
5	01	03	2	01	01	Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perencanaan	9 Dokumen	281.947.000	10 Dokumen	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)						*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
						Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				281.947.000
5	01	03	2	01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Perangkat Daerah	2.000.000	9 Laporan	2.000.000
5	01	03	2	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	598.600.000	10 Dokumen	659.594.000
5	01	03	2	01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Perangkat Daerah	2.000.000	10 Laporan	2.000.000
5	01	03	2	01	07	Pelaksanaan Monitoring dan	Jumlah Laporan Hasil	10 Perangkat	450.000.000	10 Laporan	

BAPPEDALITBANG

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)						*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
						Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Daerah			353.669.650
5	01	03	2	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	27.568.586	10 Laporan	62.904.934
5	**01**	**03**	**2**	**02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perekonomian dan SDA terhadap Program pada Dokumen Perencanaan Daerah**	**100%**	**406.000.000**	**100%**	**206.000.000**
5	01	03	2	02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	406.000.000	4 Laporan	206.000.000
5	**01**	**03**	**2**	**03**		**Koordinasi Perencanaan**	**Persentase Keselarasan Program**	**100%**	**569.606.244**	**100%**	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)						*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
						Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap Program Pada dokumen Perencanaan Daerah**				**432.621.674**
5	01	03	2	03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan	121.606.244	5 Laporan	95.302.000
5	01	03	2	03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	12 Laporan	448.000.000	12 Laporan	337.319.674
5	**05**					**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					**3.185.339.836**
5	05	02				**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti**	**20%**	**3.145.453.436**	**20%**	**3.185.339.836**
5	**05**	**02**	**2**	01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian**	**Persentase penelitian di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang**	**20%**	**246.228.936**	**20%**	**385.339.836**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)						*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
						Peraturan	**ditindaklanjuti**				
5	**05**	**02**	**2**	01	04	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	44.844.900	-	-
5	**05**	**02**	**2**	01	06	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Laporan	44.844.900	-	-
5	**05**	**02**	**2**	01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000
5	**05**	**02**	**2**	01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan / Atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang	4 Rekomendasi	96.539.136	2 Rekomendasi	325.339.836

BAPPEDALITBANG

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)						*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
						Peraturan	Diterbitkan				
5	**05**	**02**	**2**	02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase Penelitian di bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti**	**20%**	**629.379.600**	**20%**	**1.350.000.000**
5	**05**	**02**	**2**	02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	469.359.616
5	**05**	**02**	**2**	02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	44.844.900	1 Dokumen	440.320.584
5	**05**	**02**	**2**	02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	44.844.900	-	-
5	**05**	**02**	**2**	02	07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	44.844.900	-	-
5	**05**	**02**	**2**	02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	44.844.900	1 Dokumen	440.319.800
5	**05**	**02**	**2**	03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan	Persentase Penelitian di bidang Ekonomi dan Pembangunan yang	**20%**	**869.844.900**	**0%**	**0%**

BAPPEDALITBANG

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)						*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
						Pembangunan	ditindaklanjuti				
5	**05**	**02**	**2**	03	03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	44.844.900	-	-
5	**05**	**02**	**2**	03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	200.000.000	-	-
5	**05**	**02**	**2**	03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	300.000.000	-	-
5	**05**	**02**	**2**	03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	325.000.000	-	-
5	**05**	**02**	**2**	04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase inovasi daerah yang diimplementasikan**	**20%**	**1.400.000.000**	**20%**	**1.450.000.000**

BAPPEDALITBANG

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)						*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
5	**05**	**02**	**2**	04	01	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	300.000.000
5	**05**	**02**	**2**	04	03	Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	800.000.000	1 Laporan	864.300.000
5	**05**	**02**	**2**	04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000
5	**05**	**02**	**2**	04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	135.700.000
						NON URUSAN					
x	**xx**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**A**	**10.501.508.855**	**A**	**11.394.640.359**

BAPPEDALITBANG

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)						*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
x	**xx**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja**	**100%**	**61.829.169**	**100%**	**61.829.169**
x	**xx**	**01**	**2**	**01**	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	30.310.392	2 dokumen	39.101.977
x	**xx**	**01**	**2**	**01**	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.679.956	1 Dokumen	2.035.256
x	**xx**	**01**	**2**	**01**	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.044.344	1 Dokumen	2.035.256
x	**xx**	**01**	**2**	**01**	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.837.552	1 Dokumen	2.110.940
x	**xx**	**01**	**2**	**01**	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.286.940	1 Dokumen	2.110.940

BAPPEDALITBANG

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)						*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
x	**xx**	**01**	**2**	**01**	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.764.985	1 Laporan	2.084.800
x	**xx**	**01**	**2**	**01**	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	2 Laporan	19.905.000	2 Laporan	12.350.000
x	**xx**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN**	**100%**	**6.920.069.686**	**100%**	**7.763.548.866**
x	**xx**	**01**	**2**	**02**	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang/bulan	6.877.569.786	37 orang/bulan	**7.721.050.000**
X	XX	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	38 Dokumen	2.499.900	38 Dokumen	2.499.144
X	XX	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	24.999.899

BAPPEDALITBANG

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)						*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
							Keuangan Akhir Tahun SKPD				
X	XX	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	14.999.823
x	**xx**	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi barang Milik daerah pada Perangkat daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**9.000.000**	**100%**	**7.350.000**
X	XX	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik pada SKPD	2 Dokumen	**4.000.000**	2 Dokumen	**3.350.000**
X	XX	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	**3.000.000**	12 Laporan	**2.000.000**
x	**xx**	**01**	**2**	**03**	02	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	**2.000.000**	4 Laporan	**2.000.000**
x	**xx**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian**	**Persentase peserta bimbingan**	**100%**	**550.000.000**	**100%**	

BAPPEDALITBANG

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)						*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
						Perangkat Daerah	**teknis atau sejenisnya yang mampu menjawab 80% pertanyaan dengan benar**				**495.000.000**
x	**xx**	**01**	**2**	**05**	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	1 Paket	70.000.000
x	**xx**	**01**	**2**	**05**	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	165 Orang	550.000.000	165 org	425.000.000
x	**xx**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase aktivitas administrasi umum yang difasilitasi**	**100%**	**1.195.000.000**	**100%**	**986.826.598**
x	**xx**	**01**	**2**	**06**	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	25.000.000	1 paket	21.806.958
x	**xx**	**01**	**2**	**06**	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50 paket	250.000.000	50 paket	161.920.000
x	**xx**	**01**	**2**	**06**	**05**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 Paket	45.000.000	8 Paket	42.000.000
x	**xx**	**01**	**2**	**06**	**06**	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	8 Dokumen	40.000.000	8 Dokumen	

BAPPEDALITBANG

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)						*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
						Peraturan Perundang-Undangan	dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				33.723.640
x	**xx**	**01**	**2**	**06**	**09**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	12 Laporan	800.000.000	12 Laporan	697.376.000
X	XX	01	2	06	**03**	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	7 Paket	35.000.000	7 Paket	30.000.000
X	XX	**01**	**2**	*07*		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**175.000.000**	**100%**	**575.424.295**
X	XX	01	2	07	**06**	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6 Unit	175.000.000	33 Unit	575.424.295
x	**xx**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi**	**100%**	**851.610.000**	**100%**	**813.805.960**
x	**xx**	**01**	**2**	**08**	**01**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	3 Laporan	5.010.000	3 Laporan	5.010.000
x	**xx**	**01**	**2**	**08**	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	96.600.000	4 Laporan	124.800.000

BAPPEDALITBANG

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)						*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
x	**xx**	**01**	**2**	**08**	**04**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan	750.000.000	2 Laporan	683.995.960
x	**xx**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**100%**	**739.000.000**	**100%**	**690.855.471**
x	**xx**	**01**	**2**	**09**	**02**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	450.000.000	25 Unit	315.100.000
x	**xx**	**01**	**2**	**09**	06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	69 unit	75.000.000	69 Unit	93.330.000
x	**xx**	**01**	**2**	**09**	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	1 Unit	276.348.183
X	XX	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 Unit	14.000.000	10 Unit	6.077.288

BAPPEDALITBANG

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024		APBD 2024	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)						*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
						Lainnya					
JUMLAH									18.336.643.301		**19.224.611.503**

BAPPEDALITBANG

Berdasarkan data perbandingan antara Renja 2024 dan APBD 2024 pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan pada APBD disusun masih mengacu pada Renja, hal ini dapat dilihat dari persentase kesesuaian Program sebesar 100 persen, persentase kesesuaian kegiatan sebesar 94 persen dan persentase kesesuaian sub kegiatan sebesar 97,5 persen. Indikator dan target pada APBD pada semua kegiatan dan sub kegiatan sudah sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan di Renja 2024.

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, penilaian hasil pelaksanaan Renja menggunakan data realisasi pelaksanaan APBD sebagai acuan. Berikut rekapitulasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Bappedalitbang sampai triwulan II tahun 2024.

BAPPEDALITBANG

Tabel 2.3 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bappedalitbang Sampai Triwulan II Tahun 2024

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024		Realisasi Capaian TargetProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan sd Triwulan II tahun 2024			CARATAN PENTING
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.01	**PERENCANAAN**							
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase indikator kinerja sasaran daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah**	**100%**	**2.643.894.050**	880.270.109	33,29%	46%	Indikator kinerja sasaran daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase realisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun**	**100%**	**1.689.138.400**	643.721.041	38,11%	60%	Dokumen perencanaan yang telah selesai dilakukan adalah dokumen RPD, untuk dokumen perencanaan lainnya (RPJPD, RKPD, Perubahan RKPD) masih dalam proses penyusunan.
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	18.792.000	14.297.632	76,08%	76,42%	Kegiatan sudah dilaksanakan dan terdapat efisiensi anggaran
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	31.100.000	19.118.362	61,47%	57,33%	Kegiatan sudah dilaksanakan dan terdapat efisiensi anggaran
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	278.673.626	156.513.976	56,16%	60,89%	Kegiatan sudah dilaksanakan dan terdapat efisiensi anggaran
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1500 usulan	282.723.000	248.922.000	88,04%	85,47%	Kegiatan sudah dilaksanakan dan terdapat efisiensi anggaran
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	1.077.849.774	204.869.071	19,01%	18,79%	Penyusunan dokumen perencanaan masih

BAPPEDALITBANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024		Realisasi Capaian TargetProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan sd Triwulan II tahun 2024			CARATAN PENTING
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)						dilakukan hingga saat ini
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase SKPD yang mendapatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Data Informasi guna penyediaan data Perencanaan Pembangunan**	**100%**	**284.718.740**	99.687.080	35,01%	35%	Seluruh SKPD mendapatkan pembinaan dan pemanfaatan data informasi
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan	69.124.540	12.532.000	18,13%	23,09%	Pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan di triwulan III dan IV
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	40 Orang	162.169.000	87.155.080	53,74%	80,97%	Pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan di triwulan III dan IV
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 buku	53.425.200	0	0,00%	0	Penyusunan dokumen profil pembangunan daerah akan dilaksanakan di triwulan III
5.01.02.2.04	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Persentase Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**100%**	**193.230.000**	0	0,00%	0	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah telah digunakan di bidang pembangunan daerah
5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 dokumen	9.790.000	0	0,00%	0	kegiatan belum dilaksanakan
5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 dokumen	168.540.000	0	0,00%	0	kegiatan belum dilaksanakan

BAPPEDALITBANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024		Realisasi Capaian TargetProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan sd Triwulan II tahun 2024			CARATAN PENTING
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 dokumen	14.900.000	0	0,00%	0	kegiatan belum dilaksanakan
5.01.02.2.03	**Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Realisasi Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**100%**	**476.806.910**	136.861.988	28,70%	87,97%	Dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah disusun pertriwulan. Dokumen selanjutnya akan disusun di triwulan III dan IV
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	253.963.446	0	0,00%	0	kegiatan akan dilaksanakan di triwulan IV
5.01.02.2.03.0003	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan	222.843.464	136.861.988	61,42%	87,97%	Kegiatan akan dilanjutkan pelaksanaannya di triwulan III dan IV
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD terhadap program pada Dokumen Perencanaan daerah**	**100%**	**2.000.737.258**	509.549.760	25,47%	**19%**	
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap Program pada Dokumen Perencanaan Daerah**	**100%**	**1.362.115.584**	203.744.361	14,96%	**14%**	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir	10 Dokumen	281.947.000	69.384.752	24,61%	32%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024		Realisasi Capaian TargetProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan sd Triwulan II tahun 2024			CARATAN PENTING
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	2.000.000	0	0,00%	0	Kegiatan akan dilaksanakan pada awal TW III
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	659.594.000	132.629.609	20,11%	35%	
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	2.000.000	0	0,00%	0	Kegiatan akan dilaksanakan pada awal TW III
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	353.669.650	1.730.000	0,49%	15%	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	62.904.934	0	0,00%	0	Kegiatan akan dilaksanakan pada awal TW III
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perekonomian dan SDA terhadap Program pada Dokumen Perencanaan Daerah**	**100%**	**206.000.000**	116.089.196	56,35%	56,41 %	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	4 Laporan		116.089.196	56,35%	56,41 %	Kinerja sudah mencapai

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024		Realisasi Capaian TargetProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan sd Triwulan II tahun 2024			CARATAN PENTING
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		206.000.000				50% lebih
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase Keselarasan Program Pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap Program Pada dokumen Perencanaan Daerah**	**100%**	**432.621.674**	189.716.203	43,85%	43%	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan	95.302.000	39.317.425	41,26%	41,47%	Realisasi Capaian Keuangan dan Kinerja Hampir Mencapai 50% di TW II, anggaran dominan terbesar ada dipekerjaan video yang sudah dilaksanakan yang akan dibayarkan di TW III, Target Capaian Kinerja 3 Laporan
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	12 Laporan	337.319.674	150.398.778	44,59%	44,92%	Realisasi Capaian Keuangan dan Kinerja Hampir Mencapai 50% di TW II, anggaran dominan terbesar ada dipekerjaan konsultan yang akan selesai di TW III, Target capaian kinerja 6 laporan
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**3.185.339.836**				
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti**	**20%**	**3.185.339.836**	496.847.639	15,60%	**37%**	
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan**	**Persentase penelitian di bidang**	**20%**			21,39%	55%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024		Realisasi Capaian TargetProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan sd Triwulan II tahun 2024			CARATAN PENTING
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti**		**385.339.836**	**82.421.379**			
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	60.000.000	34.239.262	57,07%	60%	Laporan Data kelitbangan baru bisa diselesaikan pd akhir tahun, sampai saat ini proses pembuatan laporan sdh berjalan 60 %. Pelaksanaan sosialisasi e-riset dijadwalkan pada triwulan III
5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan / Atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	325.339.836	48.182.117	14,81%	50%	Rekomendasi yang dihasilkan baru akan didapat pada akhir tahun, tahapan penyusunan rekomendasi sudah berjalan 50%. Penyusunan policy brief/ rekomendasi akan diselesaikan di triwulan IV
5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase Penelitian di bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti**	**20%**	**1.350.000.000**	230.079.460	17,04%	33%	
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	469.359.616	118.066.005	25,15%	40%	Pelaksanaan kajian terkait kemiskinan sudah melaksanakan ekspos laporan awal dan persiapan survei lapangan, dan akan selesai pada TW IV, sampai saat ini penyusunan Dokumen sudah berjalan 40

BAPPEDALITBANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024		Realisasi Capaian TargetProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan sd Triwulan II tahun 2024			CARATAN PENTING
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
								%
5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	440.320.584	112.013.455	25,44%	40%	Pelaksanaan kajian terkait RLS dan HLS sudah melaksanakan ekspos laporan awal dan persiapan survei lapangan, dan akan selesai pada TW IV, sampai saat ini penyusunan Dokumen sudah berjalan 40 %
5.05.02.2.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	440.319.800	0	0,00%	20%	Pelaksanaan kajian terkait tenaga kerja akan melaksanakan ekspos awal pada TW III dan akan selesai pada TW IV, sampai saat ini penyusunan Dokumen sudah berjalan 20 %
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase inovasi daerah yang diimplementasikan**	**20%**	**1.450.000.000**	184.346.800	12,71%	24%	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4 Dokumen	300.000.000	60.784.100	20,26%	30%	Sudah dilakukan kegiatan bimtek inovasi, untuk peyelesaian Dokumen Inovasi sudah berjalan 30 %
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	864.300.000	116.914.500	13,53%	45%	Sudah dilakukan kegiatan coaching clinic inovasi untuk penjaringan dan pembinaan inovasi daerah
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan	1 Laporan	150.000.000	5.038.200	3,36%	10%	Pelaksanaan diseminasi penelitian akan

BAPPEDALITBANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024		Realisasi Capaian TargetProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan sd Triwulan II tahun 2024			CARATAN PENTING
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan						dilaksanakan pada TW III dan IV
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	135.700.000	1.610.000	1,19%	10%	Pelaksanaan pendaftaran Haki akan dilaksanakan pada TW IV
	NON URUSAN							
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**A**	**11.394.640.359**	4.516.235.333	39,63%	47%	
5.01.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja**	**100%**	**61.829.169**	19.619.300	31,73%	**64%**	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	39.101.977	10.605.300	27,12%	50%	Belum ada kegiatan Bimtek yang sesuai dengan kegiatan Perencanaan
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.035.256	1.785.000	87,70%	100%	
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.035.256	-	0,00%	-	Kegiatan akan dilaksanakan pada awal TW III
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.110.940	-	0,00%	-	Kegiatan akan dilaksanakan pada awal TW III
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.110.940	1.785.000	84,56%	100%	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	1 Laporan	2.084.800	1.785.000	85,62%	100%	

BAPPEDALITBANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024		Realisasi Capaian TargetProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan sd Triwulan II tahun 2024			CARATAN PENTING
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	2 Laporan	12.350.000	3.659.000	29,63%	100%	
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN**	**100%**	**7.763.548.866**	3.593.983.920	46,29%	**50%**	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang/bulan	**7.721.050.000**	3.571.237.720	46,25%	100%	
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	38 Dokumen	2.499.144	-	0,00%	0%	Masih dalam Proses ULP
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	24.999.899	22.101.200	88,41%	50%	
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	14.999.823	645.000	4,30%	50%	
5.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi barang Milik daerah pada Perangkat daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**7.350.000**	-	0,00%	**0%**	
5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik pada SKPD	2 Dokumen	**3.350.000**	-	0,00%	0%	Kegiatan dilaksakan pada TW III
5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	12 Laporan			0,00%	0%	Kegiatan dilaksakan pada

BAPPEDALITBANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024		Realisasi Capaian TargetProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan sd Triwulan II tahun 2024			CARATAN PENTING
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		**2.000.000**	-			TW III
5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	**2.000.000**	-	0,00%	0%	Kegiatan dilaksakan pada TW III
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase peserta bimbingan teknis atau sejenisnya yang mampu menjawab 80% pertanyaan dengan benar**	**100%**	**495.000.000**	91.545.000	18,49%	75%	
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	70.000.000	52.800.000	75,43%	100%	
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	165 org	425.000.000	38.745.000	9,12%	50%	Belum bisa terlaksana secara optimal karena padatnya kegiatan
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase aktivitas administrasi umum yang difasilitasi**	**100%**	**986.826.598**	329.946.953	33,44%	50%	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	21.806.958	6.617.500	30,35%	50%	disediakan sesuai kebutuhan dan permintaan
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50 paket	161.920.000	18.300.000	11,30%	50%	disediakan sesuai kebutuhan dan permintaan
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 Paket	42.000.000	14.635.000	34,85%	50%	disediakan sesuai kebutuhan dan permintaan
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	33.723.640	10.903.000	32,33%	50%	disediakan sesuai kebutuhan dan permintaan
5.01.01.2.06.0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	12 Laporan	697.376.000	272.797.953	39,12%	50%	disediakan sesuai kebutuhan dan permintaan
5.01.01.2.06.0009	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	7 Paket	30.000.000	6.693.500	22,31%	50%	disediakan sesuai kebutuhan dan permintaan
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	**Persentase Pengadaan Barang**	**100%**			11,26%	50%	

BAPPEDALITBANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024		Realisasi Capaian TargetProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan sd Triwulan II tahun 2024			CARATAN PENTING
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Milik Daerah yang dilaksanakan**		**575.424.295**	64.810.811			
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	33 Unit	575.424.295	64.810.811	11,26%	50%	disediakan sesuai kebutuhan dan permintaan
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi**	**100%**	**813.805.960**	302.672.044	37,19%	50%	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	3 Laporan	5.010.000	1.500.000	29,94%	50%	disediakan sesuai kebutuhan dan permintaan
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	124.800.000	40.476.044	32,43%	50%	disediakan sesuai kebutuhan dan permintaan
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan	683.995.960	260.696.000	38,11%	50%	disediakan sesuai kebutuhan dan permintaan
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**100%**	**690.855.471**	113.657.305	16,45%	38%	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	315.100.000	102.664.805	32,58%	50%	disediakan sesuai kebutuhan dan permintaan
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	69 Unit	93.330.000	10.992.500	11,78%	50%	disediakan sesuai kebutuhan dan permintaan
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	276.348.183	-	0,00%	0%	Kegiatan Pemeliharaan dilaksanakan pada TW III

BAPPEDALITBANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024		Realisasi Capaian TargetProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan sd Triwulan II tahun 2024			CARATAN PENTING
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 Unit	6.077.288	-	0,00%	50%	pembelian diwajibkan lewat e-katalog sementara barang yang tersedia dietalase belum lengkap
				19.224.611.503	6.402.902.841	33,31%		

BAPPEDALITBANG

Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja Bappedalitbang sampai triwulan II diatas diolah berdasarkan data pada formulir evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sesuai format evaluasi renja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (formulir evaluasi terlampir). Evaluasi Renja dimaksudkan untuk mengindentifikasi sejauh mana capaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja serta implikasi yang timbul, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk tindakan perencanaan selanjutnya.

Berdasarkan data pada tabel 2.3 tersebut, dapat dilihat bahwa dari sisi anggaran, Bappedalitbang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 6.402.902.841,- atau sekitar 33,31 persen dari total anggaran untuk tahun 2024. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif masih rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena pelaksanaannya memang dijadwalkan pada triwulan III dan IV, diantaranya yaitu :

1. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sub kegiatan :
   - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
2. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan daerah di Bidang Pembangunan Daerah
   - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
   - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
   - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota
3. Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
   - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

BAPPEDALITBANG

4. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Sub Kegiatan :
   - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
   - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
   - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Sub Kegiatan :
   - Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja;

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Bappedalitbang Kabupaten Tabalong telah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappedalitbang adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

a. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
b. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
c. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Povinsi dan Pemerintah Kabupaten, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah;
d. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
e. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan;

BAPPEDALITBANG

f. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dan atau melakukan koordinasi hasil-hasil penelitian;
g. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai petunjuk Bupati.

Kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas diantaranya dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Berdasarkan data pada tabel 2.3, secara umum pelaksanaan sebagian besar kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait capaian kinerja sampai dengan triwulan II dan memerlukan tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat rincian belanja yang masuk pada sub kegiatan yang tidak tepat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian/pemindahan belanja dari sub kegiatan satu ke sub kegiatan lainnya yang sesuai.
2. Masih terdapat hambatan terkait upaya pemenuhan laporan penunjang nilai AKIP, diantaranya belum tepat waktunya pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi dari Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar dari dilakukannya evaluasi kinerja. Selain itu pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dan rencana aksi juga belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
3. Belum optimalnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah, yang antara lain disebabkan oleh belum optimalnya proses koordinasi serta kurangnya pemahaman dalam hal perencanaan. Penguatan kapasitas ASN Perencana baik ASN Bappedalitbang dan ASN Perangkat Daerah dalam hal ini perlu terus dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang dihasilkan, terlebih mengingat padat dan pentingnya agenda perencanaan tahun 2024 ini yang tidak hanya fokus pada penyusunan perencanaan tahunan, tetapi juga penyusunan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.
4. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi yang akurat untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Ketersediaan system data dan informasi sangat dibutuhkan dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan yang sedang dijalankan. Adanya system data dan

BAPPEDALITBANG

informasi yang akurat akan mempermudah aparatur perencana pada Bappedalitbang dalam melaksanakan tugasnya.

5. Masih banyak kebutuhan akan kajian kelitbangan yang harus dilakukan untuk mendukung proses perencanaan. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu syarat perencanaan yang baik adalah perencanaan yang berbasis riset. Berdasarkan analisis prioritas kelitbangan, maka suatu kajian yang perlu untuk direncanakan pada perubahan renja 2024 adalah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan PAD dari sektor perindustrian dan perdagangan.
6. Kabupaten Tabalong kembali berhasil meraih prestasi sebagai salah satu Kabupaten Terinovatif se-Indonesia dan Kabupaten Terinovatif se Regional Kalimantan - Sulawesi pada penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kemendagri. Hal ini tidak terlepas dari upaya bersama oleh Bappedalitbang sebagai fasilitator dan para inovator daerah se-Kabupaten Tabalong. Untuk menjaga dan terus menumbuh kembangkan inovasi daerah, maka diperlukan dukungan dalam kegiatan tersebut, salah satunya melalui pemberian reward/insentif kepada para inovator daerah dan pelaksanaan lomba Inovasi Daerah.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Tabalong tidak terlepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappedalitbang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Berdasarkan perkembangan yang terjadi pada tahun 2024, dapat diidentifikasi beberapa isu yang berkembang dan harus ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah

   Bappedalitbang memiliki peran yang strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Produk perencanaan yang dihasilkan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah. Sebagai koordinator perencanaan

pembangunan di daerah, Bappedalitbang perlu terus berupaya untuk memastikan kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, memastikan bahwa perencanaan ditataran kabupaten telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di perangkat daerah, memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan. Meskipun saat ini telah diaplikasikan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan, namun dalam penggunaannya masih sering ditemui berbagai kendala sehingga Bappedalitbang juga diharapkan dapat antisipatif terhadap hal ini.

2. Optimalisasi pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah

   Salah satu syarat perencanaan yang baik adalah perencanaan yang berbasis riset. Dalam hal ini hasil kelitbangan memegang peranan penting sebagai landasan dari perumusan kebijakan perencanaan pembangunan. Sepanjang tahun 2023 hingga pertengahan tahun 2024 sebanyak 11 kajian telah dihasilkan oleh Bappedalitbang. Selain itu, berbagai inovasi pun terus dikembangkan bahkan mampu bersaing dalam ajang penghargaan berskala nasional. Hasil kelitbangan tersebut selanjutnya diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah termasuk dalam perencanaan pembangunan.

3. Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

   Regulasi dan kebijakan yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut. Adapun implementasi kebijakan yang perlu diperhatikan diantaranya kebijakan terkait :

   a. Penyetaraan jabatan dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021.
   b. Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah berdasar Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021.

BAPPEDALITBANG

c. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021.
d. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021.
e. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.
f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020.

4. Optimalisasi fungsi kelembagaan Bappedalitbang

Dalam hal ini perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan. Hal ini menjadi penting pula mengingat upaya optimalisasi ini tentunya akan membawa dampak (baik secara langsung maupun tidak langsung) pada peningkatan hasil evaluasi SAKIP.

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rumusan tematik pembangunan sebagaimana disebutkan dalam RKPD Tahun 2024 adalah **"**Penguatan Daya Saing Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas**"** dengan 5 prioritas daerah dan 15 sasaran pembangunan yang upaya pencapaiannya dijabarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. RKPD 2024 dalam hal ini mengalami perubahan diantaranya dari segi rumusan kegiatan dan sub kegiatan. Selanjutnya, sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rancangan Perubahan RKPD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, maka dalam reviu ini akan dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Perubahan Rencana Kerja Bappedalitbang. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut.

BAPPEDALITBANG

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

KODE	RANCANGAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5.01	**PERENCANAAN**				**PERENCANAAN**				
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Bappedalitbang**	**Persentase indikator kinerja sasaran daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah**	**2.701.598.644**	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Bappedalitbang**	**Persentase indikator kinerja sasaran daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah**	**2.701.598.644**	
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Bappedalitbang**	**Persentase realisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun**	**1.709.875.722**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Bappedalitbang**	**Persentase realisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun**	**1.709.875.722**	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bappedalitbang	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	18.792.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bappedalitbang	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	18.792.000	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	31.100.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	31.100.000	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappedalitbang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	278.673.626	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappedalitbang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	278.673.626	

KODE	RANCANGAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.02.2.01.00 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Bappedalitbang	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	282.723.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Bappedalitbang	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	282.723.000	
5.01.02.2.01.00 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1.098.587.096	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1.098.587.096	Pengurangan anggaran dari belanja honorarium dan pergeseran anggaran
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase SKPD yang mendapatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Data Informasi guna penyediaan data Perencanaan Pembangunan**	**511.930.621**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase SKPD yang mendapatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Data Informasi guna penyediaan data Perencanaan Pembangunan**	**511.930.621**	
5.01.02.2.02.00 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebiajakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	89.124.304	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebiajakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	89.124.304	Penambahan anggaran untuk belanja perjalanan dinas
5.01.02.2.02.00 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan	Bappedalitbang	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan	330.659.481	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan	Bappedalitbang	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan	330.659.481	Penambahan anggaran untuk pelaksanaan

KODE	RANCANGAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Informasi		Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Informasi		Forum Satu Data
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappedalitbang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	92.146.836	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappedalitbang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	92.146.836	Penambahan anggaran untuk belanja cetak buku profil pembangunan daerah dan jasa desain layout buku
5.01.02.2.04	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**35.553.276**	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**35.553.276**	
5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	9.790.000	Pengelolaan Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	9.790.000	
5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di	9.863.276	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di	9.863.276	

BAPPEDALITBANG

KODE	RANCANGAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	di Bidang Pembangunan Daerah		Bidang Pembangunan Daerah		di Bidang Pembangunan Daerah		Bidang Pembangunan Daerah		
5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	15.900.000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	15.900.000	
5.01.02.2.03	**Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase Realisasi Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**444.239.025**	**Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase Realisasi Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**444.239.025**	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	13.289.686	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	13.289.686	Penambahan anggaran untuk belanja honorarium pelaksanaan Rakor Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan di Kecamatan
5.01.02.2.03.00	Monitoring Evaluasi	Bappedalitban	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi		Monitoring Evaluasi	Bappedalitban	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi		Penambahan

BAPPEDALITBANG

KODE	RANCANGAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	g	Kinerja Pembangunan Daerah	430.949.339	dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	g	Kinerja Pembangunan Daerah	430.949.339	anggaran untuk fasilitasi pengembangan sistem SIMOLEK Pede
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Bappedalitbang**	**Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD terhadap program pada Dokumen Perencanaan daerah**	**3.104.399.858**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Bappedalitbang**	**Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD terhadap program pada Dokumen Perencanaan daerah**	**3.104.399.858**	
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Bappedalitbang**	**Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap Program pada Dokumen Perencanaan Daerah**	**2.185.878.184**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Bappedalitbang**	**Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap Program pada Dokumen Perencanaan Daerah**	**2.185.878.184**	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir	412.663.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir	412.663.000	

KODE	RANCANGAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(RPJPD RPJMD dan RKPD)		Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		(RPJPD RPJMD dan RKPD)		Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2.000.000	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1.297.640.600	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1.297.640.600	
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2.000.000	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	353.669.650	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	353.669.650	

BAPPEDALITBANG

KODE	RANCANGAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	117.904.934	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	117.904.934	Updating Data Silangkarr untuk 10 Desa
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Bappedalitbang**	**Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perekonomian dan SDA terhadap Program pada Dokumen Perencanaan Daerah**	**336.300.000**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Bappedalitbang**	**Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perekonomian dan SDA terhadap Program pada Dokumen Perencanaan Daerah**	**336.300.000**	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	336.300.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	336.300.000	Penambahan Perjalanan Dinas Biasa

BAPPEDALITBANG

KODE	RANCANGAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		130.000.000 dan Bahan Kantor - Pos (Materai) 300.000, Dan Laptop Non Teknis 23.000.000 dan printer 6.105.000 Yang Akan dialihkan Ke Sekretariat
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Bappedalitbang**	**Persentase Keselarasan Program Pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap Program Pada dokumen Perencanaan Daerah**	**582.221.674**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Bappedalitbang**	**Persentase Keselarasan Program Pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap Program Pada dokumen Perencanaan Daerah**	**582.221.674**	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	225.602.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	225.602.000	Penambahan untuk Perjalanan Dinas Biasa

KODE	RANCANGAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Bidang Infrastruktur				Bidang Infrastruktur				
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	356.619.674	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	356.619.674	Penambahan Biaya Pelatihan Geospasial
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Bappedalitbang**	**Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti**	**3.799.289.836**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Bappedalitbang**	**Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti**	**3.799.289.836**	
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Bappedalitbang**	**Persentase penelitian di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti**	**385.339.836**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Bappedalitbang**	**Persentase penelitian di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti**	**385.339.836**	
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Bappedalitbang	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	60.000.000	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Bappedalitbang	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	60.000.000	
5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan /	Bappedalitbang	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap	325.339.836	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan /	Bappedalitbang	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap	325.339.836	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa

KODE	RANCANGAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan		Atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan		Khusus Penyusunan Policy Brief Penelitian (5.1.02.02.09.0014) sebesar Rp. 50.000.000,00 digeser ke rekening Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Ekspos Laporan Penelitian (5.1.02.04.01.0001)
5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Bappedalitbang**	**Persentase Penelitian di bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti**	**1.350.000.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Bappedalitbang**	**Persentase Penelitian di bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti**	**1.350.000.000**	
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	469.359.616	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	469.359.616	

BAPPEDALITBANG

KODE	RANCANGAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	440.320.584	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	440.320.584	
5.05.02.2.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	440.319.800	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	440.319.800	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Bappedalitbang**	Persentase Penelitian di bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	325.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Bappedalitbang**	Persentase Penelitian di bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	325.000.000	
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	325.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	325.000.000	tambahan sub kegiatan untuk Penyusunan dokumen kajian penentuan Produk Unggulan Daerah sebagai masukan bagi penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek

BAPPEDALITBANG

KODE	RANCANGAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									di Daerah yang disusun pada tahun 2025
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Bappedalitbang**	**Persentase inovasi daerah yang diimplementasikan**	1.738.950.000	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Bappedalitbang**	**Persentase inovasi daerah yang diimplementasikan**	1.738.950.000	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	508.250.000	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	508.250.000	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Penyusunan Policy Brief Penelitian dan Inovasi sebesar Rp. 100.000.000,- digeser menjadi Penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik RIPJPID dan ditambahkan

BAPPEDALITBANG

KODE	RANCANGAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									pagu sebesar Rp. 125.000.000,-
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	945.000.000	Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	945.000.000	Penambahan pagu untuk narasumber
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	150.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	150.000.000	
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	135.700.000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	135.700.000	
NON URUSAN					**NON URUSAN**				
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Bappedalitbang**	**Nilai AKIP**	13.373.665.125	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Bappedalitbang**	**Nilai AKIP**	13.373.665.125	
5.01.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran dan**	**Bappedalitbang**	**Persentase hasil perencanaan dan pelaporan**	**108.978.061**	**Perencanaan Penganggaran dan**	**Bappedalitbang**	**Persentase hasil perencanaan dan pelaporan**	**108.978.061**	

KODE	RANCANGAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**yang dijadikan bahan evaluasi kinerja**		**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**yang dijadikan bahan evaluasi kinerja**		
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.250.869	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.250.869	Perlu tambahan untuk Perjadin Luar Provinsi dan pembelian materai
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.035.256	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.035.256	
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.035.256	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.035.256	
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.110.940	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.110.940	
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2.110.940	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2.110.940	

BAPPEDALITBANG

KODE	RANCANGAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD				Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.084.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.084.800	
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.350.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.350.000	
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN**	**8.237.950.268**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN**	**8.237.950.268**	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappedalitbang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.125.451.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappedalitbang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.125.451.000	
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	2.499.144	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	2.499.144	
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	45.000.037	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	45.000.037	

BAPPEDALITBANG

KODE	RANCANGAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	SKPD		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		SKPD		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65.000.087	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65.000.087	
5.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase Administrasi barang Milik daerah pada Perangkat daerah yang dilaksanakan**	**7.350.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase Administrasi barang Milik daerah pada Perangkat daerah yang dilaksanakan**	**7.350.000**	
5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	**3.350.000**	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	**3.350.000**	
5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**2.000.000**	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**2.000.000**	
5.01.01.2.03.00	Penatausahaan Barang	Bappedalitbang	Jumlah Laporan		Penatausahaan Barang	Bappedalitbang	Jumlah Laporan		

BAPPEDALITBANG

KODE	RANCANGAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	Milik Daerah pada SKPD	g	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**2.000.000**	Milik Daerah pada SKPD	g	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**2.000.000**	
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase peserta bimbingan teknis atau sejenisnya yang mampu menjawab 80% pertanyaan dengan benar**	**1.079.903.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase peserta bimbingan teknis atau sejenisnya yang mampu menjawab 80% pertanyaan dengan benar**	**1.079.903.000**	
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bappedalitbang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	74.440.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bappedalitbang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	74.440.000	
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappedalitbang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.005.463.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappedalitbang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.005.463.000	
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase aktivitas administrasi umum yang difasilitasi**	**1.094.636.598**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase aktivitas administrasi umum yang difasilitasi**	**1.094.636.598**	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappedalitbang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21.806.958	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappedalitbang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21.806.958	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Bappedalitbang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	161.920.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Bappedalitbang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	161.920.000	

KODE	RANCANGAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kantor		disediakan		Kantor		disediakan		
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bappedalitbang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	42.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bappedalitbang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	42.000.000	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	33.723.640	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	33.723.640	
5.01.01.2.06.0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	805.186.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	805.186.000	
5.01.01.2.06.0009	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappedalitbang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappedalitbang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	30.000.000	
5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan**	**1.211.096.263**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan**	**1.211.096.263**	
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya Yang di Sediakan	1.211.096.263	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya Yang di Sediakan	1.211.096.263	
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa**	**Bappedalitba**	**Persentase jasa penunjang**		**Penyediaan Jasa**	**Bappedalitba**	**Persentase jasa penunjang**		

KODE	RANCANGAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**ng**	**urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi**	**886.001.317**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**ng**	**urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi**	**886.001.317**	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	5.010.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	5.010.000	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	124.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	124.800.000	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	756.191.317	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	756.191.317	
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**747.749.618**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**747.749.618**	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappedalitbang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	315.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappedalitbang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	315.100.000	
5.01.01.2.09.00	Pemeliharaan	Bappedalitban	Jumlah Peralatan dan Mesin		Pemeliharaan	Bappedalitban	Jumlah Peralatan dan Mesin		

KODE	RANCANGAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	Peralatan Mesin Lainnya	g	Lainnya yang dipelihara	99.430.000	Peralatan Mesin Lainnya	g	Lainnya yang dipelihara	99.430.000	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	327.142.330	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	327.142.330	
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6.077.288	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6.077.288	
JUMLAH				22.978.953.463	JUMLAH			22.978.953.463	

Sumber : Bappedalitbang tanun 2024

BAPPEDALITBANG

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program-program pembangunan dalam Perubahan Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam rangka percepatan proses pembangunan. Adapun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Bappedalitbang Kabupaten Tabalong terdiri dari 4 program, 19 kegiatan dan 62 sub kegiatan sebagai berikut :

Program 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : 1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Sub Kegiatan:
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
c. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
d. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD

Kegiatan : 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:
a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

BAPPEDALITBANG

Kegiatan : 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:
a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan : 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Sub Kegiatan :
a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan : 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor

Kegiatan : 8. Pemelliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program 2 : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kegiatan : 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Sub Kegiatan:
a. Pelaksanaan Konsultasi Publik
b. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD / Lintas SKPD

BAPPEDALITBANG

c. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
d. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
e. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : 2. Analisis Data dan Informasi pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan:
a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
c. Penyusunan Profil Pembangunan Dearah Kabupaten/Kota

Kegiatan : 3. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan:
a. Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
b. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
c. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota

Kegiatan : 4. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan:
a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
b. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Program 3 : Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan : 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Sub Kegiatan :
a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

BAPPEDALITBANG

Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

c. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
d. Asistensi Penyusunan Dokumen Prencanaan Pembangunan Perankat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyususnan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
f. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Kegiatan : 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Manusia)

Sub Kegiatan :
a. Koordinasi Pelaksanaan Sintegritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Kegiatan : 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Sub Kegiatan :
a. Koordinasi Pelaksanaan Sinegritas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
b. Koordinasi Pelaksanaan Sinegritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Program 4 : Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Kegiatan : 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Sub Kegiatan:
a. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
b. Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan / Atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan

Kegiatan : 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Sub Kegiatan:
a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
b. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
c. Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja

BAPPEDALITBANG

Kegiatan : 3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Sub Kegiatan:
a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Kegiatan : 4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Sub Kegiatan:
a. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
b. Diseminasi Jenis ,Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
c. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
d. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Rencana kerja dan pendanaan pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. dibawah ini.

BAPPEDALITBANG

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Tabalong Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2022 (Sebelum Perubahan)							Rencana Tahun 2022 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting
				Renja 2022			APBD 2022			Perubahan Renja 2022				
			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5.01	**PERENCANAAN**													
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Bappedalitbang**	**Persentase indikator kinerja sasaran daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah**	**100%**	2.344.012.780	**PAD**	**100%**	**2.643.894.050**	**PAD**	**Persentase indikator kinerja sasaran daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah**	**100%**	**2.701.598.644**	**PAD**	
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Bappedalitbang**	**Persentase realisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun**	**100%**	**1.431.261.160**	**PAD**	**100%**	**1.689.138.400**	**PAD**	**Persentase realisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun**	**100%**	**1.709.875.722**	**PAD**	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bappedalitbang	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	18.792.000	PAD	1 Berita Acara	18.792.000	PAD	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	18.792.000	PAD	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	31.100.000	PAD	1 Berita Acara	31.100.000	PAD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	31.100.000	PAD	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappedalitbang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	278.673.626	PAD	1 Berita Acara	278.673.626	PAD	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	278.673.626	PAD	
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Bappedalitbang	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1500 usulan	282.723.000	PAD	1500 usulan	282.723.000	PAD	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1500 usulan	282.723.000	PAD	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	819.972.534	PAD	3 Dokumen	1.077.849.774	PAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	1.098.587.096	PAD	
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase SKPD yang mendapatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Data Informasi guna penyediaan data Perencanaan Pembangunan**	**100%**	**242.714.740**	**PAD**	**100%**	**284.718.740**	**PAD**	**Persentase SKPD yang mendapatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Data Informasi guna penyediaan data Perencanaan Pembangunan**	**100%**	**511.930.621**	**PAD**	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan	69.124.540	PAD	1 Masukan	69.124.540	PAD	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan	89.124.304	PAD	
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan	Bappedalitbang	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	40 Orang	120.165.000	PAD	40 Orang	162.169.000	PAD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data	40 Orang	330.659.481	PAD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2022 (Sebelum Perubahan)							Rencana Tahun 2022 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting
				Renja 2022			APBD 2022			Perubahan Renja 2022				
			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pembangunan Perangkat Daerah									dan Informasi				
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappedalitbang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 buku	53.425.200	PAD	1 buku	53.425.200	PAD	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 buku	92.146.836	PAD	
5.01.02.2.04	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**100%**	**193.230.000**	**PAD**	**100%**	**193.230.000**	**PAD**	**Persentase Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**100%**	**35.553.276**	**PAD**	
5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 dokumen	9.790.000	PAD	1 dokumen	9.790.000	PAD	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 dokumen	9.790.000	PAD	
5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 dokumen	168.540.000	PAD	1 dokumen	168.540.000	PAD	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 dokumen	9.863.276	PAD	
5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 dokumen	14.900.000	PAD	1 dokumen	14.900.000	PAD	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 dokumen	15.900.000	PAD	
5.01.02.2.03	**Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase Realisasi Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**100%**	**476.806.880**	**PAD**	**100%**	**476.806.910**	**PAD**	**Persentase Realisasi Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**100%**	**444.239.025**	**PAD**	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	253.963.416	PAD	2 Laporan	253.963.446	PAD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	13.289.686	PAD	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan	222.843.464	PAD	8 Laporan	222.843.464	PAD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan	430.949.339	PAD	
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Bappedalitbang**	**Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD terhadap program pada Dokumen Perencanaan daerah**	**100%**	**2.337.721.828**	**PAD**	**100%**	**2.000.737.258**	**PAD**	**Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD terhadap program pada Dokumen Perencanaan daerah**	**100%**	**3.104.399.858**	**PAD**	
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Bappedalitbang**	**Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap Program pada Dokumen Perencanaan Daerah**	**100%**	1.362.115.584	**PAD**	**100%**	**1.362.115.584**	**PAD**	**Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap Program pada**	**100%**	**2.185.878.184**	**PAD**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2022 (Sebelum Perubahan)							Rencana Tahun 2022 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting
				Renja 2022			APBD 2022			Perubahan Renja 2022				
			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Dokumen Perencanaan Daerah				
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	281.947.000	PAD	10 Dokumen	281.947.000	PAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	412.663.000	PAD	
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	2.000.000	PAD	9 Laporan	2.000.000	PAD	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	2.000.000	PAD	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	659.594.000	PAD	10 Dokumen	659.594.000	PAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	1.297.640.600	PAD	
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	2.000.000	PAD	10 Laporan	2.000.000	PAD	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	2.000.000	PAD	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	353.669.650	PAD	10 Laporan	353.669.650	PAD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	353.669.650	PAD	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	62.904.934	PAD	10 Laporan	62.904.934	PAD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	117.904.934	PAD	
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Bappedalitbang**	**Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perekonomian dan SDA terhadap Program pada Dokumen Perencanaan Daerah**	**100%**	206.000.000	**PAD**	**100%**	**206.000.000**	**PAD**	**Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perekonomian dan SDA terhadap Program pada Dokumen Perencanaan Daerah**	**100%**	**336.300.000**	**PAD**	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	4 Laporan	206.000.000	PAD	4 Laporan	206.000.000	PAD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	4 Laporan	336.300.000	PAD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2022 (Sebelum Perubahan)							Rencana Tahun 2022 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting
				Renja 2022			APBD 2022			Perubahan Renja 2022				
			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				n			Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Bappedalitbang**	**Persentase Keselarasan Program Pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap Program Pada dokumen Perencanaan Daerah**	**100%**	769.606.244	**PAD**	**100%**	**432.621.674**	**PAD**	**Persentase Keselarasan Program Pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap Program Pada dokumen Perencanaan Daerah**	**100%**	**582.221.674**	**PAD**	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan	195.302.000	PAD	5 Laporan	95.302.000	PAD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan	225.602.000	PAD	
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	12 Laporan	574.304.244	PAD	12 Laporan	337.319.674	PAD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	12 Laporan	356.619.674	PAD	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Bappedalitbang**	**Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti**	**20%**	**3.185.339.836**	**PAD**	**20%**	**3.185.339.836**	**PAD**	**Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti**	**20%**	**3.799.289.836**	**PAD**	
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Bappedalitbang**	**Persentase penelitian di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti**	**20%**	**385.339.836**	**PAD**	**20%**	**385.339.836**	**PAD**	**Persentase penelitian di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti**	**20%**	**385.339.836**	**PAD**	
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Bappedalitbang	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	60.000.000	PAD	1 Laporan	60.000.000	PAD	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	60.000.000	PAD	
5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan / Atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Bappedalitbang	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	325.339.836	PAD	2 Rekomendasi	325.339.836	PAD	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	325.339.836	PAD	
5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Bappedalitbang**	**Persentase Penelitian di bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti**	**20%**	**1.350.000.000**	**PAD**	**20%**	**1.350.000.000**	**PAD**	**Persentase Penelitian di bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti**	**20%**	**1.350.000.000**	**PAD**	
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	469.359.616	PAD	1 Dokumen	469.359.616	PAD	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	469.359.616	PAD	
5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	440.320.584	PAD	1 Dokumen	440.320.584	PAD	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	440.320.584	PAD	
5.05.02.2.02.	Penelitian dan Pengembangan	Bappedali	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian	1		PAD	1		PAD	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen		PAD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2022 (Sebelum Perubahan)							Rencana Tahun 2022 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2022			APBD 2022			Perubahan Renja 2022				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0009	Tenaga Kerja	tbang	dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	440.319.800		Dokumen	440.319.800		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja		440.319.800		
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan									Persentase Penelitian di bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	20%	325.000.000	PAD	
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan									Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	325.000.000	PAD	
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Bappedalitbang**	**Persentase inovasi daerah yang diimplementasikan**	**20%**	**1.400.000.000**	**PAD**	**20%**	**1.450.000.000**	**PAD**	**Persentase inovasi daerah yang diimplementasikan**	**20%**	1.738.950.000	**PAD**	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4 Dokumen	300.000.000	PAD	4 Dokumen	300.000.000	PAD	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4 Dokumen	508.250.000	PAD	
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	814.300.000	PAD	1 Laporan	864.300.000	PAD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	945.000.000	PAD	
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	150.000.000	PAD	1 Laporan	150.000.000	PAD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	150.000.000	PAD	
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	135.700.000	PAD	1 Laporan	135.700.000	PAD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	135.700.000	PAD	
NON URUSAN														
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Bappedalitbang**	**Nilai AKIP**	**A**	**10.519.568.857**	**PAD**	**A**	**11.394.640.359**	**PAD**	**Nilai AKIP**	**A**	13.373.665.125	**PAD**	
5.01.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja**	**100%**	**61.829.169**	**PAD**	**100%**	**61.829.169**	**PAD**	**Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja**	**100%**	**108.978.061**	**PAD**	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	39.101.977	PAD	2 dokumen	39.101.977	PAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	86.250.869	PAD	
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.035.256	PAD	1 Dokumen	2.035.256	PAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.035.256	PAD	
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	2.035.256	PAD	1 Dokum	2.035.256	PAD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan	1 Dokumen	2.035.256	PAD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2022 (Sebelum Perubahan)						Rencana Tahun 2022 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting
				Renja 2022			APBD 2022			Perubahan Renja 2022			
			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				en			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.110.940	PAD	1 Dokumen	2.110.940	PAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.110.940	PAD	
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.110.940	PAD	1 Dokumen	2.110.940	PAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.110.940	PAD	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.084.800	PAD	1 Laporan	2.084.800	PAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.084.800	PAD	
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	2 Laporan	12.350.000	PAD	2 Laporan	12.350.000	PAD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	2 Laporan	12.350.000	PAD	
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN**	**100%**	**6.925.177.384**	**PAD**	**100%**	**7.763.548.866**	**PAD**	**Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN**	**100%**	**8.237.950.268**	**PAD**	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappedalitbang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang/bulan	6.882.678.518	PAD	37 orang/bulan	**7.721.050.000**	PAD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang/bulan	8.125.451.000	PAD	
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	38 Dokumen	2.499.144	PAD	38 Dokumen	2.499.144	PAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	38 Dokumen	2.499.144	PAD	
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	24.999.899	PAD	2 Laporan	24.999.899	PAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	45.000.037	PAD	
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	14.999.823	PAD	12 Laporan	14.999.823	PAD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	65.000.087	PAD	
5.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase Administrasi barang Milik daerah pada Perangkat**	**100%**	**7.350.000**	**PAD**	**100%**	**7.350.000**	**PAD**	**Persentase Administrasi barang Milik daerah pada**	**100%**	**7.350.000**	**PAD**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2022 (Sebelum Perubahan)							Rencana Tahun 2022 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting
				Renja 2022			APBD 2022			Perubahan Renja 2022				
			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			daerah yang dilaksanakan							**Perangkat daerah yang dilaksanakan**				
5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik pada SKPD	2 Dokumen	**3.350.000**	PAD	2 Dokumen	**3.350.000**	PAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik pada SKPD	2 Dokumen	**3.350.000**	PAD	
5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	**2.000.000**	PAD	12 Laporan	**2.000.000**	PAD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	**2.000.000**	PAD	
5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	**2.000.000**	PAD	4 Laporan	**2.000.000**	PAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	**2.000.000**	PAD	
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase peserta bimbingan teknis atau sejenisnya yang mampu menjawab 80% pertanyaan dengan benar**	**100%**	**495.000.000**	**PAD**	**100%**	**495.000.000**	**PAD**	**Persentase peserta bimbingan teknis atau sejenisnya yang mampu menjawab 80% pertanyaan dengan benar**	**100%**	**1.079.903.000**	**PAD**	
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bappedalitbang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	70.000.000	PAD	1 Paket	70.000.000	PAD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	74.440.000	PAD	
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappedalitbang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	165 org	425.000.000	PAD	165 org	425.000.000	PAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	165 org	1.005.463.000	PAD	
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase aktivitas administrasi umum yang difasilitasi**	**100%**	**986.826.598**	**PAD**	**100%**	**986.826.598**	**PAD**	**Persentase aktivitas administrasi umum yang difasilitasi**	**100%**	**1.094.636.598**	**PAD**	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappedalitbang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	21.806.958	PAD	1 paket	21.806.958	PAD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	21.806.958	PAD	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappedalitbang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50 paket	161.920.000	PAD	50 paket	161.920.000	PAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50 paket	161.920.000	PAD	
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bappedalitbang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 Paket	42.000.000	PAD	8 Paket	42.000.000	PAD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 Paket	42.000.000	PAD	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	33.723.640	PAD	8 Dokumen	33.723.640	PAD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	33.723.640	PAD	
5.01.01.2.06.0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	12 Laporan	697.376.000	PAD	12 Laporan	697.376.000	PAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	12 Laporan	805.186.000	PAD	
5.01.01.2.06.0009	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappedalitbang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	7 Paket	30.000.000	PAD	7 Paket	30.000.000	PAD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	7 Paket	30.000.000	PAD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2022 (Sebelum Perubahan)							Rencana Tahun 2022 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2022			APBD 2022			Perubahan Renja 2022				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										disediakan				
5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	506.150.235	**PAD**	**100%**	**575.424.295**	**PAD**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**1.211.096.263**	**PAD**	
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	33 Unit	506.150.235	PAD	33 Unit	575.424.295	PAD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	33 Unit	1.211.096.263	PAD	
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi**	**100%**	**846.380.000**	**PAD**	**100%**	**813.805.960**	**PAD**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi**	**100%**	**886.001.317**	**PAD**	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	3 Laporan	5.010.000	PAD	3 Laporan	5.010.000	PAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	3 Laporan	5.010.000	PAD	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	124.800.000	PAD	4 Laporan	124.800.000	PAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	124.800.000	PAD	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan	716.570.000	PAD	2 Laporan	683.995.960	PAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan	756.191.317	PAD	
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bappedalitbang**	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**100%**	**690.855.471**	**PAD**	**100%**	**690.855.471**	**PAD**	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**100%**	**747.749.618**	**PAD**	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappedalitbang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	315.100.000	PAD	25 Unit	315.100.000	PAD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	315.100.000	PAD	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	69 Unit	93.330.000	PAD	69 Unit	93.330.000	PAD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	69 Unit	99.430.000	PAD	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	276.348.183	PAD	1 Unit	276.348.183	PAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	327.142.330	PAD	
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 Unit	6.077.288	PAD	10 Unit	6.077.288	PAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 Unit	6.077.288	PAD	
					18.336.643.301			19.224.611.503				22.978.953.463		

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Tabalong Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Bappedalitbang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong.
2. Penyusunan Perubahan Renja Bappedalitbang ini berpedoman pada Perubahan Renstra Bappedalitbang Tahun 2019-2024, sehingga difokuskan pada upaya pencapaian seluruh target pada Renstra.
3. Penyusunan Perubahan Renja Bappedalitbang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Bappedalitbang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bappedalitbang Kabupaten Tabalong Tahun 2024.
2. Dalam penyusunan RKPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong, begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya

BAPPEDALITBANG

Perubahan berdasarkan hasil asistensi dan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tabalong.

c Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Bappedalitbang Kabupaten Tabalong Tahun 2024 untuk setiap triwulannya.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappedalitbang Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bappedalitbang Kabupaten Tabalong, dengan melibatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dan *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Tabalong.

Akhir kata, Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, Juli 2024

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong,

Arianto, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680515 199003 1 008

BAPPEDALITBANG

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD dan Renstra SKPD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong Tahun 2024.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Tanjung, 20 September 2024

Kepala Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Kabupaten Tabalong,

Soleh, S.P., M.P.
NIP. 19700217 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan 26

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 27

2.3.1. Pemetaan Permasalahan 27

2.3.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan 27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 29

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 29

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 36

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 38

BAB V P E N U T U P 47

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan diperbaharui lagi dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong merupakan suatu lembaga yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03) dan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan dan peternakan.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong tahun 2024. Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong Tahun 2022-2024 dan Renstra 2025-2026.

Sebagaimana Visi Kabupaten Tabalong, yaitu : “Menuju Tabalong yang Lebih Agamis, Sejahtera dan Mandiri“. Makna dari pernyatan visi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- **Kabupaten Tabalong yang Lebih Agamais**; merupakan pendekatan membumi melalui pembiasaan dalam rangka mengamalkan nilai-nilai agama pada kalangan masyarakat dan aparatur pemerintah daerah untuk hidup lebih agamais dan modem dalam tatanan sosial kemasyarakatan serta produktif dan bermanfaat dalam bekerja. Nilai-nilai agama yang seharusnya mendapat perhatian tersebut seperti kejujuran, kedisiplinan, musyawarah, keikhlasan, kemandirian, profesionalisme, keadilan,

amanah, kebersamaan/ persatuan, aspiratif/akomodatif, tawakal dan lain-lain.

- **Kabupaten Tabalong yang Lebih Sejahtera**; merupakan pendekatan lahiriah untuk mencapai suatu keadaan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin dengan rasa aman dan nyaman untuk menjadi masyarakat yang lebih baik, makmur, sehat dan damai
- **Kabupaten Tabalong yang Lebih Mandiri**; merupakan pendekatan kelembagaan dan profesionlitas dalam rangka perkuatan sisten ekonomi, sosial dan budaya yang handal dan dinamis serta mampu bertindak sesuai keaaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara lebih bijak dengan memaksimalkan potensi ekonomi yang ada seperti sumber daya manusia yang dioptimalkan, pemanfaatan sumber daya alam local dan pemberdayaan Lembaga ekonomi yang ada melalui kerja keras dan inovatif.

Pencapaian visi pembangunan tersebut didukung oleh 3 (tiga) misi, yaitu :

1. **Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Lebih Agamais**

   Misi ini mengawal kebijakan pembangunan yang diarahkan agar tercapai masyarakat madani yang beretika dan bermoral melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, memperkuat kelembagaan keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan. Hal pokok yang menjadi pusat perhatian adalah Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga akan terwujud kualitas sumber daya manusia yang berahlak mulia (Tabalong Berkualitas)
2. **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

   Misi ini mengawal pembangunan yang diarahkan agar masyarakat berkemampuan lebih dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya melalui kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian akan terwujud kualitas hidup masyarakat yang peningkatannya dirasakan secara signifikan, serta terjadinya penurun angka kemiskinan yang nyata (Tabalong Sejahtera)

3. Mewujudkan Kemandirian Daerah

Misi ini mengawal pembangunan yang diarahkan pada tercapainya sistem yang handal dan dinamis yang mampu bertindak sesuai keadaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bijak melalui penguatan kelembagaan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan. Dengan kemandirian inilah akan terwujud kemajuan perekonomian daerah yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas (Tabalong Mandiri)

Merujuk pada misi tersebut, maka Dinas Perkebunan dan Peternakan memiliki fokus konsentrasi untuk menjalankan misi ke-2 yakni : meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Agenda Prioritas yang dilaksanakan sebagai penjabaran pelaksanaan misi dalam pencapaian visi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bupati Tabalong selama 5 (lima) tahun ke depan. Penetapan agenda prioritas mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan penyelesaian permasalahan lain. Prioritas daerah tersebut adalah :

1. Penyediaan SDM yang berkarakter dan produktif
2. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang merata dan berkualitas
3. Penguatan sektor perkebunan, peternakan, industri dan perdagangan

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong akan *concern* pada prioritas 1 dan 3, yaitu penyediaan SDM yang berkarakter dan produktif; dan penguatan sektor perkebunan, peternakan, indusri dan perdagangan

Adapun bagan alir tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar 1 : Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD

Penyusunan Renja dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program yang ditetapkan, serta memperhatikan keselarasan program pemerintah pusat melalui kementerian terkait dengan menghimpun usulan dari kabupaten/kota di dalam proses perencanaan pembangunan Pertanian. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanan program dan kegiatan yang telah direncanakan, telah dilalui tahapan dan mekanisme perencanaan tingkat daerah seperti Rapat Koordinasi Perkebunan dan Peternakan, Forum Perangkat Daerah dan tahapan Musrenbang guna merumuskan perencanaan tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 menggunakan landasan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunannya antara lain:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisten Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
6. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pertanian dan Gizi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong. Diperbaharui menjadi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69)
17. Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong Tahun 2022-2024 dan Renstra 2025-2026 .
18. Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Rancangan Perubahan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan pembangunan Pertanian yang selanjutnya dituangkan dalam RKA Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Dokumen Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong;
2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Pertanian untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;

   Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Pertanian

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Awal Rancangan Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun Anggaran 2024 ini mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan**

Berisi tentang uraian Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II **Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023**

Berisi uraian tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

BAB III **Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Berisi uraian tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi uraian tentang rencana kerja dan pendanaan yang akan dikelola oleh perangkat daerah

BAB V Penutup

Berisi tentang kesimpulan dari perencanaan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah tahun 2024

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan 2023

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) Kegiatan/ subkegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2023			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2024		Catatan
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP (Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**BB**	**75,773**	78,60	99,86	**BB**			
		Nilai IKM (Nilai indeks kepuasan masyarakat SKPD dan skor indeks layanan kesekretariatan)	**B**	**76,61**	Nilai indeks layanan kesekretariatan 79,09 Nilai indeks kepuasan masyarakat 80,84	110,19	**B**			
3.27.01.2.01	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran - Dokumen/Laporan perencanaan dan penganggaran - Dokumen proses**	**Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran : 10 Dokumen/tahun - Dokumen/Laporan perencanaan dan**	**Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran : 10 Dokumen/tahun - Dokumen/Laporan perencanaan dan**	10	100	**Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran : 10 Dokumen/tahun - Dokumen/Laporan perencanaan dan**			

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) Kegiatan/ subkegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2023			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2024		Catatan
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
		pelaporan kinerja	**penganggaran : 5 dokumen/tahun - Dokumen/Laporan pelaporan kinerja : 5 Dokumen/tahun**	**penganggaran : 5 dokumen/tahun - Dokumen/Laporan pelaporan kinerja : 5 Dokumen/tahun**			**penganggaran : 5 dokumen/tahun - Dokumen/Laporan pelaporan kinerja : 5 Dokumen/tahun**			
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dokumen Perencanaan Perencanaan dan Penganggaran - Dokumen/laporan pelaporan kinerja * Jumlah Evaluasi Inovasi (kematangan IID-indeks inovasi daerah) * Komponen Data Pelaporan Kinerja * Komponen Proses Perencanaan dan Penganggaran *Nilai AKIP *Nilai SPIP * Nilai Zona Integritas	-5 Dokumen - 5 Dokumen * 4 Inovasi * 4 Triwulan * 4 Komponen * 78,60 (BB) * Level 3 * Skor 40	-**5 Dokumen** - **5 Dokumen** * 3 Inovasi * 4 Triwulan * 4 Komponen * 78,60 (BB) * Level 2 * Skor 30	10	100,00	-5 Dokumen - 5 Dokumen * 4 Inovasi * 4 Triwulan * 4 Komponen * 78,60 (BB) * Level 3 * Skor 40			
		Sistem/upgrade informasi pendataan terintegrasi dan evaluasi kinerja (sistem)	1	1	0	0,00	1			

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) Kegiatan/ subkegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2023			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2024		Catatan
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
		Aplikasi pelayanan dan pendataan online (aplikasi)	3	1	0	0,00	3			
3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-Administrasi Keuangan Tepat Waktu (Bulan) - IKM - Laporan keuangan (LKPD, LO, PE, LRA, Nerac/tahun) - Laporan PAD**	**- 12 - B - Laporan keuangan (LKPD, LO, PE, LRA, Neraca) - 12**	**- 12 - B - Laporan keuangan (LKPD, LO, PE, LRA, Neraca) - 12**	- 12 - 80,84 -1 - 12	100,00	**- 12 - B - Laporan keuangan (LKPD, LO, PE, LRA, Neraca) - 12**			
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu (Orang/Bulan)	30 orang /bulan	30 orang /bulan	26	100,00	30 orang /bulan			
3.27.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-Penyusunan dokumen LKPD (Laporan Keuangan Perangkat Daerah) & PAD: -Jumlah laporan: LO, PE, LRA, Neraca, PAD, Hutang-Piutang -Jumlah analisis prognosis	- 12 bulan - 4 triwulan	- 12 bulan - 4 triwulan	- 12 - 4	100,00	- 12 bulan - 4 triwulan			
3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-IKM -Indeks Layanan Kesekretariatan**	**B B**	**B B**	-80,84 -79.09	110,19	**B B**			

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) Kegiatan/ subkegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2023			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2024		Catatan
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (5 Jenis/bulan)	5 jenis/12 bulan	**5**	**5**	**100**	5 jenis/12 bulan			
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (bulan)	12	12	12	100,00	12			
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (2 Jenis/bulan)	2 jenis/bulan	2 jenis koran/bulan	**2**	**100**	2 jenis/bulan			
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas, Jumlah Koordinasi (OK)	150	150	**150**	**100**	150			
3.27.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan BMD (unit)**	**10**			0,00	**3**			
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional/lapangan yang bertambah (unit)	**3**	**3**	**3**	**100**	**3**			
3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-IKM -Jumlah Bulan Layanan**	**-B -12**	**-B -12**	- 80,84 - 12	100,00	**-B -12**			

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) Kegiatan/ subkegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2023			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2024		Catatan
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Surat Menyurat (Bulan)	12	12	12	100,00	12			
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Rekening Terbayar (Bulan)	12	12	12	100,00	12			
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Layanan Umum Kantor yang disediakan (Bulan)	12	12	12	100,00	12			
3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**- IKM -Jumlah BMD Terpelihara (jenis)**	**-B -27**	**-B -27**	- 80,84 - 27	100,00	**-B -27**			
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional: -R4 (unit) -R2 (unit)	- 7 - 20	- 7 - 20	- 7 - 20	- 100 - 100	- 7 - 20			
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Jenis)	4	4	4	**100**	4			
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-Jumlah kelahiran ternak sapi melalui IB (ekor)**	469	**458**	**724**	158,7	**458 ekor**			
		-Produktivitas karet; Sheet (ton/Ha)	1,1	1,05	1,04	**99,04**	**1,05 ton/ha**			
		-Produktivitas Lada; Biji kering (kg/Ha)	215	215	**633**	294,41	**215 kg/ha**			

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) Kegiatan/ subkegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2023			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2024		Catatan
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
		-Produksi kopi; Biji kering (kg/ha)	466	465	**144,28**	**31,02**	**465 ton**			
3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan kabupaten/kota**	**Peningkatan Produksi Tanaman :**								
		- Karet (ton)	**61500**	**61000**	55631	91,19	**61000 ton**			
		- BOKAR bersih (ton)	**1500**	**1250**	**904**	**72,32**	**1250 ton**			
		- Lada (ton)	**10,6**	**10,6**	23,6	222,64	**10,6 ton**			
		- Hijauan pakan ternak (ha)	**5**	**5**	**5**	100	**5 ha**			
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah:								
		-Produksi Karet(ton)	61500	**61000**	55631	91,19	**61.000 ton**			
		-Produksi BOKAR Bersih (ton)	1500	**1250**	**904**	**72,32**	**1250 ton**			
		-Produksi Lada (ton)	10,6	10,6	23,6	**222,64**	**10,6 ton**			
		-Penambahan UPPB produsen BOKAR BERSIH (unit)	15	**2**	**6**	**100**	**6 UPPB**			
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen							
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Luas Lahan yang dibudidayakan untuk tanaman:								
		- Karet (Ha)	280	**170**	**170**	100	**170 ha**			

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) Kegiatan/ subkegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2023			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2024		Catatan
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
		- Hijauan Pakan ternak (Ha)	5	5	**5**	100	**5 ha**			
		- Kopi (Ha)	20	**10**	**20**	200,00	**10 ha**			
		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen							
3.27.02.2.06	**Penyediaan Behin/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Jumlah ternak Komoditi Strategis yang dikembangkan (ekor):**	**13000**	**10103**	**10606**	144,44	**10.103 ekor**			
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak Komoditi Strategis yang dikembangkan (ekor):	10350	**10103**	**10606**	161,25				
		-Jumlah kambing yang dikembangkan (ekor)	200	**45**	**198**	**220**	**45 ekor**			
		-Jumlah sapi yang dikembangkan (ekor)	150	**58**	**406**	**350**	**58 ekor**			
		-Jumlah Unggas yang dikembangkan (ekor)	10000	**10000**	10002	162,50	**10.000 ekor**			
		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	10103 ekor							
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN**	**Persentase cakupan yang**	70 %	**68 %**	**50.23 %**	**73,86**	**68%**			

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) Kegiatan/ subkegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2023			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2024		Catatan
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
	PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**dapat dilayani oleh prasarana pertanian (%)**								
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Pembangunan prasarana pendukung pertanian:**	70	68	**50,23**	**73,86**	**68 %**			
		- Perkebunan (%)	35	29	74,84	**110**	**29%**			
		- Keswan, KMV & Peternakan (%)	20	27	**65,54**	**242,74**	**27%**			
		- Penanggulangan dan pengendalian (%)	15	12	**10,32**	**85.25**	**12%**			
3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Penyusunan Dokumen Masterplan/Action Plan (dokumen)	4	1	1	100,00	**3 dokumen**			
		Pembangunan dan pengembangan Kawasan Percontohan Perkebunan & peternakan (kawasan)	1	0	0	0,00	**0 kawasan**			
		Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1 Dokumen Action Plan				**3 dokumen**			

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) Kegiatan/ subkegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2023			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2024		Catatan
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
3.27.03.2.02	***Pembangunan Prasarana Pertanian***	***Pembangunan prasarana pendukung pertanian:***	***70***	***68***	***50,23***	***73,86***				
		- Perkebunan (%)	***35***	29	74,84	**110**	***29%***			
		- Keswan, KMV & Peternakan (%)	***20***	27	**65,54**	**242,74**	***27%***			
		- Penanggulangan dan pengendalian (%)	***15***	12	**10,32**	**85.25**	***12%***			
	3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah:								
		- pembangunan prasarana pendukung kegiatan RPH/TPH/RPU/TPU:		**1**	**1**	**100**	**1 pembangunan**			
		- rehabilitasi prasarana pendukung kegiatan RPH/TPH/RPU/TPU:		**1**	**1**	**100**	**1 rehabilitasi**			
		- pemeliharaan prasarana pendukung kegiatan RPH/TPH/RPU/TPU:		**1**	**1**	**100**	**1 pemeliharaan**			

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) Kegiatan/ subkegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2023			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2024		Catatan
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pendukung kegiatan:	3	**2**	**2**	**100**	3 Paket (pagar pasar hewan Jaro, Puskeswan, Kandang kambing komunal) 1 Paket (Gudang sarana pengendalian) 2 Paket (Gudang UPPB, jalan produksi)			
		- Perkebunan (%)	***35***	29	74,84	**110**				
		- Keswan, KMV & Peternakan (%)	***20***	27	**65,54**	**242,74**				
		- Penanggulangan dan pengendalian (%)	***15***	12	**10,32**	**85.25**				
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	**3 Unit**							
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Angka Mortalitas Hewan Strategis (%)**	**≤ 3**	**≤ 3**	≤ 3	100,00	**≤3%**			
		Persentase Penyediaan Daging ASUH (%)	**75**	**75**	**74**	**98,66**	**70%**			

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) Kegiatan/ subkegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2023			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2024		Catatan
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
3.27.04.2.01	***Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Cakupan Vaksinasi terhadap luas area pengendalian dan populasi untuk menekan Penyakit Zoonosis (%)***	***90***	***85***	***92,26***	***84,25***	***≤3% 85%***			
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Penyediaan bahan obat-obatan:								
		- Pelayanan aktif service (Ternak Besar) (ekor)	2000	**2000**	**2425**	126,44	2.000 Ekor			
		- Unggas (ekor)	30000	30000	**45464**	**151,54**	30.000 Ekor			
		- Vaksin Penyakit Mulut dan Kuku		2300	2300					
		- Vaksin Jembrana (ekor)	1000	1000	**1500**	**150**	1.000 Ekor			
		- Vaksin Rabies (dosis)	2000	2000	**3400**	**170**	2.000 dosis			
		- Vaksin ND/flu burung (dosis)	35000	37000	**37000**	**100**	37.000 dosis			
3.27.04.2.03	***Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase angka mortalitas hewan strategis (%)***	***≤ 3***	***≤ 3***			***≤ 3***			
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan jasa medik/paramedik veteriner untuk melaksanakan:								

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) Kegiatan/ subkegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2023			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2024		Catatan
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
		- Aktif servis (hewan ruminansia) (ekor)	2000	2000	**2425**	**121,25**	2.000 Ekor			
		- Unggas (ekor)	30000	30000	**45464**	**151,54**	30.000 Ekor			
		- Vaksinasi jembrana (ekor	1000	1000	**1500**	**150**	1.000 Ekor			
		- Vaksinasi rabies (dosis)	2000	2000	**3400**	**170**	2.000 dosis			
		- Vaksinasi ND/Flu Burung (dosis)	38000	36000	**37000**	**100**	37.000 dosis			
		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Laporan							
3.27.04.2.04	***Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner***	***Persentase Penyediaan Daging ASUH (%)***	***75***	***70***	***98,6***	***140,86***	***70%***			
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1. Jumlah Penyediaan jasa Medik dan Paramedik Veteriner :								
		- Pelayanan Hewan Ruminansia/Ternak Besar aktif service (ekor)	2000	3150	3983	126,44				
		- Pelayanan ternak Unggas (ekor)	30000	30000	**66759**	**222,53**				
		- Vaksinasi Jembrana (ekor)	1000	2000	**1359**	**67,95**				

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) Kegiatan/ subkegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2023			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2024		Catatan
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
		- Vaksinasi Rabies (dosis)	2000	2000	**2533**	**126,65**				
		- Vaksinasi Flu Burung (dosis)	38000	35000	**38809**	**110,88**				
		2. Jumlah Hewan yang dipotong di RPH (ekor)	230	220	**358**	**162,72**				
		Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	1 Laporan							
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan Peredaran hewan dan Produk Hewan ASUH (%)	75	70	98,6	140,86				
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan							
3.27.04.2.05	***Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan***	***Persentase penyediaan daging ASUH (%)***	***70***	***70***			***70%***			
	3.27.04.2.05.01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Pengawasan pemotongan di RPH/TPH	210	**220**	**358**	**162,72**	**220**			
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Cakupan Pencegahan Bencana Pertanian (%)**	**40**	**35**	**68,65**	**196,14**	**37%**			
3.27.05.2.01	***Pengendalian dan Penanggulangan***	***Persentase Fasilitasi***	***18***	***18***	***10***	***55,55***	***16%***			

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) Kegiatan/ subkegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2023			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2024		Catatan
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
	Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	***Pengendalian OPT Perkebunan (%)***								
		Luasan pencegahan kebakaran lahan (ha)	**100**	**75**	**45**	**60**	**75 Ha**			
		Persentase Fasilitasi Penanggulangan bencana kesehatan hewan (%)	**22**	**22**	**9,6**	**43,63**	**21%**			
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pelatihan Pengendalian OPT Perkebunan (OK)	22 (300)	**22**	**22**	100	**15 kali**			
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1000 Ha							
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Sosialisasi dampak perubahan iklim	-	**0**	0	0,00				
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim								

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) Kegiatan/ subkegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2023			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2024		Catatan
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
		(DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)								
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terbentuknya kelompok tani peduli api (KTPA)	2	**3**	**3**	**100**	**3 KTPA**			
		Terlaksananya pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB)	3	**2**	**2**	**100**	**2 kali**			
		Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	200 Ha	75	**45**	**60**				
3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Ternak Sapi yang diasuransikan (ekor); target betina produktif	650	690	**292**	**42,31**	**650 ekor**			
		Sosialisasi asuransi ternak	9	**9**	**7**	**77,77**	**9 kali**			
		Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana	1 Laporan							

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) Kegiatan/ subkegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2023			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian		
								Target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2024		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
		Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan

No.	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka Nilai Target Standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Produksi BOKAR Bersih UPPB (ton)		500	750	1000	1250	1500	500	750	1000	1250	1500	
2.	Kontribusi pertanian terhadap PDRB (%)		11,02	11,05	11,06	11,08	11,15	11,05	10,71				
3.	Jumlah tenaga kerja sektor peternakan		13.000	13.500	14.000			13.000	13.500	14.000			
4.	Produktivitas Pertanian per hektar per tahun												
	- Karet (sheet)				1,05					1,08	1,04	1,10	
	- Lada (biji kering)				210					489	633	466	
5.	Persentase cakupan yang dapat dilayani oleh prasarana pertanian				66					84,15			
6.	Persentase angka mortalitas hewan strategis				≤3					0,432	1.05	≤3	
7.	Persentase penyediaan daging ASUH				65	70	75			91,6	70	75	
8.	Persentase cakupan pencegahan bencana pertanian				35	37	40			37,9	37	40	
9.	Jumlah UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR yang difasilitasi				10					8		56	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan

No.	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka Nilai Target Standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
1.	Produksi BOKAR Bersih UPPB (ton)		500	750	1000	1250	1500	500	750	1000	1250	
2.	Kontribusi pertanian terhadap PDRB (%)		11,02	11,05	11,06	11,08	11,15	11,05	10,71			
3.	Jumlah tenaga kerja sektor peternakan		13.000	13.500	14.000			13.000	13.500	14.000		
4.	Produktivitas Pertanian per hektar per tahun											
	- Karet (sheet)				1,05					1,08		
	- Lada (biji kering)				210					489		
5.	Persentase cakupan yang dapat dilayani oleh prasarana pertanian				66					84,15		
6.	Persentase angka mortalitas hewan strategis				≤3					0,432		
7.	Persentase penyediaan daging ASUH				65	70	75			91,6		
8.	Persentase cakupan pencegahan bencana pertanian				35	37	40			37,9		
9.	Jumlah UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR yang difasilitasi				10					8		

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan pada gambaran umum kondisi daerah pada bab sebelumnya dan sesuai Pasal 258 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan; pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha; akses dan kualitas pelayanan publik; dan daya saing daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap kerberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Tabalong.

Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Rendahnya produktivitas Getah Karet, produksi ternak sapi, kambing dan unggas, produksi dan produktivitas produk perkebunan, respon petani terhadap pengetahuan, inovasi dan teknologi, Sangat disadari lemahnya kemampuan pekebun dan peternak dikarenakan rendahnya sumber daya manusia pekebun dan peternak. Sehingga upaya yang diambil salah satunya adalah dengan meningkatkan kelas kelompok. Dengan meningkatnya kelas kelompok diharapkan permasalahan sumberdaya manusia dapat diselesaikan seperti harapan. Satu hal yang perlu diperhatikan dan tidak kalah pentingnya yaitu besarnya dukungan anggaran sehingga segala kegiatan yang dibutuhkan untuk menunjang peningkatan sumber daya dapat terakomodir. Sampai saat ini anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah daerah pada sektor perkebunan dan peternakan tidak lebih dari 2 %, setidaknya bila ingin memiliki perkebunan dan peternakan yang tangguh minimal anggaran yang dibutuhkan 5 % dari total anggaran APBD kabupaten tabalong. Saat ini upaya yang dilakukan adalah pendekatan dengan kegiatan kementerian pertanian melalui APBN berupa sarana, prasarana perkebunan,

pengendalian dan penanggulangan bencana pada penyakit hewan dan Kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

Berbagai permasalahan pembangunan Perkebunan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan Perkebunan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan Pertanian, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah :

1. Perlunya peningkatan produksi dan produktivitas peternakan dan perkebunan dalam rangka peningkatan ekonomi daera.h
2. Perlunya pembangunan/peningkatan/rehabilitasi infrastruktur perkebunan dan Peternakan
3. Perlunya peningkatan kapasitas SDM pekebun/peternak dan permodalan
4. Dukungan pemasaran hasil usaha pekebun/peternak dari stake holder untuk jaminan pasar yang lebih menjanjikan.
5. Perlunya peningkatan mutu hasil perkebunan dan peternakan.

   Perlunya pengolahan hasil peternakan sesuai kebutuhan pasar.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong marupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Bupati / Wakil Bupati, misi Gubernur / Wakil Gubernur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan dan Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan .

Untuk mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan Pembangunan pertanian jangka menengah yang akan diwujudkan selama periode tahun 2020- 2024 adalah **Pertanian Maju, Mandiri dan Modern Untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**, dengan makna sebagai berikut : (1) Pertanian harus berpikir maju sehingga seluruh jajaran pertanian harus lebih maju baik dari Pusat hingga desa, harus lebih bergerak, lebih bersemangat, dan lebih mempunyai kemampuan; (2) Pertanian harus mandiri tidak selalu bergantung pada impor; dan (3) Pertanian harus lebih modern dengan menggunakan berbagai inovasi teknologi sehingga mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing.

Sebagai penjabaran misi Kementrian Pertanian dalam mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Prasarana Kementrian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut

bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Kementrian Pertanian dalam periode Tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri.
2. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional.
3. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis nasional .
4. Termanfaatkannya Inovasi dan Tekhnologi Pertanian.
5. Tersedianya Prasarana dan Sarana yang sesuai Kebutuhan.
6. Terkendalinya Penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan.
7. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional.
8. Terselenggaranya Birokrasi Kementrian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima.
9. Terkelolanya anggaran Kementrian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Selama lima tahun ke depan akan dikembangkan komoditas strategis yang dapat memperkuat katahanan pangan dan mengakselerasi ekspor pertanian. Hasil telaahan terhadap kebijakan dan target Kementerian Pertanian disajikan pada Tabel 3.1.1.

Tabel 3.1.1 Telaahan Kebijakan dan Target RPJMN Kementerian Pertanian

Target	Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1. peningkatan produksi komoditas utama 7% per tahun 2. Penurunan losses dari 12% menjadi 5% 3. Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (GraTIEks) atau 300%; 4. Pemanfaatan KUR pertanian Rp. 50T per tahun; 5. Tumbuhnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 7.879 unit pada tahun 2024 6. Tumbuhnya petani milenial berjiwa entrepreneur 500.000 pemuda per tahun 7. Penurunan daerah rentan rawan pangan dari 18% menjadi 10% pada tahun 2024 8. Penurunan prevalensi stunting menjadi 14% di tahun 2024	Tugas PD : Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan Fungsi PD : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan dan peternakan ; 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penataan dan peningkatan Prasarana dan Sarana; 3. Koordinasi pelaksanaan kebjakan peningkatan produksi perkebunan; 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan produksi dan	Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	• Belum optimalnya berkembangnya usaha perbibitan di masyarakat • Masih banyak pekebun yang tidak menggunakan benih unggul • Adanya gangguan OPT • Harga pupuk yang tinggi • Fasilitasi sarana dan prasarana perkebunan belum tepat guna dan tepat sasaran • Kurangnya akses permodalan usaha dan informasi teknologi • Keterlibatan peran wanita dalam kelembagaan perkebunan masih kurang • Kurangnya tenaga HPT di lapangan • Kurangnya industri pengolahan hasil perkebunan • Globalisasi komunikasi dan informasi menuntut pelayanan prima • Kurang memadainya sarana dan prasarana • Kurang siapnya SDM yang memadai • Harga produk hasil perkebunan menguntungkan; • Panjangnya rantai pemasaran

Target	Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	kesehatan hewan; 5. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengolahan, Pemasaran dan Penyuluhan; 6. Pengawasan mutu dan peredaran benih serta produksi benih tanaman perkebunan dan peternakan 7. Pengendalian dan Penanggulangan hama dan penyakit perkebunan dan Peternakan serta penanggulangan bencana alam; 8. Pemberian izin usaha / rekomendasi teknis bidang perkebunan dan peternakan 9. Pembinaan, pengawasan, dan PengendaliaN Unit Pelaksana Teknis; dan 10.Pengelolaan Kegiatan Kesekretariatan	Belum optimalnya produksi dan produktivitas ternak	• Skala usaha peternakan tidak ekonomis • Belum berkembangnya usaha perbibitan di masyarakat • Masih terdapat pemotongan betina produktif • Adanya gangguan reproduksi pada ternak betina produktif • Harga pakan yang tinggi • Kualitas pakan yang rendah • Potensi pakan ternak yang belum dikelola/ termanfaatkan secara optimal • Fasilitasi sarana dan prasarana peternakan belum tepat guna dan tepat sasaran • Kurangnya akses permodalan usaha dan informasi teknologi • Keterlibatan peran wanita dalam kelembagaan peternakan masih kurang • Munculnya penyakit hewan menular strategis • Lalu lintas ternak yang belum sepenuhnya terkontrol • Kurangnya tenaga medik dan paramedik veteriner di lapangan • Kurangnya industri pengolahan hasil peternakan • Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan produk pangan asal hewan yang ASUH; • Globalisasi komunikasi dan informasi menuntut pelayanan prima • Kurang memadainya sarana dan prasarana • Kurang siapnya SDM yang memadai • Harga produk hasil ternak kurang menguntungkan; • Panjangnya rantai pemasaran

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 menetapkan bahwa visi pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan adalah "**KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA**" dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut :

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA	Makmur Sejahtera	Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat, Jasmani, Rohani, Aman dan Sentosa
	Berkelanjutan	Pembangunan dengan Memperhatikan Keseimbangan antara Sosial, Ekonomi dan Lingkungan
	Kalsel Gerbang Ibu Kota Negara	Kaltim telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara yang baru, Kalsel dari letaknya yang strategis menjadi Gerbang Ibu Kota Negara Baru

Dalam rangka pencapaian visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhatikan peluang yang di miliki, maka dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut:

1) **Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur**. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan Nilai-nilai Keagamaan, Pendidikan dan Sosial Budaya, Kesehatan, Ketrampilan, Kepemudaan dan Olahraga.
2) **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata.** Hal ini bertujuan untuk meningkatkan Ekonomi melalui Transformasi Struktur Ekonomi dari Komoditas Bahan Mentah Industri Turunannya (Hilirisasi)
3) **Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian.** Hal ini bertujuan untuk Membangun Sarana Prasarana Pembangunan Pelayanan Dasar dan Ekonomi berbasis Kewilayahan.
4) **Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik.** Hal ini bertujuan untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk

mendorong Investasi.

5) **Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana**. Hal ini untuk Pengendalian Banjir, Pencemaran, Perusakan Lingkungan dan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Tekhnologi

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan mendukung misi ke 2 (dua), yaitu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata.

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Keterangan
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata	Meningkatkan Produksi Sektor Perkebunan dan Peternakan	Terwujudnya peningkatan produksi sektor perkebunan dan peternakan	Angka Produksi Karet, Kelapa Sawit dan Daging
			Mewujudkan Masyarakat Pekebun dan Peternak yang Sejahtera	Terwujudnya peningkatan NTP Perkebunan Rakyat dan NTP Peternakan	NTP Pekebun dan NTP Peternak

Permasalahan yang terjadi, beserta faktor penghambat dan pendorong yang muncul dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan terkait telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dijabarkan pada Tabel 3.1.2.

Tabel 3.1.2. Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi / Misi	Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Visi : KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA	Tugas PD : Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pertanian sub urusan perkebunan	Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	• Belum optimalnya berkembangnya usaha perbibitan di masyarakat • Masih banyak pekebun yang tidak menggunakan benih unggul • Adanya gangguan OPT • Harga pupuk yang tinggi • Fasilitasi sarana dan prasarana perkebunan

Visi / Misi	Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Misi ke 2 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata	dan peternakan Fungsi PD : a. Perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan dan peternakan; b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penataan dan peningkatan Prasarana dan Sarana; c. Koordinasi pelaksanaan kebjakan peningkatan produksi perkebunan; d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan produksi dan kesehatan hewan; e. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengolahan, Pemasaran dan Penyuluhan; f. Pengawasan mutu dan peredaran benih		belum tepat guna dan tepat sasaran • Kurangnya akses permodalan usaha dan informasi teknologi • Keterlibatan peran wanita dalam kelembagaan perkebunan masih kurang • Kurangnya tenaga HPT di lapangan • Kurangnya industri pengolahan hasil perkebunan • Globalisasi komunikasi dan informasi menuntut pelayanan prima • Kurang memadainya sarana dan prasarana • Kurang siapnya SDM yang memadai • Harga produk hasil perkebunan menguntungkan; • Panjangnya rantai pemasaran

Visi / Misi	Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	serta produksi benih tanaman perkebunan dan peternakan g. Pengendalian dan Penanggulangan hama dan penyakit perkebunan dan Peternakan		

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tabel 3.1. Prioritas dan Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran SKPD (*outcome*)
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
1	Pemantapan pelaksanaan GEMAS MEKAR	Pengembangan Agribisnis Terpadu	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB	Meningkatnya potensi kapasitas produksi dan produktivitas perkebunan dan peternakan	Produksi BOKAR bersih UPPB (ton)

Tabel. 3.2. Tujuan Dinas Perkebunan dan Peternakan

No.	Tujuan SKPD	Indikator Tujuan SKPD	Target Kinerja SKPD Tahun 2023
1	***2***	***3***	***4***
1	Memajukan perekonomian daerah yang didukung oleh pengembangan sumberdaya alam dan infrastruktur yang berkelanjutan	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB	11,08

Tabel 3.3. Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan

No.	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran SKPD	Target Sasaran SKPD Tahun 2023
1	***2***	***3***	***4***
1	Meningkatnya potensi kapasitas produksi dan produktivitas perkebunan dan peternakan	Jumlah kelahiran ternak sapi via IB	458 ekor
		Produktivitas karet dalam sheet	1,07 ton/ha
		Produktivitas lada dalam biji kering	215 kg/ha
		Produktivitas kopi dalam biji kering	465 ton
		Persentase cakupan yg dapat dilayani oleh prasarana Disbunnak	68 %
		Persentase angka mortalitas hewan strategis	≤ 3 %
		Persentase penyediaan daging ASUH	70 %
		Persentase cakupan pencegahan bencana	37 %

Tabel 3.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan dan Peternakan

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja 2023
1	***2***	***3***	***4***
1.	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB (11,08 %)	Nilai AKIP	BB
		Nilai IKM	B
		Jumlah kelahiran ternak sapi melalui IB	458 ekor
		Produktivitas Karet; Sheet (ton/ha)	1,07 ton/ha
		Produktivitas Lada; Biji Kering (kg/ha)	215 kg/ha
		Produksi Kopi; Biji kering (ton)	465 ton
		Presentase cakupan yang dapat dilayani oleh prasarana pertanian	68%
		Menekan angka mortalitas ternak komoditi strategis	≤ 3%
		Pengawasan peredaran daging ASUH	70%
		Presentase cakupan pencegahan bencana pertanian	37%

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Tabel 4.1. Sasaran, Program dan Sub Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan

No.	Sasaran SKPD	Nama Program/Kegiatan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan dan akuntabel	**3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
		3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		3.27.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		3.27.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		3.27.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		3.27.01.2.05 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		3.27.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3.27.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3.27.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

No.	Sasaran SKPD	Nama Program/Kegiatan
		3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		3.27.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		3.27.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		3.27.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		3.27.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
		3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		3.27.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2	Meningkatnya potensi, kapasitas produksi dan produktivitas perkebunan dan peternakan	**3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**
		3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
		3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
		3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
		3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
		3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
		3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian
		3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
		3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian

No.	Sasaran SKPD	Nama Program/Kegiatan
		3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan
4	Meningkatnya potensi, kapasitas produksi dan produktivitas peternakan	**3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**
		3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
		3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
		3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
		3.27.04.2.05.01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan
		3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
		3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
		3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
		3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
5	Meningkatnya potensi, kapasitas produksi dan produktivitas perkebunan dan peternakan	**3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**
		3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
		3.27.05.2.01.05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		3.27.05.2.01.03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

b. Tabel rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang disajikan sebagaimana tabel berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	- **Nilai AKIP** - **Nilai IKM**	**Tabalong**	**- BB (Baik)** **- B (Baik)**	**14.107.815.188**	**APBD**			**11.681.303.040**
3.27.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Penyusunan dokumen perencanaan***	***Tabalong***	***10 Dokumen***	***247.748.954***	***APBD***			***207.073.484***
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	Tabalong	10 Dokumen	247.748.954	APBD			207.073.484
3.27.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan BMD tepat waktu***	***Tabalong***	***12 Bulan***	***12.854.800***	***APBD***			***34.094.280***
3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Laporan Aset Tetap - Laporan Aset Lainnya	Tabalong	- 12 Bulan - 12 Bulan	12.854.800	APBD			34.094.280
3.27.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah pegawai yang meningkat kemampuan dan kompetensinya***	***Tabalong***	***10 orang***	***182.904.000***	***APBD***			***262.191.400***
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang meningkat kemampuan dan kompetensinya	Tabalong	10 orang	182.904.000	APBD			262.191.400
3.27.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Administrasi Keuangan Tepat Waktu***	***Tabalong***	***12 Bulan***	***7.229.289.000***	***APBD***			***6.722.001.513***
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Tabalong	30 orang/ bulan	7.229.289.000	APBD			***6.690.540.000***
3.27.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Penyusunan dokumen LKPD (Laporan Keuangan Perangkat Daerah) & PAD: - Jumlah laporan: LO, PE, LRA, Neraca, PAD, Piutang	Tabalong	- 12 bulan - 4 triwulan	28.601.375	APBD			31.461.513
3.27.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Indeks layanan kesekretariatan***	***Tabalong***	*B*	***924.453.907***	***APBD***			***1.160.154.568***

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tabalong	5 jenis	169.652.384	APBD			193.721.650
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tabalong	2 jenis	10.998.000	APBD			12.095.000
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan koordinasi	Tabalong	150 OK	595.849.659	APBD			508.988.638
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tabalong		30.994.800	APBD			34.094.280
3.27.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah BMD terpelihara***	***Tabalong***	***14 unit***	***3.102.483.664***	***APBD***			***758.789.155***
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional: - R2 - R4	Tabalong	- 7 unit - 7 unit	444.147.300	APBD			508.789.155
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Tabalong	4 jenis	2.658.336.364	APBD			250.000.000
3.27.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah pengadaan BMD***	***Tabalong***	***10 unit***	***1.014.116.016***	***APBD***			***482.861.320***
3.27.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap yang bertambah	Tabalong		1.044.381.393	APBD			482.861.320
3.27.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Indeks layanan kesekretariatan***	***Tabalong***	***B***	***1.334.698.095***	***APBD***			***1.459.360.000***
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan surat menyurat	Tabalong	12 Bulan	15.000.000	APBD			16.500.000
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan rekening terbayar	Tabalong	12 Bulan	138.000.000	APBD			132.000.000
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum kantor	Tabalong	12 Bulan	1.181.898.095	APBD			1.310.860.000
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**1) Produktivitas: - karet; sheet (ton/ha) - lada;biji kering (kg/ha) 2) Jumlah populasi sapi yang dikembangkan (ekor)**	**Tabalong**	**1) Produktivitas: - 1,1 ton/ha - 220 kg/ha 2) 4000 ekor**	**19.268.642.991**	**APBD**			**16.366.765.757**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3.27.02.2.01	***Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian***	***Jumlah: - Produksi karet (ton) : - Produksi BOKAR bersih (ton) : - Produksi Lada (ton) : - Penambahan UPPB produsen BOKAR BERSIH:***	***Tabalong***	***- 61.500 ton - 1250 ton - 10,6 ton - 2 UPPB***	***1.075.708.106***	***APBD***			***1.170.924.786***
3.27.02.2.01.01	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	*Jumlah: - Produksi karet (ton) : - Produksi BOKAR bersih (ton) : - Produksi Lada (ton) : - Penambahan UPPB produsen BOKAR BERSIH:*	*Tabalong*	*- 61.500 ton - 1250 ton - 10,6 ton - 2 UPPB*	*1.075.708.106*	*APBD*			*1.170.924.786*
3.27.02.2.02	***Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota***	***Peningkatan produksi tanaman : - Karet: - BOKAR bersih - Lada***	***Tabalong***	***- 60.000 ton - 1250 ton - 10,6 ton***	***4.769.270.892***	***APBD***			***4.467.436.244***
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Luas lahan yang dibudidayakan untuk tanaman: - Karet: - Hijauan pakan ternak:	Tabalong	- 200 ha - 5 ha	4.769.270.892	APBD			4.467.436.244
3.27.02.2.05	***Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah ternak komoditi strategis yang dikembangkan: - jumlah populasi sapi yang dikembangkan (ekor) :***	***Tabalong***	***3900 ekor***	***13.423.663.993***	***APBD***			***10.728.404.727***
3.27.02.2.05.09	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	- Jumlah ternak komoditi strategis: - Jumlah kambing yang dikembangkan (ekor) : - Jumlah unggas yang dikembangkan (ekor):	Tabalong	- 58 ekor - 30 ekor - 10.000 ekor	13.423.663.993	APBD			10.728.404.727
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase cakupan yang dapat dilayani oleh prasarana pertanian**	**Tabalong**	**70 %**	**16.621.912.109**	**APBD**			**15.034.891.766**
3.27.03.2.02	***Pembangunan Prasarana Pertanian***	***Pembangunan prasarana pendukung kegiatan: - perkebunan - kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan peternakan***	***Tabalong***	***- 29% - 27% - 12%***	***16.621.912.109***	***APBD***			***14.901.819.038***

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		- penanggulangan dan pengendalian							
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pendukung kegiatan: - perkebunan - kesehatan hewan, kmv dan peternakan - penanggulangan dan pengendalian	Tabalong	Pembangunan prasarana pendukung: - 1 paket - 1 paket - 0	16.502.023.528	APBD			14.901.819.038
3.27.03.2.01	***Pengembangan Prasarana Pertanian***	***Pembangunan dan pengembangan kawasan perkebunan dan peternakan:***	**Tabalong**	***1 action plan***	***319.888.581***	***APBD***			***133.072.728***
3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	- Penyusunan dokumen masterplan/action plan - Pembangunan dan pengembangan kawasan percontohan perkebunan dan peternakan	Tabalong	- 1 dokumen - 0	319.888.581	APBD			133.072.728
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	- **Persentase angka mortalitas hewan strategis** - **Persentase Penyediaan Daging ASUH**	**Tabalong**	**≤ 3 %** **75%**	**1.293.706.978**	**APBD**			**2.605.263.407**
3.27.04.2.04	***Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner***	***Persentase penyediaan daging ASUH***	***Tabalong***	***70%***	***461.520.324***	***APBD***			***584.107.575***
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan ASUH	Tabalong	70%	394.680.000	APBD			450.000.000
3.27.04.2.04.05	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Pengawasan pemotongan di RPH/TPH	Tabalong	210	66.640.324	APBD			134.107.575
3.27.04.2.03	***Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase angka mortalitas hewan strategis***	***Tabalong***	***≤ 3 %***	***198.655.996***	***APBD***			***621.155.832***

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan jasa medik/paramedik veteriner untuk melaksanakan: - Aktif servis (hewan ruminansia) - Unggas - Vaksin jembrana - Vaksin rabies - Vaksin ND/flu burung	Tabalong	- 2000 ekor - 30.000 ekor - 1.000 ekor - 2.000 dosis - 35.000 dosis	198.655.996	APBD			621.155.832
3.27.04.2.01	***Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase angka penyakit zoonosis***	***Tabalong***	***≤ 0 %***	***633.530.658***	***APBD***			**1.400.000.000**
3.27.04.2.01.08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan obat-obatan: - Ternak besar - Unggas - Vaksin jembrana - Vaksin rabies - Vaksin ND/flu burung	Tabalong	- 2000 ekor - 30.000 ekor - 1.000 ekor - 2.000 dosis - 35.000 dosis	633.530.658	APBD			1.400.000.000
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase cakupan pencegahan bencana pertanian**	**Tabalong**	**40%**	**1.164.014.637**	**APBD**			**1.919.550.935**
3.27.05.2.01	***Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota***	- ***Persentase fasilitasi pengendalian OPT perkebunan*** - ***Luasan pencegahan kebakaran lahan*** - ***Persentase fasilitasi penanggulangan bencana kesehatan hewan***	***Tabalong***	***- 18% (900 ha/6442,51)*** ***- 75 ha*** ***- 22% (650/ 3039)***	***1.164.014.637***	***APBD***			***1.919.550.935***
3.27.05.2.01.07	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	- Jumlah ternak sapi yang diasuransikan - Sosialisasi asuransi ternak	Tabalong	- 650 ekor - 9 kali	97.988.739	APBD			280.446.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	- Terlaksananya pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) - Terbentuknya kelompok tani peduli api (KTPA)	Tabalong	- 2 kali - 3 KTPA	151.015.571	APBD			252.957.800
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	- Pelatihan pengendalian OPT Perkebunan - Pelatihan petugas pengendali OPT Perkebunan - Pelatihan dan pembentukan Regu Pengendali OPT - Pengadaan alat dan bahan pengendali OPT perkebunan	Tabalong	- 22 kali (330 orang) - 2 kali (40 orang) - 4 regu - 2 paket	915.010.327	APBD			1.386.147.135
JUMLAH					**52.655.891.903**				**47.675.500.905**

BAB V. PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan perangkat daerah.

Pada tahun 2024 Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong akan melaksanakan 5 Program, 17 Kegiatan, 28 Sub Kegiatan. Dengan disusunnya dokumen Renja Perangkat Daerah ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Perkebunan dan Peternakan dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kabupaten Tabalong.

Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong untuk Tahun Anggaran 2024. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra 2019-2024.

Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras dan kerja bersama oleh sumber daya manusia Dinas Perkebunan dan Peternakan dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mewujudkan Tabalong Terdepan.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PERUBAHAN

RENCANA KERJA

Tahun 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran Tahun 2024 yang merupakan rencana kerja tahunan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong telah tersusun. Rencana Kerja (Renja) Perubahan anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Perubahan Anggaran Tahun 2024 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong memiliki fungsi yang fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil yang akan dilaksanakan pada satu tahun ke depan, mengacu pada RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 dan berdasarkan Permendagri no. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah merupakan perbaikan dari penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Kerja Kabupaten Tabalong. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sehingga acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024, yang dituangkan ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Demikian Renja Perubahan Anggaran Tahun 2024 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik pikiran maupun informasi dalam penyusunan renja perubahan tahun 2024 ini. Semoga renja perubahan anggaran ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target

yang ditetapkan dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi Pimpinan dan seluruh staf pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tahun mendatang.

Tanjung, Juli 2024
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong,

ABDUL HALIM, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19820420 200112 1 001

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SKPD 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong 10

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong 12

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 28

BAB IV PENUTUP 38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk menindaklanjuti visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD dan bersifat indikatif. Untuk menjabarkan kebijakan, program dan kegiatan yang ada dalam Renstra SKPD maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyusun rencana pembangunan tahunan SKPD yang disebut Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada Rancangan RKPD dan

RKP yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

1. Tahap perumusan rancangan Renja
    a. Pengolahan data dan informasi;
    b. Analisis gambaran pelayanan;
    c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
    d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
    e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
    f. Perumusan tujuan dan sasaran;
    g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
    h. Perumusan kegiatan prioritas;
    i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
    j. Penyempurnaan rancangan Renja;
    k. Pembahasan forum SKPD; dan
    l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja.
2. Tahap penyajian rancangan Renja

    Penyajian rancangan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dilakukan sesuai dengan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya karena secara substansial Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan implementasi dari dokumen-dokumen perencanaan jangka panjang (RPJP dan RPJPD) dan jangka menegah (RPJM dan RPJMD) Rancangan Renja ini menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD, selanjutnya akan dituangkan

dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dibahas antara Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Tabalong dan Badan Anggaran DPRD kemudian disepakati untuk menjadi acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan Rancangan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem InformasiPembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor

09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten TabalongNomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 29).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah sebagai Pedoman kerja bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk jangka waktu satu tahun, yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan serta disesuaikan antara Program SKPD, Program Daerah, Program Provinsi dan Program Nasional sehingga bisa menjadi tolak ukur Penilaian Kinerja agar pelaksanaan Program Kegiatan semakin efektif dan efesien serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan.

Tujuan Rencana Kerja tahun 2024 yaitu :

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan sehingga program/kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas dan mengacu kepada Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun ke lima yang merupakan tujuan akhir perencanaan pembangunan lima tahunan
2. Agar program/ kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab.
4. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerja.
5. Menyajikan data dan analisis evaluasi hasil pembangunan
6. Menyajikan telaah atas pokok-pokok pikiran DPRD
7. Melakukan identifikasi dan rumusan kegiatan lintas sektor yang dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan
8. Dapat mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, menganalisa/mengkaji secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan berorientasi ke masa depan, melaksanakan pelayanan secara profesional dengan fasilitas komunikasi dan partisipasi seluruh pelaku (*stakeholder),* serta antisipasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong tahun 2024 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan TW II

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN,OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN TABALONG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun Hasil Evaluasi dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapian Perubahan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong s/d Tahun 2024 (Triwulan II)

Kode					Nama Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKDP)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
												Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (s/d TW II)		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraaan Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7=(6/5)* 100	8	9	10=(9/4)* 100	11
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP		BB	BB					
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja		9 Dokumen	9 Dokumen					
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100	2 Dokumen			
2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasi Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasi					1 Dokumen			
2	19	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen			
2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen			

2	19	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1	Dokumen			
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1	Laporan			
2	19	01	2.01	07	Evaluasi KInerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1	Laporan			
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gajih dan Tunjangan yang dibayar		14 Bulan	14 Bulan						
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100	24	Orang/bulan			
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		7 Orang	7 Orang	100					
2	19	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					0	Unit			
2	19	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 Orang	5 Orang		10	Orang			
2	19	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					0	Orang			
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Kantor		12 Kegiatan	12 Kegiatan						
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	2 Paket	2 Paket	100	4	Paket			
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	6 Paket	6 Paket	100	3	Paket			
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	3 Paket	3 Paket	100	2	Paket			
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	3 Paket	3 Paket	100	2	Paket			

2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179 LD dan 115 DD	26 Laporan	26 Laporan	100	47	Laporan			
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1	Unit			
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah		12 Kegiatan	12 Kegiatan						
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12	Laporan			
2	19	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	0	Laporan			
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 orang	12 Laporan	12 Laporan	100	72	Laporan			
2	19	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		6 Unit	5 Unit						
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	5 Unit	4 Unit	80	5	Unit			
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					6	Unit			
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	0	Unit			
2	19	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	Unit			
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif		91%	91%			96%			

2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pembinaan Minat Bakat		108 Orang	108 Orang					
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	225 Orang	108 Orang	108 Orang	100	7 Orang			
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan					30 Orang			
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota		3 Kegiatan	3 Kegiatan					
2	19	02	2.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	65 Orang	60 Orang	60 Orang	100	60 Orang			
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	10 Organisasi	7 Organisasi	7 Organisasi	100	1 Dokumen			
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet Berprestasi		40 Orang	40 Orang		45 Orang			
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia dan termanfaatkan		12 Kegiatan	12 Kegiatan					
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	8 Unit	7 Unit	7 Unit	100	8 Unit			
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan					1 Dokumen			

					Kabupaten / Kota	dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota								
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan					120 Orang			
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang dibina		87 Orang	87 Orang					
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	120 Atlet	60 Atlet	60 Atlet	100				
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	7 Cabor	27 Orang	27 Orang	100				
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan					30 Orang			
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		4 Kegiatan	4 Kegiatan					
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Even dan 22 Klub	2 Even dan 22 Klub	2 Even dan 22 Klub	100	2 Organisasi			
2	19	03	2.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen			
2	19	03	2.04	04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	13 Medali	2 Organisasi	2 Organisasi	100	Organisasi			
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		1 Kegiatan	1 Kegiatan					
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	4 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen			
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentasi peningkatan kapasitas dan peran aktif kepramukaan		93%	93%		96%			
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya		1 Organisasi	1 Organisasi					
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	100	1 Organisasi			

3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata		953.000 orang	13.380.173 orang		989.000 orang			
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata serta Sarana dan Prasarana Pariwisata yang dikembangkan dan terpelihara		7 Kegiatan	6 Kegiatan					
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	6 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	100	4 Lokasi			
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6 Unit	3 Unit	2 Unit	67	5 Unit			
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten		2 Persen	2 Persen		3%			
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran / Promosi Pariwisata		3 Kegiatan	3 Kegiatan					
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	100	5 Laporan			
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	7 Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	6 Dokumen			

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif			87%	88%	91%	96%	100%	88 %	91%	96 %	100%	
2	Persentasi Peningkatan Kapasitas dan Peran Aktif Kepramukaan			-	88%	93%	96%	100%	88 %	93 %	93 %	100%	
3	Jumlah Atlet Berprestasi			30 orang	35 orang	40 orang	45 orang	50 orang	68 orang	45 orang	98		
4	Jumlah Kunjungan Wisata			850.000 orang	909.500 orang	953.000 orang	989.000 orang	1.020.000 orang	3.876.767 orang	3.137.656 orang	3.896.677 orang		
5	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten			-	1,5%	2%	3%	4%	1,80%	1,30%	1,37%		
6	Nilai AKIP			B	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong

Isu yang terkait dengan Kepemudaan, olahragadan pariwisata Kabupaten Tabalong memiliki Dimensi yang cukup luas diantaranya adalah :

1. Belum meratanya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga.
2. Belum optimalnya pembinaan olahraga.
3. Destinasi pariwisata tentang kawasan geografis yang berada dalam wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
4. Belum optimalnya penataan dan pemeliharaan obyek wisata unggulan.
5. Terbatasnya pemasaran pariwisata melalui promosi, pameran potensi wisata dan pameran budaya.
6. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan pariwisata dan budaya.
7. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap sapta pesona pemuda, olahraga dan pariwisata masih terbatas.
8. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia pelaku pemuda, olahraga dan pariwisata.
9. Belum tersedianya tenaga teknis pemuda, olahragadan pariwisata.

Hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi Pemerintah dalam hal ini Dinas Kepemudaan, Olahraga dan PariwisataKabupaten Tabalong untuk menjembatani kesenjangan antara harapan dengan kondisi faktual yang terjadi dimasyarakat.Peran DinasKepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong diharapkan dapat bersinergi/berkoordinasi dengan SKPD yang sama-sama menangani pembangunan kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan untuk lebih memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disertai dengan mengarahkan program dan kegiatan SKPD agar lebih berkonsentrasi kepada pemberdayaan kepemudaan, olahraga, dan kepariwisataan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka isu-isu strategis yang perlu

dijadikan landasan dalam proses perencanaan pembangunan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yaitu :

1. Belum meratanya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga.
2. Belum optimalnya pembinaan olahraga.
3. Belum tersedianya tenaga teknis Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata.
4. Destinasi pariwisata tentang kawasan geografis yang berada dalam wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
5. Belum optimalnya penataan dan pemeliharaan obyek wisata unggulan.
6. Terbatasnya pemasaran paiwisata melalui promosi, pameran potensi wisata dan pameran budaya.
7. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan pariwisata dan budaya.
8. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap sapta pesona Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata masih terbatas.
9. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia pelaku Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN TABALONG

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong maka Dinas Kepemudaan, Olahragadan Pariwisata Kabupaten Tabalong mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok tersebut maka Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh kepala daerah.
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangKepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Kebijakan Nasional

Dalam Rangka menghadapi berbagai tantangan pembangunan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta permasalahannya yang berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan serta Renstra Tahun 2019 - 2024 yang mendasarkan pada :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dilandasi keimanan dan ketaqwaan.
2. Mengembangkan agribisnis dan perdagangan.

3. Mewujudkan kepemerintahan yang baik.

Maka Ditetapkan 6 (enam) kebijakan prioritas yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
5. Program Penigkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
6. Program Pemasaran Pariwisata

Adapun kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya wawasan kebangsaan, cinta tanah air, nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan serta nilai-nilai kepahlawanan.
- Meningkatnya kapasitas pemuda/ pengkaderan pemuda dibidang keterampilan, kewirausahaan dan wawasan pengetahuan yang beriptek dan berimtaq.
- Meningkatnya prestasi olahraga.
- Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga.
- Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi pariwisata.
- Memperluas jaringan pemasaran kebudayaan dan pariwisata
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan.
- Adanya sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olah raga
- Adanya tenaga teknis yang memiliki sertifikasi
- Adanya prestasi yang dicapai ditingkat Propinsi maupun Nasional

3.1.2 Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005 – 2025. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor

17 Tahun 2009, dimana pada Bab II tentang kondisi dan prediksi kondisi umum daerah serta isu-isu strategis kondisi Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisatayakni sebagai berikut :

1. Belum meratanya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga.
2. Belum optimalnya pembinaan olahraga.
3. Belum optimalnya penataan dan pemeliharaan obyek wisata unggulan.
4. Terbatasnya pemasaran pariwisata melalui promosi, pameran potensi wisata.
5. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan pariwisata dan budaya.
6. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap sapta pesona Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata masih terbatas.
7. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia pelaku Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
8. Belum tersedianya tenaga teknis Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Strategi merupakan faktor terpenting dalam perencanaan Strategis dan merupakan rencana menyeluruh serta terpadu dari organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan dalam mencapai tujuannya.Strategi meliputi penetapan kebijakan, program dengan memperhatikan sumberdaya yang tersedia, serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Selanjutnya strategi ini diharapkan dapat memberikan arahan dan dorongan kegiatan operasional bagi setiap pelaksana kegiatan Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian akan timbul kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi, dalam rangka menuju visi yang telah ditetapkan.

Strategi (Kebijakan dan Program) Dinas Pemuda Olah Raga Provinsi Kalimantan Selatan serta Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan :

a. Melaksanakan kreativitas pemuda dan pembinaan olahraga melalui organisasi kepemudaan dan karang taruna
b. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan
c. Meningkatkan kapasitas dan kompetisi pemuda
d. Meningkatkan pembinaan dan prestasi olahraga
e. Meningkatkan pengembangan olahraga masyarakat dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga
f. Meningkatkan kemitraan dan organisasi olahraga
g. Melaksanakan promosi dan pemasaran pariwisata
h. Meningkatkan sarana dan prasaran pariwisata
i. Meningkatkan destinasi dan daya tarik pariwisata

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja - SKPD

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah didasarkan pada Renstra Dinas Kepemuaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong.

Tujuan Renja SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong adalah :

1. Meningkatkan Pembinaan Kepemudaan.
2. Meningkatkan Kapasitas Organisasi Kepramukaan
3. Meningkatkan Pembinaan Keolahragaan
4. Meningkatkan Pengelolaan Destinasi Kepariwisataan
5. Meningkatkan Pengelolaan Promosidan Pemasaran Kepariwisataan.

6. Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja.

Sasaran Renja SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong adalah :

1. Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan
2. Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Kabupaten
3. Meningkatnya Pembinaan dan Prestasi Olahraga
4. Meningkatnya Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata serta Sarana dan Prasarana Pariwisata
5. Meningkatnya Promosi dan Pemasaran Pariwisata
6. Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran SKPD
			1		1
			2		2
			3		3

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan SKPD dengan Sasaran SKPD dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong

No	Tujuan SKPD	Indikator Tujuan SKPD	Target Kinerja SKPD Tahun 2024
	Meningkatkan Pembinaan Kepemudaan	Tercapainya Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	100%
	Meningkatkan Kapasitas Organisasi Kepramukaan	Tercapainya Persentasi peningkatan kapasitas dan peran aktif	100%

	Kabupaten	kepramukaan	
	Meningkatkan Pembinaan dan Prestasi Olahraga	Tercapainya Jumlah atlet berprsetasi	50 Orang
	Meningkatkan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata serta Sarana dan Prasarana Pariwisata	Tercapainya peningkatan Jumlah kunjungan wisata	1.020.000 orang
	Meningkatkan Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Tercapainya Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten	4%
	Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong

No	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran SKPD	Target Sasaran SKPD Tahun 2024
1	Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	100%
2	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Kabupaten	Persentasi Peningkatan Kapasitas dan Peran Aktif Kepramukaan	100%
3	Meningkatnya Pembinaan dan Prestasi Olahraga	Jumlah Atlet Berprestasi	50 orang
4	Meningkatnya Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata serta Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.020.000 orang
5	Meningkatnya Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten	3%
6	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP	BB

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Kinerja 2024
1.	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	100
2.	Persentasi Peningkatan Kapasitas dan Peran Aktif Kepramukaan	Persen	100
3.	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	50
4.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1.020.000
5.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten	Persen	4
6.	Nilai AKIP	Nilai	BB

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Perumusan Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebagai sebagai berikut :

Tabel 4.1
Sasaran, Program dan Sub Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No	Sasaran SKPD	Nama Program / Kegiatan	
1	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		SubKegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		SubKegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		SubKegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		SubKegiatan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		SubKegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
		SubKegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		SubKegiatan	Evaluasi KInerja Perangkat Daerah
		Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		SubKegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		SubKegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		SubKegiatan	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
		SubKegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		SubKegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		SubKegiatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		SubKegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		SubKegiatan	Pengadaan Mebel
		Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		SubKegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		SubKegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

		SubKegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		SubKegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan	Program	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
		Kegiatan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
		SubKegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
		SubKegiatan	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
		SubKegiatan	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
		SubKegiatan	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
		Kegiatan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		SubKegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
		SubKegiatan	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya Pembinaan dan Prestasi Olahraga	Program	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
		Kegiatan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		SubKegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
		Kegiatan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		SubKegiatan	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
		SubKegiatan	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
		Kegiatan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
		SubKegiatan	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
		Kegiatan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
		SubKegiatan	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
		SubKegiatan	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait
		Kegiatan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
		SubKegiatan	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi

4	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Kabupaten	Program	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
		Kegiatan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
		SubKegiatan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
5	Meningkatnya Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata serta Sarana dan Prasarana Pariwisata	Program	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
		Kegiatan	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		SubKegiatan	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		SubKegiatan	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		SubKegiatan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
6	Meningkatnya Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Program	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
		Kegiatan	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		SubKegiatan	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
		SubKegiatan	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

B. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebagai sebagai berikut :

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	18	19
					DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA							19.046.593.838,00	22.711.974.730,00	26.322.736.730,00			18.959.008.684,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							16.944.100.554,00	20.493.431.726,00	22.485.179.800,00			16.804.951.709,00
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							16.944.100.554,00	20.493.431.726,00	22.485.179.800,00			16.804.951.709,00
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP				BB Nilai	BB Nilai	6.215.177.051,00	6.639.407.097,00	7.158.662.349,00			6.370.966.259,00
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	-			8 Dokumen	8 Dokumen	89.535.466,00	89.535.466,00	89.535.466,00			61.500.000,00
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	23.948.984,00	23.948.984,00	23.948.984,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.500.000,00
2	19	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.153.592,00	2.153.592,00	2.152.910,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.050.000,00
2	19	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.153.592,00	2.153.592,00	2.154.726,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.050.000,00
2	19	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.378.169,00	3.378.169,00	3.378.443,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.075.000,00
2	19	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD												

						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.378.169,00	3.378.169,00	3.378.854,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.075.000,00
2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	22.000.120,00	22.000.120,00	22.000.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.500.000,00
2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	32.522.840,00	32.522.840,00	32.522.840,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.250.000,00
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gajih dan Tunjangan yang dibayar	-			14 Bulan	14 Bulan	4.545.496.838,00	5.040.656.000,00	5.040.656.000,00			4.601.816.259,00
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	4.545.496.838,00	5.040.656.000,00	4.651.418.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4.601.816.259,00
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Terampil dan Disiplin	-			11 Orang	11 Orang	106.184.000,00	106.184.000,00	106.184.000,00			112.750.000,00
2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11 Orang	11 Orang	106.184.000,00	106.184.000,00	581.903.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		112.750.000,00
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			5 Kegiatan	5 Kegiatan	653.338.154,00	687.113.838,00	687.113.838,00			664.200.000,00
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	2.996.823,00	2.996.823,00	2.996.823,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.075.000,00
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	191.688.277,00	225.463.961,00	246.663.961,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		82.000.000,00
2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												

						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.826.255,00	34.826.255,00	39.619.440,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35.875.000,00
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	28.961.799,00	28.961.799,00	28.961.799,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.750.000,00
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	394.865.000,00	394.865.000,00	698.606.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		512.500.000,00
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	-			5 Item	5 Item	130.895.793,00	37.655.793,00	37.655.793,00			164.000.000,00
2	19	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	93.240.000,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		123.000.000,00
2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	37.655.793,00	37.655.793,00	37.655.793,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		41.000.000,00
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang yang terbayar	-			6 Item	6 Item	311.646.800,00	300.182.000,00	300.182.000,00			331.075.000,00
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13.325.000,00
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	302.646.800,00	291.182.000,00	394.220.656,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		317.750.000,00
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	-			7 Unit	7 Unit	378.080.000,00	378.080.000,00	378.080.000,00			435.625.000,00
2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												

						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	134.350.000,00	134.350.000,00	134.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		220.375.000,00
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	24.720.000,00	24.720.000,00	24.720.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.625.000,00
2	19	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	219.010.000,00	219.010.000,00	219.010.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		189.625.000,00
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif				100 %	100 %	891.431.956,00	897.613.082,00	982.363.082,00			554.970.875,00
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pembinaan Minat dan Bakat	-			225 Orang	225 Orang	559.997.519,00	566.173.845,00	566.173.845,00			215.250.000,00
2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor												
						Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				25 Orang	25 Orang	165.000.266,00	165.013.266,00	191.513.266,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		169.125.000,00
2	19	02	2.01	0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota												
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	349.977.701,00	356.141.027,00	401.141.027,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
2	19	02	2.01	0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi												
						Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				10 Orang	10 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.625.000,00

2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda												
						Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				20 Orang	20 Orang	20.019.552,00	20.019.552,00	20.019.552,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.500.000,00
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pembinaan Minat dan Bakat	-			225 Orang	225 Orang	331.434.437,00	331.439.237,00	331.439.237,00			339.720.875,00
2	19	02	2.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha												
						Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha				100 Orang	100 Orang	134.999.930,00	134.999.930,00	148.249.930,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		138.375.000,00
2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota												
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	1 Dokumen	196.434.507,00	196.439.307,00	196.439.307,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		201.345.875,00
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet berprestasi				50 Orang	50 Orang	9.132.491.547,00	11.751.411.547,00	13.139.154.369,00			9.156.325.000,00
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga	-			8 Buah	8 Buah	2.697.999.912,00	5.166.919.912,00	5.166.919.912,00			2.765.450.000,00
2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota												
						Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				8 Unit	12 Unit	2.697.999.912,00	5.166.919.912,00	5.824.296.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.765.450.000,00
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	-			-	1 Dokumen	864.495.148,00	1.014.495.148,00	1.014.495.148,00			886.625.000,00
2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota												

						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	249.995.898,00	399.995.898,00	976.496.818,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		256.250.000,00
2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan												
						Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				150 Orang	150 Orang	614.499.250,00	614.499.250,00	614.499.250,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		630.375.000,00
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Pembinaan Prestasi Olahraga	-			100 Persen	100 Persen	309.997.020,00	309.997.020,00	309.997.020,00			112.750.000,00
2	19	03	2.03	0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota												
						Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				50 Orang	50 Orang	109.997.420,00	109.997.420,00	213.216.420,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		112.750.000,00
2	19	03	2.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga												
						Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	199.999.600,00	199.999.600,00	199.999.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi dan Klub Olahraga yang dibina	-			3 dan 22 Organisasi dan Klub	3 dan 22 Organisasi dan Klub	5.109.999.537,00	5.109.999.537,00	5.109.999.537,00			5.237.750.000,00
2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan												
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				2 Organisasi	2 Organisasi	109.999.937,00	109.999.937,00	109.999.937,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		112.750.000,00
2	19	03	2.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait												
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	4.999.999.600,00	4.999.999.600,00	4.999.999.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.125.000.000,00
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Cabor yang dilaksanakan pada kegiatan tersebut	-			4 Cabor	4 Cabor	149.999.930,00	149.999.930,00	149.999.930,00			153.750.000,00
2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi												
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	1 Dokumen	149.999.930,00	149.999.930,00	200.645.844,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		153.750.000,00
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentasi peningkatan kapasitas dan peran aktif kepramukaan				100 Persen	100 Persen	705.000.000,00	1.205.000.000,00	1.205.000.000,00			722.689.575,00

2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya Pembinaan Organisasi Kepramukaan	-			1 Organisasi	1 Organisasi	705.000.000,00	1.205.000.000,00	1.205.000.000,00			722.689.575,00
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah												
						Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	705.000.000,00	1.205.000.000,00	1.205.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		722.689.575,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							2.102.493.284,00	2.218.543.004,00	3.837.556.930,00			2.154.056.975,00
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							2.102.493.284,00	2.218.543.004,00	3.837.556.930,00			2.154.056.975,00
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata				1.020.000 Orang	1.020.000 Orang	1.397.632.168,00	1.464.711.439,00	1.887.725.095,00			1.431.561.125,00
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang terkelola	-			6 Lokasi	5 Lokasi	1.397.632.168,00	1.464.711.439,00	1.464.711.439,00			1.431.561.125,00
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												
						Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				4 Lokasi	4 Lokasi	191.010.526,00	191.010.526,00	372.839.126,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		194.750.000,00
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				7 Unit	7 Unit	951.621.687,00	1.018.700.958,00	1.228.888.014,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		975.436.125,00
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				5 Laporan	5 Laporan	254.999.955,00	254.999.955,00	285.997.955,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		261.375.000,00
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten				4 Persen	4 Persen	704.861.116,00	753.831.565,00	1.949.831.835,00			722.495.850,00
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Kegiatan Promosi yang dilaksanakan	-			14 Kegiatan	14 Kegiatan	704.861.116,00	753.831.565,00	753.831.565,00			722.495.850,00

					Kabupaten/Kota											
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri											
						Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				4 Dokumen	4 Dokumen	404.999.785,00	404.999.785,00	458.147.785,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		415.125.000,00
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota											
						Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Kegiatan	4 Kegiatan	299.861.331,00	348.831.780,00	1.491.684.050,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		307.370.850,00
											J U M L A H	**19.046.593.838,00**	**22.711.974.730,00**	**26.322.736.730,00**			**18.959.008.684,00**

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan segala keterbatasan yang ada dapat berjalan dengan baik secara bertahap dan berkesinambungan dan selalu diupayakan untuk dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sarana Dan Prasarana penunjang untuk kelancaran berlangsungnya kegiatan pembangunan wilayah ditinjau dari berbagai aspek baik aspek sumber daya manusia, sarana perkantoran, sarana transportasi, sarana komunikasi dan informasi serta sarana pendukung lainnya masih sangat diperlukan dan perlu untuk diperhatikan serta ditingkatkan guna memperlancar tugas – tugas kedinasan.

Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, diharapkan selalu tersedia dan selalu ditingkatkan dan bertambah dari tahun ke tahun guna mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat sebagai perwujudan " GOOD GOVERNANCE " serta sesuai dengan RPJMD 2019 - 2024 Pembangunan Kabupaten Tabalong.

Kebijakan-Kebijakan yang tertuang dan rencana kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata ini kiranya dapat memberi arah, acuan dan pedoman bagi kegiatan-kegiatan yang akan datang, sehingga Visi, Misi dan Tujuan yang diharapkan dapat dicapai.

Tanjung, Juli 2024

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong,

ABDUL HALIM, S.STP
Pembina Tk.I
NIP. 19820420 200112 1 001

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmatnya, kami dapat menyelesaikan rencana kerja perubahan (RENJA P) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong Tahun 202.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA P) ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 dan capaian kinerja untuk Tahun 2023. Capaian Renstra , analisis kinerja pelayanan DPMPTSP, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong .

Kami menyadari bahwa dokumen ini jauh dari sempurna , oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menuju kearah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 ini , dapat mejadi acuan dalam pencapaian kinerja dalam penyelenggaran tugas pokok dan fungsi serta dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

Tanjung, Agustus 2024

Kepala Dinas Penanaman Mddal dan PTSP Kabupaten Tabalong,

H. SURYANADIE,S.Sos M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19641215 198602 1 006

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana tahapan dan tatacara penyusun Renja Perubahan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoenesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.Selanjutnya Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini memuat program dan kegiatan tahun 2024, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2024

.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong Tahun 2024 mengacu pada rancangan awal RKPD,Renstra,hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program dan kegiatan serta singkronisasi indikatif pagu anggaran perkegiatan. Dengan demikian Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong dasarnya merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Tabalong Tahun 2019 -2024 dan menjadi salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan. Dan tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai bila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui : perbaikan koordinasi antara Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif dibidang ketenaga kerjaan dan keamanan berusaha.

Rendahnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat mendorong Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk segera memperbaikii kualitas pelayanannya, apalagi yang berhubungan dengan pelayanan perizinan yang dicitrakan sebagai pelayanan yang berbelit-belit, sulit diakses, meSmiliki prosedur yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan. Akibat dari itu semua membuat pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah menjadi terhambat yang juga otomatis berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. Atas dasar itulah, maka Pemerintah Kabupaten Tabalong segera menerapkan pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 81 Tahun 1993 dengan membentuk kelembagaan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah dengan maksud untuk memberikan kemudahan pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan sistem pelayanan perizinan terpadu yang dilakukan secara terkoordinir bersama instansi teknis yang berkompeten didalam proses penerbitan perizinan sehingga

masyarakat dapat menerima pelayanan yang lebih baik, cepat, mudah, transparan, tepat waktu.

Sejalan dengan perkembangan waktu dan kebutuhan organisasi serta pelayanan bagi masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong melaksanakan evaluasi dan restrukturisasi organisasi dimana yang menjadi prinsip dalam penyusunan organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan, maka pada Pemerintah Kabupaten Tabalong memandang perlu untuk untuk melakukan perubahan susunan organisasi pelaksana pelayananan perizinan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi sehingga mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02) ditetapkan sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong. Dengan status susunan organisasi kelembagaan yang baru ini maka penanaman modal menjadi salah satu tugas pokok, dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong sehingga mulai saat ini pelaksanaan urusan ini melekat pada DPMPTSP Kabupaten Tabalong yang salah satu tugas prioritasnya adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi,integrasi,sinkronisasi,simplifikasi , keamanan dan kepastian.

Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 , dinyatakan bahwa tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perlayanan Terpadu Kabupaten Tabalong adalah antara lain merumuskan kebijakan teknis dibidang pelayanan terpadu, baik untuk masyarakat maupun aparatur/pegawai yang berbasis pada potensi daerah. Masing-masing daerah didorong tidak saja untuk lebih mampu

mengambil peran dan prakarsa dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga untuk lebih jeli mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat setempat. Dengan kemampuan itu maka Pemerintah Daerah benar-benar dapat menjadi pelaku utama pembangunan.

Dengan adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong diharapkan dapat mempercepat upaya mensejahterakan rakyat Tabalong, baik masyarakat maupun aparatur pemerintah melalui perluasan kesempatan dibidang usaha yang sifatnya dalam kegiatan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, yang dilaksanakan mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dibutuhkan guna meningkatkan Profesionalisme pegawai dan masyarakat untuk mampu bekerja sebagai wira usaha yang mandiri.

Untuk mencapai harapan tersebut diperlukan suatu pelayanan yang lebih baik, cepat, mudah, transparan, tepat waktu yaitu melalui Rencana Stategis (RENSTRA) guna memberi arah kebijakan dalam jangka waktu 1 hingga 5 tahun kedepan. Sedangkan Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong merupakan suatu penjabaran dari Tujuan, Sasaran serta Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Tabalong yang telah dicanangkan untuk kurun waktu tahun 2019-2024.

Untuk mewujudkani Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong maka telah dirumuskan misi yang dapat menggerakan dan mewujudkan tujuan melalui berbagai upaya dalam pelaksanaannya, untuk itu ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan pengembangan penanaman modal/investasi;.

2. Menciptakan profesionalisme, sumber daya manusia dibidang pelayanan dan penanaman modal;
3. Meningkatkan minat investor dan kerjasama pembangunan dunia usaha yang aman dan sehat sebagai sumber pendapatan daerah dalam rangka kemajuan pembangunan ekonomi.

Misi tersebut dengan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dan menginginkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik, aparatur yang baik, sehat, cerdas,sejahtera, maju dan berdaya saing tinggi, dengan akhlak yang mulia dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat relevan dengan tujuan otonomi daerah. Dan pemenuhan kebutuhan publik yang dijadikan Misi yang hendak dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

1.2. Landasan Hukum

LANDASAN HUKUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU:

1. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1965 tentangPembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2009 tentang PelayananTerpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor927);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaliandan Evaluasi PembangunanDaerah, Tata Cara EvaluasiRancanganPeraturan DaerahtentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
18. Perda Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 – 2034;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
20. Peraturan Darah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana RPJPD Kabupaten Tabalong 2005-2025
21. Peraturan Darah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Tabalong 2020-2024;
22. Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;
23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 Perubahan atas dasar Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;

24. Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA-P) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenTabalongTahun 2019 - 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan rencana Kerja (renja perubahan) ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan penanaman modal untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

- Disusunnya RENJA – Perubahan agar dapat ditetapkannya tahapan-tahapan kebijakan demi tercapainya pelayanan kepada masyarakat/pelanggan.
- Mensinergikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Bidang-bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur sesuai skala priotitas dalam 1 (satu) tahun perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja – Perubahan Tahun 2024 disusun ke dalam bab- bab sebagai berikut :

BAB.I PENDAHULUAN

Memuat rumusan tentang latar belakang,landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja - Perubahan DPMPTSP Kabupaten Tabalong Tahun 2024.

BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN BERJALAN

Menjabarkan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong tahun 2023 sampai dengan triwulan II tahun 2024 (berjalan/ terakhir)

BAB.III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA

Memuat kegiatan lanjutan tahun 2024, pergeseran, penghapusan, penambahan, pengurangan target dan pagu, perubahan lokasi, dan kelompok sasaran.

BAB.VI PENUTUP

Memuat kesimpulan, berbagai harapan dan tindak lanjut pelaksanaan Renja- Perubahan DPMPTSP Kabupaten Tabalong tahun 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. II

TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tabalongmerupakan lembaga teknis daerah yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Tabalong.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintumempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Berdasarkan tugas pokok tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tabalong mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Infomasi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;

2.. pelaksanaan kebijakan bidang Perencanaan Penanalnan Modal dan Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;

4. pelaksanaan administrasi bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;

5. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanalnan Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Pelayanan; dan

6. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Adapun uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

a. merumuskan kebijakan teknis bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;

b. melaksanakan kebijakan teknis bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;

c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
d. melaksanakan administrasi bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Pelayanan;
e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanalnan Modal dan Informasi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan; dan
f. mengelola kegiatan kesekretariatan.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tabalong terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekreratis

    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal ,
d. Kepala BidangPengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal,

e. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan,
f. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan sistem Infomasi pelayanan,.
g. Jabatan Fungsional.

Uraian tugas pejabat struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tabalong, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**
   a. Membantu kepala daerah dalam menjalankan tugasnya dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
   b. Merumuskan visi, misi dan kebijakan teknis operasional dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan sumber yang relevan.
   c. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, SKPD dan instansi/lembaga terkait dalam merumuskan visi, misi, dan kebijakan teknis operasional, program dan kegiatan.
   d. Mengkoordinasikan semua program dan kegiatan Kepala Bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi bidang secara terpadu dan berkesinambungan.
   e. Melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung tercap
   ainya visi, misi dan kebijakan teknis operasional bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan pada rumusan yang telah dibuat.
   f. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap semua program dan kegiatan Kepala Bidang, kepala sub bagian dan kepala sub bidang untuk mendukung tercapainya visi, misi dan kebijanan teknis dan operasional pelayanan publik secara efisian, efektif dan akuntabel.

g. Memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan kepada semua pejabat struktural dan teknis dilingkungan intern kantor.
h. Melakukan evaluasi dengan melakukan penyesuaian menurut perundang-undangan, ketersediaan anggaran dan perkembangan yang terjadi.
i. Membuat laporan sebagai pertanggungjawaban dan bahan informasi untuk pengambilan kebijakan bagi kepala daerah.
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

2. **Sekretaris**

a. mengoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. mengoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Fintu;

c. mengoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan laporan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Hntu;

d. menyusun prograln, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset;

f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dari mengendalikan pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga;

g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengadministrasian kepegawaian;

h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;

i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan humas dan protokol Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Texpadu Satu Fintu;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat; dan

k. . melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang

2.1. Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Fintu;

b. menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran serta pengelolaan perencanaan dan keuangan serta penatausahaan aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kelja sama penyusunan rencana strategis yaitu menyusun Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahun;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan tahunan yaitu Rencana Kelja dan Rencana Kelja Perubahan serta pengelolaan keuangan dan aset;

e. menyiapkan bahan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, revisi anggaran, Rencana Kerja Anggaran, Monitoring evaluasi rencana anggaran;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinelja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, haporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Realisasi Capaian Kinelja (triwulan, semester dan tahunan) , haporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;

g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinelja penyusunan program;

h. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;

i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun ekstemal serta tindak lanjut basil pemeriksaan;

j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;

c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa/usul satya lencana, kenaikan pangkat, usul cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usul ujian dinas, usul pencantuman gelar, usul Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian, usul Jabatan F\mgsional, usul pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, usul penyesuaian masa kelja, usul Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Monev E-SKP, Monev E-Kinelja, pemberhentian dan pensiun pegawai;

d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinelj a pegawai;

e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinelja pegawai;

9. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan infomasi kepegawaian;

h. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

i. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;

j. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

k. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

l. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang; in. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

o. melaksanakan tugas lain yangdiberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. **Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal**

a. persiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan I+omosi Penanaman Modal;

b. penghimpunan, pengolahan, dan penyajian kegiatan Bidang Perencanaan Penanalnan Modal dan Promosi Penanaman Modal;

c. persiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis terkait kegiatan Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal;

d. persiapan bahan dan penyusunan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di Daerah melalui identifikasi potensi penanaman modal, pemetaan peluang penanaman modal dan pendokumenfasian hasil pemetaan dan peluang penanaman modal di Daerah;

e. persiapan bahan dan penyusunan rencana pengembangan Penanaman Modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;

f. persiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan pengembangan dan pemberdayaan usaha melalui fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan Besar (PMA/ PMDN) ;

g. persiapan bahan, penyusunan dan pengembangan kebijakan strategi promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan I+omosi Penanaman Modal;

h. persiapan dan penyusunan bahan, sarana dan prasarana Promosi Penanaman Modal;

i. persiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal baik di dalam Daerah maupun di Luar Daerah;

j. persiapan bahan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal;

k. persiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan satuan kelja/unit kelja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan I+omosi Penanaman Modal;

l. persiapan bahan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal; dan -8-

m. persiapan bahan dan penyusunan laporan kinelja penyelenggaraan kegiatan Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman

4. **Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal**

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Bidang pengendalian Pelaksanaan Penanalnan Modal dan Informasi Penanaman Modal;

b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi analisis dan verifikasi data, profil dan informasi Pelaku Usaha kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penananan Modal; -10-

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembang serta peningkatan kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;

g. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;

h. menyiapkan bahan dan mengembangkan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;

i. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan noma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kelja sama dengan satuan kelja/unit ken.a dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Infomasi Penanaman Modal;

l. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan terkait kewajiban l.aporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dan evaluasi in.

m. penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal; menyiapkan bahan dan menyusun laporan kineria penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. **Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

b. melaksanakan Pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission -OSS);

c. melaksanakan Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission -OSS);

d. melaksanakan Pelayanan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission -OSS) ;

e. melaksanakan Pelayanan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk pelafu UMK;

f. melaksanakan Pelayanan perubahan data usaha, pengembangan usaha, penggabungan, peleburan, dan pembubaran usaha;

g. memberikan pelayanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha; h. melaksanakan pendampingan mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan perizinan berusaha;

h. melaksanakan verifikasi Pemenuhan standar dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan tingkat risiko mengacu kepada NSPK kementerian/ lembaga pembina utama sektor usaha;
i. melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Peraturan Bupati Tabalong tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;
j. melaksanaan pelayanan pengaduan dari Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Peraturan Bupati Tabalong tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu FIntu Kabupaten Tabalon8; -12-
k. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinelja penyelenggaraan kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. **Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan**
   a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
   b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Pelayanan;
   c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
   d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
   e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Pelayanan;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembang serta peningkatan kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
g. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
h. menyiapkan bahan dan mengembangkan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
i. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
k. melaksanakan perencanaan pengembangan dan perawatan terhadap pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan;
l. menyiapkan bahan dan melaksanakan keq.a sama dengan satuan kelja/unit keria dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
m. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinelja penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

7. Jabatan Fungsional

Membantu pimpinan dalam melaksanaan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian yang dimilikinya berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompokjabatan fungsional dapat dibagi dalam Sub-Kelompoksesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing –

masingdipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Kebutuhanjabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan sifat,jenis dan beban kerja.

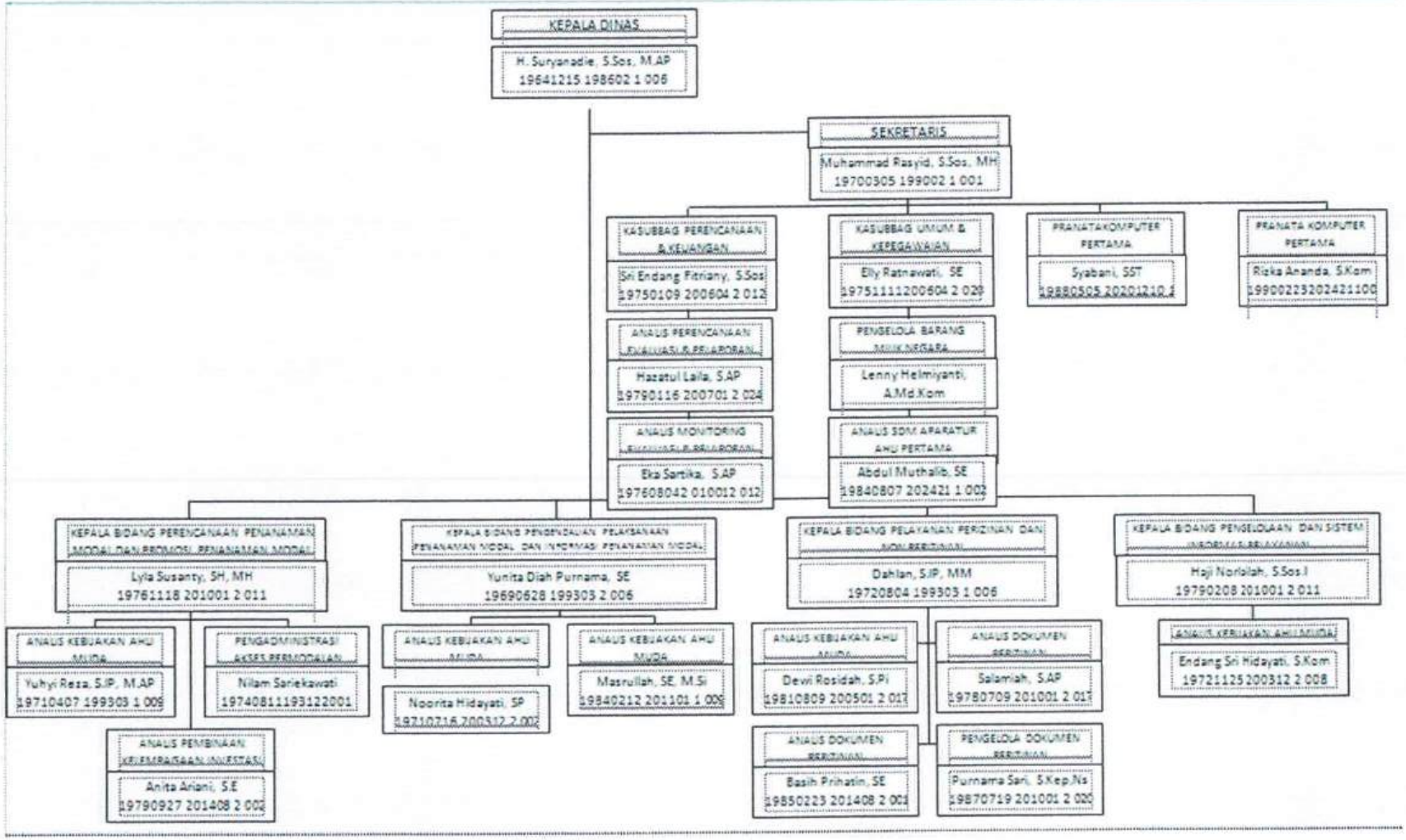
KEPALA DINAS
H. Suryanadie, S.Sos, M.AP
19641215 198602 1 006
SEKRETARIS
Muhammad Rasyid, S.Sos, MH
19700305 199002 1 001
KASUBBAG PERENCANAAN & KEUANGAN
Sri Endang Fitriany, S.Sos
19750109 200604 2 012
KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
Elly Ratnawati, SE
19751111200604 2 029
PRANATA KOMPUTER PERTAMA
Syabani, SST
19880505 20201210 1
PRANATA KOMPUTER PERTAMA
Rizka Ananda, S.Kom
19900223202421100
ANALIS PERENCANAAN EVALUASI & PELAPORAN
Hazatul Laila, S.AP
19790116 200701 2 024
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
Lenny Helmiyanti, A.Md.Kom
ANALIS MONITORING EVALUASI & PELAPORAN
Eka Sartika, S.AP
197608042 010012 012
ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA
Abdul Muthalib, SE
19840807 202421 1 002
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL
Lyla Susanty, SH, MH
19761118 201001 2 011
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
Yunita Diah Purnama, SE
19690628 199303 2 006
KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Dahlan, SIP, MM
19720804 199303 1 006
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN
Haji Norlailah, S.Sos.I
19790208 201001 2 011
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
Yuhyi Reza, S.IP, M.AP
19710407 199303 1 009
PENGADMINISTRASI AKSES PERMODALAN
Nilam Sariekawati
19740811193122001
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
Noorita Hidayati, SP
19710716 200312 2 002
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
Masrullah, SE, M.Si
19840212 201101 1 009
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
Dewi Rosidah, S.Pi
19810809 200501 2 017
ANALIS DOKUMEN PERTANIAN
Salamiah, SAP
19780709 201001 2 011
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
Endang Sri Hidayati, S.Kom
19721125 200312 2 008
ANALIS PEMBINAAN KERJASAMA INVESTASI
Anita Ariani, S.E
19790927 201408 2 002
ANALIS DOKUMEN PERTANIAN
Basih Prihatin, SE
19850223 201408 2 001
PENGELOLA DOKUMEN PERTANIAN
Purnama Sari, S.Kep,Ns
19870719 201001 2 020

BAB. III

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN BERJALAN

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong untuk tahun anggaran 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan seperti yang telah direncanakan. Pada anggaran tahun 2024 telah dilaksanakan sampai dengan triwulana II bulan Juli) dan terdapat beberapa hal yang mana program dan dapat dijalankan berkaitan dengan perubahan kebijakan. Untuk mengetahui sampai sejauh mana program dan kegiatan tersebut dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi kinerja, yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat pencapaian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong selama kurun waktu sampai dengan Bulan Juni 2024 34,53 % Tahun Anggaran 2024. Program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024 ini akan mengalami pergeseran dan penambahan anggaran, untuk penyesuaian dan perbaikan kinerja. Tingkat pencapaian kinerja Triwulan II pada bulan Juni tahun 2024, dapat dilihat pada tabel terlampir.
2. Sesuai dengan catatan strategi–rekomendasi DPRD Kabupaten Tabalong yaitu Kolaborasi dan koordinasi dengan OPD terknis perlu dimaksimalkan agar pelayanan perizinan semakin mudah,cepat dan akurat Adanya evaluasi dari Kemenpan RB dan Ombudsman Republik Indonesia ternyata masih terdapat kekurangan dalam operasional Mal Pelayanan Publik dan kurangnya pendidikan dan pelatihan bagii aparat pelayanan perizinan ,sehingga harus segera ditanggulangi melalui penambahan anggaran pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Tabalong Tahun 2022

SASARAN	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya investasi Penanaman Modal	Realisasi Investasi PMDN dan PMA	1.010.000.000.000,00	3,295	468
	Jumlah Investor yang berminat menanaman modal	20	20	100

Tabel . 2 Pencapaian Kinerja Tahun 2023

SASARAN	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA		
		Target Tahunan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Meningkatkan investasi Penanaman Modal	Realisasi Investasi PMDN dan PMA	1.01 Trilyun	2,54 Trilyun	252,07
Meningkatkan kepuasan Pelayanan Publik	Nilai Skor SKM terhadap layanan perizinan	89	91,06	102,31

Capaian Kinerja 2023 da[at dilihat pada tabel diatas dimana terlihat capaian kinerja telah melebihi target tahunan

Tabel.3 PENGUKURAN KINERJA DAN SERAPAN ANGGARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
			TARGET	REALISASI	%
1		2	6	7	8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Nilai IKM**			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai Akuntabilitasi Kinerja SKPD**	10	5	0,3
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan LKIP DPMPTSP	10	5	0,3
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN**	14	7	50
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN**	14	7	50
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terpenuhinya aparat yang memiliki wawasan**	1	6,7	667
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang memiliki wawasan	1	6,7	667

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor**	111	34	0,30631
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan Listrik yang dibeli	12	6	50
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang dibeli	12	6	50
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan disediakan	12	6	50
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang diadakan	12	6	50
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti	79	50	63,3
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terpenuhinya kelancaran aktivitas perkantoran**	12	6	0,5
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya listrik,telpon,PDAM,Internet,TV Kabel dan jasa pelayanan umum kantor	12	6	0,5
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya makan makan minum rapat,makan minum tamu, harian ASN dilingkungan DPMPTSP	12	6	0,5

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya barang milik daerah**	93	35	0,37634
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dilakukan pemeliharaan	17		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dilakukanpemeliharaan	93		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor DPMPTSP dan pembayaran jasa kebersihan kantor	1	0,5	50
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		**Realisasi investasi PMDN dan PMA**			
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Jumlah jenis potensi investasi yang terindentifikasi sesuai standar**	1	0,25	25
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah jenis potensi investasi yang terindentifikasi sesuai standar	1	0,25	25
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		**Jumlah investor yang berminat menanamkan modal**			

	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan**	5	1	3,35
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	5	1	3,35
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		**Nilai Skor Standar Kepuasan Masyarakat**			
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen Pelayanan perizinan dan Non perizinan**	2100	826	0,43474
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan	2100		
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perizinan dan non perizinan yang memerlukan survey lapangan	150		
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan pengaduan yang ditindak lanjuti	3		

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		**Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi PM**			
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi PM**			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang terawasi dan dan dikendalikan			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dibina			
	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan penanaman modal yang lancar melaksanakan kegiatan(sesuai target investasi perusahaan)			
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		**Kenaikan penurunan nilai realisasi PMDN dan PMA**			

	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase jumlah data dan informasi penanaman modal yang disampaikan ke publik**	2	1	50
	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah penyajian data yang dibuat	2	1	50

Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Tertapdu Satu Pintu Kabupaten Tabalong sebagai OPD yang diberi kewenangan memberikan pelayanan perijinan dan meningkatkan investasi , agar terus berinovasi, meningkatkan kapasitas SDM petugas, meningkatkan koordiansi dan kolaborasi dengan semua pihak, agar pelayanan publik dibidang perizinan semakin berkualitas, mudah, aman, nyaman dan investasi meningkat. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah dilakukan evaluasi ternyata masih terdapat kekurangan dalam operasional Mal Pelayanan Publik yang mesti harus segera ditanggulangi melalui penambahan anggaran kegiatan pada perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)-P.

1. Pengembangan Kompetensi pegawai yaitu dengan penyediaan pelatihan terutama service axcellen untuk peningkatan hospitality dan pelayanan serta petugas pengaduan disarankan untuk mengikuti training pengembangan kompotensi secara berkala serta perlunya diadakannya pengembangan kapasistas pegawai untuk meningkatkan kemampuan baik individu, atau kelompok dari aspek ilmu pengetahuan maupun prilaku melalui aktivitas yang menarik.
2. Pergeseran anggaran karena adanya anggaran yang tidak bisa dilaksanakan sehingga dilakukan pergeseran untuk peningkatan Sarana dan Prasarana MPP untuk peralatan yang sudah tidak bisa digunakan lagi,pembelian ginset dan untuk penunjang pelaksanaan inovasi pelayanan perizinan.
3. Penambahan untuk mengadakan pertemuan atau forum bisnis sebagai sarana menawarkan potensi investasi di Kabupaten Tabalong pada Investor potensial di forum nasional.

Berdasarkan analisis diatas maka kami perlu melakukan penambahan anggaran yang disesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong dalam menentukan tolak ukur dan indikator kinerja perlu dilakukan analisis pencapaian kinerja. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong merupakan etalase sebuah Kabupaten, Pelayanan Perizinan yang mudah transparan, cepat dan profesional akan berdampak positif untuk Kabupaten itu sendiri dalam terwujudnya iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan perizinan satu pintu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang mandiri dan berdaya saing.

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong dinilai berdasarkan Indikator Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam surat Keputusan Bupati Tabalong. Analisis pencapaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Indikator yang dilaksanakan adalah jumlah realisasi investasi PMDN dan PMA, yang mana sampai triwulan II sebesar Rp.1,01 Trilyun,telah baru sebesar ....(109%)
2. Indikator nilai Standar Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan 89 pad triwulan II capaian kinerja sudah 99,77 telah melebihi target tahunan
3. Kegiatan Pameran investasi yag ditargetkan 4 kali dalam 2 triwulan sudah 2 kali pameran yang dilaksanakan i.
4. Pada kegiatan pelayan perizinan dan non perizinan di targetkan 948 izin hanya tercapai 826 izin yang dikeluarkan

Dari beberapa kegiatan pergeseran anggaran. Program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 mengalami pergeseran dan perubahan dari Anggaran Induk sebesar Rp10.218.145.792,- dan saat perubahan menjadi Rp. 10.439.227.067,,-

Dalam setiap penyusunan rencana kerja, DPMPTSP Kabupaten Tabalong selalu melakukan analisis kebutuhan. Analisis ini dilakukan untuk mengakomodir semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan . Program dan kegiatan yang ada sesuai dengan rancangan awal dan diharapkan mampu mendukung tercapainya visi misi Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Dalam era persaingan bebas dan semangat otonomi daerah tentu setiap daerah berlomba-lomba untuk mempunyai keunggulan-keunggulan komperatif dibanding daerah lain, untuk menunjukkan kualitas baik di berbagai bidang. Namun isu yang berkembang saat ini dibidang pelayanan sungguh menjadikan keprihatinan yang perlu penyelesaian.Isu-isu yang berkembang tersebut menuntut adanya action dan perubahan kearah yang lebih baik, izin-izin yang kurang menggembirakan perlu di rubah menjadi isu yang positif yang mampu merangsang perbaikan iklim investasi di Indonesia, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan lapangan kerja, untuk mengurangi pengangguran dan mampu mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat.

Tabel 4.
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024

No	Renja Awal					Renja Perubahan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.....)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.....)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	DPMPTSP	Nilai IKM	BB	5.609.419.310	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	DPMPTSP	Nilai IKM	BB	**4.818.905.461**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	BB	20.967.100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	BB	20.967.100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Terbayarnya gajih dan tunjangan ASN	14 bln	2.922.316.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Terbayarnya gajih dan tunjangan ASN	14 bln	2.403.842.000	Penyesuaian
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP	Terpenuhinya aparat yang memiliki wawasan	2 unit	82.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP	Terpenuhinya aparat yang memiliki wawasan	2 unit	82.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	673.954.588	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	769.614.825	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	Lancarnya sarana dan pelayanan administrasi perkantoran			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	Lancarnya sarana dan pelayanan administrasi perkantoran	2 unit	48.810.000	Pembelian 2 buah sepeda motor

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Lancarnya sarana dan pelayanan administrasi perkantoran	12 bln	1.657.902.120	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Lancarnya sarana dan pelayanan administrasi perkantoran	12 bln	1.139.952.120	Bergeser untuk tambahan pembelian sepeda motor dan penambahan anggaran rapat koordinasi
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipeliharan	117 unit	251.779.502	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipeliharan	117 unit	353.219.416	Penambahan anggaran untuk pembuatan parkirana roda 2 dan pemeliharaan gedung kantor
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Realisasi investasi PMDN dan PMA	1,01 Trilyun	256.195.442	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	DPMPTSP	Realisasi investasi PMDN dan PMA	1,01 Trilyun	**256.195.442**	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah jenis potensi investasi daerah yang teridentifikasi sesuai standar	1 kajian	256.195.442	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah jenis potensi investasi daerah yang teridentifikasi sesuai standar	1 kajian	256.195.442	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	**Jumlah investor yang berminat menanamkan modal**	20 investor	403.178.259	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	DPMPTSP	**Jumlah investor yang berminat menanamkan modal**	20 investor	**388.178.524**	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	DPMPTSP	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	4 kali	403.178.259	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	DPMPTSP	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	4 kali	388.178.524	Bergeser dan berkurang untuk pembuatan video profil Dinas

Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Nilai Skor Standar Kepuasan Masyarakat	87	453.756.121	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	DPMPTSP	Nilai Skor Standar Kepuasan Masyarakat	87	453.756.121	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPMPTSP	**Jumlah dokumen pelayanan perijinan dan non perijinan yang diterbitkan**	2100 izin	453.756.121	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPMPTSP	**Jumlah dokumen pelayanan perijinan dan non perijinan yang diterbitkan**	2100 izin	**453.756.121**	Bergeser diantara belanja kegiatan
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase pengendalian pelaksanaan modal dan informasi penanaman modal	60%	633.684.780	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	DPMPTSP	Persentase pengendalian pelaksanaan modal dan informasi penanaman modal	60%	**576.825.000**	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal	80 kali	633.684.780	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal	80 kali	576.825.000	

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase pengelolaan sistem informasi	100%	246.187.603	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	DPMPTSP	Persentase pengelolaan sistem informasi	100%	**261.187.603**	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Persentase Updating sistem informasi investasi serta perizinan dan non perizinan	100%	246.187.603	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Persentase Updating sistem informasi investasi serta perizinan dan non perizinan	100%	261.187.603	Bertambah untuk pembuatan video profil dinas Anggaran Pergeseran dari Bidang Perencanaan Iklim Pd kegiatan Promosi PM

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perubahan SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di bidang Penanaman Modal guna meningkatkan dan mengefektifkan Sistem dan Tata Laksana Pelayanan Perizinan dan Pengembangan Investasi di bidang Penanaman Modal secara cepat, mudah, transparan, tepat waktu. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya penambahan dan perubahan yang membangun baik dalam Program Kerja, kegiatan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur Perizinan.

Pelimpahan kewenagan penanaman modal ke Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daearah persiapan yang matang baik menyangkut perangkat keras maupun perangkat lunaknya memerlukan biaya yang tidak sedikit serta memerlukan pentahapan-pentahapan yang terencana, baik menyangkut biaya maupun sumber daya lainnya untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Terlaksananya rencana kerja ini akan sangat ditentukan partisipasi, kesungguhan dan kerja keras seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas yang telah ditetentukan. Tercapainya keberhasilan juga sangat ditentukan dukungan berbagai pihak, kebijaksanaan pimpinan dan tersedianya anggaran yang memadai.

Perencanaan yang realitas dengan berdasarkan analisis yang mendalam guna mewujudkan Tabalong Sejahtera melalui bukti nyata yaitu pelayanan cepat, mudah, transparan, tepat waktu, dan kepastian biaya dan waktu serta bebas KKN dan Pungutan Liar (PUNGLI). Pelayanan prima yang sudah ditunggu dan sangat diharapkan oleh masyarakat harus dibuktikan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong yang dalam hal ini adalah Mal Pelayanan Publik .

Untuk merealisasikan perencanaan yang telah disusun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak yang terkait. Dengan keyakinan yang kuat bahwa perencanaan dapat direalisasikan dengan baik, sehingga output dan dampak yang diharapkan dapat diwujudkan.

Untuk itu upaya pembenahan sistem, pengembangan SDM dan pengembangan sarana sesuai tuntutan tugas dan sesuai harapan masyarakat

merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda mulai sekarang, mulai dari diri sendiri dan mulai dari yang kecil. Sehingga niat baik untuk mensejahterakan masyarakat dan aparatnya diridhoi dan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang Program Rencana Strategis ini akan lebih sempurna seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan Rencana Kerja.

Demikian Rencana Kerja (Renja) ini disampaikan sebagai bahan selanjutnya, atas perhatian dan bantuan berbagai pihak disampaikan terima kasih.

Tanjung. Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

H. SURYANADIE,S.Sos,M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. **19641215 198602 2 006**

RENCANA KERJA (RENJA) 2024

PERUBAHAN

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN TABALONG

KATA PENGANTAR

Perencanaan Kerja Perangkat Daerah, merupakan salah satu instrumen untuk membantu memahami keseluruhan gambaran tugas organisasi secara lebih jelas, lebih rinci dan meminimalkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Disusunnya perencanaan kerja juga akan memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian/unit kerja SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Perubahan merupakan salah satu bagian dari siklus perencanaan daerah. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta mengacu pada RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024. Dokumen Renja memuat program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun 2024 Perubahan disertai pagu dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya.

Renja sebagai road map tahunan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk mengawal konsistensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD yang pada gilirannya mampu berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tabalong.

Tanjung, Agustus 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tabalong,

H. SYAM'ANI, SP, MP
NIP. 19750504 200003 1 012

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan SKPD sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Acuan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Perubahan adalah Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Perubahan. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matrik yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumberdana.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Perubahan merupakan:

1. Pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 Perubahan;
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Perubahan adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);

3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata caraenyusunan, Pengendalian, dan Evalusai Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang TataCara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan PembangunanJangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009Nomor 09,Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalongg Nommor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
6). Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1) Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
2) Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.3.2 Tujuan

1) Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2024 Perubahan;
2) Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 Perubahan;
3) Memberikan alternatif pemecahan permasalahan.
4) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggarandengan memperhatikan kerangka regulasi dan

kerangka anggaranPerangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I.PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah,serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024 Perubahan serta Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD

Berisi uraian tentang :

a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
c. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan lainnya.

Diskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh.
b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu–isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2019-2024.

3.2 Program dan Kegiatan

Disajikan dalam bentuk tabel (lampiran) dengan penjelasan mengenai uraian garis besar program dan kegiatan, antara lain meliputi:

a. Nama program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikatornya.
b. Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut penggunaannya.

BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V.PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencanatindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Dan Perkiraan Tahun 2024 Perubahan Serta Capaian Renstra Tahun 2019-2024

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan Tahun 2024 Perubahan diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2023 dan perkiraan pencapaian hasil Tahun 2024 Perubahan.

Untuk tahun 2021 dengan keluarnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, maka Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Permendagri tersebut.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dapat dilihat pada table 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 Perubahan (tahun berjalan)

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024 Perubahan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024 Perubahan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun berjalan	
						Target Renja Tahun 2023 (n-1)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =(8/7)	1	2	3
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	Persen	67,16	53%	59%	59%	100	67,16	67,16	100

	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	KSP / USP	20	16 KSP/ USP	20 KSP/ USP	16 KSP/ USP	80	20	20	100
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Terwujudnya SDM Koperasi yang berkualitas	Persen	40	60 orang	60 orang	60 orang	100	40	40	100
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terfasilitasi Perizinan Usaha Mikro dan Fasilitasi Kemitraan Usaha	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terbinanya Para pelaku Usaha Mikro	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Urusan Perdagangan										
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pemenuhan indikator pasar Tipe A kriteria SNI 8152:2015	Persen	85,15	84,17%	84,17 %	84,17%	100	85,15	85,15	100
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentasi rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	Persen	88	85%	85%	85%	100%	88	88	100
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN	Konstribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	9,21	9,21%	9,21%	*) Menunggu data dari BPS		9,21	9,21	100

	POKOK DAN BARANG PENTING	Terkendalinya inflasi harga kebutuhan Bapokting	Persen	1,10	1,26	1,26	*) Menunggu data dari BPS		1,10	1,10	100
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah produk unggulan daerah yang siap ekspor	Persen	60	62,5%	62,5%	60%	96	60	60	100
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase jumlah alat UTTP dipasar dan SPBU yang ditera / tera ulang	Persen	69	70%	70%	70%	100	60	60	100
	Urusan Perindustrian										
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Konstribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	11,51	11,37%	11,37 %	*) Menunggu data dari BPS		11,51	11,51	100
		Pertambahan industri baru	unit usaha baru	40	35 unit usaha baru	35 unit usaha baru	35 unit usaha baru	100	40	40	100
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Persentase jumlah perizinan berusaha industri yang difasilitasi dengan yang dikeluarkan oleh instansi terkait secara elektronik	Persen	70	60%	60%	60%	100	70	70	100

	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri	Persen	100	100%	100%	100%	100	100	100	100

Tabel 2.2
Capaian Target Indikator Kinerja dan Penyerapan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target dan Capaian						Realisasi Penyerapan
		Target 2023	Capaian Kinerja	Prosentase Kinerja (%)	Progam	Kegiatan sesuai Renstra / Perjanjian Kerja	Anggaran	Anggaran 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urusan Koperasi dan UMKM								
1	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Unit Usaha	60 Unit Koperasi	100 %	PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 82.756.014	Rp 74.499.573
2	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	16 Unit Usaha	16 Unit Usaha	100%	PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1	Rp 53.218.181	Rp 45.246.169

	Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					(satu) Daerah Kabupaten/Kota		
3	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM KoperasiKoperasi	60 Orang	60 Orang	100 %	PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 144.270.250	Rp 140.587.300
4	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro dan Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	50 Unit Usaha dan 60 Unit Usaha	50 Unit Usaha dan 60 Unit Usaha	100%	PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp 542.927.314	Rp 379.795.005
5	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	100%	PENGEMBANGAN UMKM	Keg. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rp 1.705.991.613	Rp1.646.735.550
Urusan Perdagangan								
1	Jumlah rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang dikeluarkan	2 izin usaha	2 izin usaha	100,00%	PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Rp 13.170.000	Rp 5.117.000

2	Jumlah rekomendasi Tanda Daftar Gudang yang dikeluarkan	8 izin usaha	1 izin usaha	12,5%		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Rp 15.755.000	Rp 1.200.000
3	Jumlah rekomendasi SIUP Minuman Beralkohol yang dikeluarkan	1 izin usaha	1 izin usaha	100,00%		Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat	Rp 18.402.000	Rp 8.553.000
4	Jumlah laporan ketersediaan Bapokting dan Jumlah laporan kelancaran aksebilitas Bapokting	12 bulan	12 bulan	100%	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 97.183.000	Rp 45.573.116
5	Laporan harga stok ditingkat distributor (Bulan)	12 bulan	12 bulan	100%		Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp 2.026.484.240	Rp 506.632.068

6	Promosi Luar daerah Kabupaten (Kali)	1 Kali	0 Kali	0,00%	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 42.307.000	Rp 9.735.722
7	Jumlah kriteria pengelolaan pasar yang memenuhi SNI	11 Kriteria SNI	11 Kriteria SNI	100%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Rp 1.155.087.500	Rp 1.002.804.628
8	Jumlah kriteria untuk sarana pasar yang memenuhi SNI	30 Kriteria SNI	30 Kriteria SNI	100%		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 33.412.743.167	Rp 26.068.314.996
9	Jumlah alat UTTP pasar dan SPBU yang dtera/tera ulang	1717 UTTP	1717 UTTP	100%	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp 902.120.520	Rp 592.711.420
Urusan Perindustrian								
1	Jumlah industri baru	35 WUB	45 WUB	100%	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp 1.884.842.021	Rp 1.516.257.711

2	Jumlah perizinan berusaha industri yang difasilitasi	33 Ijin	33 Ijin	100%	PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan usaha Industri (IPUI),Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 18.098.000	Rp -
3	Tersedianya data industri per semester dan 1 buku laporan informasi industri	1 Lap/Buku	1 Lap/Buku	100,00%	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 32.722.000	Rp 19.677.456
Sekretariat								
1	Tersusunnya laporan kinerja LKPJ, LPPD, SAKIP	100%	100,00%	100,00%	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 138.939.452	Rp 114.889.648
2	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100,00%	100,00%		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 994.687.361	Rp 942.111.332

3	Terlaksananya operasional jasa surat menyurat, Terbayarnya jasa komunikasi, air dan listrik	100%	100,00%	100,00%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp 1.641.273.578	Rp 1.346.725.479
4	Terpeliharanya barang milik daerah (Persen)	100%	100,00%	100,00%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.066.324.625	Rp 951.754.391
5	Terbayarnya gaji pegawai (bulan)	12 bulan	12 bulan	100,00%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 11.112.507.070	Rp 9.683.913.063

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong adalah :

A. Penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
B. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
C. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
D. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
E. Pelaksanaan kesekretariatan dinas dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta Perjanjian KInerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) TAHUN 2024 PERUBAHAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM	Persentase koperasi aktif	59 %
2	Meningkatnya Kewirausahaan	Pertumbuhan Usaha Mikro	0,27 %
3	Konstribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Prosentase konstribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	9.21 %
4	Konstribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Prosentase konstribusi sektor Industri terhadap PDRB	11.23 %

Evaluasi bertujuan untuk menegtahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala – kendala yang dijumpai di dalam pelaksanaan kegiatan–kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan untuk perbaikan pelaksanan program/kegiatan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja atas sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n 1)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n -1)	Tahun 2024 (n 1)	Tahun 2025 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah												
1	Pertumbuhan UMK				0,25	0,26	0,27	0,25	0,26	0,27	0,28	
2	Jumlah Koperasi yang dibina, diawasi dan dinilai				80	80	80	80	59	60	61	
3	Jumlah Anggota Koperasi yang dilatih				360	360	360	360	272	275	300	
4	Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Usaha Koperasi				3	3	3	3	3	3	3	
5	Terlaksananya pembinaan usaha mikro menjadi usaha kecil				30	30	30	30	30	30	30	

6	Jumlah Pelaku Usaha yang dilatih Wirausaha				90	90	90	90	90	90	90	
3.4 Perdagangan												
7	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB				9,21	9,21	9,21	8,95	9,21	9,21	9,21	
8	Terkendalinya inflasi harga kebutuhan Bapokting				1,42	1,27	1,14	1,58	1,42	1,27	1,14	
9	Jumlah Rekomendasi Perizinan yang Dikeluarkan				82	85	86	70	82	85	86	
10	Persentase pemenuhan indikator pasar Tipe A kriteria SNI 8152:2015				59,97	84,17	100	47,38	59,97	84,17	100	
11	Jumlah produk unggulan daerah yang siap ekspor				50	62,5	75	35	50	62,5	75	
12	Persentase jumlah alat UTTP dipasar dan SPBU yang ditera / tera ulang				60	70	80	56	60	70	80	

3.5 Perindustrian												
13	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB				11,23	11,37	11,51	8,89	5,91	11,37	11,51	
14	Pertambahan Industri Baru				33	35	37	40	35	35	37	
15	Persentase jumlah perizinan berusaha industri yang difasilitasi dengan yang dikeluarkan oleh instansi terkait secara elektronik				54	60	66	46	60	60	66	
16	Tersedianya Informasi Industri				100	100	100	100	100	100	100	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sebagaimana telah diuraikan dalam Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, hal-hal kritis yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terutama adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya yang langsung melayani masyarakat, dalam hal ini pelaku usaha.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan antara lain adalah:

1. Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif.
2. Masih banyaknya koperasi aktif yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
3. Belum berkembangnya usaha koperasi.
4. Belum optimalnya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah menyebabkan tingkat pertumbuhan UKM rendah.
5. Belum memadainya prasarana dan sarana perdagangan
6. Belum optimalnya manajemen pengelolaan pasar
7. Belum efektifnya pembinaan distribusi lokal, tertib niaga, dan kepastian berusaha untuk mewujudkan perdagangan lokal yang kondusif dan dinamis
8. Masih rendahnya akses pasar bagi hasil industri lokal
9. Rendahnya daya saing produk IKM
10. Belum optimalnya pengembangan industri kecil menengah yang berbasis potensi lokal

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan antara lain adalah:

1. Sumber daya manusia sektor industri dan pedagangan masih rendah.

   Pengembangkan usaha di masyarakat sangat tinggi, sementara sumber daya manusia di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki keahlian untuk memberikan pelatihandan/atau pendampingan usaha sangat terbatas.
2. Jumlah pedagang pasar tradisional relatif banyak. Dengan jumlah pedagang yang relatif banyak menimbulkan tantangan untuk dapat mengimbangi pelayanan terutama terkait dengan penyediaan tempat dasaran bagi pedagang.
3. Lembaga-lembaga pelatihan dan permodalan yang mendukung pengembangan pelaku usaha relatif banyak. Adanya lembaga-lembaga pelatihan dan permodalan yang mendukung pengembangan usaha memunculkan peluang kerjasama bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk memberikan pelayanan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat pelaku usaha.

Dari berbagai hal tersebut di atas, beberapa isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Tahun 2024 Perubahan antara lain adalah:

1. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UKM agar memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat.
2. Meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan
3. Pengembangan sentra industri
4. Memperkuat daya saing produk IKM
5. Tenaga kerja yang andal, terampil dan terlatih
6. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi Kebijakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi dilaksanakan dengan program "Penataan dan modernisasi pasar-pasar mingguan "
7. Optimalisasi peningkatan PAD

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD 2024

Reviu terhadap rancangan awal RKPD 2024 terhadap Analisa kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 Perubahan Program dan Kegiatan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan

No	Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Bidang Koperasi										
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kab. Tabalong	Persentase koperasi aktif	67,16%		Kab. Tabalong	Persentase koperasi aktif	67,16%		
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	63 unit usaha	76.937.000		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	63 unit usaha	76.937.000	
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI (Pemeriksaan Kesehatan)	Kab. Tabalong	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	20 KSP/USP		Kab. Tabalong	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	20 KSP/USP		

	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	16 KSP/USP	91.400.000		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	16 KSP/USP	91.400.000	
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tabalong	Terwujudnya SDM Koperasi yang berkualitas	40%		Kab. Tabalong	Terwujudnya SDM Koperasi yang berkualitas	40%		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 orang	139.744.000		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 orang	139.744.000	
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil										
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab. Tabalong	Terfasilitasi Perizinan Usaha Mikro dan Fasilitasi Kemitraan Usaha	100%		Kab. Tabalong	Terfasilitasi Perizinan Usaha Mikro dan Fasilitasi Kemitraan Usaha	100%		

	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	180.854.960		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	180.854.960	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kab. Tabalong	Terbinanya Para pelaku Usaha Mikro	100%		Kab. Tabalong	Terbinanya Para pelaku Usaha Mikro	100%		
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	200 Unit Usaha	830.000.000		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	200 Unit Usaha	830,000.000	
Bidang Industri										
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kab. Tabalong	Konstribusi sektor industri terhadap PDRB	11,51%		Kab. Tabalong	Konstribusi sektor industri terhadap PDRB	11,51%		

	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1.525.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1.525.000.000	
7	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Kab. Tabalong	Persentase jumlah perizinan berusaha industri yang difasilitasi dengan yang dikeluarkan oleh instansi terkait secara elektronik	70%		Kab. Tabalong	Persentase jumlah perizinan berusaha industri yang difasilitasi dengan yang dikeluarkan oleh instansi terkait secara elektronik	70%		
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah perizinan berusaha industri yang difasilitasi dengan yang dikeluarkan oleh instansi terkait secara elektronik	1 Dokumen	125.000.000		Jumlah perizinan berusaha industri yang difasilitasi dengan yang dikeluarkan oleh instansi terkait secara elektronik	1 Dokumen	125.000.000	
8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kab. Tabalong	Tersedianya informasi industri	100%		Kab. Tabalong	Tersedianya informasi industri	100%		

	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	100.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	100.000.000	
Bidang Perdagangan dan Kemetrologian										
9	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kab. Tabalong	Persentasi rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	88%		Kab. Tabalong	Persentasi rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	82%		

	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	22.000.000		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	22.000.000	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3 Dokumen	17.000.000		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3 Dokumen	17.000.000	

	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	18.402.000		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	18.402.000	
10	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kab. Tabalong	Konstribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9,21		Kab. Tabalong	Konstribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9,21		
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3 Laporan	16.913.000		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3 Laporan	16.913.000	

	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Laporan	197.500.000		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Laporan	197.500.000	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	2 Laporan	20.000.000		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	2 Laporan	20.000.000	
11	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kab. Tabalong	Jumlah produk unggulan daerah yang siap ekspor	60%		Kab. Tabalong	Jumlah produk unggulan daerah yang siap ekspor	60%		
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	50 Pelaku Usaha	93.557.000		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	50 Pelaku Usaha	93.557.000	

12	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kab. Tabalong	Persentase jumlah alat UTTP dipasar dan SPBU yang ditera / tera ulang	69%		Kab. Tabalong	Persentase jumlah alat UTTP dipasar dan SPBU yang ditera / tera ulang	60%		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1717 UTTP	310.000.000		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1717 UTTP	310.000.000	
Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perdagangan										
13	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Tabalong	Persentase pemenuhan indikator pasar Tipe A kriteria SNI 8152:2015	85,15%		Kab. Tabalong	Persentase pemenuhan indikator pasar Tipe A kriteria SNI 8152:2015	85,15%		
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	23.141.747.890		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	23.141.747.890	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	778.881.650		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	778.881.650	
Sekretariat										

14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Tabalong	Indeks Layanan Kesekretariatan	B		Kab. Tabalong	Indeks Layanan Kesekretariatan	B		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	100%	67.540.000		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	100%	67.540.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	1.477.271.879		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	1.477.271.879	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Kendaraan Dinas R4 dan R2	12 bulan	515.993.559		Pemeliharaan Kendaraan Dinas R4 dan R2	12 bulan	515.993.559	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	200.477.288		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	200.477.288	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tabalong membuka akses yang luas kepada kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan yang akan ditindak lanjuti oleh SKPD terkait melalui mekanisme musrembang. Sistem perencanaan tersebut dilaksanakan berjenjang dari level terbawah sampai dengan tingkat kabupaten.

Setelah proses usulan tersebut masuk ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, maka dilakukan penyaringan atau seleksi kegiatan yang mendukung prioritas Kabupaten. Dengan terseleksinya kegiatan tersebut diharapkan adanya efisiensi terhadap biaya dan sumber daya lainnya sehingga pencapaian target kinerja lebih mudah terlaksana.

Seleksi kegiatan tersebut dilakukan melalui Kegiatan Forum Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2023 bertempat di Aula Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rekap Usulan Forum Perangkat Daerah
tahun 2023 untuk Rencana Kerja 2024

1. Kecamatan Banua Lawas ada 1 usulan :

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Keterangan
1	Agus Wari	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	musim hujan becek bahkan banjir sehingga para pedagang berjualan di pinggir jalan maka perlu di lakukan penyiringan beton dan tanah urug dengan P= 25 m dan L= 15 m dan ketinggian Tanah Urug = 40 cm	Desa Sungai Durian RT 01, Kab. Tabalong	Akomodir di bidang sarana distribusi perdagangan TA 2024

2. Kecamatan Kelua ada 7 usulan :

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Keterangan
1	Yulnarian	Pemberdayaan Koperasi dan Anggota Koperasi	belum adanya pelayanan usaha simpan pinjam didesa	Desa Sungai Buluh Kecamatan kelua, Kab. Tabalong	Akomodir dengan Sosialisasi perkoperasian
2	Yulnarian	Penyediaan Prasarana dan Sarana Koperasi	Perlu adanya sarana prasarana koperasi di desa Sungai Buluh Kecamatan kelua	Desa Sungai Buluh rt.04 Kecamatan Kelua, Kab. Tabalong	pending perlu data dan informasi terkait koperasi yang ada

3	Fahruddin,S.Sos	Pemberdayaan Koperasi dan Anggota Koperasi	KOPERASI AMANAH NASIONAL SEJAHTERA Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan, Ayam dan Itik dari Magot dalam Rangka Peningkatan SDM Anggota Koperasi	Jl. Gang Setuju RT. 04 Kelurahan Pulau, Kab. Tabalong	Koordinasi Disbunak
4	Fahruddin,S.Sos	Pemberdayaan Koperasi dan Anggota Koperasi	KOPERASI AMANAH NASIONAL SEJAHTERA Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan, Ayam dan Itik dari Magot, Peningkatan SDM Anggota Koperasi	Jl. Gang Setuju RT. 04 Kelurahan Pulau, Kab. Tabalong	pending perlu data dan informasi terkait koperasi yang ada
5	Muhammad Haris	Pengembangan Usaha Mikro/ Usaha Kecil	Kurang dikenalnya nama-nama produk asli desa	Telaga Itar RT 01, 02, 03, 04, Kab. Tabalong	Sudah diakomodir pada Pelatihan di tahun 2023 Bidang Industri
6	Yulnarian	Pengendalian Harga dan Stok Barang Penting	Kadang harga kebutuhan pokok meningkat naik sulit dikendalikan untuk itu perlu pengendalian harga dan stok barang penting, Pasar murah masyarakat	Desa Sungai Buluh Kecamatan Kelua, Kab. Tabalong	Sudah diakomodir Bidang Perdagangan dan Kemetrologian (tahun 2023)
7	Rustam	Penyelenggaraan Promosi dan Pemasaran Produk	kurangnya link dan tidak menguasai Teknologi untuk pemasaran Kerajinan tangan untuk itu mohon diadakan kegiatan pelatihan pemasaran kerajinan masyarkat Desa	Desa Binturu RT 004, Kab. Tabalong	Akomodir pada pelatihan bidang ukm/industri thn 2024

3. Kecamatan Muara Harus ada 1 usulan :

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	Keterangan
1	Dadang Darmadi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Pembebasan lahan untuk Pasar Tradisional Kecamatan Muara Harus	Desa Tantaringin RT.03, Kab. Tabalong	akomodasi dengan bertahap

4. Kecamatan Muara Uya ada 6 usulan :

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	Keterangan
1	Budianto	Pelayanan Usaha Simpan Pinjam	Belum tersedia layanan simpan pinjam desa	Desa Kampung Baru RT 01,02,03,04, Kab. Tabalong	Sudah di akomodir di Bimtek Perkoperasian thn 2023
2	Ahmad Sunarno	Pemasaran hasil produksi Pertanian	Masih banyaknya kekurang tahuan atau pemahaman tentang bagaimana cara yang efiktif untuk memasarkan hasil produksi agar bisa menguntungkan dan bisa menupang kesejahteraan para petani	Pasar Batu, Kab. Tabalong	pending Konsultasi ke PLUT, Agrobisnis
3	Ahmad Sunarno	Pengembangan Usaha Mikro/ Usaha Kecil	Masih kurang nya perlengkapan usaha yang di butuhkan oleh masyarakat sehingga perlu peningkatan atau pengembrngan usaha bagi, pelaku usaha	Pasar batu, Kab. Tabalong	akomodir TA 2024 (pelatihan limbah kayu)
4	Arsani	Pengembangan Usaha Mikro/ Usaha Kecil	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Kewirausahaan	Desa Santuun Rt.01 Sampai 05, Kab. Tabalong	Pending, konsultasi ke PLUT perihal Pemasaran dan Kewirausahaan tahun 2023 / Akomodir pelatihan pengolahan bolu kopi Tahun 2024 Perubahan
5	Suriansyah	Pengembangan Usaha Mikro/ Usaha Kecil	Minimnya akses pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usaha di lingkungan Desa Simpung Layung.	Desa Simpung Layung, Kab. Tabalong	Akomodir keg. Bidang industri thn 2024
6	Suriansyah	Pelayanan Penerbitan Izin Berkaitan Berusaha	Perlunya bantuan untuk dapat akses Penerbitan Izin Usaha bagi pelaku usaha mikro terkhusus bagi UP2K Desa dan UMKM di Wilayah Desa Simpung Layung	Desa Simpung Layung, Kab. Tabalong	Akomodir keg bidang industri thn 2024

5. Kecamatan Bintang Ara ada 2 usulan :

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	Keterangan
1	Marhadi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Masyarakat kesulitan mendapatkan uang kas karena ATM sangat jauh sehingga perlu dibuat ATM Umum di Pasar Burum	Desa Burum RT. 2, Kab. Tabalong	kerjasama bank
2	Diki Asdie	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Peningkatan Pasar Desa untuk peningkatan ekonomi masyarakat (RT. 03 dan RT. 05)	Dambung Raya, Kab. Tabalong	mohon info kondisi tanah hibah

6. Kecamatan Upau ada 1 usulan :

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	Keterangan
1	Nawiyanto	Penyediaan Prasarana dan Sarana Koperasi	Bantuan Permodalan UKM	Desa Masingai I RT. 06, Kab. Tabalong	Sudah diakomodir pada pendampingan KUR thn 2023

7. Kecamatan Haruai ada 2 usulan :

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	Keterangan
1	Hendrikus Lada	Penyediaan Prasarana dan Sarana Koperasi	Jarak dengan pasar Cukup Jauh , perlu Pengembangan Usaha Mikro	Desa Suriyan RT 01- 05, Kab. Tabalong	survei untuk minta info kondisi lapangan
2	Hendrikus Lada	Pengendalian Harga dan Stok Barang Penting	Kenaikan Harga Barang	Rt 01 sampai 05 Suriyan, Kab. Tabalong	akomodir keg. Pasar murah thn 2024

8. Kecamatan Jaro ada 1 usulan :

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	Keterangan
1	Midra	Pengembangan Usaha Mikro/ Usaha Kecil	Pengembangan UMKM Potensi Desa , Sumber daya yang ada tidak dapat dimanfaatkan.	Desa Garagata, Kab. Tabalong	pending, mohon info produk UMKM

9. Kecamatan Tanjung ada 2 usulan :

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	Keterangan
1	Mahyudin	Pengembangan Usaha Mikro/ Usaha Kecil	1. mixer besar dan hand mixer 2. oven besar 3. kompor gas satu set 4. alat penggiling mie 5.alat akar pinang 6. alat mempres minyak 7. toples besar untuk penyimpanan	desa garunggung, Kab. Tabalong	pending sesuaikan kebutuhan produk
2	Mahyudin	Penyelenggaraan Promosi dan Pemasaran Produk	promosi & pemasaran produk umkm desa	desa garunggung, Kab. Tabalong	akomodir di kegiatan pameran pada bidang industri

10. Kecamatan Tanta ada 1 usulan :

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	Keterangan
1	Mulyadi	Pemasaran hasil produksi Pertanian	Karena Kesulitan Pengangkutan Hasil Usaha Tani (Semangka, Jagung) Karena Lebar Jalan Usaha Tani hanya 1,5 meter jadi perlu Tossa sebanyak 2 (dua) buah	Desa Pulau Ku'u, Kab. Tabalong	Koordinasi dengan Dinas KP2TPH

11. Kecamatan Murung Pudak ada 3 usulan :

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	Keterangan
1	Eddy Rahmanto	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Belum tersedianya tempat dan bangunan Galeri SBM (Sasirangan bunda Maburai)	Desa Maburai RT. 004, Kab. Tabalong	akomodir di gedung dekranasda / plaza umaiyah / POKTA / SOLTAN / Pusat Kuliner
2	Eddy Rahmanto	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	sangat diperlukannya pasar desa mengingat tingginya mobilisasi dan perkembangan penduduk di desa maburai	Desa Maburai RT. 01, Kab. Tabalong	akomodir dengan sebelumnya cek kondisi lapangan
3	Eddy Rahmanto	Penyelenggaraan Promosi dan Pemasaran Produk	perlunya pelatihan desain kemasan dan pemasaran produk bagi UMKM	Desa Maburai RT. 001 s/d RT. 011, Kab. Tabalong	konsultasi ke PLUT

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PROVINSI

3.1.1 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

a. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan usaha Kecil

b. Meningkatkan Capaian, Skala dan Produktifitas Usaha Koperasi dan Usaha Kecil
c. Mengembangkan kapasitas SDM Koperasi dan Usaha Kecil, dengan Indikator

Sedangkan sasaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan adalah :

a. Meningkatnya kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil
b. Meningkatnya cakupan, skala dan Produktifitas Usaha Koperasi dan Usaha Kecil
c. Berkembangnya Kapasitas SDM Koperasi dan Usaha Kecil

3.1.2 Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan

Tujuan yang akan dilaksanakan adalah Mengembangkan Sarana Prasarana Strategis Daerah untuk peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Pariwisata, Industri, Sentra Pangan, Perdagangan dan Jasa". Dalam menjabarkan prioritas tersebut, sasaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian pemerintah provinsi Kalimantan Selatan antara lain Peningkatan produksi menuju sentra pangan dan Pengembangan Industri.

3.1.3 Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan

Dinas Perdagangan dengan sasaran Meningkatkan perdagangan dan jasa sambil menjaga pemerataan, tentunya ada isu-isu yang melatar belakangi. Isu Strategis Prioritas yaitu Belum Meratanya Struktur Perekonomian Daerah

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Perubahan menyesuaikan dengan tujuan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024. Tujuan yang akan dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	
				Satuan	2024

1	Memajukan perekonomian daerah yang didukung oleh pengembangan sumber daya alam dan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan di sektor industri kecil, menengah dan koperasi	Persentase koperasi aktif	Persen	59
			Pertumbuhan Usaha Mikro	Persen	0,27
			Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	11,23
		Berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	9,21

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2024 Perubahan adalah sebanyak 15 program dan 24 kegiatan serta 34 Sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp 42.805.863.660,- (*Empat Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*) termasuk Gaji dengan dana APBD.

Berdasarkan pelaksanaan Rencana Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Perubahan ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung urusan Wajib dan Pilhan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Kabupaten Tabalong dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaen Tabalong Tahun 20234diwujudkan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Rumusan rencana dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Perubahan
dan Prakiraan maju Tahun 2025
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja 2023				Catatan Penting	PRAKIRAAN RENCANA MAJU	
			Lokasi	Target Kinerja	Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
Bidang Koperasi									
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif		62,75%				62,75%	
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tabalong	63 koperasi	76.659.860	APBD		63 koperasi	76.937.000
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI (Pemeriksaan Kesehatan)	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	Kab. Tabalong	16 KSP/USP		APBD		16 KSP/USP	

	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		16 KSP/USP	81.107.218			16 KSP/USP	81.400.000
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Terwujudnya SDM Koperasi yang berkualitas	Kab. Tabalong	40%		APBD		40%	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		60 orang	129.277.466			60 orang	129.744.000
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil									
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terfasilitasi Perizinan Usaha Mikro dan Fasilitasi Kemitraan Usaha	Kab. Tabalong	100%		APBD		100%	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		30 Unit Usaha	180.204.757			4 kegiatan	180.855.000

	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terbinanya Para pelaku Usaha Mikro		100%				100%	
5	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Tabalong	200 Unit Usaha	108.813.660	APBD		2 kegiatan	109.206.000
Bidang Industri									
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Konstribusi sektor industri terhadap PDRB		11,51%				11,57%	
6	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Tabalong	1 Dokumen	637.383.000	APBD		1 Dokumen	639.684.000
7	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah perizinan berusaha industri yang difasilitasi dengan yang dikeluarkan oleh instansi terkait secara elektronik	Kab. Tabalong	70%		APBD		70%	

	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah perizinan berusaha industri yang difasilitasi dengan yang dikeluarkan oleh instansi terkait secara elektronik		1 Dokumen	26.502.000			1 Dokumen	26.598.000
8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri	Kab. Tabalong	100%		APBD		100%	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		1 Dokumen	26.327.000			1 Dokumen	26.422.000
Bidang Perdagangan dan Kemetrologian									
9	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentasi rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	Kab. Tabalong	88%		APBD		88%	

	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, PusatPerbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik		2 Dokumen	16.416.000			2 Dokumen	22.000.000
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang		3 Dokumen	12.630.000			3 Dokumen	17.000.000
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1 Dokumen	28.150.000			1 Dokumen	18.402.000
10	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Konstribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Kab. Tabalong	9,21		APBD		9,21	

	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		3 Laporan	10.630.000			3 Laporan	10.603.000
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yangBerdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		10 Laporan	96.783.000			10 Laporan	97.171.000
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		2 Laporan	96.783.000			2 Laporan	97.171.000
11	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah produk unggulan daerah yang siap ekspor	Kab. Tabalong	60%		APBD		60%	

	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		50 Pelaku Usaha	93.220.000			50 Pelaku Usaha	93.557.000
12	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase jumlah alat UTTP dipasar dan SPBU yang ditera / tera ulang	Kab. Tabalong	69%		APBD		69%	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		1717 UTTP	245.889.000			1717 UTTP	246.777.000
Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perdagangan									
13	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pemenuhan indikator pasar Tipe A kriteria SNI 8152:2015	Kab. Tabalong	85,15%		APBD		85,15%	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		5 Unit	5.546.171.338			5 Unit	5.570.835.860
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		1 Dokumen	770.254.337			1 Dokumen	741.391.140
Sekretariat									

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Layanan Kesekretariatan		B				B	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.		100%	15.399.746			100%	41.754.717
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tabalong	12 bulan	487.600.025	APBD		12 bulan	449.197.460
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Kendaraan Dinas R4 dan R2		12 bulan	229.531.226			12 bulan	433.810.688
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12 bulan	303.155.000			12 bulan	573.769.320

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Perubahan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya." (*Pasal 1 Angka 32 UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan*).

Untuk Tahun 2024 Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mendapatkan dana sebesar Rp42.805.863.660,- (*Empat Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*) termasuk Gaji dengan dana APBD. Rencana Kerja dan Pendanaan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PERUBAHAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TABALONG

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Tahun										Bertambah / (Berkurang)	
						Sebelum					Setelah						
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						Rp20.868.080.836,00	Rp21.937.782.824,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.805.863.660,00	Rp25.757.806.058,00	Rp27.773.996.792,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.531.802.850,00	Rp10.725.939.190,00	20.04
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	Rp16.443.272.283,00	Rp241.888.487,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.685.160.770,00	Rp18.112.375.003,00	Rp809.493.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.921.868.611,00	Rp2.236.707.841,00	11.82
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	Rp16.443.272.283,00	Rp241.888.487,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.685.160.770,00	Rp18.112.375.003,00	Rp809.493.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.921.868.611,00	Rp2.236.707.841,00	11.82
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Rp15.137.616.323,00	Rp241.888.487,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.379.504.810,00	Rp15.987.813.251,00	Rp809.493.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.797.306.859,00	Rp1.417.802.049,00	8.44
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Rp71.620.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.620.000,00	Rp195.673.042,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.673.042,00	Rp124.053.042,00	63.40
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp71.620.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.620.000,00	Rp195.673.042,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.673.042,00	Rp124.053.042,00	63.40
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rp12.104.478.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.104.478.000,00	Rp12.493.911.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.493.911.000,00	Rp389.433.000,00	3.12
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp12.104.478.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.104.478.000,00	Rp12.493.911.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.493.911.000,00	Rp389.433.000,00	3.12
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rp669.933.697,00	Rp241.888.487,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp911.822.184,00	Rp1.037.209.583,00	Rp635.790.589,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.673.000.172,00	Rp761.177.988,00	45.50
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp209.933.697,00	Rp241.888.487,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp451.822.184,00	Rp309.558.008,00	Rp635.790.589,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp945.348.597,00	Rp493.526.413,00	52.21
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp460.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp460.000.000,00	Rp727.651.575,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp727.651.575,00	Rp267.651.575,00	36.78
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rp1.559.494.379,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.559.494.379,00	Rp1.478.929.379,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.478.929.379,00	(Rp80.565.000,00)	(5.45)
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp308.809.340,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp308.809.340,00	Rp325.089.340,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp325.089.340,00	Rp16.280.000,00	5.01

2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp351.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp351.600.000,00	Rp357.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp357.100.000,00	Rp5.500.000,00	1.54
2	17	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp87.461.639,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.461.639,00	Rp90.281.639,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.281.639,00	Rp2.820.000,00	3.12
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp811.623.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp811.623.400,00	Rp706.458.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp706.458.400,00	(Rp105.165.000,00)	(14.89)
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rp732.090.247,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp732.090.247,00	Rp782.090.247,00	Rp173.703.019,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp955.793.266,00	Rp223.703.019,00	23.40
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp531.612.959,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp531.612.959,00	Rp531.612.959,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp531.612.959,00	Rp0,00	0.00
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp200.477.288,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.477.288,00	Rp250.477.288,00	Rp173.703.019,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp424.180.307,00	Rp223.703.019,00	52.74
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Rp76.937.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp76.937.000,00	Rp74.564.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.564.520,00	(3.18)
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Rp76.937.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp76.937.000,00	Rp74.564.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.564.520,00	(3.18)
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Rp76.937.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp76.937.000,00	Rp74.564.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.564.520,00	(3.18)
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Rp91.400.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp91.400.000,00	Rp91.148.923,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.148.923,00	(0.28)
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Rp91.400.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp91.400.000,00	Rp91.148.923,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.148.923,00	(0.28)
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp91.400.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp91.400.000,00	Rp91.148.923,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.148.923,00	(0.28)
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Rp139.744.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp139.744.000,00	Rp176.038.349,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp176.038.349,00	20.62
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Rp139.744.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp139.744.000,00	Rp176.038.349,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp176.038.349,00	20.62
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp139.744.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp139.744.000,00	Rp176.038.349,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp176.038.349,00	20.62
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Rp180.854.960,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp180.854.960,00	Rp164.694.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp164.694.960,00	(9.81)
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Rp180.854.960,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp180.854.960,00	Rp164.694.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp164.694.960,00	(9.81)
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Rp89.999.960,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp89.999.960,00	Rp81.919.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.919.960,00	(9.86)
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Rp90.855.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp90.855.000,00	Rp82.775.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.775.000,00	(9.76)
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Rp816.720.000,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp816.720.000,00	Rp1.618.115.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.618.115.000,00	49.53

2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Rp816.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp816.720.000,00	Rp1.618.115.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.618.115.000,00	49.53
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Rp336.504.495,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp336.504.495,00	Rp761.592.495,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp761.592.495,00	55.82
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Rp480.215.505,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp480.215.505,00	Rp856.522.505,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp856.522.505,00	43.93
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	Rp4.424.808.553,00	Rp21.695.894.337,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.120.702.890,00	Rp7.645.431.055,00	Rp26.964.503.184,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.609.934.239,00	24.53
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	Rp2.982.441.053,00	Rp21.461.644.337,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.444.085.390,00	Rp5.023.975.568,00	Rp26.953.403.184,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.977.378.752,00	23.56
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Rp57.402.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.402.000,00	Rp69.666.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.666.000,00	17.60
3	**30**	**02**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	Rp22.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.000.000,00	Rp22.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.000.000,00	0.00
3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp22.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.000.000,00	Rp22.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.000.000,00	0.00
3	**30**	**02**	**2.02**		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	Rp17.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.000.000,00	Rp24.784.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.784.000,00	31.41
3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Rp17.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.000.000,00	Rp24.784.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.784.000,00	31.41
3	**30**	**02**	**2.05**		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	Rp18.402.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.402.000,00	Rp22.882.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.882.000,00	19.58
3	30	02	2.05	0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Rp18.402.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.402.000,00	Rp22.882.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.882.000,00	19.58
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Rp2.298.669.053,00	Rp21.461.644.337,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.760.313.390,00	Rp3.349.589.407,00	Rp26.868.267.738,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.217.857.145,00	21.37
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Rp1.526.427.403,00	Rp21.461.644.337,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.988.071.740,00	Rp2.324.503.511,00	Rp26.868.267.738,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.192.771.249,00	21.25
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp1.526.427.403,00	Rp21.461.644.337,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.988.071.740,00	Rp2.324.503.511,00	Rp26.868.267.738,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.192.771.249,00	21.25
3	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Rp772.241.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp772.241.650,00	Rp1.025.085.896,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.025.085.896,00	24.67
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp747.241.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp747.241.650,00	Rp1.000.085.896,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.085.896,00	25.28
3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	0.00
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Rp234.413.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.413.000,00	Rp1.181.493.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.181.493.000,00	80.16
3	**30**	**04**	**2.01**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Rp16.913.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.913.000,00	Rp60.781.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.781.000,00	72.17
3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	0.00
3	30	04	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp6.913.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.913.000,00	Rp50.781.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.781.000,00	86.39
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Rp197.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp197.500.000,00	Rp1.100.712.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.100.712.000,00	82.06

3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp43.460.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.460.000,00	Rp67.508.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.508.000,00	35.62
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Rp45.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.960.000,00	Rp57.138.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.138.000,00	19.56
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp108.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.080.000,00	Rp976.066.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp976.066.000,00	88.93
3	**30**	**04**	**2.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	0.00
3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	0.00
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Rp93.557.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.557.000,00	Rp86.487.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.487.000,00	(8.17)
3	**30**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Rp93.557.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.557.000,00	Rp86.487.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.487.000,00	(8.17)
3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Rp93.557.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.557.000,00	Rp86.487.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.487.000,00	(8.17)
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Rp298.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp298.400.000,00	Rp336.740.161,00	Rp85.135.446,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp421.875.607,00	29.27
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Rp298.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp298.400.000,00	Rp336.740.161,00	Rp85.135.446,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp421.875.607,00	29.27
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp251.220.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp251.220.000,00	Rp289.560.161,00	Rp85.135.446,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp374.695.607,00	32.95
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Rp47.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.180.000,00	Rp47.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.180.000,00	0.00
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	Rp1.442.367.500,00	Rp234.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.676.617.500,00	Rp2.621.455.487,00	Rp11.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.632.555.487,00	36.31
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Rp1.313.407.500,00	Rp228.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.542.107.500,00	Rp2.498.045.487,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.498.045.487,00	38.27
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Rp1.313.407.500,00	Rp228.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.542.107.500,00	Rp2.498.045.487,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.498.045.487,00	38.27
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp101.300.000,00	Rp228.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp330.000.000,00	Rp59.838.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.838.400,00	(451.49)
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp1.212.107.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.212.107.500,00	Rp2.438.207.087,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.438.207.087,00	50.29
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	Rp68.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.800.000,00	Rp68.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.800.000,00	0.00
3	**31**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	Rp68.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.800.000,00	Rp68.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.800.000,00	0.00
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Rp24.878.281,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.878.281,00	Rp24.878.281,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.878.281,00	0.00
3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Rp43.921.719,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.921.719,00	Rp43.921.719,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.921.719,00	0.00

3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Rp60.160.000,00	Rp5.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.710.000,00	Rp54.610.000,00	Rp11.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.710.000,00	0.00
3	**31**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Rp60.160.000,00	Rp5.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.710.000,00	Rp54.610.000,00	Rp11.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.710.000,00	0.00
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Rp60.160.000,00	Rp5.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.710.000,00	Rp54.610.000,00	Rp11.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.710.000,00	0.00

BAB V
PENUTUP

Sebelum adanya penggabungan antara Dinas Koperasi dan UMKM dengan Dinas Perindustrina dan Perdagangan, pada tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong melaksanakan beberapa kegiatan strategis diantaranya berupa Pembangunan Pasar Modern dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar lainnya, pelayanan tera/tera ulang, melakukan pelatihan untuk para IKM berbahan dasar lokal, memfasilitasi IKM dalam hal rekomendasi perijinan, rekomendasi ijin usaha perdagangan serta kegiatan pendukung lainnya dan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong juga telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti pelatihan bagi pengurus koperasi, pengawasan dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan pada seluruh koperasi di Kabupaten Tabalong, pembinaan UMKM, sosialisasi perizinan.

Dengan adanya penggabungan dinas menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang semakin baik dalam tugasnya membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dalam hal ini urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan dan urusan perindustrian.

RENJA PERUBAHAN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TABALONG

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini dapat diselesaikan

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong tahun 2024 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024, untuk menjalankan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Dokumen Perubahan Renja ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong beserta program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan. Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran berjaalan.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon koreksi, saran dan masukan dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong ini dapat bermanfaat dan diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanjung, Juli 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tabalong,

Ir. H. Muhamad Noor Rifani, SH, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19721220 199803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI..... iii
BAB I.....1
PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan.....3
1.4 Sistematika Penulisan.....5
BAB II 6
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan Ii Tahun Berkenaan 6
2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024.....6
2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024.....8
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 188
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah..... 199
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD..... 221
BAB III.....29
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 29
BAB IV.....30
PENUTUP 30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahun berjalan yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perencanaan Kerja Pemerintah Daerah. Adapun substansi dari Renja Perubahan dimaksud adalah Penyesuaian Indikator Kinerja/Sub kegiatan, Kelompok Sasaran serta Pagu Indikatif.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan bulan Juni 2024 serta capaian Rencana Strategis (Renstra), capaian program dan kegiatan, indikatif pagu anggaran perkegiatan yang mengalami perubahan baik yang akan di tambah, dikurang ataupun bergeser.

Rencana Kerja Perubahan disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD Perubahan) dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten.

Rencana Kerja Perubahan ini sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP), rencana kerja anggaran perangkat daerah yang telah melalui proses pembahasan dan persetujuan oleh tim eksekutif dan legislatif selanjutnya diproses untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan APBD Perubahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2024 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Pencanan Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

14 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 29);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah :

1. Penyesuaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong;
2. Penambahan anggaran Bidang IKP dan e-Govermen dan Aplikasi dan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
3. Penyusuaian Kode Rekening, Pergeseran anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
5. Kelompok Sasaran Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2024

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah kebijakan dan acuan untuk :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) dan Rencana Perjanjian Kinerja Tahunan;
2. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika / Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada tahun anggaran 2024
4. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antara Sekretariat, Bidang-Bidang serta antar instansi terkait;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistimatika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai DenganTriwulan II Tahun Berkenaan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun selain berpedoman dengan Perubahan RKPD, juga berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan. Dalam hal ini dilakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan ke II Tahun 2024 dengan mengacu APBD Tahun 2024 yang sudah disahkan

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024

2.1.1.1 Kesesuaian Program Antara Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan APBD Tahun 2024, terdapat kesesuaian 100%. Artinya bahwa jumlah program dalam renja sama dengan jumlah program yang ada dalam APBD, yaitu ada 5 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

2.1.12 Kesesuaian Renja Perubahan Tahun 2024 Terhadap APBD Induk Tahun 2024

Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan yang ada pada rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan APBD Tahun 2024, tidak mengalami perubahan yaitu terdapat 12 Kegiatan baik pada Renja Perubahan 2024 maupun pada Induk APBD 2024.

2.1.1.3 Kesesuaian Sub Kegiatan Antara Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap sub kegiatan yang ada di renja perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan APBD Induk tahun 2024, berjumlah sama yaitu 30 Sub Kegiatan.

2.1.1.4 Kesesuaian Pagu Anggaran Antara Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Anggaran Renja perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 sebesar Rp. 23.626.572.727,-

sedangkan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika berdasar APBD (Induk) Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 21.768.252.719,- Terdapat selisih Anggaran antara APBD dengan Renja Perubahan 2024 sebesar

Rp. 1.858.320.008,-

seiring dengan proses penganggaran yang berjalan. Hasil evaluasi kesesuaian jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran antara renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1. dibawah ini

Tabel 2. 1

Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dengan APBD 2024

No	Uraian	Renja Perubahan 2024	APBD Induk 2024
1	Program	5	5
2	Kegiatan	12	12
3	Sub Kegiatan	30	30
4	Pagu Anggaran	Rp. 23.626.572.727,-	Rp. 21.768.252.719,-

Tabel 2. 2 Perbandingan Anggaran, Program, Kegitan dan Sub Kegiatan pada Renja dan APBD Tahun 2024

Perangkat Derah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Renja Perubahan 2024		APBD Induk 2024	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indukatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A	9.669.299.171	Nilai AKIP A	8.505.932.402
2.16.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	A	73.575.000	A	73.575.000
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	73.575.000	7 Dok	73.575.000
2.16.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan tepat waktu	100%	6.660.095.000	100%	6.264.483.000
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	6.660.095.000	28 Orang	6.264.483.000
2.16.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas SDM	100%	303.500.000	100%	155.000.000
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	60.000.000	30 Paket	60.000.000
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	26 Orang	243.500.000	19 Orang	95.000.000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	100%	826.440.282	100%	586.904.659
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	27.877.900	6 Paket	27.877.900

2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	106.866.282	4 Paket	101.955.602
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Dok	19.087.100	3 Dok	15.868.157
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	10.800.000	12 Dok	10.800.000
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105 Lap	661.809.000	80 Lap	430.403.000
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah		**342.002.781**		123.295.776
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	342.002.781	11 Unit	123.295.776
2.16.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	100%	**796.623.341**	100%	782.611.200
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Lap	298.200.000	72 Lap	298.200.000
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	126 Lap	498.423.341	126 Lap	484.411.200
2.16.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	**667.062.767**	100%	520.062.767
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 unit	374.510.000	26 unit	227.510.000
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Paket	257.172.767	10 Paket	257.172.767
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	29 Unit	35.380.000	29 Unit	35.380.000

		Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			**7.356.722.496**	100%	**6.976.722.496**
2.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Informasi yang dikomunikasikan	100%	**7.356.722.496**	100%	**6.976.722.496**
2.16.02.2.01.02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi publik	40 Dok	121.357.496	40 Dok	60.357.496
2.16.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	7920 Dokumen	3.226.523.000	7920 Dokumen	3.737.523.000
2.16.02.2.01.07	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	33 Layanan	4.008.842.000	33 Layanan	3.178.842.000
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			**5.692.363.864**		**5.477.338.972**
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan e-Goverment dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya	100%	**4.045.402.026**	100%	**3.412.755.568**
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daera	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	68 Unit	4.045.402.026	68 Unit	3.412.755.568,-
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan e-Goverment dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya	100%	**1.646.961.838**	100%	**2.064.583.404**
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dok	379.445.640	3 Dok	379.445.640
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektron	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	411.520.214	3 Unit	577.596.780
2.16.03.2.02.09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Elektronik	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	4 Dokumen	855.995.984	4 Dokumen	1.107.540.984
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			**546.878.832**		**612.498.420**
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			**546.878.832**		**612.498.420**

2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	**546.878.832**	100%	**612.498.420**
2.20.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	6 Dok	228.165.800	6 Dok	349.686.000
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	146 Orang	101.220.000	146 Orang	77.775.440
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dok	76.705.756	1 Dok	97.061.320
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	41 Perangkat Daerah	140.787.276	41 Perangkat Daerah	87.975.660
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			**361.308.364**		**195.760.429**
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			**361.308.364**		**195.760.429**
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	100%	**361.308.364**	100%	**195.760.429**
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3 Dok	101.866.153	3 Dok	117.958.200
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Lap	197.129.192	1 Lap	61.609.200
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	41 OPD	62.313.019	41 OPD	16.193.029
						21.768.252.719

Berdasarkan data perbandingan antara Renja Perubahan 2024 dan APBD 2024 pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan pada APBD disusun masih mengacu pada Renja, hal ini dapat dilihat dari persentase kesesuaian Program sebesar 100 persen, persentase kesesuaian kegiatan sebesar 100 persen dan persentase kesesuaian sub kegiatan sebesar 100% persen. Namun ada perbedaan total Anggaran Renja Perubahan 2024 dan APBD Induk 2024 ini disebabkan Penambahan dana pada Bidang IKP Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Publik yaitu belanja videotron outdoor P5 di batalkan di ubah menjadi pengadaan videotron indoor, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan Spesifikasi : Advetorial/Lapsus Media Lokal Bulanan, Belanja Konsultansi Spesifikasi : Belanja Konsultan Perencanaan Renovasi Kantor LPPL Kab. Tabalong, Belanja Sewa Videotron Spesifikasi : Belanja Sewa Videotron Untuk Peringatan Puncak Hari Jadi Kabupaten Tabalong, Hadiah Lomba dan Honor Dewan Juri Lomba Reels Video antar SKPD. Sedangkan pada Bidang Penyelenggaraan e-Goverment dan Aplikasi pada Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah terdapat penambahanan dana untuk pembelian alat jaringan untuk menunjang Pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Tabalong, pemeliharaan Tower Jaringa Intra Pemerintah, pembelian firewall server aplikasi maupun server jaringan serta pemeliharaan firewall, penambahan *Bandwidht* Jaringan Intra Pemerintah, dan perjalanan dinas untuk peningkatan kompetensi SDM TIK pada Bidang Penyelenggaraan e-Goverment dan Aplikasi. Pada Bidang Pengembangan Kota Cerdas (Smartcity) pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas Penghapusan Belanja Tower Triangle dan Pengurangan Sebagian Alat Alat Jaringan, Penambahan Biaya Master Plan Smartcity Tahun 2024-2029, Penambahan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dan Luar Kabupaten untuk Koordinasi, Konsultasi dan Pelatihan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Kota Cerdas Di Bidang Statistik dan Persandian, pada Sub.Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik

Sektoral Belanja Tenaga Ahli dibatalkan dan ada penambahan item Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, perjalanan dinas untuk koordinasi, konsultasi dan pelatihan. Di Sub.Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, ada penambahan perjalanan dinas untuk koordinasi, konsultasi dan pelatihan. Dan di Sub.Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral ada penambahan Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia serta Belanja Sosialisasi, Kursus/Pelatihan, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan pada Bagian Sekretariat sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ada Penambahan Kontribusi dan pengalihan kontribusi bidang ke sekretariat. pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ada Penambahan Perjalanan Dinas untuk keperluan Bimtek-Bimtek dan Workshop. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ada ada Pengalihan dana dari Bidang Smart City untuk keperluan pembelian Laptop Teknis, Printer dan TV yang keperuntukannya pada Bidang Smart City. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor ada beberapa aitem yang tidak teranggarkan pada induk yaitu Stan Pameran, Hadiah Pameran Hari Jadi , Kudapan, Kain Batik Tabalong untuk Hari jadi Kabupaten Tabalong, Penambahan daya tahan tubuh, pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mana pada anggaran Induk 2024 tidak terkafer dan ada beberapa Penyesuaian/Penempatan Kode Rekening Belanja ke Sub.Kegiatan yang sesuai.

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, penilaian hasil pelaksanaan Renja menggunakan data realisasi pelaksanaan APBD sebagai acuan. Berikut rekapitulasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sampai triwulan II tahun 2024

Tabel 2. 3 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sampai Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Target/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d tw II Tahun 2024			Catatan
			Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		21.768.252.719		7.477.271.033	*34,35*	47%	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP A	8.505.932.402	Nilai AKIP A	3.469.851.110	40,79	50%	
2.16.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	73.575.000	7 Dok	16.144.330	21,94	50%	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.575.000	7 Dok	16.144.330	21,94	50%	
2.16.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan tepat waktu	6.264.483.000	10%	2.948.217.450	47,06	50%	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.264.483.000	28 Orang	2.948.217.450	47,06	50%	
2.16.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas SDM	155.000.000	100%	36.950.000	23,84	50%	
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60.000.000	30 Paket	0	0,00	0%	
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	95.000.000	19 Orang	36.950.000	38,89	50%	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	586.904.659	100%	165.214.109	28,15	50%	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	27.877.900	6 Paket	6.427.000	23,05	50%	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	101.955.602	4 Paket	15.069.200	14,78	50%	

2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15.868.157	3 Dok	2.504.436	15,78	50%	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10.800.000	12 Dok	1.220.000	11,30	50%	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430.403.000	80 Lap	139.993.473	32,53	50%	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	123.295.776		0	0,00	0%	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	123.295.776	11 Unit	0	0,00	0%	
2.16.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	782.611.200	100%	215.846.403	27,58	50%	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	298.200.000	72 Lap	84.690.403	28,40	50%	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	484.411.200	126 Lap	131.156.000	27,08	50%	
2.16.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	520.062.767	100%	87.478.818	16,82	50%	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	227.510.000	26 unit	80.624.712	35,44	50%	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	257.172.767	10 Paket	2.284.106	0,89	50%	

2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35.380.000	29 Unit	4.570.000	12,92	50%	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		**6.976.722.496**	100%	**2.280.124.095**	32,68	50%	
2.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Informasi yang dikomunikasikan	**6.976.722.496**	100%	**2.280.124.095**	32,68	50%	
2.16.02.2.01.02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi publik	60.357.496	40 Dok	23.284.600	38,58	50%	
2.16.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3.737.523.000	7920 Dokumen	1.376.577.223	36,83	50%	
2.16.02.2.01.07	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3.178.842.000	33 Layanan	880.262.272	27,69	50%	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		**5.477.338.972**		**1.599.319.268**	29,20	50%	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan e-Goverment dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya	**3.412.755.568**	100%	**1.071.875.412**	31,41	50%	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daera	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	3.412.755.568,-	68 Unit	1.071.875.412		50%	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan e-Goverment dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya	**2.064.583.404**	100%	**527.443.856**	25,55	50%	
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	379.445.640	3 Dok	223.731.321	58,96	50%	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektron	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	577.596.780	3 Unit	133.333.555	15,38	50%	
2.16.03.2.02.09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Elektronik	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1.107.540.984	4 Dokumen	170.378.980	12,82	50%	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		**612.498.420**		**78.501.075**	12,82	50%	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		**612.498.420**		**78.501.075**	12,82	50%	

2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	**612.498.420**	100%	**78.501.075**	9,88	50%	
2.20.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	349.686.000	6 Dok	34.554.275	45,44	50%	
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	77.775.440	146 Orang	35.340.000	0,00	50%	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	97.061.320	1 Dok		9,78	50%	
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	87.975.660	41 Perangkat Daerah	8.606.800	25,27	50%	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		**195.760.429**		**49.475.485**	25,27	50%	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		**195.760.429**		**49.475.485**	25,27	50%	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	**195.760.429**	100%	**49.475.485**	41,94	50%	
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	117.958.200	3 Dok	49.475.485	40,79	50%	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	61.609.200	1 Lap	0	0,00	0%	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	16.193.029	41 OPD	0	0,00	0%	

Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai triwulan II diatas diolah berdasarkan data pada Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SI-MOLEK. Evaluasi Renja dimaksudkan untuk mengindentifikasi sejauh mana capaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja serta implikasi yang timbul, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk tindakan perencanaan selanjutnya.

Berdasarkan data pada tabel 2.2 tersebut, dapat dilihat bahwa dari sisi anggaran, Dinas Komunikasi dan Informatika telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 7.477.271.033. atau sekitar 34,35% persen dari total anggaran untuk tahun 2024. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif masih rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena pelaksanaannya memang dijadwalkan pada triwulan III dan IV

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas diantaranya dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Berdasarkan data pada tabel 2.3, secara umum pelaksanaan sebagian besar kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait capaian kinerja sampai dengan triwulan II dan memerlukan tindak lanjut adalah sebagai berikut :

2.2.1 Beberapa Indikator Kinerja baik Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja 2024 belum seluruhnya selaras dengan perubahan Renstra 2019-2024 yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena penyusunan Renja 2024 dilakukan sebelum ditetapkannya Perubahan Renstra pada tanggal 24 Desember 2021 Dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja pada Renja agar selaras dengan Perubahan Renstra

2.2.2 Masih terdapat rincian belanja yang masuk pada sub kegiatan yang tidak tepat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian/pemindahan belanja dari sub kegiatan satu ke sub kegiatan lainnya yang sesuai

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong tidak terlepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Berdasarkan perkembangan yang terjadi pada tahun 2024, dapat diidentifikasi beberapa isu yang berkembang dan harus ditindaklanjuti sebagai berikut:

2.3.1 Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Aplikasi

- Pengembangan dan penguatan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah yang belum tercover.
- Terjadi peningkatan kebutuhan penggunaan internet di seluruh Organisasi Perangakat Daerah (OPD) dan unit pendukung serta penambahan titik lokasi free wifi di lingkungan sekolah menengah atas dan sekolah-sekolah kejuruan.
- Peningkatan pengamanan Infrastruktur TIK meliputi Server Aplikasi maupun server Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- Peningkatan kompetensi SDM IT dalam hal penangan insiden serangan malware terhadap infrastruktur TIK.
- Melanjutkan proses migrasi seluruh aplikasi dan sistem informasi dari serverfarm Diskominfo ke Pusat Data Nasional Kementerian KOMINFO RI.

2.3.1.1 Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Kota Cerdas

- Belum optimalnya teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi
- Besarnya tingkat kebutuhan jaringan internet bagi masayarakat

2.3.2 Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong mengangkat beberapa isu strategis

sebagai berikut :

- Penguatan Media Center yang menjadi pusat informasi Pemerintah Kabupaten;.
- Penyediaan layanan informasi website online.
- Pembentukan masyarakat yang informatif dan inovatif melalui penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat.
- Pembentukan dan pemberdayaan kolompok informasi masyarakat (KIM) yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab.
- Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat.
- Penyelenggaraan Penyiaran TV Tabalong dan Radio FM Suara Tabalong yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumberdaya seoptimal mungkin, memenuhi standar kualitas layanan prima;
- Pengembangan sumberdaya aparatur di Bidang IKP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong yang menguasai tentang teknologi informasi, jurnalistik, dokumentasi, kehumasan dan lainnya.

2.3.3 Bidang Statistik dan Persandian. Untuk

- Belum optimalnya penyediaan data statistik yang valid dan akurat sesuai dengan kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan, khususnya statistik sectoral
- Masih rendahnya kapasitas SDM bidang statistik sectoral
- Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM SanTel (Sandi - Telekomunikasi) dalam menjaga keamanan informasi

- Masih rendahnya kesadaran pemangku kepentingan akan pentingnya pengamanan jaringan komunikasi dan pengamanan jiwa
- Masih kurangnya sarana prasarana persandian

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Bahwa Rancangan Perubahan RKPD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, maka dalam review ini akan dilakukan proses membandingkan rancangan perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perubahan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Kode	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program Kegiatan Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indukatif	Program Kegiatan Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indukatif	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Diskominfo	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A	9.418.527.402	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Diskominfo	Nilai AKIP A	9.669.299.171	
2.16.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	A	73.575.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	73.575.000	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	73.575.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.575.000	
2.16.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo	Terlaksananya penatausahaan keuangan tepat waktu	100%	6.264.483.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo	Terlaksananya penatausahaan keuangan tepat waktu	6.660.095.000	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	6.264.483.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.660.095.000	
2.16.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskominfo	Meningkatnya Kualitas SDM	100%	393.150.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskominfo	Meningkatnya Kualitas SDM	303.500.000	
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Diskominfo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	76.650.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Diskominfo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60.000.000	
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diskominfo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	26 Orang	316.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diskominfo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	243.500.000	

2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	100%	761.149.659	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	826.440.282	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	27.877.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	27.877.900	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	101.955.602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	106.866.282	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Diskominfo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Dok	15.868.157	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Diskominfo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	19.087.100	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	10.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10.800.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105 Lap	604.648.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	661.809.000	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	Tersedianya barang milik daerah		303.575.776	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	Tersedianya barang milik daerah	**342.002.781**	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	303.575.776	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	342.002.781	

2.16.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	100%	861.621.200	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	**796.623.341**	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Lap	298.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	298.200.000	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	126 Lap	563.421.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	498.423.341	
2.16.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	760.972.767	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	667.062.767	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 unit	468.420.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	374.510.000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Paket	257.172.767	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	257.172.767	

2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	35.380.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35.380.000	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo			7.356.722.496	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo		7.356.722.496	
2.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Presentase Informasi yang dikomunikasikan	100%	7.356.722.496	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Presentase Informasi yang dikomunikasikan	7.356.722.496	
2.16.02.2.01.02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi publik	40 Dok	528.357.496	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi publik	121.357.496	
2.16.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	7920 Dokumen	2.711.523.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3.226.523.000	
2.16.02.2.01.07	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Diskominfo	Jumlah Layanan Hubungan Media	33 Layanan	4.116.842.000	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Diskominfo	Jumlah Layanan Hubungan Media	4.008.842.000	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo			5.409.831.980	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo		**5.692.363.864**	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan e-Goverment dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya	100%	3.662.755.568	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan e-Goverment dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya	**4.045.402.026**	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daera	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra	68 Unit	3.662.755.568	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra	4.045.402.026	

			Pemerintah Daerah					Pemerintah Daerah		
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan e-Goverment dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya	100%	1.747.076.412	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan e-Goverment dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya	1.646.961.838	
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dok	379.445.640	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	379.445.640	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektron	Diskominfo	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	511.596.780	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektron	Diskominfo	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	411.520.214	
2.16.03.2.02.09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Elektronik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	4 Dokumen	856.033.992	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Elektronik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	855.995.984	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Diskominfo			550.118.420	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Diskominfo		546.878.832	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Diskominfo			550.118.420	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Diskominfo		546.878.832	
2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	100%	550.118.420	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	546.878.832	

			yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah					yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah		
2.20.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	6 Dok	217.686.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	228.165.800	
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Diskominfo	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	146 Orang	91.395.440	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Diskominfo	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	101.220.000	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dok	98.061.320	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	76.705.756	
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	41 Perangkat Daerah	142.975.660	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	140.787.276	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Diskominfo			495.760.429	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Diskominfo		361.308.364	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Diskominfo			495.760.429	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Diskominfo		361.308.364	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk	Diskominfo	Persentase Perangkat	100%	495.760.429	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Diskominfo	Persentase Perangkat	361.308.364	

	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi		
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3 Dok	117.958.200	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	101.866.153	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Lap	311.609.200	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	197.129.192	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	41 OPD	66.193.029	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	62.313.019	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan prioritas pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong telah ditetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai yang tertera dalam dokumen rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong periode 2019 – 2024

Adapun Program kerja yang akan mewujudkan prioritas pembangunan yang akan dicapai pada Perubahan tahun 2024 adalah sebanyak 5 (lima) program yang diimplementasikan dalam 12 (dua belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
				9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

		5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10	Lapangan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	8	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
				17	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
				18	Layanan Hubungan Media
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	9	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
				20	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		10	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
				22	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	11	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	23	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
				24	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
				25	Membangun Metadata Statistik Sektoral
				26	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	12	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

			28	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			29	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			30	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3. 1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi Detai	Rencana Tahun 2024 (sebelum perubahan)							Rencana Tahun 2024 (setelah perubahan)				Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Renja 2024			APBD 2024			Perubahan Renja 2024				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo												
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Diskominfo	Nilai AKIP A	A	8.822.422.147	APBD		8.505.932.402	APBD	Nilai AKIP A	A	9.669.299.171	APBDP	
2.16.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	100%	3.172.749	APBD	A	73.575.000	APBD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	100%	73.575.000	APBDP	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dok	3.172.749	APBD	7 Dok	73.575.000	APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	73.575.000	APBDP	
2.16.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo	Terlaksananya penatausahaan keuangan tepat waktu	100%	6.229.396.648	APBD	100%	6.264.483.000	APBD	Terlaksananya penatausahaan keuangan tepat waktu	100%	6.660.095.000	APBDP	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang	6.229.396.648	APBD	28 Orang	6.264.483.000	APBD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	6.660.095.000	APBDP	
2.16.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskominfo	Meningkatnya Kualitas SDM	100%	132.012.000	APBD	100%	155.000.000	APBD	Meningkatnya Kualitas SDM	100%	303.500.000	APBDP	

2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					APBD	30 Paket	60.000.000	APBD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	60.000.000	APBDP	
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diskominfo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	14 Orang	132.012.000	APBD	19 Orang	95.000.000	APBD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	26 Orang	243.500.000	APBDP	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	100%	616.501.104	APBD	100%	586.904.659	APBD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	100%	826.440.282	APBDP	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	5.064.894	APBD	6 Paket	27.877.900	APBD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	27.877.900	APBDP	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	148.050.908	APBD	4 Paket	101.955.602	APBD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	106.866.282	APBDP	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Diskominfo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.221.166	APBD	3 Dok	15.868.157	APBD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Dok	19.087.100	APBDP	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4.164.136	APBD	12 Dok	10.800.000	APBD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	10.800.000	APBDP	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41 Laporan	450.000.000	APBD	80 Lap	430.403.000	APBD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105 Lap	661.809.000	APBDP	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	Tersedianya barang milik daerah	100%	175.000.000	APBD		123.295.776	APBD	Tersedianya barang milik daerah	100%	342.002.781	APBDP	

2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskominfo	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	156.151.132	APBD								
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	18.848.868	APBD	11 Unit	123.295.776	APBD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	342.002.781	APBDP	
2.16.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	100%	1.025.950.000	APBD	100%	782.611.200	APBD	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	100%	796.623.341	APBDP	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	154.500.000	APBD	72 Lap	298.200.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Lap	298.200.000	APBDP	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	871.450.000	APBD	126 Lap	484.411.200	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	126 Lap	498.423.341	APBDP	
2.16.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	640.389.646	APBD	100%	520.062.767	APBD	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	667.062.767	APBDP	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	353.565.665	APBD	26 unit	227.510.000	APBD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 unit	374.510.000	APBDP	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	251.823.963	APBD	10 Paket	257.172.767	APBD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Paket	257.172.767	APBDP	

			Dipelihara/ Direhabilitasi											
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35.000.018	APBD	29 Unit	35.380.000	APBD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	35.380.000	APBDP	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo		100%	5.770.802.000	APBD	100%	6.976.722.496	APBD			7.356.722.496	APBDP	
2.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Presentase Informasi yang dikomunikasikan	100%	5.770.802.000	APBD	100%	6.976.722.496	APBD	Presentase Informasi yang dikomunikasikan	100%	7.356.722.496	APBDP	
2.16.02.2.01.02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi publik	40 Dokumen	60.357.496	APBD	40 Dok	60.357.496	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi publik	40 Dok	121.357.496	APBDP	
2.16.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	7920 Dokumen	2.222.303.000	APBD	7920 Dokumen	3.737.523.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	7920 Dokumen	3.226.523.000	APBDP	
2.16.02.2.01.07	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Diskominfo	Jumlah Layanan Hubungan Media	33 Layanan	3.488.141.504	APBD	33 Layanan	3.178.842.000	APBD	Jumlah Layanan Hubungan Media	33 Layanan	4.008.842.000	APBDP	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo			4.085.590.664	APBD		5.477.338.972	APBD			5.692.363.864	APBDP	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan e-Goverment dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya	100%	2.880.368.301	APBD	100%	3.412.755.568	APBD	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan e-Goverment dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya	100%	4.045.402.026	APBDP	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokur Penyelenggaraan Komunikasi Intra Daerah	86 Unit	2.880.368.301	APBD	68 Unit	3.412.755.568,-	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	68 Unit	4.045.402.026	APBDP	

2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan e-Goverment dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya	100%	1.205.222.363	APBD	100%	2.064.583.404	APBD	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan e-Goverment dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya	100%	1.646.961.838	APBDP	
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				380.000.000	APBD	3 Dok	379.445.640	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dok	379.445.640	APBDP	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektron	Diskominfo	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Aplikasi	250.000.000	APBD	3 Unit	577.596.780	APBD	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	411.520.214	APBDP	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Diskominfo	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	10 Layanan	195.000.000									
2.16.03.2.02.09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Elektronik	Diskominfo	Jumlah Dokume Inovasi Diimplementasika dengan Masterpla	4 Dokumen	380.222.363	APBD	4 Dokumen	1.107.540.984	APBD	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	4 Dokumen	855.995.984	APBDP	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Diskominfo			596.429.020	APBD		612.498.420	APBD			546.878.832	APBDP	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Diskominfo			596.429.020	APBD		612.498.420	APBD			546.878.832	APBDP	
2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik	100%	596.429.020	APBD	100%	612.498.420	APBD	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	546.878.832	APBDP	

			dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah											
2.20.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah Dokumen dan Pengumpulan, Analisis dan Dise Statistik Sektoral	1 Dokumen	256.090.600	APBD	6 Dok	349.686.000	APBD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	6 Dok	228.165.800	APBDP	
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Diskominfo	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	146 Orang	133.701.440	APBD	146 Orang	77.775.440	APBD	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	146 Orang	101.220.000	APBDP	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral			1 Dok	118.661.320	APBD	3 Dok	97.061.320	APBD	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	11 Dok	76.705.756	APBDP	
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			41 Perangkat Daerah	87.975.660	APBD	41 Perangkat Daerah	87.975.660	APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	41 Perangkat Daerah	140.787.276	APBDP	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Diskominfo			319.523.000	APBD		195.760.429	APBD			361.308.364	APBDP	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Diskominfo			319.523.000	APBD		195.760.429	APBD			361.308.364	APBDP	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	100%	319.523.000	APBD	100%	195.760.429	APBD	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	100%	361.308.364	APBDP	
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			3 Dok	117.958.400	APBD	3 Dok	117.958.200	APBD	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3 Dok	101.866.153	APBDP	

2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo		1 Laporan dan 2 Bimtek	136.609.200	APBD	1 Lap	61.609.200	APBD	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Lap	197.129.192	APBDP	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	41 OPD	64.955.400	APBD	41 OPD	16.193.029	APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	41 OPD	62.313.019	APBDP	

BAB IV

PENUTUP

Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Tahun 2024 ini dilaksanakan dengan memperhatikan catatan-catatan, kaidah-kaidah serta rencana tindaklanjut pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tabalong 2024 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tabalong sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tabalong 2024 merupakan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tabalong yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah (RKAP-PD) sebagai dokumen perencanaan program/kegiatan dan anggaran tahun 2024. Seluruh komponen dinas diwajibkan untuk menjabarkan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tabalong 2024 kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Unit/ satuan tugasnya masing-masing.
3. Sumber dana untuk menjalankan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tabalong 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik.
4. Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi di tingkat pelaksanaan dilakukan secara berjenjang dan melekat mulai dari jajaran paling bawah sampai jajaran paling atas pada masing-masing unsur satuan unit kerja.
5. Fungsi Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi dikoordinasikan oleh Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.
6. Pengendalian dan Evaluasi Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tabalong 2024 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tabalong. Pada akhir tahun

dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tabalong 2024, yang merupakan evaluasi kinerja tahunan yang terintegrasi dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2019-2024, sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Kerja tahun berikutnya.

7. Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tabalong 2024 disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan situasi dan kondisi faktual.
8. Dokumen ini dapat dilakukan review dan perubahan mengikuti pola dan perkembangan yang terjadi berdasarkan isu-isu strategis global, nasional dan daerah setelah melalui hasil evaluasi dan kajian yang objektif.
9. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas DisKomunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan:

Tanjung, Juli 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tabalong,

Ir. H. Muhamad Noor Rifani, SH, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19721220 199803 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

RANCANGAN KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong telah selesai menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024, yang memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan sampai dengan triwulan satu dan Capaian Renstra, tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikatif pembiayaan tahun anggaran 2024

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah bagian dari proses perencanaan kerja pertahun terhadap program kegiatan sub kegiatan indikator target maupun pagu anggaran dikarenakan adanya pergeseran maupun perubahan didalam implementasi pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Akhirnya dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini, maka langkah-langkah yang diambil dalam mewujudkan sasaran dan tujuan pembangunan di Kabupaten Tabalong dapat tercapai, terlaksana dan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan

Tanjung, September 2024

Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Tabalong,

TUMBUR PARULIAN MANALU,S.STP,MT

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19780508 199612 1 002

DAFTAR ISI

			Halaman
Kata Pengantar			i
Daftar isi			ii
BAB	I	PENDAHULUAN	4
		1.1. Latar Belakang	4
		1.2. Landasan Hukum	6
		1.3. Maksud dan Tujuan	6
		1.4. Sistematika Penulisan	
BAB	II	EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2024	8
		2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai denganTriwulan II	8
		2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	14
BAB	III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	18
BAB	IV	PENUTUP	32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2024, rencana kerja anggaran perubahan perangkat daerah yang apabila telah melalui proses pembahasan dan persetujuan oleh tim eksekutif dan legislatif selanjutnya diproses untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (DPAP-PD) sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan APBDP pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Tabalong memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan di sektor Transportasi dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 yaitu : **" Menuju Kabupaten Tabalong yang Lebih Agamis, Sejahtera dan Mandiri "**.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong dalam tataran kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum akan mengimplentasikan nilai-nilai yang terkandung pada misi pertama yakni "***Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Lebih Agamis***, namun dalam tataran kebijakan teknis akan sinergis dengan menetapkan beberapa program strategis yang berfokus dan berkaitan langsung dengan ke tiga yaitu :

- **Mendorong Kemajuan Daerah**

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Pencanan Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
16. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Tabalong;
17. Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor : B- /BAPPEDA/000.7/ /2024 tanggal Maret 2024 perihal Penysunan Perubahan RKPD dan Renja SKPD Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah untuk mengetahui :

1. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 yang mengalami pergeseran / perubahan
2. Lokasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 yang mengalami pergeseran / perubahan
3. Indikator dan Target Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong yang mengalami pergeseran / perubahan
4. Kelompok Sasaran Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 yang mengalami pergeseran / perubahan
5. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Perubahan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 yang mengalami pergeseran / perubahan

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah kebijakan dan acuan dalam :

1. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Perubahan (RKAP-PD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (DPAP-PD) dan Rencana Perjanjian Kinerja Perubahan;
2. Penilaian Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan / Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
3. Memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada tahun anggaran 2024
4. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antara Sekretariat, Bidang-Bidang dan UPTD serta antar instansi terkait;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republi Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perencanaan Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan
BAB II Evaluasi Renja Dinas Perhubungan s/d Triwulan II Tahun 2024
BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan
BAB IV Penutup
LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sampai dengan triwulan 2 (Dua) posisi bulan Juni Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.1.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong

Belanja	Anggaran (Rp)		
	Anggaran 2024	Realisasi sd Juni 2024	% Capaian
Pendapatan Daerah	1.550.000.000	1.263.815.376	81,54
Belanja Daerah	23.577.694.793	6.881.077.534	29,18
- Belanja operasi	22.423.929.574	6.834.789.245	30,48
- Belanja Pegawai	8.149.613.700	3.223.174.740	39,55
- Belanja Barang dan Jasa	9.952.792.235	3.611.614.505	36,29
- Belanja Modal (BM) :	1.153.765.219	46.288.289	4,01
- BM Peralatan dan mesin	1.153.765.219	46.288.289	4,01
- BM Gedung dan bangunan	-	-	-
- BM Jalan,Jaringan,dan Irigasi	-	-	-

Sedangkan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Renja Tahun 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1.2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong s/d Juni 2024 dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024

PD : Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sub kegiatan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan sub Kegiatan 2024			Target Program dan Kegiatan sub kegiatan renstra 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
				Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024 s/d Juni 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Ke giatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Predikat / Nilai AKIP BB	BB	BB	BB			BB		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu	21 dokumen	21dokumen	21 dokumen	12 dokumen	57,49	21 dokumen	12 dokumen	57,49
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	21 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	12 dokumen	57,49	21 dokumen	12 dokumen	57,49
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN*	35 orang/bulan	35 orang/bulan	35 orang/bulan	35 orang/bulan	48,73	35 orang/bulan	35 orang/bulan	48,73
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	35 orang/bulan	35 orang/bulan	35 orang/bulan	35 orang/bulan	48,73	35 orang/bulan	35 orang/bulan	48,73
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	7 Orang	7 Orang	7 Orang	6 Orang	57	7 Orang	6 Orang	57
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	7 Orang	7 Orang	7 Orang	6 Orang	57	7 Orang	6 Orang	57
Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan*								

	BangunanKantor yang Disediakan *Tersedianya alat listrik dan elektronik*								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	21 Paket	21 Paket	21 Paket	10 Paket	24	21 Paket	10 Paket	24
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	107 Paket	107 Paket	107 Paket	50 Paket	23	107 Paket	50 Paket	23
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	13 Paket	13 Paket	13 Paket	7 Paket	23	13 Paket	7 Paket	23
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	175 Laporan	175 Laporan	175 Laporan	97 Laporan	72,04	175 Laporan	97 Laporan	72,04
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan* *Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan* *Tersedianya Jasa peralatan dan perlengkapan kantor*								
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan* *Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	6 Laporan	50
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan* *Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	6 Laporan	50
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya*								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	33 Unit	33 Unit	33 Unit	12 Unit	36,4	33 Unit	12 Unit	36,4
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin* *Lainnya yang Dipelihara*	67 Unit	67 Unit	67 Unit	16 Unit	50	67 Unit	16 Unit	50
Pemeliharaan/Rehabilitasi	*Jumlah Gedung Kantor dan*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*								
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase terhadap perlengkapan jalan yang diusulkan dan direalisasikan*	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia*	100 Unit	100 Unit	100 Unit	25 Unit	25	100 Unit	25 Unit	25
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*	200 Unit	200 Unit	200 Unit	50 Unit	25	200 Unit	50 Unit	25
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan danPelayanan Terminal Penumpang Tipe C*	60 Persen	60 Persen	60 Persen					
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	*Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Persentase Terhadap Penyelenggaran danPembangunan Fasilitas Parkir yang di Izinnyaditerbitkan*		100 Persen	100 Persen					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	6 Laporan	50
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yangtelah melakukan pengujian*	4500 KBWU	4500 KBWU	4500 KBWU			4500 KBWU		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia*	6000 Unit	6000 Unit	6000 Unit			6000 Unit		
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengadaan Pemasangan*		1074 Unit	1074 Unit			1074 Unit		
Pengadaan dan Pemasangan	*Jumlah Perlengkapan Jalan*	1	1 Dokumen	1	1	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	*dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan*	Dokumen		Dokumen	Dokumen				
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Koordinasi dan Sinkornisasi Penilai Hasil Andalalin*								
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan		
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Tersedianya data laporan hasil pelaksanaan inspeksi, audit danpemantauan terminal*								
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	*Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	6 Laporan	50
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	*Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	6 Laporan	50
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	*Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	6 Laporan	50
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau BarangAntar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia*								
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia*	52 Unit	52 Unit	52 Unit	38 Unit	73	52 Unit	38 Unit	73
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kawasan Angkutan PerkotaanKewenangan Kabupaten yang di tetapkan Jumlah Dokumen Kebijakan*								

	Penetapan KawasanPerkotaan untuk Angkutan Perkotaan KewenanganKabupaten/Kota								
Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50	1 Dokumen	1 Dokumen	50
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	*Sinkronisasi PengawasanPelaksanaan Izin Penyelenggaraan AngkutanOrang dalam Trayek yang dilaksanakan*								
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50	1 Laporan	1 Laporan	50

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Tabel 2.2.1
Isu Strategis Kementrian Perhubungan
dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel

Isu Strategis Kementrian Perhubungan	Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
- Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal	- Pengembangan transportasi diarahkan pada pemantapan Sistem Transportasi Regional dan Nasional yang handal, aman nyaman dan selamat sesuai dengan perannya sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan serta untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa
- Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah	- Tujuan pembangunan transportasi adalah untuk mewujudkan transportasi regional dan nasional yang terpadu, tertib dan lancar, aman, nyaman, cepat, terjangkau, efektif dan efisien. Untuk mendukung produksi dan perdagangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangn kerja dan kesempatan usaha, pengembangan wilayah, peningkatan dinamika pembangunan serta untuk memperlancar mobilitas manusia, barang dan jasa agar mampu mengantisipasi perkembangan perdagangan global dengan melibatkan peran serta masyarakat dan usaha nasional
- Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi *backlog* dan *bottleneck* kapasitas infrastruktur transportasi	- Secara spesifik mendorong upaya pembangunan/pengembangan bandar udara di Kabupaten Tabalong yakni Bandar Udara Warukin Tanjung
- Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi	
- Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.	

Tabel 2.2.2.
Isu Strategis Kabupaten Tabalong dan Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong dalam renstra 2019-2024

Isu Strategis Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong
- Kurangnya SDM berlatar belakang teknis perhubungan
- Lajunya pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan pembangunan infrastruktur jalan menjadikan **ancaman kemacetan** dan **meningkatnya kecelakaan lalulintas** di jalan raya
- Meningkatnya tarap kehidupan di masyarakat menyebabkan munculnya tuntutan masyarakat agar tersedianya angkutan masal yang **aman, nyaman, cepat, selamat dan terjangkau**
- Jarak tempuh perjalan darat yang cukup lama ditempuh baik ke ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Balikpapan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tabalong perlu ditindak lanjuti dengan menyediakan moda transportasi pilihan yang cepat seperti **kereta api** dan **pesawat terbang**
- Pengelolaan SDM Perhubungan yang **mumpuni dan handal** serta berkelanjutan untuk melaksanakan program dan kebijakan perhubungan yang peduli lingkungan, Isu dunia pengurangan emisi karbon, berimplikasi terhadap aplikasi teknologi angkutan yang ramah lingkungan, terutama angkutan diperkotaan
- Penerapan **reformasi birokrasi** dan peningkatan **pelayanan publik** dengan dasar pemerintahan yang Isu nasional tuntutan terhadap keterbukaan informasi publik dan pemerataan informasi secara luas serta perkembangan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang demikian pesat di tambah lagi dengan kompleksitas jenis pelayanan terhadap perubahan dan perkembangan lingkungan internal dan eksternal Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan professional

TUJUAN	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.1 Meningkatnya layanan jasa perparkiran, kelengkapan fasilitas keselamatan jalan / sungai /danau, fungsi halte, terminal, stasiun, jembatan penyebrangan orang dan pelabuhan sungai / danau;	1.1.1 Peningkatan manajemen dan penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan/sungai, danau;	1.1.1.1 Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan/sungai/ danau.
		1.1.2 Tersedianya terminal angkutan penumpang dan rest area pada setiap Kabupaten/ Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek;	1.1.2.1 Revitalisasi, pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan pelayanan terminal angkutan darat.
		1.1.3 Tersedianya jasa parkir yang didukung dengan tempat/gedung parkir yang memadai dan refresentatif di Kabupaten/Kota.	1.1.3.1 Revitalisasi, pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan pelayanan jasa perparkiran.
		1.1.4 Tersedianya pelabuhan untuk melayani kapal sungai dan danau;	1.1.4.1 Mendorong dan memfasilitasi pembangunan pelabuhan untuk melayani kapal sungai dan danau.
		1.1.5 Tersedianya jembatan penyebrangan orang (JPO);	1.1.5.1 Pembangunan jembatan penyebrangan orang (JPO) pada area yang tingkat kepadatan lalulintasnya tinggi.
	1.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas kendaraan bermotor yang laik jalan;	1.2.1 Peningkatkan kinerja, kualitas dan kuantitas serta akreditasi pengujian kendaraan bermotor;	1.2.1.1 Meningkatkan kesadaran masyarakat pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk menguji kendaraannya secara teratur dan berkelanjutan.
			1.2.1.2 Meningkatkan pelayanan, sarana, prasarana dan fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standart kementrian perhubungan.
	1.3 Meningkatnya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas jalan / sungai / danau;	1.3.1 Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas jalan / sungai / danau;	1.3.1.1 Meningkatkan pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas.
	1.4 Meningkatnya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan, sungai / danau;	1.4.1 Peningkatan keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan/sungai/danau;	1.4.1.1 Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna jalan tentang keamanan dan keselamatan lalu lintas.
			1.4.1.2 Memperkuat intensitas, kajian, pengawasan dan pengendalian keselamatan lalu lintas

			jalan/sungai/danau.
	1.5 Meningkatnya aksesbilitas dan pergerakan distribusi orang dan barang/jasa;	1.5.1 Peningkatan kelancaran system pelayanan dan peran angkutan transportasi perkotaan dan pedesaan;	1.5.1.1 Revitalisasi dan pengembangan angkutan perkotaan dan pedesaan.
			1.5.1.2 Membangun system tranportasi perkotaan dan pedesaan yang terintegrasi dengan RTRW dan ramah lingkungan.
			1.5.1.3 Penyusunan Norma, Standar, pedoman dan kriteria pelayanan angkutan.
		1.5.2 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek;	1.5.2.1 Pembangunan dan pemeliharaan halte pada jalur trayek angkutan kota/desa.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERHUBUNGAN

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan prioritas pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong telah ditetapkan program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada perubahan tahun melalui 2 (dua) program 16 (enam belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima sub kegiatan , sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten	1 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			11 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	7 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	13 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			14 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
		8 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	15 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
		9 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	16 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
		10 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	17 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		11 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	18 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

			Kabupaten/Kota		
		12	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	19	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
		13	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	20	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
				21	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
				22	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
		14	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	23	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		15	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
		16	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Tahun 2024				Usulan Perubahan Tahun 2024			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Alasan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				16.975.772.233		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		23.603.705.813	
Bidang Perhubungan				16.975.772.233		Bidang Perhubungan		23.603.705.813	
Dinas Perhubungan				16.975.772.233		Dinas Perhubungan		23.603.705.813	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Predikat / Nilai AKIP BB	Dinas Perhubungan	BB	12.244.110.124	APBD	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Predikat / Nilai AKIP BB	13.932.775.870	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu	Dinas Perhubungan	21 dokumen	80.754.445	APBD	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	Penyusunan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu	130.754.445	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dinas Perhubungan	21 dokumen	80.754.445	APBD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	130.754.445	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN*	Dinas Perhubungan	35 orang/bulan	6.587.667.000	APBD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	7.593.878.000	

							Tersediaan ya Gaji dan Tunjangan ASN		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Dinas Perhubungan	35 orang/bulan	6.587.667.000	APBD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	7.593.878.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Terlaksananya Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	Dinas Perhubungan	100%	76.314.000	APBD	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Terlaksanaanya Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	115.900.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	Dinas Perhubungan	7 Orang	76.314.000	APBD	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	115.900.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Dinas Perhubungan	100%	717.339.301	APBD	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	*Persentase Terlaksanaanya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	1.024.531.455	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Dinas Perhubungan	21 Paket	26.659.758	APBD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang*	26.659.758	

							Disediakan		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Dinas Perhubungan	107 Paket	389.188.779	APBD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	385.903.933	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Dinas Perhubungan	13 Paket	34.999.764	APBD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	34.999.764	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Dinas Perhubungan	175 Laporan	266.491.000	APBD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	576.986.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Dinas Perhubungan	100 %	4.227.210.370	APBD	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	*Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4.536.561.644	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Dinas Perhubungan	12 Laporan	314.213.870	APBD	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	447.631.144	

							yang Disediaka n		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Dinas Perhubunga n	12 Laporan	3.912.996.500	APBD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n*	4.068.930.500	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera***	Dinas Perhubunga n	100%	554.824.008	APBD	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksan anya Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daera***	531.150.326	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	Dinas Perhubunga n	33 Unit	441.730.000	APBD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	436.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Dinas Perhubunga n	67 Unit	46.590.000	APBD	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	46.590.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang*	Dinas Perhubunga n	1 Unit	66.505.008	APBD	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan*	48.560.326	

	Dipelihara/Direhabilitasi						*Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Dinas Perhubungan		4.731.662.109	APBD	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		9.670.929.943	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase terhadap perlengkapan jalan yang diusulkan dan direalisasikan*	Dinas Perhubungan	100 %	1.139.999.835	APBD	***Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota***	*Persentase terhadap perlengkapan jalan yang diusulkan dan direalisasikan*	1.139.999.835	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia*	Dinas Perhubungan	100 Unit	939.999.842	APBD	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia*	939.999.842	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*	Dinas Perhubungan	200 Unit	199.999.993	APBD	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*	199.999.993	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan danPelayanan Terminal Penumpang Tipe C*	Dinas Perhubungan	60 Persen	24.584.109	APBD	***Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C***	*Terlaksanaanya Peningkatan Pengelolaan danPelayanan Terminal Penumpang Tipe C*	24.584.109	
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	*Jumlah Rencana Pembangunan Terminal*	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	24.584.109	APBD	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal	*Jumlah Rencana Pembangu*	24.584.109	

	Penumpang Tipe C yang Tersusun					Penumpang Tipe C	*nan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun*		
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Persentase Terhadap Penyelenggaran danPembangunan Fasilitas Parkir yang di Izinnyaditerbitkan*	Dinas Perhubungan	100 %	75.083.249	APBD	***Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir***	*Persentase Terhadap Penyelenggaran danPembangunan Fasilitas Parkir yang di Izinnyaditerbitkan*	75.083.249	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dinas Perhubungan	12 Laporan	75.083.249	APBD	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota*	75.083.249	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yangtelah melakukan pengujian*	Dinas Perhubungan	4500 KBWU	1.050.000.000	APBD	***Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor***	*Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yangtelah melakukan pengujian*	1.190.160.245	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian*	Dinas Perhubunga	6000 Unit	1.050.000.000	APBD	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala	*Jumlah Sarana*	1.190.160.245	

	Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	n				Kendaraan Bermotor	*dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia*		
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	***Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota***	Dinas Perhubungan	100 %	545.759.662	APBD	***Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota***	***Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota***	5.002.425.015	
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	*Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan*	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	545.759.662	APBD	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	*Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan*	5.002.425.015	
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	***Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota***	Dinas Perhubungan	100 %	45.000.000	APBD	***Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota***	***Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan***	45.000.000	

							Kabupaten/Kota		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin*	Dinas Perhubungan	1 Laporan	45.000.000	APBD	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin*	45.000.000	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	***Persenatase Terlaksaananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan***	Dinas Perhubungan	100 %	333.314.880	APBD	***Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan***	***Persenatase Terlaksaananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan***	400.762.880	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	*Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal*	Dinas Perhubungan	12 Laporan	77.999.708	APBD	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	*Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal*	126.449.708	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	*Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota*	Dinas Perhubungan	12 Laporan	174.344.252	APBD	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	*Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota*	184.592.252	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	*Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan*	Dinas Perhubungan	12 Laporan	80.970.920	APBD	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan	*Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantau*	89.720.920	

	Perusahaan Angkutan Umum					Angkutan Umum	*an Sistem Manajeme n Keselamat an Perusahaa n Angkutan Umum*		
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	Dinas Perhubunga n	100 %	1.419.974.973	APBD	***Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentas e Penyediaa n Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupate n/Kota***	1.694.977.209	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia*	Dinas Perhubunga n	52 Unit	1.419.974.973	APBD	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota yang Tersedia*	1.694.977.209	
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui	***Persenatase Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan***	Dinas Perhubunga n	100 %	37.945.410	APBD	***Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan***	***Persenata se Penetapan Kawasan***	37.945.410	

Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	***Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***					***Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***		
Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	37.945.410	APBD	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten /Kota*	37.945.410	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	***Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota***	Dinas Perhubungan	100 %	59.000.991	APBD	***Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota***	***Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota***	59.991.991	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam*	Dinas Perhubungan	1 Laporan	59.000.991	APBD	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawas*	59.991.991	

	Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota	*an Pelaksana an Izin Penyeleng garaan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenang an Kabupaten /Kota*		

- Pagu induk 2024 : Rp. 16.975.772.233
- Pagu pergeseran 2024 : Rp. -
- Pagu usulan perubahan 2024 Rp. 23.603.705.813

BAB IV
PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Daerah Tahun 2024 ini dilaksanakan dengan memperhatikan catatan-catatan, kaidah-kaidah serta rencana tindaklanjut pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong 2024 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong 2024 merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Dinas Perhubungan Daerah (RKAP-PD) sebagai dokumen perencanaan program/kegiatan dan anggaran perubahan tahun 2024. Seluruh komponen dinas diwajibkan untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong 2024 kedalam Rencana Kerja dan Anggaran perubahan Unit/ satuan tugasnya masing-masing.
3. Sumber dana untuk menjalankan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Tabalong.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik.
5. Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi di tingkat pelaksanaan dilakukan secara berjenjang dan melekat mulai dari jajaran paling bawah sampai jajaran paling atas pada masing-masing unsur satuan unit kerja.
6. Fungsi Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi dikoordinasikan oleh Sekretariat Dinas Perhubungan Daerah.
7. Pengendalian dan Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong 2024 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Kepala Dinas Perhubungan yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong. Pada akhir tahun dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan perubahan Renja Dinas

Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong 2024, yang merupakan evaluasi kinerja tahunan yang terintegrasi dengan Renstra Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Kerja tahun berikutnya.

8. Perubahan Renja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong 2024 disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan situasi dan kondisi faktual.
9. Dokumen ini dapat dilakukan review dan perubahan mengikuti pola dan perkembangan yang terjadi berdasarkan isu-isu strategis global, nasional dan daerah setelah melalui hasil evaluasi dan kajian yang objektif.
10. Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Renja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024, organisasi penyelenggara Renja dimaksud seperti tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.1.
Organisasi penyelenggara Renja

No.	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Penanggungjawab Program dan Kebijakan Strategis
2.	2.1 Sekretaris	Penanggungjawab Program Kegiatan dan Dana Indikatif
	2.2 Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	
	2.3 Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	
	2.4 Kepala Bidang Keselamatan	
	2.5 Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	
	2.6 Kepala UPT Bandar Udara Warukin	
3.	Para pemangku jabatan struktural Eselon III, IV dan PNS golongan III di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Penanggungjawab Pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan

Tanjung, September 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong,

TUMBUR PARULIAN MANALU,S.STP,MT

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19780508 199612 1 002

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kabupaten Tabalong

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

RENCANA KINERJA PERUBAHAN (RENJA)

2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhaanahu Wa Ta'aalaa atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya jualah akhirnya sebuah Laporan Rencana Kinerja (RENJA) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong Tahun 2024 telah selesai.

Dokumen ini juga tersusun karena Kerjasama dari berbagai pihak khususnya Sekretaris Dinas PMD, Kasubbag Perencanaan, para Kepala Bidang selaku penyelenggara pembangunan sesuai dengan kewenangannya masing-masing, oleh sebab itu kepada semua pihak yang aktif menunjukkan fungsi jabatannya diucapkan terimakasih dan penghargaan atas kontribusi masukannya dengan harapan Laporan Rencana Kinerja (RENJA) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tabalong Tahun 2024 ini dapat memenuhi kebutuhan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan yang kita laksanakan.

Demikian pengantar dari kami, atas upaya dari semua penyelenggara pembangunan di sektor Pemerdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Tabalong diucapkan terimakasih.

Tanjung, Juni 2024

Kepala Dinas PMD
Kabupaten Tabalong,

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dr. H. Erwan, SH, M.AP
NIP.19660921 1987031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 6

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja..... 12

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kinerja..... 13

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 14

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai dengan Triwulan II..... 14

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 20

2.3 Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi..... 24

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 26

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 38

BAB IV PENUTUP 45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perubahan tahun 2024 ini adalah gambaran rencana yang akan dicapai selama beberapa bulan ke depan. Rencana kinerja ini merupakan hasil kesepakatan semua pemangku kepentingan terkait dengan urusan SKPD. Renja ini selaras dengan renstra KL dan Provinsi. Dengan renja ini diharapkan akan dapat ditindaklanjuti harapan-harapan yang ada dalam rumusan yang telah disepakati baik secara internal SKPD maupun dengan pihak terkait di luar SKP. Renja Perubahan tahun 2024 ini berpedoman pada RKPD dan Renstra periode 2019-2024 sehingga target yang akan dicapai susah sesuai dengan apa yang direncanakan.

Seiring dengan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2024, hasil pengendalian pelaksanaan renja menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Renja DPMD Tahun 2024.

Selain berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024, Perubahan Renja DPMD Tahun 2024 juga disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan.

Untuk menjamin akurasi kegiatan SKPD berjalan secara efektif dan efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya

tujuan yang ditetapkan maka diperlukan Rencana Program dan Kegiatan Daerah yang baik. Perencanaan Program dan Kegiatan Daerah harus memiliki strategi sehingga perencanaan yang dihasilkan bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kabupaten Tabalong dapat memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berkesinambungan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong yang mempunyai tujuan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) lima tahun kedepan adalah **”MENINGKATNYA KEBERDAYAAN DESA”.**

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara SKPD, Pemerintah Daerah dan DPRD. Untuk mencapai hal tersebut proses Rencana Program dan Kegiatan harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap penyusunan Rencana Kegiatan, pelaksanaan, Evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong melalui tugas-tugasnya memegang prinsip berdasarkan ketentuan yang mengatur setiap bidang tugas. Bidang-bidang tugas tersebut adalah memberikan pelayanan dan pembinaan kepada Pemerintahan Desa.

Dalam rangka mewujudkan ***“good governance”*** serta mendukung kondisi tersebut di atas maka perlu peningkatan kinerja di bidang Pemerintahan desa.

Tugas tersebut baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen kegiatan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain Rencana Program Kegiatan yang baik akan dapat menghasilkan kegiatan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Proses Penyusunan Renja Perubahan SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga Perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan riview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelahaan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi rumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Desa adalah ujung tombak pembangunan wilayah NKRI. Desa kemudian mendapat angurah kebijakan dana desa untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera. Namun yang belum selaras adalah kapasitas Kepala Desa dan Aparat Pemerintahan Desa.

Maka tidaklah berlebihan bila gerak dan dinamika pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menjadi semakin krusial untuk lebih mendapat perhatian oleh semua pemangku kepentingan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebenarnya telah terbagi

habis pada semua sektor baik di tingkat kementerian, di pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota. Hanya saja jika tidak ditangani oleh satu lembaga terkait pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pemerintahan di desa maka akan terjadi pembiayaan yang terlalu besar dalam pelaksanaan nawacita pemerintah.

- Keberadaan lembaga khusus yang menangani pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pemerintahan di desa sangat relevan dengan keadaan sekarang. Hal ini seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Dalam rangka perkuatan kelembagaan yang menangani peningkatan keberdayaan masyarakat dan desa, telah dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah akan terus mendukung berbagai upaya pencapaian visi dan misi pembangunan melalui tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 adalah membantu kepala daerah dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya menekan angka kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat termasuk kaum perempuan dengan melalui kegiatan ekonomi produktif.

- Dalam rangka pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tabalong, terutama dalam menunjang pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tabalong "*Menuju Kabupaten Tabalong yang lebih Agamis, Sejahtera dan Mandiri*". Keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong sebagai salah satu bagian/unit yang dapat menunjang pembangunan daerah dan nasional dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin melalui penataan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Peningkatan Peran serta masyarakat dalam upaya menekan angka kemiskinan.
- Untuk menghadapi berbagai peluang dan tantangan, aktifitas maka konsistensi program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menjadi sangat penting terutama dalam memberikan support bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan tugas terkait.
- Mengingat pentingnya peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam menjembatani berbagai tugas

pemberdayaan masyarakat dan desa maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dituntut melakukan reposisioning peran, tugas dan tanggung jawab masyarakat melalui revitalisasi penataan kelembagaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa, penguatan lembaga usaha ekonomi rakyat, dan pembinaan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat bagi pemerintahan di desa.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia TahunTahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9, Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nmor 80);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014.tentang Desa.
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Berita Negara Tahun 2010 Nomor 02);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa/ Kelurahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penerapan TTG;
19. SK Bupati Tabalong Nomor 188.45/18/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Penerapan dan Pengembangan TTG Kabupaten Tabalong;
20. Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,

Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Derah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017, Nomor 02);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 Tentag Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
27. Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Tabalong tahun 2014-2034;
28. Perda Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 04 Tahun 2019 tentang RPJMD

Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024;

29. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69));
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Tabalong;
32. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 63);

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Perubahan

1. Maksud

Adapun maksud dari penyusunan rencana kerja perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 yaitu:

a. Agar tercipta keselarasan antara rencana kinerja 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Untuk memastikan tersusunnya langkah yang integral, komprehensif, terarah dan sistematis di bidang pemberdayaan demi terwujudnya peningkatan tingkat perkembangan masyarakat dan Desa menuju status desa mandiri.
c. Untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Perubahan 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 adalah memberi arahan operasional bagi pejabat terkait dengan pelaksanaan tugas merumuskan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam penyusunan

perencanaan Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan program dan kegiatan dalam RPJMD Kabupaten Tabalong.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kinerja

Adapun sistematika penulisan Rencana Kinerja (Renja) Perubahan 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang…… 1

1.2 Landasan Hukum …… 6

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja…….. 12

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kinerja……..… 13

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 14

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai dengan Triwulan II…….. 14

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah……..…….. 20

2.3 Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi…….. 24

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD…… 26

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 38

BAB IV PENUTUP 45

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II pada tahun 2024 menunjukan tingkat realisasi keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih rendah yaitu sebesar 39,55% belum mencapai angka 50%. Pada triwulan II tingkat realisasi kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rata-rata sudah mencapai target 50% pada indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Pada Tahun 2024 melaksanakan 4 Program yang dijabarkan dalam 8 Kegiatan serta 26 Sub kegiatan, adapun tingkat capaian realisasi keuangan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Tahun 2024

REKAPITULASI REALISASI BELANJA APBD TA. 2024
PADA *DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TABALONG*

PERIODE TRIWULAN II [APRIL S/D JUNI 2024]

No.	Nama Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)			Realisasi (Rp.)			Sisa Anggaran (Rp.)			Realisasi (%)
		Belanja Operasional	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Operasional	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Operasional	Belanja Modal	Jumlah	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA**	**6,489,704,838.00**	**244,638,807.00**	**6,734,343,645.00**	**1,917,765,655.00**	**-**	**2,836,349,188.00**	**3,653,355,650.00**	**244,638,807.00**	**3,897,994,457.00**	**42.12**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**16,011,256.00**	**-**	**16,011,256.00**	**-**	**-**	**-**	**16,011,256.00**	**-**	**16,011,256.00**	**-**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,373,628.00	-	5,373,628.00	-	-	-	5,373,628.00	-	5,373,628.00	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,637,628.00	-	10,637,628.00	-	-	-	10,637,628.00	-	10,637,628.00	-
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4,928,875,000.00**	**-**	**4,928,875,000.00**	**1,467,714,616.00**	**-**	**2,164,507,457.00**	**2,764,367,543.00**	**-**	**2,764,367,543.00**	**43.91**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,928,875,000.00		4,928,875,000.00	1,467,714,616.00		2,164,507,457.00	2,764,367,543.00	-	2,764,367,543.00	43.91
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**580,964,269.00**	**244,638,807.00**	**825,603,076.00**	**269,023,078.00**	**-**	**357,711,396.00**	**223,252,873.00**	**244,638,807.00**	**467,891,680.00**	**43.33**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,043,637.00	-	16,043,637.00	6,340,360.00	-	6,340,360.00	9,703,277.00	-	9,703,277.00	39.52
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182,597,622.00	244,638,807.00	427,236,429.00	37,816,499.00	-	39,316,499.00	143,281,123.00	244,638,807.00	387,919,930.00	9.20
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13,421,010.00	-	13,421,010.00	10,769,000.00	-	10,769,000.00	2,652,010.00	-	2,652,010.00	80.24
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,640,000.00	-	8,640,000.00	3,600,000.00	-	3,600,000.00	5,040,000.00	-	5,040,000.00	41.67

5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360,262,000.00	-	360,262,000.00	210,497,219.00	-	297,685,537.00	62,576,463.00	-	62,576,463.00	82.63
4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**526,005,396.00**	**-**	**526,005,396.00**	**95,358,408.00**	**-**	**165,035,383.00**	**360,970,013.00**	**-**	**360,970,013.00**	**31.38**
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98,072,796.00	-	98,072,796.00	21,592,876.00	-	34,913,663.00	63,159,133.00	-	63,159,133.00	35.60
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	427,932,600.00	-	427,932,600.00	73,765,532.00	-	130,121,720.00	297,810,880.00	-	297,810,880.00	30.41
5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**437,848,917.00**	**-**	**437,848,917.00**	**85,669,553.00**	**-**	**149,094,952.00**	**288,753,965.00**	**-**	**288,753,965.00**	**34.05**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	253,244,800.00	-	253,244,800.00	82,039,553.00	-	145,464,952.00	107,779,848.00	-	107,779,848.00	57.44
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34,510,000.00	-	34,510,000.00	3,630,000.00	-	3,630,000.00	30,880,000.00	-	30,880,000.00	10.52
3	Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150,094,117.00	-	150,094,117.00	-	-	-	150,094,117.00	-	150,094,117.00	-
II	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**9,391,639,680.00**	**-**	**9,391,639,680.00**	**4,063,627,700.00**	**-**	**4,104,838,386.00**	**5,286,801,294.00**	**-**	**5,286,801,294.00**	**43.71**
1	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**9,391,639,680.00**	**-**	**9,391,639,680.00**	**4,063,627,700.00**	**-**	**4,104,838,386.00**	**5,286,801,294.00**	**-**	**5,286,801,294.00**	**43.71**
1	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	272,079,966.00	-	272,079,966.00	40,590,700.00	-	63,765,900.00	208,314,066.00	-	208,314,066.00	23.44
2	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	9,119,559,714.00	-	9,119,559,714.00	4,023,037,000.00	-	4,041,072,486.00	5,078,487,228.00	-	5,078,487,228.00	44.31
III	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**424,999,874.00**	**-**	**424,999,874.00**	**105,156,700.00**	**-**	**136,839,025.00**	**288,160,849.00**	**-**	**288,160,849.00**	**32.20**
1	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**424,999,874.00**	**-**	**424,999,874.00**	**105,156,700.00**	**-**	**136,839,025.00**	**288,160,849.00**	**-**	**288,160,849.00**	**32.20**
1	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	124,999,918.00	-	124,999,918.00	12,104,200.00	-	30,311,275.00	94,688,643.00	-	94,688,643.00	24.25
2	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	299,999,956.00	-	299,999,956.00	93,052,500.00	-	106,527,750.00	193,472,206.00	-	193,472,206.00	35.51
IV	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**2,859,180,118.00**	**-**	**2,859,180,118.00**	**532,780,876.00**	**-**	**932,425,848.00**	**1,926,754,270.00**	**-**	**1,926,754,270.00**	**32.61**
1	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**2,859,180,118.00**	**-**	**2,859,180,118.00**	**532,780,876.00**	**-**	**932,425,848.00**	**1,926,754,270.00**	**-**	**1,926,754,270.00**	**32.61**
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1,520,768,409.00	-	1,520,768,409.00	444,385,701.00	-	814,285,843.00	706,482,566.00	-	706,482,566.00	53.54

2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	170,132,623.00	-	170,132,623.00	4,746,130.00	-	4,746,130.00	165,386,493.00	-	165,386,493.00	2.79
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	164,657,849.00	-	164,657,849.00	28,565,285.00	-	43,080,285.00	121,577,564.00	-	121,577,564.00	26.16
4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	607,126,131.00	-	607,126,131.00	12,808,260.00	-	12,808,260.00	594,317,871.00	-	594,317,871.00	2.11
5	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	83,281,191.00	-	83,281,191.00	-	-	-	83,281,191.00	-	83,281,191.00	-
6	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	313,213,915.00	-	313,213,915.00	42,275,500.00	-	57,505,330.00	255,708,585.00	-	255,708,585.00	18.36
V	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**2,124,958,904.00**	**-**	**2,124,958,904.00**	**384,534,812.00**	**-**	**505,857,312.00**	**1,619,101,592.00**	**-**	**1,619,101,592.00**	**23.81**
1	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**2,124,958,904.00**	**-**	**2,124,958,904.00**	**384,534,812.00**	**-**	**505,857,312.00**	**1,619,101,592.00**	**-**	**1,619,101,592.00**	**23.81**
1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1,216,416,753.00	-	1,216,416,753.00	172,252,780.00	-	293,575,280.00	922,841,473.00	-	922,841,473.00	24.13
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	151,730,380.00	-	151,730,380.00	3,732,200.00	-	3,732,200.00	147,998,180.00	-	147,998,180.00	2.46
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	447,180,487.00	-	447,180,487.00	188,441,932.00	-	188,441,932.00	258,738,555.00	-	258,738,555.00	42.14
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	309,631,284.00	-	309,631,284.00	20,107,900.00	-	20,107,900.00	289,523,384.00	-	289,523,384.00	6.49
	JUMLAH SELURUHNYA SKPD	**21,290,483,414.00**	**244,638,807.00**	**21,535,122,221.00**	**7,003,865,743.00**	**-**	**8,516,309,759.00**	**12,774,173,655.00**	**244,638,807.00**	**13,018,812,462.00**	**39.55**

Tabel 2.2

Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan Triwulan II Pada Aplikasi Simolek PeDe

OPD	Pagu	Target Kinerja TW 2		Realisasi Kinerja TW 2			Tingkat Capian Kinerja (%)	
		Keuangan(Rp)	Fisik(%)	Keuangan(Rp)	Fisik(%)	% Realisasi Thd Pagu	Keuangan	Fisik
1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	493.954.369.697	246.983.300.791	50	163.590.721.722	43,46	33,12	66,24	86,93
2. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17.035.103.488	9.934.730.213	58,32	4.500.866.436	59,21	26,42	45,3	101,53
3. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	63.515.464.199	31.757.732.117	50	14.421.749.589	22,69	22,71	45,41	45,39
4. DINAS LINGKUNGAN HIDUP	66.270.385.423	40.060.346.460	60,45	17.379.057.550	59,63	26,22	43,38	98,65
5. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.946.573.868	9.001.560.809	60,22	5.847.617.323	46,38	39,12	64,96	77,02
6. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	21.535.122.221	12.921.073.333	60	8.516.309.759	51,02	39,55	65,91	85,04

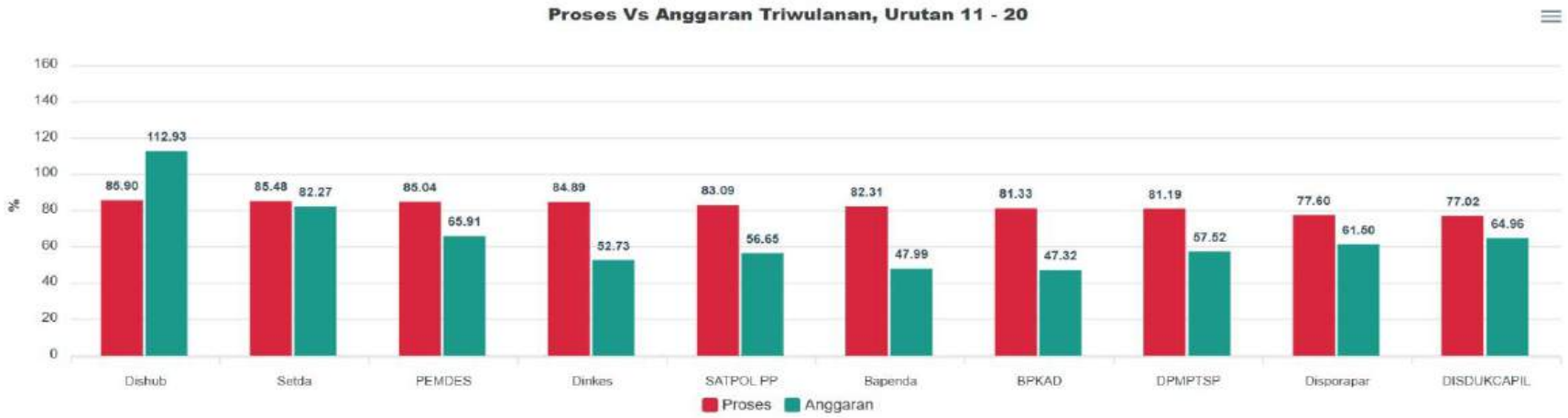

Berikut ini disampaikan penjelasan Evaluasi Program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.1 sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota secara realisasi keuangan pada triwulan II tahun 2024 sebesar 42,12% atau sebesar Rp. 2.836.349.188 dari anggaran sebesar Rp. 6.734.343.645, yang dimana pada program ini terdapat 5 kegiatan dan 13 Sub kegiatan.

2. Program penataan desa secara realisasi keuangan pada triwulan II tahun 2024 sebesar 43,71% atau sebesar Rp. 4.104.838.386 dari anggaran sebesar Rp. 9.391.639.680 yang dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 2 Sub kegiatan.

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa secara realisasi keuangan pada triwulan II tahun 2024 sebesar 32,20% atau sebesar Rp. 288.160.849 dari total anggaran sebesar Rp. 424.999.874, yang dimana program ini terdapat 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.

4. Program administrasi pemerintahan desa secara realisasi keuangan pada triwulan II tahun 2024 sebesar 32,61% atau sebesar Rp 932.425.848 dari total anggaran sebesar Rp. 2.859.180.118 yang dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 6 Sub kegiatan.

5. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat secara realisasi keuangan pada triwulan II tahun 2024 sebesar 23,81% atau sebesar Rp. 505.857.312 dari total anggaran

sebesar Rp. 2.124.958.904, yang dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 4 Sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja adalah gambaran keadaan fisikal tempat kerja, gambaran SDM organisasi dan gambaran hasil dari semua pekerjaan SDM organisasi. Pelayanan Dinas PMD terdiri dari pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung. Tergolong sebagai pelayanan langsung adalah pelayanan konsultasi dan pembinaan lapangan. Sedangkan pelayanan tidak langsung adalah monitoring penyusunan dan regulasi dalam rangka menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi desa-desa di Kabupaten Tabalong berkembang sehingga bisa mencapai kemandirian.

Terkait dengan jumlah kelompok binaan pemberdayaan masyarakat terdapat banyak kelompok binaan yang belum dibina langsung oleh Dinas PMD seperti Rukun Tetangga/ Rukun Warga, karang Taruna, Kelomok Tani, Kelompok Seni dan Budaya, Kelompok Perlindungan Masyarakat Desa dan lain sebagainya, sehingga kelompok LPM ini seperti mau hilang. Kedaan ini sangat tidak diharapkan. Mengingat pentingnya peran KSM dan PSM dalam masyarakat maka ada baiknya dilakukan revitalisasi peran LPM sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat di desa dipandang perlu melakukan revitalisasi peran mereka.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan triwulan II tahun 2024 sudah memberikan hasil yang baik dari segi pembinaan kepada aparatur pemerintah desa di 121 desa yang ada di

Kabupaten Tabalong, penataan kewilayahan juga sudah banyak mengalami progres pembinaan. Dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentu mengalami banyak tantangan terutama banyaknya regulasi-regulasi yang dikeluarakan Kementrian atau Lembaga yang dimana aturan tersebut harus diterapkan atau di implementasikan secepat mungkin terutama yang meyangkut Dana Desa. Selain itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih melakukan banyak upaya untuk menyelesaikan batas desa yang masih bersengketa yang dimana dalam penyelesaian ini juga melibatkan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tabalong.

Mengingat pentingnya peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjembatani berbagai tugas pemberdayaan masyarakat dan desa maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dituntut melakukan reposisioning peran, tugas dan tanggung jawab masyarakat melalui revitalisasi penataan kelembagaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa, penguatan lembaga usaha ekonomi rakyat, dan pembinaan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat bagi pemerintahan di desa.

Terkait dengan tingkat keberdayaan tidak bisa dikatakan sebaga gambaran keberhasilan dan kegagalan Dinas PMD Kabupaten Tabalong. Karena 42 komponen indikator IDM merupakan kinerja seluruh pemangku kepentingan terkait dalam hal ini SKPD-SKPD di Kabupaten Tabalong.

Tabel 2.3

Target Dan Realisasi Capaian Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tabalong

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra						Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Nilai IKM		✓	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	A	
2	Nilai Lakip		✓	BB	BB	BB	BB	BB	A	BB	BB	BB	BB	BB	A	
3	Jumlah BUM Desa yang terbentuk		✓	104	107	110	113	117	121	104	106	110	113	117	121	
4	Persentase BUM Desa yang aktif		✓	55	58	60	65	70	75	55	51	60	65	70	75	
5	Persentase BUM Desa yang berkembang		✓	45	50	55	60	65	75	45	45	55	60	65	75	
6	Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM		✓	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
7	Persentase LPM aktif		✓	5	10	15	20	25	30	5	9	15	20	25	30	
8	Persentase LPM berprestasi		✓	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		✓	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	Persentase PKK aktif		✓	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Posyandu aktif		✓	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan Masyarakat		✓	20	25	30	35	40	45	20	20	30	35	40	45	
13	Persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan Masyarakat		✓	20	25	30	35	40	45	20	20	30	35	40	45	
14	Jumlah prasarana transportasi di desa yang dibangun		✓	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
15	Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk		✓	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	
16	Persentase desa dengan perencanaan desa yang baik		✓	40	50	60	70	80	90	40	47	60	70	80	90	

17	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan dan aset yang baik		✓	40	50	60	70	80	90	40	48	60	70	80	90	
18	Persentase desa dengan administrasi umum desa yang baik		✓	40	50	60	70	80	90	40	41	60	70	80	90	
19	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan dengan baik		✓	40	50	60	70	80	90	40	45,33	60	70	80	90	
20	Persentase cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik		✓	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
21	Jumlah desa yang telah ditetapkan batas wilayahnya		✓	90	93	114	116	121	121	90	93	114	116	121	121	
22	Jumlah kerja sama desa yang dibuat		✓	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu- isu penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMD tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kompetensi sumber daya aparatur desa dan sumberdaya aparatur pembina di Kecamatan dan di Kabupaten.
2. Masih kurangnya Sumber daya yang dimiliki Dinas PMD dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.
3. Sumberdaya aparatur kecamatan yang kurang berfungsi secara optimal.
4. Sumberdaya Aparatur Desa dilihat dari sisi kuantitas dan kualitas masih terbatas untuk bisa lebih berkembang, maju dan mandiri.
5. Pendamping teknis dan pendamping administrasi bagi desa tersedia di Kecamatan-Kecamatan kurang dimanfaatkan desa (Pemerintah Desa).
6. Tingkat inovasi yang masih rendah dalam memanfaatkan peluang dan kesempatan.
7. Regulasi untuk desa agak komplek dan tumpang tindih antara peraturan yang dibuat Kemendagri dan Kemendesa.
8. Tata batas desa belum selesai semua.

Berdasarkan permasalahan diatas isu-isu penting berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Tabalong antara lain adalah:

1. Tata batas desa, kewenangan desa dan kemandirian desa.
2. Efektifitas pemanfaatan dana desa dalam kerangka pencapaian program nawacita menuju sustainable development goals desa.
3. Kecenderungan SKPD/KL melirik dan menggunakan dana desa untuk mencapai kinerjanya.
4. Tata kelola pemerintahan desa yang baik.
5. Tingkat keberdayaan dan ketahanan masyarakat desa masih rendah dalam hal social, ekonomi dan ekologi (seperti eksistensi BUMDes dan LKD).
6. Komptensi aparat pembina desa.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja Dinas PMD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja Dinas PMD Kabupaten Tabalong juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati. Seiring dengan proses perjalanan ada beberapa Program dan Kegiatan yang harus dilakukan penyesuain anggaran untuk dapat mencapai target yang sudah dibuat di awal RKPD. Penyesuaian anggaran tersebut harus dilakukan terutama pada kegiatan TMMD itu membutuhkan penambahan biaya karna anggaran yang tersedia di awal tidak cukup membiayai proses kegiatan TMMD tersebut sampai selesai, untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan semua sudah sesuai cuma perlu dilakukan penyesuaian anggaran.

Review Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4

Reviu Terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024

Pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tabalong

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	**PROGRAM/ KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**PROGRAM/ KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				
	Perencanaan, Penggaran, dan Evluasi Kinerja Perangkat Daerah	**DPMD**	**Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penggaran, dan Evluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 Dikumen**	**16.011.256**	**Perencanaan, Penggaran, dan Evluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**DPMD**	**Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penggaran, dan Evluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 Dikumen**	**-**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD	Terlaksananya Penyusuanan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dibuat	100%	5.373.628	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD			-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	10.637.628	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD			-

	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMD	**Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah**	**26 Dokumen**	4.928.875.000	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	DPMD	**Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah**	**26 Dokumen**	5.307.160.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD	Terbayarnya gaji, tunjangan dan insentif ASN	14 Bulan	4.928.875.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	5.307.160.000
2.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**DPMD**	**Terlaksananya kegiatan administrasi umum**	**100%**	**496.355.412**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**DPMPD**	**Terlaksananya kegiatan administrasi umum**	**100%**	**1.334.947.068**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMD	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	1 Paket	250.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.043.637
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	29 Item	178.093.052	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	14 Paket	430.358.496
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMD	Terfasilitasinya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	9.609.110	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.631.930
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMD	Surat kabar harian	4 jenis surat kabar	12.516.960	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	12.960.000

	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	50 kali	283.235.000	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	50 Laporan	860.953.005
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	563.421.033	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	DPMD	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	541.450.799
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD	Pembayaran tagihan telpon, air, listrik dan kawat/faksimili /internet/TV berlangganan	12 Bulan	79.646.914	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan	74.018.199
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD	Terfasilitasinya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	403.635.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 Laporan	467.432.600
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	**Terpeliharanya a Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	241.370.587	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	DPMD	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	527.848.917
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	DPMD	Terfasilitasinya Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	2 Bangunan	72.000.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	DPMD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.094.117

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD	Terfasilitasinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	213.652.516	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarka Pajaknya	26 Unit	343.244.800
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD	Terfasilitasinya Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	34.510.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	34.510.000
2	**Program Penataan Desa**	**DPMD**	**1. Jumlah Desa yang telah ditetapkan batas administrasi wilayah desa 2. Jumlah sarana transportasi desa 3. Jumlah kawsan perdesaan yang terbentuk**	**1. 118 Desa 2. 2 buah 3. 1 Kawasan**	**4.115.645.130**	**Program Penataan Desa**	**DPMD**	**1. Jumlah Desa yang telah ditetapkan batas administrasi wilayah desa 2. Jumlah sarana transportasi desa 3. Jumlah kawsan perdesaan yang terbentuk**		**18.164.169.680**
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa		**1. Persentase cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang**	**1. 100% 2. 2 buah 3. 118 Desa**	**4.115.645.130**	**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa**		**1. Persentase cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik 2. Jumlah sarana**	**1. 100% 2. 2 buah 3. 118 Desa**	18.164.169.680

		DPMD	**baik** **2. Jumlah sarana trasnportasi desa yang dibangun** **3. Jumlah desa yang ditetapkan batas wilayahnya**				DPMD	**trasnportasi desa yang dibangun** **3. Jumlah desa yang ditetapkan batas wilayahnya**		
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	DPMD	1. Jumlah Desa yang ditetapkan Batas administrasi Wilayah 2. Jumlah kawsan perdesaan yang terbentuk	1. 118 Desa 2. 1 Kawasan	361.564.397	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	DPMD	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewilayahnya	121 Desa	180.429.966
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	DPMD	1. Jumlah Saranat ransportasi Desa yang dibangun wilayah desa 2. Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan desa yang baik	1. 2 buah 2. 100%	3.754.080.733	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	DPMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	2 Unit	17.983.739.714

3.	**Program Peningkatan KerjaSama Desa**	DPMD	**Jumlah Kerjasama Desa**	**2 Kerjasama**	95.130.460	**Program Peningkatan KerjaSama Desa**	DPMD	**Jumlah Kerjasama Desa**	**2 Kerjasama**	409.399.719
	Kegiatan Kerja sama Desa	DPMD	**Jumlah Kerjasama Desa yang dibuat**	**2 Kerjasama**	95.130.460	**Kegiatan Kerja sama Desa**	DPMD	Jumlah Kerjasama Desa yang dibuat	**2 Dokumen**	409.399.719
	Fasilitasi Kerja sama Desa	DPMD	Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi	2 Kerjasama	95.130.460	Fasilitasi Kerja sama Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten	2 Dokumen	149.449.765
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	299.999.956	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	259.949.954
4.	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	DPMD	**Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa**	**60%**	2.226.344.559	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	DPMD	**Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa**	**60%**	4.144.628.346

	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**DPMD**	**1. Persentase desa dengan perencanaan yang baik 2. Persentase desa dengan pengelolaankeuangan yang baik 3. Persentase desa dengan administrasi umum desa yang baik 4. Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan dengan yang baik**	**1. 70% 2.70% 3. 70% 4. 70%**	**2.226.344.559**	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**DPMD**	**1. Persentase desa dengan perencanaan yang baik 2. Persentase desa dengan pengelolaankeuangan yang baik 3. Persentase desa dengan administrasi umum desa yang baik 4. Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan dengan yang baik**	**1. 70% 2. 70% 3. 70% 4. 70%**	4.144.628.346
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD	Persentase desa dengan administrasi umum desa yang baik	70%	1.499.631.054	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Desa	121 Dokumen	2.949.540.275
	Fasilitasi Penyususnan Perencanaan Pembangunan Desa	DPMD	Persentase desa dengan perencanaan desa yang baik	70%	104.247.689	Fasilitasi Penyususnan Perencanaan Pembangunan Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	121 Dokumen	174.735.623

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	DPMD	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan dan aset yang baik	70%	243.415.892	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	121 Dokumen	174.442.849
	PembinaanPeningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	DPMD	Persentase Aparatur Desa yang dilakukan Pembinaan	70%	187.152.317	PembinaanPeningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	DPMD	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	242 Orang	508.418.131
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	DPMD	Persentase Desa dengan Profil Desa yang baik	70%	40.933.795	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Profil Desa	73 Dokumen	87.386.191
	Fasiltasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	DPMD	Jumlah Desa/ kelurahan yang mengikuti Lomba desa/kelurahan	12 Desa	150.963.812	Fasiltasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	12 Dokumen	250.105.277
5.	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	DPMD	**Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa**	**60%**	1.629.212.126	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	DPMD	**Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa**	60%	1.917.917.209
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di		**1. Jumlah BUM Desa yang terbentuk 2. Persentase**	**1.113 Bum Desa 2. 65% 3. 60% 4. 5**	1.629.212.126	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di**		**1. Jumlah BUM Desa yang terbentuk 2. Persentase BUM Desa yang**	**1.113 Bum Desa 2. 65% 3. 60% 4. 5**	1.917.917.209

	Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPMD	**BUM Desa yang aktif 3. Persentase BUM Desa yang berkembang 4. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM 5. Persentase LPM aktif 6. Persentase LPM berprestasi 7. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 8. Persentase PKK aktif 9. Persentase Posyandu aktif 10. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat 11. Persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat**	**kelompok 5. 20% 6. 1 Kelompok 7. 4 Kelompok 8.100% 9.100% 10. 35% 11. 35%**		**Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	DPMD	**aktif 3. Persentase BUM Desa yang berkembang 4. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM 5. Persentase LPM aktif 6. Persentase LPM berprestasi 7. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 8. Persentase PKK aktif 9. Persentase Posyandu aktif 10. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat 11. Persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat**	**kelompok 5. 20% 6. 1 Kelompok 7. 4 Kelompok 8.100% 9.100% 10. 35% 11. 35%**	

	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD	Persentase Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	60%	1.196.295.962	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	1.026.387.993
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha	60%	86.056.168	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	3 Lembaga	170.506.425

			n dan Masyarakat Hukum Adat					Hukum Adat		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	DPMD	Persentase Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	60%	195.003.846	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Laporan	430.548.087
	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	DPMD	Persentase Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	60%	151.856.150	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Laporan	290.474.704
		TOTAL			**12.237.280.159**		**TOTAL**			**32.347.521.738**

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rencana kerja perubahan dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 di dapat dari dana APBD Kabupaten Tabalong. Diharapkan rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong berjalan lancar dan bisa menjalankan rencana kerja perubahan di tahun 2024 dengan semaksimal mungkin dan di harapkan mendapatkan hasil yang baik dan tercapai sesuai dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Tahun Anggaran 2024.

Rencana kerja perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong tahun 2024 ini terdapat 5 Program, 8 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan. Adapun rencana kerja perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Tahun 2024

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju (Renja Tahun 2025)		Jenis Keg.*)	Unit SKPD Penanggung jawab
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana					
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=12-11	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
13	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1. Nilai IKM 2. Nilai Lakip**	**1. Nilai IKM 2. Nilai Lakip**	**Dinas PMD**	**Dinas PMD**	**Kab. Tabalong**	**Kab. Tabalong**	**B BB**	**B BB**	**6,734,343,645**	**7,711,406,784**	**14,445,750,429**	**DAU**	**DAU**	**A A**	**6,734,343,645**	**A**	**DPMD**
13	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dinas PMD	Dinas PMD	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	10 Dokumen	10 Dokumen	16,011,256		- **16,011,256**	DAU	DAU	10 Dokumen	16,011,256	A	DPMD
13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMD	Dinas PMD	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	2 Dokumen	2 Dokumen	5,373,628		- **5,373,628**	DAU	DAU	10 Dokumen	5,373,628	A	DPMD
13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusuanan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kienrja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusuanan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kienrja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusuanan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kienrja SKPD	Dinas PMD	Dinas PMD	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	8 Laporan	8 Laporan	10,637,628		- **10,637,628**	DAU	DAU	8 Laporan	10,637,628	A	DPMD
13	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah**	**ASN Dinas PMD**	**ASN Dinas PMD**	**Kab. Tabalong**	**Kab. Tabalong**	**26 Dokumen**	**26 Dokumen**	**4,928,875,000**	5,307,160,000	**378,285,000**	**DAU**	**DAU**	**26 Dokumen**	**4,928,875,000**	**A**	**DPMD**
13	01	2.06	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN Dinas PMD	ASN Dinas PMD	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	21 Orang	21 Orang	4,928,875,000	5,307,160,000	**378,285,000**	DAU	DAU	21 Orang	4,928,875,000	A	DPMD

13	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya kegiatan administrasi umum**	**Terlaksananya kegiatan administrasi umum**	**Dinas PMD**	**Dinas PMD**	**Kab. Tabalong**	**Kab. Tabalong**	**100%**	**100%**	**825,603,076**	**1,334,947,068**	**509,343,992**	**DAU**	**DAU**	**100%**	**825,603,076**	**A**	**DPMD**
13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas PMD	Dinas PMD	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	1 Paket	1 Paket	16,043,637	16,043,637	-	DAU	DAU	1 Paket	16,043,637	A	DPMD
13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas PMD	Dinas PMD	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	15 Paket	24 Paket	427,236,429	430,358,496	**3,122,067**	DAU	DAU	15 Paket	427,236,429	A	DPMD
13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganddan	Jumlah Paket Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas PMD	Dinas PMD	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	1 Paket	1 Paket	13,421,010	14,631,930	**1,210,920**	DAU	DAU	1 Paket	13,421,010	A	DPMD
13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas PMD	Dinas PMD	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	4 Dokumen	4 Dokumen	8,640,000	12,960,000	**4,320,000**	DAU	DAU	4 Dokumen	8,640,000	A	DPMD
13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMD	Dinas PMD	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	60 Laporan	70 Laporan	360,262,000	860,953,005	**500,691,005**	DAU	DAU	60 Laporan	360,262,000	A	DPMD
13	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan**	**Dinas PMD**	**Dinas PMD**	**Kab. Tabalong**	**Kab. Tabalong**	**100%**	**100%**	**526,005,396**	**541,450,799**	**15,445,403**	**DAU**	**DAU**	**100%**	**526,005,396**	**A**	**DPMD**
13	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan**	**Dinas PMD**	**Dinas PMD**	**Kab. Tabalong**	**Kab. Tabalong**	**100%**	**100%**	**526,005,396**	**541,450,799**	**15,445,403**	**DAU**	**DAU**	**100%**	**526,005,396**	**A**	**DPMD**
13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas PMD	Dinas PMD	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	4 Laporan	4 Laporan	98,072,796	74,018,199	**24,054,597**	DAU	DAU	4 Laporan	98,072,796	A	DPMD
13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang Disediakan	Dinas PMD	Dinas PMD	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	4 Laporan	4 Laporan	427,932,600	467,432,600	**39,500,000**	DAU	DAU	4 Laporan	427,932,600	A	DPMD
13	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas PMD**	**Dinas PMD**	**Kab. Tabalong**	**Kab. Tabalong**	**100%**	**100%**	**437,848,917**	**527,848,917**	**90,000,000**	**DAU**	**DAU**	**100%**	**437,848,917**	**A**	**DPMD**

13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas PMD	Dinas PMD	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	26 Unit	26 Unit	253,244,800	343,244,800	**90,000,000**	DAU	DAU	26 Unit	253,244,800	A	DPMD
13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas PMD	Dinas PMD	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	20 Unit	18 Unit	34,510,000	34,510,000	-	DAU	DAU	18 Unit	34,510,000	A	DPMD
13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas PMD	Dinas PMD	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	2 Unit	1 Unit	150,094,117	150,094,117	-	DAU	DAU	2 Unit	150,094,117	A	DPMD
13	**02**			**Program Penataan Desa**	**1. Jumlah desa yang telah ditetapkan batas administrasi wilayah desa 2. Jumlah sarana transportasi desa yang dibangun 3. Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk**	**1. Jumlah desa yang telah ditetapkan batas administrasi wilayah desa 2. Jumlah sarana transportasi desa yang dibangun 3. Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk**	**Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa**	**Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa**	**Kab. Tabalong**	**Kab. Tabalong**	**1. 121 Desa 2. 2 Buah**	**1. 121 Desa 2. 2 Buah**	**9,391,639,680**	**18,164,169,680**	**8,772,530,000**	**PAD**	**PAD**	**1. 121 Desa 2. 2 Buah 3. 1 Kawasan**	**9,391,639,680**	**A**	**DPMD**
13	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**1. Persentase cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik 2.Jumlah sarana transportasi desa yang dibangun 3.Jumlah desa yang telah ditetapkan batas wilayahnya**	**1. Persentase cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik 2.Jumlah sarana transportasi desa yang dibangun 3.Jumlah desa yang telah ditetapkan batas wilayahnya**	**Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa**	**Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa**	**Kab. Tabalong**	**Kab. Tabalong**	**1. 100% 2. 2 Buah 3. 121 Desa**	**1. 100% 2. 2 Buah 3. 121 Desa**	**9,391,639,680**	**18,164,169,680**	**8,772,530,000**	**PAD**	**PAD**	**1. 100% 2. 2 Buah 3. 121 Desa**	**9,391,639,680**	**A**	**DPMD**
13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa	Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	120 Desa	120 Desa	272,079,966	180,429,966	**91,650,000**	PAD	PAD	121 Desa	272,079,966	A	DPMD
13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa	Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	2 Unit	2 Unit	9,119,559,714	17,983,739,714	**8,864,180,000**	PAD	PAD	2 Unit	9,119,559,714	A	DPMD
13	**03**			**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Jumlah kerjasama antar desa**	**Jumlah kerjasama antar desa**	**Desa yang Melakukan Kerjasama**	**Desa yang Melakukan Kerjasama**	**Kab. Tabalong**	**Kab. Tabalong**	**1 Kerjasama**	**1 Kerjasama**	**424,999,874**	**409,399,719**	**15,600,155**	**PAD**	**PAD**	**1 Kerjasama**	**424,999,874**	**A**	**DPMD**
13	**03**	**2.01**		**kerjasama desa**	Jumlah kerja sama Desa yang dibuat	Jumlah kerja sama Desa yang dibuat	Desa yang Melakukan Kerjasama	Desa yang Melakukan Kerjasama	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	1 Kerjasama	1 Kerjasama	424,999,874	409,399,719	**15,600,155**	PAD	PAD	1 Kerjasama	424,999,874	A	DPMD
13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja sama Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kab	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kab	Desa yang Melakukan Kerjasama	Desa yang Melakukan Kerjasama	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	1 Dokumen	1 Dokumen	124,999,918	149,449,765	**24,449,847**	PAD	PAD	1 Dokumen	124,999,918	A	DPMD
13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Desa yang Melakukan Kerjasama	Desa yang Melakukan Kerjasama	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	1 Dokumen	1 Dokumen	299,999,956	259,949,954	**40,050,002**	PAD	PAD	1 Dokumen	299,999,956	A	DPMD

13	**04**			**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa**	**Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa**	**Pemerintah Desa**	**Pemerintah Desa**	**Kab. Tabalong**	**Kab. Tabalong**	**80%**	**80%**	**2,859,180,118**	**4,144,628,346**	**1,285,448,228**	**PAD**	**PAD**	**80%**	**2,859,180,118**	**A**	**DPMD**
13	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa**	1. Persentase desa dengan perencanaan yang baik 2. Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang baik 3.Persentase desa dengan administrasi umum desa yang baik 4. Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan dengan baik	1. Persentase desa dengan perencanaan yang baik 2. Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang baik 3.Persentase desa dengan administrasi umum desa yang baik 4. Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan dengan baik	Pemerintah Desa	Pemerintah Desa	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	1. 90% 2. 90% 3. 90% 4. 90%	1. 90% 2. 90% 3. 90% 4. 90%	2,859,180,118	4,144,628,346	**1,285,448,228**	PAD	PAD	1. 90% 2. 90% 3. 90% 4. 90%	2,859,180,118	A	DPMD
13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pemerintah Desa	Pemerintah Desa	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	121 Dokumen	121 Dokumen	1,520,768,409	2,949,540,275	**1,428,771,866**	PAD	PAD	121 Dokumen	1,520,768,409	A	DPMD
13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Pembangunan Desa	Pemerintah Desa	Pemerintah Desa	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	121 Dokumen	121 Dokumen	170,132,623	174,735,623	**4,603,000**	PAD	PAD	121 Dokumen	170,132,623	A	DPMD
13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Dsa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Dsa	Pemerintah Desa	Pemerintah Desa	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	121 Dokumen	121 Dokumen	164,657,849	174,442,849	**9,785,000**	PAD	PAD	121 Dokumen	164,657,849	A	DPMD
13	04	2.01	05	Pembinaan Peringkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Pemerintah Desa	Pemerintah Desa	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	242 Orang	242 Orang	607,126,131	508,418,131	**98,708,000**	PAD	PAD	242 Orang	607,126,131	A	DPMD
13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Pemerintah Desa	Pemerintah Desa	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	70 Dokumen	70 Dokumen	83,281,191	87,386,191	**4,105,000**	PAD	PAD	70 Dokumen	83,281,191	A	DPMD
13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Pemerintah Desa	Pemerintah Desa	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	12 Dokumen	12 Dokumen	313,213,915	250,105,277	**63,108,638**	PAD	PAD	12 Dokumen	313,213,915	A	DPMD
13	**05**			**Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa**	**Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa**	**RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna, dan Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat**	**RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna, dan Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat**	**Kab. Tabalong**	**Kab. Tabalong**	**70%**	**70%**	**2,124,958,904**	**1,917,917,209**	**207,041,695**	**PAD**	**PAD**	**80%**	**2,124,958,904**	**A**	**DPMD**

13	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyaraktan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	1. Jumlah BUM Desa yang terbentuk 2. Persentase BUM Desa yang aktif 3. Persentase BUM Desa yang berkembang 4. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM 5. Persentase LPM berprestasi 6. Persentase LPM berprestasi 7. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 8.Persentase PKK aktif 9. Persentase Posyandu aktif 10. Persentase swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat 11. Persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	1. Jumlah BUM Desa yang terbentuk 2. Persentase BUM Desa yang aktif 3. Persentase BUM Desa yang berkembang 4. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM 5. Persentase LPM berprestasi 6. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 7.Persentase PKK aktif 8. Persentase Posyandu aktif 9. Persentase swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat 10. Persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna, dan Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna, dan Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	1. 121 Bumdes 2. 75% 3. 70% 4. 5 Kelompok 5. 1 LPM 6. 4 Kelompok 7. 100% 8. 100% 9. 100% 10. 100%	1. 121 Bumdes 2. 75% 3. 70% 4. 5 Kelompok 5. 1 LPM 6. 4 Kelompok 7. 100% 8. 100% 9. 100% 10. 100%	2,124,958,904	1,917,917,209	**207,041,695**	PAD	PAD	1. 121 Bumdes 2. 75% 3. 70% 4. 5 Kelompok 5. 30% 6. 1 LPM 7. 4 Kelompok 8. 100% 9. 100% 10. 100% 11. 100%	2,124,958,904	A	DPMD
13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW/PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW/PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW/PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna, dan Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna, dan Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	1 Dokumen	1 Dokumen	1,216,416,753	1,026,387,993	**190,028,760**	PAD	PAD	1 Dokumen	1,216,416,753	A	DPMD
13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna, dan Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna, dan Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	3 Lembaga	3 Lembaga	151,730,380	170,506,425	**18,776,045**	PAD	PAD	3 Lembaga	151,730,380	A	DPMD

13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna, dan Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna, dan Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	1 Dokumen	1 Dokumen	447,180,487	430,548,087	**16,632,400**	PAD	PAD	1 Dokumen	447,180,487	A	DPMD
13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi tepat guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi tepat guna	RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna, dan Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna, dan Lembaga Adat Desa dan Masyarakat	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	1 Laporan	1 Laporan	309,631,284	290,474,704	**19,156,580**	PAD	PAD	1 Laporan	309,631,284	A	DPMD
				TOTAL									**21,535,122,221**	**32,347,521,738**	**24,726,370,507**				**21,535,122,221**		

BAB IV

PENUTUP

Dinas PMD Kabupaten Tabalong secara umum mempunyai tugas merumuskan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45).

Rancangan Target Kinerja Output (Tahunan) Dinas PMD Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis ditargetkan baik kinerja fisik dan kinerja keuangan dapat direalisasi 100%. Untuk mencapai output dan outcomes dari program dan kegiatan yang direncanakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan dan visi Dinas PMD Kabupaten Tabalong maka pada tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 5 program dan 8 kegiatan serta 24 sub kegiatan.

Efektifitas dari implementasi dari Rencana Kinerja Perubahan Dinas PMD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan visi Dinas PMD Kabupaten Tabalong sangat tergantung dari keseriusan dan kerja keras dari seluruh stakeholders terkait, untuk itu dalam rangka pencapaian kinerja yang optimal agar stakeholders terkait untuk mampu bekerja dengan serius, keras dan cerdas.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas PMD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran dan sebagai pedomanan dalam pencapaian kinerja Dinas PMD Kabupaten Tabalong 2024.

Tanjung, Juni 2024
Kepala Dinas PMD
Kabupaten Tabalong

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dr. H. Erwan, SH, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660921 198703 1 009

RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA P)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024, untuk menjalankan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dearah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dokumen Perubahan Renja ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong beserta program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan. Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun ini belum sempurna, untuk itu kami mohon koreksi, saran dan masukan dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong ini dapat bermanfaat dan diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanjung, Agustus 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong,

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Ir. ROWI RAWATIANICE, M. T
Pembina Utama Muda
NIP. 19661125 199403 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA TAHUN 2024 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan 7

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024 7

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 16

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong 34

2.3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 38

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 44

3.1 Rencana Kerja 44

BAB IV PENUTUP 48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Disdukcapil Tahun 2024 Dengan APBD 2024	9
Tabel 2.2	Perbandingan Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja dan APBD Disdukcapil Tahun 2024	10
Tabel 2.3	Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Disdukcapil Sampai Triwulan II Tahun 2024	17
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	37
Tabel 2.5	Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024	39
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Disdukcapil Kabupaten Tabalong Tahun 2024	45

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Than 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan konsekuensi dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai wujud implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024. Renja Tahun 2024 telah disusun pada tahun 2023 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Seiring dengan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2024, hasil pengendalian pelaksanaan renja menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Renja Disdukcapil Tahun 2024. Hal ini sekaligus sebagai tindak lanjut dari terbitnya Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor B-83/BAPPEDALITBANG/000.7/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Selain berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024, Perubahan Renja Disdukcapil Tahun 2024 juga disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten

Tabalong Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2024 yaitu:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2756) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonissai Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Dearah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor

09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024

(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 63);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
17. Surat edaran Pj. Bupati Tabalong nomor B. 83/BAPPEDALITBANG/ 000.7/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

   Dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

2. Tujuan
   - 1.1 Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
   - 1.2 Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan.

1.3 Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra PD dan Perubahan Renja PD untuk menunjang pencapaian visi,misi tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun selain berpedoman dengan Perubahan RKPD, juga berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. Dalam hal ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sampai dengan triwulan II tahun 2024 dengan mengacu pada APBD tahun 2024 yang sudah disahkan.

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAAN

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024

2.1.1.1 Kesesuaian Program Antara Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada rencana kerja Disdukcapil dengan APBD Tahun 2024, terdapat kesesuaian jumlah program dalam renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dengan jumlah program yang ada dalam APBD, Renja Dukcapil ada 5 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan, begitu jua dalam APBD ada 5 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

2.1.1.2 Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan yang ada pada rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dengan APBD Tahun 2024, terdapat 16 kegiatan yang direncanakan di Renja dan telah teranggarkan dalam APBD, yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Dearah, Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dearah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah, Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan. Dengan demikian maka jumlah kegiatan yang ada di Renja sebanyak 16 kegiatan dan jumlah kegiatan yang ada di APBD sebanyak 16 kegiatan. Terdapat kesesuaian jumlah kegiatan antara Renja dan APBD tahun 2024.

2.1.1.3 Kesesuaian Sub Kegiatan Antara Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap sub kegiatan yang ada di renja Disdukcapil dengan APBD tahun 2024, jumlah sub kegiatan yang ada di renja sebanyak 36 dan sub kegiatan yang ada di APBD sebanyak 33 sub kegiatan. Terdapat ketidaksesuaian jumlah sub kegiatan Renja dan APBD Tahun 2024. Ada 3 sub kegiatan yang tidak diakumodir dalam APBD yaitu sub kegiatan pengadaan kendaraan perorangan

dinas atau kendaraan dinas jabatan, sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dan sub kegiatan pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

2.1.1.4 Kesesuaian Pagu Anggaran Antara Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2024 denga APBD Tahun 2024

Anggaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2024 sebesar Rp 12.705.921.818,- sedangkan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong berdasarkan APBD 2024 adalah sebesar Rp 14.946.573.868,- terdapat selisih anggaran antara APBD dengan Renja 2024 sebesar Rp 2.240.652.050,- hal ini terjadi seiring dengan proses penganggaran yang berjalan.

Hasil kesesuaian jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran antara renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1

Hasil Evaliuasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Disdukcapil Tahun 2024 dengan APBD 2024

No	Uraian	Renja 2024	APBD 2024
1	Program	5	5
2	Kegiatan	16	16
3	Sub Kegiatan	36	33
4	Pagu Anggaran	Rp 12.705.921.818,-	Rp 14.946.573.868,-

Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Perbandingan Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja dan APBD Disdukcapil Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Renja 2024		APBD 2024	
							Target Capaian kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Anggaran
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*
2					**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
2	12				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Evaluasi AKIP**	**A (85.00)**	**8.939.144.588,-**	**A (85.00)**	**11.087.075.630,-**
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8 dok/lap**	**9.000.000,-**	**8 dok/lap**	**8.990.080**
2	12	01	2.01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	8 dok/lap	9.000.000,-	**8 dok/lap**	8.990.080
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penatausahaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 bulan**	**5.070.544.588,-**	**12 bulan**	**5.590.590.000,-**
2	12	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/ bulan	5.070.544.588,-	26 orang/ bulan	5.590.590.000,-
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**176 orang**	**101.000.000,-**	**100%**	**103.750.000,-**
2	12	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26 paket	25.000.000,-	71 paket	35.500.000,-
2	12	01	2.05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 orang	16.000.000,-	140 orang	13.250.000,-
2	12	01	2.05	1001	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	60.000.000,-	10 orang	55.000.000,-
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**177 Paket/ laporan**	**1.323.000.000,-**	**100%**	**2.370.579.025,-**

2	12	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	8.000.000,-	3 paket	8.539.560,-
2	12	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disedikan	12 paket	900.000.000,-	12 paket	1.308.111.613,-
2	12	01	2.06	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disedikan	4 paket	4.000.000,-	11 paket	517.388.438,-
2	12	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	25.000.000,-	5 paket	94.271.414,-
2	12	01	2.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disedikan	2 dokumen	5.000.000,-	1 dokumen	3.660.000,-
2	12	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 laporan	380.000.000,-	163 laporan	438.608.000,-
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8 unit**	**255.000.000,-**	**15 paket/unit**	**760.530.406,-**
2	12	01	2.07	0001	Sub Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 unit	100.000.000,-	-	0,-
2	12	01	2.07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 unit	40.000.000,-	-	0,-
2	12	01	2.07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	90.000.000,-	7 unit	740.530.406,-
2	12	01	2.07	0008	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	1 unit	10.000.000,-	1 unit	20.000.000,-
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 bulan**	**1.982.600.000,-**	**12 bulan**	**1.969.116.119,-**
2	12	01	2.08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	1600.000,-	12 laporan	600.000,-
2	12	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 laporan	182.000.000,-	12 laporan	158.000.000,-
2	12	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.800.000.000,-	12 laporan	1.810.516.119,-
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersediannya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**49 unit**	**198.000.000,-**	**62 unit/item**	**283.520.000,-**

2	12	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya	18 Unit	150.000.000,-	24 unit	258.550.000,-
2	12	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	30 unit	18.000.000,-	37 unit	24.970.000,-
2	12	01	2.09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit	30.000.000,-	-	0,-
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	• **Persentase Cakupan kepemilikan KTP Elektronik, Persentase kepemilikan Kartu Keluarga dan Persentase kepemikan Kartu Identitas Anak**	**100% 100% 100%**	**356.454.564,-**	**100% 100% 100%**	**356.504.264,-**
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan pendaftaran penduduk**	**Jumlah dokumen kependudukan yang terbit**	**36.800 dokumen pendafduk dan 1 dokumen dasil pendataan**	**313.658.196,-**	**37.890 - 2 dok/laporan**	**348.224.264,-**
2	12	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	1 dokumen	73.658.196,-	2 dokumen	65.550.000,-
2	12	02	2.01	0002	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	36.000 dokumen	20.000.000,-	36.000 dokumen	19.901.400,-
2	12	02	2.01	0004	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1 laporan	200.000.000,-	1 laporan	242.801.864,-
2	12	02	2.01	0005	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	36.000 dokumen	20.000.000,-	60 dokumen	19.971.000,-
2	**12**	**02**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**12 kecamatan**	**42.796.368,-**	**12 kecamatan**	**8.280.000,-**
2	12	02	2.04	0002	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	1 laporan	42.796.368,-	1 laporan	8.280.000,-
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran per1000 penduduk, persentase**	**70% 100% 100%**	**154.703.000,-**	**70% 100% 100%**	**153.650.000,-**

						kepemilikan akta anak 0-18 tahun, persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan, persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan, persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	**100% 100%**		**100% 100%**	
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentase permohonan akta kelahiran dan dan akta kematian yang diterbitkan kutipan aktanya**	**100%**	**136.201.660,-**	19.120 layanan	**135.680.000,-**
2	12	03	2.01	0001	Sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	19.120 dokumen	111.572.324,-	17 dokumen	24.300.000,-
2	12	03	2.01	0002	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	17 layanan	24.629.336,-	19.120 layanan	111.380.000,-
2	**12**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		**100%**	**10.800.000,-**	**12 kecamatan**	**10.620.000,-**
2	12	03	2.02	0001	Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementrian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan Kantor Kementrian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	12 laporan	10.800.000,-	12 laporan	10.620.000,-
2	**12**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**12 Kecamatan**	**7.701.340,-**	**12 kecamatan**	**7.350.000,-**
2	12	03	2.03	0002	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	12 laporan	7.701.340,-	12 laporan	7.350.000,-
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**-Persentase validitas database kependudukan -Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) -Cakupan perangkat derah yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan**	**100% Puas(92,00) 100%**	**3.144.968.666,-**	**100% Puas(92,00) 100%**	**3.285.813.974,-**

2	12	04	2.01		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Jumlah SKPD yang melakukan kerjasama Pemanfaatan data kependudukan**	**30 SKPD**	**85.000.000,-**	**40 SKPD**	**49.639.802,-**
2	12	04	2.01	0002	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	30 dokumen	85.000.000,-	30 SKPD	49.639.802,-
2	12	04	2.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase pelaksanaan SIAK (jaringan SIAK kabpaten dan kecamatan dalam kondisi baik dan peralatan SIAK hard dan software dalam kondisi baik, update data kependudukan 25 desa)**	**12 survey 50 peserta 1 inovasi**	**150.000.000,-**	**25 laporan 1 laporan**	**261.404.562,-**
2	12	04	2.03	0003	Sub Kegiatan Fasilitas terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 laporan	100.000.000,-	2 laporan	221.654.554,-
2	12	04	2.03	0005	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 laporan	50.000.000,-	2 laporan	39.750.008,-
2	12	04	2.04		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100% 100% 25 desa**	**2.909.968.666,-**	**12 Survey 2 Laporan 5 Laporan**	**2.974.769.610,-**
2	12	04	2.04	0001	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 Laporan	2.777.500.000,-	2 Laporan	2.749.551.396,-
2	12	04	2.04	0003	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	5 Laporan	132.468.666,-	5 Laporan	225.218.214,-
2	12	05			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Ketersediaan database skala kabupaten**	**3 dokumen 12 laporan**	**40.651.000,-**	**Ada**	**63.530.000,-**
2	12	05	2.01		**Penyusunan Profil Kependudukan**	Jumlah laporan data dan profil kependudukan	3 dokumen dan 12 laporan	110.651.000,-	3 laporan 3 dokumen	63.530.000,-

2	12	05	2.01	0002	Sub Kegiatan penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	3 dokumen	110.651.000,-	3 dokumen	63.530.000,-
					Jumlah			**12.705.921.818,-**		**14.946.573.868,-**

Berdasarkan data perbandingan antara Renja 2024 dan APBD 2024 pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan pada APBD disusun masih mengacu pada Renja dengan kesesuaian hampir 100%, namun terjadi ketidaksesuaian pagu anggaran APBD dan Renja 2024 yang disebabkan ada perubahan pagu anggaran untuk fasilitas Gedung kantor baru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (peralatan dan perlengkapan gedung kantor, peralatan rumah tangga dam mebeler dll) sebesar 18%.

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, penilaian hasil pelaksanaan Renja menggunakan data realisasi pelaksanaan APBD sebagai acuan. Berikut rekapitulasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Disdukcapil sampai triwulan II tahun 2024.

Tabel 2.3 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Disdukcapil Sampai Triwulan II Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024				Catatan
							Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (Rp)	(%)	Kinerja	(%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2	12				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Evaluasi AKIP**	**A (85.00)**	**11.087.075.630,-**	**3.509.182.330,-**	**31,65%**	**A**	**100%**	
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8 dok/lap**	**8.990.080**	**2.357.700,-**	**26,23%**	**4 dok**	**50%**	
2	12	01	2.01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	8 dok/lap	8.990.080	2.357.700,-	26,23%	4 dok	50%	Rapat internal yang dilaksanakan pada bulan ramadhan tidak mengunakan makmin rapat, Rapat internal

													pada tanggal 26 Juni 2026 belum realisasi keuangan, belanja fotocopy dokumen renja 2025 dan dokumen 2024 dll belum di spj kan (Tindak Lanjut : Segera memproses realisasikan belanja fotocopy dokumen perencanaan
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penatausahaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 bulan**	**5.590.590.000,-**	**2.618.002.434,-**	**46,83%**	**6 bulan**	**50%**	
2	12	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/ bulan	5.590.590.000,-	2.618.002.434,-	46,83%	23 orang	100%	Tidak ada
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**103.750.000,-**	**28.350.000,-**	**27,33%**	**0**	**0%**	
2	12	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	71 paket	35.500.000,-	0,-	0%	0	0%	Tidak ada
2	12	01	2.05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 orang	13.250.000,-	0,-	0%	4 orang	2,86%	Tidak ada

2	12	01	2.05	0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 orang	55.000.000,-	28.350.000,-	51,55%	15 orang	100%	Tidak ada
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penatausahaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**2.370.579.025,-**	**233.469.806,-**	**9,85%**	**50%**	**50%**	
2	12	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 paket	8.539.560,-	0,-	0%	0	0%	Tidak ada
2	12	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disedikan	12 paket	1.308.111.613,-	42.930.500,-	3,28%	8 paket	66,67%	Tidak ada
2	12	01	2.06	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disedikan	11 paket	517.388.438,-	0,-	0%	0	0%	Tidak ada
2	12	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	94.271.414,-	-	0%	4 paket	80%	Tidak ada
2	12	01	2.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disedikan	1 dokumen	3.660.000,-	720.000,-	19,67%	2 dok	100%	Tidak ada
2	12	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	163 laporan	438.608.000,-	189.819.306,-	43,28%	16 laporan	9,82%	Tidak ada
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15 paket/unit**	**760.530.406,-**	**0,-**	**0%**	**5 paket**	**45,45%**	

2	12	01	2.07	0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	-	0,-	0,-	0%	0	0%	Tidak ada
2	12	01	2.07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional atau lapangan yang disediakan	-	0,-	0,-	0%	0	0%	Tidak ada
2	12	01	2.07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	7 unit	740.530.406,-	0,-	0%	0	0%	Tidak ada
2	12	01	2.07	0008	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	1 unit	20.000.000,-	0,-	0%	0	0%	Tidak ada
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 bulan**	**1.969.116.119,-**	**567.198.390,-**	**28,80%**	**6 bulan**	**50%**	
2	12	01	2.08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	600.000,-	13.900,-	2,32%	6 laporan	50%	Tidak ada
2	12	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 laporan	158.000.000,-	3.170.800,-	2,01%	6 laporan	50%	Tidak ada
2	12	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.810.516.119,-	564.013.690,-	31,15%	6 laporan	50%	Tidak ada
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersediannya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**62 unit/item**	**283.520.000,-**	**59.804.000,-**	**21,09%**	**32 unit**	**51,61%**	
2	12	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional operasional atau	24 unit	258.550.000,-	57.214.000,-	22,13%	14 unit	58,33%	Tidak ada

					Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya							
2	12	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	37 unit	24.970.000,-	2.590.000,-	10,37%	14 unit	37,84%	Tidak ada
2	12	01	2.09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	-	0,-	0,-	0%	0	0%	Tidak ada
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	• **Persentase kepemilikan KTP Elektronik,** • **Persentase kepemilikan Kartu Keluarga** • **Persentase kepemikan Kartu Identitas Anak** • **Penerapan KTP Nasional berbasis NIK**	**100%** **100%** **100%** **sudah**	**356.504.264,-**	**63.142.232,-**	**17,71%**	**100** **100** **79** **sudah**	**99,75%** **99,59%** **78,90%** **100%**	
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan pendaftaran penduduk**	**Jumlah dokumen kependudukan yang terbit**	**37.890 – 2 dok/laporan**	348.224.264,-	60.082.232,-	17,25%	30.361	80,13%	
2	12	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	2 dokumen	65.550.000,-	0,-	0%	1 dokumen	50%	Banyaknya penduduk yang tidak mempunyai KTP Tabalong dan tidak melaporkan sebagai penduduk non permanen (Tindak Lanjut:

													Berkoordinasi dengan seluruh kepala desa agar sebelum memberikan surat keterangan domisi warga harus ke dukcapil terlebih dahulu untuk mendapatkan nomor regester penduduk non permanen)
2	12	02	2.01	0002	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	36.000 dokumen	19.901.400,-	5.610.000,-	28,19%	29.911 dokumen	83,09%	Masih ada 5 desa stunting yang belum dilakukan jebol pelayanan adminduk (Tindak Lanjut : Terus melakukan koordinasi terkait desa stunting dengan bappeda litbang dan kepala desa)
2	12	02	2.01	0004	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1 laporan	242.801.864,-	54.472.232,-	22,43%	28.297 dokumen	80,85%	Belum melaksanakan rekam di sekolah terkait data dapodik dan data dari sekolah yang dilakukan saat jebol tidak

													akurat dan tidak sinkron serta waktu pelayanan adminduk terkait jaringan (Tindak Lanjut : Terus melkukan jebol kesekolah-sekolah dan desa-desa dalam memberikan pelayanan adminduk)
2	12	02	2.01	0005	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	60 dokumen	19.971.000,-	0,-	0%	0	0%	Belum melaksanakan kegiatan terkait inovasi kawin perak (Tindak Lanjut : Melakukan koordinasi terkait kawin perak)
2	**12**	**02**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**12 kecamatan**	**8.280.000,-**	**3.060.000,-**	**36,96%**	**3 kecamatan**	**25%**	
2	12	02	2.04	0002	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	1 laporan	8.280.000,-	3.060.000,-	36,96%	1 laporan	100%	Belum melaksanakan tertib adminduk pada 12 kecamatan (Tindak Lanjut : Melakukan tertib adminduk dan pengawasan terkait adminduk di kecamatan)

2	12	03			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase kepemilikan akta kelahiran per1000 penduduk, persentase kepemilikan akta anak 0-18 tahun, persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan, persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan, persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan**	**70% 100% 100% 100% 100%**	**153.650.000,-**	**20.250.000,-**	**13,18%**	**64 99 100 100 100**	**91,27% 99,11% 100% 100% 100%**	
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentase permohonan akta kelahiran dan dan akta kematian yang diterbitkan kutipan aktanya**	**19.120 layanan**	**135.680.000,-**	**20.250.000,-**	**14,92%**	**9.275 layanan**	**48,51%**	
2	12	03	2.01	0001	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	17 dokumen	24.300.000,-	0,-	0%	9 dokumen	52,94%	Tidak ada
2	12	03	2.01	0002	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	19.120 layanan	111.380.000,-	20.250.000,-	18,18%	9.005 layanan	47,10%	Tidak ada

2	**12**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Jumlah laporan hasil koordinasi dengan Kantor Kementrian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam**	**12 kecamatan**	**10.620.000,-**	**0,-**	**0%**	**0**	**0%**	
2	12	03	2.02	0001	Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementrian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan Kantor Kementrian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	12 laporan	10.620.000,-	0,-	0%	2 laporan	16,67%	Tidak ada
2	**12**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**12 kecamatan**	**7.350.000,-**	**0,-**	**0%**	**0**	**0%**	
2	12	03	2.03	0002	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	12 laporan	7.350.000,-	0,-	0%	0	0%	Tidak ada
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI**	**-Persentase validitas database kependudukan -Nilai survey**	**100% Puas (92,00) 100%**	**3.285.813.974,-**	**2.246.155.506,-**	**68,36%**	**100 Puas (92,00) 27%**	**100% 100,29% 26,82%**	

					KEPENDUDUKAN	**kepuasan masyarakat (SKM) -Cakupan perangkat derah yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan**							
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Jumlah SKPD yang melakukan kerjasama Pemanfaatan data kependudukan**	**40 SKPD**	**49.639.802,-**	**3.717.000,-**	**7,49%**	**20 SKPD**	**50%**	
2	12	04	2.01	0002	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	30 SKPD	49.639.802,-	3.717.000,-	7,49%	6	20%	Tidak ada
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Peresentase pelaksanaan SIAK (jaringan SIAK kabpaten dan kecamatan dalam kondisi baik dan peralatan SIAK hard dan software dalam kondisi baik, update data kependudukan 25 desa)**	**25 laporan 1 laporan**	**261.404.562,-**	**7.378.376,-**	**2,82%**	**12 laporan**	**48%**	
2	12	04	2.03	0003	Sub Kegiatan Fasilitas terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 laporan	221.654.554,-	5.851.100,-	2,64%	6 laporan	100%	Tidak ada
2	12	04	2.03	0005	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 laporan	39.750.008,-	1.527.276,-	3,84%	0	0%	Tidak ada
2	**12**	**04**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan**	**12 survey 2 laporan 5 laporan**	**2.974.769.610,-**	**2.235.060.130,-**	**75,13%**	**2 laporan**	**40%**	

					Kependudukan	**Informasi Administrasi Kependudukan**							
2	12	04	2.04	0001	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 laporan	2.749.551.396,-	2.215.064.900,-	80,56%	2 laporan	50%	Evesiensi Anggaran, dimana harga pada DPA atau Satuan Harga merupakan harga yang termasuk PPN dan pph, sedangkan pada realisasi bahwa harga yang di realisasikan bagi penyedia non PKP adalah harga kesepakatan dikurangi jumlah PPN, sehingga realisasi keuangan tidak maksimal. (Tindak Lanjut : akan berkoordinasi dengan tim penyusunan standar harga satuan)
2	12	04	2.04	0003	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	5 laporan	225.218.214,-	19.995.230,-	8,88%	2 laporan	40%	Kegiatan bimtek telah diselenggaran sesuai dengan anggaran kas, tetapi pada kegiatan bimtek ini tidak

													mengunakan narasumber dari luar SKPD maupun narasumber dari tenaga ahli. Berdasarkan ketentuan yang berlaku narasumber yang berasal dari SKPD sendiri tidak boleh dibayarkan honorariumnya (Tindak Lanjut : Dana tersebut akan dipergunakan pada kegiatan Bimtek selanjutnya)
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Ketersediaan database skala kabupaten	Ada	**63.530.000,-**	**8.887.225,-**	**13,99%**	**Ada**	**100%**	
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	Tersusunnya laporan dan profil kependudukan	3 laporan 3 dokumen	**63.530.000,-**	8.887.225,-	13,99%	**2 dokumen**	66,67%	
2	12	05	2.01	0002	Sub Kegiatan penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	3 dokumen	63.530.000,-	8.887.225,-	13,99%	2 dokumen	66,67%	Proses penyusunan dan pengolahan buku agregat dan buku profil memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga proses penyelesaian

													penyusunan dan pencetakan menjadi terlambat (Tindak Lanjut : Untuk kegiatan penyusunan buku profil dan agregat yang akan datang, akan dilakukan koordinasi dengan instansi tekhnis lebih awal, sehingga penyusunan lebih cepat)
					Jumlah			**14.946.573.868,-**	**5.847.617.323,-**	**39,12%**			

Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja Disdukcapil sampai triwulan II diatas diolah berdasarkan data pada formulir evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sesuai format evaluasi renja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (formulir evaluasi renja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (formulir evaluasi terlampir). Evaluasi Renja dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja serta implikasi yang timbul, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk tindakan perencanaan selanjutnya.

Berdasarkan data pada tabel 2.3 tersebut, dapat dilihat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten Tabalong telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp. 5.847.617.323,-** atau sekitar 39,12% dari total anggaran **Rp.14.946.573.868,-** Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif masih rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena pelaksanaannya memang dijadwalkan pada triwulan III dan IV sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan, diantaranya yaitu sub kegiatan pengadaan pakian dinas beserta atribut kelengkapannya, sub kegiatan pengadaan mebel, sub kegiatan aset tak berwujud dan sub kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan, selain itu ada beberapa permasalah yang dihadapi sehingga sub kegiatan pada Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong belum bisa terealisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah di tetapkan dalam DPA skpd, diantaranya :

1. Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD realisasi belum maksimal disebabkan Rapat internal yang dilaksanakan pada bulan ramadhan tidak mengunakan makmin rapat, Rapat internal pada tanggal 26 Juni 2024 belum terealisasi keuangannya, belanja fotocopy dokumen renja 2025 dan dokumen 2024 dll belum di spj kan.
2. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tidak ada masalah.

3. Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya tidak ada masalah.
4. Sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tidak ada masalah.
5. Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan tidak ada masalah.
6. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor tidak ada masalah.
7. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tidak ada masalah.
8. Sub kegiatan penyedian peralatan rumah tangga tidak ada masalah.
9. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengandaan tidak ada masalah.
10. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tidak ada masalah.
11. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tidak ada masalah.
12. Sub kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan tidak ada masalah.
13. Sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan tidak ada masalah.
14. Sub kegiatan pengadaan mebel tidak ada masalah.
15. Sub kegiatan pengadaan asset tak berwujud tidak ada masalah.
16. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat tidak ada masalah.
17. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik tidak ada masalah.
18. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor tidak ada masalah.
19. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeiharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan tidak ada masalah.

20. Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya tidak ada masalah.
21. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
22. Sub kegiatan pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan, masih banyaknya penduduk yang tidak mempunyai KTP Tabalong dan tidak melaporkan sebagai penduduk non permanen (Tindak Lanjut : berkoordinasi dengan seluruh kepala desa agar sebelum memberikan surat keterangan domisi warga harus ke dukcapil terlebih dahulu untuk mendapatkan nomor regester penduduk non permanen).
23. Sub kegiatan pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk, permasalahannya masih ada 5 desa stunting yang belum dilakukan jebol pelayanan adminduk (Tindak Lanjut : Terus melakukan koordinasi terkait desa stunting dengan bappedalitbang dan kepala desa).
24. Sub kegiatan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk, permasalahannya belum melaksanakan rekam di sekolah terkait data dapodik dan data dari sekolah yang dilakukan saat jebol tidak akurat dan tidak sinkron serta waktu pelayanan adminduk terkait jaringan (Tindak Lanjut : Terus melkukan jebol kesekolah-sekolah dan desa-desa dalam memberikan pelayanan adminduk).
25. Sub kegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan permasalahan yang dihadapi belum melaksanakan kegiatan terkait inovasi kawin perak (Tindak Lanjut : Melakukan koordinasi terkait kawin perak)
26. Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait pendaftaran penduduk, permasalahan yang dihadapi belum melaksanakan tertib adminduk pada 12 kecamatan (Tindak Lanjut : Melakukan tertib adminduk dan pengawasan terkait adminduk di kecamatan).
27. Sub kegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting permasalahannya tidak ada.

28. Sub kegiatan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil permasalahannya tidak ada.
29. Sub kegiatan koordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam permasalahannya tidak ada.
30. Sub kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil permasalahannya tidak ada.
31. Sub kegiatan kerjasama pemanfaatan data kependudukan permasalahannya tidak ada.
32. Sub kegiatan fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan permasalahannya tidak ada.
33. Sub kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan permasalahannya tidak ada.
34. Sub kegiatan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, permasalahan yang dihadapi Efesiensi Anggaran, dimana harga pada DPA atau Satuan Harga merupakan harga yang termasuk PPN dan pph, sedangkan pada realisasi bahwa harga yang di realisasikan bagi penyedia non PKP adalah harga kesepakatan dikurangi jumlah PPN, sehingga realisasi keuangan tidak maksimal. (Tindak Lanjut : akan berkoordinasi dengan tim penyusunan standar harga satuan).
35. Sub kegiatan bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan, permasalahannya kegiatan bimtek telah diselenggaran sesuai dengan anggaran kas, tetapi pada kegiatan bimtek ini tidak mengunakan narasumber dari luar SKPD maupun narasumber dari tenaga ahli. Berdasarkan ketentuan yang berlaku narasumber yang berasal dari SKPD sendiri tidak boleh dibayarkan honorariumnya (Tindak Lanjut : Dana tersebut akan dipergunakan pada kegiatan Bimtek selanjutnya)

36. Sub kegiatan penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan lainnya yang tersusun, Proses penyusunan dan pengolahan buku agregat dan buku profil memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga proses penyelesaian penyusunan dan pencetakan menjadi terlambat (Tindak Lanjut : Untuk kegiatan penyusunan buku profil dan agregat yang akan datang, akan dilakukan koordinasi dengan instansi tekhnis lebih awal, sehingga penyusunan lebih cepat)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong telah melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perubahan yang diberikan kepada daerah.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran atau yang disebut dengan indikator kinerja utama (IKU) serta mengambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong mempunyai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Telah dilakukan perubahan Renstra 2019-2024 dan Indikator dan Target Kinerja Utama pada Perubahan Renja 2024 telah menyesuaikan dengan hasil Perubahan Renstra 2019-2024. Untuk mencapai sasaran tersebut dituangkan dalam beberapa indikator kinerja utama dengan target kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

1. Persentase kepemilikan kartu tanda penduduk dengan target 100%
2. Persentase kepemilikan kartu keluarga dengan target 100%

3. Persentase kepemilikan kartu identitas anak dengan target 85%
4. Penerapan KTP nasional berbasis NIK dengan target sudah
5. Persentase kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk dengan target 70%
6. Persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun dengan target 100%
7. Persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan dengan target 100%
8. Persentase Kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan target 100%
9. Persentase validitas database kependudukan dengan target 100%
10. Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten dengan target "Ada"
11. Nilai survey kepuasan masyarakat dengan target 92.00 (puas)
12. Persentase perangkat daerah yang pemanfaatan data dengan target 100%
13. Nilai evaluasi Akip dengan skor A (85.00)

Pada perubahan anggaran 2024 ini indikator kinerja sasaran tersebut diatas telah dijabarkan ke dalam 5 program, 14 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dalam upaya menunjang keberhasilan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.

Kualitas penyelenggaraan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Berdasarkan data pada tabel 2.3 diatas secara garis besar pelaksanaan sebagian besar kegiatan belum berjalan lancar dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait capaian kinerja sampai dengan hal triwulan II dan memerlukan tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Beberapa indikator kinerja baik program, kegiatan dan sub kegiatan pada renja 2024 sebagian besar sudah selaras dengan perubahan renstra 2019-2024 yang telah ditetapkan.
2. Terdapat kegiatan dan sub kegiatan yang sampai dengan tiwulan II masih belum dilaksanakan dan akan dilakukan penyesuaian/pemindahan belanja ke kegiatan dan sub kegiatan lain yang sesuai.

3. Masih terdapat rincian belanja yang masuk pada sub kegiatan yang tidak tepat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian/pemindahan belanja dari sub kegiatan satu ke sub kegiatan lain yang sesuai.

Adapun pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran atau indikator kinerja utama (IKU) yang telah disesuaikan dengan perubahan Renstra 2019-2024 berdasarkan data pelayanan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong

NO	Indikator	SPM/ Sandar Nasional	IKK	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)
1	Persentase kepemilikan kartu tanda penduduk	-	✓	✓	99,75%	99,85%	100%	100%	100%	99,05%	99,05%	99,03%	99,28%	99,42%	100%	
2	Persentase kepemilikan kartu keluarga	-	-	✓	100%	100%	100%	100%	100%	99,52%	99,60%	89,21%	100%	99,64%	100%	
3	Persentase kepemilikan kartu identitas anak	-	-	✓	75%	55%	70%	85%	100%	23,73%	45,97%	64,22%	70,27%	78,94%	100%	
4	Penerapan KTP Nasonal berbasis NIK	-	✓	✓	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	
5	Persentase kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	-	✓	✓	87%	55%	60%	65%	70%	53,33%	54,62%	60,09%	61,89%	63,89%	70%	
6	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun	-	✓	✓	95,50%	96%	96,50%	98%	100%	92,48%	93,28%	98,02%	98,67%	99%	100%	
7	Persentase kepemilkan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	-	✓	✓	72%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Pesentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	-	✓	✓	49%	100%	100%	100%	100%	100%	44,08%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	-	✓	✓	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase validitas database kependudukan	-	-	✓	99,50%	99,60%	99,70%	99,80%	100%	97,45%	99,20%	99,84%	100%	100%	100%	
11	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	-	✓	✓	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
12	Nilai survey kepuasan masyarakat	-	-	✓	Puas (85,00)	Puas (85,00)	Puas (87,00)	Puas (90,00)	Puas (92,00)	Puas (85,75)	Sangat Puas (89,63)	Sangat Puas (90,02)	Sangat Puas (91,58)	Sangat Puas (92,27)	Sangat Puas (93,00)	
13	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	-	-	✓	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	22,22%	26,82%	27%	
14	Indeks layanan kesekretariatan	-	-	✓	BB (76,00)	BB (78,00)	BB (80,00)	A (82,00)	A (85,00)	BB (77,28)	BB (77,47)	BB (77,57)	BB (79,60)	A (80,40)	A	

2.3. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Tema pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah "Penguatan Daya Saing Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas"

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaian yang merupakan refresentasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tabalong Tahun 2024 yang terkait dengan pelayanan Dinas Kependudukan Kabupaten Tabalong sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

No	Rancangan RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Disdukcapil**	**Nilai evaluasi Akip**	**A(85.00)**	**12.651.987.879**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Disdukcapil**	**Nilai evaluasi Akip**	**A(85.00)**	**12.651.987.879**	
1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Disdukcapil**	**Terlsusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8 laporan**	**8.990.080**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Disdukcapil**	**Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8 laporan**	**8.990.080**	
2.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Disdukcapil**	**Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**26 org / bulan**	**6.001.495.956**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Disdukcapil**	**Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**26 org / bulan**	**6.001.495.956**	
3.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Disdukcapil**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**142.524.364**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Disdukcapil**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**142.524.364**	
4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Disdukcapil**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**3.043.489.581**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Disdukcapil**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**3.043.489.581**	
5.	**Kegiatan Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Disdukcapil**	**Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 paket**	**911.621.326**	**Kegiatan Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Disdukcapil**	**Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 paket**	**911.621.326**	

6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapil	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2.147.216.572	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapil	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2.147.216.572	
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapil	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61 unit/item	423.280.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapil	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61 unit/item	423.280.000	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Disdukcapil	• Cakupan persentase kepemilikan KTP Elektronik, Persentase kepemilikan Kartu Keluarga dan Persentase kepemikan Kartu Identitas Anak	100% 100% 100%	356.504.264	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Disdukcapil	• Cakupan persentase kepemilikan KTP Elektronik, Persentase kepemilikan Kartu Keluarga dan Persentase kepemikan Kartu Identitas Anak	100% 100% 100%	356.504.264	
1.	Pelayanan pendaftaran penduduk	Disdukcapil	Jumlah dokumen kependudukan yang terbit	37.890 2 lap/dok	348.224.264	Pelayanan pendaftaran penduduk	Disdukcapil	Jumlah dokumen kependudukan yang terbit	37.890 2 lap/dok	348.224.264	
2.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	12 kec	8.280.000	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	12 kec	8.280.000	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	Cakupan persentase kepemilikan akta kelahiran per1000 penduduk, cakupan	70% 100% 100% 100% 100%	77.750.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	Cakupan persentase kepemilikan akta kelahiran per1000 penduduk,	70% 100% 100% 100% 100%	77.750.000	

			persentase kepemilikan akta anak 0-18 tahun, cakupan persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan, cakupan persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan, cakupan persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan					cakupan persentase kepemilikan akta anak 0-18 tahun, cakupan persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan, cakupan persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan, cakupan persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan			
1.	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Persentase permohonan akta kelahiran dan dan akta kematian yang diterbitkan kutipan aktanya	100%	64.430.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Persentase permohonan akta kelahiran dan dan akta kematian yang diterbitkan kutipan aktanya	100%	64.430.000	
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Jumlah hasil koordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	12 kec	7.470.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Jumlah hasil koordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	12 kec	7.470.000	

			bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam					bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam			
3.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12 kec	5.850.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12 kec	5.850.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Disdukcapil	-Cakupan perangkat daerah yang melakukan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan -Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) -Persentase validitas database kependudukan	37% Puas (92.00) 100%	3.777.710.974	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Disdukcapil	-Cakupan perangkat daerah yang melakukan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan -Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) -Persentase validitas database kependudukan	37% Puas (92.00) 100%	3.777.710.974	
1.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah SKPD yang melaksanakan kerjasama Pemanfaatan data kependudukan	10 SKPD	65.149.802	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah SKPD yang melaksanakan kerjasama Pemanfaatan data kependudukan	10 SKPD	65.149.802	

2.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	- Jumlah laporan hasil pelaksanaan SKM dan SPAK - Jumlah laporan inovasi pelayanan	27 lap	382.791.562	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	- Jumlah laporan hasil pelaksanaan SKM dan SPAK - Jumlah laporan inovasi pelayanan	27 lap	287.387.897	
3.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	8 lap	3.329.769.610	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	8 lap	3.329.769.610	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Disdukcapil	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	Ada	61.490.000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Disdukcapil	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	Ada	61.490.000	
1.	Penyusunan Profil Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah laporan data dan profil perkembangan pendudukan	3 dok	61.490.000	Penyusunan Profil Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Laporan data dan profil perkembangan kependudukan	3 dok	61.490.000	
	Jumlah				17.636.812.868	Jumlah				17.636.812.868	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja

Program-program pembangunan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam rangka Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan diantaranya sebagai berikuti :

1. Pelayanan jemput bola dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data kependudukan.
2. Percepatan kepemilikan akta anak 0-18 tahun dan KIA.
3. Pengadaan, peremajaan dan pemeliharaan peralatan operasional SIAK.
4. Peningkatan sumber daya manusia (operator SIAK).
5. Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan melalui pameran dan peningkatan inovasi pelayanan.
6. Pembinaan dan pengawasan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
7. Penyusunan profil kependudukan
8. Pengadaan pakaian dinas, pengadaan peralatan dan perlengkapan Gedung kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan kendaraan dinas operasional, pengadaan mebel rumah tangga, pengadaan aset tak berwujud, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, pakaian untuk hari jadi kabupaten, bahan bakar dan alat bantu kendaraan operasional serta untuk kelancaran pelaksanaan rapat koordinasi.

Rencana kerja dan pendanaan pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Sebelum Perubahan)							Rencana Tahun 2024 (Setelah Perubahan)					Catatan Penting
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Renja 2024			APBD 2024			Perubahan Renja 2024					
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai evaluasi akip	A (85,00)	8.939.144.588	APBD	A (85,00)	11.087.075.630	APBD	Nilai evaluasi Akip	A (86,00)	12.651.987.879	APBD	
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dok/lap	9.000.000	APBD	8 dok/lap	8.990.080	APBD	Terlaksananya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangka Daerah	8 laporan	8.990.080	APBD	
2	12	01	2.01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar SKPD	8 dok/lap	9.000.000	APBD	8 dok/lap	8.990.080	APBD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 laporan	8.990.080	APBD	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daeral	12 bulan	5.070.544.588	APBD	26 org/bln	5.590.590.000	APBD	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 org / bln	6.001.495.956	APBD	

2	12	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 orang/ bulan	5.070.544.588	APBD	26 orang/ bulan	5.590.590.000	APBD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 org/bln	6.001.495.956	APBD	
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**176 orang**	**101.000.000**	**APBD**	**100%**	**103.750.000**	**APBD**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**142.524.364**	**APBD**	
2	12	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	26 paket	25.000.000	APBD	71 paket	35.500.000	APBD	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	71 paket	74.274.364		
2	12	01	2.05	0001	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	140 orang	16.000.000	APBD	140 orang	13.250.000	APBD	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	140 orang	13.250.000		
2	12	01	2.05	0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 Orang	60.000.000	APBD	10 Orang	55.000.000	APBD	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10 orang	55.000.000	APBD	
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**177 Paket/ laporan**	**1.323.000.000**	**APBD**	**100%**	**2.370.579.025**	**APBD**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**3.043.459.581**	**APBD**	
2	12	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	8.000.000	APBD	3 paket	8.539.560	APBD	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 paket	8.539.560	APBD	

2	12	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	900.000.000	APBD	12 paket	1.308.111.613	APBD	Jumlah Paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disedikan	12 paket	1.826.843.353	APBD	
2	12	01	2.06	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	4.000.000	APBD	11 paket	517.388.438	APBD	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	11 paket	518.581.184	APBD	
2	12	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	4 paket	25.000.000	APBD	5 paket	94.271.414	APBD	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disedikan	5 paket	123.830.484	APBD	
2	12	01	2.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	5.000.000	APBD	1 dokumen	3.660.000	APBD	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dok	7.660.000	APBD	
2	12	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 laporan	380.000.000	APBD	163 laporan	438.608.000	APBD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	163 laporan	558.005.000	APBD	
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Dearah Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah**	**Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**8 unit**	**255.000.000**	**APBD**	**15 unit**	**760.530.406**	**APBD**	**Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**12 paket**	**911.621.326**	**APBD**	
2	12	01	2.07	0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	4 unit	100.000.000	APBD	2 unit	0	APBD	-	-	-		
2	12	01	2.07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	40.000.000	APBD	0 unit	0	APBD	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3 unit	121.090.920	APBD	

2	12	01	2.07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 paket	90.000.000	APBD	7 unit	740.530.406	APBD	Jumlah paket mebel yang disediakan	7 paket	740.530.406	APBD	
2	12	01	2.07	0008	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	1 unit	10.000.000	APBD	1 unit	20.000.000	APBD	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	1 unit	50.000.000	APBD	
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 bulan**	**1.982.600.000**	**APBD**	**100%**	**1.969.116.119**	**APBD**	**Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**2.147.216.572**	**APBD**	
2	12	01	2.08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	600.000	APBD	12 laporan	600.000	APBD	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	600.000	APBD	
2	12	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 laporan	182.000.000	APBD	12 laporan	158.000.000	APBD	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 laporan	159.800.000	APBD	
2	12	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.800.000.000	APBD	12 laporan	1.810.516.119	APBD	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	1.986.816.572	APBD	
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**49 unit**	**198.000.000**	**APBD**	**62 unit**	**283.520.000**	**APBD**	**Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**61 unit/ item**	**396.680.000**	**APBD**	

2	12	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 Unit	150.000.000	APBD	24 Unit	258.550.000	APBD	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya	23 unit	371.710.000	APBD	
2	12	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	30 unit	18.000.000	APBD	37 unit	24.970.000	APBD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	37 unit	24.970.000	APBD	
2	12	01	2.09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	30.000.000	APBD	0 Unit	0	APBD	-	-	-	-	
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTAN PENDUDUK**	• **Persentase cakupan kepemilikan KTP Elektronik, Persentase cakupan kepemilikan Kartu Keluarga dan Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak**	**100% 100% 100%**	**356.454.564**	**APBD**	**100% 100% 100%**	**356.504.264**	**APBD**	**Persentase cakupan kepemilikan KTP Elektronik, Persentase cakupan kepemilikan Kartu Keluarga dan Persentase cakupan kepemikan Kartu Identitas Anak**	**100% 100% 100%**	**287.444.400**	**APBD**	
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan pendaftaran penduduk**	**Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang terbit**	**36.800 dokumen pendafduk dan 1 laporan hasil pendataan**	**313.658.196**	**APBD**	**37.890 dokumen pendafduk dan 2 laporan hasil pendataan**	**348.224.264**	**APBD**	**Jumlah dokumen kependudukan yang terbit**	**37.890 dokumen 2 lap/dok**	**281.414.400**	**APBD**	

2	12	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	1 dokumen	73.658.196	APBD	2 dokumen	65.550.000	APBD	Dokumen dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	2 dokmen	27.060.000	APBD	
2	12	02	2.01	0002	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen, pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	36.000 dokumen	20.000.000	APBD	36.000 dokumen	19.901.400	APBD	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	36.000 dokumen	19.901.400	APBD	
2	12	02	2.01	0004	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1 laporan	200.000.000	APBD	1 laporan	242.801.864	APBD	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan atas pendaftaran penduduk	1 Laporan	229.317.000	APBD	
2	12	02	2.01	0005	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelapoaran Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	36.000 dokumen	20.000.000	APBD	60 dokumen	19.971.000	APBD	Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	60 dokumen	5.136.000	APBD	
2	**12**	**02**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**12 kecamatan**	**42.796.368**	**APBD**	**12 kecamatan**	**8.280.000**	APBD	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**12 kec**	**6.030.000**	**APBD**	
2	12	02	2.04	0002	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	1 laporan	42.796.386	APBD	1 laporan	8.280.000	APBD	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	1 laporan	6.030.000	APBD	

2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran per1000 penduduk, persentase kepemilikan akta anak 0-18 tahun, persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan, persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan, persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	70% 100% 100% 100% 100%	154.703.000	APBD	70% 100% 100% 100% 100%	153.650.000	APBD	Cakupan Persentase kepemilikan akta kelahiran per1000 penduduk, cakupan persentase kepemilikan akta anak 0-18 tahun, cakupan persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan, cakupan persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan, cakupan persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	70% 100% 100% 100% 100%	77.750.000	APBD	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase permohonan akta kelahiran dan dan akta kematian yang diterbitkan kutipan aktanya	100%	136.201.660	APBD	19.120 layanan	135.680.000	APBD	Jumlah layanan pencatatan sipil dan paket pengadaan dokumen	-	64.430.000	APBD	

2	12	03	2.01	0001	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	19.120 dokumen	111.572.324	APBD	17 dokumen	24.300.000	APBD	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	11 dokumen	12.000.000		
2	12	03	2.01	0002	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	17 layanan	24.629.336	APBD	19.120 layanan	111.380.000	APBD	Jumlah layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	19.120 layanan	52.430.000	APBD	
2	**12**	**03**	**2.03**		**Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Persentase permohonan akta perkawinan dan akta perceraian yang diterbitkan kutipan aktanya**	**100%**	**10.800.000**	**APBD**	**12 kec**	**10.620.000**	**APBD**	**Jumlah hasil koordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam**	**13 kec**	**7.470.000**	**APBD**	
2	12	03	2.03	0001	Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementrian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, cerai dan	Jumlah laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementrian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan	12 laporan	10.800.000	APBD	12 laporan	10.620.000	APBD	Jumlah hasil Koordinasi dengan Kantor Kementrian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan	12 laporan	7.470.000	APBD	

					Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Pencatatan Nikah, Talak, cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam							Nikah, Talak, cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				
2	**12**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**12 Kec**	**7.701.340**	**APBD**	**12 Kec**	**7.350.000**	**APBD**	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**13 kec**	**5.850.000**	**APBD**	
2	12	03	2.03	0002	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan	12 kec	7.701.340	APBD	12 lap	7.350.000	APBD	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan	13 laporan	5.850.000	APBD	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**-Persentase validitas database kependudukan -Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) -Cakupan perangkat derah yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan**	**100% Sangat Puas (92,00) 100%**	**3.144.968.666**	**APBD**	**100% Puas (92,00) 100%**	**3.285.813.974**	**APBD**	**Cakupan perangkat daerah yang melakuakan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan, nilai survey kepuasan (SKM), persentase validitas database kependudukan**	**37% Sangat Puas (92,00) 100%**	**4.266.063.545**	**APBD**	
2	**12**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Jumlah SKPD yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan**	**30 SKPD**	**85.000.000**	**APBD**	**40 SKPD**	**49.639.802**	**APBD**	**Jumlah SKPD yang melaksanakan kerjasama Pemanfaatan data kependudukan, pelaksanaan skm dan inovasi pelayanan**	**40 SKPD**	**56.508.002**	**APBD**	

2	12	04	2.01	0002	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	30 dokumen	85.000.000	APBD	30 dokumen	49.639.802	APBD	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	30 dokumen	56.508.002	APBD	
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan**	**12 survey 50 peserta 1 inovasi**	**150.000.000**	**APBD**	**25 lap 1 lap**	**261.404.562**	**APBD**	**- Jumlah laporan hasil pelaksanaan SKM dan SPAK - Jumlah laporan inovasi pelayanan**	**27 lap**	**434.821.170**	**APBD**	
2	12	04	2.03	0003	Sub Kegiatan Fasilitas terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 laporan	100.000.000	APBD	2 laporan	221.654.554	APBD	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 laporan	363.711.162	APBD	
2	12	04	2.03	0005	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 laporan	50.000.000	APBD	2 laporan	39.750.008	APBD	Jumlah laporan hasil Sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 laporan	71.110.008	APBD	
2	12	04	2.03	0006	Sub Kegiatan Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah dokumen kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan da perguruan tinggi	1 dokumen	0	APBD	0 dokumen	0	APBD	-	-	-	-	

2	**12**	**04**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase pelaksanaan SIAK (jaringan SIAK kabupaten dan kecamatan dalam kondisi baik dan peralatan SIAK hard dan sortware dalam kondisi baik, update data kependudukan 25 desa)**	**100% 100% 25 desa**	**2.909.968.666**	**APBD**	**4 lap 5 lap**	**2.974.769.610**	**APBD**	**Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan**	**8 laporan**	**3.774.734.373**	**APBD**	
2	12	04	2.04	0001	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 laporan	2.777.500.000	APBD	2 laporan	2.749.551.396	APBD	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 laporan	3.495.937.159	APBD	
2	12	04	2.04	0003	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	5 laporan	132.468.666	APBD	5 laporan	225.218.214	APBD	Jumlah laporan hasil Bimbingan Teknis terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan pendayaguna an Data Kependudukan	5 laporan	278.797.214	APBD	
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten**	**3 dok 12 lap**	**110.651.000**	**APBD**	**Ada**	**63.530.000**	**APBD**	**Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten**	**Ada**	**74.234.000**	**APBD**	
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Jumlah laporan data dan profil perkembanagan kependudukan**	**3 dok 12 lap**	**110.651.000**	**APBD**	**3 dok**	**63.530.000**	**APBD**	**Jumlah Laporan data dan profil perkembangan kependudukan**	**3 dok**	**74.234.000**	**APBD**	

2	12	05	2.01	02	Sub Kegiatan penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	3 dok	110.651.000	APBD	3 dok	63.530.000	APBD	Jumlah dokumen profil perkembangan dan proyeksi kependudukan ser kebutuhan lainnya yang tersusun	3 dok	**74.234.000**	APBD	
					Jumlah			**12.705.921.818**			**14.946.573.868**				**17.357.479.824**		

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Disdukcapil Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Tabalong di dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Disdukcapil pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong.
2. Penyusunan Perubahan Renja Disdukcapil ini berpedoman pada Perubahan Renstra Disdukcapil Tahun 2019-2024, sehingga difokuskan pada upaya pencapaian seluruh target pada Renstra.
3. Penyusunan Perubahan Renja Disdukcapil ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Disdukcapil ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Disdukcapil Kabupaten Tabalong Tahun 2024.
2. Dalam penyusunan RKPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong, begitu pula dalam penyusunan RKPA dimungkinkan terjadinya

Perubahan berdasarkan hasil asistensi dan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tabalong.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2024 untuk setiap triwulannya.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, dengan melibatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dan stakeholders pembangunan di Kabupaten Tabalong.

Akhir kata, Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, Agustus 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. TABALONG,

Ir. ROWI RAWATIANICE, M. T
Pembina Utama Muda
Nip. 19661125 199403 2 003

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

#bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong telah selesai menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024, yang memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan sampai dengan triwulan satu dan Capaian Renstra, tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikatif pembiayaan tahun anggaran 2024

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah bagian dari proses perencanaan kerja pertahun terhadap program kegiatan sub kegiatan indikator target maupun pagu anggaran dikarenakan adanya pergeseran maupun perubahan didalam implementasi pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Akhirnya dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini, maka langkah-langkah yang diambil dalam mewujudkan sasaran dan tujuan pembangunan di Kabupaten Tabalong dapat tercapai, terlaksana dan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan

Tanjung, Juni 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabalong,

H. SLAMET RIYADI, ST
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670815 199603 1 004

DAFTAR ISI

			Halaman
Kata Pengantar			i
Daftar isi			ii
BAB	I	PENDAHULUAN	1
		1.1. Latar Belakang	1
		1.2. Landasan Hukum	1
		1.3. Maksud dan Tujuan	2
		1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB	II	EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP S/D TRIWULAN II TAHUN 2024	4
		2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai denganTriwulan II	4
		2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	17
BAB	III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	19
BAB	IV	PENUTUP	32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Kabupaten Tabalong merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2024, rencana kerja anggaran perubahan perangkat daerah yang apabila telah melalui proses pembahasan dan persetujuan oleh tim eksekutif dan legislatif selanjutnya diproses untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (DPAP-PD) sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan APBDP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Tabalong memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan di sektor lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 yaitu : "Menuju Kabupaten Tabalong yang Lebih Agamis, Sejahtera dan Mandiri"

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong dalam tataran kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum akan mengimplentasikan nilai-nilai yang terkandung pada misi pertama yakni "Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Agamis", namun dalam tataran kebijakan teknis akan sinergis dengan menetapkan beberapa program strategis yang berfokus dan berkaitan langsung dengan ke tiga yaitu :

- Mewujudkan kemandirian daerah

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2024 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Pencanan Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
12. Perda No 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Tabalong 2019 – 2024;
13. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Tabalong;
14. Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor B-83/BAPPEDALITBANG/000.7/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah untuk mengetahui :

1. Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2024 yang mengalami pergeseran / perubahan
2. Lokasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

Tahun 2024 yang mengalami pergeseran / perubahan

3. Indikator dan Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong yang mengalami pergeseran / perubahan
4. Kelompok Sasaran Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2024 yang mengalami pergeseran / perubahan
5. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Perubahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2024 yang mengalami pergeseran / perubahan

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah kebijakan dan acuan dalam :

1. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Perubahan (RKAP-PD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (DPAP-PD) dan Rencana Perjanjian Kinerja Perubahan;
2. Penilaian Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup / Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
3. Memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada tahun anggaran 2024
4. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antara Sekretariat, Bidang-Bidang dan UPTD serta antar instansi terkait;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republi Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perencanaan Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan
BAB II Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup s/d Triwulan II Tahun 2024
BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup
BAB IV Penutup
LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 sampai dengan triwulan 2 (dua) posisi bulan Juni Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.1.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong

Belanja	Anggaran (Rp)		
	Anggaran 2024	Realisasi sd Juni 2024	% Capaian
Pendapatan Daerah	945.000.000	364.780.500	38,60
Belanja Daerah	66.270.385.423	13.835.437.150	20,88
- Belanja operasi	50.259.052.688	12.683.126.229	25,24
- Belanja Pegawai	12.261.715.000	3.745.436.897	30,55
- Belanja Barang dan Jasa	37.997.337.688	8.937.689.332	23,52
- Belanja Modal (BM) :	16.011.332.735	1.152.310.921	7,20
- BM Tanah	1.165.000.000	0	0
- BM Peralatan dan mesin	12.808.864.121	874.508.000	6,83
- BM Gedung dan bangunan	2.007.468.614	277.802.921	13,84
- BM Aset lainnya	30.000.000	0	0

Sedangkan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Renja Tahun 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1.2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong s/d Mei 2024 dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024

PD : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sub kegiatan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan sub Kegiatan 2024			Target Program dan Kegiatan sub kegiatan renstra 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024 s/d Juni 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Ke giatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2.11	Bidang Urusan Lingkungan Hidup									
	Dinas Lingkungan Hidup Daerah									
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten	Predikat / Nilai AKIP BB	BB	BB	BB			BB		
2.11.01.2.01	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	50	8 dokumen	4 dokumen	50
2.11.01.2.01.01	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	50	8 dokumen	4 dokumen	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sub kegiatan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan sub Kegiatan 2024			Target Program dan Kegiatan sub kegiatan renstra 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024 s/d Juni 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Ke giatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan tepat waktu	48 laporan	4 laporan	48 laporan	12 laporan	25	48 laporan	12 laporan	25
2.11.01.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	69 orang	69 orang / bulan	69 orang	65 orang	94,20	69 orang	65 orang	94,20
2.11.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah tertib dan tepat waktu	12 bulan	74 nilai ikm	12 bulan	3 bulan	25	12 bulan	3 bulan	25
2.11.01.2.06.02	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket	6 paket	6 paket	2 paket	33,33	6 paket	2 paket	33,33
2.11.01.2.06.09	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	26 laporan	24 ok	26 laporan	7 laporan	27	26 laporan	7 laporan	27
2.11.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang urusan pemda yang tersedia di perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	3 bulan	25	12 bulan	3 bulan	25
2.11.01.2.09	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	3 bulan	25	12 laporan	3 bulan	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sub kegiatan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan sub kegiatan 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024 s/d Juni 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Ke giatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah yang dipelihara oleh perangkat daerah	40 unit	40 unit	40 unit	12 unit	30	40 unit	12 unit	30
2.11.01.2.09.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 unit	40 unit	30 unit	10 unit	33,33	30 unit	10 unit	33,33
2.11.01.2.09.06	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	5 unit	5 unit	1 unit	20	5 unit	1 unit	20
2.11.01.2.09.10	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	1 unit	50	2 unit	1 unit	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sub kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan sub kegiatan 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024 s/d Juni 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Ke giatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen lingkungan yang updating	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100
2.11.02.2.01	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH	Dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50	1 dokumen	1 dokumen	50
2.11.02.2.01.02	Sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten / kota	1 dokumen	1 dokumen IKPLHD	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
2.11.02.2.02	Kegiatan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kabupaten / kota	dokumen KLHS yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
2.11.02.2.02.03	Sub Kegiatan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD / RPJMD kabupaten / kota yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024 s/d Juni 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Ke giatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.03	Program Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Indeks kualitas udara indeks kualitas air Indeks kualitas lahan	89,5 point 61 point 64,5 point	70,79 point 68,79 point 60 point	89,5 point 61 point 64,5 point	0	0	89,5 point 61 point 64,5 point	0	0
2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Aksi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	4 aksi	3 aksi	4 aksi	2 aksi	40	4 aksi	2 aksi	40
	Sub kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap tanah, air udara da air laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air udara dan air laut	4 dokumen	30 titik pantau	4 dokumen	1 dokumen	25	4 dokumen	1 dokumen	25
2.11.03.2.01.0015	Sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / kota	Jumlah pengujian yang dilakukan oleh laboratorium lingkungan	225 sampel	200 sampel uji	225 sampel	101 sampel	40,4	225 sampel	101 sampel	40,4
2.11.03.2.02	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Aksi Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 aksi	1 aksi	1 aksi			1 aksi		
2.11.03.2.02.0001	Sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan kabupaten / kota yang dilaksanakan	2 laporan	2 laporan	2 laporan			2 laporan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024 s/d Juni 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Ke giatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	73%	70%	73%	62%	82,19	73%	62%	82,19
2.11.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas lahan terkonservasi	825,26 ha	838,99 ha	825,26 ha	281,75 ha	33,54 ha	825,26 ha	281,75 ha	33,54
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
2.11.04.2.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya	Luas kebun raya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten / kota	15 ha	13,54 ha	15 ha	2,75 ha	8,33 ha	15 ha	2,75 ha	8,33
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten / kota	774,65 ha	825,45 ha	774,65 ha	279 ha	33,80 ha	774,65 ha	279 ha	33,80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024 s/d Juni 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Ke giatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha / kegiatan yang taat dalam pengelolaan Limbah B3	70%	100%	70%	12%	12	70%	12%	12
2.11.05.2.01	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha / kegiatan yang dibina dalam pengelolaan LB3	24 pelaku usaha kegiatan	25 pelaku usaha kegiatan	24 pelaku usaha kegiatan	4 pelaku usaha kegiatan	26,67	24 pelaku usaha kegiatan	4 pelaku usaha kegiatan	26,67
2.11.05.2.01.0001	Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitasi persetujuan / izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	5 dokumen	10 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	20	5 dokumen	1 dokumen	20
2.11.05.2.01.000	Sub kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah laporan kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	15 laporan	15 laporan	15 laporan			15 laporan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024 s/d Juni 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Ke giatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha / kegiatan terhadap izin lingkungan, izin pplh dan puu lh yang diterbitkan	100%	120%	100%	30,77%	30,77	100%	30,77%	30,77
2.11.06.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanngung jawab usaha / kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin pplh dan puu lh yang diterbitkan	40 pelaku usaha	36 pelaku usaha / kegiatan	40 pelaku usaha	4 pelaku usaha	26,67	40 pelaku usaha	4 pelaku usaha	26,67
2.11.06..2.01.0006	Sub kegiatan Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota dan peraturan perundang – undangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah badan usaha dan / atau kegiatan yang diawasi	40 pelaku usaha	36 pelaku usaha / kegiatan	40 pelaku usaha	4 pelaku usaha	26,67	40 pelaku usaha	4 pelaku usaha	26,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024 s/d Juni 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Ke giatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase masyarakat hukum adat (MHA) yang diakui terkait PPLH	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
2.11.07.2.02	Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak M;HA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Masyarakat hukum adat	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	100	1 kelompok	1 kelompok	100
2.11.07.2.02.0001	Sub kegiatan Pemberdayaan Kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH	Jumlah dokumen kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisionak dan hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan pendampingan dan penguatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024 s/d Juni 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Ke giatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pembinaan, penyuluhan dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan	80%	86,8%	80%	20,55%	20,55	80%	20,55%	20,55
2.11.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten / kota	Pembinaan, penyuluhan dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	73 dokumen	59 sekolah	73 dokumen	15 dokumen	37,5	73 dokumen	15 dokumen	37,5
2.11.08.2.01.0002	Sub kegiatan Pendampingan Gerakan peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan pembinaan Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	73 dokumen	59 sekolah	73 dokumen	15 dokumen	37,5	73 dokumen	15 dokumen	37,5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024 s/d Juni 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Ke giatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup	Persentase pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	40%	40	100%	40%	40
2.11.10.2.01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten	Pengaduan Masyarakat di bidang PPLH kabupaten / kota yang selesai di mediasi	10 pengaduan	11 kasus	10 pengaduan	4 pengaduan	40	10 pengaduan	4 pengaduan	40
2.11.10.2.01.0004	Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Tingkat kabupaten / kota	Jumlah Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10 pengaduan	11 kasus	10 pengaduan	4 pengaduan	40	10 pengaduan	4 pengaduan	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024 s/d Juni 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Ke giatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.11	Program Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah	30%	24%	30%	5,20%	18,57	30%	5,20%	18,57
		Persentase penanganan sampah	70%	94,64%	70%	22,22%	31,29	70%	22,22%	31,29
2.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Cakupan pengelolaan sampah kabupaten	70%	70%	70%			70%		
2.11.11.2.01.0015	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dsan terpelihara dengan baik	34 unit	34 unit	34 unit	34 unit	56,67	34 unit	34 unit	56,67
2.11.11.2.01.0017	Sub kegiatan Penanganan sampah melalui Pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS 3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PltSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS 3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PltSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		8.325 ton						
2.11.11.2.01.0020	Sub kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten / kota atau TPA/TPST regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST regional	25.225 ton	36.124,5 ton	25.225 ton	9.085 ton	36,02	25.225 ton	9.085 ton	36,02

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 2.2.1
Isu Strategis Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel

Isu Strategis Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan
- Menjaga kualitas lingkungan hidup	- Pengelolaan sumber daya alam yang Lestari dan berkelanjutan
- Pemanasan Global	- Peningkatan kelestarian lingkungan dengan prinsip pembangunan berketahanan dan berkelanjutan
- Menjaga DAS	- Upaya pelestarian
- Pengendalian Perubahan iklim	- Asap
- Menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan SDA untuk kelangsungan kehidupan,	- Pemanfaatan SDA tanpa memperhatikan kaidah konservasi SDA dan LH
- Menjaga daya dukung fisik ruang wilayah serta kualitasnya.	- Terjadinya tumpang tindah pemanfaatan ruang.

Tabel 2.2.2.
Isu Strategis RPD Kabupaten Tabalong dan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabalong dalam renstra 2025 - 2026

Isu Strategis RPD Kabupaten Tabalong	Isu Strategis Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
- Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan	1 Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup
	2 Belum optimalnya kinerja pengelolaan sampah

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Peningkatan Pengawasan dan penegakan hukum kepada pelaku usaha/kegiatan	- Menyusun dan meningkatkan pengelolaan data dan informasi lingkungan hidup
Belum optimalnya kinerja pengelolaan sampah	Meningkatkan pengelolaan sampah kabupaten	Meningkatnya pengelolaan sampah kabupaten	- Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengendalian dampak perubahan iklim	- Mengendalikan pencemaran melalui pemantauan kualitas air udara tanah, inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar serta dampak perubahan iklim
			- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan persampahan	- Melakukan pembinaan, pengawasan dan serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
			- Meningkatkan kinerja Laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	- Meningkatan mutu laboratorium lingkungan
			- Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup	- Meningkatkan pengelolaan persampahan yang masuk ke TPA
			- Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati	- Melakukan perhitungan timbulan sampah
			- Meningkatkan Prasarana dan Pengelolaan Sarana Persampahan	- Melakukan sosialisasi dan pelayanan di bidang persampahan
			- Meningkatkan Penghijauan dan Penanaman Pohon	- Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan hidup dan persampahan
			- Mempercepat realisasi kebun raya tabalong	- Melakukan Gerakan Menanam Pohon (Gentas Hijau)
			Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau	- Melakukan pemeliharaan, dan menambah luasan RTH Kabupaten

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan prioritas pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong telah ditetapkan program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada perubahan tahun melalui 10 (sepuluh) program 16 (enam belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan , sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten	1 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			7 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			8 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Perencanaan Lingkungan Hidup	6 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	10 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
		7 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	11 Penyelenggaraan KLHS rencana tata ruang
3	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	8 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12 Pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara dan laut
			13 Pengelolaan Laboratorium lingkungan hidup kabupaten / kota
		9 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	14 Pemberian informasi peringatan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup pada Masyarakat

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
4	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	10 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	15 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan
			16 Pengelolaan Kebun Raya
			17 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
5	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	11 Penyimpanan Sementara Limbah B3	18 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
			19 Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 kabupaten / kota
6	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	12 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	20 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	13 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Pemberdayaan Kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH
8	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	14 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	28 Pendampingan Gerakan peduli Lingkungan Hidup
9	Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup	15 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten	29 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten
10	Pengelolaan Persampahan	16 Pengelolaan sampah	30 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
			31 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
			32 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Tahun 2024				Usulan Perubahan Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu setelah pergeseran 1 (Rp)	Sumber Dana	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
2.11	Bidang Lingkungan Hidup									
	Dinas Lingkungan Hidup									
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten	Nilai AKIP	Kabupaten Tabalong	BB		APBD	Nilai AKIB baik	BB		
2.11.01.2.01	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja perangka daerah		8 dokumen			Penyusunan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja perangka daerah	8 dokumen		
2.11.01.2.01.01	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 dokumen	44.651.500		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	25.200.000	Pengurangan belanja fotcopy dan forum PD ke sub kegiatan rakor
2.11.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan tepat waktu		48 laporan			Administrasi keuangan tepat waktu	48 laporan		
2.11.01.2.02.01	Sub kegiatanPenyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		69 orang	12.076.135.000		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 orang	12.176.135.000	penambahan untukkekurangan pembayaran tunjangan dan iuran kesehatan tenaga P3K dan insentrif retibusi
2.11.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah tertib dan tepat waktu		12 bulan			Administrasi umum perangkat daerah tertib dan tepat waktu	12 bulan		
2.11.01.2.06.02	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6 paket	361.478.855		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	731.478.855	Penambahan pembelian paket AC, laptop, printer, scanner, gorden, dispenser, dll
2.11.01.2.06.09	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		26 laporan	323.437.000		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	26 laporan	623.437.000	Penambahan anggaran biaya kontribusi, perjalanan dinas keluar daerah dan dalam daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Tahun 2024				Usulan Perubahan Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu setelah pergeseran 1 (Rp)	Sumber Dana	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan layanan umum perangkat daerah	Kabupaten Tabalong	12 bulan		APBD	Jumlah penyediaan layanan umum perangkat daerah	12 bulan		
2.11.01.2.09	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 bulan	2.287.006.520		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan	2.597.006.520	penambahan anggaran belanja pameran dalam hari jadi kab tabalong, belanja Listrik, belanja penamabhan 1 bulan Upah Karyawan
2.11.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah yang dipelihara oleh perangkat daerah		40 unit			Barang milik daerah yang dipelihara oleh perangkat daerah	40 unit		
2.11.01.2.09.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		30 unit	300.000.000		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 unit	700.000.000	Penambahan anggaran belanja mobil dinas operasional sekretaris
2.11.01.2.09.06	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		5 unit	39.070.000		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	39.070.000	pergeseran
2.11.01.2.09.10	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		2 unit	131.438.920		Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	131.438.920	pergeseran

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Tahun 2024				Usulan Perubahan Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu setelah pergeseran 1 (Rp)	Sumber Dana	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen lingkungan yang updating	Kabupaten Tabalong	2 dokumen		APBD	Dokumen lingkungan yang updating	2 dokumen		
2.11.02.2.01	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH	Dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di perangkat daerah		1 dokumen			Dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di perangkat daerah	1 dokumen		
2.11.02.2.01.02	Sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten / kota		1 dokumen	155.898.020		Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten / kota	1 dokumen	155.898.020	pergeseran
2.11.02.2.02	Kegiatan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kabupaten / kota	dokumen KLHS yang tersedia		1 dokumen			dokumen KLHS yang tersedia	1 dokumen		
2.11.02.2.02.03	Sub Kegiatan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD / RPJMD kabupaten / kota yang disusun		1 dokumen	500.000.000		Jumlah dokumen KLHS RPJPD / RPJMD kabupaten / kota yang disusun	1 dokumen	600.000.000	Penambahan belanja tenaga konsultan revisi dokumen KLHS RPJPD / RPJMD

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Tahun 2024				Usulan Perubahan Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu setelah pergeseran 1 (Rp)	Sumber Dana	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.03	Program Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Indeks kualitas udara indeks kualitas air Indeks kualitas lahan	Kabupaten Tabalong	89,5 point 61 point 64,5 point		APBD	Indeks kualitas udara indeks kualitas air Indeks kualitas lahan	89,5 point 61 point 64,5 point		
2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Aksi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan		4 aksi			Aksi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	4 aksi		
	Sub kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap tanah, air udara da air laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air udara dan air laut		4 dokumen	169.999.520		Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air udara dan air laut	4 dokumen	269.999.520	penambahan untuk belanja perjalanan dinas luar daerah kegiatan pemantauan
2.11.03.2.01.0015	Sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / kota	Jumlah pengujian yang dilakukan oleh laboratorium lingkungan		225 sampel	11.259.939.673		Jumlah pengujian yang dilakukan oleh laboratorium lingkungan	225 sampel	10.259.939.673	Pengurangan dan pergeseran belanja untuk penambahan upah tenaga kontrak, perencanaan pemeliharaan pagar dan halaman,, belanja kendaraan oprsl lab, pengadaan meja kursi, penambahan daya Listrik, pemeliharaan kantor lab
2.11.03.2.02	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Aksi Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan		1 aksi			Aksi Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 aksi		
2.11.03.2.02.0001	Sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan kabupaten / kota yang dilaksanakan		2 laporan	164.999.882		Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan kabupaten / kota yang dilaksanakan	2 laporan	264.999.882	Penambahan untuk belanja jaldin dd dan luar daerah, monev proklim, study tiru kampung iklim, bimtek teknis

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Tahun 2024				Usulan Perubahan Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu setelah pergeseran 1 (Rp)	Sumber Dana	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	Kabupaten Tabalong	73%		APBD	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	73%		
2.11.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas lahan terkonservasi		825,26 ha			Luas lahan terkonservasi	825,26 ha		
2.11.04.2.01.0001	Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun		1 dokumen	94.380.272		Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	1 dokumen	194.380.272	penambahan untuk belanja penyusunan dok inventarisasi kehati
2.11.04.2.01.0003	Sub kegiatan Pengelolaan Kebun Raya	Luas kebun raya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten / kota		15 ha	153.853.943		Luas kebun raya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten / kota	15 ha	196.103.943	Penambahan untuk belanja kekurangan upah tenaga kontrak, pakaian lapangan, perjalanan dinas biasa
2.11.04.2.01.0004	Sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten / kota		774,65 ha	7.000.602.406		Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten / kota	774,65 ha	14.478.173.106	Penambahan untuk belanja jasa Konsultan Perencanaan RTH Stadion Batu Pulut, RTH Pasar Lama Haruai/jembatan, RTH kawasan Mesjid Ash Shiratal Mustaqim, RTH Madrasyah Desa Garagata Kec.Jaro, , RTH Taman Mesjid Desa Ojek Simpung, RTH Desa Catur Karya, RTH Madrasah Tsanawiyah Negeri 11 Tabalong, Pembelian sarana mobil operasional RTH, Pengadaan lahan RTH Maluyung, Lahan Desa Nawin, Penanaman, tossa, bak sampah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Tahun 2024				Usulan Perubahan Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu setelah pergeseran 1 (Rp)	Sumber Dana	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha / kegiatan yang taat dalam pengelolaan Limbah B3	Kabupaten Tabalong	70%		APBD	Persentase pelaku usaha / kegiatan yang taat dalam pengelolaan Limbah B3	70%		
2.11.05.2.01	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha / kegiatan yang dibina dalam pengelolaan LB3		24 pelaku usaha kegiatan			Jumlah pelaku usaha / kegiatan yang dibina dalam pengelolaan LB3	24 pelaku usaha kegiatan		
2.11.05.2.01.0001	Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitasi persetujuan / izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		5 dokumen	433.199.930		Jumlah fasilitasi persetujuan / izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	5 dokumen	608.199.930	Penambahan untuk belanja dropbox untuk limbah b3
2.11.05.2.01.000	Sub kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah laporan kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3		15 laporan	24.000.000		Jumlah laporan kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	15 laporan	24.000.000	pergeseran

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Tahun 2024				Usulan Perubahan Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu setelah pergeseran 1 (Rp)	Sumber Dana	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha / kegiatan terhadap izin lingkungan, izin pplh dan puu lh yang diterbitkan	Kabupaten Tabalong	100%		APBD	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha / kegiatan terhadap izin lingkungan, izin pplh dan puu lh yang diterbitkan	100%		
2.11.06.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha / kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin pplh dan puu lh yang diterbitkan		40 pelaku usaha			Jumlah penanngung jawab usaha / kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin pplh dan puu lh yang diterbitkan	40 pelaku usaha		
2.11.06..2.01.0006	Sub kegiatan Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota dan peraturan perundang – undangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah badan usaha dan / atau kegiatan yang diawasi		40 pelaku usaha	194.919.852		Jumlah badan usaha dan / atau kegiatan yang diawasi	40 pelaku usaha	194.919.852	pergeseran

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Tahun 2024				Usulan Perubahan Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu setelah pergeseran 1 (Rp)	Sumber Dana	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase masyarakat hukum adat (MHA) yang diakui terkait PPLH	Kabupaten Tabalong	100%		APBD	Persentase masyarakat hukum adat (MHA) yang diakui terkait PPLH	100%		
2.11.07.2.02	Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak M;HA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Masyarakat hukum adat		1 kelompok			Jumlah Masyarakat hukum adat	1 kelompok		
2.11.07.2.02.0001	Sub kegiatan Pemberdayaan Kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH	Jumlah dokumen kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisionak dan hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan pendampingan dan penguatan		1 dokumen	100.015.840		Jumlah dokumen kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisionak dan hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan pendampingan dan penguatan	1 dokumen	156.955.840	Penambahan untuk perjalanan dinas keluar daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Tahun 2024				Usulan Perubahan Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu setelah pergeseran 1 (Rp)	Sumber Dana	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pembinaan, penyuluhan dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan	Kabupaten Tabalong	80%		APBD	Persentase pembinaan, penyuluhan dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan	80%		
2.11.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten / kota	Pembinaan, penyuluhan dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan		73 dokumen			Pembinaan, penyuluhan dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	73 dokumen		
2.11.08.2.01.0002	Sub kegiatan Pendampingan Gerakan peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan pembinaan Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan		73 dokumen	347.659.959		Jumlah pendampingan pembinaan Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	73 dokumen	453.125.909	Penambahan untuk belanja hadiah perlombaan dan makan minum aksi lingkungan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Tahun 2024				Usulan Perubahan Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu setelah pergeseran 1 (Rp)	Sumber Dana	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup	Persentase pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti	Kabupaten Tabalong	100%		APBD	Persentase pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti	100%		
2.11.10.2.01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten	Pengaduan Masyarakat di bidang PPLH kabupaten / kota yang selesai di mediasi		10 pengaduan			Pengaduan Masyarakat di bidang PPLH kabupaten / kota yang selesai di mediasi	10 pengaduan		
2.11.10.2.01.0004	Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Tingkat kabupaten / kota	Jumlah Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten kota yang ditindaklanjuti/ditangani		10 pengaduan	194.919.684		Jumlah Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10 pengaduan	160.297.413	Pengurangan dan pergeseran

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Tahun 2024				Usulan Perubahan Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu setelah pergeseran 1 (Rp)	Sumber Dana	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.11	Program Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah	Kabupaten Tabalong	30%		APBD	Persentase pengurangan sampah	30%		
		Persentase penanganan sampah		70%			Persentase penanganan sampah	70%		
2.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Cakupan pengelolaan sampah kabupaten		70%			Cakupan pengelolaan sampah kabupaten	70%		
2.11.11.2.01.0015	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dsan terpelihara dengan baik		34 unit	19.030.309.850		Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dsan terpelihara dengan baik	34 unit	20.296.476.223	penambahan gajih petugas kebersihan, kekurangan belanja pembelian 4 buah truck, penambahan belanja container, perjaldin ld, CCTV, pengadaan tossa, bak sampah, rehab TPS pasar arba, mabuun, kapar
2.11.11.2.01.0017	Sub kegiatan Penanganan sampah melalui Pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS 3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PltSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS 3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PltSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		7.700 ton	2.579.266.725		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS 3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PltSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	7.700 ton	2.840.975.189	penambahan anggaran belanja sosialisasi ke desa, workshop / pelatihan untuk kompos dan maggot, APD petugas
2.11.11.2.01.0020	Sub kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten / kota atau TPA/TPST regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST regional		25.225 ton	8.303.202.072		Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST regional	25.225 ton	8.303.202.072	Pergeseran untuk belanja dozer,pemeliharaan kantor TPA Bongkang

- Pagu induk 2024 : Rp. 66.064.885.127
- Pagu pergeseran 2024 : Rp. 66.270.385.423
- Pagu usulan perubahan 2024 Rp. 76.481.415.139

BAB IV
PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024 ini dilaksanakan dengan memperhatikan catatan-catatan, kaidah-kaidah serta rencana tindaklanjut pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong 2024 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong 2024 merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Daerah (RKAP-PD) sebagai dokumen perencanaan program/kegiatan dan anggaran perubahan tahun 2024. Seluruh komponen dinas diwajibkan untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong 2024 kedalam Rencana Kerja dan Anggaran perubahan Unit/ satuan tugasnya masing-masing.
3. Sumber dana untuk menjalankan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Tabalong.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik.
5. Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi di tingkat pelaksanaan dilakukan secara berjenjang dan melekat mulai dari jajaran paling bawah sampai jajaran paling atas pada masing-masing unsur satuan unit kerja.
6. Fungsi Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi dikoordinasikan oleh Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Daerah.
7. Pengendalian dan Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong 2024 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong. Pada akhir tahun dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan

perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong 2024, yang merupakan evaluasi kinerja tahunan yang terintegrasi dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Kerja tahun berikutnya.

8. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong 2024 disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan situasi dan kondisi faktual.
9. Dokumen ini dapat dilakukan review dan perubahan mengikuti pola dan perkembangan yang terjadi berdasarkan isu-isu strategis global, nasional dan daerah setelah melalui hasil evaluasi dan kajian yang objektif.
10. Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024, organisasi penyelenggara Renja dimaksud seperti tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.1.
Organisasi penyelenggara Renja

No.	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Penanggungjawab Program dan Kebijakan Strategis
2.	2.1 Sekretaris	Penanggungjawab Program Kegiatan dan Dana Indikatif
	2.2 Kepala Bidang Tata Lingkungan	
	2.3 Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3	
	2.4 Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
	2.5 Kepala Bidang Penaatan Lingkungan	
	2.6 Kepala UPTD	
3.	Para pemangku jabatan struktural Eselon III, IV dan PNS golongan III di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Penanggungjawab Pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan

Tanjung, April 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabalong,

H. SLAMET RIYADI, ST
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670815 199603 1 004

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024

Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong

Jalan Jenderal Ahmad Yani km. 7,5 Maburai,
Kecamatan Murung Pudak

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong (DKPPTPH) Tahun 2024 merupakan laporan perubahan perencanaan tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja DKPPTPH selama 1 (satu) tahun berikutnya berisi tentang rencana pemilihan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator dan kebutuhan anggarannya. Rencana Kerja Perubahan yang disusun memperhatikan RPJMD Kabupaten Tabalong 2019 – 2024, arah kebijakan RKPD Kabupaten Tabalong tahun 2023, usulan Musrenbang Desa / Kelurahan / Kecamatan dan Pokok – pokok pikiran DPRD Kabupaten Tabalong.

Renja Perubahan DKPPTPH Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Renja SKPD DKPPTPH Kabupaten Tabalong ini merupakan salah satu tahapan proses perencanaan yang awal mulanya berawal dari Musrenbang di tingkat Desa / Kelurahan hingga Musrenbang di tingkat Kabupaten dan pada akhirnya akan terbit Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pada waktu yang telah lewat, DKPPTPH Kabupaten Tabalong juga melaksanakan Forum SKPD untuk menyerap / mengakomodir usulan yang dihasilkan dari Musrenbang tingkat Kecamatan, adapun usulan – usulan tersebut harus sejalan dan searah dengan Renstra DKPPTPH Kabupaten Tabalong Tahun 2020 – 2024. Akhir kata semoga Renja ini dapat menjelaskan rencana kegiatan DKPPTPH pada tahun 2023 untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dan perikanan di Kabupaten Tabalong.

Tabalong, 7 Oktober 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Perikanan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Tabalong,

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KETAHANAN PANGAN PERIKANAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

H. FAHRUL RAJI, S.Pi, M.AP
NIP. 19691111 199703 1 006

DAFTAR ISI

		Hal
	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR TABEL	iii
	DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Gambaran Umum Organisasi	3
	C. Sarana dan Prasarana	6
	D. Aspek Strategis Organisasi	6
	E. Isu Permasalahan Utama	7
	F. Penentuan Isu Strategis	8
	G. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja	8
	H. Sistematika Penyajian	9
BAB II.	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	10
	A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	10
	B. Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 beserta Realisasinya	12
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	17
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	19
BAB V.	PENUTUP	24
	A. Kesimpulan	24
	B. Saran	24

DAFTAR TABEL

		Hal
1.1.	Daftar PNS dan PPPK DKPPTPH Kabupaten Tabalong	4
1.2.	Sarana dan Prasarana Utama pada DKPPTPH Kabupaten Tabalong.....	6
2.1.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024.....	10
2.2.	Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 beserta Realisasinya Per Triwulan II.....	12
3.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran DKPPTPH Kabupaten Tabalong Tahun 2024.....	17
3.2.	Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Indikator Sasaran DKPPTPH Kabupaten Tabalong Tahun 2024.....	17
4.1.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DKPPTPH Kabupaten Tabalong Tahun 2024.....	19
4.2.	Rencana Usulan APBD Perubahan DKPPTPH Tahun 2024.....	21

DAFTAR GAMBAR

Hal

1.1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong sesuai Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah..... 3

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong (DKPPTPH Kabupaten Tabalong) dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021** tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan **Tugas dan Fungsi dari DKPPTPH Kabupaten Tabalong** adalah diatur dalam **Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

Menurut Perda Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021, DKPPTPH Kabupaten Tabalong merupakan perangkat daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan. Kedudukan DKPPTPH Kabupaten Tabalong adalah merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas atau sebutan lainnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas DKPPTPH Kabupaten Tabalong adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Untuk melaksanakan tugas tersebut, DKPPTPH Kabupaten Tabalong menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
b. Pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura,
d. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura,
e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD,
f. Pengelolaan kegiatan kesekratariatan,
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya.

DKPPTPH Kabupaten Tabalong merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Tabalong yang mendukung Visi Kepala Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 yaitu ”Menuju Kabupaten Tabalong yang Lebih Agamis, Sejahtera dan Mandiri” dimana terdapat 3 (tiga) Misi yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi tersebut yaitu :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Lebih Agamis
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
3. Mewujudkan Kemandirian Daerah.

Dari ketiga Misi tersebut peran DKPPTPH Kabupaten Tabalong adalah mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Misi 2) dan mewujudkan kemandirian daerah (Misi 3) terutama kemandirian dalam pembangunan perikanan.

Agenda prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai penjabaran pelaksanaan Misi dalam pencapaian Visi adalah agenda prioritas yang mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan penyelesaian permasalahan lain yaitu:

1. Penyediaan SDM yang berkarakter dan produktif
2. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang merata dan berkualitas
3. Penguatan sektor pertanian, industri dan perdagangan

B. Gambaran Umum Organisasi

Susunan Organisasi DKPPTPH Kabupaten Tabalong sesuai Perbup Kabupaten Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 terdiri atas :

1. Sekretariat
2. Bidang Ketahanan Pangan
3. Bidang Perikanan
4. Bidang Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura
5. Bidang Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura
6. Bidang Penyuluhan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan
8. Jabatan Fungsional (JF)

Struktur Organisasi DKPPTPH Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong
sesuai Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

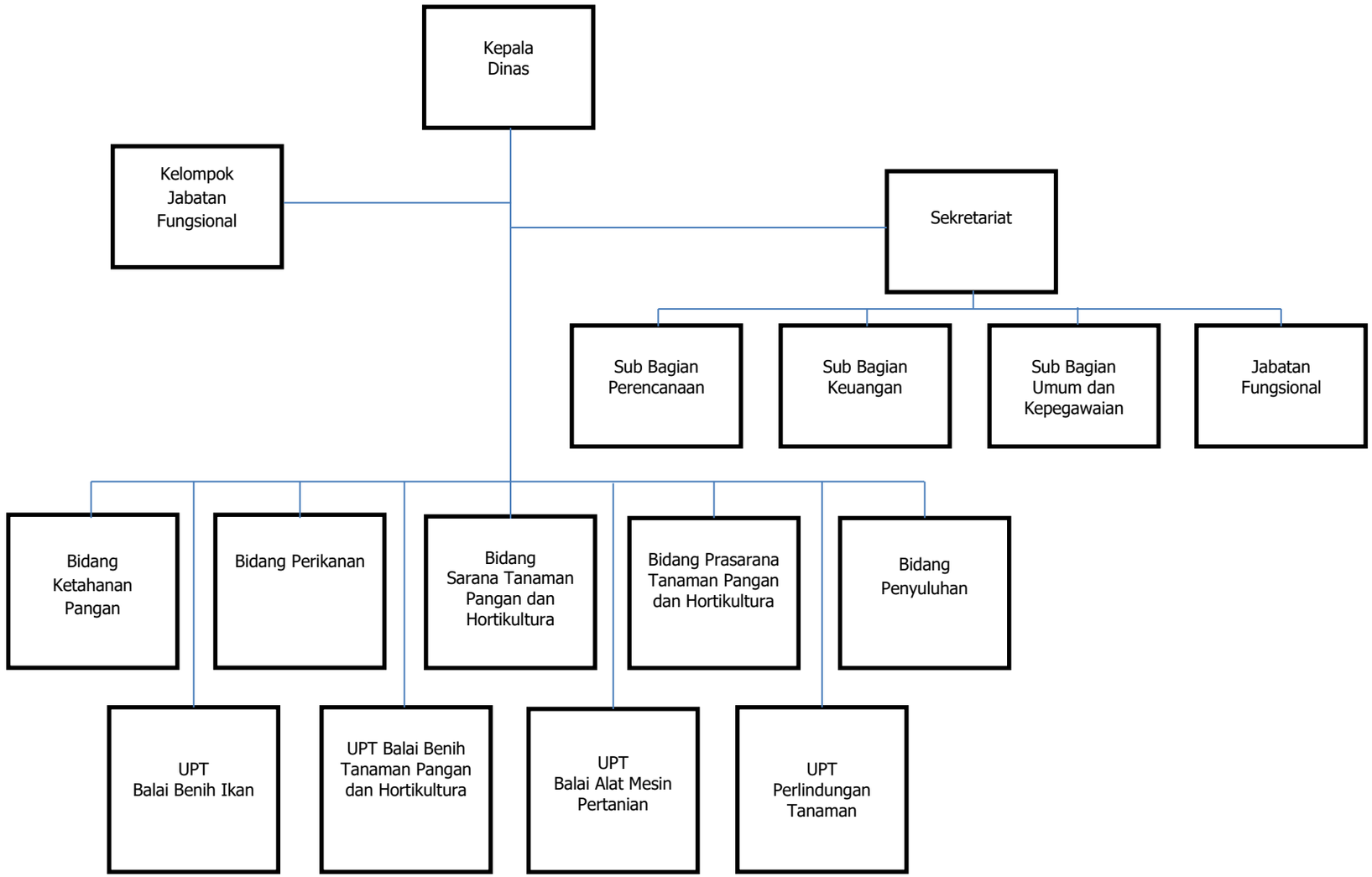

Aparat Sipil Negara (ASN) DKPPTPH Kabupaten Tabalong berjumlah 130 (seratus tiga puluh) orang. Rincian jumlah ASN DKPPTPH Kabupaten Tabalong menurut Jabatan adalah :

1. PNS Eselon II / Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berjumlah 1 (satu) orang
2. PNS Eselon III / Jabatan Administrator berjumlah 6 (enam) orang, terdiri dari :
   - 1 (satu) orang Sekretaris
   - 5 (lima) orang Kepala Bidang
3. PNS Eselon IV / Jabatan Pengawas berjumlah 11 (sebelas) orang, terdiri dari :
   - 3 (tiga) orang Kasubbag Sekretariat
   - 4 (empat) orang Kepala UPTD
   - 4 (empat) orang Kepala Tata Usaha UPTD
4. PNS Non Eselon / Pelaksana berjumlah 18 (delapan belas) orang
5. PNS Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) berjumlah 71 (tujuh puluh satu) orang
   - PNS JFT Ahli Muda di Bidang berjumlah 14 (empat belas) orang
   - PNS JFT Penyuluh Pertanian berjumlah 53 (lima puluh tiga) orang
6. PPPK Jabatan Fungsional Tertentu pada Balai Penyuluh Pertanian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang

Sedangkan jika dibedakan menurut status ASN (PNS dan PPPK) pada DKPPTPH Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

1. PNS (Pegawai Negeri Sipil) berjumlah 103 (seratus tiga) orang
2. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang

Tabel 1.1. Daftar PNS dan PPPK DKPPTPH Kabupaten Tabalong

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	H. FAHRUL RAJI, S.Pi, M.AP	19691111 199703 1 006	Kepala Dinas
2	SUPARMAN, S.PT	19670607 198711 1 001	Sekretaris
3	H. KURDIANSYAH, SP, MP	19660115 198709 1 001	Kabid Sarana TPH
4	RAHMAN EFFANSYAH, SP, MP	19720409 199803 1 003	Kabid Penyuluhan
5	M. AGUS NORRAHMAN, S.Pi, MS	19720808 199903 1 005	Kabid Ketahanan Pangan
6	ELZAN FIQRI, S.Pi	19660125 199903 1 000	Kabid Perikanan
7	RAHMANI, S.Pi	19691028 199703 1 006	Kabid Prasarana TPH
8	ERIE YUSTIANTO, S.Pi	19821007 200604 1 004	Kasubbag Perencanaan
9	NOORHAYATI, S.AP	19710101 199303 2 015	Kasubbag Keuangan
10	JOJOR HUTAGALUNG, SE, ME	19840306 201101 2 000	Kasubbag Umpeg
11	AGUSTIAN RIZANI, S.Pi	19770817 200604 1 030	Kepala UPTD PBAT
12	YANA MULYANA, SP, MP	19790701 201101 1 002	Kepala UPTD BBTPH
13	DONY TUGAS PRASETYO, S.TP	19800930 201001 1 016	Kepala UPTD Perlindungan
14	M. ASNI, SP	19650502 198802 1 001	Kepala UPTD Balai Alsintan
15	RAHMADI, S.Pi	19670513 200604 1 007	Kasubbag TU UPTD PBAT
16	TEGUH FITRIANTO, S.Pi	19780904 201001 1 012	Kasubbag TU UPTD Balai Alsintan
17	RAHMA RIDHA, SP	19800514 200701 2 009	Kasubbag TU UPTD BBTPH
18	MARDIATI, S.AP	19820909 200701 2 002	Kasubbag TU UPTD Perlindungan
19	WAHIDATUL AISYAH, SP	19700829 201408 2 001	Jabfung Bidang Ketapang
20	ARPANI S.Pi	19680904 199503 1 004	Jabfung Bidang Perikanan
21	ELFAH,S.Pi	19670918 199903 2 001	Jabfung Bidang Perikanan
22	WAHYUNI, S.Pi	19840512 201001 2 035	Jabfung Bidang Perikanan
23	H. EDY RAKHMAN, S.Pi	19670911 199903 1 005	Jabfung Bidang Perikanan
24	DEDY RAHNONI, S.Pi	19740714 200501 1 007	Jabfung Bidang Perikanan
25	BUDI SANTOSO, SP	19670304 200604 1 015	Jabfung Bidang Sarana TPH
26	ENDANG SDH, SP, MP	19700102 198903 2 004	Jabfung Bidang Sarana TPH
27	SRI ASTUTI, SP	19841021 201001 2 026	Jabfung Bidang Sarana TPH
28	EDI RAHMAN, SP	19831220 200904 1 002	Jabfung Bidang Prasarana TPH
29	NORKASYIFAH, S.Pi	19710407 200604 2 017	Jabfung Bidang Prasarana TPH
30	Hj. ZULZANA EFRIANI, S.Pi	19680428 199603 2 003	Jabfung Bidang Penyuluhan

No.	Nama	NIP	Jabatan
31	SUDARSIH, SP	19690828 200003 2 005	Jabfung Bidang Penyuluhan
32	NURMILAWATI, S.Hut	19821221 200604 2 012	Jabfung Bidang Penyuluhan
33	PATHURRAHMAN, SP, M.MA	19651027 198803 1 009	PP Madya
34	Hj. ZAITUN, S.Pt	19661125 198801 2 002	PP Madya
35	NOOR AISYAH, SP	19720408 199903 2 007	PP Madya
36	M. ASNI, SP	19650502 198802 1 001	PP Madya
37	MUHAMMAD HUSNA YANI, S.Pt	19680124 198803 1 006	PP Madya
38	HERMANSYAH, SP	19690509 198803 1 002	PP Madya
39	SURYANTO, SP	19680307 199203 1 011	PP Madya
40	Hj. MAS ELNA GAYATRI, S.Pt	19660730 198803 2 000	PP Madya
41	FAHLULLAH, SP	19610722 198703 1 010	PP Madya
42	UNANG SETIAWAN	19690323 199103 1 006	PP Madya
43	PARIDA NORMAWATI, A.Md	19741006 200604 2 015	PP Pelaksana Lanjutan
44	ZAHRATUL HUSNA, S.Sos	19660813 198802 2 003	PP Penyelia
45	MIRHAT, A.Md	19720620 200604 1 011	PP Pelaksana Lanjutan
46	M. SYAFEI	19670805 199203 1 020	PP Penyelia
47	ABDUL GAFUR, SP	19810202 201001 1 017	PP Muda
48	IRWAN SANJAYA, SP	19750911 200604 1 005	PP Muda
49	JAMALUDDIN, SP	19671122 199403 1 006	PP Muda
50	ARLENA, S.Hut	19680124 198803 1 006	PP Muda
51	RUSLAN, SP	19670916 199403 1 007	PP Muda
52	HERI LESTIYAWAN, SP	19740428 200604 1 017	PP Muda
53	AS'ARI, SP	19711111 200604 1 005	PP Pertama
54	JAMHUR, SP	19711122 200604 1 008	PP Pertama
55	HOTIM, SP, MP	19720315 200604 1 004	PP Muda
56	FERDARENY, SP	19810905 200604 2 020	PP Muda
57	KHAIRUN NISA, SP	19840620 201101 2 014	PP Muda
58	HAIRUN SYAH ZAIN, S.ST	19801020 201001 1 025	PP Pertama
59	MUNARDI, SP	19700910 200604 1 009	PP Pertama
60	REZKI SETIADI RAMADHANI, S.ST	19870519 201001 1 009	PP Muda
61	USMAN, SP	19690305 200604 1 010	PP Muda
62	YULI PERMANA, SP	19751030 200604 1 008	PP Pertama
63	YAHYA, SP	19820718 201706 1 001	PP Pertama
64	ARIDA FAHRINA, SP	19830622 201706 2 001	PP Pertama
65	NORYANI, SP	19880624 201706 2 001	PP Pertama
66	ERMAYASARI, SP	19890516 201706 2 001	PP Terampil
67	NORLIANTI	19901001 201706 2 001	PP Pelaksana Lanjutan
68	GAZALI RAHMAN, SP	19870202 201706 1 001	PP Pertama
69	M. IKHSAN RISWANDI, SP	19721022 200604 1 009	PP Pertama
70	KASPUL ANWAR, SP	19890103 201706 1 001	PP Pertama
71	RIDI PANJI SEPTIARULIN, S.ST	19870910 200604 1 004	PP Pertama
72	LIA SUSILAWATI, SP	19890917 201706 2 001	PP Pertama
73	HJ. SARIANA, SP	19750712 200604 2 026	PP Pertama
74	M. RIZANI, SP	19720629 200604 1 004	PP Pertama
75	VINA AFRIANA, SP	19840418 201706 2 001	PP Pertama
76	YULINA FARIDA, A.Md	19820105 201706 2 002	PP Pelaksana
77	SIGIT EKO SUSILO, S.ST	19841208 201706 1 001	PP Pertama
78	SA'ADILLAH, S.ST	19840111 200604 1 004	PP Pertama
79	MUHAMAD PRASETYO, SP	19841102 201706 1 001	PP Pertama
80	RISSA NOOR 'AIN, SP	19820713 201706 2 001	PP Pertama
81	SITI IZZATIL SA'IRA, SP	19951123 202203 2 000	PP Pertama
82	IMAM WAHYUDI SALIM	19800117 200501 1 005	Pelaksana UPTD PBAT
83	SAHIDE, A.Md	19910000 202012 0 001	Pelaksana Bidang Ketapang
84	NELLY ANDERIYANI, S.Pi	19830120 201408 2 003	Pelaksana Bidang Perikanan
85	SOFYAN HADI	19780914 199703 1 003	Pelaksana Subbag Keuangan
86	AKHMAD JAYADI	19740518 200701 1 016	Pelaksana Subbag Keuangan
87	YUDHI HAIRIL	19790206 201001 1 010	Pelaksana UPTD PBAT
88	NURIYADI	19751010 200701 1 020	Pelaksana UPTD PBAT
89	MARWAH, S.Tr.Gz	19940424 202203 2 001	Pelaksana Bidang Ketapang
90	M. RUSDI, S.AK	19820111 200701 1 006	Bendahara Pengeluaran
91	ABDUL HAIR	19680710 200701 1 033	Pelaksana UPTD PBAT
92	ZAINAL ABIDIN	19750503 200701 1 021	Pelaksana Bidang Perikanan
93	RUSPANDI	19770727 200701 1 019	Pramu Kebersihan
94	RUSNA YULIDA	19770725 201408 2 000	Pengadministrasi Umum
95	NORLAILA	19680229 201408 2 001	Pramu Kebersihan
96	SORAYA, A.Md	19970503 202203 2 001	Pengelola Barang Milik Negara
97	PETRUS ANUNU SEU, S.Hut	19740308 199703 1 000	Pengawas Harga Pangan

No.	Nama	NIP	Jabatan
98	ANNISA JAINA, A.Md	19910620 202203 2 000	Pengelola Barang Milik Negara
99	SARI MAHRITA, S.Pi	19890812 202012 2 008	Pelaksana Bidang Perikanan
100	KHALIFAH (P3K)	19700318 202121 2 002	PP Terampil
101	NORHASANAH, SP (P3K)	19751010 202121 2 004	PP Pertama
102	BUDI SULISTIANI, SP (P3K)	19750719 202121 2 001	PP Pertama
103	LAELA, SP (P3K)	19900503 202121 2 001	PP Pertama
104	HJ. RABINAH, SP (P3K)	19750805 202121 2 004	PP Pertama
105	ASLAMIAH (P3K)	19710203 202121 2 003	PP Terampil
106	HASPIAN SURIYADI, SP (P3K)	19740908 202121 1 001	PP Pertama
107	SUHARTI, SP (P3K)	19890813 202121 2 001	PP Pertama
108	HASBULLAH (P3K)	19810507 202121 1 006	PP Terampil
109	ERLIANA, A.Md (P3K)	19730915 202121 2 004	PP Terampil
110	H. MAKI HIDAYATULLAH (P3K)	19790917 202121 1 004	PP Terampil
111	HORMANSYAH, SP (P3K)	19820216 202221 1 001	PP Pertama
112	ADYA FAURINA, ST (P3K)	19970208 202321 2 023	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama
113	NUR SALASIAH, SP (P3K)	19951114 202321 2 037	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama
114	RINA LESTARI, SP (P3K)	19821006 202321 2 022	Analis Ketahanan Pangan Pertama
115	HARIS FADILLAH, S.TP (P3K)	19900922 202321 1 010	Pengawas Alsintan Pertama
116	M. NORKESRIYADI, SP (P3K)	19821103 202321 1 008	PP Pertama
117	RIZALI RACHMAN, SP (P3K)	19800627 202321 1 005	PP Pertama
118	JOKO EKO SAPUTRO, SP (P3K)	19970819 202321 1 006	PP Pertama
119	SITI RUSNAH, SP (P3K)	19880507 202321 2 043	PP Pertama
120	M. HARIS, SP (P3K)	19860210 202321 1 011	PP Pertama
121	RUSMILAWATI, SP (P3K)	19880128 202321 2 021	PP Pertama
122	IRFANSYAH, SP (P3K)	19930529 202321 1 010	PP Pertama
123	MUHYAR, SP (P3K)	19820910 202321 1 004	PP Pertama
124	M. NASRULLAH, SP (P3K)	19760820 202321 1 005	PP Pertama
125	ANDI PARAMITHA AGUSTINI, SP (P3K)	19890809 202321 2 001	PP Pertama
126	RINI NORHAYATI, SP (P3K)	19830408 202321 2 029	PP Pertama
127	ANNISA RAHMI, SP (P3K)	19940526 202321 2 039	PP Pertama
128	FATIMATUL AULIA, SP (P3K)	19940425 202321 2 031	PP Pertama
129	IRWAN SAPUTRA, SP (P3K)	19930101 202321 1 027	PP Pertama
130	FATIMATUL AULIA, SP (P3K)	19800324 202321 2 012	PP Pertama

C. Sarana dan Prasarana

DKPPTPH Kabupaten Tabalong memiliki beberapa sarana dan prasarana utama yang digunakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berupa peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan. Sarana dan prasarana utama tersebut dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 1.2. Sarana dan Prasarana Utama pada DKPPTPH Kabupaten Tabalong

No.	Uraian	Jumlah Unit dan Luas
1.	Gedung utama	3 unit (294,80 m^2)
2.	Gedung unit	16 unit (885,00 m^2)
3.	Kendaraan roda 4	13 unit
4.	Kendaraan roda 2	60 unit
5.	Meja kerja dan rapat	30 unit
6.	Kursi kerja dan rapat	50 unit
7.	Printer	15 unit
8.	Laptop dan PC	25 unit
9.	AC	14 unit
10.	Brankas	2 unit

D. Aspek Strategis Organisasi

Aspek – aspek strategis organisasi adalah aspek – aspek yang mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi SKPD DKPPTPH Kabupaten Tabalong. Harmonisasi aspek – aspek ini harus dilaksanakan dan dipertahankan oleh DKPPTPH Kabupaten Tabalong, terdiri dari :

1. Aspek Kewenangan, artinya memiliki hak dan kemampuan dalam mengolah dan mengelola pemanfaatan potensi – potensi pertanian dan perikanan dengan efektif dan efisien,
2. Aspek Kesejahteraan, artinya potensi – potensi pertanian dan perikanan yang telah diolah dan dikelola dapat mensejahterakan para pelaku usaha di bidang pertanian,
3. Aspek Keberlanjutan, artinya pemanfaatan potensi – potensi pertanian dan perikanan dilaksanakan dengan cara yang ramah lingkungan atau tidak merusak lingkungan sehingga lingkungan tersebut akan memberikan daya dukung yang maksimal dalam usaha – usaha pertanian dan perikanan selanjutnya

Aspek – aspek di atas dapat dilaksanakan dengan menerapkan nilai – nilai organisasi kepada setiap ASN DKPPTPH Kabupaten Tabalong. Nilai – nilai organisasi adalah kriteria tentang kebaikan dan kebenaran yang diyakini oleh SKPD DKPPTPH dan diterapkan oleh para ASNnya. Adapun nilai – nilai organisasi yang diterapkan oleh ASN DKPPTPH meliputi :

1. Integritas, yaitu bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan sesuai kode etik atau nilai – nilai yang berlaku
2. Inovatif, yaitu proses mewujudkan atau menggunakan suatu pengetahuan / gagasan / ide baru untuk memperbaiki permasalahan yang ada atau meningkatkan kualitas hasil pekerjaan
3. Kerjasama, yaitu bekerja dengan individu lain untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama,
4. Kedisiplinan, yaitu ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan berlaku
5. Profesional, yaitu memiliki keahlian dan keterampilan dalam melaksanakan tugas pekerjaan sesuai bidangnya

E. Isu Permasalahan Utama

Isu – isu permasalahan utama dalam pembangunan bidang KPPTPH di Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Cadangan pangan daerah belum optimal
2. Pola konsumsi pangan belum optimal
3. Masih banyak terdapat bahan pangan segar yang tercemar
4. Masih rendahnya pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pengelolaan bahan pangan
5. Belum terpenuhinya penganekaragaman bibit ikan, terutama bibit ikan lokal
6. Masih kurangnya penyediaan sarana dan prasarana perikanan
7. Belum optimalnya produksi pengolahan hasil perikanan
8. Masih rendahnya produksi ikan lokal
9. Masih banyak dilakukan kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan
10. Produktivitas tanaman pangan rendah
11. Produksi tanaman hortikultura belum optimal
12. Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian di tingkat petani / kelompok tani
13. Respon petani terhadap pengetahuan, inovasi dan teknologi masih rendah

F. Penentuan Isu Strategis

Adapun isu – isu strategis yang akan dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Ketahanan Pangan daerah perlu ditingkatkan dalam menghadapi gejolak krisis pangan,
2. Produksi budidaya ikan, produksi penangkapan ikan dan produksi pengolahan hasil perikanan belum optimal
3. Prasarana dan sarana produksi perikanan masih terbatas dan nilainya semakin mahal untuk didapatkan oleh pembudidaya ikan
4. Produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura di lahan pertanian masih belum optimal
5. Prasarana dan sarana pertanian masih belum merata dan belum menjangkau seluruh petani dan lahan pertanian
6. Sistem pemasaran belum tertata dengan baik
7. Minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian dan perikanan menurun

G. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) DKPPTPH Kabupaten Tabalong Tahun 2024 disusun berpedoman pada peraturan – peraturan sebagai berikut yaitu :

1. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

H. Sistematika Penyajian

Laporan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Organisasi
- C. Sarana dan Prasarana
- D. Aspek Strategis Organisasi
- E. Isu Permasalahan Utama
- F. Penentuan Isu Strategis
- G. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja
- H. Sistematika Penyajian

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023
- B. Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 beserta Realisasinya

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 terdapat 13 Program, 21 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan Kabupaten Tabalong yaitu :

Tabel 2.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Nomor Urut Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			Nama Program dan Kegiatan
1.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
	1.		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		-	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2.		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		-	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
	3.		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		-	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	4.		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		-	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		-	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		-	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5.		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		-	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
		-	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		-	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	6.		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	7.		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		-	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
		-	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
	8.		Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
		-	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
3.			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
	9.		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
		-	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
	10.		Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota
		-	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
4.			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
	11.		Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
		-	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
5.			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
	12.		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota
		-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

6.			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
	13.		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
		-	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
7.			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
	14.		Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
		-	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
	15.		Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan
		-	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
8			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
	16.		Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota
		-	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota
9.			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
	17.		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
		-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
10.			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	18.		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		-	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
		-	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
	19.		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten / Kota
		-	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman
		-	Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman
11.			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
	20.		Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
		-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
	21.		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
		-	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
		-	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
12.			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
	22.		Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota
		-	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		-	Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
13.			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	23.		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
		-	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
		-	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
		-	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

B. Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 beserta Realisasinya

Tabel 2.2. Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DKPPTPH Kabupaten Tabalong Tahun 2024 beserta Realisasinya Per Triwulan II

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Triwulan II (Rp)	Capaian (%)	Kendala / Tindak Lanjut
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	29.522.834.365	13.838.427.574	46,87%	Indeks Layanan Kesekretariatan akan diukur / dinilai pada bulan September tahun 2024 melalui Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Sekretariat DKPPTPH
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*529.630.932*	*187.038.226*	*35,31%*	*Dokumen perencanaan yang sudah tersedia adalah : DPA 2024, DPA Pergeseran I 2024, DPA Pergeseran II 2024 (DAK NF 2024), LKjIP 2023, LKPJ 2023, LPPD 2023, Monev Renja Triwulan I, Monev IKU Triwulan I, RKA 2025, Monev Renja Triwulan II, Monev IKU Triwulan II, RKA Perubahan 2024,*
	- *Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*529.630.932*	*187.038.226*	*35,31%*	*Dokumen perencanaan yang sudah tersedia adalah : DPA 2024, DPA Pergeseran I 2024, DPA Pergeseran II 2024 (DAK NF 2024), LKjIP 2023, LKPJ 2023, LPPD 2023, Monev Renja Triwulan I, Monev IKU Triwulan I, RKA 2025, Monev Renja Triwulan II, Monev IKU Triwulan II, RKA Perubahan 2024,*
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.835.274.477	12.023.517.870	55,06%	Telah dibayarkan gaji dan tunjangan kepada PNS dan PPPK
	- *Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*21.835.274.477*	*12.023.517.870*	*55,06%*	Telah dibayarkan gaji dan tunjangan kepada PNS dan PPPK
	3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000	34.250.000	22,83%	Minimnya informasi pelaksanaan diklat untuk pegawai. Akan dikoordinasikan dengan balai - balai diklat teknis lingkup pertanian dan perikanan
	- *Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	150.000.000	*34.250.000*	22,83%	Minimnya informasi pelaksanaan diklat untuk pegawai. Akan dikoordinasikan dengan balai - balai diklat teknis lingkup pertanian dan perikanan
	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.260.293.636	763.214.746	60,56%	*Banyak barang - barang belanja modal yang belum memenuhi TKDN. Melakukan percepatan proses pengadaan barang yang memiliki syarat TKDN*
	- *Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*765.682.464*	*160.943.000*	*21,02%*	*Banyak barang - barang belanja modal yang belum memenuhi TKDN. Melakukan percepatan proses pengadaan barang yang memiliki syarat TKDN*
	- *Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*126.481.734*	*23.320.000*	*18,44%*	*Beberapa barang cetakan belum dapat direalisasikan karena tidak ada permintaan. Hingga triwulan II barang cetakan yang sudah tersedia adalah map blue Dinas, amplop kop, lembar disposisi, xbanner, kartu lebaran, spanduk.*
	- *Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*949.388.100*	*399.426.761*	*42,07%*	*Hingga triwulan 2 sudah dilaksanakan perjadin ke Provinsi sebanyak 29 OK dan perjadin keluar Provinsi sebanyak 5 OK*
	5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	548.871.845	2.663.800	0,48%	Masih menunggu pekerjaan fisik kantor DKPPTPH selesai
	- *Sub Kegiatan Pengadaan Mebel*	*155.454.875*	*0*	0,00%	Masih menunggu pekerjaan fisik kantor DKPPTPH selesai
	- *Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*423.189.963*	*0*	0,00%	Masih menunggu pekerjaan fisik kantor DKPPTPH selesai
	- *Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*125.681.882*	*2.653.800*	2,11%	Masih menunggu pekerjaan fisik kantor DKPPTPH selesai
	6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.725.442.400	558.062.176	20,48%	
	- *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*345.600.000*	*142.748.814*	*41,30%*	

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Triwulan II (Rp)	Capaian (%)	Kendala / Tindak Lanjut
	- *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*2.379.842.400*	*938.494.084*	*39,44%*	*Hingga triwulan II sudah tersedia layanan jasa petugas kebersihan, jasa pramubakti, jasa petugas keamanan dan jasa pengemudi*
	7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.736.608.115	269.690.756	15,53%	Pemeliharaan gedung kantor akan dilaksanakan pada triwulan 4
	- *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional atau Lapangan*	*740.080.000*	*298.109.167*	*40,28%*	*Hingga triwulan II sudah dilaksanakan pembayaran pajak kendaraan dinas R2 sebanyak 16 dan R4 sebanyak 3 unit*
	- *Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*	*125.250.000*	*5.940.000*	*4,74%*	*Hingga triwulan II pemeliharaan aset tetap hanya sebanyak 24 unit*
	- *Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*871.278.115*	*3.317.650*	*0,38%*	*Pemeliharaan gedung kantor akan dilaksanakan pada triwulan 4*
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.098.118.181	261.351.454	23,80%	Indeks Ketahanan Pangan akan dihitung pada akhir tahun 2024
	1. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	1.098.118.181	261.351.454	23,80%	Pembinaan kelompok PUPM yang sudah dilaksanakan yaitu kepada kelompok PUPM Maluput (Lumbang), Usaha Bersama (Masingai 2) dan Bangun Banua (Pugaan)
	- *Sub Kegiatan Penyediaan Infrastuktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya*	1.098.118.181	261.351.454	23,80%	*Adanya bangunan lumbung pangan masyarakat yang perlu direhabilitasi dan belum memiliki aliran listrik. Juga terdapat lumbung pangan yang status kepemilikannya tidak jelas karena berdiri diatas tanah yang diambil oleh pemiliknya. Lumbung pangan yang rusak tersebut akan direhabilitasi pada tahun 2024 sedangkan lumbung pangan yang status lahannya tidak jelas tersebut akan dihapuskan dan ke depannya dalam pembangunan lumbung pangan akan dimintai sertifikat kepemilikan lahan. Pembinaan kelompok lumbung pangan sudah 100% dilaksanakan pada triwulan III*
3.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	869.833.614	*59.093.994*	6,79%	Skor Pola Pangan Harapan akan diukur pada akhir tahun 2024
	1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	217.433.614	*59.093.994*	27,18%	Pada triwulan II ini telah dibina 4 Kelompok PUPM (100%) yaitu Gapoktan Bangun Banua desa pugaan, Gapoktan Usaha Bersama Desa Masingai II, Kelompok Tani Maluput Desa Lumbang dan Kelompok Tani Tunas Karya Baru (Bawang Merah) Desa Uwie
	- *Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya*	*217.433.614*	*59.093.994*	27,18%	*Laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok akan disusun pada akhir tahun*
	2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota	652.400.000	95.782.902	14,68%	Komoditas yang dikembangkan pada triwulan II adalah komoditas yang memiliki nilai ekonomis di masyarakat yaitu ubi jalar, singkong dan tomat
	- *Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal*	*652.400.000*	95.782.902	14,68%	*Pengembangan komoditas yang sudah dilakukan adalah cabe rawit, cabe besar, sawi, terong, tomat dan seledri atau pada triwulan III*
4.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	166.800.000	52.926.250	31,73%	Persentase Desa tahan pangan akan dihitung pada akhir tahun 2024
	1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	166.800.000	52.926.250	31,73%	Target akhir penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan ada pada triwulan IV
	- *Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan*	166.800.000	52.926.250	31,73%	*Target akhir penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan ada pada triwulan IV*
5.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	269.495.454	*43.851.388*	16,27%	Tingkat keamanan PSAT akan diukur pada akhir tahun 2024
	1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota	269.495.454	*43.851.388*	16,27%	Target jumlah komoditas PSAT yang terawasi hingga triwulan II adalah bawang merah, tomat, cabe besar, terong, cabe keriting, dan cabe tiung, kacang panjang dan bayam

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Triwulan II (Rp)	Capaian (%)	Kendala / Tindak Lanjut
	- *Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota*	*269.495.454*	*43.851.388*	*16,27%*	*Laporan kelembagaan keamanan pangan segar daerah yang dibina akan disusun pada akhir tahun 2024*
6.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	392.689.000	0	0,00%	Capaian target akhir produksi penangkapan ikan tahun 2024 akan dihitung pada akhir tahun berjalan
	1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	392.689.000	0	0,00%	Target akhir penyediaan prasarana dan sarana usaha perikanan tangkap akan dilaksanakan pada triwulan IV
	- *Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	392.689.000	0	0,00%	*Target akhir penyediaan prasarana dan sarana usaha perikanan tangkap akan dilaksanakan pada triwulan IV*
7.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.824.806.781	269.528.560	14,77%	Capaian akhir target produksi budidaya ikan akan dihitung pada akhir tahun
	1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1.217.997.250	24.140.500	1,98%	Penyediaan sarana produksi budidaya pembesaran ikan akan dimulai pada triwulan III
	- *Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil*	*1.217.997.250*	*24.140.500*	*1,98%*	*Pengembangan kapasitas kelompok pembudidaya ikan kecil berupa bimtek budidaya pembesaran ikan yang diikuti 2 klp (@10 orang)*
	2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.201.350.000	245.388.060	7,67%	Debit air yang masuk ke kolam ikan dari cekdam volumenya kurang mencukupi dan air yang masuk bercampur dengan bahan - bahan kimia rumah tangga (sabun, deterjen dll). Akan dilakukan rehabilitasi cekdam dan saluran air pada tahun 2024 sehingga permasalahan debit air akan teratasi
	- *Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota*	*3.201.350.000*	*245.388.060*	*7,67%*	*Debit air yang masuk ke kolam ikan dari cekdam volumenya kurang mencukupi dan air yang masuk bercampur dengan bahan - bahan kimia rumah tangga (sabun, deterjen dll). Akan dilakukan rehabilitasi cekdam dan saluran air pada tahun 2024 sehingga permasalahan debit air akan teratasi*
8.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	479.680.270	0	*0,00%*	Masih ditemukan kegiatan penangkapan ikan ramah lingkungan di 2 Kecamatan, hal ini berarti masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya perairan. Pengawasan atau sosialisasi terhadap kegiatan perikanan tangkap akan ditingkatkan pada triwulan berikutnya dalam rangka pencegahan kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan
	1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota	479.680.270	0	*0,00%*	Karena kurangnya aparat pengawas maka hanya ada 4 Kecamatan yang diawasi pada triwulan 2. Pada pengawasan selanjutnya akan membawa lebih banyak personel, termasuk dari APH
	- *Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupeten / Kota*	*479.680.270*	*0*	*0,00%*	*Dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap akan disusun pada akhir tahun*
9.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.285.188.781	72.215.607	5,62%	Capaian target produksi pengolahan hasil perikanan tahun 2024 akan dihitung pada akhir tahun berjalan
	1. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengelolaan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	1.285.188.781	72.215.607	5,62%	Adanya fluktuasi harga bahan pangan (ikan), adanya kesulitan dalam pemasaran produk hasil perikanan, kurangnya anggaran sehingga jumlah bimtek yang dilaksanakan lebih sedikit dari tahun yang lalu. Fluktuasi harga bahan pangan (ikan) dapat diatasi dengan menyetok bahan mentah (ikan) dalam jumlah yang diperlukan oleh kelompok pengolahan hasil perikanan. Anggaran untuk promosi akan disiapkan untuk membantu dalam pemasaran produk hasil perikanan

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Triwulan II (Rp)	Capaian (%)	Kendala / Tindak Lanjut
	- *Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengelolaan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil*	*1.285.188.781*	*72.215.607*	5,62%	*Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran yang mendapat perizinan berusaha akan dihitung pada akhir tahun*
10.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.421.795.283	2.650.673.993	59,95%	Capaian target produktivitas pertanian akan dihitung pada akhir tahun
	1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	7.503.918.460	2.154.833.343	28,72%	Alsintan yang telah diserahkan kepada masyarakat adalah : cultivator (15 unit), tracktor roda 2 rotary 5 unit). Penyediaan sisa alsintan akan dilaksanakan pada triwulan IV
	- *Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	*7.308.295.000*	*403.673.163*	*5,52%*	*Dokumen pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian akan disusun pada triwulan IV*
	- *Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	*195.623.460*	*21.416.036*	*10,95%*	*Kinerja balai alsintan yang masih kurang dikarenakan keberadaan aset alsintan sewaan yang tidak jelas, pengelolaan alsintan yang dikuasakan kepada UPJA tanpa melibatkan balai alsintan dan terbatasnya tenaga kerja pada balai alsintan. Melaksanakan inventarisir alsintan ke lapangan, mengambil alih seluruh pengelolaan alsintan di UPJA dan menambah tenaga kerja yang ahli dalam operasional alsintan*
	1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota	1.929.667.434	495.840.650	53,23%	Pelestarian dan pemurnian SDG tanaman akan dilaksanakan pada triwulan 4
	- *Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman*	*631.187.434*	*355.956.105*	*56,39%*	*Target akhir peningkatan kualitas SDG tanaman ada pada triwulan IV. Pelestarian SDG tanaman yang telah dilakukan sudah 100% untuk DPA induk 2023 yaitu padi BR, kamudai / likol dan langsat*
	- *Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman*	*1.298.480.000*	*57.828.034*	*4,45%*	*Target SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian ada pada triwulan IV. SDG tanaman yang dilakukan pelestarian sudah dilaksanakan 100% pada DPA Induk 2024*
11.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.673.314.931	1.126.084.839	53,23%	Capaian target persentase cakupan yang dapat dilayani oleh prasarana pertanian akan diukur pada akhir tahun
	1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	0	0	0,00%	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersumber dari DAK yang baru dianggarkan pada triwulan II
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0	*0*	0,00%	Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersumber dari DAK yang baru dianggarkan pada triwulan II
da	2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	8.673.314.931	1.099.084.839	12,67%	Pembuatan jalan, jaringan dan irigasi akan dilaksanakan pada triwulan 4
	- *Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan DAM Parit*	*1.388.824.120*	*206.560.755*	*14,87%*	*Pembangunan irigasi baru dan normalisasi irigasi (3 unit) akan dimulai pada triwulan III*
	- *Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya*	*7.284.490.811*	*892.524.084*	*12,25%*	*Pembangunan jalan usaha tani (5 unit) akan dimulai pada triwulan II tetapi belum selesai 100%*
12.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	604.795.641	105.715.805	17,48%	Target persentase cakupan pencegahan bencana pertanian akan dihitung pada akhir tahun
	1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota	604.795.641	105.715.805	17,48%	Adanya serangan tikus, lalat buah dan hama tanaman lainnya. Melaksanakan Gerakan Pengendalian (Gerdal), menggunakan teknis fumigasi dan seeding treatment untuk mengendalikan OPT tikus, menggunakan pestisida kimia
	- *Sub Kegiatan Pembangunan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan*	*506.535.000*	*86.344.685*	*17,05%*	*Adanya serangan tikus, lalat buah dan hama tanaman lainnya. Melaksanakan Gerakan Pengendalian (Gerdal), menggunakan teknis fumigasi dan seeding treatment untuk mengendalikan OPT tikus, menggunakan pestisida kimia*

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Triwulan II (Rp)	Capaian (%)	Kendala / Tindak Lanjut
	- *Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan*	*98.260.641*	*19.371.120*	*19,71%*	*Area terdampak perubahan iklim disebabkan oleh kekeringan lahan sawah, kebanjiran lahan sawah dan serangan hama tikus. Melakukan percepatan pembangunan / rehabilitasi irigasi pertanian dan melakukan koordinasi pecegahan serta pemberantasan hama*
13.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.756.351.830	364.889.159	20,78%	Target persentase peningkatan jumlah kelompok tani yang naik nilai kemampuannya akan dihitung pada akhir tahun
	1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.756.351.830	364.889.159	20,78%	Target jumlah BPP yang meningkat kelasnya akan dihitung pada akhir tahun
	- *Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa*	*1.059.425.919*	243.878.691	*23,02%*	*Target jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya akan dihitung pada akhir tahun*
	- *Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa*	*458.131.077*	*10.917.200*	*2,38%*	*Target jumlah kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya akan dihitung pada akhir tahun*
	- *Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*	*238.794.834*	*110.093.268*	*46,10%*	*Target jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian akan dihitung pada akhir tahun*
	Jumlah	61.060.464.199	14.338.026.589	23,48%	

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
DKPPTPH Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Indeks Layanan Kesekretariatan
2.	Meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan
3.	Mengembangkan perikanan tangkap yang ramah lingkungan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap yang ramah lingkungan	Jumlah produksi perikanan tangkap yang ramah lingkungan
4.	Mengembangkan perikanan budidaya yang berbasis lokal	Meningkatnya produksi perikanan budidaya yang berbasis lokal	Jumlah produksi perikanan budidaya
5.	Mewujudkan kelestarian sumber daya perikanan pada Perairan Umum Daratan (PUD)	Meningkatnya pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan
6.	Mengembangkan produk pengolahan hasil perikanan yang berdaya saing	Meningkatnya produksi pengolahan hasil perikanan yang berdaya saing	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan
7.	Meningkatkan produktivitas pertanian per hektar per tahun	Meningkatnya produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produktivitas pertanian per hektar per tahun : padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai rawit, cabai besar
8.	Meningkatkan cakupan yang dilayani oleh prasarana pertanian	Meningkatnya cakupan yang dilayani oleh prasarana pertanian	Persentase cakupan yang dapat dilayani oleh prasarana pertanian
9.	Meningkatkan cakupan pencegahan bencana pertanian	Meningkatnya cakupan pencegahan bencana pertanian	Persentase cakupan pencegahan bencana pertanian
10.	Meningkatkan jumlah kelompok tani yang naik nilai kemampuannya	Meningkatnya jumlah kelompok tani yang naik nilai kemampuannya	Persentase peningkatan jumlah kelompok tani yang naik nilai kemampuannya

Sedangkan target pada masing – masing indikator sasaran pada DKPPTPH Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah berikut,

Tabel 3.2. Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Indikator Sasaran APBD Perubahan
DKPPTPH Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Indeks Layanan Kesekretariatan	B (75)
2.	Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	84,72
3.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap yang ramah lingkungan	Jumlah produksi perikanan tangkap yang ramah lingkungan	2.163,41 ton

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
4.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya yang berbasis lokal	Jumlah produksi perikanan budidaya	18.053,2 ton
5.	Meningkatnya pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan	0 kali
6.	Meningkatnya produksi pengolahan hasil perikanan yang berdaya saing	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	32 ton
7.	Meningkatnya produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produktivitas pertanian per hektar per tahun : padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai rawit, cabai besar	4,80 ; 4,05 ; 1,15 ; 7,30 ; 5,50 ; 8,80 ton / ha
8.	Meningkatnya cakupan yang dilayani oleh prasarana pertanian	Persentase cakupan yang dapat dilayani oleh prasarana pertanian	70%
9.	Meningkatnya cakupan pencegahan bencana pertanian	Persentase cakupan pencegahan bencana pertanian	40%
10.	Meningkatnya jumlah kelompok tani yang naik nilai kemampuannya	Persentase peningkatan jumlah kelompok tani yang naik nilai kemampuannya	35%

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, DKPPTPH Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 akan menjalankan 13 Program, 21 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan (sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019) seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DKPPTPH Kabupaten Tabalong
Tahun 2024

Nomor Urut Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			Nama Program dan Kegiatan
1.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
	1.		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		-	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2.		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		-	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
	3.		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		-	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	4.		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		-	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		-	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		-	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		-	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
		-	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		-	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	6.		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	7.		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		-	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
		-	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
	8.		Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
		-	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
3.			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
	9.		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
		-	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
	10.		Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota
		-	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
4.			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
	11.		Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
		-	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
5.			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
	12.		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota
		-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

Nomor Urut Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			Nama Program dan Kegiatan
6.			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
	13.		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
		-	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
7.			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
	14.		Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
		-	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
	15.		Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan
		-	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
8			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
	16.		Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota
		-	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota
9.			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
	17.		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
		-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
10.			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	18.		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		-	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
		-	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
	19.		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten / Kota
		-	Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman
		-	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman
11.			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
	20		Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
		-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainya
	21.		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
		-	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
		-	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
12.			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
	22.		Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota
		-	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		-	Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
13.			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	23.		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
		-	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
		-	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
		-	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Tabel 4.2. Rencana Usulan APBD Perubahan DKPPTPH Tahun 2024

No.		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Outcome Ouput Kegiatan *Output Sub Kegiatan*			Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Rp)
			Indikator	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan		
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	INDEKS LAYANAN KESEKRETARIATAN	B (75)	B (75)	29.522.834.365	26.003.304.423
	1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	15 dokumen	15 dokumen	529.630.932	*535.518.357*
	-	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*15 dokumen*	*15 dokumen*	*529.630.932*	*535.518.357*
	2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya gaji dan tunjangan ASN*	*14 bulan*	*14 bulan*	21.835.274.477	24.233.771.000
	-	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*122 orang*	*132 orang*	*21.835.274.477*	*24.233.771.000*
	3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Diklat pegawai*	*15 orang*	*17 orang*	150.000.000	284.969.951
	-	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*15 orang*	*17 orang*	*150.000.000*	*284.969.951*
	4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	*39 unit*	*101 unit*	1.260.293.636	1.998.852.528
	-	*Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*8 paket*	*13 paket*	*765.682.464*	*1.749.751.902*
	-	*Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*9 paket*	*9 paket*	*126.481.734*	*126.482.234*
	-	*Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*124 laporan*	*100 laporan*	*949.388.100*	*999.050.947*
	5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Belanja Modal BMD yang Disediakan	*124 unit*	*219 unit*	548.871.845	1.782.336.252
	-	*Sub Kegiatan Pengadaan Mebel*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*73 unit*	*153 unit*	*155.454.875*	*822.960.084*
	-	*Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Disediakan*	*50 unit*	*66 unit*	*423.189.963*	*959.376.168*
	-	*Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*2 unit*	*0 unit*	*125.681.882*	*0*
	6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa telepon / internet, jasa air dan listrik	*12 bulan*	*12 bulan*	2.725.442.400	2.630.542.400
	-	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*36 laporan*	*36 laporan*	*345.600.000*	*354.600.000*
	-	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*48 laporan*	*48 laporan*	*2.379.842.400*	*2.275.942.400*
	6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor ; kendaraan dinas	*6 unit ; 81 unit*	*5 unit ; 88 unit*	1.736.608.115	1.848.709.639
	-	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*81 unit*	*88 unit*	*740.080.000*	*862.741.536*
	-	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	*60 unit*	*60 unit*	*125.250.000*	*125.250.000*
	-	*Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi*	*1 unit*	*5 unit*	*871.278.115*	*860.718.103*
2.		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	INDEKS KETAHANAN PANGAN	84,03	84,03	1.098.118.181	1.830.226.289
	9.	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kelembagaan Lumbung Pangan yang Terbina	3 Kelompok	4 Kelompok	1.098.118.181	1.830.226.289
	-	*Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya*	*Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia*	*4 unit*	*7 Unit*	*1.098.118.181*	*1.830.226.289*
3.		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH)	89,9	89,9	869.833.614	937.835.501

No.		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Outcome Ouput Kegiatan *Output Sub Kegiatan*			Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Rp)
			Indikator	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan		
	10.	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Terbinanya Kelembagaan PUPM	4 kelompok	4 kelompok	217.433.614	231.681.196
	-	*Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya*	*Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokokdan Pangan Lainnya*	*1 laporan*	*1 laporan*	*217.433.614*	*231.681.196*
	11.	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota	Jumlah Komoditas Pangan Lokal yang Dikembangkan	4 komoditas	4 komoditas	652.400.000	706.154.305
	-	*Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal*	*Rencana Kebutuhan Pangan Lokal*	*1 dokumen*	*1 dokumen*	*652.400.000*	*706.154.305*
4.		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Tahan Pangan	97%	97%	166.800.000	305.388.726
	12	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan	1 dokumen	1 dokumen	166.800.000	305.388.726
	-	*Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan*	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan*	*1 dokumen*	*1 dokumen*	*166.800.000*	*305.388.726*
5.		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	TINGKAT KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT)	88 %	88 %	269.495.454	291.705.223
	13.	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Komoditas PSAT yang Terawasi	8 komoditas	8 komoditas	269.495.454	291.705.223
	-	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan*	*Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan*	*1 laporan*	*1 laporan*	*269.495.454*	*291.705.223*
6.		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP YANG RAMAH LINGKUNGAN	2.163,41 ton	2.163,41 ton	392.689.000	444.719.732
	14.	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya sarana penangkapan ikan ramah lingkungan	392 buah / set	392 buah / set	392.689.000	444.719.732
	-	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	*Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia*	392 buah / set	392 buah / set	*392.689.000*	*444.719.732*
7.		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	18.053,2 ton	17.112 ton	6.507.776.238	2.706.235.801
	15.	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Tersedianya Sarana Produksi Budidaya Pembesaran Ikan	27 paket	36 paket	3.201.350.000	5.174.982.242
	-	*Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil*	*Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas*	*3 kelompok*	*3 kelompok*	*3.201.350.000*	*5.174.982.242*
	16.	Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Jumlah Produksi Bibit Ikan UPTD PBAT	*700.000 ekor*	*700.000 ekor*	3.306.426.238	3.983.804.990
	-	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota*	*Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota*	*2 unit*	*5 unit*	*3.306.426.238*	*3.983.804.990*
8.		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	JUMLAH KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG TIDAK RAMAH LINGKUNGAN	0 kali	0 kali	479.680.270	580.534.964
	17.	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pemantauan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Tidak Ramah Lingkungan di Wilayah Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	479.680.270	580.534.964
	-	*Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota*	*1 dokumen*	*1 dokumen*	*479.680.270*	*580.534.964*
9.		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	JUMLAH PRODUKSI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	32 ton	32 ton	1.285.188.781	1.472.421.422
	18.	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengolahan dan Diversifikasi Produk Perikanan	6 kali	10 kali	1.285.188.781	1.472.421.422

No.		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Outcome Ouput Kegiatan *Output Sub Kegiatan*			Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Rp)
			Indikator	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan		
	-	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil*	*Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko*	*1 unit usaha*	*1 unit usaha*	*1.285.188.781*	*1.472.421.422*
10.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PRODUKTIVITAS PERTANIAN PERHEKTAR PERTAHUN : JAGUNG ; PADI ; KEDELAI ; BAWANG MERAH ; CABAI RAWIT ; CABAI BESAR	4,80 ; 4,05 ; 1,15 ; 7,30 ; 5,50 ; 8,80 ton / ha	4,80 ; 4,05 ; 1,15 ; 7,30 ; 5,50 ; 8,80 ton / ha	4.421.795.283	17.292.697.420
	19.	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Alsintan yang Diserahkan kepada Masyarakat	58 unit	78 unit	7.503.918.460	13.780.460.809
	-	*Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Lokasi*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*7.308.295.000*	*13.292.374.587*
	-	*Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*195.623.460*	*488.086.222*
	20.	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah SDG Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	9 VUB	12 VUB	1.929.667.434	3.512.236.611
	-	*Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman*	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman*	*3 Dokumen*	*3 Dokumen*	*631.187.434*	*2.162.107.238*
	-	*Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman*	*Jumlah SDG Hewan / Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian*	*6 VUB*	*1 VUB*	*1.298.480.000*	*1.251.701.156*
11.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE CAKUPAN YANG DAPAT DILAYANI OLEH PRASARANA PERTANIAN	70%	70%	5.247.265.842	15.479.729.118
	21.	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlindunginya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	6.714 hektar	6.714 hektar	0	94.500.000
	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0 laporan	7 laporan	0	94.500.000
	22.	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembuatan Jalan, Jaringan dan Irigasi	29 unit	57 unit	8.673.314.931	15.385.229.118
	-	*Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit*	*Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara*	*6 unit*	*9 unit*	*1.388.824.120*	*2.010.989.785*
	-	*Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya*	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi danDipelihara*	*23 Unit*	*48 Unit*	*7.284.490.811*	*13.374.239.333*
12.		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE CAKUPAN PENCEGAHAN BENCANA PERTANIAN	40%	40%	604.795.641	815.681.440
	23.	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota	Luas areal pengendalian bencana pertanian	2.500 hektar	2.500 hektar	506.535.000	815.681.440
	-	*Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan*	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*	*482 ha*	*482 ha*	*506.535.000*	*697.220.579*
	-	*Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan*	*Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani*	*2.000 ha*	*2.000 ha*	*98.260.641*	*118.460.861*
13.		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH KELOMPOK TANI YANG NAIK NILAI KEMAMPUANNYA	35%	35%	1.756.351.830	2.480.218.872
	24.	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang meningkat kelasnya	1 unit (1 BPP)	1 unit (1 BPP)	1.756.351.830	2.480.218.872
	-	*Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa*	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*1 Unit*	*1 unit*	*1.059.425.919*	*1.345.359.613*
	-	*Sub Keg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa*	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*1 unit*	*1 unit*	*458.131.077*	*684.550.990*
	-	*Sub Keg. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*	*1 Unit*	*1 unit*	*238.794.834*	*450.308.269*
					Jumlah	**61.060.464.199**	**85.182.650.404**

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) DKPPTPH Kabupaten Tabalong tahun ini telah disusun berdasarkan peraturan – peraturan yang mengikat dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut yaitu : RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024, arah kebijakan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024, usulan – usulan masyarakat melalui Musrenbang Desa / Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang / Forum tingkat SKPD dan Pokok Pikiran DPRD.

Pada Tahun 2024, APBD induk pada DKPPTPH Kabupaten Tabalong adalah sebesar Rp. 61.060.464.199 (Enam puluh milyar enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sedangkan usulan APBD Perubahan 2024 DKPPTPH adalah sebesar Rp. 85.182.650.404 (Delapan puluh lima milyar seratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus empat rupiah). Hal ini berarti ada penambahan sebesar Rp. 24.122.186.205 (Dua puluh empat milyar seratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima rupiah).

Tujuan dan Sasaran pembangunan pada DKPPTPH Kabupaten Tabalong tahun 2024 masih berorientasi pada peningkatan ketahanan pangan dan produksi, baik produksi tanaman pangan, hortikultura dan perikanan. Produksi akan senantiasa ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kabupaten Tabalong yang pertumbuhan jumlah penduduknya semakin bertambah dari tahun ke tahun. Selain orientasi produksi, pada tahun 2024 juga berorientasi pada peningkatan mutu hasil (pengolahan pasca panen). Peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian dan perikanan bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong dari sektor pertanian dan perikanan secara umum.

B. Saran

Pada tahun anggaran yang akan datang (2025) diharapkan APBD Kabupaten Tabalong yang ada pada DKPPTPH dapat ditingkatkan jumlahnya atau lebih stabil jumlah anggarannya untuk mencapai sasaran strategis pada tahun tersebut. Begitu juga dengan jumlah SDM ASN pada DKPPTPH agar dapat dipenuhi kebutuhannya agar tercapai jumlah yang ideal untuk melaksanakan tugas – tugas administratif dan teknis sehingga target sasaran strategis dapat lebih mudah mencapainya.

RENJA PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2024

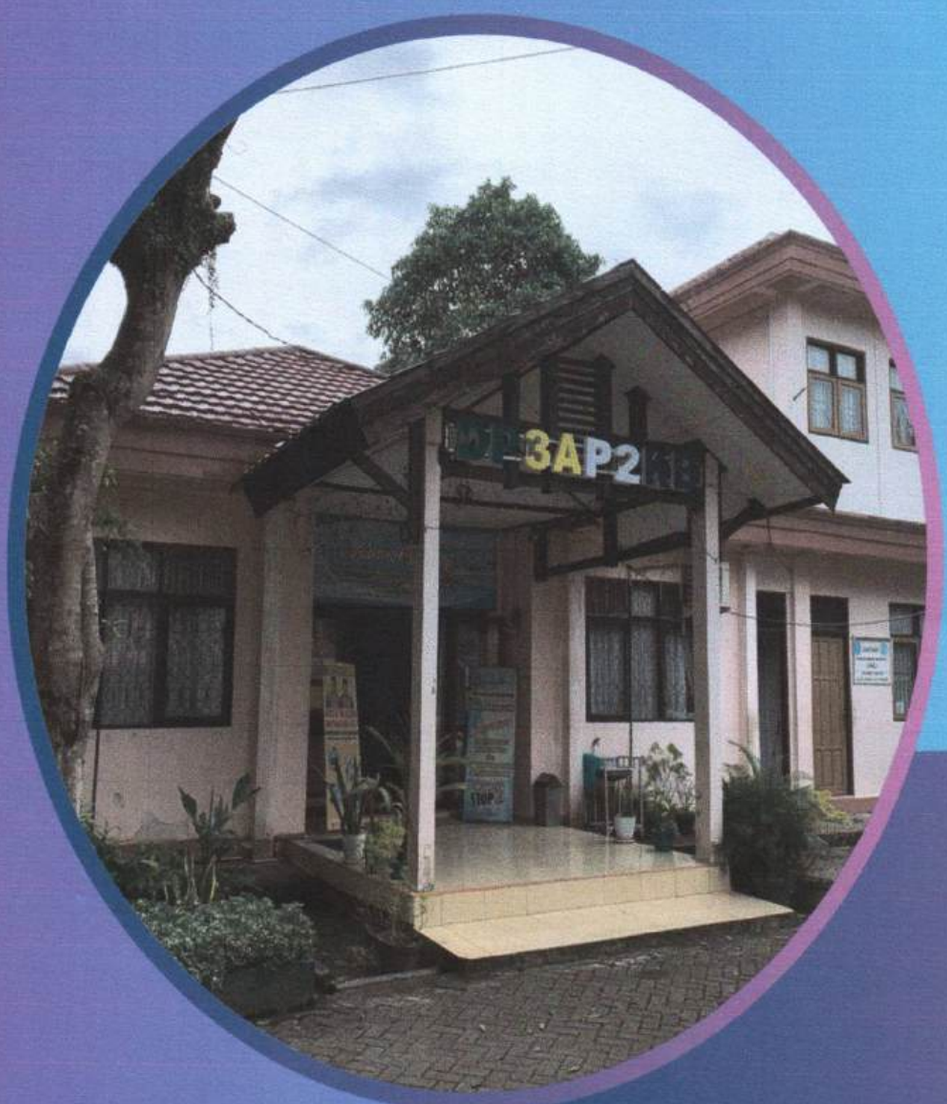

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta dengan Taufik dan Hidayah-Nya kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2024 akan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) berperan juga sebagai alat kendali, dan sebagai wujud transparasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.

Dalam penyusunan Renja ini kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan/program kedepan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Tanjung, 2024

Kepala Dinas,

Drs. H. RUSMADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19671030 199303 1 007

DAFTAR ISI

		Hal
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		iv
BAB I	**Pendahuluan**	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	6
	1.3. Maksud dan Tujuan	8
	1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II	**Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu**	11
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	11
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	25
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD	31
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal SKPD	31
	2.5. Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat	43
BAB III	**Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**	47
	3.1. Telaahan Kebijakan Nasional dan Provinsi	47
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	47
BAB IV	**Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**	53
BAB V	**Penutup**	77
	5.1. Catatan penting yang Perlu Mendapat Perhatian, baik dalam rangka Pelaksanaannya Maupun Seandainya Ketersediaan Anggaran tidak sesuai dengan Kebutuhan	77
	5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan	77
	5.3. Rencana tindak lanjut	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 13

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong..... 26

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024..... 32

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong 44

Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..... 49

Tabel 3.2 Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..... 50

Tabel 3.3 Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..... 50

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..... 51

Tabel 4.1 Sasaran, Program dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..... 54

Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota	4
Gambar 1.2	Bagan alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran	5
Gambar 1.3	Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah.....	6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan di daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan Pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada Masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2024 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024, yang merupakan penjabaran visi, misi dan program dari Revisi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024.

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan Pembangunan daerah, karena Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2024 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan Kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Dikaitkan dengan Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni "MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK

ANAK, KELUARGA SEJAHTERA & BERKUALITAS MENUJU KABUPATEN TABALONG YANG AGAMIS, SEJAHTERA DAN MANDIRI". Dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni :

1. Mewujudkan Kemandirian dan Pemberdayaan Perempuan melalui Pemberdayaan dan Pengarusutamaan Gender serta Pemberdayaan Ekonomi Perempuan;
2. Mewujudkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak;
3. Mewujudkan Pengendalian Jumlah Penduduk melalui Pelayanan KB;
4. Mewujudkan pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evalusi Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang berdasarkan Surat Bupati Tabalong Nomor: B-83/BAPPEDALITBANG/000.7/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan sektor perdagangan di Kabupaten Tabalong dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tabalong.

1.1.1 Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong merupakan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tabalong yang mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah sesuai Peraturan Bupati Tabalong No. 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

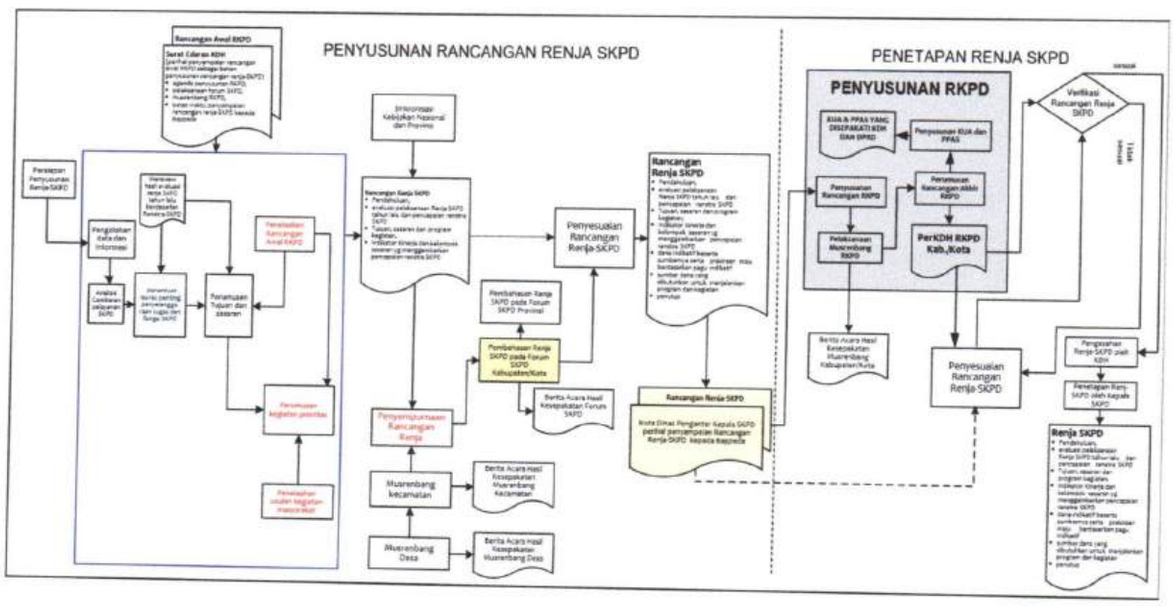

Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja

- Pembentukan Tim Penyusun Renja
- Orientasi mengenai Renja
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
- Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

- Pengolahan data dan informasi;
- Analisis gambaran pelayanan OPD;
- Mereview hasil evaluasi pelaksaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- Telaah terhadap rancangan awal RKPD
- Perumusan tujuan dan sasaran;
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

- Perumusan kegiatan prioritas;
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
- Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
- Pembahasan forum OPD; dan
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD

f. Penetapan Renja.

Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:

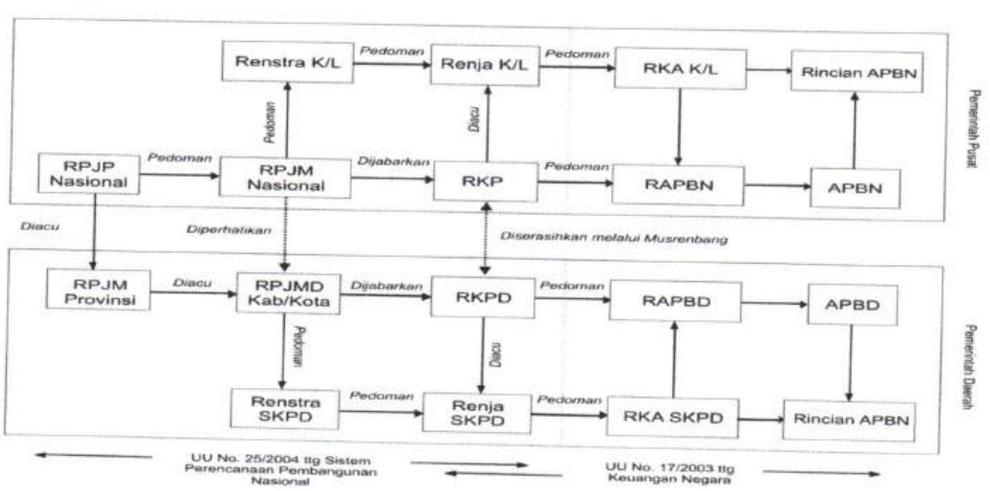

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

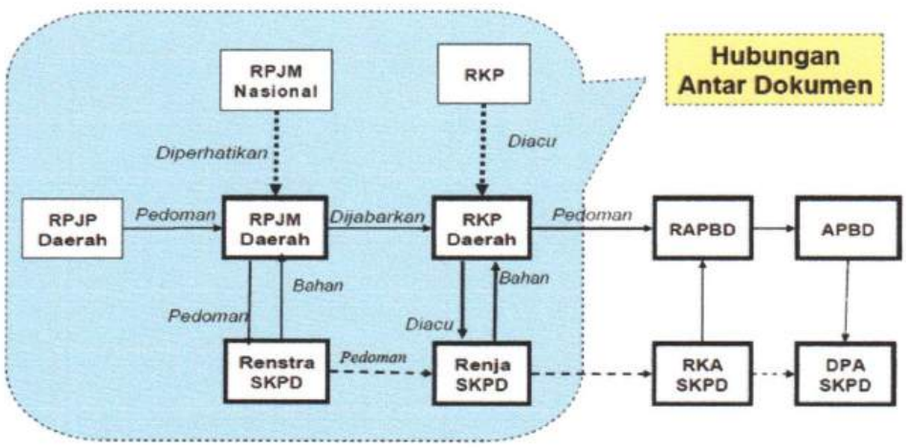

Gambar 1.3

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat. Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan di Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
14. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Propinsi Kal-Sel Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelesaian dan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Gubernur Kal-Sel Nomor 067 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Propinsi Kal-Sel;
17. Peraturan Gubernur Kal-Sel Nomor 078 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Kal-Sel;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 06);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04).
23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

Adapun maksud dari pembuatan Rencana Kerja (RENJA) tersebut adalah agar program dan kegiatan dapat direncanakan dengan baik dan tepat sasaran. Dan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat terukur dan dievaluasi. Maksud dari pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Memberdayakan Perempuan dalam meningkatkan Peran Serta Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan serta Meningkatkan Usaha Ekonomi Perempuan.
2. Meningkatkan Pemenuhan hak-hak anak, perlindungan Perempuan dan anak dari tindak kekerasan untuk menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

3. Suatu Gerakan yang dapat dirasakan oleh Perempuan didalam peningkatan peranan Wanita menuju keluarga sehat.
4. Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana bagi Masyarakat, terutama keluarga yang kurang mampu dan meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku remaja terhadap Kesehatan reproduksi.
5. Tersedianya data dan informasi Program Pembangunan Kependudukan dan KB di Kabupaten Tabalong dan dapat dimanfaatkan serta didaya gunakan bagi kepentingan operasional Program Pembangunan Kependudukan dan KB dilapangan (Tingkat RT, desa, Kecamatan dan Kabupaten) serta untuk kepentingan dan kebutuhan sektor Pembangunan lain yang terkait dalam program Kependudukan dan social ekonomi di daerah.

Tujuan :

Tujuan dari pembuatan rancangan akhir rencana kerja (RENJA) adalah agar program dan kegiatan rencana kerja dapat dengan tepat teranggarkan dananya, sasaran yang jelas serta indikator dan target yang terukur dengan baik. Adapun tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan yang berkeadilan Gender;
2. Mengoptimalkan Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak;
3. Meningkatkan Peserta KB Aktif MKJP;
4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap PK3;
5. Meningkatkan Sistem Data dan Informasi Program KKBPK;
6. Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Renja Perubahan Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tabalong disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD

Untuk melakukan evaluasi tentu kita akan melihat hal-hal yang harus dilakukan seluruh SKPD di kabupaten Tabalong Dimana adanya Upaya rasionalisasi terhadap anggaran belanja perjalanan dinas sebesar 20% dimana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Tabalong juga melakukan hal yang sama.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s/d tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 (Tahun berjalan).

Total Pagu Anggaran Setelah Perubahan Anggaran Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong yaitu sebesar Rp. 16.476.576.528,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 13.901.181.031 (84,37%) menurun dibanding realisasi Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 9.619.034.326 (84,45%) dan tahun 2021 yaitu (87,42%).

Secara umum tidak semua anggaran tahun 2023 dapat direalisasikan secara maksimal, hal tersebut disebabkan antara lain:

1. Adanya ketentuan terbaru untuk penggunaan anggaran snack yang semula Rp. 20.000,- menjadi Rp. 16.000,-.
2. Adanya silva pada belanja perjalanan dinas biasa karena menyesuaikan harga tiket, harga penginapan dan pengambilan belanja penginapan 30%
3. Adanya anggaran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dilapangan.
4. Penggunaan belanja barang di E-Cataloq Non PKP dikurangi 10%.
5. Adanya sisa honor Narasumber, dimana untuk narasumber dalam SKPD Penyelenggara hanya dapat dibayarkan 50%.
6. Untuk dana DAK BOKB, adanya beberapa kegiatan yang belum maksimal dilakukan mengingat:
   - ✓ Waktu, tenaga, dan sarana penunjang yang sangat terbatas.
   - ✓ Masih minimnya minat kaum pria untuk ber KB MOP (Medis Operasi Pria) sedang anggarannya telah disediakan.
   - ✓ Belanja yang tidak sesuai dengan juknis BOKB yang mengharuskan bahwa Praktik Bidan Mandiri (PMB) yang ada di Tabalong Sebagian besar tidak terdaftar di aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA).

Kemudian untuk serapan tahun anggaran berjalan (2024) sampai dengan Juli 2024 ini mencapai 39,80% hal tersebut disebabkan:

1. Kegiatan DAK fisik masih dalam proses pengerjaan.
2. Beberapa Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III sesuai dengan Rancangan Anggaran Kas.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluargaa Berencana Tahun 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2024		
											Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1				2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2	**08**	**02**		**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Presentase ARG Pada Belanja APBD**	**20%**	**25%**	**18%**	**72%**	**30%**	**30%**	**100%**	
					Persentase SKPD yang Responsif Gender	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
					IDG	**75,12%**	**74,25%**	**74,60%**	**100%**	**75,12%**	**75,12%**	**100%**	
2	**08**	**02**	**2.01**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah SKPD yang Responsif Gender**	**41 SKPD**	**42 SKPD**	**41 SKPD**	**100%**	**42 SKPD**	**42 SKPD**	**100%**	
2	08	02	2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota.	-	42	41	100%	42 SKPD	42 SKPD	100%	-
2	08	02	2.0006	2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	70 Orang	-	-	-	-	-	70 Orang	
2	**08**	**02**	**2.02**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif**	**30%**	**30%**	**23.33%**	**77,76%**	**30%**	**30%**	**100%**	
					Jumlah Desa Sadar Hukum Kabupaten/Kota	**60 Desa**	**48 Desa**	**24 Desa**	**100%**	**60 Desa**	**60 Desa**	**100%**	
					Persentase Angkatan Kerja Perempuan yang Mendapatkan Advokasi	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2	08	02	2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	3 Dokumen	100%	

				Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota								
2	08	02	2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang di Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Organisasi	5 Organisasi	5 Organisasi	100%	5 Organisasi	6 Organisasi	100%	
2	**08**	**02**	**2.03**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaku Usaha Ekonomi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2	08	02	2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	140 Orang	160 Orang	160 Orang	100%	160 Orang	160 Orang	100%	
2	08	02	2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	66,67%	
2	08	03		**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Terselesaikan Penangannya Pada Unit Pelayanan Terpadu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2	08	03	2.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang ditindaklanjuti dan atau diselesaikan dengan perjanjian bersama**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2	08	03	2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-	
2	**08**	**03**	**2.02**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanganan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	

2	08	03	2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	15 Orang	11 Orang	9 Orang	100%	15 Orang	15 Orang	100%	
2	08	03	2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Layanan	10 Layanan	7 Layanan	100%	15 Layanan	15 Layanan	100%	
2	**08**	**03**	**2.03**	**Penguatan dan Pengembanga Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanganan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2	08	03	2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-	
2	08	03	2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	30 Orang	30 Orang	100%	-	-	-	
2	**08**	**04**		**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**IPG**	**88,06%**	**85,91**	**86,06**	**100%**	**86,1%**	**86,1%**	**100%**	
2	**08**	**04**	**2.01**	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Kualitas Hidup keluarga**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2	08	04	2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
4	8	19	2.02.02	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
2	**08**	**04**	**2.02**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak**	**Jumlah Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan PUSPAGA**	**12 Kecamatan**	**6 Kecamatan**	**6 Kecamatan**	**100%**	**12 Kecamatan**	**12 Kecamatan**	**100%**	

				Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota									
2	08	04	2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	108 Orang	108 Orang	100%	120 Orang	120 Orang	66,67%	
2	**08**	**05**		**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase SKPD yang Mempunyai Data Terpilah Gender dan Anak**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2	**08**	**05**	**2.01**	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah SKPD yang Membuat Data Terpilah Gender dan Anak**	**30 SKPD**	**30 SKPD**	**30 SKPD**	**30 SKPD**	**30 SKPD**	**30 SKPD**	**100%**	
2	08	05	2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
2	**08**	**06**		**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Kabupaten Layak Anak (KLA)**	**Utama**	**Nindya**	**Nindya**	**100%**	**Utama**	**Utama**	**100%**	
2	**08**	**05**	**2.01.1**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Kelurahan/ Desa Layak Anak**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2	08	06	2.01.01	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	203 Organisasi	203 Organisasi	203 Organisasi	100%	203 Organisasi	203 Orgamisasi	100%	
2	**08**	**06**	**2.02**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Kelurahan/ Desa Layak Anak**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2	08	06	2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

2	08	06	2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
2	**08**	**07**		**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Indeks Perlindungan Anak**	-	**68,02%**	-	-	-	-	-	
					Persentase Anak Korban Kekerasan yang Terselesaikan Penanganannya Pada Unit Pelayanan terpadu	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2	**08**	**07**	**2.01**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Sosialisasi dan Pembentukan PATBM**	**12 Kali**	**6 Kali**	**6 Kali**	**100%**	**12 Kali**	**12 Kali**	**50%**	
2	08	07	2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	100%	-	-	-	
				Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/ Kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah SDM yang Memperoleh Advokasi dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA	240 Orang	-	-	-	-	390 Orang	390 Orang	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Keenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-	
2	**08**	**07**	**2.02**	**Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kasus Kekerasan Anak yang ditindaklanjuti**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2	08	07	2.02.01	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Orang	26 Orang	25 Orang	100%	45 Orang	45 Orang	100%	
2	08	07	2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan	-	10 Layanan	7 Layanan	100%	-	-	-	

					Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota								
				Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	-	-	-	-	45 Layanan	45 Layanan	100%	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penanganan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2	08	07	2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	
				Peningkatan Kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penenangan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	240 Orang	-	-	-	143 Orang	143 Orang	100%	
2	**14**	**2**		**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Laju Pertumbuhan Penduduk**	**1,36%**	**1,45%**	**1,37%**	**105,52%**	**1,44%**	**1,44%**	**105%**	
					Indeks Pembangunan Keluarga	**67**	**60,44**	**66,24%**	**109,65%**	**64,55**	**64,55**	**96,34%**	
					Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Sfcific Fertility Rate/ASFR 15-19)	**29**	**32**	**29,37%**	**91,78%**	**29**	**29**	**100%**	
					Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR Per WUS Usia 15-49 Tahun)	**2,21**	**2,16**	**2,23%**	**103,24%**	**2,12**	**2,12**	**95,93%**	
2	**14**	**2**	**01**	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) terbentuk**	**1 SSK**	**1 SSK**	**1 SSK**	**100%**	**3 SSK**	**1 SSK**	**100%**	
					Rapat/ Pertemuan Program Bangga Kencana	**10 Kegiatan**	**8 Kegiatan**	**8 Kegiatan**	**100%**	**10 Kegiatan**	**10 Kegiatan**	**100%**	
				Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jejaring SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang	1 SSK	1 SSK	1 SSK	100%	1 SSK	1 SSK	100%	

					SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal								
				Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	10 Kegiatan	-	-	-	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100%	
				Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	-	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100%	-	-	-	
2	**14**	**02**	**2.02**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Anak Sekolah yang Memahami Manfaat Pendewasaan usia Perkawinan**	**35 Orang**	**35 Orang**	**35 Orang**	**100%**	**90 Orang**	**90 Orang**	**100%**	
					Persentase Pelaporan Tepat Waktu	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2	14	02	2.02.06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
2	14	02	2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	-	
				Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Program Bangga Kencana	12 Laporan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	
				Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	-	
2	**14**	**03**		**PROGRAM KELUARGA BERENCANA**	**Persentase Pencapaian Peserta KB MKJP**	**14%**	**17,50%**	**13,50%**	**77,14%**	**20%**	**20%**	**100%**	
					Cakupan Peserta KB yang Aktif	**82,3%**	**82,19%**	**79,3%**	**96,48%**	**82,28%**	**82,28%**	**99,98%**	
					Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	**82,3%**	**82,19%**	**79,26%**	**96,44%**	**82,28%**	**82,28%**	**99,98%**	
					Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	**7,58%**	**7,75%**	**7,58%**	**97,81%**	**7,57%**	**7,57%**	**100%**	

2	**14**	**03**	**2.01**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Persentase Kelompok UPPKS yang Aktif**	**90%**	**87%**	**87,80%**	**100%**	**90%**	**90%**	**90%**	
2	14	03	2.01	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (DAK Non Fisik BOKB-KB)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	5 Organisasi	5 Organisasi	100%	50 Organisasi	50 Organisasi	100%	
				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal (DAK Non Fisik BOKB-KB)	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	12 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	3 Dokumen	25%	
				Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (DAK Non Fisik BOKB-KB)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana), melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
2	14	03	2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	14	03	2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (DAK Non Fisik BOKB-KB)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	72 Laporan	60 Laporan	83,33%	10 Laporan	10 laporan	100%	
2	14	03	2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (DAK Non Fisik BOKB-KB)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	
2	14	03	2.01.08	Pengendalian Program KKBPK (DAK Non Fisik BOKB-KB)	Jumlah Laporan Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%	

2	**14**	**03**	**2.02**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB**	**Persentase PPKBD yang Aktif**	**100%**	**91,6%**	**100%**	**100%**	**95,4%**	**95,4%**	**95,4%**	
					Persentase Sub PPKBD Aktif	**100%**	**64,1%**	**100%**	**100%**	**66,9%**	**66,9%**	**66,9%**	
				Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Laporan Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	
2	14	03	2.03	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	64 Orang	887 Orang	883 Orang	99,55%	890 Orang	890 Orang	100%	
2	**14**	**03**	**2.03**	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase KB Aktif**	**82,25%**	**80,56%**	**79,3%**	**98,44%**	**81,80%**	**81,80%**	**99,45%**	
2	14	03	2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK Non Fisik BOKB-KB)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	
2	14	03	2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	510 Orang	510 Orang	510 Orang	100%	1.500 Orang	1.500 Orang	100%	
2	14	03	2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	4 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%	
2	14	03	2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK Non Fisik BOKB-KB)	Jumlah Laporan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%	
2	**14**	**03**	**2.04**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB**	**Persentase Akseptor Pada Kampung KB**	**82,25%**	**80,56%**	**81,31%**	**100%**	**81,80%**	**81,80%**	100%	

2	14	03	2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	7 Organisasi	6 Organisasi	6 Organisasi	100%	50 Organisasi	50 Organisasi	71,43%	
2	14	03	2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Progran KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	24 Kampung KB	24 Kampung KB	24 Kampung KB	100%	18 Kampung	18 Kampung	75%	
				Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	
2	**14**	**04**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan Anggota Bina Keluarga yang ber-KB (BKB, BKR, BKL)**	**80%**	**77,90%**	**78,65%**	**100%**	**80%**	**90%**	**100%**	
					Cakupan Anggota UPPKS yang ber-KB	**92%**	**91,75%**	**91,89%**	**100%**	**92%**	**92%**	**100%**	
2	**14**	**04**	**2.01**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase BKB yang Aktif**	**100%**	**100%**	**73,57%**	**73,57**	**100%**	**100%**	**100%**	
					Persentase BKR yang Aktif	**100%**	**69%**	**61,06%**	**88,49%**	**80%**	**80%**	**80%**	
					Persentase BKL yang Aktif	**100%**	**75%**	**54,87%**	**73,16%**	**97%**	**97%**	**97%**	
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK Non Fisik BOKB-KB)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS< PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	-	-	-	-
				Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS (DAK Non Fisik BOKB-KB)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	-	576 Kader	576 Kader	100%	-	-	-	-
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	-	5 Laporan	5 Laporan	100%	-	-	-	-

					Pemberdayaan Keluarga/UPPKS)								
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PPKS, PIK-R dan Dunia Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2	**14**	**04**	**2.02**	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Kelompok UPPKS yang Aktif**	**90%**	**87%**	**87,80%**	**100%**	**90%**	**90%**	**100%**	
2	**14**	**04**	**2.02.04**	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	-	100%	
2	**08**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kategori SAKIP**	**A**	**BB**	**BB**	**100%**	**A**	**A**	**100%**	
					Nilai SAKIP	**80,00%**	**79,00%**	**77,95%**	**198,67%**	**80,00%**	**80,00%**	**100%**	
2	**08**	**01**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencaaan dan Realisasi Kinerja**	**14 Dokumen**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**100%**	**14 Dokumen**	**14 Dokumen**	**100%**	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	14 Laporan	14 Laporan	100%	
				Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	-	-	-	-	-	100%	
				Pelaksanaan Pengumpulan data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	-	-	-	-	-	100%	
2	**08**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Laporan Keuangan diselesaikan Tepat Waktu**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**	
2	08	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan				308 Orang/ Bulan	308 Orang/ Bulan	100%	

2	**08**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2	08	01	2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	16 Paket	9 Paket	9 Paket	100%	8 Paket	9 Paket	100%	
2	08	01	2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	20%	
2	08	01	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	56 laporan	56 Laporan	100%	70 Laporan	70 Laporan	93,33%	
2	**08**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Ppenunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	-	-	-	-	-	100%	
2	08	01	2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	8 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	2 Unit	2 Unit	100%	
2	08	01	2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6 Unit	9 Unit	9 Unit	100%	14 Unit	14 Unit	100%	
2	**08**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Kepuasan Masyarakat dan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2	08	01	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	
2	08	01	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	
2	**08**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Alat dan Perlengkapan Kantor yang dilakukan Pemeliharaan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2	08	01	2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	61 Unit	61 Unit	100%	33 Unit	33 Unit	94,29%	
2	08	01	2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	52 Unit	34 Unit	13 Unit	38,24%	52 Unit	52 Unit	100%	
2	08	01	2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunaan Lainnya	Jumlah Gedung dan Kantor Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Memperhatikan hasil analisis Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong, secara makro pelaksanaan program dan kegiatan telah terlaksana dengan baik, hal ini dapat terlihat dari capaian sasaran maupun indikator yang menjadi target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dari 8 sasaran strategis dan 11 indikator sasaran dengan tingkat capaian sebagai berikut:

1. Capaian >100% Sangat Baik (A): 1 indikator kinerja sasaran
2. Capaian 76%-100% Baik (B): 11 indikator kinerja sasaran
3. Capaian 56%-75% Cukup (C): -
4. Capaian < 55% Kurang (K): -

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak, baik dari sisi manajemen dan pengelolaan anggaran diperlukan pencermatan yang lebih baik.

Penataan terhadap perencanaan program dan kegiatan yang mengarah pada tugas pokok dan fungsi terutama pada peningkatan kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender dengan indikator IPG dan IDG, peningkatan kesertaan KB, peningkatan ketahanan keluarga, penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan anak, serta pencapaian yang mendukung Kabupaten Layak Anak tetap menjadi prioritas utama.

Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diupayakan perbaikannya. Dari sisi manajemen dan pengelolaan anggaran diperlukan pencermatan yang lebih baik. Penataan terhadap perencanaan program dan kegiatan yang mengarah pada tugas pokok dan fungsi terutama pada peningkatan kesertaan KB, peningkatan ketahanan keluarga, penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan anak, serta pencapaian yang mendukung Kabupaten Layak Anak tetap menjadi prioritas utama.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD akan membaik apabila didukung oleh :

- SDM yang berkualitas
- Pegawai yang cukup
- Sarana dan Prasarana yang lengkap

Adapun hambatan yang terjadi:

- Masih kurangnya tenaga PNS (Staf/Pelaksana) pada masing-masing bidang
- Rusaknya peralatan pada saat kegiatan sedang berjalan.
- Pemadaman Listrik pada saat kegiatan berlangsung.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kabupaten Tabalong

NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka Nilai Target Standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Persentase ARG pada Belanja APBD	-	16	16	20	25	30%	20%	4	4	3,41	18	30%	20%	
2.	Persentase SKPD yang Responsif Gender	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93,33%	52,4%	90,5%	100%	100%	100%	
3.	IDG	-	71,64	72,51	73,38	74,25	75,12	75,12	72,30	73,40	74,65	74,60	75,12	75,12	
4.	Jumlah SKPD yang Responsive Gender	-	30 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	41 SKPD	30 SKPD	22 SKPD	42 SKPD	41 SKPD	42 SKPD	41 SKPD	
5.	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif	-	30%	30%	30%	30%	30%	30%	24,14%	26,67%	26,67%	23,33%	30%	30%	
6.	Jumlah Desa Sadar Hukum	-	12 Desa	24 Desa	24 Desa	48 Desa	60 Desa	60 Desa	12 Desa	24 Desa	24 Desa	48 Desa	60 Desa	60 Desa	
7.	Persentase Angkatan Kerja Perempuan yang Mendapatkan Advokasi	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

8.	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9.	IPG	-	85,34	85,53	85,72	85,91	86,1	86,06	85,43	85,34	85,48	86,06	86,1	86,06	
10.	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup keluarga	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11.	Jumlah Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	-	3	5	7	10	10	10	3	5	4	6	10	10	
12.	Persentase SKPD yang Mempunyai Data Terpilah Gender dan Anak	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13.	Jumlah SKPD yang Membuat Data Terpilah Gender dan Anak	-	15 SKPD	15 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	15 SKPD	15 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	
14.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Terselesaikan Penanganannnya Pada Unit Pelayanan Terpadu	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15.	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang ditindaklanjuti dan atau diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16.	Persentase Penanganan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17.	Persentase Penanganan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

18.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	-	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Tdk ada Evaluasi	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	
19.	Persentase Kelurahan/ Desa Layak Anak	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
20.	Persentase Kelurahan/ Desa Layak Anak	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
21.	Indeks Perlindungan Anak	-	-	68	68,01	68,02	68,03	-	-	-	-	-	68,03	-	
22.	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Terselesaikan Penanganannya Pada Unit Pelayanan terpadu	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
23.	Pencegahan Perkawinan Usia Anak	-	9	21	33	45	57	-	-	-	-	-	57	-	
24.	Sosialisasi dan Pembentukan PATBM	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	
25.	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
27.	Laju Pertumbuhan Penduduk	-	1,48%	1,47%	1,46%	1,45%	1,44%	1,36%	1,5%	1,40%	1,73%	1,37%	1,44%	1,36%	
28.	Indeks Pembangunan Keluarga	-	-	58,2	60,32	60,44	64,55	67	-	53,42	53,42	66,24	64,55	67	
29.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Sfcific Fertility Rate/ASFR 15-19)	-	-	28	34	32	29	29	-	-	41,3	29,37	29	29	
30.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR Per WUS Usia 15-49 Tahun)	-	-	2,23	2,19	2,16	2,12	2,21	-	2,46	2,37	2,23	2,12	2,21	

31.	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) terbentuk	-	-	-	3	3	3	1	-	-	1	1	3	1	
32.	Rapat/ Pertemuan Program Bangga Kencana	-	-	3	6	8	8	10	-	3	6	8	8	10	
33.	Jumlah Anak Sekolah yang Memahami Manfaat Pendewasaan usia Perkawinan	-	-	90	90	90	90	35	-	35	35	35	90	35	
34.	Persentase Pelaporan Tepat Waktu	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
35.	Persentase Pencapaian Peserta KB MKJP	-	13%	14,50%	15,25%	17,50%	20%	14%	13,92%	13,07%	13,25%	13,50%	20%	14%	
36.	Cakupan Peserta KB yang Aktif	-	81,97%	82,05%	82,11%	82,19%	82,28%	82,30%	80,89%	79,12%	79,22%	79,30%	82,28%	82,30%	
37.	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	-	-	82,05%	82,11%	82,19%	82,28%	82,30%	-	79,12%	79,22%	79,26%	82,28%	82,30%	
38.	Persentase UPPKS yang Aktif	-	75%	80%	82%	87%	90%	90%		80%		87,80%	90%	90%	
39.	Persentase PPKBD yang Aktif	-	80,2%	84%	87,8%	91,6%	95,4%	100%		100%	84%	100%	95,4%	100%	
40.	Persentase Sub PPKBD Aktif	-	60,3%	61,2%	62,3%	64,1%	66,9%	100%		100%	61,20%	100%	66,9%	100%	
41.	Persentase KB Aktif	-	80,27%	80,29%	80,30%	80,56%	81,80%	82,00%		79,12%		79,3%	81,80%	82,00%	
42.	Persentase Akseptor Pada Kampung KB	-	-	80,29 %	80,30%	80,56%	81,80%	82,25%		79%		81,31%	81,80%	82,25%	
43.	Cakupan Anggota Bina Keluarga yang ber-KB (BKB, BKR, BKL)	-	72,75%	73,80%	75,83%	77,90%	80%	80%	84,00%	81,83%	94,32%	78,65%	80%	80%	
44.	Cakupan Anggota UPPKS yang ber-KB	-	-	91,45%	91,60%	91,75%	92%	92%	91,41%	89,70%	71,49%	91,89%	92%	92%	

45.	Persentase BKB yang Aktif	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	95,04%	73,57%	100%	100%	
46.	Persentase BKR yang Aktif	-	-	54%	60,3%	69%	80%	100%	-	100%	84,04%	61,06%	80%	100%	
47.	Persentase BKL yang Aktif	-	-	65%	73%	84%	97%	100%	-	100%	79,31%	54,87%	97%	100%	
48.	Persentase Kelompok UPPKS yang Aktif	-	75%	80%	82%	87%	90%	90%	-	80%	80%	87,80%	90%	90%	
49.	Kategori SAKIP	-	BB	BB	BB	BB	A	A	BB	BB	BB	BB	A	A	
50.	Nilai SAKIP	-	76	77	78	79	80	80	75,00	77,48	77,13	77,95	80	80	
51.	Jumlah Dokumen Perencaaan dan Realisasi Kinerja	-	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	14 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	14 Dok	
52.	Laporan Keuangan diselesaikan Tepat Waktu	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
53.	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
54.	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
55.	Persentase Kepuasan Masyarakat dan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
56.	Persentase Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera ini melihat isu-isu yang terjadi di masyarakat yaitu kurangnya perhatian terhadap pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, tidak terkendalinya jumlah penduduk dan kualitas penduduk yang masih rendah, serta tugas lain yang diberikan Bupati. Dalam menyelanggarakan tugas pokoknya.

Dalam melaksanakan kegiatan pada lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentunya ditemukan permasalahan-permasalahan yang perlu dipecahkan yaitu :

1. Kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur
2. Kurangnya sarana dan prasarana.
3. Masih kurangnya peraturan perundang-undangan.
4. Dihapusnya 12 UPT KB sehingga berdampak pada kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB dilapangan karena berkurangnya tenaga Ka.UPT.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana malaksanakan tugasnya meliputi 4 (empat) Bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Anak, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dan Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pelaporan, mencakup 12 Kecamatan serta 28 PKB/PLKB di 131 Desa/Kelurahan sehingga hal tersebut tentunya membutuhkan SDM yang mencukupi dan trampil.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Tabalong RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan hasil analisis kebutuhan tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana semuanya sudah sesuai dengan Rencana Strategis dan RKPD untuk program dan kegiatannya

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Program Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				487.704.000	Program Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				537.704.000	
1.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				143.537.578	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				143.537.578	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Perangkat Daerah	143.537.578	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Perangkat Daerah	143.537.578	
2.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				116.502.389	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				116.502.389	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	59.320.497	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	59.320.497	

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Organisasi	57.181.892	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Organisasi	57.181.892	
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				227.664.033	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				277.664.033	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	160 Orang	168.452.933	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	160 Orang	218.452.933	Berdasarkan usulan Langsung (Masyarakat/Lembaga) Musrenbang.
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	59.211.100	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	59.211.100	
B.	Program Perlindungan Perempuan				191.184.000	Program Perlindungan Perempuan				280.472.808	
1.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				90.588.552	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakam Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	90.588.552	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakam Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	Berdasarkan usulan Langsung (Masyarakat/Lembaga) Musrenbang.
2.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				65.472.808	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				65.472.808	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	15 Orang	65.472.808	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	15 Orang	65.472.808	
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				35.122.640	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				65.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewennagan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35.122.640	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewennagan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	65.000.000	Berdasarkan usulan Langsung (Masyarakat/Lembaga) Musrenbang.
C.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga				265.669.000	Program Peningkatan Kualitas Keluarga				285.529.000	
1.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				174.205.397	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				174.205.397	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan	1 Dokumen	119.689.763	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	119.689.763	

			Kabupaten/Kota yang Tersedia								
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	54.515.634	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	54.515.634	
2.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				91.463.603	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				111.323.603	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	91.463.603	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	111.323.603	Pentingnya Upaya Pencegahan Perkawinan Anak, Melalui Keluarga dan Masyarakat. Maka Perlu dilakukan kegiatan Penjangkuan ke 12 Kecamatan Melalui PUSPAGA
D.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak				179.386.000	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak				179.386.000	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				179.386.000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				179.386.000	
	Penyajian Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Yang Tersedia	1 Dokumen	179.386.000	Penyajian Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Yang Tersedia	1 Dokumen	179.386.000	
E.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)				225.038.000	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)				575.000.000	
1.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				81.430.000	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				150.000.000	

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi Pemerinta, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	203 Organisasi	81.430.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi Pemerinta, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	203 Organisasi	150.000.000	Dalam rangka Mendukung KLA
2.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				143.608.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				425.000.000	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	28.980.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000	Sesuai Arahan Bapak Bupati Tabalong untuk mendukung Kabupaten Layak Anak, pada Indikator Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	114.628.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	175.000.000	Dalam rangka mendukung KLA dan Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa
F.	Program Perlindungan Khusus Anak				126.284.000	Program Perlindungan Khusus Anak				170.472.280	
1.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				30.811.720	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000	

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Perangkat Daerah	30.811.720	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Perangkat Daerah	75.000.000	Dalam rangka mendukung indikator KLA dan sebagai wadah resmi penanganan awal jika terjadi kasus di Desa/Kelurahan
2.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				95.472.280	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				95.472.280	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	95.472.280	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	95.472.280	
G.	Program Pengendalian Penduduk				162.164.000	Program Pengendalian Penduduk				190.812.400	
1.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				63.458.352	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				75.350.352	
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan informal	1 Satuan Pendidikan	7.054.560	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan informal	3 Satuan Pendidikan	10.554.560	Pada Sekolah yang telah dilaksanakan Sosialisasi Sekolah Kependudukan perlu mendapatkan Pembinaan berkelanjutan baik berupa pembuatan papan nama maupun pemberian modul tentang kependudukan

	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan	56.403.792	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan	64.795.792	Untuk memenuhi undangan/rapat/koordinasi/pertemuan program KKBPK di Tingkat Propinsi
2.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk dan Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				98.705.648	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk dan Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				115.462.048	
	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	3 Dokumen	22.385.648	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	3 Dokumen	39.142.048	Belum tercapainya target Median Usia Kawin Perempuan (MUKP) yaitu 21 tahun. Sedangkan MUKP Kabupaten Tabalong Tahun2022 baru mencapai 20,61 (data BPS)
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	69.060.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	69.060.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	12 Laporan	7.260.000	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	12 Laporan	7.260.000	
H.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				1.028.036.000	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				1.678.536.000	
1.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				221.036.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				221.036.000	
	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			221.036.000	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			221.036.000	
2.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				619.350.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				1.194.850.000	

	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	887 Orang	619.350.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	890 Orang	1.194.850.000	Berdasarkan Kebutuhan Pembayaran Honor Kader IMP untuk selama setahun bersumber dari APBD murni karena selama ini sharing dengan BOKB sementara alokasi dari BOKB untuk menu ini berkurang setiap tahunnya.
3.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				139.150.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				214.150.000	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1500 Orang	77.650.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1500 Orang	77.650.000	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	3 Unit	61.500.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Unit	136.500.000	Berdasarakan estimasi keperluan kegiatan penurunan stunting banyak sekali pertemuan dan rakor di tingkat propinsi sehingga memerlukan dukungan untuk mengikuti kegiatan tersebut.
4.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB				48.500.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB				48.500.000	
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	50 Organisasi	48.500.000	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	50 Organisasi	48.500.000	

I.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				134.065.000	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				134.065.000	
1.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				92.500.000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				92.500.000	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	92.500.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	92.500.000	
1.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				41.565.000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				41.565.000	
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	12 Laporan	41.565.000	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	12 Laporan	41.565.000	
J.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4.496.131.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				6.416.516.743	
1.	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.580.433	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.580.433	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	10.580.433	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	10.580.433	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.326.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.134.123.743	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	3.326.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	5.134.123.743	Menyesuaikan Pagu Anggaran Tahun 2023

3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				321.909.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah				384.171.800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 paket	79.420.640	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 paket	79.420.640	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	34.751.160	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	34.751.160	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	207.738.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	270.000.000	Penambahan sebesar Rp. 62.262.000, - karena Banyaknya Kegiatan Bimtek/ Pertemuan diluar Daerah & kami tdk bisa mengikuti semua kegiatan tsbt krn terkendala sdktnya biaya perjalanan dinas
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48.502.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48.502.500	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Unit	48.502.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Unit	48.502.500	
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				296.482.697	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				296.482.697	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	91.700.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	91.700.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	204.782.697	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	204.782.697	
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				492.655.570	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				542.655.570	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	61 Unit	395.988.340	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	61 Unit	395.988.340	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	34 Unit	34.125.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	34 Unit	34.125.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Laiinya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	62.542.230	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Laiinya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	112.542.230	Penembahan Dana Pemeliharaan Gedung Kantor sebesar Rp. 50.000.000,-
					7.295.661.000					**10.448.494.231**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan isu-isu yang berkembang yaitu : Kurangnya perhatian terhadap Pemberdayaan Perempuan, Kurangnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak, Tidak Terkendalinya Jumlah Penduduk, Kualitas Penduduk yang masih rendah serta Tingginya angka Perkawinan Anak.

Untuk menekan atau menghilangkan isu-isu tersebut maka direncanakan program dan kegiatan, baik itu top down planning maupun button up planning. Usulan rencana kegiatan yang berasal dari pemerintah atas dan usulan dari Masyarakat akan disenergikan dan disinkronisasikan agar kegiatan tersebut akan tepat sasaran dan tepat tujuan.

Dalam rangka peningkatan peran Perempuan tentunya Perempuan perlu meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilakunya terhadap isu pengarusutamaan gender dan memberikan kesempatan yang lebih banyak bagi Perempuan untuk dapat berpatisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan, khususnya dalam membangun keluarga-keluarga yang berkualitas, Sejahtera, Bahagia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kegiatan-kegiatan pada Bidang Analisis Program KB dilaksanakan adalah agar selalu tersedia data program kependudukan dan KB yang Up to date, akurat dan benar dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan kebijakan dalam program Bangga Kencana.

Dalam penyusunan program/kegiatan rencana kerja, juga harus memperhatikan usulan program/kegiatan rencana kerja perubahan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Kabupaten Tabalong, LSM, Asosiasi-asosiasi, organisasi-organisasi maupun dari kecamatan-kecamatan yang langsung ditujukan kepada DP3AP2KB Kabupaten Tabalong, baik berdasarkan hasil pengumpulan informasi DP3AP2KB Kabupaten Tabalong dari monitoring lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang Kecamatan.

Adapun usulan musrembang yang ditujukan kepada DP3AP2KB Kabupaten Tabalong untuk rencana kerja Tahun 2024 sebanyak 8 usulan masyarakat. Dari 8 usulan tersebut, diakomodir dalam rencana kerja tahun 2024.

Tabel. 2.4
Usulan Pembangunan Tahun 2024 dari Para Pemangku Kepentingan di Kabupaten Tabalong

No	Uraian Usulan	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Besaran/ Volume	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan (Pengarsutanaan Gender)	Program Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kembang Kuning, Kabupaten Tabalong, Haruai, Kembang Kuning			Pelatihan Kelompok Pertanian
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	160 Orang Rp. 218.452.933,-	
2.	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan (Pengarusutamaan Gender)	Program Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jl. A. Yani RT.01 Kelurahan Pulau, Kabupaten Tabalong, Kelua, Pulau			1. Pelatihan Pengolahan Hasil Pangan Lokal bagi Kelompok Wanita Tani Kembang Kuning (1 Keg). 2. Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan bagi Ibu-Ibu KWT Kel. Pulau (1 Keg).
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	160 Orang Rp. 218.452.933,-	

3.	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan (Pengarsutanaan Gender)	Program Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Desa Simpung Layung, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tabalong, Muara Uya, Simpung Layung			
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	160 Orang Rp. 218.452.933,-	
4.	Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak	Desa Simpung Layung, Kabupaten Tabalong, Muara Uya, Simpung Layung			Perlunya Penyuluhan serta Pembinaan bagi Anak-anak Lingkungan Desa Simpung Layung dalam Menghadapi Kehidupan di Lingkungan Masyarakat
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
		Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen Rp. 175.000.000,-	
5.	Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Desa Simpung Layung, Kabupaten Tabalong, Muara Uya, Simpung Layung			Perlunya Sosialisasi dan Pembinaan bagi Perempuan terkhusus dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen Rp. 150.000.000,-	
6.	Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Desa Simpung Layung, Kabupaten Tabalong, Muara Uya, Simpung Layung			Perlunya Pembinaan dan Sosialisasi bagi Perempuan dalam mencegah kekerasan
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				

		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen Rp. 65.000.000,-	terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga
7.	Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Desa Simpung Layung, Kabupaten Tabalong, Muara Uya, Simpung Layung			Perlunya Pembinaan Bagi Keluarga di Desa Simpung Layung dalam Merencanakan Kehidupan Berkeluarga
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				
		Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK			Rp. 221.036.000,-	
8.	Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Desa Simpung Layung, Kabupaten Tabalong, Muara Uya, Simpung Layung			Kurangnya Minatnya Warga dalam Pelayanan KB
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				
		Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK			Rp. 221.036.000,-	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan Nasional dan Provinsi untuk Pemberdayaan Perempuan diharapkan adanya Kesetaraan Gender. Kemudian untuk Perlindungan Anak diharapkan terpenuhinya hak-hak dan perlindungan terhadap anak. Dalam rangka Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kualitas Penduduk diperlukan peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB). Kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang telah tertuang dalam kebijakan nasional sudah dituangkan dalam kebijakan pemerintah daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 01/Meneg-PP/V/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI yang diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 02/Meneg.PP/IX/2007, Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 40);

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Adapun tujuan dari Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB adalah sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan yang berkeadilan Gender.
b. Mengoptimalkan Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.
c. Meningkatkan Peserta KB Aktif MKJP
d. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap PK3.
e. Meningkatkan Sistem Data dan Informasi Program KKBPK.
f. Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja.

Sedangkan sasaran yang diharapkan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan Bidang Ekonomi.
b. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum.
c. Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Data Informasi.

d. Meningkatnya Upaya Pemenuhan Hak Anak.
e. Meningkatnya Upaya Perlindungan Khusus Anak.
f. Meningkatnya Upaya Perlindungan Hak Perempuan.
g. Meningkatnya Angka keberlangsungan Peserta KB.
h. Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
i. Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
j. Meningkatnya Pelayanan dan akuntabilitas Kinerja.

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN SKPD	INDIKATOR SASARAN SKPD (*OUTCOME*)
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan yang Berkeadilan Gender	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan yang Berkeadilan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender	Indeks Pembangunan Gender
			Indeks Pemberdayaan Gender		Indeks Pemberdayaan Gender
2.	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Pemeuhan Hak Anak	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Kabupaten Layak Anak	Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Kabupaten Layak Anak
			Persentase Anak dan Perempuan Korban Kekerasan yang terselesaikan Penanganannya pada Unit Terpadu		Persentase Anak dan Perempuan Korban Kekerasan yang terselesaikan Penanganannya pada Unit Terpadu
3.	Peningkatan Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pencapaian Peserta KB MKJP	Meningkatnya Angka Keberlangsungan Peserta KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pencapaian Peserta KB MKJP
					TFR
			Cakupan Peserta KB yang Aktif		Cakupan Peserta KB yang Aktif
			Cakupan Anggota Bina Keluarga yang ber-KB 9BKB, BKR, dan BKL)		Cakupan Anggota Bina Keluarga yang ber-KB 9BKB, BKR, dan BKL)
			Cakupan Anggota UPPKS yang ber-KB		Cakupan Anggota UPPKS yang ber-KB
4.	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
5.	Peningkatan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti
			Nilai AKIP		Nilai AKIP
			Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Tabel 3.2
Tujuan
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN SKPD	TARGET KINERJA SKPD TAHUN 2024
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan yang Berkeadilan Gender	Indeks Pembangunan Gender	86,1
		Indeksa Pemberdayaan Gender	75,12
2.	Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Kabupaten Layak Anak	Utama
		Persentase Anak dan Perempuan Korban Kekerasan yang Terselesaikan Penanganannya Pada Unit Terpadu	100%
3.	Meningkatkan Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pencapaian Peserta KB MKJP	20%
		TFR	2,12
		Cakupan Peserta KB yang Aktif	82,28%
		Cakupan Anggota Bina Keluarga yang ber-KB 9BKB, BKR, dan BKL)	80%
		Cakupan Anggota UPPKS yang ber-KB	92%
4.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,44 %
5.	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		Nilai AKIP	A
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100 %

Tabel 3.3

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	SASARAN SKPD	INDIKATOR SASARAN SKPD	TARGET KINERJA SKPD TAHUN 2024
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender	Indeks Pembangunan Gender	86,1
		Indeksa Pemberdayaan Gender	75.12
2.	Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Kabupaten Layak Anak	Utama
		Persentase Anak dan Perempuan Korban Kekerasan yang Terselesaikan Penanganannya Pada Unit Terpadu	100%
3.	Meningkatnya Angka Keberlangsungan Peserta KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pencapaian Peserta KB MKJP	20%
		TFR	2,12
		Cakupan Peserta KB yang Aktif	82,28%
		Cakupan Anggota Bina Keluarga yang ber-KB 9BKB, BKR, dan BKL)	80%
		Cakupan Anggota UPPKS yang ber-KB	92%
4.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,44 %

5.	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		Nilai AKIP	A
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100 %

Tabel 3.4

Indikator Kinerja Utama

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA IKU	TARGET KINERJA 2024
1	2	3	4
1.	Indeks Pembangunan Gender	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	100%
		Jumlah Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	12 Kecamatan
		Persentase SKPD yang Mempunyai Data Terpilah Gender dan Anak	100%
2.	Indeksa Pemberdayaan Gender	Jumlah SKPD yang Responsive Gender	42 SKPD
		Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif	30%
		Jumlah Desa Sadar Hukum	60 Desa
		Persentase Angkatan Kerja Perempuan yang Mendapatkan Advokasi	100%
		Persentase Pelaku Usaha Ekonomi	100%
3.	Kabupaten Layak Anak	Persentase Kelurahan/Desa Layak Anak	100%
		Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
4.	Persentase Anak dan Perempuan Korban Kekerasan yang Terselesaikan Penanganannya Pada Unit Terpadu	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang ditindaklanjuti dan atau diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	100%
		Persentase Penanganan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	100%
		Persentase Penanganan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama	100%
		Pencegahan Perkawinan Usia Anak	57 Desa/Kelurahan
		Persentase Kasus Kekerasan Anak yang ditindaklanjuti	100%
		Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupateb/Kota	1 Dokumen
5.	Persentase Pencapaian Peserta KB MKJP	Persentase Peserta KB Aktif	81,80%
6.	Cakupan Peserta KB yang Aktif	Persentase Akseptor Pada Kampung KB	81,80%
		Persentase PPKBD Aktif	95,40%
		Persentase Sub PPKBD Aktif	66,90%
		Persentase Kelompok UPPKS yang Aktif	90%
7.	Cakupan Anggota Bina Keluarga yang ber-KB, BKB, BKR, dan BKL)	Persentase BKB yang Aktif	100%
		Persentase BKR yang Aktif	80%
		Persentase BKL yang Aktif	80%

8.	Cakupan Anggota UPPKS yang ber-KB	Persentase Kelompok UPPKS yang Aktif	90%
9.	Laju Pertumbuhan Penduduk	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Terbentuk	3 SSK
		Rapat/Pertemuan Program Bangga Kencana	6 Kegiatan
		Jumlah Anak Sekolah yang Memahami Manfaat Pendewasaan Usia Perkawinan	90 Orang
		Persentase Pelaporan Tepat Waktu	100%
10.	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase Kepuasan Masyarakat dan Aparatur Terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor	100%
		Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
		Persentase Alat dan Perlengkapan Kantor yang dilakukan Pemeliharaan	100%
		Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
11.	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Realisasi Kinerja	7 Dokumen
12.	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Laporan Keuangan diselesaikan Tepat Waktu	1 Laporan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tabalong.

Tabel 4.1
Sasaran, Program dan Sub Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran SKPD	Nama Program / Kegiatan
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
		Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab./Kota
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik Hukum, Sosial dan Ekonomi
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangangan Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

		Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Program Perlindungan Perempuan
		Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi PHA bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Perlindungan Khusus Anak
		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

		Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA
		Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koodinasi Tk. Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten
3.	Meningkatnya Angka Keberlangsungan Peserta KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Program Pembinaan Keluarga Berencana
		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
		Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
		Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
		Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
		Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB
		Sub Kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Laiinya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

		Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor /UPPKA)
		Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarag
		Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
4.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Program Pengendalian Penduduk
		Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
		Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
		Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
		Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
		Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana
5.	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Peneliharaan/ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan)											Perkiraan Maju (Renja Tahun 2025)		Jenis Keg.*)	Unit SKPD Penanggung jawab
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=12-11	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	08	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai AKIP**	**Nilai AKIP**	**Dokumen Laporan Kinerja**	**Dokumen Laporan Kinerja**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**A**	**A**	**7.139.611.728**	**7.737.902.223**	**598.290.495**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**A**	**7.957.227.382**	**Sedang Berjalan**	**SEKRETARIAT**
2	08	01	2.01		**Perencanaan, penganggaran,dan, evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Realisasi Kinerja**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Realisasi Kinerja**	**Dokumen Laporan Kinerja**	**Dokumen Laporan Kinerja**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**10.580.433**	**10.580.433**	**-**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**A**	**140.000.000**	**Sedang Berjalan**	**SEKRETARIAT**
2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Kinerja	Dokumen Laporan Kinerja	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	7 Laporan	7 Laporan	10.580.433	10.580.433	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Laporan	132.000.000	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT

3	08	01	2.02	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen Laporan Kinerja	Dokumen Laporan Kinerja	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	-	-	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Dokumen	5.000.000	Baru dengan Kriteria	SEKRETARIAT
4	08	01	2.03	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Kinerja	Dokumen Laporan Kinerja	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	-	-	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Data	3.000.000	Baru dengan Kriteria	SEKRETARIAT
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Laporan Keuangan Diselesaikan Tepat Waktu**	**Laporan Keuangan Diselesaikan Tepat Waktu**	**ASN**	**ASN**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**5.556.910.000**	**5.708.229.000**	**151.319.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1 Dok**	**5.556.910.000**	**Sedang Berjalan**	**SEKRETARIAT**
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	ASN	ASN	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	308 Orang/ Bulan	309 Orang/ Bulan	5.556.910.000	5.708.229.000	151.319.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35 Org/Bulan	5.556.910.000	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**ASN**	**ASN**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**100%**	**100%**	**-**	**13.320.000**	**13.320.000**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**100%**	**-**	**Baru dengan Kriteria**	**SEKRETARIAT**
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	ASN	ASN	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	40 Buah	40 Buah	-	13.320.000	13.320.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40 Buah	-	Baru dengan Kriteria	SEKRETARIAT
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi umum perangkat daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Seluruh Karyawan**	**Seluruh Karyawan**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**100%**	**100%**	**370.674.675**	**504.993.539**	**134.318.664**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**100%%**	**570.673.933**	**Sedang Berjalan**	**SEKRETARIAT**
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Seluruh Karyawan	Seluruh Karyawan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	8 Paket	8 Paket	69.991.777	71.698.841	1.707.064	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16 Paket	150.673.929	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	Seluruh Karyawan	Seluruh Karyawan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	2 Paket	2 Paket	29.273.098	19.624.228	-9.648.870	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Paket	23.622.004	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT

2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Seluruh Karyawan	Seluruh Karyawan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	70 Laporan	85 Laporan	271.410.000	413.670.470	142.260.470	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75 Laporan	396.378.000	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT
2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Seluruh Karyawan**	**Seluruh Karyawan**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**100%**	**100%**	**58.422.156**	**295.590.181**	**237.168.025**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**100%**	**356.834.901**	**Sedang Berjalan**	**SEKRETARIAT**
2	08	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Seluruh Karyawan	Seluruh Karyawan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	-	-	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	234.109.114	Baru dengan Kriteria	Sekretariat
2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	Jumlah paket Mebel yang disediakan	Seluruh Karyawan	Seluruh Karyawan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	2 Paket	1 Paket	3.890.692	50.496.362	46.605.670	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Paket	59.279.852	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Seluruh Karyawan	Seluruh Karyawan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	14 Unit	14 Unit	54.531.464	245.093.819	190.562.355	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Unit	63.445.935	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT
2	08	01	2.07	0008	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Kantor atau Lapangan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Kantor atau Lapangan yang disediakan	Seluruh Karyawan	Seluruh Karyawan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	-	5 Unit	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Baru dengan Kriteria	SEKRETARIAT
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Kepuasan Masyarakat dan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor**	**Persentase Kepuasan Masyarakat dan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor**	**Seluruh Karyawan**	**Seluruh Karyawan**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**100%**	**100%**	**722.825.769**	**789.535.769**	**66.710.000**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**100%**	**753.794.566**	**Sedang Berjalan**	**SEKRETARIAT**
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Seluruh Karyawan	Seluruh Karyawan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	12 Laporan	12 Laporan	73.190.000	139.900.000	66.710.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	104.160.000	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Seluruh Karyawan	Seluruh Karyawan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	12 Laporan	12 Laporan	649.635.769	649.635.769	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	649.634.566	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Alat dan Perlengkapan Kantor yang dilakukan Pemeliharaan**	**Persentase Alat dan Perlengkapan Kantor yang dilakukan Pemeliharaan**	**Seluruh Karyawan**	**Seluruh Karyawan**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**100%**	**100%**	**420.198.495**	**415.653.301**	**-4.545.194**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**100%**	**579.013.982**	**Sedang Berjalan**	**SEKRETARIAT**

2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Seluruh Karyawan	Seluruh Karyawan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	33 Unit	33 Unit	376.890.000	376.890.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35 Unit	445.650.000	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Seluruh Karyawan	Seluruh Karyawan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	52 Unit	52 Unit	33.960.000	29.414.806	-4.545.194	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55 Unit	33.960.000	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Seluruh Karyawan	Seluruh Karyawan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	1 Unit	1 Unit	9.348.495	9.348.495	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	99.403.982	Sedang Berjalan	SEKRETARIAT
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG pada Belanja APBD** **Persentase SKPD yang Responsif Gender** **IDG**	**Persentase ARG pada Belanja APBD** **Persentase SKPD yang Responsif Gender** **IDG**	**SKPD se Kabupaten Tabalong**	**SKPD se Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**30%** **100%** **75,12**	**30%** **100%** **75,12**	**500.104.000**	**685.058.500**	**184.954.500**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**20%** **100%** **75,12**	**898.179.293**	**Sedang Berjalan**	**BIDANG PP**
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)**	**Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)**	**SKPD se Kabupaten Tabalong**	**SKPD se Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**42 SKPD**	**42 SKPD**	**143.537.578**	**283.396.578**	**139.859.000**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**41 SKPD**	**321.926.053**	**Sedang Berjalan**	**BIDANG PP**
2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	SKPD se Kabupaten Tabalong	SKPD se Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	143.537.578	283.396.578	139.859.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sedang Berjalan	BIDANG PP
2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang Memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Jumlah SDM yang Memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	SKPD se Kabupaten Tabalong	SKPD se Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	-	-	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70 Orang	321.926.053	Baru dengan Kriteria	BIDANG PP
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi**	**Persentasee Keterwakilan Perempuan di Legislatif**	**Persentasee Keterwakilan Perempuan di Legislatif**	**Kelompok Perempuan dan**	**Kelompok Perempuan dan**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**30%**	**30%**	**116.502.220**	**116.502.220**	**-**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**30%**	**160.778.610**	**Sedang Berjalan**	**BIDANG PP**

					pada OrganisasiKemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Desa Sadar Hukum** **Persentase Angkatan Kerja Perempuan yang Mendapatkan Advokasi**	**Jumlah Desa Sadar Hukum** **Persentase Angkatan Kerja Perempuan yang Mendapatkan Advokasi**	**Organisasi Wanita**	**Organisasi Wanita**			**60 Desa** **100%**	**60 Desa** **100%**					**60 Desa** **100%**			
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelompok Perempuan dan Organisasi Wanita	Kelompok Perempuan dan Organisasi Wanita	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	2 Dokumen	2 Dokumen	59.320.420	59.320.420	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	97.878.630	Sedang Berjalan	BIDANG PP
2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelompok Perempuan dan Organisasi Wanita	Kelompok Perempuan dan Organisasi Wanita	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	5 Organisasi	5 Organisasi	57.181.800	57.181.800	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Organisasi	62.899.980	Sedang Berjalan	BIDANG PP
2	**08**	**2**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaku Usaha Ekonomi**	**Persentase Pelaku Usaha Ekonomi**	**Masyarakat**	**Masyarakat**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**100%**	**100%**	**240.064.202**	**285.159.702**	**45.095.500**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**100%**	**415.474.630**	**Sedang Berjalan**	**BIDANG PP**
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Masyarakat	Masyarakat	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	160 Orang	160 Orang	191.167.102	218.417.102	27.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	160 Orang	317.596.000	Sedang Berjalan	BIDANG PP

2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Masyarakat	Masyarakat	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	2 Dokumen	2 Dokumen	48.897.100	66.742.600	17.845.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	97.878.630	Sedang Berjalan	BIDANG PP
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang terselesaikan Penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang terselesaikan Penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu**	**Perempuan, SKPD Dunia Usaha, LSM dan Semua Unsur Pemerintah, Non Pemerintah dan Lain-lain**	**Perempuan, SKPD Dunia Usaha, LSM dan Semua Unsur Pemerintah, Non Pemerintah dan Lain-lain**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**100%**	**100%**	**335.905.033**	**339.083.672**	**3.178.639**	**DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**100%**	**282.383.093**	**Sedang Berjalan**	**BIDANG PP DAN UPTD PPA**
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang ditindaklanjuti dan atau diselesaikan dengan Perjanjian Bersama**	**Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang ditindaklanjuti dan atau diselesaikan dengan Perjanjian Bersama**	**Perempuan, SKPD Dunia Usaha, LSM dan Semua Unsur Pemerintah, Non Pemerintah dan Lain-lain**	**Perempuan, SKPD Dunia Usaha, LSM dan Semua Unsur Pemerintah, Non Pemerintah dan Lain-lain**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**100%**	**100%**	**140.815.000**	**148.075.000**	**7.260.000**	**DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**100%**	**175.000.000**	**Sedang Berjalan**	**BIDANG PPA**
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan, SKPD Dunia Usaha, LSM dan Semua Unsur Pemerintah, Non Pemerintah dan Lain-lain	Perempuan, SKPD Dunia Usaha, LSM dan Semua Unsur Pemerintah, Non Pemerintah dan Lain-lain	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	1 Dokumen	1 Dokumen	140.815.000	148.075.000	7.260.000	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	175.000.000	Sedang Berjalan	BIDANG PPA

2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanganan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan**	**Persentase Penanganan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan**	**Perempuan, SKPD Dunia Usaha, LSM dan Semua Unsur Pemerintah, Non Pemerintah dan Lain-lain**	**Perempuan, SKPD Dunia Usaha, LSM dan Semua Unsur Pemerintah, Non Pemerintah dan Lain-lain**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**100%**	**100%**	**130.090.033**	**126.008.672**	**- 4.081.361**	**DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**100%**	**12.383.093**	**Sedang Berjalan**	**UPTD PPA**
2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Perempuan, SKPD Dunia Usaha, LSM dan Semua Unsur Pemerintah, Non Pemerintah dan Lain-lain	Perempuan, SKPD Dunia Usaha, LSM dan Semua Unsur Pemerintah, Non Pemerintah dan Lain-lain	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	15 Orang	15 Orang	24.932.408	20.851.047	- 4.081.361	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15 Orang	12.383.093	Sedang Berjalan	UPTD PPA
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sikronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sikronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan, SKPD Dunia Usaha, LSM dan Semua Unsur Pemerintah, Non Pemerintah dan Lain-lain	Perempuan, SKPD Dunia Usaha, LSM dan Semua Unsur Pemerintah, Non Pemerintah dan Lain-lain	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	15 Layanan	15 Layanan	105.157.625	105.157.625	-	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK;	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK;	-	-	Sedang Berjalan	UPTD PPA
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanganan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama**	**Persentase Penanganan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama**	**Perempuan, Dunia Usaha, LSM,Pemerintah, Non Pemerintah**	**Perempuan, Dunia Usaha, LSM,Pemerintah, Non Pemerintah**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**100%**	**100%**	**65.000.000**	**65.000.000**	**-**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**100%**	**95.000.000**	**Sedang Berjalan**	**BIDANG PPA**
2	08	03	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan, Dunia Usaha, LSM,Pemerintah, Non Pemerintah	Perempuan, Dunia Usaha, LSM,Pemerintah, Non Pemerintah	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000	65.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokmen	95.000.000	Sedang Berjalan	BIDANG PPA
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PPA

2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**IPG**	**IPG**	**Desa/ Kecamatan**	**Desa/ Kecamatan**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**86,1**	**86,1**	**230.429.000**	**402.823.421**	**172.394.421**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**86,11**	**367.952.361**	**Sedang Berjalan**	**BIDANG PP**
2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesertaan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga**	**Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga**	**Desa/ Kelurahan**	**Desa/ Kelurahan**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**100%**	**100%**	**176.705.397**	**184.365.397**	**7.660.000**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**100%**	**232.005.312**	**Sedang Berjalan**	**BIDANG PP**
2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	1 Dokumen	1 Dokumen	122.189.768	129.849.768	7.660.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	175.189.668	Sedang Berjalan	BIDANG PP
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	2 Dokumen	2 Dokumen	54.515.629	54.515.629	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	56.815.644	Sedang Berjalan	BIDANG PP
2	**08**	**04**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedian Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan PUSPAGA**	**Jumlah Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan PUSPAGA**	**Masyarakat**	**Masyarakat**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**12 Kecamatan**	**12 Kecamatan**	**53.723.603**	**218.458.024**	**164.734.421**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**12 Kecamatan**	**135.947.049**	**Sedang Berjalan**	**BIDANG PP**
2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	120 Orang	120 Orang	53.723.603	218.458.024	164.734.421	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	180 Orang	135.947.049	Sedang Berjalan	BIDANG PP
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase SKPD yang Mempunyai Data Terpilah Gender dan Anak**	**Persentase SKPD yang Mempunyai Data Terpilah Gender dan Anak**	**SKPD**	**SKPD**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**100%**	**100%**	**150.586.000**	**180.686.000**	**30.100.000**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**100%**	**195.131.871**	**Sedang Berjalan**	**BIDANG PP**

2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah SKPD yang Membuat Data Terpilah Gender dan Anak**	**Jumlah SKPD yang Membuat Data Terpilah Gender dan Anak**	**SKPD**	**SKPD**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**30 SKPD**	**30 SKPD**	**150.586.000**	**180.686.000**	**30.100.000**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**30 SKPD**	**195.131.871**	**Sedang Berjalan**	**BIDANG PP**
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	SKPD	SKPD	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	1 Dokumen	1 Dokumen	150.586.000	180.686.000	30.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	195.131.871	Sedang Berjalan	BIDANG PP
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Kabupaten Layak Anak**	**Kabupaten Layak Anak**	**Dunia Usaha, LSM, Pemerintah, Non Pemerintah dan Lain-lain**	**Dunia Usaha, LSM, Pemerintah, Non Pemerintah dan Lain-lain**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**Utama**	**Utama**	**559.800.000**	**904.906.747**	**345.106.747**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Utama**	**674.882.445**	**Sedang Berjalan**	**BIDANG PPA**
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Kelurahan/ Desa Layak Anak**	**Persentase Kelurahan/ Desa Layak Anak**	**Dunia Usaha, LSM, Pemerintah, Non Pemerintah dan Lain-lain**	**Dunia Usaha, LSM, Pemerintah, Non Pemerintah dan Lain-lain**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**100%**	**100%**	**150.000.000**	**488.926.747**	**338.926.747**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**100%**	**175.000.000**	**Sedang Berjalan**	**BIDANG PPA**
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Dunia Usaha, LSM, Pemerintah, Non Pemerintah dan Lain-lain	Dunia Usaha, LSM, Pemerintah, Non Pemerintah dan Lain-lain	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	203 Organisasi	203 Organisasi	150.000.000	488.926.747	338.926.747	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	203 Organisasi	175.000.000	Sedang Berjalan	BIDANG PPA
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Kelurahan/ Desa Layak Anak**	**Persentase Kelurahan/ Desa Layak Anak**	**Desa/ Kelurahan**	**Desa/ Kelurahan**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**100%**	**100%**	**409.800.000**	**415.980.000**	**6.180.000**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**100%**	**499.882.445**	**Sedang Berjalan**	**BIDANG PPA**
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	1 Dokumen	1 Dokumen	234.800.000	240.980.000	6.180.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	349.882.445	Sedang Berjalan	BIDANG PPA

2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000	175.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	150.000.000	Sedang Berjalan	BIDANG PPA
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Indeks Perlindungan Anak**	**Indeks Perlindungan Anak**	**Anak Korban Kekerasan**	**Anak Korban Kekerasan**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**68,03**	**68,03**	**513.931.327**	**521.421.327**	**7.490.000**	**DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**68,03**	**107.119.536**	**Sedang Berjalan**	**BIDANG PPA DAN UPTD PPA**
						Persentase Anak Korban Kekerasan yang Terselesaikan Penanganannya Pada Unit Pelayanan Terpadu	**Persentase Anak Korban Kekerasan yang Terselesaikan Penanganannya Pada Unit Pelayanan Terpadu**			**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**100%**	**100%**				**100%**			
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kasus Kekerasan Anak yang di selesaikan dengan Perjanjian Bersama**	**Persentase Kasus Kekerasan Anak yang di selesaikan dengan Perjanjian Bersama**	**Anak Korban Kekerasan**	**Anak Korban Kekerasan**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**100%**	**100%**	**195.585.000**	**210.673.000**	**15.088.000**	**DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**100%**	**75.000.000**	**Sedang Berjalan**	**BIDANG PPA**
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah SDM yang Memperoleh Advokasi dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah SDM yang Memperoleh Advokasi dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA	Anak Korban Kekerasan	Anak Korban Kekerasan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	390 Orang	390 Orang	195.585.000	210.673.000	15.088.000	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	240 Orang	75.000.000	Sedang Berjalan	BIDANG PPA
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kasus Kekerasan Anak yang ditindaklanjuti**	**Persentase Kasus Kekerasan Anak yang ditindaklanjuti**	**Anak Korban Kekerasan**	**Anak Korban Kekerasan**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**100%**	**100%**	**229.946.327**	**222.348.327**	**-7.598.000**	**DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**100%**	**32.119.536**	**Sedang Berjalan**	**UPTD PPA**

2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak Korban Kekerasan	Anak Korban Kekerasan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	45 Orang	45 Orang	33.503.952	25.905.952	- 7.598.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44 Orang	32.119.536	Sedang Berjalan	UPTD PPA
2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Pelayanan	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Pelayanan	Anak Korban Kekerasan	Anak Korban Kekerasan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	45 Layanan	45 Layanan	196.442.375	196.442.375	-	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK;	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK;	-	-	Sedang Berjalan	UPTD PPA
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Desa/ Kelurahan**	**Desa/ Kelurahan**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**88.400.000**	**88.400.000**	**-**	**DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK;**	**DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK;**	**1 Dokumen**	**-**	**Sedang Berjalan**	**BIDANG PPA**
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang Terlatih dan Mendapatkan Sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang Terlatih dan Mendapatkan Sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	143 Orang	143 Orang	88.400.000	88.400.000	-	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK;	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK;	-	-	Sedang Berjalan	BIDANG PPA
2	**14**	**2**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Laju Pertumbuhan Penduduk**	**Laju Pertumbuhan Penduduk**	**Pengelola Program KKBPK dan Mitra Kerja**	**Pengelola Program KKBPK dan Mitra Kerja**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**1,44%**	**1,44%**	**394.552.400**	**428.031.380**	**33.478.980**	**DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAK FISIK-BOKB-KB-PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAK FISIK-BOKB-KB-PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**1,36%**	**229.050.792**	**Sedang Berjalan**	**BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN SISTEM DATA INFORMASI KELUARGA**
						Indeks Pembangunan Keluarga	**Indeks Pembangunan Keluarga**					**64,55**	**64,55**						**67**				
						Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Sfcific Fertility Rate/ASFR 15-19)	**Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Sfcific Fertility Rate/ASFR 15-19)**					**29**	**29**						**16,5**				
						Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR Per WUS usia 15-49 Tahun	**Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR Per WUS usia 15-49 Tahun**					**2,12**	**2,12**						**2,12**				
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) terbentuk**	**Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) terbentuk**	**Pengelola Program KKBPK dan Mitra Kerja**	**Pengelola Program KKBPK dan Mitra Kerja**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**1 SSK**	**1 SSK**	**72.850.352**	**105.096.352**	**32.246.000**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1 SSK**	**99.795.792**	**Sedang Berjalan**	**BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN SISTEM DATA INFORMASI KELUARGA**
						Repat/ Pertemuan Program Bangga Kencana	**Repat/ Pertemuan Program Bangga Kencana**					**10 Kegiatan**	**10 Kegiatan**						**10 Kegiatan**				

2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Pengelola Program KKBPK dan Mitra Kerja	Pengelola Program KKBPK dan Mitra Kerja	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	1 SSK	1 SSK	10.554.560	10.554.560	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 SSK	15.000.000	Sedang Berjalan	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN SISTEM DATA INFORMASI KELUARGA
2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pengelola Program KKBPK dan Mitra Kerja	Pengelola Program KKBPK dan Mitra Kerja	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	10 Kegiatan	10 Kegiatan	62.295.792	94.541.792	32.246.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Kegiatan	84.795.792	Sedang Berjalan	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN SISTEM DATA INFORMASI KELUARGA
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Anak Sekolah yang Memahami Manfaat Pendewasaan Usia Perkawinan** **Persentase Pelaporan Tepat Waktu**	**Jumlah Anak Sekolah yang Memahami Manfaat Pendewasaan Usia Perkawinan** **Persentase Pelaporan Tepat Waktu**	**131 Desa/ Kelurahan dan 20 Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana**	**131 Desa/ Kelurahan dan 20 Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**90 Orang** **100%**	**90 Orang** **100%**	**321.702.048**	**322.935.028**	**1.232.980**	**DAK NON FISIK-BOKB-KB, BOKB-PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**DAK NON FISIK-BOKB-KB, BOKB-PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**35 Orang** **100%**	**129.255.000**	**Sedang Berjalan**	**BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN SISTEM DATA INFORMASI KELUARGA**
2	14	02	2.02	0006	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	131 Desa/ Kelurahan dan 20 Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana	131 Desa/ Kelurahan dan 20 Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	3 Dokumen	3 Dokumen	39.142.048	32.090.048	-7.052.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	44.500.000	Sedang Berjalan	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN SISTEM DATA INFORMASI KELUARGA
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	132 Desa/ Kelurahan dan 20 Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana	132 Desa/ Kelurahan dan 20 Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	12 Laporan	12 Laporan	96.240.000	100.280.000	4.040.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	Sedang Berjalan	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN SISTEM DATA INFORMASI KELUARGA
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	131 Desa/ Kelurahan dan 20 Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana	131 Desa/ Kelurahan dan 20 Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	12 Dokumen	12 Dokumen	179.060.000	183.900.000	4.840.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DAK NON FISIK-BOKB-KB, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	75.000.000	Sedang Berjalan	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN SISTEM DATA INFORMASI KELUARGA

2	1 4	0 2	02. 02	001 4	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	132 Desa/ Kelurahan dan 20 Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana	132 Desa/ Kelurahan dan 20 Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 laporan	-	-	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN SISTEM DATA INFORMASI KELUARGA
2	1 4	0 2	2.0 2	001 8	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	132 Desa/ Kelurahan dan 20 Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana	132 Desa/ Kelurahan dan 20 Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	12 Laporan	12 Laporan	7.260.000	6.664.980	- 595.020	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 laporan	9.755.000	Sedang Berjalan	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN SISTEM DATA INFORMASI KELUARGA
2	**1 4**	**0 3**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Pencapaian Peserta KB MKJP** **Cakupan Peserta KB yang Aktif** **Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)** **Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)**	**Persentase Pencapaian Peserta KB MKJP** **Cakupan Peserta KB yang Aktif** **Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)** **Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)**	**Desa/ Kelurahan**	**Desa/ kelurahan**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**20%** **82,28%** **82,28%** **7,57%**	**20%** **82,28%** **82,28%** **7,57%**	**5.480.119.000**	**5.932.703.522**	**452.584.522**	**DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAK FISIK-BOKB-KB-PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAK FISIK-BOKB-KB-PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**14,5%** **82,3%** **82,3%** **6,70%**	**1.744.443.980**	**Sedang Berjalan**	**BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**
2	**1 4**	**0 3**	**2.0 1**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Persentase Kelompok UPPKS yang Aktif**	**Persentase Kelompok UPPKS yang Aktif**	**Desa/ kelurahn**	**Desa/ Kelurahan**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**90%**	**90%**	**1.432.036.000**	**1.571.255.522**	**139.219.522**	**DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAK FISIK-BOKB-KB-PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAK FISIK-BOKB-KB-PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**90%**	**160.413.980**	**Sedang Berjalan**	**BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**
2	1 4	0 3	2.0 1	000 8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	2 Laporan	2 Laporan	80.000.000	80.000.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	Sedang Berjalan	BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
2	1 4	0 3	2.0 1	000 7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	12 Laporan	12 Laporan	496.000.000	496.000.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	Sedang Berjalan	BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

2	1 4	0 3	2.0 1	000 6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Kabupat en Tabalon g	Kabupat en Tabalon g	10 Laporan	10 laporan	180.000.00 0	180.000.00 0	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	Sedan g Berjal an	BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTER AAN KELUARGA
2	1 4	0 3	2.0 1	000 4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana), melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana), melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Kabupat en Tabalon g	Kabupat en Tabalon g	1 Dokume n	1 Dokume n	366.036.00 0	374.496.00 0	8.460.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	Sedan g Berjal an	BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTER AAN KELUARGA
2	1 4	0 3	2.0 1	05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan KKBPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1 4	0 3	2.0 1	000 2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana), sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana), sesuai Kearifan Budaya Lokal	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Kabupat en Tabalon g	Kabupat en Tabalon g	2 Dokume n	2 Dokume n	60.000.000	60.000.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	1 Dokume n	160.413.98 0	Sedan g Berjal an	BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTER AAN KELUARGA
2	1 4	0 3	2.0 1	000 1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Kabupat en Tabalon g	Kabupat en Tabalon g	50 Organisa si	50 Organisa si	250.000.00 0	380.759.52 2	130.759.5 22	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	Sedan g Berjal an	BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTER AAN KELUARGA
2	**1 4**	**0 3**	**2.0 2**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh**	**Persentase PPKBD Aktif**	**Persentase PPKBD Aktif**	**Kader IMP**	**Kader IMP**	**Kabupa ten**	**Kabupa ten**	**95,40%**	**95,40%**				**DAK NON FISIK-**	**DAK NON FISIK-**	**100%**		**Sedan g**	**BIDANG KB, KETAHANAN**

					KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Persentase Sub PPKBD Aktif**	**Persentase Sub PPKBD Aktif**			**Tabalong**	**Tabalong**	**66,90%**	**66,90%**	**1.502.950.000**	**1.471.450.000**	**-31.500.000**	**BOKB-KB, DAK FISIK-BOKB-KB-PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**BOKB-KB, DAK FISIK-BOKB-KB-PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**100%**	**1.150.640.000**	**Berjalan**	**DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kader IMP	Kader IMP	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	890 Orang	890 Orang	1.502.950.000	1.471.450.000	-31.500.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAK FISIK-BOKB-KB-PENDAPATAN ASLI DAERAH	DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAK FISIK-BOKB-KB-PENDAPATAN ASLI DAERAH	64 Orang	1.150.640.000	Sedang Berjalan	BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kotrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peserta KB Aktif**	**Persentase Peserta KB Aktif**	**Pasangan Usia Subur (PUS)**	**Pasangan Usia Subur (PUS)**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**81,80%**	**81,80%**	**2.207.883.000**	**2.588.908.000**	**381.025.000**	**DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB**	**DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB**	**82,25%**	**384.890.000**	**Sedang Berjalan**	**BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pasangan Usia Subur (PUS)	Pasangan Usia Subur (PUS)	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	24 Laporan	24 Laporan	18.900.000	18.900.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB;	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB;	-	-	Sedang Berjalan	BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pasangan Usia Subur (PUS)	Pasangan Usia Subur (PUS)	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	1.500 Orang	1.500 Orang	234.078.000	615.103.000	381.025.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAK FISIK-BOKB-KB-PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAK FISIK-BOKB-KB-PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	510 Orang	234.890.000	Sedang Berjalan	BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

2	1 4	0 3	2.0 3	000 6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Pasangan Usia Subur (PUS)	Pasangan Usia Subur (PUS)	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	5 Unit	5 Unit	1.936.455.000	1.936.455.000	-	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan Keluarga Berencana; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan Keluarga Berencana; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	150.000.000	Sedang Berjalan	BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
2	1 4	0 3	2.0 3	000 8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pasangan Usia Subur (PUS)	Pasangan Usia Subur (PUS)	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	2 Laporan	2 Laporan	18.450.000	18.450.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	Sedang Berjalan	BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
2	**1 4**	**3**	**2.0 4**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Persentase Akseptor Pada Kampung KB**	**Persentase Akseptor Pada Kampung KB**	**Desa/ Kelurahan**	**Desa/ Kelurahan**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**81,80%**	**81,80%**	**337.250.000**	**301.090.000**	**- 36.160.000**	**DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAK FISIK-BOKB-KB-PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAK FISIK-BOKB-KB-PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**82,25%**	**48.500.000**	**Sedang Berjalan**	**BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**
2	1 4	0 3	2.0 4	000 1	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahnan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	50 Organisasi	50 Organisasi	48.500.000	6.700.000	- 41.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Organisasi	48.500.000	Sedang Berjalan	BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
2	1 4	0 3	2.0 4	000 2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahnan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	1 Dokumen	1 Dokumen	3.750.000	3.750.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	Sedang Berjalan	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN SISTEM DATA INFORMASI KELUARGA
2	1 4	0 3	2.0 4	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	18 Kampung	18 Kampung	285.000.000	290.640.000	5.640.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	Sedang Berjalan	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN SISTEM DATA INFORMASI KELUARGA
2	**1 4**	**0 4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN**	**Cakupan Anggota Bina Keluarga yang ber-KB (BKB, BKR, BKL)**	**Cakupan Anggota Bina Keluarga yang ber-KB (BKB, BKR, BKL)**	**Desa/ Kelurahan**	**Desa/ Kelurahan**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**80,00%**	**80,00%**	**1.730.065.000**	**1.745.365.000**	**15.300.000**	**DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAK FISIK-**	**DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAK FISIK-**	**80%**	**134.065.000**	**Sedang**	**BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTER**

					KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota UPPKS yang ber-KB	Cakupan Anggota UPPKS yang ber-KB					92,00%	92,00%				BOKB-KB-PENDAPATAN ASLI DAERAH	BOKB-KB-PENDAPATAN ASLI DAERAH	92%%		Berjalan	AAN KELUARGA
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase BKB yang Aktif Persentase BKR yang Aktif Persentase BKL yang Aktif	Persentase BKB yang Aktif Persentase BKR yang Aktif Persentase BKL yang Aktif	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	100% 80% 80%	100% 80% 80%	478.900.000	494.200.000	15.300.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	100% 100% 100%	92.500.000	Sedang Berjalan	BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Desa/Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	7 Laporan/ Dokumen	7 Laporan/ Dokumen	86.400.000	86.400.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	Sedang Berjalan	BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	12 Laporan	12 laporan	92.500.000	107.800.000	15.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	92.500.000	Sedang Berjalan	BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang Tersedia	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang Tersedia	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	25 Unit	25 Unit	300.000.000	300.000.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	Sedang Berjalan	BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
2	14	04	2.02	02	Pengadaan Saran Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

2	1 4	0 4	2.0 2	07	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS))	Jumlah Kader Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS))	Jumlah Kader Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
2	**1 4**	**0 4**	**2.0 2**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Kelompok UPPKS yang Aktif**	**Persentase Kelompok UPPKS yang Aktif**	**Desa/ Kelurahan**	**Desa/ Kelurahan**	**Kabupaten Tabalong**	**Kabupaten Tabalong**	**90%**	**90%**	**1.251.165.000**	**1.251.165.000**	-	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**80%**	**41.565.000**	**Sedang Berjalan**	**BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**
2	1 4	0 4	2.0 2	000 4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	12 Laporan	12 Laporan	41.565.000	41.565.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	41.565.000	Sedang Berjalan	BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
2	1 4	0 4	2.0 2	000 5	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	2 Laporan	2 Laporan	576.000.000	576.000.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	Sedang Berjalan	BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
2	1 4	0 4	2.0 2	000 6	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	1 Laporan	1 Laporan	633.600.000	633.600.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	Sedang Berjalan	BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TOTAL														**17.035.103.488**	**18.877.981.792**	**1.842.878.304**				**12.590.435.753**		

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan RKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2024. Selain itu Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/ rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2019-2024 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan DP3AP2KB dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
4. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024, di dalam proses penyusunannya

harus memperhatikan/ mempedomani RPJMD 2019-2024 Pembangunan Kabupaten Tabalong.

5. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
5. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan DP3AP2KB, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
7. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Tanjung, 2024

Kepala DP3AP2KB,

Drs. H.RUSMADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19671030 199303 1 007

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN TABALONG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 yang disesuaikan dengan urusan bidang Ketenagakerjaan. Perubahan Rencana Kerja ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong. Dalam Perubahan Rencana Kerja juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil/kinerja.

Berkenaan dengan hal tersebut dalam memenuhi dokumen perencanaan kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong, maka disusunlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan kebutuhan program, kegiatan dan anggaran tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong.

Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2024.

Tanjung, 2024

Mengetahui :

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tabalong,

HERWANDI, S.Pd, M.AP
NIP. 19640925 198804 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN LALU 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun Lalu dan capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong tahun 2019-2024 7

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA 20

BAB IV PENUTUP 29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2024 7

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) Kabupaten Tabalong 12

Tabel 3.1 Rekapitulasi Daftar Perubahan Program dan Perubahan Kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong tahun 2024 21

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin akurasi kegiatan SKPD berjalan secara efektif dan efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan maka diperlukan Rencana Program dan Kegiatan Daerah yang baik. Perencanaan Program dan Kegiatan Daerah harus memiliki strategi sehingga perencanaan yang dihasilkan bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kabupaten Tabalong dapat memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berkesinambungan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong yang mempunyai visi dalam Rencana Strategis lima tahun kedepan adalah **"TERWUJUDNYA TENAGA KERJA YANG MANDIRI PRODUKTIF DAN SEJAHTERA MENUJU KABUPATEN TABALONG YANG AGAMIS, SEJAHTERA DAN MANDIRI"**

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara SKPD, Pemerintah Daerah, DPRD, Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang tenaga kerja. Untuk mencapai hal tersebut proses Rencana Program dan Kegiatan harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap penyusunan Rencana Kegiatan, pelaksanaan, Evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran diatas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong yang dibentuk berdasarkan unsur Tenaga Kerja (Bidang Ketenagakerjaan) melalui tugas-tugasnya memegang prinsip berdasarkan ketentuan yang mengatur setiap bidang tugas. Bidang-bidang tugas tersebut adalah memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat terutama bidang tenaga kerja.

Dalam rangka mewujudkan ***"good governance"*** serta mendukung kondisi tersebut di atas maka perlu peningkatan kinerja di bidang ketenagakerjaan.

Tugas tersebut baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen kegiatan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain Rencana Program Kegiatan yang baik akan dapat menghasilkan kegiatan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Proses Penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga Perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan riview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelahaan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi rumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2756) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional ;
6. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengerusutamaan Gender di Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasii Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tentang RPJPD dan RPJMD serta tatacara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69) .

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja untuk Tahun 2024 ini adalah sebagai Pedoman kerja bagi Dinas Tenaga Kerja untuk jangka waktu satu tahun. Kebijakan dan program Kegiatan disesuaikan antara Program SKPD, program Daerah, Program Provinsi dan program Nasional sehingga pelaksanaan program kegiatan akan semakin efektif dan Efesien.

Sedangkan tujuan penyusunan RENJA adalah :

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan sehingga program/ kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas dan mengacu kepada Renstra Dinas Tenaga Kerja tahun ke satu yang merupakan tujuan awal perencanaan pembangunan lima tahunan.
2. Agar program/kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab.
4. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui

pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capian kinerja

5. Dapat mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, menganalisa/mengkaji secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan berorientasi ke masa depan, melaksanakan pelayanan secara profesional dengan fasilitas komunikasi dan partisipasi seluruh pelaku (*stakeholder),* serta antisipasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Tujuan
- 1.4 Sistemastika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanakan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Tabalong. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2024

KD. REKENING	URAIAN	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN		%
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI AKIP**	**75**	**-**	**8.097.912.264**	**3.547.695.055**	**43,81**
2.07.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah**	**10 Dokumen**	**6 dokumen**	**26.698.100**	**4.980.000**	**18,65**
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	6 dokumen	26.698.100	4.980.000	18,65
2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**12 dokumen**	**6.525.960.000**	**2.795.681.366**	**42,84**
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan dan insentif ASN	14 Bulan	8 bulan	6.525.960.000	2.795.681.366	42,84
2.07.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	**100%**	**100%**	**40.000.000**	**32.500.010**	**81,25**
2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai yang ikut diklat / Pelatihan	8 orang	8 orang	40.000.000	32.500.010	81,25
2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**58%**	**402.567.163**	**221.266.012**	**54,96**
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 paket	4.972.312	1.866.000	37,53
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2 paket	47.623.566	17.004.500	35,71
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3 paket	35.654.285	5.485.000	15,38
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3 dokumen	17.240.000	1.700.000	9,86

KD. REKENING	URAIAN	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN		%
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	47 laporan	297.077.000	195.210.512	65,71
2.07.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya barang milik daerah**	**100%**	**100%**	**41.902.725**	**41.150.000**	**98,20**
2.07.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit		-	-	
2.07.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Pengadaan Alat Besar yang Disediakan	7 unit		-	-	
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	5 unit		-	-	
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 unit	6 unit	41.902.725	41.150.000	98,20
2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	**50%**	**762.054.276**	**290.488.117**	**38,12**
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2 laporan	5.000.000	2.500.000	50
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6 laporan	139.700.000	84.607.817	60,56
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 laporan	617.354.276	203.380.300	32,94
2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**78%**	**298.730.000**	**161.629.550**	**54,11**
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	225.910.000	109.466.800	48,46
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	10 unit	28.420.000	8.012.500	28,19
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	1 unit	44.400.000	44.150.250	99,44

KD. REKENING	URAIAN	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN		%
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentasi pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan tenaga kerja**	**100%**	**0%**	**142.794.726**	**49.692.972**	**34,80**
2.07.02.2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja dan Database Ketenagakerjaan**	**1 Dokumen**	**-**	**142.794.726**	**49.692.972**	**34,80**
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	-	142.794.726	49.692.972	34,80
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam negeri**	**138 orang**	**80 orang**	**.642.613.148**	**365.136.838**	**5,50**
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**	**100%**	**21%**	**6.388.885.693**	**276.409.591**	**4,33**
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Daerah Yang Mendapat Pelatihan	384 Orang	80 orang	6.388.885.693	276.409.591	4,33
2.07.03.2.02	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**30 Lembaga**	**-**	**87.100.000**	**35.022.310**	**40,21**
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga	-	87.100.000	35.022.310	40,21
2.07.03.2.04	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil**	**20 Perusahaan**	**-**	**166.627.455**	**53.704.937**	**32,23**
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	-	166.627.455	53.704.937	32,23
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri**	**500 orang**	**765 orang**	**1.805.923.524**	**508.715.156**	**28,17**
2.07.04.2.01	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**66%**	**1.461.195.604**	**424.610.862**	**29,06**

KD. REKENING	URAIAN	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN		%
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	510 orang	340 orang	972.425.956	23.296.338	2,40
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	20 0rang	-	8.418.876	-	-
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	336 orang	112 orang	480.350.772	401.314.524	83,55
2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri**	**44%**	**57,30%**	**344.727.920**	**84.104.294**	**24,40**
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	3 dokumen	66.240.600	20.281.428	30,62
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	40 orang	156 orang	278.487.320	63.822.866	22,92
2.07.04.2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran**	**100%**	**0%**	**-**	**-**	**-**
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	150 orang	0	-	-	-
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Pelaksanaan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial**	**100%**	**14,89%**	**314.488.000**	**46.831.162**	**14,89**
2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan**	**100%**	**15,45%**	**267.939.000**	**41.384.324**	**15,45**
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	5 Laporan	267.939.000	41.384.324	15,45

KD. REKENING	URAIAN	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN		%
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**20%**	**46.549.000**	**5.446.838**	**11,70**
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	25 Perkara	8 Perkara	46.549.000	5.446.838	11,70
					17.003.731.662	**4.518.071.183**	**26,57**

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja seluruh program Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong sebagian sudah mencapai target yang sesuai dengan rencana aksi. Hasil evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) Kabupaten Tabalong
Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indika tor Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sub kegiatan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan sub Kegiatan 2024			Target Program dan Kegiatan sub kegiatan renstra 2024	Perkiraan Realisasi Capaian		
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024 s/d Juni 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Ke giatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	Catatan
1	2	3	4	5	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI AKIP**	**75**	**76,45**	**75**	**-**		**75**	**77,35**	**103%**	
2.07.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah**	**10 Dokumen**	**10 Dokumen**	**10 Dokumen**	**6 dokumen**	**60**	**10 Dokumen**	**10 Dokumen**	**100%**	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	6 dokumen	60	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	
2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah**	**26 Dokumen**	**26 Dokumen**	**26 Dokumen**	**12 dokumen**	**46**	**26 Dokumen**	**100%**	**100%**	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan dan insentif ASN	30 orang/bulan	30 orang/bulan	14 Bulan	8 bulan	57	30 orang/bulan	14 Bulan	100%	
2.07.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	**100%**	**5 orang**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indika tor Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sub kegiatan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan sub Kegiatan 2024			Target Program dan Kegiatan sub kegiatan renstra 2024	Perkiraan Realisasi Capaian		
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024 s/d Juni 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Ke giatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	Catatan
1	2	3	4	5	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai yang ikut diklat / Pelatihan	8 orang	5 orang	8 orang	8 orang	100	8 orang	8 orang	100%	
2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**58%**	**58**	**100%**	**100%**	**100%**	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	4 Paket	2 paket	50	4 Paket	4 Paket	100%	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10 Paket	12 Paket	2 paket	16	12 Paket	12 Paket	100%	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Paket	3 paket	25	12 Paket	12 Paket	100%	
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 dokumen	25	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	103 Laporan	75 Laporan	47 laporan	67	75 Laporan	87 Laporan	116%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indika tor Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sub kegiatan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan sub Kegiatan 2024			Target Program dan Kegiatan sub kegiatan renstra 2024	Perkiraan Realisasi Capaian		
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024 s/d Juni 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Ke giatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	Catatan
1	2	3	4	5	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.07.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya barang milik daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100%**	
2.07.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit		1 unit		0	1 unit	1 unit	100%	
2.07.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Pengadaan Alat Besar yang Disediakan	7 unit		7 unit		0	7 unit	7 unit	100%	
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	5 unit	75 unit	5 unit		0	5 unit	5 unit	100%	
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 unit	34 jenis	42 unit	6 unit	14	42 unit	42 unit	100%	
2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50**	**100%**	**100%**	**100%**	
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 laporan	50	4 Laporan	4 Laporan	100%	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 laporan	50	12 Laporan	12 Laporan	100%	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 laporan	50	12 Laporan	12 Laporan	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indika tor Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sub kegiatan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan sub Kegiatan 2024			Target Program dan Kegiatan sub kegiatan renstra 2024	Perkiraan Realisasi Capaian		
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024 s/d Juni 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Ke giatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	Catatan
1	2	3	4	5	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**78%**	**78**	**100%**	**100%**	**100%**	
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 unit	18 Unit	18 Unit	100	18 Unit	18 Unit	100%	
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	0	30 Unit	10 unit	33	30 Unit	30 Unit	100%	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	20 unit	2 unit	1 unit	50	2 unit	2 unit	100%	
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentasi pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan tenaga kerja**	**100%**	**1 Dokumen**	**100%**	**0%**	**0**	**100%**	**100%**	**100%**	
2.07.02.2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja dan Database Ketenagakerjaan**	**1 Dokumen**	**90%**	**1 Dokumen**	**-**	**0**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**	
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	18 Perusahaan	1 Dokumen	-	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indika tor Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sub kegiatan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan sub Kegiatan 2024			Target Program dan Kegiatan sub kegiatan renstra 2024	Perkiraan Realisasi Capaian		
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024 s/d Juni 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Ke giatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	Catatan
1	2	3	4	5	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam negeri**	**138 orang**	**138 orang**	**138 orang**	**80 orang**	**58**	**138 orang**	**138 orang**	**100%**	
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**	**100%**	**100%**	**100%**	**21%**	**21**	**100%**	**88%**	**88%**	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Daerah Yang Mendapat Pelatihan	384 Orang	256 Orang	384 Orang	80 orang	21	384 Orang	336 Orang	87,50%	
2.07.03.2.02	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**30 Lembaga**	**100%**	**30 Lembaga**	**-**	**0**	**30 Lembaga**	**30 Lembaga**	**100,00%**	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga		30 Lembaga	-	0	30 Lembaga	30 Lembaga	100%	
2.07.03.2.04	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil**	**20 Perusahaan**	**100%**	**20 Perusahaan**	**-**	**0**	**20 Perusahaan**	**20 Perusahaan**	**100%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indika tor Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sub kegiatan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan sub Kegiatan 2024			Target Program dan Kegiatan sub kegiatan renstra 2024	Perkiraan Realisasi Capaian		
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024 s/d Juni 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Ke giatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	Catatan
1	2	3	4	5	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	20 Perusahaan	20 Perusahaan	-	0	20 Perusahaan	20 Perusahaan	100%	
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri**	**500 orang**		**500 orang**	**765 orang**	**153**	**500 orang**	**1217 orang**	**243%**	
2.07.04.2.01	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**		**100%**	**66%**	**66**	**100%**	**100%**	**100%**	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	510 orang	100 orang	510 orang	340 orang	67	510 orang	510 orang	100%	
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	20 0rang		20 0rang	-	0	20 0rang	20 0rang	100%	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	336 orang	176 orang	336 orang	112 orang	33	336 orang	336 orang	100%	
2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri**	**44%**		**44%**	**57,30%**	**130**	**44%**	**23%**	**52%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indika tor Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sub kegiatan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan sub Kegiatan 2024			Target Program dan Kegiatan sub kegiatan renstra 2024	Perkiraan Realisasi Capaian		
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024 s/d Juni 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Ke giatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	Catatan
1	2	3	4	5	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 dokumen	25	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	40 orang		40 orang	156 orang	390	40 orang	156 orang	390%	
2.07.04.2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran**	**100%**		**100%**	**0%**	**0**	**100%**	**81%**	**81%**	
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	150 orang		150 orang	0	0	150 orang	122 orang	81%	
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Pelaksanaan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial**	**100%**		**100%**	**14,89%**	**14,89**	**100%**	**85%**	**85%**	
2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan**	**100%**	**100%**	**100%**	**15,45%**	**15,45**	**100%**	**90%**	**90%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indika tor Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sub kegiatan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan sub Kegiatan 2024			Target Program dan Kegiatan sub kegiatan renstra 2024	Perkiraan Realisasi Capaian		
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024 s/d Juni 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Ke giatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	Catatan
1	2	3	4	5	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	5 Laporan	42	12 Laporan	12 Laporan	100%	
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**20%**	**20**	**100%**	**80%**	**80%**	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	25 Perkara	23 Perkara	25 Perkara	8 Perkara	32	25 Perkara	11 Perkara	44%	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 di dapat dari dana APBD Kabupaten Tabalong. Diharapkan Perubahan rencana kerja dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong berjalan lancar dan bisa menjalankan rencana kerja di tahun 2024 dengan semaksimal mungkin dan di harapkan mendapatkan hasil yang baik dan tercapai sesuai dengan target Dinas Tenaga Kerja di Tahun Anggaran 2024.

Adapun Perubahan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tebel di bawah ini :

Tabel 3.1
Rekapitulasi Daftar Perubahan Program dan Perubahan Kegiatan pada Rencana Kerja
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong tahun 2024

Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan		Indika tor Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja		Pagu			Alasan Perubahan
		Sebelum	Sesudah		RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	Penambahan/ Pengurangan	RKPD 2024 Perubahan	
1		2		3	4	5	5	6	7=(6/5)*100	11
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**TENAGA KERJA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI AKIP**	**75**	**75**	**8.097.912.264**	**7.283.853.767**	**15.381.766.031**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah**	**10 Dokumen**	**10 Dokumen**	**26.698.100**	**-**	**26.698.100**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	26.698.100	-	26.698.100	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah**	**26 Dokumen**	**26 Dokumen**	**6.525.960.000**	**262.347.000**	**6.788.307.000**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan dan insentif ASN	14 Bulan	14 Bulan	6.525.960.000	262.347.000	6.788.307.000	Penambahan Gaji ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	**100%**	**100%**	**40.000.000**	**-**	**40.000.000**	

Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan		Indika tor Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja		Pagu			Alasan Perubahan
		Sebelum	Sesudah		RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	Penambahan/ Pengurangan	RKPD 2024 Perubahan	
1		2		3	4	5	5	6	7=(6/5)*100	11
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai yang ikut diklat / Pelatihan	8 orang	8 orang	40.000.000	-	40.000.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**402.567.163**	**269.882.258**	**672.449.421**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.972.312	-	4.972.312	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	47.623.566	73.133.647	120.757.213	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	35.654.285	6.191.891	41.846.176	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	17.240.000	-	17.240.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	75 Laporan	297.077.000	190.556.720	487.633.720	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya barang milik daerah**	**100%**	**100%**	**41.902.725**	**5.990.117.358**	**6.032.020.083**	

Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan		Indika tor Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja		Pagu			Alasan Perubahan
		Sebelum	Sesudah		RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	Penambahan/ Pengurangan	RKPD 2024 Perubahan	
1		2		3	4	5	5	6	7=(6/5)*100	11
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 unit	-	560.000.000	560.000.000	Pengadaan Mobil untuk pelatihan MTU
		Pengadaan Alat Besar	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Pengadaan Alat Besar yang Disediakan		7 unit	-	5.100.000.000	5.100.000.000	Pengadaan Alat Berat dan Simulator
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan		5 unit	-	74.325.040	74.325.040	Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	42 unit	41.902.725	255.792.318	297.695.043	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	**100%**	**762.054.276**	**382.517.151**	**1.144.571.427**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	-	5.000.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	139.700.000	42.500.000	182.200.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	617.354.276	340.017.151	957.371.427	Penambahan kegiatan capacity Building dan Hari Jadi Tabalong

Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan		Indika tor Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja		Pagu			Alasan Perubahan
		Sebelum	Sesudah		RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	Penambahan/ Pengurangan	RKPD 2024 Perubahan	
1		2		3	4	5	5	6	7=(6/5)*100	11
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**298.730.000**	**378.990.000**	**677.720.000**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	225.910.000	76.360.000	302.270.000	Penambahan Pemeliharaan kendaraan dinas
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	28.420.000	15.230.000	43.650.000	Penambahan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	2 unit	44.400.000	287.400.000	331.800.000	Penambahan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentasi pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan tenaga kerja**	**100%**	**100%**	**142.794.726**	**- 27.540.000**	**115.254.726**	
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja dan Database Ketenagakerjaan**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**142.794.726**	**- 27.540.000**	**115.254.726**	
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	142.794.726	- 27.540.000	115.254.726	Effesiensi Anggaran

Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan		Indika tor Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja		Pagu			Alasan Perubahan
		Sebelum	Sesudah		RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	Penambahan/ Pengurangan	RKPD 2024 Perubahan	
1		2		3	4	5	5	6	7=(6/5)*100	11
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam negeri**	**320 orang**	**138 orang**	**6.642.613.148**	**285.938.279**	**6.928.551.427**	
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**	**100%**	**100%**	**6.388.885.693**	**195.414.669**	**6.584.300.362**	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Daerah Yang Mendapat Pelatihan	384 Orang	384 Orang	6.388.885.693	195.414.669	6.584.300.362	Penambahan pembelian alat untuk pelatihan
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**60 Lembaga**	**30 Lembaga**	**87.100.000**	**-**	**87.100.000**	
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	60 Lembaga	30 Lembaga	87.100.000	-	87.100.000	
		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil**	**20 Perusahaan**	**20 Perusahaan**	**166.627.455**	**90.523.610**	**257.151.065**	

Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan		Indika tor Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja		Pagu			Alasan Perubahan
		Sebelum	Sesudah		RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	Penambahan/ Pengurangan	RKPD 2024 Perubahan	
1		2		3	4	5	5	6	7=(6/5)*100	11
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	20 Perusahaan	166.627.455	90.523.610	257.151.065	Penambahan Pelatihan Peningkatan Produktivitas untuk Perusahaan Kecil yaitu UMKM
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri**	**500 orang**	**500 orang**	**1.805.923.524**	**1.413.098.037**	**3.219.021.561**	
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**100%**	**1.461.195.604**	**1.433.290.318**	**2.894.485.922**	
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	485 orang	510 orang	972.425.956	588.210.000	1.560.635.956	Penambahan pelatihan
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	5 0rang	20 0rang	8.418.876	61.946.038	70.364.914	
		Perluasan Kesempatan Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	112 orang	336 orang	480.350.772	783.134.280	1.263.485.052	Penambahan Pelatihan WUB
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri**	**44%**	**44%**	**344.727.920**	**- 95.625.500**	**249.102.420**	

Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan		Indika tor Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja		Pagu			Alasan Perubahan
		Sebelum	Sesudah		RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	Penambahan/ Pengurangan	RKPD 2024 Perubahan	
1		2		3	4	5	5	6	7=(6/5)*100	11
		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	12 Dokumen	66.240.600	- 30.500	66.210.100	Effesiensi Anggaran
		Job Fair/Bursa Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	40 orang	40 orang	278.487.320	- 95.595.000	182.892.320	Effesiensi Anggaran
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran**		**100%**	**-**	**75.433.219**	**75.433.219**	
			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA		150 orang	-	75.433.219	75.433.219	Penambahan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Pelaksanaan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial**	**87,90%**	**100%**	**314.488.000**	**19.068.000**	**333.556.000**	
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar**	**100%**	**100%**	**267.939.000**	**-**	**267.939.000**	

Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan		Indika tor Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja		Pagu			Alasan Perubahan
		Sebelum	Sesudah		RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	Penambahan/ Pengurangan	RKPD 2024 Perubahan	
1		2		3	4	5	5	6	7=(6/5)*100	11
				sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan						
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	12 Laporan	267.939.000	-	267.939.000	
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**100%**	**46.549.000**	**19.068.000**	**65.617.000**	
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	25 Perkara	25 Perkara	46.549.000	19.068.000	65.617.000	Penambahan Sosialisasi Kegiatan Hubungan Industrial
							17.003.731.662	**8.974.418.083**	**25.978.149.745**	

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan segala keterbatasan yang ada dapat berjalan dengan baik secara bertahap dan berkesinambungan dan selalu diupayakan untuk dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sarana dan Prasarana penunjang untuk kelancaran berlangsungnya kegiatan pembangunan wilayah ditinjau dari berbagai aspek baik aspek sumber daya manusia, sarana perkantoran, sarana transportasi, sarana komunikasi dan informasi serta sarana pendukung lainnya masih sangat diperlukan dan perlu untuk diperhatikan serta ditingkatkan guna memperlancar tugas-tugas kedinasan.

Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, diharapkan selalu tersedia dan selalu ditingkatkan dan bertambah dari tahun ke tahun guna mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat sebagai perwujudan "GOOD GOVERNANCE" serta sesuai dengan RPJMD 2019-2024 Pembangunan Kabupaten Tabalong.

Kebijakan-Kebijakan yang tertuang dan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja ini kiranya dapat memberi arah, acuan dan pedoman bagi kegiatan-kegiatan yang akan datang, sehingga Visi, Misi dan Tujuan yang diharapkan dapat dicapai.

Tanjung, 2024

Mengetahui :

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tabalong,

HERWANDI, S.Pd, M.AP
NIP. 19640925 198804 1 002

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS SOSIAL
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2024. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 yang disesuaikan dengan urusan bidang Sosial. Rencana Kerja ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tabalong. Dalam Rencana Kerja juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil/kinerja.

Berkenaan dengan hal tersebut dalam memenuhi dokumen perencanaan kerja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong, maka disusunlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan kebutuhan program, kegiatan dan anggaran tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.

Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2024.

Tanjung, 2 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tabalong,

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS SOSIAL

Drs. H. ABUBAKAR SIDIQ
NIP. 19670720 199103 1 014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dan Capaian Rentra Dinas Sosial Tahun 2019-2024 7

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Sosial 18

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial 21

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 26

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 28

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 28

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 31

3.3 Program dan Kegiatan 31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 35

BAB V PENUTUP..... 37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin akurasi kegiatan SKPD berjalan secara efektif dan efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan maka diperlukan Rencana Program dan Kegiatan Daerah yang baik. Perencanaan Program dan Kegiatan Daerah harus memiliki strategi sehingga perencanaan yang dihasilkan bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kabupaten Tabalong dapat memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berkesinambungan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tabalong yang mempunyai visi dalam Rencana Strategis lima tahun kedepan adalah *"TERWUJUDNYA PELAYANAN SOSIAL YANG BERKUALITAS, SEJAHTERA MENUJU KABUPATEN TABALONG YANG LEBIH AGAMIS, SEJAHTERA DAN MANDIRI"*

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara SKPD, Pemerintah Daerah, DPRD, Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang sosial. Untuk mencapai hal tersebut proses Rencana Program dan Kegiatan harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap penyusunan Rencana Kegiatan, pelaksanaan, Evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran diatas, Dinas Sosial Kabupaten Tabalong yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 05 tahun 2016 tanggal 23 September 2016 melalui tugas-tugasnya memegang prinsip berdasarkan ketentuan yang mengatur setiap

bidang tugas. Bidang-bidang tugas tersebut adalah memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat terutama bidang pemberdayaan potensi dan organisasi kesejahteraan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang bantuan sosial.

Dalam rangka mewujudkan *"good governance"* serta mendukung kondisi tersebut di atas maka perlu peningkatan kinerja di bidang pembangunan sosial.

Tugas tersebut baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen kegiatan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain Rencana Program Kegiatan yang baik akan dapat menghasilkan kegiatan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Proses Penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga Perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan riview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelahaan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi rumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan ususlan kegiatan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah maka Dinas Sosial Kabupaten Tabalong mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabolitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah sebagai pedoman kerja bagi Dinas Sosial untuk jangka waktu satu tahun. Kebijakan dan program kegiatan disesuaikan antara Program SKPD, Program Daerah, Program Propinsi dan Program Nasional sehingga pelaksanaan program kegiatan akan semakin efektif dan efesien.

Tujuan Rencana Kerja Tahun 2024 yaitu :

a. Sebagai panduan penyusunan rencana program/kegiatan

tahunan sehingga program/kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas dan mengacu kepada Renstra Dinas Sosial tahun ke lima yang merupakan tujuan akhir perencanaan pembangunan lima tahunan.

b. Agar program/kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

c. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab.

d. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capian kinerja

e. Dapat mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, menganalisa/mengkaji secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan berorientasi ke masa depan, melaksanakan pelayanan secara profesional dengan fasilitas komunikasi dan partisipasi seluruh pelaku (stakeholder), serta antisipasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tabalong

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tabalong

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting

5.2 Kaidah - Kaidah Pelaksanaan

5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dan capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tabalong tahun 2019-2024

Berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 menunjukan bahwa semua program dan kegiatan terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukan dari tingkat realisasi rata-rata sampai dengan 85,78% dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2023. Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Pada Tahun 2023 melaksanakan 6 Program yang dijabarkan dalam 12 Kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2023

NO	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN INI	REALISASI SPJ	% SPJ
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.254.225.356	3.515.272.456	82,63
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	434.753.012	432.591.526	94,01
	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah	430.959.865	407.583.800	94,58
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	972.086.114	862.737.060	88,75
	Pemerliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	424.597.167	385.823.969	90,87
II.	Program Pemberdayaan Sosial			
	Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	2.604.942.136	2.596.415.678	99,67
III.	Program Rehabilitasi Sosial			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti	2.476.579.233	2.240.912.806	90,48

	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	468.515.948	415.631.472	88,71
IV.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
	Pemeliharaan Anak-anak terlantar	4.430.280.000	4.406.280.000	99,46
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	23.322.948.870	18.966.835.549	81,32
V.	Program Penanganan Bencana			
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
	Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat Terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	519.072.920	476.931.798	91,88
VI	Program Pengelolaan taman makam pahlawan			
	Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional kabupaten/Kota	567.172.860	534.570.805	94,25
	JUMLAH	40.931.532.941	35.776.157.724	87,40

Anggaran Belanja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2023, sebesar Rp. 40.931.532.941,- dengan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 35.776.157.724 atau 87,40 %, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sesuai tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Sosial
Kabupaten Tabalong Tahun 2023

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
BELANJA						
Belanja Operasi	**35.838.227.447**	**30.862.485.603**	86,12	**40.931.532.941**	**35.776.157.724**	87,40
Belanja Pegawai	2.686.850.000	2.484.147.175	92,46	4.433.240.856	4.380.975.356	98,82
Belanja Barang dan Jasa	14.367.477.447	11.698.797.028	81,43	12.744.383.350	12.020.763.019	94,32
Belanja Hibah	0	0		0	0	
Belanja Bantuan Sosial	18.783.900.000	16.679.423.400	88,79	23.322.948.870	18.966.835.549	81,32
Belanja Modal	**1.655.878.974**	**1.300.281.898**		**430.959.865**	**407.583.800**	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.050.181.932	890.050.616	84,75	430.959.865	407.583.800	94,58
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	505.697.042	310.231.282				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000	100.000.000				
TOTAL	**37.494.106.421**	**32.162.649.501**	85,78	**40.931.532.941**	**35.776.157.724**	87,40

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Tabalong secara fungsi sangat erat terkait dengan program dan sasaran baik mulai dari tingkat Pusat, Provinsi

sampai daerah, artinya bahwa setiap program kegiatan mempunyai benang merah mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Adapun program/kegiatan dimaksud adalah terkait dengan pemberantasan kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran yang merupakan program dalam skala prioritas di tingkat pusat, regional. Pada tahun 2023 banyak hal sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tabalong dalam menopang sasaran prioritas RPJMD Kabupaten Tabalong utamanya. Hal ini tercermin dari capaian kinerja yang dihasilkan (87,40%) dan ditunjang pula oleh kinerja keuangan yang baik dengan menggunakan prinsip 3e (ekonomis, efektif dan efisien dengan mempertimbangkan azas money follow function. Kontribusi yang diberikan untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan tingkat pengangguran signifikan dengan program/ kegiatan yang ada dan dilaksanakan dengan baik oleh dinas. Keberhasilan program/kegiatan yang ada tak lepas dari aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik internal dan eksternal.

2.3. Isu-Isu Penting Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tabalong

Isu yang terkait dengan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong memiliki dimensi yang cukup luas diantaranya adalah sosial masyarakat dan kondisi sosial budaya disebutkan bahwa masih banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum terlayani dan merupakan fenomena umum di kota-kota yang semakin berkembang termasuk diseluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Tabalong untuk menjembatani kesenjangan antara harapan dengan kondisi faktual yang terjadi dimasyarakat. Peran Dinas Sosial diharapkan dapat bersinergi/berkoordinasi dengan SKPD yang sama-sama menangani

masalah pengentasan kemiskinan untuk lebih memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disertai dengan mengarahkan program dan kegiatan SKPD agar lebih berkonsentrasi kepada pemberdayaan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka isu-isu strategis yang perlu dijadikan landasan dalam proses perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yaitu:

1. Masih banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan pengemis yang belum mendapatkan pelayanan sosial.
2. Belum maksimalnya peran pemerintah, lembaga swasta, masyarakat/organisasi sosial dalam penanganan PPKS.
3. Masih belum maksimalnya penanganan terhadap fakir miskin baik itu dari segi pendataan dan pengelolaan data dalam mendapatkan layanan sosial.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja Dinas Sosial tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Review Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023

PADA SKPD DINAS SOSIAL KABUPATEN TABALONG

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Gaji dan Tunjangan)	Dinas Sosial	Terlayaninya pembayaran gaji dan tunjangan	1 Tahun	2.723.868.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Gaji dan Tunjangan)	Dinas Sosial	Terlayaninya pembayaran gaji dan tunjangan	1 Tahun	4.251.225.356
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Terlakasananya penyediaan komponen listrik, peralatan kantor, peralatan rumah tangga, cetak penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan perpu, rapat koordinasi dan konsultasi	1 tahun	345.600.033	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Terlakasananya penyediaan komponen listrik, peralatan kantor, peralatan rumah tangga, cetak penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan perpu, rapat koordinasi dan konsultasi	1 tahun	337.400.033

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial	Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	32.318.981	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial	Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	52.773.529
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Dinas Sosial	Terlaksananya jasa surat menyurat, jasa komunikasi, jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	1.153.180.716	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Dinas Sosial	Terlaksananya jasa surat menyurat, jasa komunikasi, jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	1.139.080.716
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	Terlaksananya pemeliharaan kendaaraan dinas, dan terpeliharanya kebersihan kantor dan pembayaran tenaga honor	1 Tahun	431.097.661	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	Terlaksananya pemeliharaan kendaaraan dinas, dan terpeliharanya kebersihan kantor dan pembayaran tenaga honor	1 Tahun	431.097.661
2.	**Program Pemberdayaan Sosial**					**Program Pemberdayaan SosiaL**				
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraa n Kesejahteraan Sosial	100%	2.608.034.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100%	2.541.589.756
3.	**Program Rehabilitas Sosial**									

	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase dari Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	2.891 orang	3.079.384.848	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase dari Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	2.891 orang	2.544.878.189
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase dari Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	51 orang	525.905.435	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase dari Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	51 orang	537.366.055
4.	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**					**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**				
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Persentase dari Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	575 anak	4.404.350.000	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Persentase dari Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	575 anak	4.404.350.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase dari Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	4700 KPM	9.334.347.600	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase dari Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	4700 KPM	9.382.386.148

5.	**Program Penanganan Bencana**					**Program Penanganan Bencana**				
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Baperstok bencana	5.000 jiwa	265.492.620	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Penyediaan Baperstok untuk Pemberian bantuan Korban Bencana (Jiwa)	5.000 Jiwa	265.492.620
6.	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**					**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**				
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah TMP yang dipelihara	2 TMP	248.360.616	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah TMP yang dipelihara	2 TMP	314.804.680
	Jumlah				24.626.035.075		Jumlah			26.202.444.922

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Tahun 2023 Dinas Sosial memiliki 6 (enam) Program dan 12 (dua belas) kegiatan yang kesemuanya bersumber dari Dana APBD Kabupaten Tabalong, diantara Program/Kegiatan tersebut adalah :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan antara lain : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
b. Program Pemberdayaan Sosial yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain yaitu Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
c. Program Rehabilitasi Sosial yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan antara lain : Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial dan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan antara lain : Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak terlantar, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
e. Program Penanganan Bencana yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu : Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.
f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Program Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2023 telah mengacu pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2019 -2024 dan Rancangan awal RKPD Tahun 2022 serta berpedoman dengan RPJMD yang telah disepakati.

Berdasarkan Hasil Pengumpulan Informasi Perangkat Daerah, Penelitian Lapangan dan Pengamatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota maka untuk tahun 2024 terdapat usulan dari Masyarakat yang akan dituangkan dalam 6 (enam) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan pada tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024
PADA SKPD DINAS SOSIAL KABUPATEN TABALONG

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Laporan Keuangan diselesaikan tepat waktu	1 Dokumen	
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	
II	**Program Pemberdayaan Sosial**				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah	Dinas Sosial	Peserta sosialisasi UGB dan PUB	100%	

	Uang atau Barang				
1	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Persentase Jumlah Karang taruna, LKS dan Organisasi Masyarakat yang mendapatkan uji kompetensi	100 %	
III	**Program Rehabilitasi Sosial**				
1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Dinas Sosial	Jumlah orang mendapat layanan Rehabilitasi Sosial (Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	2.871 orang	
2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.	Dinas Sosial	Jumlah orang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial (PPKS lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial)	78 orang	
IV	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**				
1	Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Dinas Sosial	Jumlah Anak Panti yang mendapatkan Bantuan	575 anak	
2	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah KPM penerima Fasilitasi Bantuan Sosial	4.700 KPM	
V	**Program Penanganan Bencana**				
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap	Dinas Sosial	Persentase Jumlah Korban bencana yang mendapat bantuan	100 %	

	Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				
VI	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**				
1	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	2 TMP	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, POGRAM DAN KEGIATAN

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong maka Dinas Sosial Kabupaten Tabalong mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang sosial. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok tersebut maka Dinas Sosial mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang sosial sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh kepala daerah.
b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang sosial.
c. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas.
e. Pengelolaan urusan ketata usahaan dinas
f. Pengelolaan urusan kesekretariatan.
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

a. Kebijakan Nasional

Dalam Rangka menghadapi berbagai tantangan pembangunan sosial serta permasalahannya beserta mengamati hasil dari Musrenbang Kecamatan serta Renstra Tahun 2019-2024 yang mendasarkan pada :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dilandasi keimanan dan ketaqwaan.
2. Mengembangkan agribisnis dan perdagangan.
3. Mewujudkan kepemerintahan yang baik.

Maka ditetapkan 6 (Enam) kebijakan prioritas yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pemberdayaan Sosial.
3. Program Rehabilitasi Sosial.
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
5. Program Penanganan Bencana.
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Adapun kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam kegiatan-kegiatan kesejahteraaan sosial.
2. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta tertanganinya orang terlantar dan korban bencana melalui kegiatan tanggap darurat.
3. Terpeliharanya anak terlantar didalam dan luar panti sosial.
4. Meningkatnya keterampilan anak putus sekolah dan wanita rawan sosial ekonomi.
5. Meningkatnya kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas Berat dan Non Produktif.
6. Meningkatnya keterampilan dan kemandirian Penyandang Disabilitas Potensial melalui bantuan sarana dan prasarana untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di panti-panti sosial yang ada di luar Kabupaten Tabalong.
7. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial
8. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan organisasi sosial/lembaga sosial di bidang manajemen kesejahteraan sosial.
9. Meningkatnya rasa penghayatan dan penghormatan terhadap para pahlawan.

b. Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor :

17 Tahun 2009, dimana pada Bab II tentang kondisi dan prediksi kondisi umum daerah serta isu-isu strategis kondisi sosial budaya disebutkan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan fenomena umum di kota-kota yang semakin berkembang termasuk diseluruh Kabupaten/ Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Strategi merupakan faktor terpenting dalam perencanaan Strategis dan merupakan rencana menyeluruh serta terpadu dari Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Selatan dalam mencapai tujuannya. Strategi meliputi penetapan kebijakan, program dengan memperhatikan sumberdaya yang tersedia, serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Selanjutnya strategi ini diharapkan dapat memberikan arahan dan dorongan kegiatan operasional bagi setiap pelaksana kegiatan Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian akan timbul kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi, dalam rangka menuju visi yang telah ditetapkan.

Strategi (Kebijakan dan Program) Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2019-2024, yang berkaitan dengan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan

a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PPKS.
b. Meningkatkan kualitas manajemen dan SDM pelayanan kesejahteraan sosial.

c. Meningkatkan kualitas manajemen dan SDM pelayanan kesejahteraan sosial.

d. Meningkatkan pemberdayaan penanggulangan kemiskinan, kecacatan, ketunaan sosial, keterlantaran, korban bencana dan masalah sosial strategis lainnya.

e. Meningkatkan partisipasi dan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

f. Meningkatkan kualitas pelayanan panti-panti sosial .

g. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi bagi tuna sosial, korban penyalahgunaan napza, penyandang cacat, lanjut usia dan perlindungan kesejahteraan sosial serta keterampilan dalam panti dan luar panti baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta.

Meningkatkan kesiapsiagaan perangkat dan kesadaran, kemampuan dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan akibat bencana alam, bencana sosial.

h. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat (PSKS), organisasi sosial masyarakat (Orsos), Karang Taruna (KT).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja - SKPD

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Tujuan Renja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tabalong adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

3. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.
4. Meningkatkan Rasa Nasionalisme dan Penghargaan terhadap Para Pahlawan.
5. Menurunkan Jumlah keluarga Miskin

Sasaran Renja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tabalong adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
3. Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja
4. Meningkatnya rasa Nasionalisme dan penghargaan terhadap para pahlawan.
5. Menurunnya Jumlah Keluarga Miskin

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Sosial Kabupaten Tabalong sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah dan membantu Bupati Tabalong dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dibidang sosial dituntut untuk menghasilkan produk-produk berkualitas terutama produk kesehteraraan sosial serta dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Tabalong.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 yaitu ***"MENUJU KABUPATEN TABALONG YANG AGAMIS, SEJAHTERA DAN MANDIRI"*** maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tabalong pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

3.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Program Pemberdayaan Sosial.
2. Program Rehabilitasi Sosial.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

4. Program Penanganan Bencana.
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Dengan rincian kegiatan sebagaimana tertuang pada tabel 4.1 dibawah ini:

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024

KODE	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KPOTA	**Nilai AKIP**	**Dinas Sosial**	**BB**		**APBD**	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Laporan Keuangan diselesaikan tepat waktu	4.856.588.000		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	643.081.291		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.011.184.735		
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	296.008.061		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terpeliharanya Barang Milik Daerah	903.777.327		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**		**100 %**			
	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam daerah Kabupaten/ Kota			Sosialisasi Prosedur Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan (Barang dan Uang) yang terjadi di Masyarakat	80.213.000		
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Jumlah Karang taruna, LKS dan Organisasi Masyarakat yang mendapatkan uji kompetensi	3.136.221.000		
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial**		**100 %**			

	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial			Jumlah orang mendapat layanan Rehabilitasi Sosial (Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	3.456.777.801		
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.			Jumlah orang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial (PPKS lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial)	1.213.883.419		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial**		**100 %**			
	Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar			Jumlah Anak Panti yang mendapatkan Bantuan	5.640.100.000		
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah KPM penerima Fasilitasi Bantuan Sosial	23.153.403.373		
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial**		**100 %**			
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			Persentase Jumlah Korban bencana yang mendapat bantuan	815.263.347		
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	790.728.679		
	Jumlah				**45.997.230.033**		

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan RKPD Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2024. Selain itu Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Dinas/Badan/ Lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Dinas Sosial Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2019-2024 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan,

mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

3. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
4. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani RPJMD 2019-2024 Pembangunan Kabupaten Tabalong.
5. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
5. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
7. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Tanjung, 2 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tabalong,

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS SOSIAL

Drs. H. ABUBAKAR SIDIQ
NIP. 19670720 199103 1 014

RENCANA KERJA

BPBD

TAHUN 2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Salam Tangguh,

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan limpahan Taupik dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Badan Peanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 telah diselesaikan.

Rencana Kerja Badan Peanggulangan Bencana Daerah merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Peanggulangan Bencana Daerah maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat pada tahun 2024. Rencana Kerja Badan Peanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 sebagai pedoman perencanaan bagi Badan Peanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong dalam menyusun program dan kegiatan dalam penanggulangan bencana selama satu tahun yang berisikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta penganggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan penanggulanagn bencana di Kabupaten Tabalong.

Tanjung, Februari 2024

Kepala Pelaksana BPBD Kab. Tabalong

ZAHIRSYAH MANUAR, BA

NIP. 196[illegible]06041986091001

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

DAFTAR ISI ii

KATA PENGANTAR iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 3
C. Maksud dan Tujuan 6
D. Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Tabalong Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9
B. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Tabalong 20
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kab. Tabalong 24
D. Review Terhadap Rancangan RKPD 39
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 47

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PRORGAM DAN KEGIATAN

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 49
B. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kabupaten Tabalong 49
C. Program dan Kegiatan 51

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 59

BAB V PENUTUP 60

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2024 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan estimasi dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong. Untuk penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 berpedoman pada Renstra BPBD Tahun 2020 - 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.

Gambar 1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten

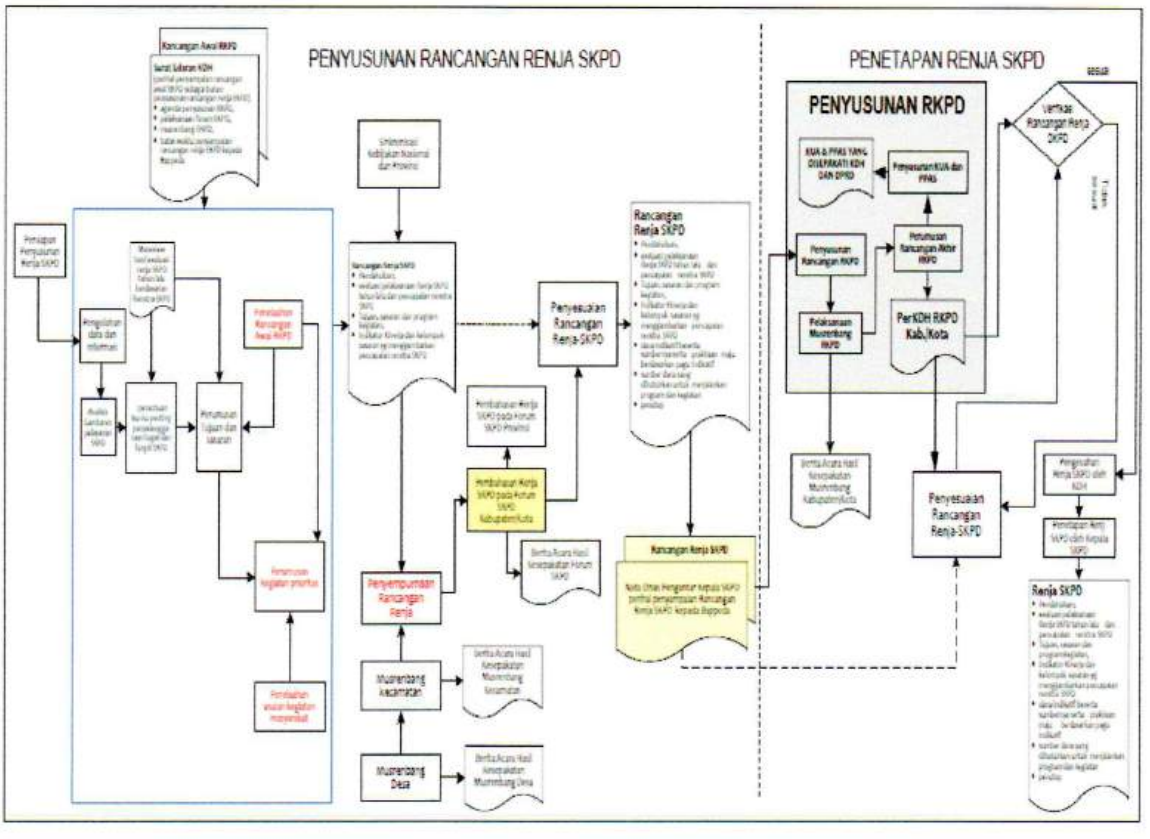

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No.8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara RI Tahun 1965 No.51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
5. UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025(Lembaran Negara RI Tahun 2007 No.33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan PenerapanStandar Pelayanan Minimal.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunandan Penetapan SPM.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
22. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 19);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bancana Daerah Tahun 2023 adalah:

a) Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
b) Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
c) Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;

d) Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.;

e) Untuk memasukkan program kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Renja SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

D. Review terhadap RKPD

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

B. Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

C. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Tabalong adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis BPBD Kabupaten Tabalong. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BPBD Kabupaten Tabalong ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Tabalong selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

a) Evaluasi Program Tahun 2022

Pada tahun 2022 total anggaran adalah sebesar Rp. **5.561.540.699**,- (lima milyar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) dan terealisasi sebesar Rp. **4.552.455.560**,- (empat milyar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh). Pencapaian 81,86%, yang dijabarkan melalui 2 (dua) Program dan 8 (delapan) Kegiatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPBD
Kabupaten Tabalong Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Target	Realisasi
I	***Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten***	**2.832.393.193**	**2.696.504.804**
1.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	46.327.598	42.867.100
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.456.012.000	1.400.118.421
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	169.933.474	154.948.37
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	523.637.020	511.500.831
5.	Pemeliharaan Barng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	627.483.101	587.070.085

II	***Program Penanggulangan Bencana***	**2.729.147.506**	**2.566.823.030**
6.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	88.789.123	66.92.100
7.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.978.037.883	1.887.002.721
8	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	662.320.500	612.894.209
Jumlah		**5.561.540.599**	**4.552.455.560**

b) Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2023

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 8.719.962.570,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) terurai dalam 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal bisa lebih dari tahun 2022.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi Kabupaten Tabalong ***"Menuju Kabupaten Tabalong Yang Lebih Agamis, Sejahtera dan Mandiri"*** dan Misi nomor pertama yaitu ***Kabupaten Tabalong yang Lebih Agamais***, pada dasarnya kegiatan BPBD Kabupaten Tabalong mendukung misi pertama Kabupaten Tabalong dimana masyarakat merasa lebih aman dan nyaman untuk beribadah jika tidak ada bencana. Untuk mencapai misi pertama tersebut, BPBD mempunyai fungsi komando, koordinasi dan pelaksana terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabalong baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program

penanggulangan bencana maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPBD sebagai berikut:

a. Tipologi BPBD Kabupaten Tabalong adalah B, dengan kepala pelaksana diduduki esselon 3 sehingga untuk berkoordinasi dengan instansi lain agak kesulitan.
b. Rendahnya Aksesibiltas informasi kebencanaan di seluruh wilayah Kabupaten Tabalong;
c. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
d. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi komando dan pelaksanaan;
e. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
f. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra BPBD Kabupaten Tabalong tahun 2020-2024, maka strategi dan kebijakan yang

akan ditempuh BPBD Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
   a) Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas aparatur kebencanaan.
   b) Peningkatan kemampuan teknis aparat kebencanaan.
   c) Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
   d) Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
2) Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam kondisi siaga bencana dan tanggap darurat bencana dilaksanakan dengan arah kebijakan :
   a) Membangun kemampuan dan kolektivitas masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi penanggulangan bencana.
   b) Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses penanggulangan bencana.
   c) Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabalong yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan kelembagaan non-pemerintah.
3) Strategi Pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah

kebijakan : Meningkatkan pelayanan kebencanaan pada saat pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana.

4) Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabalong dengan arah kebijakan :
   a) Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan langkah inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tabalong dan BPBD Kabupaten Tabalong.
   b) Melaksanakan penanggulangan bencana yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar SKPD.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABALONG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun (n-3) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun n-1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2021		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan n-1) 2022	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%) Tahun 2022
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.05	BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai AKIB	**BB**	**CC**	**BB**	**BB**		**BB**	**CC**	
1.05.01.2.01	**Kegiatan** Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1.05.01.2.01.01	**Sub Kegiatan** Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentasi Dokumen tersusun	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	100%	10 Dok	10 Dok	100%
1.05.01.2.02	**Kegiatan** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1.05.01.2.02.01	**Sub Kegiatan** Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Prosentase terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	18 org	17 org	17 org	11 org	100%	18 org	18 org	100%
1.05.01.2.05	**Kegiatan** Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1.05.01.2.05.02	**Sub Kegiatan** Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase Pakaian Dinas Terbeli	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1.05.01.2.06	**Kegiatan** Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan									
1.05.01.2.06.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Prosentasi tersedianya komponen Instalasi Listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Prosentasi tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.06.05	- Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	- Prosentasi tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.06.06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Prosentasi tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Prosentasi Koordinasi dan Konsultasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.08	**Kegiatan** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentasi penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan									
1.05.01.2.08.01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Prosentasi Surat Menyurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Prosentasi Pembayaran Jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.08.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Prosentasi tersedianya jasa pelayanan umum kantor								
1.05.01.2.09 1.05.01.2.09.01 1.05.01.2.09.07 1.05.01.2.09.00	**Kegiatan** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah **Sub Kegiatan** - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan - Pemeliharaan Aset tetap - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor bangunan lainnya	Prosentase pelayanan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Prosentasi jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan - Prosentasi terpeliharanya asset tetap - Prosentasi terpeliharanya Gedung kantor bangunan lainnya	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
	Program Penanggulangan Bencana									
1.05.03.2.01	**Kegiatan** Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	Prosentasi jumlah penduduk dikawasan rawan								

1.05.03.2.01.02	**Sub Kegiatan** Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten	bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Prosentasi jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.03.1.02	**Kegiatan** Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase rasio kecukupan sarana dan prasarana pencegahan bencana alam								
1.05.03.1.02.03	**Sub Kegiatan** - Pengendalian operasi dan penyediaan sarana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.03.1.02.04	prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana - Penyediaan peralatan perlindungan dan	- Prosentasi tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.03.1.02.06	kesiapsiagaan terhadap bencana	terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.03.1.02.07	- Penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	- Prosentasi tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.03.1.02.08	- Penangganan Pascabencana Kabupaten	- Prosentasi kapasitas Kawasan untuk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	pencegahan dan kesiapsiagaan - Prosentasi penanganan pascabencana - Prosentasi pengembangan Kapasitas TRC								
1.05.03.2.03	**Kegiatan** Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	Prosentase kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana								
	Sub Kegiatan									
1.05.03.2.03.02	- Respon cepat darurat bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.03.2.03.03	- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi korban bencana	- Prosentasi kegiatan respon cepat darurat bencana - Prosentasi pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.03.2.03.04	- Penyediaan Logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	- Prosentasi tersedianya logistic penyelamatan dan evakuasi korban	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. Analisis Kerja Pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong.

Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang ex-officio adalah Sekretaris Daerah yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Pemberian dukungan atas penyelenggara tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada table berikut.

TABEL 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Tabalong

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase (%) penyelesaian penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%		100%	100%	100%	100%	-	-	100%		
2.	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Persentase (%) penyelesaian penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%		100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	
4.	Persentase (%) penyelesaian penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi (Rekon)	100%		100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	

	sampai dengan dinyatakan sah/legal											
5.	Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan Pencegahan dan Mitigasi.	100%		100%	100%	100%	100%	-	25%	100%	100%	
6.	Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.	100%		100%	100%	100%	100%	-	0,06%	100%	100%	
7.	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9.	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana.	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	jam untuk setiap status darurat bencana.											
11.	Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana.	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12.	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana.	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Tingkat kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong

Sejak dibentuk pada tahun 2017 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong tanggal 25 Agustus 2017, dan Peraturan Bupati Tabalong tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong masih dalam proses. BPBD Kabupaten Tabalong merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BPBD Kabupaten Tabalong mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanggulangan Bencana.Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

a. Kepala;
b. Unsur Pengarah;
c. Unsur Pelaksana;
d. Sekretariat;
e. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
f. Kasi Kedaruratan dan Logistik;
g. Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
h. UPT Pemadam Kebakaran; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabalong tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong yang telah diubah dengan Peraturan daerah

Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, antara lain:

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.
f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong berdasarkan Perda Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 adalah :

a. Perumusan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu

oleh Unsur Pengarah yang mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.
b. Pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong dipimpin Kepala Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian;
b. Pengomandoan; dan
c. Pelaksana.

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

a. Kepala Pelaksana;

b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
c. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
d. Kasi Kedaruratan dan Logistik;
e. Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

a. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana.
b. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana.
c. Penetapan rumusan kebijakan pengomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
d. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
e. Penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana.
f. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
g. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang penanggulangan bencana.

Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretariat Unsur Pelaksana, yaitu :

a. Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris.
b. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum,

kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.

c. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
   1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
   2) Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.
   3) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan.
   4) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
   5) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Badan.
   6) Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan.
   7) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan.
   8) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan.
   9) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
   10) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
   11) Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
   12) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi tersebut di atas, uraian tugas Kepala Pelaksana, Sekretariat, Kepala Seksi, UPT Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

a. Kepala Pelaksana, mempunyai tugas :

1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana.
2) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pengomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan mengatur proses penanggulangan bencana.
6) Merumuskan dan menetapkan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana.
7) Mengkoordinasikan, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan.
8) Melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana.
9) Menyampaikan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
10) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
11) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
12) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanggulangan bencana daerah.
13) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.

14) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah, Swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan.
15) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.
16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

b. Sekretaris, mempunyai tugas :

1) Menetapkan penyusunanrencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
2) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pada sub bagian program, sub bagian keuangan serta sub bagian umum dan kepegawaian.
3) Menyusun rencana program pada sub bagian program, sub bagian keuangan serta sub bagian umum dan kepegawaian.
4) Menetapkan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Kepala Seksi secara terpadu.
5) Menetapkan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Badan.
6) Menetapkan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan.
7) Menetapkan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
8) Menetapkan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan.
9) Menetapkan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan.
10) Menetapkan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan.

11) Melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
13) Melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
14) Menyusun Rencana Kerja Anggaran BPBD.
15) Menyusun laporan kinerja BPBD.
16) Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan laporan kinerja Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
17) Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan laporan Realisasi Anggaran Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
18) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam penanggulangan bencana.
19) Mengkoordinasikan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas.
20) Menyusun laporan realisasi anggaran Sekretariat.
21) Menyusun laporan kinerja program Sekretariat.
22) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai tugas

1) Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

3) Melaksanakan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana.
4) Membuat rencana aksi daerah.
5) Melaksanakan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana.
6) Melaksanakan analisis kebutuhan potensi sumber daya bidang penanganan bencana.
7) Melaksanakan identifikasi dan pendataan kejadian bencana.
8) Menyusun peta resiko bencana.
9) Melaksanakan sosialisasi daerah rawan bencana dan teknis penanganan bencana.
10) Melaksanakan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dibidang penanganan bencana.
11) Melaksanakan peningkatan dan pengembangan sistem penanganan bencana terpadu.
12) Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber daya penanganan bencana.
13) Merumuskan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan daerah rawan bencana.
14) Melaksanakan survey dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugas pencegahan bencana.
15) Melaksanakan bimbingan, penyuluhan, mitigasi dan pemantauan.
16) Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta menghimpun potensi rakyat untuk memenuhi syarat menjadi Tim Penolong dalam penanganan bencana (Rescue).
17) Melaksakana penyajian data dan informasi dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
18) Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

19) Melaksanakan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
20) Melaksanakan penyajian tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, mempunyai tugas :

1) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kedaruratan dan logistik.
2) Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran dibidang kedaruratan dan logistik.
3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang kedaruratan dan logistik.
4) Mengkoordinasikan pembentukan tim kaji cepat.
5) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana.
6) Melaksanakan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana.
7) Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pengerahan sumber daya penanganan bencana.
8) Melaksanakan penyajian data dan informasi dibidang kedaruratan dan logistik.
9) Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang kedaruratan dan logistik.
10) Melaksanakan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kedaruratan dan logistik.
11) Melaksanakan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Kedaruratan dan Logistik.
12) Melaksanakan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Kedaruratan dan Logistik.
13) Melaksanakan penyajian tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Kepala Seksi Rekonstruksi dan Rehabilitasi, mempunyai tugas

1) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi danrekonstruksi.
2) Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran dibidang rehabilitasi danrekonstruksi.
3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang rehabilitasi danrekonstruksi.
4) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana.
5) Melaksanakan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana.
6) Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pengerahan sumber daya penanganan bencana.
7) Melaksanakan penyajian data dan informasi dibidang rehabilitasi danrekonstruksi.
8) Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang rehabilitasi danrekonstruksi.
9) Melaksanakan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang rehabilitasi danrekonstruksi.
10) Melaksanakan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Rehabilitasi danRekonstruksi.
11) Melaksanakan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Rehabilitasi danRekonstruksi.
12) Melaksanakan penyajian tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong

Seperti halnya pembangunan, upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu:

a) Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana. Hal tersebut terkait dengan

keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah:

1) Belum terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat tapak.
2) Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat.

Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah:

1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara regular.
2) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat.
3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial.
4) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat.
5) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

b) Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Meliputi rendahnya tingkat kemandirian dan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain:

1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat.

2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif.
3) Belum terbentuknya kelembagaan dimasyarakat sebagai upaya penanggulangan bencana.
4) Masih kurangnya perhatian terhadap pengintegrasian pengurangan resiko bencana kedalam kebijakan dan perencanaan pembangunan di daerah.

Padahal memperhatikan besarnya potensi ancaman berbagai bencana di Kabupaten Tabalong perlu disikapi oleh pengambil kebijakan secara terintegrasi dan komprehensif.

Hambatan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi khususnya di Kabupaten Tabalong ini antara lain :

1) Lokasi bencana yang sulit dijangkau.
2) Kejadian bencana yang tidak dapat dipredikasi (*unpredictable*).
3) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap upaya penanganan bencana.
4) Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam.
5) Adanya keterbatasan sarana informasi dan komunikasi sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data dan informasi dari kecamatan ke kabupaten.
6) Luasnya wilayah Kabupaten Tabalong dengan jenis potensi bencana yang beragam.
7) Alokasi anggaran penanggulangan bencana yang belum mencukupi.
8) Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan masih berjalan secara sektoral.

9) Masih terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana.
10) Kurangnya tenaga staf yang dimiliki BPBD Kabupaten Tabalong.
11) Sarana dan prasarana yang belum memadai.

c) Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
1) Kurangnya kualitas dan tanggung jawab masyarakat terhadap perkembangan daerahnya khususnya tentang bencana alam dan kebakaran.
2) Kurangnya kesiapan anggota BPK / Satlak PB dalam menangani musibah baik bencana alam atau kebakaran.
3) Bertambahnya potensi timbulnya wabah penyakit dan banjir akibat rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembuangan sampah khususnya membuang sampah ke sungai.

d) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

TANTANGAN

1) Terjadinya perubahan Struktur Organisasi dengan perubahan Bidang yang menyebabkan perlu penyesuaian tugas dan fungsi.
2) Terjadinya persaingan antar aparatur serta ada kecendrungan mementingkan kegiatan program daripada pelaksanaan pelayanan rutin terhadap tugas dan fungsinya.
3) Terjadinya mutasi pejabat / pegawai yang berakibatkan terhambatnya pelaksanaan tugas karena yang bersangkutan harus belajar mulai awal.
4) Kurang kuatnya landasan hukum dari segala permasalahan yang dihadapi sehingga terhambatnya keputusan akan diambil dengan jalan koordinasi antar instansi.

5) Adanya tumpang tindih dalam pengambilan dan pemberian kebijakan sehingga menghambat penyelesaian permasalahan.
6) Kurangnya kesadaran masyarakat di daerah Kabupaten Tabalong terhadap aturan dan peraturan yang berlaku.
7) Penyampaian laporan kejadian bencana yang tidak akurat berdampak pada pembuatan laporan yang tidak akurat juga.

PELUANG

1) Tersedianya peraturan perundang – undangan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2) Dukungan pemerintah daerah dalam Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Bidang Pemadam Kebakaran.
3) Kemajuan teknologi informasi.

KEKUATAN

1) Dukungan dan persetujuan Bupati terhadap rencana program dan kegiatan.
2) Koordinasi yang baik antara instansi terkait di lingkungan pemerintah kabupaten.
3) Personil pegawai yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk maju dan bertanggung jawab.
4) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

KELEMAHAN

1) Belum optimalnya anggaran dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana untuk mendukung program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2) Kurangnya kualitas keterampilan pegawai, baik yang profesional secara teknik maupun operasional.
3) Teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal

D. Review Terhadap RKPD Tahun 2023

Review terhadap RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara RKPD Kabupaten Tabalong tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan BPBD Kabupaten Tabalong tahun 2023. Hasil Review dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan RKPD tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA				**5.957.385.000**					**6.785.465.049**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA				**3.011.557.517**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**				**3.011.557.517**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**8.470.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**8.470.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	8.470.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	8.470.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**1.405.000.026**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.405.000.026**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Tabalong	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bulan	1.405.000.026	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tabalong	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bulan	1.405.000.026	
	Administrasi Kepegawaian				**55.000.000**	**Administrasi Kepegawaian**				**55.000.000**	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Kab.Tabalong	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	11 Orang	55.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Kab.Tabalong	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	11 Orang	55.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**531.363.236**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**531.363.236**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Tabalong	Jumlah Paket Komponen Instalsi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	8.771.093	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Tabalong	Jumlah Paket Komponen Instalsi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	8.771.093	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tabalong	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	1 Paket	186.712.716	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tabalong	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	1 Paket	186.712.716	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Tabalong	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang disediakan	1 Paket	18.535.567	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Tabalong	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang disediakan	1 Paket	18.535.567	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Tabalong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan Yang Disediakan	4 Dokumen	4.177.860	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Tabalong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan Yang Disediakan	4 Dokumen	4.177.860	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tabalong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	313.166.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tabalong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	313.166.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**398.596.380**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**398.596.380**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Tabalong	Jumlah Laporan Penyediaan Surat menyurat	12 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Tabalong	Jumlah Laporan Penyediaan Surat menyurat	12 Laporan	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Tabalong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	62.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Tabalong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	62.400.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tabalong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	335.196.380	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tabalong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	335.196.380	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**613.127.875**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**613.127.875**	

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berikut beberapa penelaahan usulan program dan Kegiatan dari masyarakat melalui musrenbang.

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Melalui Musrenbang

No	Usulan Permasalahan	Program	Lokasi
1	Minimnya Peralatan-peralatan Pemadam Kebakaran. Diperlukan Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran (Mesin dan Peralatan-peralatan Pemadam Kebakaran Lainnya).	Peningkatan Fasilitas Pencegahan Bencana Alam dalam Daerah	Desa Hapalah Kecamatan Banua Lawas
2	Permohonan alat atau mesin portabel 1 buah, selang 2 rol, dan wisel untuk UPBS PUSAKA	Pelayanan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana	UPBS PUSAKA Kecamatan Banua Lawas
3	Tidak tersedianya Mobil Pemadam Volume 1 Unit, Pompa Air 1 Unit, dam Selang 200M	Pelayanan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana	Desa Habau Kecamatan Banua Lawas
4	Sering terjadi bencana banjir di Desa Wirang dan Sekitarnya	Pelayanan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana	Desa Wirang Kecamatan Haruai
5	Pemasangan jalur evakuasi untuk titik kumpul dari bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Desa Halong Kecamatan Haruai
6	Belum mempunyai alat kesiapsiagaan bencana banjir seperti perahu karet, plampong karet, agar kiranya dibantu alat tersebut	Pelayanan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana	Desa Sungai Buluh Kecamatan Kelua
7	Pengadaan Perahu Karet untuk di Kelurahan Pulau, Penanganan kesiagaan Evakuasi warga masyarakat yang rumahnya terdampak banjir	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kelurahan Pulau Kecamatan Kelua

8	Belum lengkapnya peralatan untuk Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Desa Masitan Kecamatan Kelua
9	Perahu Karet, Mesin Pemotong Kayu, Pelampung.	Pelayanan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana	Desa Pudak Setegal Kecamatan Kelua
10	kurangnya pengetahuan dan sarana prasaran pendukung tentang kesiapsiagaan bencana, untu itu perlu pasilitas pendukungnya	Pelayanan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana	Desa Sungai Buluh Kecamatan Kelua
11	Kurangnya biaya untuk pemeliharaan mobil pemadam dan ambulance (Biaya untuk pemeliharaan mobil pemadam dan ambulance)	Peningkatan Fasilitas Pencegahan Bencana Alam dalam Daerah	Desa Paliat Kecamatan Kelua
12	Lampu besar masih kurang (Emergency) Lampu besar dan terang beserta kabel panjang	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Desa Paliat Kecamatan Kelua
13	sarana pendukung tidak ada perlu perahu dan mesin untuk mengatasi musibah banjir	Peningkatan Fasilitas Pencegahan Bencana Alam dalam Daerah	Desa Sungai Rukam Kecamata Pugaan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Apabila kita melihat kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, maka boleh dikatakan secara umumsasaran yang hendak dicapai sudah diakomodir dalam Renja BPBD Kabupaten Tabalong, namun yang menjadi penghambat kegiatan ini terlaksana dengan baik di Kabupaten Tabalong adalah :

1. Masih rendahnya sumber daya manusia baik kwalitas maupun kwantitas.
2. Masih sedikitnya dukungan dana untuk kegiatan tersebut.
3. Sarana dan prasarana yang jauh dari ketersedian.

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa maksud dan tujuan organisasi.

Melalui perumusan Misi Kabupaten Tabalong akan memberikan arahjangka panjang dan terciptanya stabilitas dalam manejemen dankepemimpinan Kabupaten Tabalong, meletakkan acuan dan pedomandasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijakan-kebijakandalam pelaksanaan pemerintahan serta memberikan kenyamanan danketentraman kepada masyarakat Kabupaten Tabalong terutama yangberada pada daerah yang rawan bencana, sehingga masyarakat dalamkehidupan sehari-hari akan selalu merasa tenang dalam beraktivitas danbekerja. Berikut dapat dilihat tujuan dan sasaran Rencana Kinerja BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong yaitu

TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Tujuan		Sasaran		Indikator	Target
1.	Meningkatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1.	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal.	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100%
		2.	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana.	Persentase (%) jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%
2.	Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi.	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100%
		2.	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100%
		3.	Terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	100%
		4.	Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	100%
		5.	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan	Jumlah Warga Negara yang mendapat	100%

			bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	
		6.	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%
3.	Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)	100%
		2.	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	100%
		3.	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%
		4.	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%
4.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.	Terlaksanannya penanganan pasca bencana kabupaten	Prosentase penanganan pasca bencana kabupaten	100%

C. Program dan Kegiatan

Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 terdiri dari 2 (dua) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dengan jumlah pagu dana sebesar Rp. 5.957.385.000,- (lima milyar sembilan ratus lima puuh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahun kelima dari Rencana Strategis SKPD Tahun 2020-2024.

Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (1.05.01), dengan kegiatan sebagai berikut :**
   a. 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. 1.05.01.2.05 Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   d. 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
   e. 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   f. 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (1.05.03), dengan kegiatan sebagai berikut :**
   a. 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten
   b. 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
   c. 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
   d. 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN TABALONG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%		Pendapatan Daerah		100%	
1.05.01.2.01	**Kegiatan** Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**8.470.000**				
1.05.01.2.01.01	**Sub Kegiatan** Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD	Prosentasi Dokumen tersusun	9 Dok		Pendapatan Daerah		9 Dok	
1.05.01.2.02	**Kegiatan** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**1.456.012.026**				
1.05.01.2.02.01	**Sub Kegiatan** Penyediaan Gaji dan Tunjangan	SKPD	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	17 org		Pendapatan Daerah		17 org	
1.05.01.2.05	**Kegiatan** Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**55.000.000**				

1.05.01.2.05.02	**Sub Kegiatan** Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	SKPD	Presentasi pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti diklat	100%		Pendapatan Daerah		100%	
1.05.01.2.06	**Kegiatan** Administrasi Umum Perangkat Daerah	SKPD	Prosentasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	**531.363.236**	Pendapatan Daerah		100%	
	Sub Kegiatan								
1.05.01.2.06.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	- Prosentasi tersedianya komponen Instalasi Listrik	100%		Pendapatan Daerah		100%	
1.05.01.2.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	- Prosentasi tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%		Pendapatan Daerah		100%	
1.05.01.2.06.05	- Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	SKPD	- Prosentasi tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%		Pendapatan Daerah		100%	
1.05.01.2.06.06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	- Prosentasi tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	100%		Pendapatan Daerah		100%	
1.05.01.2.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	- Prosentasi Koordinasi dan Konsultasi	100%		Pendapatan Daerah		100%	
1.05.01.2.08	**Kegiatan** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Prosentasi penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**398.596.380**	Pendapatan Daerah		100%	

1.05.01.2.08.01	**Sub Kegiatan** - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	- Prosentasi Surat Menyurat	100%		Pendapatan Daerah		100%	
1.05.01.2.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	- Prosentasi Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%		Pendapatan Daerah		100%	
1.05.01.2.08.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD	- Prosentasi tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%		Pendapatan Daerah		100%	
1.05.01.2.09	**Kegiatan** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Prosentase pelayanan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**613.127.875**	Pendapatan Daerah		100%	
1.05.01.2.09.01	**Sub Kegiatan** - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		- Prosentasi jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100%		Pendapatan Daerah		100%	
1.05.01.2.09.07	- Pemeliharaan Aset tetap		- Prosentasi terpeliharanya asset tetap	100%		Pendapatan Daerah		100%	
1.05.01.2.09.00	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor bangunan lainnya		- Prosentasi terpeliharanya Gedung kantor bangunan lainnya	100%		Pendapatan Daerah		100%	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Rata-rata waktu tanggap darurat bencana	15 menit		Pendapatan Daerah		15 menit	

1.05.03.2.01	**Kegiatan** Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	SKPD	Prosentasi jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	**319.978.246**	Pendapatan Daerah		100%	
	Sub Kegiatan								
1.05.03.2.01.02	- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten		Prosentasi jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%		Pendapatan Daerah		100%	
	- Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana		Prosentasi tersusunnya dolumen KRB sehingga sah	100%		Pendapatan Daerah		100%	
1.05.03.1.02	**Kegiatan** Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	SKPD	Prosentase rasio kecukupan sarana dan prasarana pencegahan bencana alam	100%	**2.630.801.700**	Pendapatan Daerah		100%	
	Sub Kegiatan								
1.05.03.1.02.03	- Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	SKPD	- Prosentasi tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	100%		Pendapatan Daerah		100%	
1.05.03.1.02.04	- Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	SKPD	- Prosentasi tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%		Pendapatan Daerah		100%	
1.05.03.1.02.06	- Penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	SKPD	- Prosentasi kapasitas Kawasan	100%		Pendapatan Daerah		100%	

1.05.03.1.02.08	- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana - Gladi kesiapsigaan Terhadap Bencana	SKPD SKPD	untuk pencegahan dan kesiapsiagaan - Prosentasi pengembangan Kapasitas TRC - Prosentasi gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	100% 100%		Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah		100% 100%	
1.05.03.2.03 1.05.03.2.03.02 1.05.03.2.03.03 1.05.03.2.03.04	**Kegiatan** Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana **Sub Kegiatan** - Respon cepat darurat bencana - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi korban bencana - Penyediaan Logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	SKPD SKPD SKPD	Prosentase kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana - Prosentasi kegiatan respon cepat darurat bencana - Prosentasi pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana - Prosentasi tersedianya logistic penyelamatan dan evakuasi korban	100% 100% 100%	**650.691.207**	Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah		100% 100% 100%	
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana **Sub Kegiatan** - Penangganan Pascabencana Kabupaten		Prosentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Prosentasi penanganan	 100%	**172.436.379**	 Pendapatan Daerah		 100%	

			Pascabencana kabupaten						
		TOTAL				**6.785.465.049**			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

(Lihat Lampiran)

BAB V
PENUTUP

Rencana Kinerja BPBD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tabalong dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2020-2024 sesuai dengan Visi, misi serta tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Tabalong.

Rencana Kinerja ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit di lingkungan BPBD Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang evaluasi pelaksanaan rencana kinerja tahun lalu dan capaian rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, analisis kinerja pelayanan dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD serta tujuan dan sasaran rencana kinerja serta Program Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong untuk tahun 2024.

Rencana kinerja BPBD ini akan dituangkan kedalam Program dan Kegiatan setiap tahunnya. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya BPBD Kabupaten Tabalong sebagaimana tertuang dalam Renja ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari SKPD/Instansi/Lembaga terkait serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kinerja BPBD ini serta hambatan yang ditemukan, akan tergambar nantinya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang akan disusun setiap tahunnya.

Tabel 4.1

Rumus Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024

Kode.					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2024				Catatan	Perkiraaan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIB/**				**6.785.465.049**				
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**				**3.011.557.517**				
1	**05**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**8.470.000**				
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Tabalong	9 Dokumen	8.470.000				
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.405.000.026**				
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Kab.Tabalong	17 Orang/Bulan	140.500.026				
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian**				**55.000.000**				
1	05	01	2.05	02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Kab.Tabalong	11 Orang	55.000.000				
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**531.363.236**				
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalsi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Yang Disediakan	Kab.Tabalong	1 Paket	8.771.093				
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	Kab.Tabalong	1 Paket	186.712.716				

1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang disediakan	Kab.Tabalong	1 Paket	18.535.567				
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan Yang Disediakan	Kab.Tabalong	4 Dokumen	4.177.860				
1	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kab.Tabalong	50 Laporan	313.166.000				
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**398.596.380**				
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat menyurat	Kab.Tabalong	12 Laporan	1.000.000				
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Kab.Tabalong	12 Laporan	62.400.000				
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tabalong	12 Laporan	335.196.380				
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**613.127.875**				
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	Kab.Tabalong	23 Unit	349.426.325				

1	05	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Dipelihara	Kab.Tabalong	41 Unit	13.253.668				
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang	Kab.Tabalong	1 Unit	250.447.882				
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**				**3.773.907.532**				
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**				**319.978.246**				
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota Secara Tatap Muka Kepada Penduduk Yang Tinggal Di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Yang Ada Di Kawasan Tempat Tinggalnya	Kab.Tabalong	150 Orang	319.978.246				
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**				**2.630.801.700**				
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota	Kab.Tabalong	12 Dokumen	1.563.000.000				

1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri Bagi Individu, Warga Negara, Keluarga Maupun Petugas	Kab.Tabalong		802.765.025				
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan Yang di Tingkatkan Kapsitasnya Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab.Tabalong	12 Kawasan	130.500.000				
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kaupaten/Kota	Jujmlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis	Kab.Tabalong	50 Orang	70.499.375				
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur Dan Warga Negara Yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kab.Tabalong	500 Orang	64.037.300				
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**				**650.691.207**				
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan	Kab.Tabalong	2 Dokumen	514.619.600				
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Yang Berhasil Ditemukan Ditolong Dan Dievakuasi Per	Kab.Tabalong	20 Orang	60.000.000				
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamtan Dan	Kab.Tabalong	200 Orang	76.071.607				

1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**				**172.436.379**				
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Kab.Tabalong	12 Dokumen	172.436.379				

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

bangga melayani bangsa

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
DAFTAR TABEL 2
DAFTAR GAMBAR ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB I 3
PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Landasan Hukum4
1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan 7
1.4 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8
BAB II 9
EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TABALONG TRIWULAN II 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Hingga Triwulan II 9
BAB III 17
RENCANA KERA DAN PENDANAAN 17
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 17
KABUPATEN TABALONG 17
BAB V 24
PENUTUP 24

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2024 9

Table 2.2 Rekapitulafi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 (Triwulan II) 11

Tabel 3.1 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Tabalong 19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2024 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan estimasi dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyusun Renja Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019-2024 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban, serta penegakan kebijakan dan peraturan

daerah terjamin dan jelas aturan lainnya, karena adanya payung hukum yang mendasarinya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo7r 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Permendari Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan PRPJD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2005 – 2025 ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 – 2034.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Paraja Kabupaten Tabalong.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor ..... Tahun 2021
27. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong.
28. Peraturan Bupati Tabalong Nomor .... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024
29. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong;
2. Keadaan yang mengakibatkan penambahan atau pengurangan kegiatan target kinerja dan pagu kegiatan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud pembuatan Perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk penyempurnaan Rencana Kerja untuk menyesuaikan perubahan target terhadap program dan kegiatan dan menyesuaikan perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan perubahan tahun 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong;
2. Sebagai acauan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD Hingga Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TABALONG TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Hingga Triwulan II

Berdasarkan hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong tahun 2024, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Table 2.1 Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No	Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegaiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kinerja		Realisasi		%
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**BB**	**-**	**11.184.597.822**	**4.166.406.069**	
	1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**50%**	**75.478.460**	**21.628.900**	
	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	7 Laporan	75.478.460	21.628.900	
	1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**48%**	**7.865.302.000**	**3.476.565.657**	
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	38 Orang	7.865.302.000	3.476.565.657	
	1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**35%**	**136.041.000**	**32.260.600**	
	1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	8.050.000	0	
	1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	5 Orang	127.991.000	32.260.600	
	1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**39%**	**1.009.428.794**	**351.440.984**	
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	4 Paket	252.455.182	37.776.500	
	1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	78.139.263	26.656.000	
	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	53.120.349	13.500.000	
	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000	2.000.000	
	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	15 Laporan	618.314.000	271.508.484	
	1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**43%**	**854.679.800**	**83.658.728**	
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air, Listrik dan Internet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	6 Laporan	89.400.000	37.568.728	
	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	121 Laporan	51 Laporan	765.279.800	46.090.000	
	1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**100%**	**20%**	**1.243.667.768**	**200.851.200**	
	1.05.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	0 Unit	467.740.000	187.365.200	

	1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	8 Unit	28.470.000	5.035.000	
	1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	747.457.768	8.451.000	
	1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentasi Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota**	**100%**	**53%**	**5.134.012.339**	**541.584.222**	
			Persentasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan bupati / WaliKota	**100%**	**45%**			
	1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penangganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa**	**100%**	**53%**	**4.540.433.423**	**382.492.458**	
	1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	51 Kasus	35 Kasus	1.841.344.000	155.105.740	
	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	2 Dokumen	2.305.040.875	48.197.462	
	1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	50 Orang	178.779.948	61.023.823	
	1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahaan Kejahatan	160 Dokumen	33 Dokumen	215.268.600	118.165.433	
	1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**100%**	**45%**	**1.841.344.000**	**159.091.764**	
	1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/wali kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	28 Laporan	10 Laporan	167.942.738	18.218.600	
	1.05.02.2.01.02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	20 Laporan	18 Laporan	220.099.800	74.252.000	
	1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	50 Laporan	12 Laporan	205.536.378	66.621.164	
	1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Cakupan Pencegahan Penanggulan gan Kebakaran**	**100%**	**60%**	**3.918.913.714**	**402.087.594**	
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran	**6 Unit**	**1 Unit**			
	1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**13%**	**3.918.913.714**	**402.087.594**	
	1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten,Kota Setiap Tahunnya	40 Dokumen	24 Dokumen	889.768.320	392.583.089	
	1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	6 Unit	1 Unit	3.029.145.394	9.504.505	

Table 2.2 Rekapitulafi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 (Triwulan II)

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Semua Bidang																							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Nilai)	4,00	-	4,00	-	4	10.214.182.178		1.051.660.864		3.215.545.205		-		-	4	4.267.206.069	100,00%	41,78%	4,00	4.267.206.069		0,00%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)		-	0,00	-	100	37.836.089	-	-	-	21.628.900		-		-	-	21.628.900	0,00%	57,16%	0,00	21.628.900	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		-	0,00	-	11	37.836.089	5	-	2	21.628.900					7	21.628.900	63,64%	57,16%	7,00	21.628.900	0,00%	0,00%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (persen)		-	0,00	-	100	7.454.244.000	-	857.026.285	-	2.619.539.372		-		-	-	3.476.565.657	0,00%	46,64%	0,00	3.476.565.657	0,00%	0,00%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	40	7.454.244.000	38	857.026.285	38	2.619.539.372					38	3.476.565.657	95,00%	46,64%	38,00	3.476.565.657	0,00%	0,00%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (persen)		-	0,00	-	100	113.965.000	-	12.544.600	-	19.716.000		-		-	-	32.260.600	0,00%	28,31%	0,00	32.260.600	0,00%	0,00%

		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		-	0,00	-	1	1.550.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		-	0,00	-	8	112.415.000	3	12.544.600	2	19.716.000					5	32.260.600	62,50%	28,70%	5,00	32.260.600	0,00%	0,00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (persen)		-	0,00	-	100	1.023.099.194	-	65.423.587	-	286.017.397		-		-	-	351.440.984	0,00%	34,35%	0,00	351.440.984	0,00%	0,00%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	17	218.490.634	-	-	10	37.776.500					10	37.776.500	58,82%	17,29%	10,00	37.776.500	0,00%	0,00%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	3	78.139.263	1	-	-	26.656.000					1	26.656.000	33,33%	34,11%	1,00	26.656.000	0,00%	0,00%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	4	97.692.297	1	-	-	13.500.000					1	13.500.000	25,00%	13,82%	1,00	13.500.000	0,00%	0,00%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		-	0,00	-	2	7.400.000	-	-	-	2.000.000					-	2.000.000	0,00%	27,03%	0,00	2.000.000	0,00%	0,00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	23	621.377.000	9	65.423.587	-	206.084.897					9	271.508.484	39,13%	43,69%	9,00	271.508.484	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)		-	0,00	-	100	816.099.800	-	52.484.392	-	131.974.336		-		-	-	184.458.728	0,00%	22,60%	0,00	184.458.728	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	15	89.400.000	3	18.884.392	3	18.684.336					6	37.568.728	40,00%	42,02%	6,00	37.568.728	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	121	726.699.800	21	33.600.000	30	113.290.000					51	146.890.000	42,15%	20,21%	51,00	146.890.000	0,00%	0,00%

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)		-	0,00	-	100	768.938.095	-	64.182.000	-	136.669.200		-		-	-	200.851.200	0,00%	26,12%	0,00	200.851.200	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	22	467.740.000	22	64.182.000	22	123.183.200					11	187.365.200	50,00%	40,06%	11,00	187.365.200	0,00%	0,00%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	36	28.470.000	6	-	2	5.035.000					8	5.035.000	22,22%	17,69%	8,00	5.035.000	0,00%	0,00%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	2	272.728.095	-	-	-	8.451.000					-	8.451.000	0,00%	3,10%	0,00	8.451.000	0,00%	0,00%
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		80,09%	41,78%				
																		Predikat Kinerja		Tinggi	Sangat Rendah				
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																							
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Wali Kota (Persentase)	100,00		0,00		100										-		0,00%		100,00			
			Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman danKetertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan) (Persentase)	100,00	-	0,00	-	100	5.033.490.833		988.648.430		905.395.792		-		-	-	1.894.044.222	0,00%	37,63%	100,00	1.894.044.222		0,00%
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian K3 ((Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan) (Persen)		-	0,00	-	100	4.440.680.973	-	988.648.430	-	746.304.028		-		-	-	1.734.952.458	0,00%	39,07%	0,00	1.734.952.458	0,00%	0,00%
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)		-	0,00	-	5	2.305.040.875	1	750.688.430	1	83.917.310					2	834.605.740	40,00%	36,21%	2,00	834.605.740	0,00%	0,00%

		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	*Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)		-	0,00	-	60	168.876.298	-	-	50	48.197.462					50	48.197.462	83,33 %	28,54 %	50,00	48.197.462	0,00%	0,00%
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)		-	0,00	-	160	228.383.800	20	12.960.000	13	48.063.823					33	61.023.823	20,63 %	26,72 %	33,00	61.023.823	0,00%	0,00%
		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)		-	0,00	-	51	1.738.380.000	12	225.000.000	23	566.125.433					35	791.125.433	68,63 %	45,51 %	35,00	791.125.433	0,00%	0,00%
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda (persen)		-	0,00	-	100	592.809.860	-	-	-	159.091.764		-		-	-	159.091.764	0,00%	26,84 %	0,00	159.091.764	0,00%	0,00%
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)		-	0,00	-	20	165.280.956	-	-	-	18.218.600					-	18.218.600	0,00%	11,02 %	0,00	18.218.600	0,00%	0,00%
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)		-	0,00	-	50	220.296.948	-	-	-	74.252.000					-	74.252.000	0,00%	33,71 %	0,00	74.252.000	0,00%	0,00%
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)		-	0,00	-	20	207.231.956	-	-	-	66.621.164					-	66.621.164	0,00%	32,15 %	0,00	66.621.164	0,00%	0,00%
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									45,75 %	37,63 %				

																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan penangulangan kebakaran (%)	100,00	-	0,00	-	100	3.909.163.714		140.280.394		261.807.200		-		-	-	402.087.594	0,00%	10,29 %	100,00	402.087.594		0,00%
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran (nilai)	5,00		0,00		5									-	0,00%		5,00			
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (persen)		-	0,00	-	100	3.909.163.714	-	140.280.394	-	261.807.200		-		-	-	402.087.594	0,00%	10,29 %	0,00	402.087.594	0,00%	0,00%
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)		-	0,00	-	40	880.018.320	10	130.775.889	14	261.807.200					24	392.583.089	60,00 %	44,61 %	24,00	392.583.089	0,00%	0,00%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	*Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)		-	0,00	-	6	3.029.145.394	1	9.504.505	-	-					1	9.504.505	16,67 %	0,31%	1,00	9.504.505	0,00%	0,00%
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		26,42 %	10,29 %				
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
								19.156.836.725		**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**											**60,11 %**	**34,26 %**				
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												**Rendah**	**Sangat Rendah**				

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**):

BAB III

RENCANA KERA DAN PENDANAAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN TABALONG

Dalam Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2024, ada beberapa kegiatan dan ada juga yang mengalami perubahan dari segi target dan anggaran, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikator program ini adalah : Nilai AKIP dengan target “BB”
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari pagu awal Rp 37.836.089,- pagu perubahan Rp 75.478.460,-
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari pagu 7.454.244.000,- pagu perubahan Rp 7.865.302.000,-
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dari pagu awal Rp 113.965.000,- pagu perubahan Rp 136.041.000,-
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah pagu awal Rp 1.023.099.194,- pagu perubahan Rp 1.009.428.794,-
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pagu awal Rp 816.099.800,- pagu perubahan Rp 854.679.800,-
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pagu awal Rp 768.938.095,- pagu perubahan Rp 1.243.667.768
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, indikator program ini adalah : Persentase Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan) dengan target 100% sedangkan kegiatannya meliputi :
   a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pagu awal Rp 4.440.680.973,- pagu perubahan Rp 4.540.433.423,-

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota pagu awal Rp 592.809.860,- pagu perubahan Rp 593.578.916,-

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, indikator program ini adalah : Persentase Cakupan Pencegahan Dini dengan target 100% sedangkan kegiatannya meliputi :
   a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota pagu awal Rp 3.909.163.714,- pagu perubahan RP 3.918.913.714

Tabel 3.1 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Tabalong

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**TABALONG**	**Nilai AKIP**	**BB**	**6.509.898.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TABALONG**	**Nilai AKIP**	**BB**	**6.939.080.651**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**TABALONG**	**Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11 Laporan**	**33.000.500**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**TABALONG**	**Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11 Laporan**	**37.836.089**	
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TABALONG	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	33.000.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TABALONG	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	37.836.089	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**TABALONG**	**Persentase Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN**	**40 Orang/ Bulan**	**4.758.178.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**TABALONG**	**Persentase Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN**	**40 Orang/ Bulan**	**6.804.186.035**	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TABALONG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	4.758.178.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TABALONG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	6.804.186.035	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**TABALONG**	**Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**2 Paket**	**35.072.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**TABALONG**	**Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**2 Paket**	**113.965.000**	
3.1	Pengadaaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	TABALONG	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.860.000	Pengadaaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	TABALONG	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Orang	1.550.000	

3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	TABALONG	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	33.212.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	TABALONG	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	112.415.000	Diklat Luar Provinsi
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**TABALONG**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5 Paket**	**484.155.468**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**TABALONG**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5 Paket**	**832.251.487**	
4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TABALONG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	178.305.646	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TABALONG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	244.306.8760	penambahan untuk instalasi listrik kantor dan peralatan dan perlengkapan pendukung administrasi kantor
4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	TABALONG	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	26.908.779	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	TABALONG	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	28.941.074	
4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	TABALONG	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	37.934.315	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	TABALONG	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	63.030.537	
4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	TABALONG	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.090.928	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	TABALONG	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.900.000	
4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TABALONG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	235.915.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TABALONG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**23 Laporan**	491.073.000	Perjalanan dinas HUT Satpol PP Provinsi dan Nasional, Perjalanan Dinas HUT Damkar Provinsi dan Nasional
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**TABALONG**	**Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**136 Laporan**	**628.150.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**TABALONG**	**Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**136 Laporan**	**796.625.000**	
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TABALONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	106.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TABALONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	89.400.000	
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TABALONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	121 Laporan	521.350.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TABALONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	121 Laporan	707.225.000	
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**TABALONG**	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60 Unit**	**571.342.032**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**TABALONG**	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60 Unit**	**768.938.095**	

6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TABALONG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	357.488.316	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TABALONG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	467.740.000	Penambahan biaya pemeliharaan STNK R4 sebanyak menjadi 7 unit dan BBM kendaraan operasional
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TABALONG	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	16.755.348	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TABALONG	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	28.470.000	
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	TABALONG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	197.098.368	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	TABALONG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	272.728.095	Rehab Lobby kantor dan parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 dan 6
II	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**TABALONG**	**Persentasi Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Persentasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Ko ta dan Peraturan bupati / Wal iKota**	**100%**	**2.468.897.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**TABALONG**	**Persentasi Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Persentasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Ko ta dan Peraturan bupati / Wal iKota**	**100%**	**5.229.097.200**	
1	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**TABALONG**	**Persentase Penyelesaian K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan)**	**4 Paket**	**1.996.150.000**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**TABALONG**	**Persentase Penyelesaian K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan)**	**4 Paket**	**4.631.961.134**	
1.1	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	TABALONG	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	51 Kasus	1.615.500.000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	TABALONG	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	51 Kasus	1.736.815.794	1. Penambahan Jumlah Kali Kegiatan 2. Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan 3. SPPD Keluar Daerah Dalam Provinsi Ke Banjarbaru (Untuk Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Satpol PP Provinsi)
1.2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	TABALONG	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	127.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	TABALONG	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	2.568.662.340	1. Untuk PAM Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif 2. Untuk Pemilihan Umun Bupati dan Wakil Bupati 3. Untuk PAM Gabungan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati 4. PAM Apel Gelar Pasukan :
1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam	TABALONG	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang	60 Orang	125.650.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	TABALONG	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang	60 Orang	138.885.000	Untuk memenuhi Kebutuhan SDM PPNS di Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tabalong

	Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Ditingkatkan Kapasitasnya			termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Ditingkatkan Kapasitasnya			
1.4	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	TABALONG	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	160 Dokumen	128.000.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	TABALONG	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	160 Dokumen	187.598.000	Melakukan Penambahan Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Provinsi) Dikarenakan Banyak Melakukan Kegiatan Pengawalan dan Pengamanan Bupati Tabalong, Wakil Bupati Tabalong dan Pejabat Pemerintah Keluar Daerah untuk Menghadiri atau Mengikuti Agenda Tahunan dan Acara Tahunan Ke Kabupaten Lain serta Melakukan Penambahan Uang Petugas Pengawalan Jemaah Haji.
2	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**TABALONG**	**Persentase penegakan Perda**	**90 Laporan**	**472.747.000**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**TABALONG**	**Persentase penegakan Perda**	**90 Laporan**	**597.162.509**	
2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	TABALONG	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20 Laporan	66.911.893	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	TABALONG	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20 Laporan	166.040.002	1. Penambahan Harga Satuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, 2. Penambahan Belanja Bahan Cetak (Jumlah Kali Kegiatan Sosialisasi Bertambah), 3. Penambahan Belanja Makan dan Minum Rapat (Jumlah Orang dan Jumlah Kali Kegiatan Sosialisasi Bertambah), 4. Penambahan Honorarium Narasumber/Pembahas (Jumlah Kali Kegiatan Sosialisasi Bertambah), 5. Penambahan Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Perda/Perkada (Tambah 1 Kali Tayang), 6. Penambahan Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penambahan Jumlah Personil dan Tujuan Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Murung Pudak, Tanta, Muara Harus, Bintang Ara, Haruai, Pugaan, Upau, dan Muara Uya)

2.2	Pengawasan Aatas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	TABALONG	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20 Laporan	183.170.984	Pengawasan Aatas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	TABALONG	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20 Laporan	208.458.384	Penambahan Anggaran untuk Perjalanan Dinas Ke Balikpapan dan Tamiang Layang dalam rangka Koordinasi dan Kerjasama dalam Pelaksanaan Perda / Perkada Lintas Provinsi
2.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	TABALONG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	50 Laporan	222.664.123	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	TABALONG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	50 Laporan	222.637.680	
III	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**TABALONG**	**Cakupan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan kebakaran**		**922.838.000**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**TABALONG**	**Cakupan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan kebakaran**		**3.908.155.054**	
1	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**TABALONG**	**Persentase Pencegahan. Pengendalian. Pemadaman. Penyelamatan. dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**2 Paket**	**922.838.000**	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**TABALONG**	**Persentase Pencegahan. Pengendalian. Pemadaman. Penyelamatan. dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**2 Paket**	**3.908.155.054**	
1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	TABALONG	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten,Kota Setiap Tahunnya	40 Dokumen	854.293.730	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	TABALONG	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten,Kota Setiap Tahunnya	40 Dokumen	895.079.660	Penambahan Anggaran Untuk Perjalanan Dinas Ke Jakarta, Dalam Rangka Menghadiri HUT Damkar di Jakarta dan Pendukung Kegiatan
1.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	TABALONG	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	6 Unit	68.544.270	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Ala Pelindung Diri	TABALONG	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	6 Unit	3.013.075.394	Usulan Musrenbang Kecamatan
JUMLAH					**9.901.633.000**					**15.546.372.810**	

BAB V
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Rencana Kerja (Renja) Perubahan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong. Rencana Kerja (Renja) Perubahan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Selain itu Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan.

Melalui Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Tabalong,

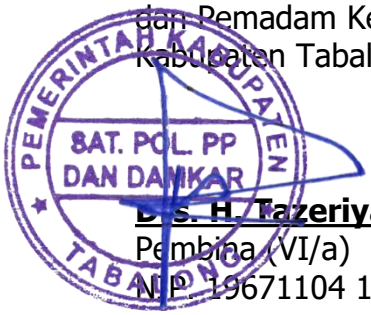

Drs. H. Tazeriyanor, MA
Pembina (VI/a)
NIP. 19671104 198903 1 011

RENCANA KINERJA PERUBAHAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2024

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya akhirnya kami dapat menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Rencana Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 ini merupakan penjelasan secara ringkas mengenai capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD, dimana penjadwalan dilakukan sesuai siklus yang telah ditetapkan didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah akan terus bekerja sesuai penjadwalan dan siklus yang telah ditetapkan.

Kami berharap Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 ini dapat memotivasi kinerja kami untuk lebih baik lagi dan bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Tabalong.

Tanjung,03 Juli 2024

Kepala Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Tabalong,

ERFIN NIRZA SIREGAR, ST
NIP. 19710928 200003 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai Dokumen Rencana Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja SKPD merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025;
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Tahun 2019 – 2024 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah :

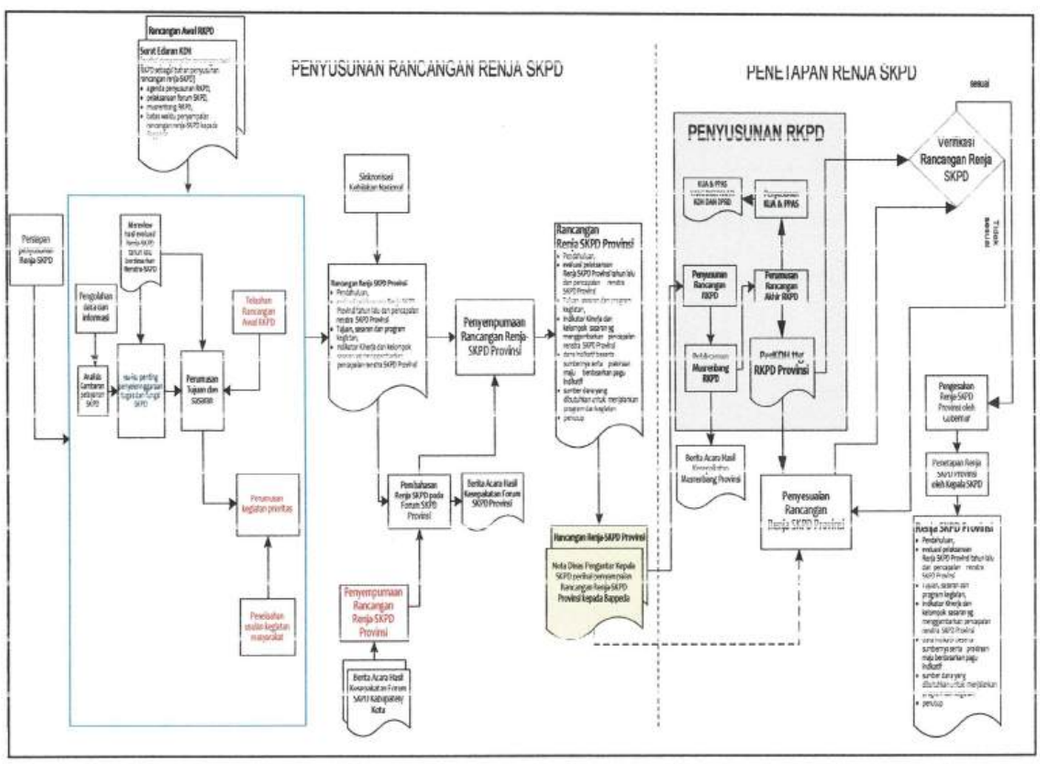

Rancangan program prioritas pada RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 menitikberatkan pada isu aktual seperti kemiskinan, stunting, pengangguran, daya saing daerah, tatakelola pemerintahan/reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang

inklusif dan berkelanjutan, pemenuhan infrastruktur dasar mendukung IKN dan tatakelola lingkungan hidup.

Sasaran pokok strategis tahun 2025, diantaranya meliputi; Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Meningkatnya kualitas Pendidikan, pelayanan Kesehatan untuk penurunan stunting dalam rangka pencapaian kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung IKN, Meningkatnya kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal dan Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong dalam menyusunan Renja SKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2019 tentang Standar Teknis;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wiayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Tabalong Tahun Anggara 2024; (Lembar Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);

31. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan SKPD Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen guna mewujudkan visi dan misi SKPD.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong adalah :

1. Melaksanakan evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
2. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif yang memuat program prioritas melalui diskusi internal dan eksternal dengan Tim Pendamping penyusunan Renja SKPD;
3. Menyediakan rancangan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan SKPD;
4. Memudahkan seluruh jajaran SKPD dalam mencapai tujuan Renja dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur;
5. Sebagai dasar dalam penyusunan RKA dan DPA Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perubahan SKPD Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang perumusan Rencana Kinerja, landasan hukum yang mendukung Rencana Kerja, maksud dan tujuan, proses penyusunan, serta sistematikan penulisan Dokumen Renja Perubahan SKPD Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kinerja Perangkat Daerah Induk Tahun 2024

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Induk SKPD Tahun 2024, analisis kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong, reviu rancangan awal RKPD 2024, serta penelaahan usulan program dan kegiatan tahun 2024.

BAB III Tujuan dan Sasaran Daerah

Bab ini menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD Tahun 2024, serta Program dan Kegiatan Tahun 2024.

BAB IV Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang Renja Perubahan SKPD dan pendanaan tahun 2024.

BAB V Penutup

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan Renja SKPD Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong tahun 2024.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD INDUK TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SK PD dan Capaian Renstra SK PD

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024. Dalam mendukung kelancaran dan keberlangsungan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 194.949.064.309 -. Berdasarkan pelaksanaan hasil evaluasi Renja SKPD Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2024, telah melaksanakan 8 (delapan) program dan 22 Sub kegiatan. Sedangkan realisasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 39.697.029.138- atau terealisasi sekitar 20,36 %.

No	Program	Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8. Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 9. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor 10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 11. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	Program Pengembangan Perumahan	1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
3.	Program Kawasan Permukiman	1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

4.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuk dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Diluar Kawasan Permukiman Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
5.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 2. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum di Perumahan Untuk menunjang Fungsi Hunian 3. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
5.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1. Inventarisasi sengketa, Konflik dan Perkara Pertanaham dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
6.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1. Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaiaan Masalah Ganti Kerugian dan santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintahab Daerah Kabupaten / Kota
7.	Program Redistribusi tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	1. Koordinasi dan Penyelengaraan Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota

Anggaran dan realisasi belanja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman pada tahun 2024 dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2024 Sebelum Perubahan		
	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	88.306.913	44.993.000	50,95%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.535.321.000	2.524.351.197	45,60%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	399.420.184	8.500.000	2,13%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.360.575	14.650.000	14,60%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.612.000	13.225.000	31,78%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	414.957.800	205.103.701	49,43%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.604.000	-	0%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.038.579.773	901.322.080	44,21%
Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	88.500.000	36.674.358	41,44%
Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	58.713.638	-	0%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	389.610.000	-	0%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.670.000	-	0%

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.195.921.223	-	0%
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	407.448.000	44.903.412	11,02%
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	2.080.450.000	1.361.400.000	65,44%
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	7.052.051.100	5.630.067.059	79,84%
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	8.822.375.000	153.600.000	1,74%
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha	8.499.120.000	2.000.000.000	23,53%
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	4.940.041.750	-	0%
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diperumahan untuk menunjang fungsi hunian	89.842.038.292	10.345.680.093	11,52%
Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, arana, dan Utilitas Umum Perumahan	34.754.518.061	13.957.369.296	40,16%
Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu)vdaerah Kabupaten/kota	70.074.000	7.815.300	11,15%
Koordinasi dan sinkronisasi Penyelesaiaan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	27.699.613.000	2.411.774.639	8,71%
Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	218.758.000	35.600.000	16,27%
TOTAL	**194.949.064.309**	**39.697.029.138**	**20,36%**

Untuk lebih jelasnya berikut adalah Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel II.2 di bawah ini :

TABEL II.2
CAPAIAN TRIWULAN II
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024

Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Uraian Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan	Satuan	Target 2024	Target Triwulan s/d saat ini	Realisasi Triwulan Saat ini	Realisasi Triwulan s/d saat ini	Capaian Realisasi Triwulan s/d saat ini	Target akhir Renstra	Capaian tahun 2024 terhadap target akhir renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatkan Ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan perumahan dan permukiman	Presentase Rumah Tidak Layak Huni	Penanganan rumah bagi korban bencana	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi	Unit	16 Unit	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang dibangun	Unit	40 Unit	-	-	26 Unit	26 Unit	40 Unit	65%
Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Meningkatkan kawasn perumahan dan permukiman sesuai standart	Presentase permukiman yang tertata	Peningkatan kualitas kawasan permukiman	Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP)	Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
					Pemeliharaan jalan lingkungan di kawasan kumuh	Km	2,147 Km	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Kerjasama dengan BKM	Dokumen	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-
				Penangangan RTLH	Jumlah RTLH diluar kawasan kumuh yang tertangani	Unit	500 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	500 Unit	20%
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Presentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Penangangan RTLH	Jumlah RTLH tertangani	Unit	207 Unit	207 Unit	207 Unit	207 Unit	207 Unit	207 Unit	100%
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	meningkatkan Kualitas dan rasio dan Sarana, Prasarana Umum	Presentase PSU Tertangani	Pemeliharaan jalan lingkungan	Jalan Lingkungan	Km	52 Km	10 KM	-	-	-	-	-
				Pemeliharaan drainase	Drainase yang terpelihara	Km	13 Km	3 Km	-	-	-	-	-
				Pemeliharaan dan pengembangan PJU	Jumlah PJU terpelihara	Titik lampu	59.465 Titik Lampu	14.717 titik lampu	13463 Titik Lampu	13463 Titik Lampu	13463 Titik Lampu	59.465 Titik Lampu	22,60%
				Dokumen Perencanaan yang tersusun	Jumlah Dokumen perencanaan	55 Dokumen	55 Dokumen	17 Dokumen	-	-	-	-	-
				Penggantian PJU Konvensional ke LED hemat energi	Jumlah penggantiaan PJU Konvensional ke LED hemat energi	Buah	6.559 Buah	1.082 Buah	370 Buah	1.849 Buah	1.849 Buah	6.559 Buah	28,10%

Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	meningkatkan kualitas perencanaan dan ketersediaan lahan milik pemerintah	Presentase Luas pengadaan tanah untuk pembangunan	Sidang; panitia peetimbangan landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah	Jumlah dokumen sidang	Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
Program Penyelesaian Sengketa tanah Garapan	Penyelesaiaan Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kab/kota			Pengaduan permasalahan Tanah	Jumlah Pengaduan Permasalahan Tanah	Pengaduan	3 Pengaduan	-	1 Pengaduan	1 Pengaduan	1 Pengaduan	1 Pengaduan	33,33%
Program Penyelesaiaan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Masalah Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Luas pengadaan tanah untuk pembangunan	Luas tanah untuk pembangunan terbeli	Ha	10,5 Ha	2,9 Ha	1,8 Ha	2,1 Ha	2,1 Ha	10,5 Ha	20,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan nomenklaturnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan yakni urusan wajib pelayanan dasar bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan wajib non pelayanan dasar bidang pertanahan. Dalam pelaksanaan kewenangannya tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong mendapatkan mandat untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan ini terkait dengan fasilitasi kebijakan perumahan terhadap bencana dan kebijakan pembangunan yang mengakibatkan relokasi.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan
1.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni b. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni c. Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani d. Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU
2.	Pertanahan	a. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya b. Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang seiesaitepat waktu

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja PD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

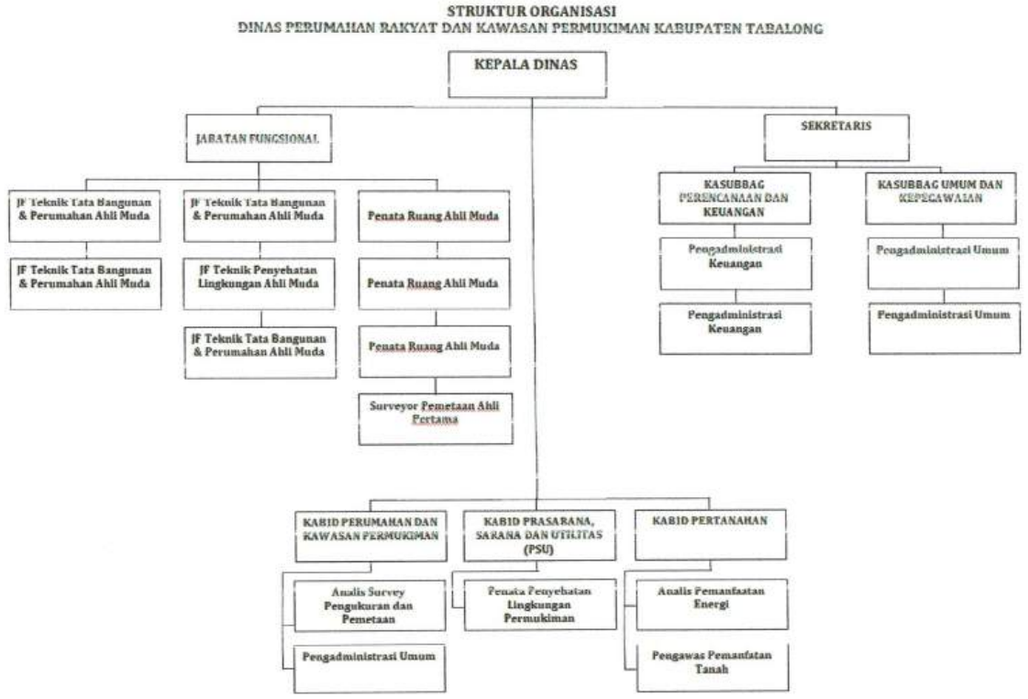

Pada bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui 3 (tiga) program, yaitu Program Perumahan, Program Kawasan Permukiman dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong menyelenggarakan penanganan rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten. Selain itu juga dilaksanakan penanganan rehabilitasi dan pembangunan baru Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan peningkatan jalan dan drainase di kawasan kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha serta penanganan rehabilitasi dan pembangunan baru Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diluar kawasan kumuh sebagai tindak pencegahan

kekumuhan. Ketiga Program ini memberikan multi efek bagi pencapaian target sektor lain diluar sektor perumahan dan Kawasan permukiman, misalnya mendukung pencapaian target kesehatan dan sanitasi lingkungan.

Pada bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), melalui 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong melaksanakan peningkatan jalan dan drainase di lingkungan perumahan dan permukiman.

Sedangkan pada bidang pertanahan, koordinasi dan sinkronisasi baik dengan instansi pusat maupun provinsi telah cukup baik, namun tentunya akan terus di tingkatkan seiring dengan kompleksnya permasalahan pertanahan di Kabupaten Tabalong.

Menilik perkembangan kondisi yang ada terhitung sejak tahun 2017 maka beberapa isu penting yang menjadi perhatian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong kedepan terkait dengan aspek kewenangan, kebutuhan organisasi dan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain adalah :

1. **Pranata pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan belum memadai.**

   Kelancaran berbagai pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman akan dipengaruhi oleh kepranataannya. Berbagai kendala di lapangan sering diakibatkan oleh belum adanya pengaturan hukum maupun teknis, minimnya norma, standar, pedoman dan kriteria/manual pelaksanaan, belum tersedia atau rendahnya kinerja kelembagaan, kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia, maupun kemampuan pembiayaan yang rendah.

   Hal lain yang tidak kalah penting dari aspek kepranataan adalah kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia serta data dan informasi yang akurat dan terkini. Berdasarkan hasil analisa lingkungan strategis dinas, salah satu kelemahan yang dirasakan adalah masih minimnya ketersediaan pegawai (SDM) dengan kualitas yang sesuai dengan tuntutan dan beban kerja di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan. Masalah ini tidak saja terjadi di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman, namun juga menjadi problematik umum yang terjadi di pemerintah kabupaten. Selain itu ketersediaan, keakuratan, konsistensi dan kemutakhiran data masih menjadi isu penting yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan permukiman dan perumahan.

Penguatan sistem pembiayaan pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan juga masih menjadi isu dan tantangan ke depan terkait dengan kurangnya sumber pembiayaan pembangunan perumahan untuk MBR dan konsep pembangunan perumahan skala besar (kawasan) dengan keterpaduan program dan sumber pendanaan, penyediaan prasarana serta sarana permukiman dan perumahan.

2. **Rendahnya Tingkat Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman**

   Kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana wilayah, khususnya kualitas jalan lingkungan, drainase, serta Penerangan Jalan Umum (PJU) di perumahan dan permukiman di Kabupaten Tabalong masih relatif rendah. Berbagai tantangan dalam pembangunan sarana dan prasarana ini telah menunggu di depan yang perlu diselesaikan secara bertahap. Ketersediaan lahan yang semakin terbatas, menurunnya daya beli masyarakat, kemampuan pembiayaan yang memadai, perilaku masyarakat untuk hidup bersih, sehat, dan ramah lingkungan, perilaku untuk memelihara sarana prasarana, merupakan tantangan utama ke depan.

3. **Kemitraan, Kerjasama dan Penguatan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Permukiman dan Perumahan belum efektif**

   Revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta beberapa peraturan perundangan sektoral lainnya mengisyaratkan adanya penguatan peran kabupaten dalam hal penyelenggaraan pembangunan. Peraturan perundangan tersebut menegaskan kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengaturan, pembinaan,

pelaksanaan dan pembangunan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan permukiman dan perumahan.

Dalam era otonomi daerah, dimana hirarki antara provinsi dan kabupaten melemah, serta terbatasnya kemampuan anggaran pembangunan daerah dalam penyelengaraan pembangunan, maka pola kemitraan dan kerjasama harus dikembangkan di masa depan. Disadari bahwa selama ini kerjasama dan kemitraan dengan kabupaten, antar Kementerian dan Lembaga atau para pemangku kepentingan lain, khususnya masyarakat dan sektor swasta, belum berjalan efektif, sehingga efektifitas hasil kegiatan pembangunan masih rendah, hal ini terjadi karena belum adanya sinkronisasi kegiatan, baik dari sisi lokasi, pendanaan, skala hasil dan cakupannya.

Terdapat beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam pembangunan prasarana dan sarana bidang perumahan dan permukiman antara lain :

1. Tingkat urbanisasi yang relatif tinggi dan belum disertai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang diakibatkan oleh pertumbuhan urbanisasi tersebut maupun backlog yang ada sebelumnya;
2. Adanya disparitas regional secara ekonomi dan sangat terkait dengan tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dan layananan di bidang perumahan dan permukiman. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya peran perencanaan tata ruang untuk dijadikan acuan pembangunan berbasis kawasan;
3. Ketersediaan infrastruktur dan layanan bidang perumahan dan permukiman belum merata ke semua golongan masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini juga disebabkan belum optimalnya sinergi lintas sektor dan instansi dalam penanggulangan MBR;
4. Degradasi lingkungan perkotaan pada umumnya dan belum berperannya pembangunan dalam menciptakan kota yang asri dan lestari secara maksimal;
5. Belum maksimalnya perencanaan dan penerapan tata bangunan dan lingkungan kawasan perkotaan yang mengakibatkan wajah fisik perkotaan yang tidak tertata;

6. Keterbatasan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur khususnya di bidang pembiayaan. Belum optimalnya partisipasi swasta dalam hal pembiayaan pembangunan khususnya bidang permukiman dan perumahan.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka tantangan dan peluang pengembangan bidang perumahan dan permukiman antara lain sebagai berikut :

1. Amanat peraturan perundangan tentang penyelenggaraan pemerintahan (Undang- undang Nomor 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) yang menguatkan kembali peran kabupaten dalam otonomi daerah;
2. Amanat peraturan perundangan sektoral terkait bidang perumahan dan permukiman yang menegaskan peran kabupaten dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman;
3. Pentingnya menekankan pembangunan bidang perumahan dan permukiman dalam RPJM Nasional dan Daerah dan menyelaraskan indikator pembangunan dalam RPJM Nasional dan RPJM Provinsi;
4. Tingginya tingkat kebutuhan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman, mengharuskan peningkatan kualitas perencanaan, penyusunan program dan kebijakan, pemutakhiran data, evaluasi kinerja, serta pengalokasian anggaran yang optimal;
5. Pendanaan melalui pembagian peran antara pusat, provinsi, kab/kota serta tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (CSR).

Sedangkan ancaman yang ada antara lain :

1. Sulitnya menekan laju urbanisasi dan jumlah penduduk sehingga sulit mengimbangi pemenuhan prasarana dan sarana;
2. Lemahnya penegakan hukum dalam pengendalian pembangunan bidang perumahan dan permukiman;
3. Kurangnya komitmen bersama dan masih adanya perbedaan tujuan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman; dan

4. Menurunnya daya dukung lingkungan dalam menunjang kegiatan perumahan dan permukiman (air, tanah, udara) yang disebabkan adanya perubahan iklim global

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 8 (delapan) Misi/Agenda, 17 (tujuh belas) Arah/Tujuan, dan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan.

Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025, maupun yang dirumuskan dalam rancangan awal RKP 2025 penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD 2025 yang direncanakan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong. Identifikasi kebijakan nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kebijakan Nasional		Keterangan
1	**RPJP 2005-2025**		
	a	Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi;	
	b	Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya;	
	c	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi.	
2	**SDG'S**		
	Tujuan 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.		
	Tujuan 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.		
3	**RPJMN 2020-2024**		7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2024
	a	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;	
	b	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;	

	c	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	
	d	Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;	
	e	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;	
	f	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;	
	g	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	

No	Kebijakan Nasional		Keterangan
4	**BAPPENAS**		Air Minum
	a	Mewujudkan pemenuhan 100% akses layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Goal 6.1.1 dan untuk mewujudkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta untuk mendukung program prioritas nasional, dengan komitmen dan upaya pemerintah daerah;	
	b	Mewujudkan pemenuhan 100% akses layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Goal 6.1.1 dan untuk mewujudkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta untuk percepatan pembangunan air minum di kabupaten/kota prioritas pengembangan wilayah dalam RPJMN 2020-2024, kabupaten/kota yang termasuk dalam layanan SPAM Regional dan Proyek Strategis Nasional (PSN), lokasi prioritas penanganan stunting, dan kabupaten yang telah melaksanakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dan desa baru Pamsimas yang masuk dalam longlist IMAS tahap II, dengan komitmen dan upaya pemerintah daerah;	
	c	Pembangunan air minum dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana yang tertuang dalam Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan/atau Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL);	
	d	Mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan menuju target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bidang sanitasi serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) air limbah melalui dukungan Pemda dalam peningkatan cakupan layanan sanitasi. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK);	Sanitasi
	e	Mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan menuju target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bidang sanitasi melalui: peningkatan akses layanan sanitasi di lokasi prioritas penanganan stunting, PAMSIMAS, dan kabupaten/kota prioritas pengelolaan lumpur tinja; serta di 103 kabupaten/kota prioritas pengembangan wilayah dalam RPJMN 2020- 2024 dan kabupaten/kota yang termasuk dalam DAS Citarum. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK);	
	f	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman layak di kawasan permukiman kumuh yang memiliki SK Kawasan Kumuh serta mendukung pelayanan dasar daerah kabupaten/kota pada SPM Perumahan Rakyat.	Perumahan dan Permukiman
5	**Direktorat PAM - DJCK Kementerian PUPR**		Target RAD

	a	Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal dan memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk MBR;	Nasional 100% Seluruh Masyarakat Akses Terhadap Sanitasi Yang layak dan aman
	b	Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi;	
	c	Meningkatkan/ memperluas akses air minum jaringan perpipaan terlindungi;	
	d	Meningkatkan kualitas air minum;	
	e	Menurunkan tingkat kehilangan air;	
	f	Meningkatkan kemampuan finansial internal Penyelenggara SPAM;	
	g	Meningkatkan komitmen Pemerintah dan Pemda dalam pendanaan SPAM;	
	h	Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR);	
	i	Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non-pemerintah;	
	j	Meningkatkan sinergitas antara BUMN-BUMD dalam percepatan SPAM;	
	k	Memperkuat kapasitas SDM tingkat pusat dan daerah dalam pengembangan SPAM;	
	l	Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota;	
	m	Mendorong komitmen Pemda untuk lebih memprioritaskan Pengembangan SPAM;	
	n	Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk Penyelenggara SPAM;	
	o	Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent*;	
	p	Mengembangkan manajemen aset dalam efisiensi dan efektivitas pengelolaan;	
	q	Mengembangkan kapasitas Pemda dalam pelaksanaan SPAM Regional.	
6	**Direktorat PPLP - DJCK Kementerian PUPR**		Target RAD Nasional 100% Seluruh Masyarakat Akses Terhadap Sanitasi Yang layak dan aman
	a	Peningkatan Kesadaran Masyarakat;	
	b	Peningkatan Kepedulian dan Komitmen PEMDA;	
	c	Peningkatan kelembagaan dan kompetensi SDM;	
	d	Peningkatan akses air limbah layak;	
	e	Kerjasama lintas sektor;	
	f	Pengembangan skala penanganam;	
	g	Peningkatan kualitas perencanaan air limbah.	
7	**Direktorat PKP - DJCK Kementerian PUPR**		

		1. Penanganan **Permukiman Kumuh** di 30 lokasi prioritas; 2. Penataan **9 Kampung Nelayan** di Pontianak, Tegal, Bengkulu, Indramayu, Banjarmasin, Jayapura, Makassar, Medan dan Semarang; (MYC) 3. Penanganan Permukiman Kumuh melalui **KOTAKU;** 4. **Inkubasi Kota Baru**: Perencanaan di 4 Kota (Kota Padang, Kota Maja, Kota Banjar Baru dan Kota Sofifi), Pembangunan Fisik di 4 Kota (Kota Pontianak, Kota Palembang, Kota Makassar dan Kota Manado); 5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hunian Rusunawa; 6. Pembangunan Infrastruktur **Permukiman Perdesaan** pada Kawasan Prioritas Perdesaan Nasional (KPPN), baik untuk Agropolitan, Minapolitan serta Desa Wisata Kandri dan Mandeh; 7. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (**PISEW**) di 900 Kecamatan; 8. Pemenuhan SPM di kawasan permukiman perdesaan dalam mendukung **kampung sejahtera (OASE)** di Kab. Nunukan, Kaltara dan Kab. Malaka, NTT.	Target RAD Nasional 0% Kawasan Kumuh Perkotaan
8	**Kementerian Agraria dan Tata Ruang – Badan Pertanahan Nasional**		
		1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional; 2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia; 3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land tenureship); 4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik; 5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis; 6. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan sistem pengamanan Dok pertanahan di seluruh Indonesia; 7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat; 8. Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar; 9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan Pertanahan yang telah ditetapkan; 10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional. 11. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan Pertanahan.	

Sumber: www.bappenas.go.id, www.pu.go.id, www.bpn.go.id, www.sdg2030indonesia.org/

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan Misi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong. Adapun tujuan pelaksanaan masing-masing misi sebagai berikut :

1. Mengurangi rasio Rumah Tidak Layak Huni;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan;
3. Meningkatkan PSU Perumahan dan Permukiman;

4. Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Rumah;
5. Tersedianya lahan untuk pembangunan sesuai rencana umum pengadaan tanah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Perumahan rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong adalah :

1. Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni bagi MBR;
2. Meningkatkan kualitas tertangani lingkungan perumahan dan pemukiman;
3. Penanganan Perumahan dan Permukiman;
4. Penanganan PSU;
5. Penanganan pertumbuhan pembangunan rumah dan hunian;
6. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengadaan tanah;
7. Penyelesaian konflik pertanahan;
8. Peningkatan kualitas data pertanahan.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran SKPD (outcome)
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya tingkat kemiskinan	Meningkatnya akses layanan dasar (fisik)	Persentase warga miskin yang mendapatkan layanan dasar fisik	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Bagi Korban Pasca Bencana yang direhabilitasi dan dibangun

				Meningkatnya penanganan RTLH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani di Kawasan Kumuh
				Berkurangnya Kawasan kumuh perkotaan	Presentase Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani
				Meningkatnya penanganan PSU	Persentase PSU yang ditangani
2	Meningkatkan Penanganan, Pemanfaatan dan Legalitas Lahan Milik Daerah			Meningkatnya Penanganan pengadaan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah	Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum oleh pemerintah daerah
				Berkurangnya sengketa tanah garapan	Persentase kasus sengketa lahan yang ditangani
				Meningkatnya kualitas data pertanahan	Dokumen Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah

Tabel 3.2

Tujuan Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong

No	Tujuan SKPD	Indikator Tujuan SKPD	Target Kinerja SPD Tahun 2024
1	**2**	**3**	**4**
1	Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses Masyarakat untuk mendapatkan rumah, perumahan dan permukiman	Persentase Rumah Layak Huni / Rasio Rumah Layak Huni	1 : 1,46
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni Bagi Korban Pasca Bencana	100%
2	Meningkatkan lingkungan yang sesuai standar	Persentase Kawasan kumuh dibawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani	85%

3	Meningkatkan kualitas dan rasio sarana dan prasarana PSU	Persentase perumahan dan permukiman yang sudah dilengkapi PSU	100%
4	Meningkatkan kualitas perencanaan dan ketersediaan lahan milik pemerintah	Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum oleh pemerintah daerah	100%
		Persentase kasus sengketa lahan yang ditangani	100%
		Dokumen Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong

No	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran SKPD	Target Sasaran SPD Tahun 2024
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Bagi Korban Pasca Bencana yang direhabilitasi dan dibangun	100%
2	Meningkatnya penanganan RTLH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani di Kawasan Kumuh	100%
3	Berkurangnya Kawasan kumuh perkotaan	Presentase Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	85%
4	Meningkatnya penanganan PSU	Persentase PSU yang ditangani	100%
5	Meningkatnya Penanganan pengadaan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah	Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum oleh pemerintah daerah	100%
6	Berkurangnya sengketa tanah garapan	Persentase kasus sengketa lahan yang ditangani	100%

7	Meningkatnya kualitas data pertanahan	Dokumen Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	100%

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja 2024
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah, perumahan dan permukiman pada lingkungan layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	1 : 1,46
		Persentase Kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	85%
		Persentase Permukiman yang tertata	100%
		Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100%
2	Meningkatkan Penanganan, Pemanfaatan dan Legalitas Lahan Miiik Daerah	Presentase luas lahan bersertifikat (tanah aset Pemda)	100%
		Sidang panitia pertimbangan landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah	100%
		Penyelesaiaan kasus tanah yang tertangani	100%
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	BB
		Indeks Kepuasan Kesekretariatan	76

BAB IV

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini digambarkan tentang Renja Perubahan SKPD dan pendanaan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman tahun 2024. Adapun program/kegiatan serta pendanaan dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Sasaran, Program dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong

No	Sasaran SKPD	Nama Program / Kegiatan
1	Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah, perumahan dan permukiman pada lingkungan layak huni	**Program** : Pengembangan Perumahan **Kegiatan** : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan** : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana **Sub Kegiatan** : Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
		Program : Kawasan Permukiman **Kegiatan** : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha **Sub Kegiatan** : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni **Sub Kegiatan** : Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU **Program** : Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh **Kegiatan** : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :** Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		Program : Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) **Kegiatan** : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan **Sub Kegiatan** : Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan **Sub Kegiatan** : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian **Sub Kegiatan** : Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
2	Meningkatkan Penanganan, Pemanfaatan dan Legalitas Lahan Milik Daerah	**Program** : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan **Kegiatan** : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan** : Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program : Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan **Kegiatan** : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan** : Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

		Program : Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee **Kegiatan** : Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan** : Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	**Program** : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota **Kegiatan** : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **Sub Kegiatan** : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota **Kegiatan** : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah **Sub Kegiatan** : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **Kegiatan** : Administrasi Umum Perangkat Daerah **Sub Kegiatan** : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sub Kegiatan** : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **Sub Kegiatan** : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **Sub Kegiatan** : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **Kegiatan** : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah **Sub Kegiatan** : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **Sub Kegiatan** : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sub Kegiatan** : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **Kegiatan** : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah **Sub Kegiatan** : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **Sub Kegiatan** : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Sub Kegiatan** : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel IV.1

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2024

Kabupaten Tabalong

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan)										Perkiraan Maju (Renja Tahun 2025)		Jenis Keg.*)	Unit SKPD Penanggung jawab
									Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=12-11	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
															194.949.064.309	**385.127.941.402**	**190.178.877.093**					
1	**04**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**Nilai AKIP**	**Disperkim**	**Disperkim**	**Tabalong**	**Tabalong**	**BB**	**BB**	**10.562.577.106**	**11.937.555.534**	**1.374.978.428**	**DAU**	**DAU**	**BB**	**10.210.588.631**	**a.**	**Disperkim**
1	*04*	*01*	*2*	*01*		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah*	*Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah*	*Disperkim*	*Disperkim*	*Tabalong*	*Tabalong*	*100%*	*100%*	*88.306.913*	*224.012.913*	**135.706.000**	DAU	DAU	*100%*	*129.613.200*	a.	Disperkim
1	04	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu	Jumlah Dokumen Penyusunan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu	Disperkim	Disperkim	Tabalong	Tabalong	14 Dokumen	14 Dokumen	88.306.913	224.012.913	**135.706.000**	DAU	DAU	14 Dokumen	129.613.200	a.	Disperkim
1	*04*	*01*	*2*	*02*		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Administrasi keuangan tepat waktu*	*Administrasi keuangan tepat waktu*	*Disperkim*	*Disperkim*	*Tabalong*	*Tabalong*	*100%*	*100%*	*5.535.321.000*	*5.535.321.000*	-	DAU	DAU	*100%*	*5.535.321.000*	a.	Disperkim
1	04	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Disperkim	Disperkim	Tabalong	Tabalong	24 Orang	24 Orang	5.535.321.000	5.535.321.000	-	DAU	DAU	24 Orang	5.535.321.000	a.	Disperkim
1	*04*	*01*	*2*	*06*		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Terlaksanannya kegiatan administrasi umum*	*Terlaksanannya kegiatan administrasi umum*	*Disperkim*	*Disperkim*	*Tabalong*	*Tabalong*	*100%*	*100%*	*956.350.559*	*1.400.666.779*	**444.316.220**	DAU	DAU	*100%*	*1.432.903.289*	a.	Disperkim
1	04	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Disperkim	Disperkim	Tabalong	Tabalong	15 Paket	15 Paket	399.420.184	399.420.184	-	DAU	DAU	15 Paket	643.173.544	a.	Disperkim
1	04	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disperkim	Disperkim	Tabalong	Tabalong	4 Paket	4 Paket	100.360.575	109.366.795	**9.006.220**	DAU	DAU	4 Paket	104.515.745	a.	Disperkim
1	04	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disperkim	Disperkim	Tabalong	Tabalong	4 Dokumen	4 Dokumen	41.612.000	41.612.000	-	DAU	DAU	4 Dokumen	41.612.000	a.	Disperkim
1	04	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Disperkim	Disperkim	Tabalong	Tabalong	80 Dokumen	100 Dokumen	414.957.800	850.267.800	**435.310.000**	DAU	DAU	80 Dokumen	643.602.000	a.	Disperkim
1	*04*	*01*	*2*	*07*		*Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Terlaksanannya pembelian kendaraan operasional*	*Terlaksanannya pembelian kendaraan operasional*	*Disperkim*	*Disperkim*	*Tabalong*	*Tabalong*	*100%*	*100%*	*155.604.000*	*515.799.000*	**360.195.000**	DAU	DAU	[redacted]			
1	04	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional yang dibeli	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional yang dibeli	Disperkim	Disperkim	Tabalong	Tabalong	4 Buah	5 Buah	155.604.000	515.799.000	**360.195.000**	DAU	DAU				
1	*04*	*01*	*2*	*08*		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan*	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan*	*Disperkim*	*Disperkim*	*Tabalong*	*Tabalong*	*100%*	*100%*	*2.185.793.411*	*2.517.414.619*	**331.621.208**	DAU	DAU	*100%*	*2.415.221.142*	a.	Disperkim

1	04	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Disperkim	Disperkim	Tabalong	Tabalong	4 Laporan	4 Laporan	88.500.000	160.500.000	**72.000.000**	DAU	DAU	4 Laporan	100.500.000	a.	Disperkim
1	04	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Disperkim	Disperkim	Tabalong	Tabalong	1 Laporan	1 Laporan	58.713.638	103.713.638	**45.000.000**	DAU	DAU	1 Laporan	150.879.921	a.	Disperkim
1	04	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Disperkim	Disperkim	Tabalong	Tabalong	5 Laporan	5 Laporan	2.038.579.773	2.253.200.981	**214.621.208**	DAU	DAU	5 Laporan	2.163.851.221	a.	Disperkim
1	*04*	*01*	*2*	*09*		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Disperkim*	*Disperkim*	*Tabalong*	*Tabalong*	*100%*	*100%*	*1.641.201.223*	*1.744.341.223*	**103.140.000**	DAU	DAU	*100%*	*697.460.000*	a.	Disperkim
1	04	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Disperkim	Disperkim	Tabalong	Tabalong	24 Unit	24 Unit	389.610.000	492.750.000	**103.140.000**	DAU	DAU	24 Unit	403.010.000	a.	Disperkim
1	04	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Disperkim	Disperkim	Tabalong	Tabalong	65 Unit	65 Unit	55.670.000	55.670.000	-	DAU	DAU	65 Unit	94.480.000	a.	Disperkim
1	04	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Disperkim	Disperkim	Tabalong	Tabalong	1 Unit	1 Unit	1.195.921.223	1.195.921.223	-	DAU	DAU	1 Unit	200.000.000	a.	Disperkim
1	**04**	**02**				**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Rasio Rumah Layak Huni**	**Rasio Rumah Layak Huni**	**Disperkim**	**Disperkim**	**Tabalong**	**Tabalong**	**1 : 1,46**	**1 : 1,46**	**2.487.898.000**	**2.487.898.000**	-	**DAU**	**DAU**				
1	**04**	**02**				**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rumah Korban Bencana yang ditangani**								**2.487.898.000**	**2.487.898.000**				**70%**	**2.363.665.000**	**a.**	**Disperkim**
1	*04*	*02*	*2*	*03*		*Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Penanganan rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten*	*Terlaksananya Penanganan rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten*	*Disperkim*	*Disperkim*	*Tabalong*	*Tabalong*	*100%*	*100%*	*2.487.898.000*	*2.487.898.000*	-	*DAU*	*DAU*	*100%*	*2.363.665.000*	*a.*	*Disperkim*
1	04	02	2	03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Perangkat Daerah	Jumlah Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi	Jumlah Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi	Disperkim	Disperkim	Tabalong	Tabalong	16 Unit	16 Unit	407.448.000	407.448.000	-	DAU	DAU	16 Unit	531.765.000	a.	Disperkim
1	*04*	*02*	*2*	*03*	*04*	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Pasca Bencana yang dibangun	Jumlah Rumah Korban Pasca Bencana yang dibangun	Disperkim	Disperkim	Tabalong	Tabalong	40 Unit	40 Unit	2.080.450.000	2.080.450.000	-	DAU	DAU	40 Unit	1.831.900.000	a.	Disperkim
1	**04**	**03**				**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Permukiman yang tertata**	**Persentase Permukiman yang tertata**	**Tabalong**	**Tabalong**	**Tabalong**	**Tabalong**	**70%**	**70%**	**15.874.426.100**	**16.859.842.846**	**985.416.746**	**DAU**	**DAU**				

1	**04**	**03**				**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase RTLH yang ditangani**	[redacted]						**15.874.426.100**	**16.859.842.846**	[redacted]			**13%**	**14.154.338.432**	**a.**	**Disperkim**
1	*04*	*03*	*2*	*03*		*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*Terlaksananya Penanganan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*Terlaksananya Penanganan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	Tabalong	Tabalong	Tabalong	Tabalong	*100%*	*100%*	15.874.426.100	16.859.842.846	**985.416.746**	DAU	DAU		14.154.338.432	a.	Disperkim
1	04	03	2	03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1. Jumlah peningkatan kualitas (PK) rumah layak huni yang terbangun di kawasan kumuh (unit) 2. Penyusunan Dokumen Kumuh	1. Jumlah peningkatan kualitas (PK) rumah layak huni yang terbangun di kawasan kumuh (unit) 2. Penyusunan Dokumen Kumuh 3. Jumlah Dokumen Penanganan PSU	Tabalong	Tabalong	Tabalong	Tabalong	1. 207 Unit 2. 1 Dokumen	1. 207 Unit 2. 1 Dokumen	7.052.051.100	7.132.050.846	**79.999.746**	DAU	DAU		3.502.722.385	a.	Disperkim
1	*04*	*03*	*2*	*03*	*03*	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1. Jumlah Dokumen Penanganan PSU 2. Jumlah Bedah Rumah Peningkatan Kualitas (PK) RTLH Diluar Kawasan Kumuh	1. Jumlah Dokumen Penanganan PSU 2. Jumlah Bedah Rumah Peningkatan Kualitas (PK) RTLH Diluar Kawasan Kumuh	Tabalong	Tabalong	Tabalong	Tabalong	1. 14 dokumen 2. 100 Unit	1. 18 dokumen 2. 100 Unit	8.822.375.000	9.727.792.000	**905.417.000**	DAU	DAU		10.651.616.047	a.	Disperkim
1	**04**	**04**				**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani**	**Persentase Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani**	**Tabalong**	**Tabalong**	**Tabalong**	**Tabalong**	**85%**	**85%**	**8.499.120.000**	**8.682.703.000**	**183.583.000**	**DAU**	**DAU**	**5 Ha**	**6.486.684.000**	**a.**	**Disperkim**
1	*04*	*04*	*2*	*01*		*Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Penanganan Pencegahan Permukiman Kumuh*	*Terlaksananya Penanganan Pencegahan Permukiman Kumuh*	Tabalong	Tabalong	Tabalong	Tabalong	*100%*	*100%*	8.499.120.000	8.682.703.000	**183.583.000**	DAU	DAU	*100%*	6.486.684.000	a.	Disperkim
1	04	04	2	01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan yang terbangun (unit)	1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan yang terbangun (unit)	Tabalong	Tabalong	Tabalong	Tabalong	400 Unit	400 Unit	8.499.120.000	8.682.703.000	**183.583.000**	DAU	DAU		6.486.684.000	a.	Disperkim
1	**04**	**05**				**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase PSU yang ditangani**	**Persentase PSU yang ditangani**	**Tabalong**	**Tabalong**	**Tabalong**	**Tabalong**	**100%**	**100%**	**129.536.598.103**	**308.409.527.022**	**178.872.928.919**	**DAU**	**DAU**	**25%**	**113.120.285.563**	**a.**	**Disperkim**
1	4	5	2	1		*Unsur Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU*	*Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU*	Tabalong	Tabalong	Tabalong	Tabalong	*100%*	*100%*	129.536.598.103	308.409.527.022	**178.872.928.919**	DAU	DAU	*100%*	113.120.285.563	a.	Disperkim
1.	4	5	2	1	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tabalong	Tabalong	Tabalong	Tabalong	57 Dokumen	210 Dokumen	4.940.041.750	18.300.601.750	**13.360.560.000**	DAU	DAU		4.500.000.000	a.	Disperkim
1	4	5	2	1	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Tabalong	Tabalong	Tabalong	Tabalong	87 Lokasi	152 Lokasi	89.842.038.292	245.754.632.067	**155.912.593.775**	DAU	DAU		77.222.069.995	a.	Disperkim

1.		4	5	2	1	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Tabalong	Tabalong	Tabalong	Tabalong	40 Dokumen	47 Dokumen	34.754.518.061	44.354.293.205	**9.599.775.144**	DAU	DAU		31.398.185.568	a.	Disperkim
2	**10**	**04**					**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase kasus sengketa lahan yang ditangani**	**Persentase kasus sengketa lahan yang ditangani**	**Tabalong**	**Tabalong**	**Tabalong**	**Tabalong**	**100%**	**100%**	**70.074.000**	**70.074.000**	-	**DAU**	**DAU**	**100%**	**71.621.000**	**a.**	**Disperkim**
	10	*04*	*2*	*01*		*Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah yang ditangani*	*Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah yang ditangani*	*Tabalong*	*Tabalong*	*Tabalong*	*Tabalong*	*100%*	*100%*	*70.074.000*	*70.074.000*	-	*DAU*	*DAU*	*100%*	*71.621.000*	*a.*	*Disperkim*
	10	*04*	*2*	*01*	*01*	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tabalong	Tabalong	Tabalong	Tabalong	3 Kasus	3 Kasus	70.074.000	70.074.000	-	DAU	DAU	3 Kasus	71.621.000	a.	Disperkim
2	**10**	**05**					**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum oleh pemerintah daerah**	**Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum oleh pemerintah daerah**	**Tabalong**	**Tabalong**	**Tabalong**	**Tabalong**	**100%**	**100%**	**27.699.613.000**	**36.419.583.000**	**8.719.970.000**	**DAU**	**DAU**	**100%**	**29.147.238.000**	**a.**	**Disperkim**
2	*10*	*05*	*2*	*01*		*Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan*	*Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan*	*Tabalong*	*Tabalong*	*Tabalong*	*Tabalong*	*100%*	*100%*	*27.699.613.000*	*36.419.583.000*	**8.719.970.000**	*DAU*	*DAU*	*100%*	*29.147.238.000*	*a.*	*Disperkim*
2	10	05	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas pengadaan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah	Luas pengadaan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah	Tabalong	Tabalong	Tabalong	Tabalong	10,5 Ha	11,65 Ha	27.699.613.000	36.419.583.000	**8.719.970.000**	DAU	DAU	9,76 Ha	29.147.238.000	a.	Disperkim
2	**10**	**06**				**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Penetapan subyek dan obyek reforma agraria**	**Penetapan subyek dan obyek reforma agraria**	**Tabalong**	**Tabalong**	**Tabalong**	**Tabalong**	**100%**	**100%**	**218.758.000**	**260.758.000**	**42.000.000**	**DAU**	**DAU**	**100%**	**200.034.000**	**a.**	**Disperkim**
2	*10*	*06*	*2*	*01*		*Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee*	*Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee*	*Tabalong*	*Tabalong*	*Tabalong*	*Tabalong*	*100%*	*100%*	*218.758.000*	*260.758.000*	***42.000.000***	*DAU*	*DAU*	*100%*	*200.034.000*	*a.*	*Disperkim*
2	10	06	2	01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Tabalong	Tabalong	Tabalong	Tabalong	1 Dokumen	1 Dokumen	218.758.000	260.758.000	**42.000.000**	DAU	DAU	1 Dokumen	200.034.000	a.	Disperkim

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini menjadi acuan dan arah pembangunan SKPD satu tahun kedepan. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana kerja merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja, oleh karena itu efisiensi dan efektifitas implementasi Renja memerlukan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tabalong, stakeholders terkait dan dukungan seluruh komponen organisasi, sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD akan mudah dicapai dan tentunya dengan memperhatikan hal-hal berikut :

a. Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur seandainya ketersediaan anggaran menjadi pokok permasalahan;
b. Peka terhadap kebutuhan masyarakat yang tentunya akan berpengaruh pada tercapainya tujuan organisasi;
c. Memegang teguh komitmen bahwa transparansi diseluruh kegiatan yang pelaksanaannya diterapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong memiliki 8 (delapan) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 25 (dua puluh empat) sub kegiatan. Sedangkan jumlah anggaran perubahan untuk menunjang kegiatan yang dibutuhkan guna terselenggaranya seluruh program dan kegiatan tersebut sebesar **Rp 190.178.877.093,-** sehingga anggaran perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawsan Permukiman Kabupaten Tabalong menjadi **Rp. 385.127.941.402,-**

Tanjung, Juli 2024

KEPALA DINAS,

ERFIN NIRZA SIREGAR, ST

NIP. 19[illegible]0928 200003 1 003

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. TABALONG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**249.485.544.024,00**	**469.858.781.720,00**	**627.856.320.183,00**	**378.370.776.159,00**							**261.755.454.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**249.485.544.024,00**	**469.858.781.720,00**	**627.856.320.183,00**	**378.370.776.159,00**							**261.755.454.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**249.485.544.024,00**	**469.858.781.720,00**	**627.856.320.183,00**	**378.370.776.159,00**							**261.755.454.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Layanan Kesekretariatan**				**-**	**B**	**14.639.732.477,00**	**14.974.776.636,00**	**15.890.294.306,00**	**732.744.523,00**							**15.372.477.000,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan lainnya*				-	100 Persen	131.501.560,00	131.501.560,00	113.673.560,00	-17.828.000,00			-	- -	Dokumen Perencanaan dan Dokumen Laporan Kinerja		138.077.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	62.938.100,00	62.938.100,00	27.033.100,00	-35.905.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			66.085.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	68.563.460,00	68.563.460,00	86.640.460,00	18.077.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			71.992.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN*				-	100 Persen	10.758.284.304,00	10.901.602.000,00	11.363.157.000,00	604.872.696,00			-	- -	ASN di Dinas PUPR		11.296.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71 Orang/bulan	71 Orang/bulan	10.758.284.304,00	10.901.602.000,00	11.363.157.000,00	604.872.696,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.296.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai tugas dan fungsinya*				-	12 Bulan	156.976.000,00	156.976.000,00	169.784.000,00	12.808.000,00			-	- -	ASN di Dinas PUPR		164.825.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	156.976.000,00	156.976.000,00	169.784.000,00	12.808.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			164.825.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perkantoran*				-	12 Bulan	803.576.475,00	1.056.454.759,00	1.382.192.399,00	578.615.924,00			-	- -	Pelayanan administrasi umum di Dinas PUPR		844.010.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	397.577.915,00	650.456.199,00	806.056.839,00	408.478.924,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			417.456.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	79.756.560,00	79.756.560,00	79.756.560,00	0,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			84.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	326.242.000,00	326.242.000,00	496.379.000,00	170.137.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			342.554.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan jasa penunjang kantor Dinas PUPR*				-	12 Bulan	1.602.154.200,00	1.566.034.200,00	1.691.654.280,00	89.500.080,00			-	- -	Penyediaan jasa penunjang di Dinas PUPR		1.682.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	49.775.000,00	49.775.000,00	49.775.000,00	0,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			52.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	195.500.000,00	195.500.000,00	242.000.000,00	46.500.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			205.275.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.356.879.200,00	1.320.759.200,00	1.399.879.280,00	43.000.080,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.424.725.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang2 milik daerah di Dinas PUPR*				-	12 Bulan	1.187.239.938,00	1.162.208.117,00	1.169.833.067,00	-17.406.871,00			-	- -	Barang-barang milik daerah di Dinas PUPR		1.246.865.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				41 Unit	41 Unit	525.070.000,00	525.070.000,00	525.070.000,00	0,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			551.324.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	79.750.000,00	79.750.000,00	79.750.000,00	0,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			84.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	209.960.408,00	184.928.587,00	192.553.537,00	-17.406.871,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			220.458.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**1. Rasio Jaringan Irigasi 2. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik**				**-**	**6.36 75 Persen Persen**	**12.232.406.870,00**	**13.232.406.870,00**	**13.734.721.870,00**	**611.799.130,00**							**12.844.206.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terbangunnya dan terpeliharanya pintu air dan tanggul sungai*				-	12 Bu;an	3.750.958.750,00	3.750.958.750,00	3.963.946.750,00	212.988.000,00			-	- -	Pintu air dan tanggul sungai		3.938.526.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	1.194.029.000,00	1.194.029.000,00	1.349.757.000,00	155.728.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.253.730.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				30 Lembaga	30 Lembaga	285.885.000,00	285.885.000,00	251.465.000,00	-34.420.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.180.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0.5 KM	0.5 KM	805.041.000,00	805.041.000,00	805.541.000,00	500.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			845.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	802.641.000,00	802.641.000,00	828.273.000,00	25.632.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			842.780.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0.25 KM	0.25 KM	411.253.000,00	411.253.000,00	476.801.000,00	65.548.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar 5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar			431.820.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terbangunnya dan terpeliharanya jalan usaha tani dan saluran irigasi*				-	12 Bulan	8.481.448.120,00	9.481.448.120,00	9.770.775.120,00	1.289.327.000,00			-	- -	Saluran irigasi dan normalisasi sungai		8.905.680.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				1 KM	1 KM	3.209.429.100,00	3.592.817.100,00	4.011.559.000,00	802.129.900,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.369.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0.9 KM	0.9 KM	808.241.000,00	808.241.000,00	1.506.200.000,00	697.959.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			848.660.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				5.5 KM	3 KM	4.201.538.900,00	4.818.150.900,00	3.990.777.000,00	-210.761.900,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.411.620.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase penduduk berakses air minum**				**-**	**74.99 Persen**	**18.166.154.514,00**	**18.266.154.307,00**	**39.888.746.864,00**	**908.307.486,00**							**19.074.462.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Terbangunnya dan meningkatnya SPAM di kawasan perdesaan dan perkotaan*				-	12 Bulan	18.166.154.514,00	18.266.154.307,00	39.888.746.864,00	21.722.592.350,00			-	5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar 5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar	Pemasangan sambungan rumah air minum		19.074.462.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				4 Lembaga	4 Lembaga	199.999.720,00	199.999.720,00	199.999.590,00	-130,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar 5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar			210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1500 SR	1000 SR	17.966.154.794,00	18.066.154.587,00	39.688.747.274,00	21.722.592.480,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN INSENTIF FISKAL	-	- -			18.864.462.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase rumah tinggal bersanitasi**				**-**	**96.43 Persen**	**1.400.909.621,00**	**1.400.909.621,00**	**7.590.670.606,00**	**-139.949.621,00**							**1.260.960.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terbangunnya IPAL dan septic tank*				-	12 Bulan	1.400.909.621,00	1.400.909.621,00	7.590.670.606,00	6.189.760.985,00			-	- -	Rumah tangga dengan toilet dan tangki septik		1.260.960.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				100 Rumah Tangga	450 Rumah Tangga	1.230.909.621,00	1.230.909.621,00	7.420.670.606,00	6.189.760.985,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	-	- -			1.082.460.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Cakupan bangunan untuk fasilitas publik yang layak fungsi**				**-**	**65 Persen**	**477.503.906,00**	**477.503.906,00**	**598.471.906,00**	**23.876.094,00**							**501.380.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Terlayaninya pengurusan dokumen PBG dan Sertifikat laik fungsi*				-	12 Bulan	477.503.906,00	477.503.906,00	598.471.906,00	120.968.000,00			-	- -	Dokumen PBG dan SLF		501.380.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				75 Dokumen	75 Dokumen	477.503.906,00	477.503.906,00	598.471.906,00	120.968.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			501.380.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase bangunan fasilitas publik yang terpelihara**				**-**	**80 Persen**	**9.568.718.946,00**	**104.568.719.153,00**	**122.668.904.681,00**	**478.429.054,00**							**10.047.148.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Terpeliharanya bangunan / fasilitas publik*				-	12 Bulan	9.568.718.946,00	104.568.719.153,00	122.668.904.681,00	113.100.185.735,00			-	- -	Bangunan fasilitas publik di Kabupaten Tabalong		10.047.148.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				8 Kawasan	8 Kawasan	9.568.718.946,00	104.568.719.153,00	122.668.904.681,00	113.100.185.735,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			10.047.148.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**1. Persentase Desa yang dapat di akses dengan mudah** **2. Presentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap**				**-**	**100** **79.8 Persen** **Persen**	**189.299.632.175,00**	**313.999.632.175,00**	**424.477.173.782,00**	**9.469.677.825,00**							**198.769.310.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Terbangunnya dan terpeliharanya jalan dan jembatan kabupaten*				-	12 Bulan	189.299.632.175,00	313.999.632.175,00	424.477.173.782,00	235.177.541.607,00			-	- -	Jalan dan jembatan kabupaten		198.769.310.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				5 KM	5 KM	55.581.040.000,00	151.583.315.600,00	179.760.618.673,00	124.179.578.673,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			58.360.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				5 KM	5 KM	19.600.000.000,00	28.600.000.000,00	44.408.101.591,00	24.808.101.591,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL DBH SAWIT	-	- -			20.580.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				5 KM	5 KM	35.660.000.000,00	36.085.594.780,00	80.828.753.047,00	45.168.753.047,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA INSENTIF DAERAH	-	- -			37.443.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				15 Jembatan	15 Jembatan	3.110.000.000,00	3.110.000.000,00	7.810.000.000,00	4.700.000.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.265.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				13 Jembatan	13 Jembatan	26.300.000.000,00	49.692.129.620,00	55.109.535.346,00	28.809.535.346,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.615.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0.198 KM	0.198 KM	35.700.000.000,00	26.580.000.000,00	26.623.682.950,00	-9.076.317.050,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			37.485.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				17 KM	17 KM	12.150.000.000,00	17.150.000.000,00	28.737.890.000,00	16.587.890.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.757.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Presentase penerapan manajemen mutu konstruksi**				**-**	**100 Persen**	**725.698.840,00**	**646.174.455,00**	**610.222.671,00**	**36.286.160,00**							**761.985.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Terselenggaranya pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi dan terpeliharanya alat-alat laboratorium ke-PU-an*				-	12 Bulan	567.045.000,00	511.528.661,00	475.576.877,00	-91.468.123,00			-	- -	Tenaga kerja konstruksi		595.398.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				50 Orang	50 Orang	216.907.570,00	161.391.234,00	125.439.450,00	-91.468.120,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			227.753.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Lembaga	8 Lembaga	145.331.950,00	145.331.947,00	145.331.947,00	-3,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			152.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				70 Orang	70 Orang	204.805.480,00	204.805.480,00	204.805.480,00	0,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			215.045.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya pelayanan sistem informasi jasa konstruksi*				-	12 Bulan	107.353.840,00	83.345.794,00	83.345.794,00	-24.008.046,00			-	- -	Aplikasi Simanjakon		112.722.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	107.353.840,00	83.345.794,00	83.345.794,00	-24.008.046,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			112.722.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Terlaksananya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi*				-	12 Bulan	51.300.000,00	51.300.000,00	51.300.000,00	0,00			-	- -	Penyedia jasa konstruksi		53.865.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				25 Paket Pekerjaan	25 Paket Pekerjaan	51.300.000,00	51.300.000,00	51.300.000,00	0,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			53.865.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**2. Ketaatan terhadap RTRW 1. Persentase kawasan terbangun**				**-**	**100 2,07 Persen Persen**	**2.974.786.675,00**	**2.292.504.597,00**	**2.397.113.497,00**	**148.739.325,00**							**3.123.526.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Terlaksananya penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota*				-	12 Bulan	2.154.433.572,00	1.632.751.072,00	1.632.751.072,00	-521.682.500,00			-	- -	Dokumen RTRW & RTRR		2.262.156.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	868.310.223,00	673.132.623,00	673.132.623,00	-195.177.600,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			911.726.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	998.028.375,00	711.523.475,00	711.523.475,00	-286.504.900,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.047.930.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang																		
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				150 Orang	150 Orang	288.094.974,00	248.094.974,00	248.094.974,00	-40.000.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			302.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan SIMTARU*				-	12 Bulan	145.838.100,00	145.838.100,00	250.447.200,00	104.609.100,00			-	- -	Aplikasi Simtaru		153.130.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	145.838.100,00	145.838.100,00	250.447.200,00	104.609.100,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			153.130.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*				-	12 Bulan	674.515.003,00	513.915.425,00	513.915.225,00	-160.599.778,00			-	- -	Forum Penataaan Ruang		708.240.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	674.515.003,00	513.915.425,00	513.915.225,00	-160.599.778,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			708.240.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH							**249.485.544.024,00**	**469.858.781.720,00**	**627.856.320.183,00**	**378.370.776.159,00**							**261.755.454.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**249.485.544.024,00**	**469.858.781.720,00**	**627.856.320.183,00**	**378.370.776.159,00**							**261.755.454.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**249.485.544.024,00**	**469.858.781.720,00**	**627.856.320.183,00**	**378.370.776.159,00**							**261.755.454.000,00**	
1.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase rumah tinggal bersanitasi**				**-**	**96.43 Persen**	**1.400.909.621,00**	**1.400.909.621,00**	**7.590.670.606,00**	**-139.949.621,00**							**1.260.960.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terbangunnya IPAL dan septic tank*				-	12 Bulan	1.400.909.621,00	1.400.909.621,00	7.590.670.606,00	6.189.760.985,00			-	- -	Tangki septik rumah tangga		1.260.960.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			178.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN							**249.485.544.024,00**	**469.858.781.720,00**	**627.856.320.183,00**	**378.370.776.159,00**							**261.755.454.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**249.485.544.024,00**	**469.858.781.720,00**	**627.856.320.183,00**	**378.370.776.159,00**							**261.755.454.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**249.485.544.024,00**	**469.858.781.720,00**	**627.856.320.183,00**	**378.370.776.159,00**							**261.755.454.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Layanan Kesekretariatan**				**-**	**B**	**14.639.732.477,00**	**14.974.776.636,00**	**15.890.294.306,00**	**732.744.523,00**							**15.372.477.000,00**	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang2 milik daerah di Dinas PUPR*				-	12 Bulan	1.187.239.938,00	1.162.208.117,00	1.169.833.067,00	-17.406.871,00			-	5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar 5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar	Barang milik daerah di UPTD Workshop dan Peralatan		1.246.865.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	372.459.530,00	372.459.530,00	372.459.530,00	0,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar 5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar			391.083.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPTD PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PENGAIRAN WILAYAH I							**249.485.544.024,00**	**469.858.781.720,00**	**627.856.320.183,00**	**378.370.776.159,00**							**261.755.454.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**249.485.544.024,00**	**469.858.781.720,00**	**627.856.320.183,00**	**378.370.776.159,00**							**261.755.454.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**249.485.544.024,00**	**469.858.781.720,00**	**627.856.320.183,00**	**378.370.776.159,00**							**261.755.454.000,00**	
1.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**1. Rasio Jaringan Irigasi 2. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik**				**-**	**6.36 75 Persen Persen**	**12.232.406.870,00**	**13.232.406.870,00**	**13.734.721.870,00**	**611.799.130,00**							**12.844.206.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terbangunnya dan terpeliharanya pintu air dan tanggul sungai*				-	12 Bu;an	3.750.958.750,00	3.750.958.750,00	3.963.946.750,00	212.988.000,00			-	5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar 5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar	Pintu air dan tanggul sungai di Wilayah UPTD I Kelua		3.938.526.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	113.461.158,00	113.461.158,00	113.461.158,00	0,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar 5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar			119.135.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0.3 KM	0.3 KM	138.648.592,00	138.648.592,00	138.648.592,00	0,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			145.581.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**1. Persentase Desa yang dapat di akses dengan mudah 2. Presentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap**				**-**	**100 79.8 Persen Persen**	**189.299.632.175,00**	**313.999.632.175,00**	**424.477.173.782,00**	**9.469.677.825,00**							**198.769.310.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Terbangunnya dan terpeliharanya jalan dan jembatan kabupaten*				-	12 Bulan	189.299.632.175,00	313.999.632.175,00	424.477.173.782,00	235.177.541.607,00			-	5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar 5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar	Jalan dan jembatan kabupaten di Wilayah UPTD I Kelua		198.769.310.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				4 Jembatan	4 Jembatan	149.236.730,00	149.236.730,00	149.236.730,00	0,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar 5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar			157.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				3 KM	3 KM	168.056.170,00	168.056.170,00	168.056.170,00	0,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar 5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar			176.460.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPTD PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PENGAIRAN WILAYAH II							**249.485.544.024,00**	**469.858.781.720,00**	**627.856.320.183,00**	**378.370.776.159,00**							**261.755.454.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**249.485.544.024,00**	**469.858.781.720,00**	**627.856.320.183,00**	**378.370.776.159,00**							**261.755.454.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**249.485.544.024,00**	**469.858.781.720,00**	**627.856.320.183,00**	**378.370.776.159,00**							**261.755.454.000,00**	
1.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**1. Rasio Jaringan Irigasi 2. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik**				**-**	**6.36 75 Persen Persen**	**12.232.406.870,00**	**13.232.406.870,00**	**13.734.721.870,00**	**611.799.130,00**							**12.844.206.000,00**	
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terbangunnya dan terpeliharanya jalan usaha tani dan saluran irigasi*				-	12 Bulan	8.481.448.120,00	9.481.448.120,00	9.770.775.120,00	1.289.327.000,00			-	5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar 5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar	Saluran irigasi di Wilayah UPTD II Haruai		8.905.680.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0.3 KM	0.3 KM	109.815.180,00	109.815.180,00	109.815.180,00	0,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar 5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar			115.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**1. Persentase Desa yang dapat di akses dengan mudah 2. Presentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap**				**-**	**100 79.8 Persen Persen**	**189.299.632.175,00**	**313.999.632.175,00**	**424.477.173.782,00**	**9.469.677.825,00**							**198.769.310.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Terbangunnya dan terpeliharanya jalan dan jembatan kabupaten*				-	12 Bulan	189.299.632.175,00	313.999.632.175,00	424.477.173.782,00	235.177.541.607,00			-	5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar 5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar	Jalan dan jembatan kabupaten di Wilayah UPTD II Haruai		198.769.310.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				4 Jembatan	4 Jembatan	197.281.924,00	197.281.924,00	197.281.924,00	0,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar 5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar			210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				3 KM	3 KM	264.130.545,00	264.130.545,00	264.130.545,00	0,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar 5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar			278.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPTD PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PENGAIRAN WILAYAH III							**249.485.544.024,00**	**469.858.781.720,00**	**627.856.320.183,00**	**378.370.776.159,00**							**261.755.454.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**249.485.544.024,00**	**469.858.781.720,00**	**627.856.320.183,00**	**378.370.776.159,00**							**261.755.454.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**249.485.544.024,00**	**469.858.781.720,00**	**627.856.320.183,00**	**378.370.776.159,00**							**261.755.454.000,00**	
1.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**1. Rasio Jaringan Irigasi** **2. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik**				**-**	**6.36** **75 Persen**	**12.232.406.870,00**	**13.232.406.870,00**	**13.734.721.870,00**	**611.799.130,00**							**12.844.206.000,00**	
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terbangunnya dan terpeliharanya jalan usaha tani dan saluran irigasi*				-	12 Bulan	8.481.448.120,00	9.481.448.120,00	9.770.775.120,00	1.289.327.000,00			-	5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar 5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar	Saluran irigasi di Wilayah UPTD III Muara Uya		8.905.680.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0.3 KM	0.3 KM	152.423.940,00	152.423.940,00	152.423.940,00	0,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar 5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar			160.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**1. Persentase Desa yang dapat di akses dengan mudah** **2. Presentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap**				**-**	**100** **79.8 Persen** **Persen**	**189.299.632.175,00**	**313.999.632.175,00**	**424.477.173.782,00**	**9.469.677.825,00**							**198.769.310.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Terbangunnya dan terpeliharanya jalan dan jembatan kabupaten*				-	12 Bulan	189.299.632.175,00	313.999.632.175,00	424.477.173.782,00	235.177.541.607,00			-	5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar 5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar	Jalan dan jembatan kabupaten di Wilayah UPTD III Muara Uya		198.769.310.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				4 Jembatan	4 Jembatan	199.891.466,00	199.891.466,00	199.891.466,00	0,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar 5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar			210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				3 KM	3 KM	219.995.340,00	219.995.340,00	219.995.340,00	0,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar 5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Penyediaan Pelayanan Dasar			231.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	J U M L A H								**249.485.544.024,00**	**469.858.781.720,00**	**627.856.320.183,00**	**378.370.776.159,00**							**261.755.454.000,00**	

RENCANA KERJA PERUBAHAN

RSUD H. BADARUDDIN KASIM MABURAI

KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2024

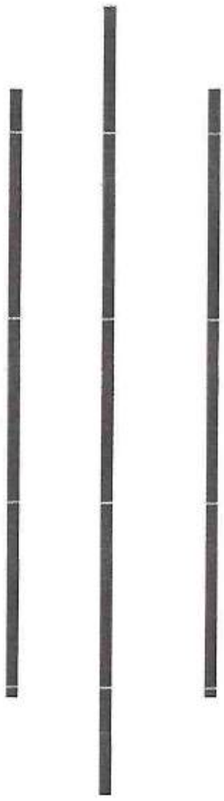

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai Kabupaten Tabalong telah dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini sebagai rencana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai Kabupaten Tabalong dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan Instansi Pemerintah dalam rangka Perwujudan Good Govermence.

Untuk kesempurnaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai Kabupaten Tabalong ini, mohon kritik dan saran dari semua pihak.

Tanjung, Agustus 2024

Direktur
RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai
Kabupaten Tabalong,

dr. H. Mastur Kurniawan,MM
NIP. 19720109 200604 1 019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Restra OPD 5

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 11

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 11

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 14

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD H. BADARUDDIN KASIM MABURAI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024 19

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 19

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD 19

3.3. Program dan Kegiatan 19

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD H. BADARUDDIM KASIM MABURAI KABUPATEN TABALONG 25

BAB V PENUTUP 28

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong berstatus Badan Layanan Umum Daerah yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan masyarakat dan merupakan lembaga teknis Daerah Kabupaten/Kota yang secara pelaksanaannya bertanggungjawab langsung kepada Bupati Tabalong melalui Sekretaris Daerah, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 dengan tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan publik.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4585);
6. PeraturanPemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tabalong Nomor 03);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 589;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;
12. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 927);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 193);
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
17. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Tata Ruang Tata Wilayah;
18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Maksimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02 MENKES/52/201 Tahun 2015 tantang Rencana Strategis Kementrian Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal;

23. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud pembuatan Rencana Kerja Akhir ini adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan anggaran 1 (satu) tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai Kabupaten Tabalong dalam rangka pelayanan kesehatan publik.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan operasional untuk mewujudkan program Pemerintah Kabupaten Tabalong, terutama untuk Peningkatan kualitas hidup Masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1 Program dan Kerja

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Restra OPD

Pelaksanaan kegiataan dilaksanakan oleh RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai Kabupaten Tabalong didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2024. Dalam hal ini semua kegiatan pada prinsipnya dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun kendala yang dihadapi pada masing-masing kegiatan adalah :

1. Terbatasnya kemampuan dan SDM dalam melaksanakan tugas di lapangan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan berjalan tidak maksimal. Solusi yang dilakukan adalah perlu adanya peningkatan kemampuan dan penambahan SDM RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana di RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai. Solusi yang dilakukan adalah perlu ditambahkannya sarana dan prasarana pendukung bagi RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai seperti alat kesehatan penunjang diagnosa medis.
3. Belum optimalmya pelaksanaan target capaian Standar Pelyanan Minimal RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai.

Pada tahun 2023, RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai Kabupaten Tabalong melaksanakan kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.164.496.590.908,-.

Dengan 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan serta 8 (delapan) sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Dari 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan serta 8 (delapan) sub kegiatan tersebut yang telah dilaksanakan oleh RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai Kabupaten

Tabalong tersebut sudah direalisasikan dengan baik namun belum optimal dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Tabalong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPTATEN KOTA	Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel	BB	-	BB	-	BB	-	-	-
	Kegiatan administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN	35.266.750.000		27.963.135.000	35.418.527.164	100,43%	31.598.894.500	29.699.208.739	94%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi						127.990.000	108.929.195,00	85%
	Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	2.669.967.931	-	1.214.708.892	1.709.944.200	64,04%	1.729.881.000	1.473.345.000	85%
	Kegiatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan BLUD	45.988.473.069	-	75.044.811.968	83.448.144.367	181,45%	97.672.608.500	92.602.888.228	95%
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,53 (A)	-	3.48 (B)	3.44 (B)	3.44 (B)	3.5 (B)	3.39 (B)	3.39 (B)
		Akreditasi	Paripurna	-	Madya	Paripurna	Paripurna	Utama	Paripurna	Paripurna

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase Capaian SPM	100 %	-	90,50	82	82	95,50	84	84
	Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Akreditasi Persentase SPM	2.683.910.000		4.164.528.108	11.158.328.625	415,74%	33.367.216.908	30.509.014.748	91%
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Akreditasi	Paripurna	-	1.792.046.440	903.806.667	50,43%	Madya	Madya	Madya
	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	Terlaksananya Alat Pengadaan Penunjang Medik						32.427.216.908	29.569.014.748	83,6%
	Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Sarana Fasilitas Pelayanan						940.000.000	940.000.000	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kesehatan								
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Sistem informasi kesehatan	-	-	350.000.000	314.340.000	89,81%	-	-	-

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu yang berkaitan dengan tugas dan fungsi RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai Kabupaten Tabalong diantaranya yaitu :

1. Koordinasi antara pihak terkait dalam memahami pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai masih kurang, sehingga sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .
2. Masih terbatasnya SDM yang mempunyai kemampuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai secara berkesinambungan.
3. Masih terbatasnya tenaga profesional RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai yakni tenaga fungsional kesehatan dan administrasi padaRSUD H. Badaruddin Kasim Maburai sehingga perlu penambahan pegawai.
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai penunjang kelancaran tugas seperti alat kesehatan dan penunjang medis pada RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai yang memadai
5. Belum optimalnya pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai sebagai dasar penilaian kinerja tersebut.

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Selanjutnya akan dilakukan dianalisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (tidak tercapainya target) untuk tindakan yang diperlukan pada tahun berikutnya. Sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai Kabupaten Tabalong, Dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai maka dengan ini langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai
2. Meningkatkan Koordinasi antara pihak terkait dalam memahami pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .
3. Menambah tenaga profesional RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai yakni tenaga fungsional kesehatan dan administrasi pada RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai.

4. Menambahsarana dan prasarana yang dimiliki sebagai penunjang kelancaran tugas seperti alat kesehatan dan penunjang medis pada RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai.
5. Mengoptimalkan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai Kabupaten Tabalong

No	Indikator	SPM/Standar	IKK	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	IKM	-		√	3.4 (B)	3.43 (B)	3.48 (B)	3.5 (B)	3.53 (A)	3.4 (B)	3.48 (B)	3.5 (B)	
II	Akreditasi	-		√	Madya	Madya	Madya	Utama	Paripurna	Paripurna	Madya	Utama	
III	Persentase SPM	-		√	85,75	88,30	90,50	95,50	100	84	90,50	95,50	

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024

Review terhadap rancangan perubahan RKPD tahun 2024, khususnya OPD (Organisasi Perangkat Daerah) RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai. Kabupaten Tabalong meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiataan, indikator kinerja program dan kegiatan, tolak ukur/target sasaran program dan kegiataan serta pagu indikator yang dialokasikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2024
Kabupaten Tabalong

NO	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel	B	**154.722.723.200**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel	B	**154.722.723.200**	
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN	14 Bulan	**46.606.465.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai.	Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN	14 Bulan	**46.606.465.000**	
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	46.606.465.000	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai.	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	46.606.465.000	
2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	**1.044.991.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai.	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	**1.044.991.000**	

NO	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	643 Paket	214.119.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	643 Paket	214.119.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	226	830.872.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	226	830.872.000	
3	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	**501.348.964**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	**501.348.964**	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	501.348.964	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	Terpenuhinya jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 unit	501.348.964	
4	**Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah**	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	**1.626.571.200**	**Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah**	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	**1.626.571.200**	

NO	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	Terbayarnya Gaji dan THR Tenaga Kontrak Umum	12 Bulan	1.626.571.200	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	Terbayarnya Gaji dan THR Tenaga Kontrak Umum	12 Bulan	1.626.571.200	
5	**Kegiatan Pelayanan BLUD**	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan BLUD	**100**	**109.944.696.000**	**Kegiatan Pelayanan BLUD**	**RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .**	**Terlaksananya Kegiatan Pelayanan BLUD**	**100**	**109.944.696.000**	
	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	Persentase Capaian SPM	100	109.944.696.000	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	Persentase Capaian SPM	100	109.944.696.000	
II	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,53 (A)	**11.357.408.761**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEAHATAN MASYARAKAT**	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,53 (A)	**11.357.408.761**	
			Persentase Capaian SPM	100				Persentase Capaian SPM	100		

NO	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah**	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	IKM	3,53	11.357.408.761	**Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah**	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	IKM	3,53	11.357.408.761	
			Akreditasi	Paripurna				Akreditasi	Paripurna		
			Persentase SPM	100				Persentase SPM	100		
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	11 unit	10.102.435.761	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	11 unit	10.102.435.761	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Kaliberasi Alat kesehatan dan kedokteran sera contract service alat kesehatan)	500 unit	1.254.973.000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Kaliberasi Alat kesehatan dan kedokteran sera contract service alat kesehatan)	500 unit	1.254.973.000	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD H. BADARUDDIN KASIM MABURAI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai Kabupaten Tabalong yang diproritaskan diantaranya :

1. Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Melakukan koordinasi dengan SKPD atau provinsi apabila dipandang perlu.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai Kabupaten Tabalong adalah untuk Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Kesehatan.

Sasaran yang akan dicapai secara nyata dalam waktu 1 (satu) tahun harus bersifat spesifik, dapat diukur dan dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun. Dengan pengertian tersebut RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai Kabupaten Tabalong menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan

3.3. Program dan Kegiatan

Dari total pagu indikatif belanja sesuai pada pagu anggaran yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Provinsi/Kabupaten/Kota Tabalong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	**B**	**159.724.072.164**	**APBD**		**B**	**104.249.655.860**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	**14 Bulan**	**46.606.465.000**	**APBD**		**14 bulan**	**45.385.395.000**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianyan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	14 bulan	46.606.465.000	APBD		14 bulan	45.385.395.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	**100%**	**1.044.991.000**	**APBD**		**100%**	**1.777.142.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	643	214.119.000	APBD			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	226	830.872.000	APBD		226	1.777.142.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	**100%**	**501.348.964**	**APBD**		**100%**	**389.040.585**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	1 unit	501.348.964	APBD		1 unit	389.040.585
	Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	**12 Bulan**	**1.626.571.200**	**APBD**		**12 bln**	**912.248.625**
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Terwujudnya Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	12 bln	1.626.571.200	APBD		12 bln	912.248.625
	Kegiatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan BLUD	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	**100 %**	**109.944.696.000**	**APBD**		**100 %**	**71.297.408.749**
	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Persentase Capaian SPM	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	90,50	109.944.696.000	APBD		95,50	71.297.408.749

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEAHATAN MASAYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	**3,53 (A)**	**11.357.408.761**	**APBD**		**3,44 (B)**	**18.203.717.410**
		Akreditasi		Paripurna				Paripurna	
		Persentase Capaian SPM		100				**100**	
	Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	IKM	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	(3,53) A	11.357.408.761	**APBD**		(3,48) B	18.203.717.410
		Akreditasi		Paripurna				Paripurna	
		Persentase SPM		100				100	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Terwujudnya jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	100 %	10.102.435.761	APBD		100 %	11.444.138.410
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Terwujudnya pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai .	500 unit	1.254.973.000	APBD		500 unit	6.759.579.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Kaliberasi Alat kesehatan dan kedokteran sera contract service alat kesehatan)							

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
RSUD H. BADARUDDIM KASIM MABURAI
KABUPATEN TABALONG

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

A. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

B. Kegiatan

1. Kegiatan administrasi keuangan.
2. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah.
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah.
4. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah.
5. Kegiatan Pelayanan BLUD.
6. Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah.

C. Sub Kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN.
2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
5. Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor.
6. Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD.
7. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
8. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Tabel 4.1
Rencana Program / Kegiatan dan Pagu Indikatif
Tahun Anggaran 2024

Program / Kegiatan	Pagu Indikatif
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**159.724.072.164**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**46.606.465.000**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.606.465.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**1.044.991.000**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	214.119.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	830.872.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**501.348.964**
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	501.348.964
Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	**1.626.571.200**
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.626.571.200
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	**109.944.696.000**
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	109.944.696.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**11.357.408.761**

Program / Kegiatan	Pagu Indikatif
Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	**11.357.408.761**
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	10.102.408.761
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.254.973.000

BAB V
PENUTUP

Untuk mencapai sasarannya RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai Kabupaten Tabalong tentunya perlu didukung segenap komponen Pemerintah Daerah yang bertujuan demi terlaksananya pelayanan kesehatan publik yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan RSUD H. Badaruddin Kasim Maburai Kabupaten Tabalong yang tidak terlepas dari keberhasilan dan kendala. Keberhasilan dapat membawa ke arah meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Tabalong khususnya, dan masyarakat di sekitar Tabalong pada umumnya.

Demikian Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran disusun, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Tanjung, Agustus 2024

Direktur RSUD H.Badaruddin Kasim,

dr.H.MASTUR KURNIAWAN, MM

NIP. 19720109 200604 1 019

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan limpahan taupik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 telah diselesaikan.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dinas Kesehatan telah menyusun Rencana Kerja (Renstra) Dinas Kesehatan tahun 2024.

Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat pada tahun 2024. Rencana Kerja (Renstra) Dinas kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 sebagai pedoman perencanaan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong dalam menyusun program dan

kegiatan dalam Pembangunan Kesehatan selama satu tahun yang berisikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta penganggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tabalong baik untuk jajaran kesehatan, masyarakat maupun pihak-pihak lainnya.

Tanjung, Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tabalong

H. Hamrani, S.Kep, Ns, SH, MM, MH.
Pembina
NIP. 19720418 199303 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong sebagai dasar Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam memajukan kesejahteraan rakyat dan menyelenggarakan pelayanan publik daerah.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 secara garis besar memuat rancangan program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2024 serta pendanaan indikatif baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja merupakan rancangan usulan sebagai bahan penyusunan rancangan APBD tahun 2024 dengan target yang terukur serta telah disesuaikan berdasarkan prioritas dan strategi utama guna mendukung visi dan misi Dinas Kesehatan. Pengajuan Renja ini telah disusun secara realistis untuk mencapai tujuan pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan Renja SKPD Dinas Kesehatan adalah :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik IndonesiaNomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
7. Undang–Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
13. Undang – Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
14. Undang – Undang Nomor Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor Seri 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Tanjung, Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005 – 2025;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan mengacu pada prioritas program Dinas Kesehatan tahun 2024 yang merupakan Dokumen Perencanaan Urusan Pemerintahan Wajib Kesehatan yang meliputi Organisasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas dengan berpedoman Program Indikatif Kabupaten Tabalong Tahun 2024.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan adalah sebagai bahan pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 bidang Kesehatan. Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan ini diharapkan sudah mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) desa, Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Dinas Kesehatan sudah berusaha mengakomodir usulan Musrenbang desa dan kecamatan, namun sehubungan dengan keterbatasan pagu anggaran yang ada di SKPD Dinas Kesehatan maka tidak semua usulan di Musrenbang kecamatan dapat terakomodir sehingga yang dimasukan merupakan usulan yang super prioritas dari usulan tersebut.

E. Sistematika Penulisan

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

(berisi latar belakang kenapa RENJA SKPD disusun, al. Meliputi urgensi/pentingnya SKPD dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah (RPJMD) dll.)

B. Dasar Hukum

(berisi peraturan perundangan yang menjadi dasar eksistensi SKPD dan penyusunan Renja SKPD, mulai dari UU, PP, dan Perda).

C. Maksud dan Tujuan

(berisi uraian maksud dan tujuan disusunnya Renja SKPD).

D. Sistematika Penulisan

(berisi urutan Bab dan sub bab penyusunan Renja).

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Pencapaian Renstra.
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
C. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
D. Review terhadap Rencana awal RKPD
E. Perihal Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

A. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
B. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
C. Program dan kegiatan

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Pencapaian Renstra.

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong tahun 2023 (kegiatan tahun 2024 masih berjalan) tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2020-2024.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

PROGRAM	Anggaran	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	92.792.733.980	64.757.469.146	69,79
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	72.957.079.387	63.778.861.252	87,42
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.276.443.487	3.755.473.673	71,17
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	468.936.620	176.131.000	37,56
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	494.533.817	411.670.075	83,24
TOTAL	171.989.727.291	132.879.605.146	77,26

2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

2.1.1 Angka Kematian

Mortalitas adalah angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu. Mortalitas atau kejadian kematian dalam suatu masyarakat dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat, keberhasilan pelayanan kesehatan dan keberhasilan program-program pembangunan kesehatan lainnya. Pada bagian ini kita dapat melihat bagaimana gambaran kejadian kematian dalam periode tahun terakhir di Kabupaten Tabalong.

Angka Kematian Bayi (AKB) per-1.000 Kelahiran Hidup.

Infant Mortality Rate atau Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat sehingga banyak program kesehatan yang ada ditujukan untuk menurunkan AKB ini. AKB ini didefinisikan sebagai jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hingga bayi belum mencapai umur 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup.

Angka kematian bayi diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu rendah jika AKB kurang dari 20; sedang 20-49, tinggi 50-99 dan sangat tinggi jika AKB di atas 100 per 1000 kelahiran hidup (Depkes, 2009). Berdasarkan klasifikasi tersebut maka AKB di Kabupaten Tabalong termasuk dalam klasifikasi rendah.

Angka kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Tabalong tahun 2023 adalah 10 per 1000 Kelahiran Hidup, jumlah yang sama dengan tahun 2022 yang sebesar 10 per 1000 Kelahiran Hidup. Data selengkapnya dapat di lihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.1
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
di Kabupaten Tabalong Tahun 2019 s/d 2023

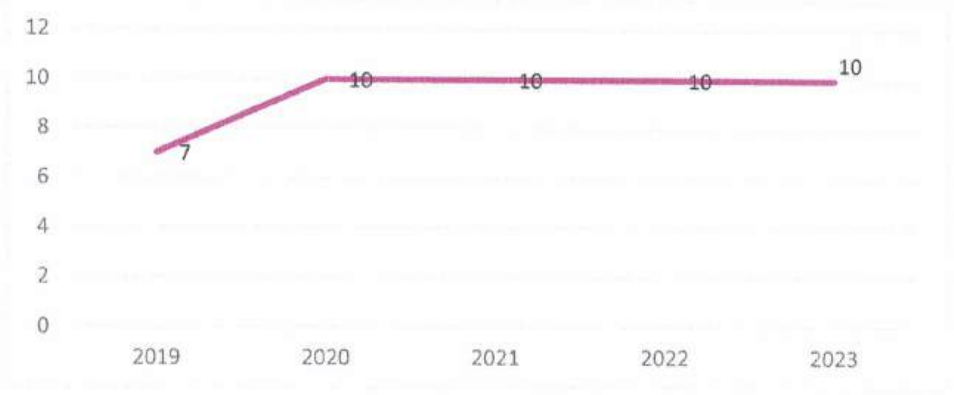

Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2023

Hasil dari analisis kasus kematian bayi yang ada, lebih dari setengahnya dikarenakan BBLR/Asfeksia, dimana kematiannya di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit/Klinik) dan ada juga kasus yang meninggal di rumah dan semuanya telah mendapatkan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir. Penyebab kelahiran BBLR/prematur di kabupaten Tabalong sebagian besar karena umur kehamilan ibu belum cukup bulan (<37-40 minggu), sebelum masa kehamilan mencapai 37 minggu sudah terjadi persalinan. Hal ini menyebabkan bayi yang dilahirkan memiliki Berat Badan Lahir Rendah (<2500 gram) dan disertai organ tubuh bayi belum cukup matang yang menjadi salah satu faktor resiko tinggi penyebab kematian bayi.

Jumlah Kematian Ibu/Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan)

tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup (DepKes 2009). Angka Kematian Ibu secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan.

Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 sebanyak 3 orang dari 3.243 kelahiran hidup, setara dengan 93 per 100.000 Kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022 yang sebesar 135 per 100.000 Kelahiran hidup atau dengan jumlah kematian ibu sebanyak 5 orang.

Gambaran angka kematian ibu sejak tahun 2013 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.2
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Tabalong Tahun 2019 s/d 2023

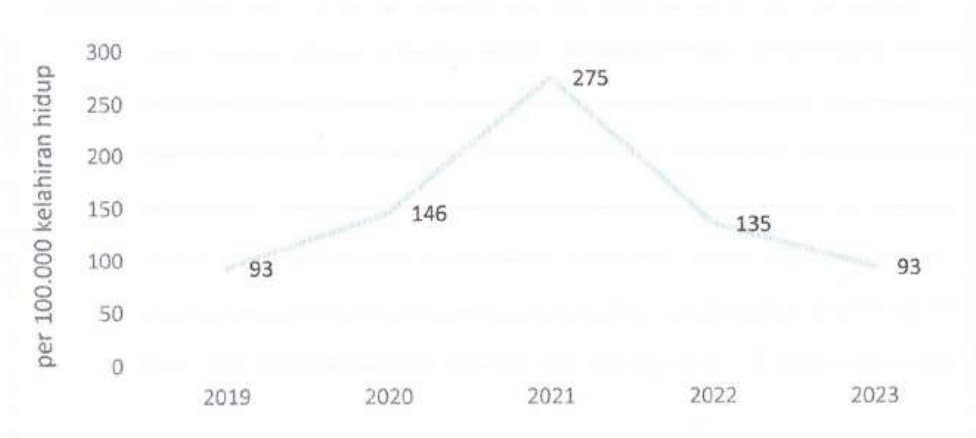

Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2023

Dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI), di Indonesia sejak tahun 2007 telah dikembangkan

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Untuk mengetahui data kematian ibu per puskesmas dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.3

Jumlah Kematian Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, dan Ibu Nifas Kabupaten Tabalong Tahun 2019 - 2023

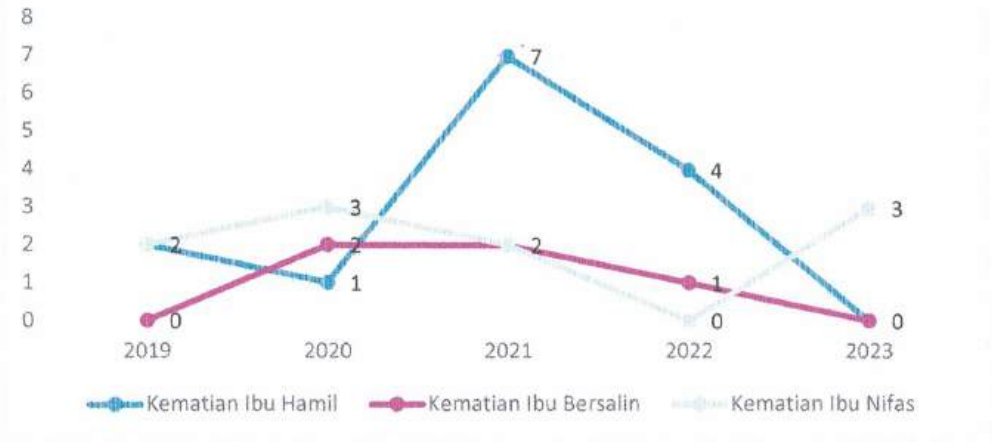

Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2022

Dari kematian ibu di kabupaten Tabalong yang berjumlah 3 kasus semuanya sudah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar kualitas, yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10T selama kehamilannya. Berdasarkan penyebab kematian ibu yang ada tahun 2023, 2 orang disebabkan Eklamasi, dan sisanya karena gangguan darah.

Dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI), di Indonesia sejak tahun 2007 telah dikembangkan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Penurunan Angka Kematian Ibu
2. Penurunan Angka Kematian Bayi
3. Penurunan Stunting;
4. *Universal Health Coverage* (UHC) / Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Rasio Dokter Terhadap Jumlah Penduduk
6. Fasilitas Kesehatan Dengan Ketersediaan Obat Esensial
7. Nilai AKIP

2.4 Review terhadap Rencana awal RKPD

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi merupakan hal yang penting dalam menentukan keberhasilan bagi suatu organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal maupun eksternal organisasi dengan memperhatikan kebutuhan Renstra Dinas kesehatan kab.Tabalong stakeholders, akan dapat di ketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang menghadang organisasi.

Analisis lingkungan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam merespon setiap perkembangan zaman. Lingkungan internal mencakup struktur organisasi, komonikasi antar bagian dalam organisasi, sumberdaya yang semuanya akan mendukung kelangsungan hidup organisasi. Pemahaman terhadap lingkungan internal akan memberikan pemahaman kepada organisasi akan kondisi dan kemampuan organisasi. Sedangkan lingkungan eksternal meliputi situasi dan kondisi di sekeliling organisasi yang berpengaruh pada kehidupan organisasi. Salah satu metode yang dipergunakan untuk melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal adalah metode SWOT.

a. Analisis Eksternal

Berbagai kecendrungan pembangunan terkait dengan sector Kesehatan, berbagai kecendrungan mengkhawatirkan di sector kesehaatn antara lain : Ancaman penyakit menular, HIV/AIDS masih ada yang belum terdeteksi dan semakin meningkatnya penyakit tidak menular yang dapat menyebabkan stroke dan penggunaaan narkoba menunjukan kenaikan.

Namun disamping itu ada kecendrungan yang positif di sector kesehatan antara lain : semakin meningkatnya perhatian pemerintah terutama untuk masyarakat miskin dan penanggulangan ***masalah sustainable Development Goals*** semakin meningkatnya peran masyarakat dan swasta sehingga meningkatnya mutu pelayan kesehatan di sertai dengan adanya peningkatan terhadap sarana dan prasarana.

b. Analisis Internal

Analisis internal menggunakan konsep *value chain*, dalam model ini keadaan internal Dinas Kesehatan Kab.tabalong di nilai menggunakan fungsi manajemen dan system pendukung manajerial.

Fungsi manajemen :

Kelemahan : belum mempunyai rencana strategi untuk perencanaan

Kekuatan: mempunyai minat dan motivasi kuat untuk meningkatkan perencanaan dalam rangka menjalankan visi misi dinas kesehatan.

System Pendukung Manajemen

Manajemen SDM :

Kelemahan :Penyebaran SDM yang kurang marata di perbagai UPT Puskesmas dan belum optimalnya pelaksanaan rotasi dan mutasi petugas.

Kekuatan :Kualitas SDM yang bagus; adanya komitmen,loyalitas dan integritas yang tinggi

System Keuangan dalam pelayanan

Kelemahan : system keuangan UPT Puskesmas masih menggunakan pola birokrasi, Tarif perda UPT Puskesmas sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

Manajemen Informatika

Kelemahan : Tidak ada kasi khusus menangani SIK dan belum mempunyai system pelaporan online yang baik

Kekuatan : adanya motivasi kuat untuk mengembangkan SIK

BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2024

A. Tujuan dan Sasaran Target Kinerja SKPD 2024

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tabalon 2020 – 2024 maka tujuan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Tabalong secara umum adalah untuk Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten Tabalong. Adapun sasaran kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatkan pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik	Meningkatkan pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik	Nilai AKIP	BB
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	130
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	8
		UHC	100
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	9,5
		Rasio Dokter terhadap jumlah penduduk	1 : 2.500
		Persentase Faskes dengan ketersediaan obat esensial	100

B. Strategi dan Kebijakan

Strategi yang dirumuskan dalam RPJMD adalah Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan kebijakan :

- Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan
- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
- Meningkatkan serta peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan

C. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
Non Urusan								
-								
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.2.01.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	228.017.000	APBD		10	250.818.700
1.2.01.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	155.997.000	APBD		12	171.596.700

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.2.02.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	707	97.970.843.000	APBD		707	107.767.927.300
1.2.02.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	238.654.000	APBD		12	262.519.400
1.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
1.2.03.5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	127.800.000	APBD		4	140.580.000
1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
1.2.05.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	74.062.000	APBD		4	81.468.200
1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
1.2.06.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	18.759.000	APBD		1	20.634.900
1.2.06.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	223.811.916	APBD		3	246.193.108
1.2.06.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	157.211.883	APBD		3	172.933.072
1.2.06.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	18.234.548	APBD		12	20.058.003
1.2.06.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	1.082.168.000	APBD		12	1.190.384.800
1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1.2.07.6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	643.754.479	APBD		20	708.129.927

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.2.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	471.900.000	APBD		12	519.090.000
1.2.08.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.670.146.180	APBD		12	1.837.160.798
1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.2.09.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	661.220.000	APBD		10	727.342.000
1.2.09.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	175.000.000	APBD		1	192.500.000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
Urusan								
Wajib								
2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
2.2.01.1 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	31.424.221.908	APBD		1	34.566.644.099
2.2.01.2 Pembangunan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1	10.001.950.000	APBD		1	11.002.145.000
2.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	10	2.203.418.000	APBD		10	2.423.759.800

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
2.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100%	12.924.884.626	APBD		1	14.217.373.089
2.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	1	23.080.000	APBD		1	25.388.000
2.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100%	74.000.000	APBD		1	81.400.000
2.2.01.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1	3.233.700.000	APBD		1	3.557.070.000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
2.2.01.24 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Dinas Kesehatan	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		23.101.000	APBD			25.411.100
2.2.01.26 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	18	608.276.000	APBD		18	669.103.600
2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.2.02.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4778	142.850.512	APBD		4778	157.135.564
2.2.02.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3700	103.852.552	APBD		3700	114.237.808
2.2.02.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3457	74.000.000	APBD		3457	81.400.000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
2.2.02.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19367	177.677.920	APBD		19367	195.445.712
2.2.02.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43561	105.967.634	APBD		43561	116.564.398
2.2.02.7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20006	92.712.000	APBD		20006	101.983.200
2.2.02.6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	167922	148.865.325	APBD		167922	163.751.858
2.2.02.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	17230	73.952.000	APBD		17230	81.347.200
2.2.02.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Pelayanan	3482	73.991.000	APBD		3482	81.390.100

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
		Kesehatan Penderita Diabetes Militus						
2.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Persentase ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	372	18.436.000	APBD		372	20.279.600
2.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	860	92.484.592	APBD		860	101.733.052
2.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	42	64.452.000	APBD		42	70.897.200
2.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12	46.236.000	APBD		12	50.859.600

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
2.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	122.078.770	APBD		1	134.286.647
2.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4	158.187.396	APBD		4	174.006.136
2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10	138.750.000	APBD		10	152.625.000
2.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3	166.782.964	APBD		3	183.461.261
2.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	94.417.000	APBD		1	103.858.700
2.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	73.992.000	APBD		12	81.391.200
2.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	236368	46.250.000	APBD		236368	50.875.000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
2.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	36.959.000	APBD		0	40.654.900
2.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1	115.432.000	APBD		1	126.975.200
2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4	138.166.000	APBD		4	151.982.600
2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	35.956.493.000	APBD		1	39.552.142.300
2.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinas Kesehatan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	20	90.120.000	APBD		20	99.132.000
2.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	8	138.750.000	APBD		8	152.625.000
2.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12	296.930.000	APBD		12	326.623.000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
2.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	1.836.107.000	APBD		1	2.019.717.700
2.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	18	175.857.000	APBD		18	193.442.700
2.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	61.910.000	APBD		12	68.101.000
2.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52	108.946.000	APBD		52	119.840.600
2.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	829.615.700	APBD		1	912.577.270

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
2.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Dinas Kesehatan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	225	64.758.000	APBD		225	71.233.800
2.2.02.43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Dinas Kesehatan	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7	103.271.000	APBD		7	113.598.100
2.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								
2.2.03.2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	72.408.000	APBD		1	79.648.800
2.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.2.04.3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	18	143.372.000	APBD		18	157.709.200

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
2.2.04.4 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	577.716.000	APBD		1	635.487.600
3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
3.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota								
3.2.01.1 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	14.812.000	APBD		1	16.293.200
3.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
3.2.02.1 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan sumber Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	93.727.000	APBD		1	103.099.700
3.2.02.2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1	7.271.985.000	APBD		1	7.999.183.500
3.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
3.2.03.1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50	620.941.000	APBD		50	683.035.100
4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT								

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								
4.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
4.2.01.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	80	32.300.743	APBD		80	35.530.818
4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan								

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
4.2.03.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	120	78.171.400	APBD		120	85.988.540
4.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah								
4.2.06.1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak	Dinas Kesehatan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	80	69.214.250	APBD		80	76.135.675

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
5.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
5.2.01.1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	41.623.950	APBD		1	45.786.345

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong menyajikan uraian Tentang Kinerja instansi Dinas Kesehatan dalam hal Perencanaannya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini jauh dari sempurna oleh karena itu kami membutuhkan koordinasi, singkronisasi dan kerja sama yang optimal dari berbagai pihak untuk mendukung perbaikan penyusunan ditahun-tahun mendatang.

Tanjung, Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tabalong,

H. Hamrani, S.Kep, Ns, SH, MM, MH.
NIP. 19720418 199303 1 006